



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Boyolali.
3. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Daerah.
13. Rencana....

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021-2026.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
20. Strategi adalah cara sistematis dan langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
21. Arah Kebijakan adalah penjabaran strategi dan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan yang dilaksanakan secara bertahap.
22. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
23. Kinerja adalah capaian dampak, hasil, dan keluaran dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
24. Kerangka Pendanaan adalah pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati serta target pembangunan nasional.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3....

Pasal 3

- (1) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses, meliputi:
 - a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) RPJMD disusun menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi hasil, meliputi:
 - a. holistik-tematik;
 - b. integratif; dan
 - c. spasial.
- (3) RPJMD disusun dengan berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMN.
- (4) RPJMD disusun dengan memperhatikan:
 - a. RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
 - b. kajian lingkungan hidup strategis; dan
 - c. RPJMD daerah sekitar.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. instrumen pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. bagi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJMD, meliputi:
 - a. BAB I : pendahuluan;
 - b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. BAB III : gambaran keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;

g. BAB VII....

- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : penutup.
- (2) Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
 - a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJMD;
 - b. sinkronisasi antara RPJMD dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN; dan
 - c. kesesuaian antara capaian RPJMD dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil Rencana Pembangunan Daerah.
- (5) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (6) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil....

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal RPJMD Tahun 2026-2031 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, RKPD Tahun 2021 tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 atau sampai dilakukan perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 182), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13....

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 25 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



SETDA
AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-164/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pembangunan merupakan proses dinamis dan progresif untuk mencapai tujuan berupa peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing. Dalam rangka menjalankan pembangunan yang efektif dan mencapai tujuan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang sistematis. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

RPJMD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD kemudian digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan tahunan, perencanaan Perangkat Daerah, serta instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan agar sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan.

RPJMD disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan berorientasi proses dan substansi. Pendekatan berorientasi proses berupa pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan pendekatan berorientasi substansi yaitu tematik-holistik, integratif, dan spasial. Penggunaan seluruh pendekatan tersebut dalam rangka menghasilkan perencanaan yang komprehensif, sesuai kebutuhan daerah, sinergis dengan perencanaan Pusat dan Provinsi, serta memiliki legitimasi yang kuat sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif” adalah Kerangka Pendanaan yang bersifat perkiraan atau ancar-ancar.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknokratik” adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “politis” adalah pendekatan perencanaan yang menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “atas-bawah dan bawah-atas” adalah hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “holistik-tematik” adalah mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “integratif” adalah menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “spasial” adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan hidup strategis” adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana kerja Perangkat Daerah” adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain berupa rencana induk, rencana aksi Daerah dan *masterplan* pembangunan sektoral.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, antara lain adalah tokoh masyarakat, representasi perempuan, pemuda, kelompok masyarakat rentan dan termarginalkan, unsur DPRD, tentara nasional Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, kejaksaan, akademisi, representasi partai politik, lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota sekitar, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat atau instansi vertikal di daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR
265

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan sehubungan akan berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021. Pembuatan RPJMD ini dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Boyolali selama kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJMD disusun untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terkait implementasi program/kegiatan jangka menengah melalui penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan perencanaan pembangunan tahunan. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, secara terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional melalui pendekatan perencanaan, teknokratik, politis, *top-down/bottom-up*, dan partisipatif. RPJMD Tahun 2021-2026 ini juga akan menjadi rujukan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan demikian, kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.


BUPATI BOYOLALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen	9
1.3.1. Keterkaitan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025	10
1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	17
1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	18
1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Daerah Sekitar	19
1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali 2011-2031	20
1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	20
1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah	21
1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	21
1.3.9. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	21
1.3.10. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	22
1.4. Maksud dan Tujuan	22
1.4.1. Maksud Penyusunan	22
1.4.2. Tujuan Penyusunan	22
1.5. Sistematika Penyusunan	23
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	25
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	25
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	25
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	33
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	40
2.1.4. Demografi	42
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	47
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	47
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	58
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	60
2.3. Aspek Pelayanan Umum	64

2.2.4.	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	64
2.2.5.	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	159
2.2.6.	Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan	176
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	194
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	194
2.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	197
2.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	200
2.4.4.	Fokus Sumber Daya Manusia	200
2.4.5.	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	201
2.5.	Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021	205
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH		293
3.1.	Kondisi Perekonomian Nasional	293
3.2.	Kondisi Perekonomian Daerah	294
3.3.	Kinerja Keuangan Masa Lalu	295
3.3.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	295
3.3.2.	Neraca Daerah	306
3.4.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	319
3.4.1.	Analisis Kesehatan Keuangan Daerah	319
3.4.2.	Analisis Belanja Daerah	323
3.4.3.	Analisis Pembiayaan Daerah	333
3.5.	Kerangka Pendanaan	337
3.5.1.	Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali	337
3.5.2.	Perhitungan Kerangka Pendanaan	344
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH		351
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	351
4.1.1.	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar	352
4.1.2.	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar	361
4.1.3.	Urusan Pilihan	374
4.1.4.	Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum	380
4.2.	Isu Strategis	387
4.2.1.	Isu Internasional	388
4.2.2.	Isu Nasional di dalam RPJMN 2020-2024	395
4.2.3.	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023	401
4.2.4.	Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Boyolali	403
4.2.5.	Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Boyolali di dalam RPJPD 2005-2025	404
4.2.6.	Telaah RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031	405
4.2.7.	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	412

4.2.8. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Boyolali	413
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	428
5.1. Visi	429
5.2. Misi	431
5.3. Tujuan dan Sasaran	438
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	454
6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	454
6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan	474
6.3. Integrasi Program Rekomendasi KLHS	481
6.4. Program Pembangunan Daerah	494
6.4.1. Prioritas Pembangunan Daerah	494
6.4.2. Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Kabupaten Boyolali (<i>Cross-Cutting</i>)	499
6.4.3. Program Pembangunan Daerah	505
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	689
7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	689
7.2. Program Pembangunan	692
7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	692
7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	698
7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	712
7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	716
7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	718
7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	720
7.2.7. Unsur Kewilayahan	721
7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum	722
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	794
8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah	795
8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	797
8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)	804
BAB IX PENUTUP	832

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sasaran Pokok Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025	11
Tabel 1. 2.	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025	14
Tabel 1. 3.	Visi dan Misi RPJMN 2020-2024	17
Tabel 1. 4.	Target Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMN 2020-2024	17
Tabel 1. 5.	Visi dan Misi RPJMD Daerah Sekitar	19
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali	26
Tabel 2. 2.	Topografi Wilayah Berdasarkan Ketinggian	27
Tabel 2. 3.	Daftar Nama Mata Air Besar di Kabupaten Boyolali	29
Tabel 2. 4.	Daftar Nama Sungai Besar di Kabupaten Boyolali	29
Tabel 2. 5.	Daftar Nama Waduk/Embung/Situ Besar di Kabupaten Boyolali	29
Tabel 2. 6.	Perbandingan Status Daya Dukung Air Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2026	30
Tabel 2. 7.	Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Boyolali	32
Tabel 2. 8.	Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten Boyolali	37
Tabel 2. 9.	Rencana Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Boyolali	38
Tabel 2. 10.	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Boyolali	41
Tabel 2. 11.	Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Per Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	43
Tabel 2. 12.	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali Dirinci per Kecamatan Tahun 2020	44
Tabel 2. 13.	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	48
Tabel 2. 14.	Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)	49
Tabel 2. 15.	Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2020 (%)	51
Tabel 2. 16.	Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020	60
Tabel 2. 17.	Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	62
Tabel 2. 18.	Tempat Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	62
Tabel 2. 19.	Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	63
Tabel 2. 20.	Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 (%)	66

Tabel 2. 21.	Jumlah Guru pada Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	68
Tabel 2. 22.	Jumlah Guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 pada Jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	69
Tabel 2. 23.	Jumlah Sekolah Formal, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	70
Tabel 2. 24.	Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Boyolali Tahun 2020	72
Tabel 2. 25.	Ketersediaan Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Kabupaten Boyolali per Februari 2020	74
Tabel 2. 26.	Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit untuk Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Tahun 2020	75
Tabel 2. 27.	Data Sarana Jamban Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2020	76
Tabel 2. 28.	Capaian 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Per Puskesmas Tahun 2019	78
Tabel 2. 29.	Persentase Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	80
Tabel 2. 30.	Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	87
Tabel 2. 31.	Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	88
Tabel 2. 32.	Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019	89
Tabel 2. 33.	Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan (km)	96
Tabel 2. 34.	Cakupan Penduduk yang Mengakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	100
Tabel 2. 35.	Capaian Indikator Tata Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	103
Tabel 2. 36.	Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	112
Tabel 2. 37.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016- 2020	113
Tabel 2. 38.	Cakupan PMKS yang Tertangani di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	114
Tabel 2. 39.	Daftar Panti Sosial di Kabupaten Boyolali	115
Tabel 2. 40.	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	116
Tabel 2. 41.	Perkembangan UMK di Boyolali Tahun 2016-2020	119
Tabel 2. 42.	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Boyolali 2016-2020	120
Tabel 2. 43.	Capaian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	123
Tabel 2. 44.	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	129

Tabel 2. 45.	Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019 (%)	130
Tabel 2. 46.	Persentase Unmet need Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	133
Tabel 2. 47.	Layanan Transportasi dan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	134
Tabel 2. 48.	Data Terminal di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	135
Tabel 2. 49.	Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	136
Tabel 2. 50.	Tingkat Load Factor Angkutan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	137
Tabel 2. 51.	Capaian Rasio Konektivitas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	137
Tabel 2. 52.	Level of Service Jalan Kabupaten yang Berada di Tengah Kota Tahun 2020	138
Tabel 2. 53.	Angka Kecelakaan di titik Blackspot Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	139
Tabel 2. 54.	Daftar Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Boyolali Tahun 2021	140
Tabel 2. 55.	Uji KIR di Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Tahun 2016–2020	141
Tabel 2. 56	Data Parkir Khusus di Kabupaten Boyolali Tahun 2021	142
Tabel 2. 57	Data Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Boyolali Tahun 2021	143
Tabel 2. 58.	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020 (%)	147
Tabel 2. 59.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020	147
Tabel 2. 60.	Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	151
Tabel 2. 61.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Boyolali Tahun 2019	155
Tabel 2. 62.	Dokumen Statistik Daerah yang Dipublikasikan Tahun 2016-2020	156
Tabel 2. 63.	Capaian Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Boyolali	156
Tabel 2. 64.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016-2020	157
Tabel 2. 65.	Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	158
Tabel 2. 66.	Kondisi Pengelolaan Arsip di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	159
Tabel 2. 67.	Capaian Pengelolaan Arsip di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	159
Tabel 2. 68.	Produksi Ikan Menurut Jenis dan Asalnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 (Kg)	160
Tabel 2. 69.	Produksi Benih Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019	162

Tabel 2. 70.	Jumlah dan Jenis Industri Kab. Boyolali Tahun 2020	163
Tabel 2. 71.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	166
Tabel 2. 72.	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	169
Tabel 2. 73.	Produksi Pangan Utama dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	169
Tabel 2. 74.	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	171
Tabel 2. 75.	Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	174
Tabel 2. 76.	Nilai Ekspor dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	175
Tabel 2. 77.	Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali Beserta Ketegorinya Tahun 2020	175
Tabel 2. 78.	Pendapatan Retribusi Pasar Daerah yang Dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	176
Tabel 2. 79.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	177
Tabel 2. 80.	Ketersediaan Dokumen Evaluasi	177
Tabel 2. 81.	Ketersediaan Dokumen Pelaporan	178
Tabel 2. 82.	Opini Laporan Keuangan Daerah	178
Tabel 2. 83.	Perbandingan Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Tahun 2016-2020	179
Tabel 2. 84.	Jumlah Pegawai di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Golongan.	181
Tabel 2. 85.	Persentase Pejabat Struktural yang Telah Lulus Pendidikan dan Pelatihan	181
Tabel 2. 86.	Persentase ASN yang Menempati Jabatan Sesuai Kompetensi	182
Tabel 2. 87.	Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Boyolali 2016-2020	183
Tabel 2. 88.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	184
Tabel 2. 89.	Persentase Penyelenggara Negara yang Melaporkan Harta Kekayaan	185
Tabel 2. 90.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	186
Tabel 2. 91.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2016-2020	187
Tabel 2. 92.	Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali dari Kemenpan-RB Tahun 2016-2020	188
Tabel 2. 93.	Nilai SAKIP Kabupaten Boyolali 2016-2020	188
Tabel 2. 94.	Peringkat, Skor, dan Status EKPPD Kabupaten Boyolali secara Nasional	189
Tabel 2. 95.	Indikator Terkait Kebijakan	190
Tabel 2. 96.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan se-Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	192

Tabel 2. 97.	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	196
Tabel 2. 98.	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	196
Tabel 2. 99.	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	197
Tabel 2. 100.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	198
Tabel 2. 101.	Jumlah Hotel dan Homestay di Kabupaten Boyolali	199
Tabel 2. 102.	Kondisi-kondisi Iklim Investasi di Kabupaten Boyolali	200
Tabel 2. 103.	Realisasi Capaian SPM Kabupaten Boyolali Tahun 2020	202
Tabel 2. 104.	Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021	205
Tabel 3. 1.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	297
Tabel 3. 2.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	303
Tabel 3. 3.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	305
Tabel 3. 4.	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	307
Tabel 3. 5.	Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	314
Tabel 3. 6.	Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	315
Tabel 3. 7.	Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020	316
Tabel 3. 8.	Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	317
Tabel 3. 9.	Rasio Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (Hari)	318
Tabel 3. 10.	Rasio Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	318
Tabel 3. 11.	Tax Ratio Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	321
Tabel 3. 12.	Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	324
Tabel 3. 13.	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	328
Tabel 3. 14.	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	330
Tabel 3. 15.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	332
Tabel 3. 16.	Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	334
Tabel 3. 17.	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	335

Tabel 3. 18.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020	336
Tabel 3. 19.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026	339
Tabel 3. 20.	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026	346
Tabel 3. 21.	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	348
Tabel 3. 22.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022-2026	350
Tabel 4. 1.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan	352
Tabel 4. 2.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan	354
Tabel 4. 3.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	356
Tabel 4. 4.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	358
Tabel 4. 5.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	358
Tabel 4. 6.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial	360
Tabel 4. 7.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja	361
Tabel 4. 8.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	362
Tabel 4. 9.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan	363
Tabel 4. 10.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan	363
Tabel 4. 11.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup	364
Tabel 4. 12.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	365
Tabel 4. 13.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	365
Tabel 4. 14.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	366
Tabel 4. 15.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan	367
Tabel 4. 16.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika	367
Tabel 4. 17.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	368
Tabel 4. 18.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal	369
Tabel 4. 19.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga	370
Tabel 4. 20.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik	371

Tabel 4. 21.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian	371
Tabel 4. 22.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan	372
Tabel 4. 23.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan	372
Tabel 4. 24.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan	373
Tabel 4. 25.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan	374
Tabel 4. 26.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian	375
Tabel 4. 27.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata	376
Tabel 4. 28.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian	377
Tabel 4. 29.	Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan	379
Tabel 4. 30.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan	380
Tabel 4. 31.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan	381
Tabel 4. 32.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian	382
Tabel 4. 33.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	382
Tabel 4. 34.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	383
Tabel 4. 35.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan	384
Tabel 4. 36.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	384
Tabel 4. 37.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	385
Tabel 4. 38.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan	386
Tabel 4. 39.	Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum	387
Tabel 4. 40.	Rekap Capaian Target-Target SDGs di Kabupaten Boyolali	389
Tabel 4. 41.	Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019	394
Tabel 4. 42.	Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	396
Tabel 4. 43.	Isu Strategis Daerah Sekitar	403
Tabel 4. 44.	Daftar Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali	412
Tabel 4. 45.	Identifikasi Isu Strategis Daerah	425
Tabel 5. 1.	Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026	429
Tabel 5. 2.	Keterkaitan Antara Visi-Misi RPJMD Kabupaten Boyolali dengan Visi-Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah	436

Tabel 5. 3.	Keterkaitan Misi dan Tujuan dalam Merespon Isu Strategis RPJMD dan KLHS	438
Tabel 5. 4.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026	441
Tabel 6. 1.	Perumusan Strategi RPJMD Berbasis Pemetaan Masalah Pembangunan	455
Tabel 6. 2.	Strategi dan Arah Kebijakan	458
Tabel 6. 3.	Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan	474
Tabel 6. 4.	Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 Terhadap Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	479
Tabel 6. 5.	Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 terhadap Program Utama Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029	480
Tabel 6. 6.	Integrasi Rekomendasi Program KLHS dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026	484
Tabel 6. 7.	Prioritas Pembangunan Daerah	494
Tabel 6. 8.	Identifikasi Program yang Mewakili Kriteria Kemiskinan	501
Tabel 6. 9.	Program Pembangunan Daerah	506
Tabel 7. 1.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026	691
Tabel 7. 2.	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 2022-2026	725
Tabel 8. 1.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026	796
Tabel 8. 2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026	797
Tabel 8. 3.	Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/Impact) Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026	805

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1.	Distribusi Penduduk di Tiap Kecamatan Tahun 2020	45
Grafik 2. 2.	Struktur Penduduk Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	46
Grafik 2. 3.	Struktur Penduduk Kabupaten Boyolali Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	47
Grafik 2. 4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020	48
Grafik 2. 5.	Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Secara Total Tahun 2016-2020 (%)	51
Grafik 2. 6.	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	53
Grafik 2. 7.	Laju Inflasi Kabupaten Boyolali 2016-2019	53
Grafik 2. 8.	Perbandingan IPM Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	54
Grafik 2. 9.	Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	55
Grafik 2. 10.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	56
Grafik 2. 11.	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	57
Grafik 2. 12.	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	58
Grafik 2. 13.	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020	59
Grafik 2. 14.	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	61
Grafik 2. 15.	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	65
Grafik 2. 16.	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	66
Grafik 2. 17.	Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	67
Grafik 2. 18.	Perkembangan Rasio Guru-Murid SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	68
Grafik 2. 19.	Persentase Guru PAUD, SD dan SMP Bersertifikat di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	69
Grafik 2. 20.	Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	72

Grafik 2. 21.	Kasus HIV/AIDS dan Kematian per Tahun di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	81
Grafik 2. 22.	Case Notification Rate (CNR) Seluruh Kasus TB Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	82
Grafik 2. 23.	Perkembangan Kasus Covid-19 Empat Minggu Terakhir Bulan Januari 2021 di Kabupaten Boyolali	83
Grafik 2. 24.	Jumlah Kasus Hipertensi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	84
Grafik 2. 25.	Jumlah Kasus Diabetes Melitus Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	85
Grafik 2. 26.	Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	86
Grafik 2. 27.	Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	90
Grafik 2. 28.	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	91
Grafik 2. 29.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	92
Grafik 2. 30.	Persentase Balita Gizi Kurang Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	93
Grafik 2. 31.	Persentase Balita Pendek (Stunting) Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	94
Grafik 2. 32.	Persentase Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020	95
Grafik 2. 33.	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	97
Grafik 2. 34.	Data Kondisi Jembatan Kabupaten Boyolali 2016-2020	98
Grafik 2. 35.	Persentase Penduduk yang Terlayani Penggunaan Air Baku	99
Grafik 2. 36.	Persentase Ketersediaan Air Baku	99
Grafik 2. 37.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Tahun 2016-2020	101
Grafik 2. 38.	Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019	102
Grafik 2. 39.	Kondisi Drainase Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	102
Grafik 2. 40.	Jumlah Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Perda RTRW	104
Grafik 2. 41.	Data Kondisi Bangunan Gedung 2016-2020	104
Grafik 2. 42.	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani dan Belum Tertangani di Kabupaten Boyolali (Ha)	105
Grafik 2. 43.	Persentase Rumah Layak Huni	106
Grafik 2. 44.	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	108
Grafik 2. 45.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	109
Grafik 2. 46.	Jumlah Tindak Kriminalitas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	110

Grafik 2. 47.	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	110
Grafik 2. 48.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	111
Grafik 2. 49.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	111
Grafik 2. 50.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Boyolali 2017-2020	117
Grafik 2. 51.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Boyolali 2017-2020	117
Grafik 2. 52.	Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Pada Tahun 2019	118
Grafik 2. 53.	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan Pada Tahun 2019	119
Grafik 2. 54.	Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2020	121
Grafik 2. 55.	Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	121
Grafik 2. 56.	Perkembangan Jumlah Kekerasan di Kabupaten Boyolali 2015-2020	122
Grafik 2. 57.	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	124
Grafik 2. 58.	Cakupan Permasalahan Pertanahan yang Diselesaikan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	125
Grafik 2. 59	Persentase Pensertifikatan Tanah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	126
Grafik 2. 60.	Data IKLH-IKA-IKU-IKL Kabupaten Boyolali 2017-2020	127
Grafik 2. 61.	Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020	127
Grafik 2. 62.	Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019	128
Grafik 2. 63.	Jumlah Status Kemandirian Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020	131
Grafik 2. 64.	Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	132
Grafik 2. 65.	Persentase KB Aktif Kabupaten Boyolali Per Kecamatan Tahun 2020	133
Grafik 2. 66.	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	149
Grafik 2. 67.	Jumlah Koperasi yang Dibina yang Meningkatkan Nilai Kesehatannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	150
Grafik 2. 68.	Jumlah UMKM yang dibina yang Meningkatkan Usahanya/Omzetnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	150
Grafik 2. 69.	Realisasi Investasi Kabupaten Boyolali 2016-2020	152
Grafik 2. 70.	Jumlah Investor di Kabupaten Boyolali 2015-2020	153

Grafik 2. 71.	Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boyolali 2016-2020	154
Grafik 2. 72.	Produksi Ikan Hasil Ternak Tahun 2016-2020	160
Grafik 2. 73.	Produksi Ikan (ton) di Kabupaten Boyolali	161
Grafik 2. 74.	Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2019	165
Grafik 2. 75.	Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	166
Grafik 2. 76.	Terbangunnya Sumber Energi Baru Terbarukan (unit)	168
Grafik 2. 77.	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020	170
Grafik 2. 78.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	180
Grafik 2. 79.	Cakupan Hasil Penelitian dan Inovasi yang Diimplementasikan	183
Grafik 2. 80.	Persentase Layanan Fasilitasi DPRD Tahun 2016-2020	186
Grafik 2. 81.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali 2016- 2020	190
Grafik 2. 82.	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2018	195
Grafik 2. 83.	Jumlah Restoran di Kabupaten Boyolali	199
Grafik 2. 84.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2019 (%)	201
Grafik 3. 1.	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	295
Grafik 3. 2.	Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	299
Grafik 3. 3.	Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	300
Grafik 3. 4.	Persentase Kontribusi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	301
Grafik 3. 5.	Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)	304
Grafik 3. 6.	Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	319
Grafik 3. 7.	Realisasi Ruang Fiskal Terhadap Total Pendapatan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	320
Grafik 3. 8.	Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	322
Grafik 3. 9.	Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020	323

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	10
Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali	26
Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Boyolali	28
Gambar 2. 3. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali	33
Gambar 2. 4. Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali	36
Gambar 2. 5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali	38
Gambar 2. 6. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Boyolali	41
Gambar 6. 1. Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor di Daerah	504

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan memiliki peran penting dalam rangkaian proses Pembangunan Daerah. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Pengertian tersebut menempatkan perencanaan pembangunan dalam posisi strategis untuk menentukan efektivitas pengelolaan kewenangan Daerah yang besar di era otonomi daerah. Perencanaan pembangunan sekaligus menjadi ruang interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks *good governance*.

RPJMD merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Penyusunan RPJMD memadukan berbagai pendekatan perencanaan, baik yang berorientasi proses maupun hasil. Pendekatan berorientasi proses terdiri dari (a) Pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah ; (b) pendekatan partisipatif, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; (c) pendekatan politis, yaitu dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam dokumen RPJMD yang dibahas

bersama DPRD; (d) pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Sedangkan pendekatan perencanaan yang berorientasi hasil, yaitu (a) pendekatan holistik-tematik, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; (b) pendekatan integratif, yaitu menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah; (c) pendekatan spasial, yaitu dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Kabupaten Boyolali dipimpin oleh pasangan **Bupati Mohammad Said Hidayat, S.H.** dan **Wakil Bupati Wahyu Irawan, S.H.** dalam periode RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 oleh Gubernur Jawa Tengah. Kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati bertekad melanjutkan dan meningkatkan kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, meskipun berada di tengah tantangan aktual, salah satunya berupa Pandemi Covid-19 yang berdampak multidimensi, sehingga membutuhkan perhatian untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tantangan lain berupa tuntutan global adanya Revolusi Industri 4.0, membangun sinergi pembangunan dengan pemerintah pusat, provinsi, dan antar daerah, serta melanjutkan dan meningkatkan capaian Pembangunan Daerah yang sudah baik pada periode sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan tersebut tetap menjadi peluang dan modal pembangunan melalui kerjasama dan sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai Visi Pembangunan Tahun 2021-2026, yaitu **“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)”**. Periode RPJMD Tahun 2021-2026 sekaligus periode terakhir dalam rangka mencapai Visi RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri, dan Sejahtera”**.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 18. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 30. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
 31. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 10);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2010

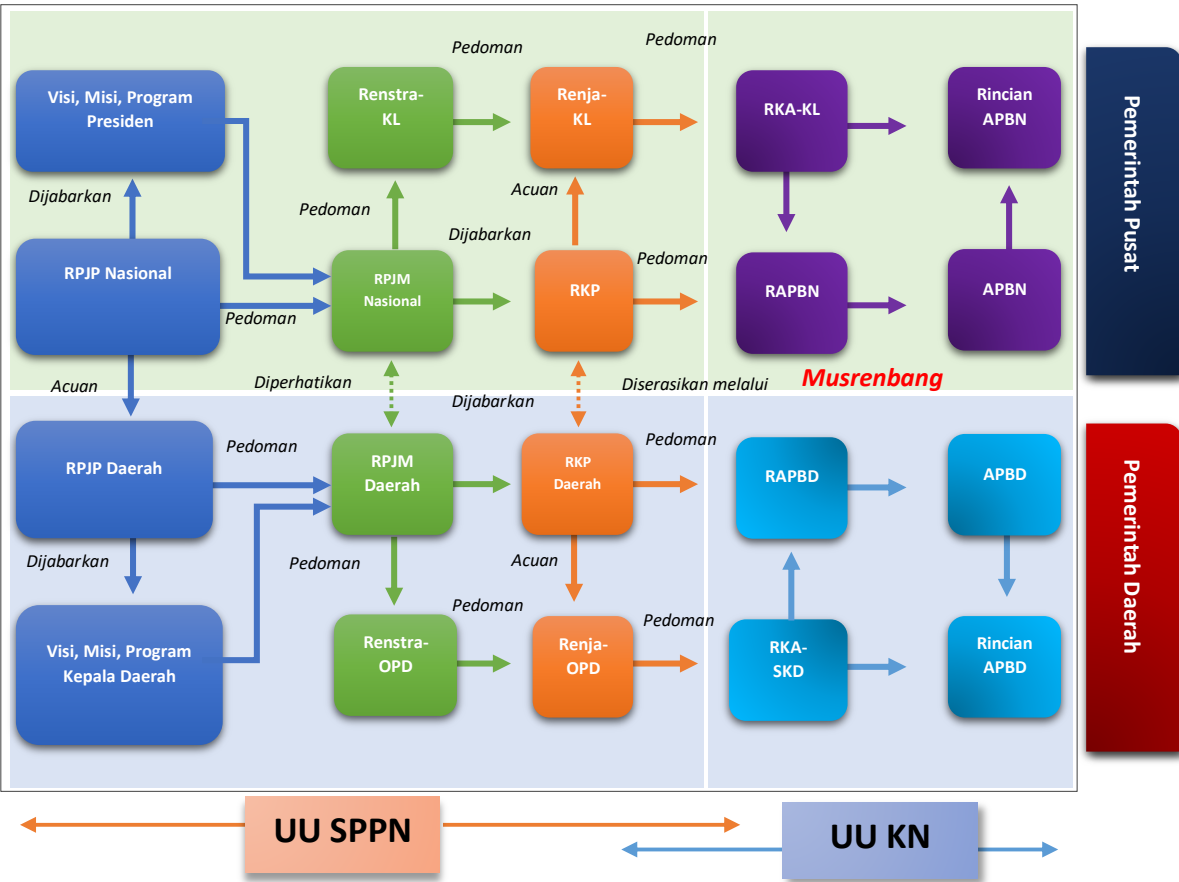
- Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 224);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

- Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan menentukan efektivitas Pembangunan Daerah. Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya, mulai dari RPJPD, perencanaan nasional, maupun perencanaan tata ruang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Demikian halnya dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menempatkan RPJMN Tahun 2020-2024

sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD, sekaligus RPJMD sebagai instrumen penjabaran program di dalam RPJMN.



Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.3.1. Keterkaitan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025, sekaligus dalam rangka mencapai Visi pembangunan jangka panjang, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri, dan Sejahtera”. Periode RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025. Tahapan keempat ini memiliki sasaran pokok sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Pokok Tahap Keempat RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

NO	SASARAN POKOK	DITANDAI OLEH
1	Terwujudnya tata pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat	a. Terwujudnya tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan efektif b. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di berbagai bidang c. Rendahnya praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan d. Tingginya profesionalitas aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan e. Semakin lengkapnya ketersediaan data dan informasi yang mutakhir untuk keperluan perencanaan pembangunan f. Tingginya kualitas pelayanan kearsipan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan g. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan h. Tingginya kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan
2	Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan politik yang demokratis	a. Rendahnya ketegangan dan ancaman konflik antar kelompok maupun golongan masyarakat b. Rendahnya angka kriminalitas serta tingkat pelanggaran terhadap ketertiban umum c. Tingginya partisipasi dan kedewasaan politik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
3	Terwujudnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan	a. Tingginya penanganan kasus berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama korupsi. b. Terwujudnya konsistensi dan keselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi c. Tingginya penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) d. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada semua bidang pembangunan e. Rendahnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak f. Terwujudnya upaya penanggulangan kerawanan sosial
4	Terwujudnya sumber daya manusia yang	a. Tingginya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai

NO	SASARAN POKOK	DITANDAI OLEH
	berkualitas	tatakelola pendidikan yang baik dengan titik berat pada pengembangan kewirausahaan b. Semakin tingginya kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat c. Semakin tingginya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas d. Tingginya efektivitas program keluarga berencana dan semakin terkendalinya pertumbuhan penduduk e. Semakin tingginya ketaqwaan dan kerukunan antar umat beragama f. Semakin tingginya peran pemuda dalam pembangunan dan meningkatnya prestasi keolahragaan g. Semakin tingginya peran serta masyarakat dalam pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat dan pencegahan berkembangnya budaya asing yang negatif
5	Tingginya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah	a. Semakin tingginya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan b. Terpenuhinya prasarana perhubungan masyarakat pada kawasan terisolir c. Semakin memadainya ketersediaan rumah layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat d. Tingginya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi pertanian e. Semakin terpenuhinya kebutuhan air baku dan air bersih bagi masyarakat f. Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan semakin luasnya jangkauan pelayanan listrik ke seluruh wilayah g. Semakin luasnya jangkauan pelayanan telekomunikasi ke seluruh wilayah
6	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada sektor unggulan Daerah	a. Semakin tingginya perdagangan produk-produk unggulan daerah di dalam negeri dan luar negeri b. Tingginya produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan kualitas pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan c. Tingginya jumlah kunjungan wisata daerah dan lama tinggal wisatawan d. Tingginya produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat e. Meratanya distribusi pangan masyarakat ke seluruh wilayah sampai tingkat rumah tangga

NO	SASARAN POKOK	DITANDAI OLEH
7	Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan didukung tingkat investasi yang tinggi dan penguasaan IPTEK bagi pengembang industri dan terwujudnya pelayanan perizinan yang prima serta kerjasama kemitraan	a. Semakin tingginya jumlah investasi yang masuk di Kabupaten Boyolali b. Semakin tingginya perkembangan koperasi dan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro c. Semakin tingginya penerapan teknologi dan standar produk industri daerah untuk meningkatkan daya saing d. Semakin optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis e. Semakin optimalnya kerjasama pemerintah daerah dengan institusi yang profesional dibidangnya dalam pembangunan f. Semakin optimalnya kerjasama dengan banyak daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi
8	Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan sehingga daya beli masyarakat tinggi	a. Semakin meningkatnya jumlah keluarga sejahtera II dan sejahtera III b. Tingginya persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani c. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka
9	Semakin Optimalnya kemandirian keuangan daerah dengan berkembangnya sumber keuangan daerah terintegrasi dengan Pembangunan Daerah	a. Semakin optimalnya jumlah Pendapatan Asli Daerah b. Semakin optimalnya proporsi Pendapatan Asli Daerah c. Semakin optimalnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah
10	Semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	a. Semakin meningkatnya daya saing produk-produk kehutanan dan optimalnya kawasan hutan dengan tetap menjaga kelestariannya b. Semakin optimalnya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup c. Terkendalinya alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah d. Terkendalinya pencemaran perairan yang disebabkan aktivitas usaha masyarakat e. Terkendalinya pencemaran udara akibat aktivitas kendaraan dan industri

RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 memiliki arah kebijakan yang perlu diperhatikan untuk memandu RPJMD Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025

ARAH KEBIJAKAN UMUM JANGKA PANJANG	RINCIAN
Mewujudkan tata pemerintahan yang amanah didukung oleh aparatur pemerintah professional dan kompeten	• Mengoptimalkan penyelenggaraan otonomi daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah • Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintahan Daerah • Mengoptimalkan penyediaan data statistik yang akurat untuk keperluan perencanaan Pembangunan Daerah • Mengoptimalkan pelayanan kearsipan kepada masyarakat • Mengoptimalkan pelayanan administrasi pertanahan untuk mendukung tertib administrasi agraria • Mengoptimalkan pelayanan administrasi kependudukan kepada seluruh anggota masyarakat
Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan masyarakat yang aman dan tertib	• Mengembangkan kerjasama antar kelompok dan jiwa nasionalisme masyarakat sebagai bagian dari ketahanan nasional • Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta upaya penanggulangan kriminalitas • Mengembangkan iklim demokrasi dalam segi-segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Mewujudkan penegakan hukum dan hak asasi manusia serta kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang Pemerintahan	• Mewujudkan penegak hukum berbagai pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan • Mewujudkan konsistensi peraturan daerah dengan peraturan pusat dan provinsi • Mewujudkan penghargaan dan penghormatan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) • Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan • Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak • Mengupayakan penanggulangan kerawanan sosial
Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya	• Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh pendidikan, mutu dan relevansi serta tata kelola pendidikan

ARAH KEBIJAKAN UMUM JANGKA PANJANG	RINCIAN
saing daerah	• Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan kepada masyarakat • Mengoptimalkan pemerataan akses memperoleh kesehatan yang bermutu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Mengendalikan pertumbuhan penduduk secara optimal • Meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi umat beragama serta kerukunan dan toleransi antar umat beragama • Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi keolahragaan • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga sejahtera • Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat
Meningkatkan Ketercukupan sarana dan prasarana wilayah secara kuantitas dan kualitas	• Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan dalam rangka menunjang mobilitas penduduk, barang dan jasa • Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perhubungan • Mengembangkan perumahan yang layak huni sesuai dengan kebutuhan masyarakat • Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dalam rangka mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penyediaan air baku dan air bersih agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat • Mengembangkan energi alternatif dan mengoptimalkan suplai listrik ke seluruh wilayah • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana telekomunikasi
Mewujudkan Perekonomian daerah yang maju dengan bertumpu pada sektor unggulan daerah dan usaha ekonomi rakyat	• Mengoptimalkan pemasaran produk-produk unggulan daerah baik dalam negeri maupun keluar negeri • Meningkatkan produktivitas hasil pertanian (dalam arti luas) dan pengolahan produk-produk pertanian untuk mendukung ketahanan pangan • Mengembangkan obyek dan daya tarik wisata daerah • Meningkatkan produksi perikanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat • Meningkatkan pemerataan distribusi dan akses pangan masyarakat sampai tingkat rumah tangga
Mewujudkan daerah ramah	• Meningkatkan investasi daerah melalui

ARAH KEBIJAKAN UMUM JANGKA PANJANG	RINCIAN
investasi dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi pengembangan industri, pelayanan perizinan yang prima dan kerjasama kemitraan daerah	penciptaan iklim dan sarana prasarana pendukung investasi • Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah melalui peningkatan kualitas SDM • Peningkatan daya saing industri daerah melalui penerapan teknologi dan standar produk • Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan provinsi atau kabupaten/kota lainnya dalam percepatan pembangunan kawasan strategis • Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi yang profesional dibidangnya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan • Mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi
Mewujudkan kemandirian keuangan daerah dengan mengembangkan sumber keuangan daerah terintegrasi dengan Pembangunan Daerah	• Mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas sumber Pendapatan Asli Daerah • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah
Mewujudkan ketercukupan lapangan pekerjaan dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan	• Mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mengurangi penduduk miskin • Meningkatkan upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial • Mengurangi pengangguran melalui fasilitasi usaha masyarakat dan penyelenggaraan bursa kerja daerah • Mendorong percepatan pembangunan pada kawasan-kawasan tertinggal
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	• Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan dengan tetap memperhatikan kelestariannya • Mengoptimalkan usaha pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup • Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menghindari kerusakan lingkungan • Meningkatkan penerapan standar teknis pengolahan limbah dan pengawasan pencemaran air • Mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan padat kendaraan dan kawasan industri untuk mengurangi polusi udara

1.3.2. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

Penyusunan RPJMD merupakan salah satu instrumen penting untuk menjabarkan dan menopang pencapaian arahan presiden yang tercantum di dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Arahan presiden tersebut diinstrumentasikan ke dalam Visi dan Misi sebagai berikut:

Tabel 1. 3. Visi dan Misi RPJMN 2020-2024

VISI	MISI
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
	Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Terget indikator makro pembangunan di dalam RPJMN untuk Provinsi Jawa Tengah yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 1. 4. Target Pembangunan Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMN 2020-2024

INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET PROVINSI JAWA TENGAH		
	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,90	6,10	6,20
Tingkat Kemiskinan	9,00	8,55	8,15
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,80	3,40	3,10
Perkiraan Kebutuhan Investasi	Rp545,82 triliun	Rp607,49 triliun	Rp672,30 triliun

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 memberikan posisi strategis RPJMD sebagai instrumen bagi Daerah

untuk menjabarkan dan melaksanakan program di dalam RPJMN. Beberapa program/kegiatan strategis di dalam RPJMN yang akan dijalankan di Kabupaten Boyolali, antara lain:

1. Pengembangan Bandara Adi Sumarmo, yakni dalam rangka pengembangan kawasan strategis, terutama berupa perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas DPP Borobudur dan sekitarnya. Kabupaten Boyolali memiliki posisi strategis untuk merespon program RPJMN ini, terutama untuk meningkatkan dampak multiganda dalam rangka akselerasi ekonomi. Kabupaten Boyolali menjadi daerah pertama kali dikunjungi wisatawan yang masuk melalui pintu masuk Bandara Adi Sumarmo, sehingga dapat dioptimalkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah, serta kesiapan masyarakat.
2. Pembangunan desa terpadu dalam rangka peningkatan status desa menjadi berkembang dan mandiri, serta penurunan angka kemiskinan desa.

1.3.3. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 memiliki Visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam Misi sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran, dan Guyup untuk Menjaga NKRI
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
3. Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
4. Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

Kabupaten Boyolali di dalam arah pengembangan wilayah RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 bagian dari wilayah pengembangan Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Wonogiri, Sragen dan Klaten (Subosukowonosraten). Sektor unggulan yang dikembangkan di dalam wilayah tersebut adalah pariwisata terpadu, pertanian, industri pengolahan, serta berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

1.3.4. Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD Daerah Sekitar

Penelaahan dokumen perencanaan daerah lain berfungsi untuk mengkaji dampak pembangunan yang saling berpengaruh dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali yang sedang menjalankan periode RPJMD 2018-2023 adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Karanganyar merupakan daerah yang berada di wilayah pengembangan wilayah yang sama dengan Boyolali di dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, yaitu wilayah Subosukowonosraten. Fokus pengembangan di wilayah tersebut adalah pariwisata, pertanian dan industri pengolahan. Boyolali dan Karanganyar juga berada dalam Kawasan yang sama dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Perkotaan Subosukowonosraten dan kawasan pengendalian pendayagunaan Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali. Sedangkan Kabupaten Magelang berada di wilayah pengembangan yang berbeda, namun berbatasan langsung dengan Boyolali dan memiliki persamaan karakteristik wilayah pegunungan dan potensi di sektor pariwisata dan pertanian. Boyolali dan Magelang berada dalam satu kawasan pariwisata Solo Selo Borobudur (SSB). Kedua daerah tersebut memiliki fokus pembangunan yang direpresentasikan melalui Visi dan Misi pembangunan sebagai berikut:

Tabel 1. 5. Visi dan Misi RPJMD Daerah Sekitar

DAERAH	VISI	MISI
Kabupaten Karanganyar	Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar	• Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh • Pemberdayaan Perekonomian Rakyat • Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis • Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan • Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

DAERAH	VISI	MISI
Kabupaten Magelang	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)	• Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia • Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup • Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

1.3.5. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Boyolali 2011-2031

Penyusunan RPJMD berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan
2. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara
3. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung
4. Pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian
5. Pengoptimalan produktivitas kawasan pertanian
6. Pengembangan kawasan peruntukan industri
7. Pengembangan kawasan pariwisata
8. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara
9. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

1.3.6. Keterkaitan RPJMD dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan KLHS yang menyertai penyusunan RPJMD memiliki mekanisme sebagai pengkajian teknis dan pengkajian pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program

Pembangunan Daerah ; perumusan alternatif penyempurnaan program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan yang hasilnya berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan; serta penyusunan rekomendasi perbaikan terhadap program Pembangunan Daerah dan/atau kegiatan berupa alternatif antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi program dan/atau kegiatan.

1.3.7. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Efektivitas Pembangunan Daerah ditopang oleh perencanaan daerah dengan perencanaan perangkat daerah yang terhubung secara sinergis. Penyusunan RPJMD sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun renstra. Demikian halnya berbagai isu dan permasalahan sektoral yang berasal dari masing-masing perangkat daerah juga menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD. Adanya sinergi antara RPJMD dengan renstra perangkat daerah pada tahap selanjutnya akan menopang efektivitas pencapaian indikator kinerja kepala daerah yang ditopang oleh capaian kinerja kepala perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya.

1.3.8. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD selama lima tahun dijalankan dan dijabarkan setiap tahunnya oleh RKPD. RKPD berpedoman pada tema pembangunan RPJMD setiap tahun. RKPD selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD dalam hal ini memiliki peran penting sebagai penghubung sinergi antara RPJMD dengan dukungan penganggaran setiap tahun.

1.3.9. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan tidak saja berdasar pada jangka waktu, namun juga merespon berbagai isu strategis, merespon kebijakan nasional, maupun perencanaan yang secara fokus akan mengelola pembangunan sektor tertentu. Perencanaan dalam konteks ini perlu bersinergi dengan RPJMD untuk memastikan implementasinya dan bersinergi dengan penganggaran daerah. Salah satu perencanaan penting untuk merespon kebijakan internasional dan nasional yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah Rencana Aksi Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan, target dan indikator TPB perlu diadopsi dalam indikator kinerja di dalam RPJMD.

1.3.10. Keterkaitan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota, sehingga perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan Pembangunan Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Oleh karena itu, RPJMD berperan sebagai instrumen penyelarasan RPJM Desa dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud Penyusunan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan di Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali selama 5 (lima) tahun.

1.4.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu:

- a. Tersusunnya dokumen penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 terdiri dari sembilan bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab I memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab II secara garis besar memuat gambaran umum kondisi daerah, terutama capaian kinerja pembangunan periode 2016-2021 beserta analisisnya. Bab ini disajikan berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah yang disajikan di dalam Bab III terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan periode 2021-2026.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab IV merupakan identifikasi permasalahan Pembangunan Daerah yang berbasis analisis capaian kinerja di Bab II. Permasalahan Pembangunan Daerah kemudian menjadi dasar perumusan isu strategis daerah, yang memperhatikan pula isu strategis Internasional, Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan daerah sekitar.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab V memuat uraian visi dan misi daerah, serta di dalam setiap misi terdapat penjabaran tujuan, sasaran dan indikator.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab VI memuat strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah di seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab VIII berisi tentang uraian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirumuskan ke dalam Indikator Kinerja Utama Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci.

Bab IX Penutup

Bab IX sebagai penutup memuat tentang kaidah pelaksanaan dan pedoman masa transisi.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Sub bab ini akan mendeskripsikan kondisi Daerah baik dari aspek geografi maupun demografi. Penjelasan pada aspek geografi meliputi karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan aspek demografi akan mendeskripsikan struktur dan jumlah penduduk di Daerah.

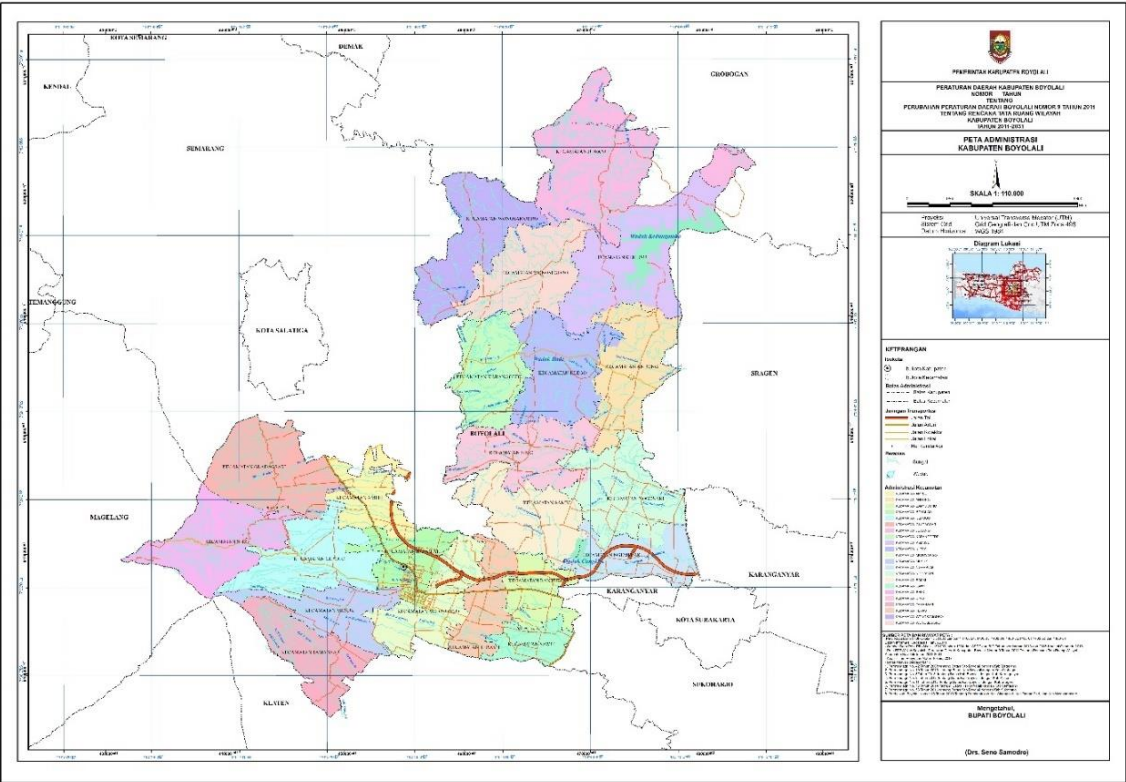
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah akan memberikan gambaran mengenai kondisi geografis Daerah. Sub bab ini akan menjelaskan berbagai hal terkait luas dan batas wilayah administratif, letak kondisi geografis topografi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 1.015,10 Km². Wilayah Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam 22 wilayah administrasi kecamatan yang terdiri dari 261 desa dan 6 kelurahan. Berikut merupakan batas-batas wilayah administratif Kabupaten Boyolali.

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten
- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang, Kabupaten Magelang
- Sebelah Timur : Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Boyolali

Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031

Kecamatan Kemusu merupakan kecamatan yang memiliki wilayah paling luas diantara 22 kecamatan lainnya, yaitu 81,43 Km². Sementara kecamatan Sawit merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil, yaitu 17,23 Km². Berikut adalah informasi luas wilayah kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1	Selo	Samiran	56,08
2	Ampel	Candi	30,38
3	Gladagsari	Gladagsari	60,01
4	Cepogo	Mliwis	53,00
5	Musuk	Musuk	30,53
6	Tamansari	Karangkendal	34,51
7	Boyolali	Banaran	26,25
8	Mojosongo	Mojosongo	43,41
9	Teras	Mojolegi	29,94
10	Sawit	Kemasan	17,23
11	Banyudono	Jembungan	25,38
12	Sambi	Sambi	46,49
13	Ngemplak	Sawahan	38,53
14	Nogosari	Glonggong	55,08
15	Simo	Simo	48,04
16	Karanggede	Kebonan	41,76
17	Klego	Klego	51,88
18	Andong	Kacangan	54,53

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
19	Kemusu	Klewor	81,43
20	Wonosegoro	Wonosegoro	51,79
21	Wonosamodro	Garangan	58,86
22	Juwangi	Juwangi	79,99

Sumber: BPS, Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2020

2.1.1.2. Letak Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Boyolali terletak antara 110^o 22’ – 110^o 50’ Bujur Timur dan antara 7^o 7’ – 7^o 36’ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 75 – 1500 meter di atas permukaan laut. Posisi Kabupaten Boyolali berada pada jalur penghubung di antara tiga kota besar yaitu Solo, Yogyakarta dan Semarang sehingga posisinya menjadi sangat strategis. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan industri.

2.1.1.3. Topografi

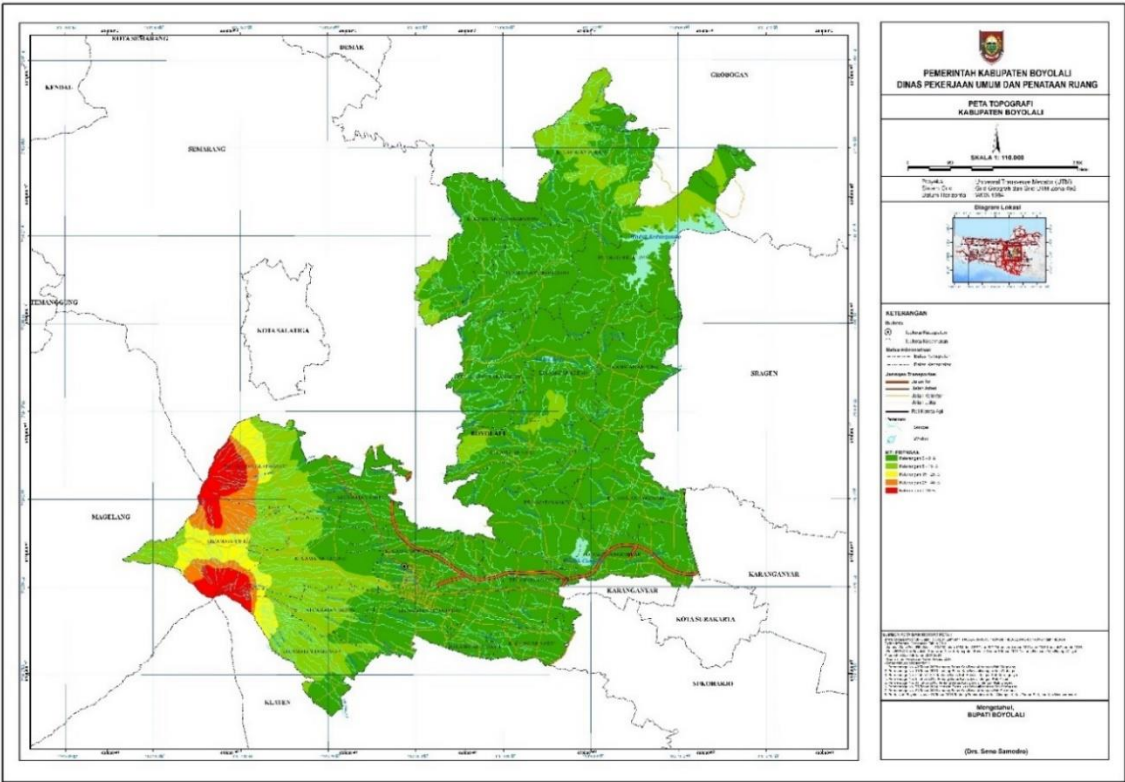
Secara umum topografi Kabupaten Boyolali terbagi ke dalam beberapa wilayah berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (dpl). Wilayah yang termasuk ke dalam dataran tinggi berada di bagian barat yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo dan Ampel, ketinggian wilayah tersebut berada di kisaran 1.000 – 1500 Mdpl. Berikut adalah topografi wilayah Kabupaten Boyolali berdasarkan ketinggian.

Tabel 2. 2. Topografi Wilayah Berdasarkan Ketinggian

NO	KETINGGIAN (Mdpl)	KECAMATAN
1	75 – 400	Kecamatan Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambi, Ngemplak, Simo, Nogosari, Karanggede, Andong, Klego, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi dan Sebagian Boyolali
2	400 – 700	Kecamatan Boyolali, Musuk, Mojosongo, Cepogo, Ampel, dan Karanggede, Tamansari
3	700 - 1.000	Kecamatan Musuk, Ampel, dan Cepogo
4	1.000 - 1.300	Kecamatan Cepogo, Ampel, dan Selo
5	1.300 - 1.500	Kecamatan Selo, Gladagsari

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Wilayah paling rendah secara umum berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali yang meliputi Kecamatan Teras, Banyudono, Sawit, Mojosongo, Ngemplak, Simo, Nogosari, Kemusu, Karanggede, Wonosamodro, Juwangi, Wonosegoro, Sambu dan Sebagian Kecamatan Boyolali, yaitu berada di kisaran 75 – 400 Mdpl.



Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Boyolali

Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011 – 2031

Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Boyolali dibedakan menjadi 5 jenis. Secara umum wilayah Kabupaten Boyolali didominasi oleh dataran dengan tingkat kemiringan 0 – 8%. Penyebaran wilayah dataran berada di bagian selatan, tengah dan utara Kabupaten Boyolali.

Wilayah barat Kabupaten Boyolali didominasi oleh daerah yang memiliki tingkat kemiringan 8 - >40%. Jika dilihat per wilayah kecamatan, daerah yang memiliki tingkat kemiringan >40% adalah kecamatan Selo dan Gladagsari. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh geografis keduanya yang berada di lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu.

2.1.1.4. Hidrologi

Kabupaten Boyolali memiliki beberapa sumber air, baik alami maupun buatan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karakter hidrologi yang ada di Kabupaten Boyolali memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim, kondisi topografi, maupun struktur geologi wilayah. Beberapa sumber

hidrologi potensial yang dimiliki Kabupaten Boyolali antara lain adalah mata air, sungai dan waduk. Berikut adalah mata air, sungai dan waduk yang ada di Kabupaten Boyolali.

a. Mata Air Dangkal

Tabel 2. 3. Daftar Nama Mata Air Besar di Kabupaten Boyolali

No	Nama Sumber Air	Lokasi
1	Tlatar	Kecamatan Boyolali
2	Nepen	Kecamatan Teras
3	Pengging	Kecamatan Banyudono
4	Pantaran	Kecamatan Ampel
5	Wonopedut	Kecamatan Cepogo
6	Mungup	Kecamatan Sawit

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

b. Sungai

Tabel 2. 4. Daftar Nama Sungai Besar di Kabupaten Boyolali

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Air (m ³ / dtk)
1	Serang	15	6.844/0.441
2	Pepe	11.5	24.346/11179
3	Gandul	28.5	7.128/6.960
4	Cemoro	16.3	4.485/0.154

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali

Sungai Pepe merupakan sungai yang memiliki debit air terbesar di Kabupaten Boyolali. Sungai ini mengalir dari lereng Gunung Merbabu hingga Sungai Bengawan Solo. Debit air yang besar menjadi salah satu potensi hidrologi yang dapat dikembangkan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk lokasi wisata.

Selain Sungai Pepe, terdapat Sungai Gandul yang mengalir melewati Kabupaten Boyolali. Sungai ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Kabupaten Boyolali. Sungai Gandul mengalir dari Lereng Gunung Merapi melewati Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras dan Sawit.

c. Waduk/ Situ/ Embung

Tabel 2. 5. Daftar Nama Waduk/Embung/Situ Besar di Kabupaten Boyolali

No	Nama waduk	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kedungombo	3.536	Kecamatan Kemusu

No	Nama waduk	Luas (Ha)	Lokasi
2	Kedungdowo	48	Kecamatan Andong
3	Cengklik	240	Kecamatan Ngemplak
4	Bade	80	Kecamatan Klego
5	Drajitan	12.5	Kecamatan Musuk

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Waduk Kedungombo merupakan salah satu potensi hidrologi yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali. Waduk ini menggunakan Kali Serang sebagai sumber air utamanya. Sumber air lainnya dipasok dari beberapa anak sungai besar maupun kecil lainnya. Beberapa anak sungai yang menyuplai air ke Waduk Kedungombo antara lain adalah Sungai Braholo, Sungai Tengah, Sungai Nglanji, Sungai Tapen dan Sungai Sambas.

d. Status Daya Dukung Air

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Bila ketersediaan air lebih besar dari kebutuhan air maka daya dukung air dinyatakan surplus atau berlebih. Sebaliknya, jika ketersediaan air kurang dari kebutuhan air maka daya dukung air dinyatakan defisit atau tidak dapat memenuhi.

Ketersediaan air di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 diketahui sebesar 1.033.423.043,47 m³/tahun. Sedangkan berdasarkan perhitungan kebutuhan air untuk keseharian penduduk, pertanian, maupun pertanian hanya sebesar 49.481.508,57 m³/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa daya dukung air di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 masih *surplus* atau berlebih.

Proyeksi dilakukan untuk perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air pada tahun 2026. Ketersediaan air pada tahun 2026 berdasarkan hasil analisis terhadap sumber mata air, curah hujan, dan perubahan peruntukan lahan sebesar 1.068.903.572,58 m³/tahun. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk dan juga mempertimbangkan penggunaan air di sektor pertanian dan peternakan, diketahui kebutuhan air pada tahun 2026 di Kabupaten Boyolali sebesar 51.786.848,84 m³/tahun. Daya dukung air masih dapat mencukupi kebutuhan air bahkan masih berlebih.

Tabel 2. 6. Perbandingan Status Daya Dukung Air Kabupaten Boyolali Tahun 2020-2026

No	Daya Dukung Air	Tahun 2020		Tahun 2026	
		m ³ /tahun	Keterangan	m ³ /tahun	Keterangan
1	Ketersediaan Air	1.033.423.043,47		1.068.903.572,58	
2	Kebutuhan Air	49.481.508,57		51.786.848,84	

No	Daya Dukung Air	Tahun 2020		Tahun 2026	
		m ³ /tahun	Keterangan	m ³ /tahun	Keterangan
3	Surplus pemenuhan kebutuhan air layak	983.941.534,90		1.017.116.723,74	
4	Daya dukung air permukaan	19,88	surplus	19,64	surplus

Sumber : Analisis, 2021

Banyaknya titik sumber mata air di Kabupaten Boyolali menjadi salah satu penyebab melimpahnya ketersediaan air. Terdapat 756 mata air yang tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali dengan debit rerata 3.780 liter/detik atau 119.206.080 m3/tahun. Selain banyak ditemukan mata air, keberadaan Kabupaten Boyolali di kaki gunung juga menyebabkan rerata curah hujan yang tergolong tinggi yakni 2.718,75 mm/tahun. Namun melimpahnya ketersediaan air dimungkinkan tidak seluruhnya tersimpan di dalam tanah, hal ini dipengaruhi juga oleh tutupan lahan yang mempengaruhi koefisien limpasan. Selain tutupan lahan, jenis tanah, kelerengan, dan faktor geologi lainnya juga dapat mempengaruhi koefisien limpasan yang terjadi.

Tingginya ketersediaan air di Kabupaten Boyolali tak menutup kemungkinan bahwa di beberapa kecamatan masih sering terjadi kekeringan. Kekeringan disebabkan karena kemarau panjang yang membuat debit di beberapa mata air menurun. Kekeringan biasa terjadi di wilayah utara Kabupaten Boyolali yang secara hidrogeologi merupakan wilayah non CAT yang meliputi Kecamatan Wonosegoro, Wonosamodro, Juwangi, Kemusu, Andong, dan Karanggede. Selain itu dua kecamatan di lereng Gunung Merapi yakni Kecamatan Tamansari dan Musuk juga kesulitan air karena dalamnya muka air tanah.

2.1.1.5. Klimatologi

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sekitar 2212 mm³/Tahun. Secara umum curah hujan yang dimiliki Kabupaten Boyolali cukup tinggi sehingga memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut adalah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 7. Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Boyolali

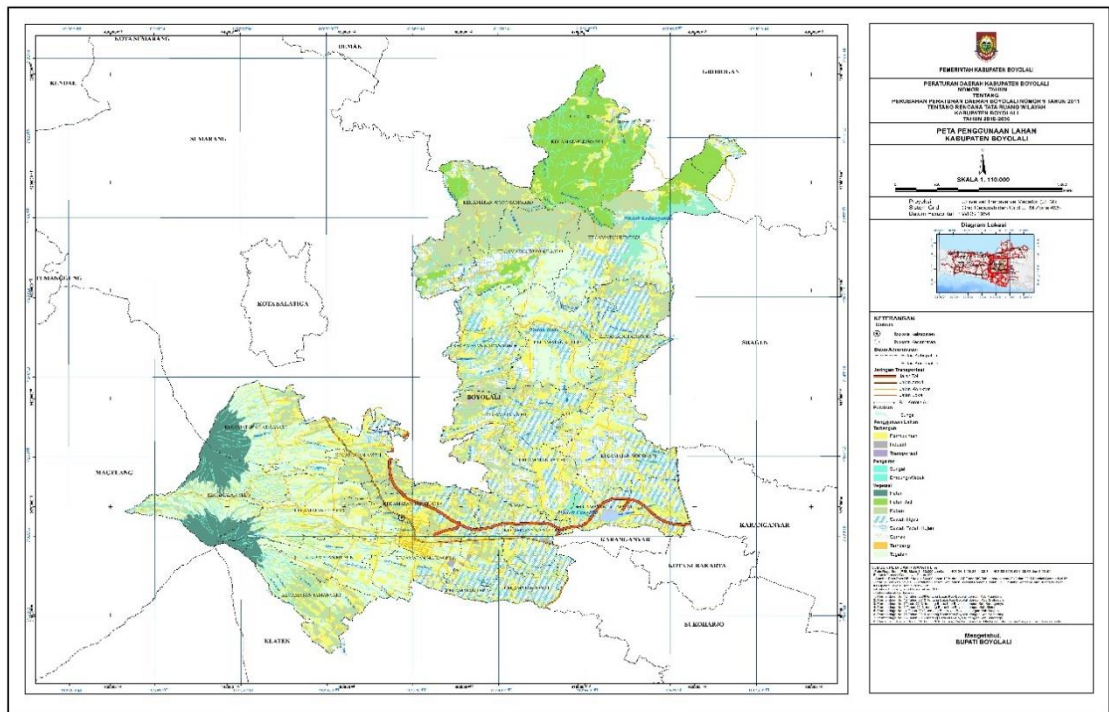
Bulan	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Boyolali					
	Curah Hujan (mm ³)			Hari Hujan		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Januari	441.00	410.00	439.00	21.00	24.00	22.00
Februari	426.00	430.00	418.00	20.00	23.00	20.00
Maret	285.00	251.00	277.00	18.00	17.00	17.00
April	255.00	96.00	256.00	15.00	11.00	14.00
Mei	139.00	39.00	160.00	7.00	4.00	8.00
Juni	-	57.00	78.00	-	4.00	7.00
Juli	-	-	17.00	-	-	3.00
Agustus	-	-	-	-	-	-
September	-	9.00	74.00	-	1.00	5.00
Oktober	2.00	7.00	173.00	-	-	11.00
November	372.00	294.00	421.00	18.00	10.00	20.00
Desember	300.00	211.00	301.00	19.00	16.00	19.00

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali

Berdasarkan hitungan bulan, curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak di Kabupaten Boyolali terjadi pada Bulan Januari. Rata-rata curah hujan per bulan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 adalah 277,50 mm³/Bulan. Puncak kemarau terjadi pada bulan Juni hingga September. Sebagian besar wilayah Kabupaten Boyolali memiliki suhu udara yang cukup sejuk yaitu berkisar antara 24⁰C – 29⁰C dengan kelembapan antara 80% - 85%.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan informasi yang menggambarkan mengenai pemanfaatan lahan di Kabupaten Boyolali. Pemanfaatan lahan di Kabupaten Boyolali terbagi Beberapa klasifikasi penggunaan antara lain adalah permukiman, industri, transportasi, sungai, embung, hutan, sawah, tambak dan tegalan. Berikut adalah peta penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali.



Gambar 2. 3. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Boyolali

Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali didominasi oleh sawah dan permukiman dengan sebaran hampir di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Luas total lahan persawahan pada tahun 2018 adalah 22.693 Ha. Kondisi tersebut mengalami pengurangan luas lahan sebanyak 40 Ha dari tahun 2017. Salah satu penyebab menurunnya luas lahan persawahan adalah adanya alih fungsi lahan persawahan dan perkebunan menjadi lahan permukiman dan industri.

Selain lahan persawahan dan permukiman, terdapat lahan industri dan hutan jati yang secara umum berada di wilayah bagian utara Kabupaten Boyolali seperti Kecamatan Juwangi dan Wonosamodro. Sementara untuk lahan perhutanan berada di kawasan lereng pegunungan seperti Kecamatan Gladagsari dan Selo.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Ditegaskan dalam perda tersebut bahwa penataan ruang Kabupaten Boyolali bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Guna mewujudkan tujuan penataan dan

pengembangan wilayah maka ditetapkan beberapa kebijakan dan strategi yang meliputi:

- a. Pengembangan pusat-pusat pelayanan;
 - membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki; dan
 - meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.
- b. Pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara;
 - mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - mengoptimalkan pengembangan sistem transportasi massal dan infrastruktur pendukungnya;
 - mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang;
 - mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan; dan
 - menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Kawasan Bandar Udara.
- c. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung;
 - memulihkan fungsi lindung;
 - mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di Kawasan lindung;
 - menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun; dan
 - mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman, dan berwawasan lingkungan.
- d. Pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian;
 - mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - mengembangkan irigasi pertanian;
 - mengoptimalkan kawasan pertanian lahan basah;
 - mengoptimalkan kawasan pertanian lahan kering;
 - mengoptimalkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas.
- e. Optimalisasi produktivitas kawasan perikanan;
 - mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan; dan
 - mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
- f. Pengembangan kawasan peruntukan industri;
 - mengembangkan industri kecil, industri menengah dan industri besar;

- mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan; dan
 - pengembangan kawasan industri tidak berada pada lahan pertanian.
- g. Pengembangan kawasan pariwisata;
- mengembangkan destinasi pariwisata; dan
 - menyediakan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
- h. Peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;
- mendukung penetapan Kawasan Strategi Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - mengembangkan Kawasan Budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
 - turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- i. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.
- menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - mengembangkan kawasan agropolitan; dan
 - mengembangkan kawasan minapolitan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan penataan ruang yang telah dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, maka dirumuskan rencana struktur dan pola ruang sebagai acuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Untuk lebih jelasnya, rencana struktur dan pola ruang dapat dilihat pada sub bab selanjutnya.

2.1.2.1. Rencana Struktural Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boyolali meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan rencana pengembangan sistem prasarana wilayah.

A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

Sistem Perkotaan dalam struktur ruang didesign meliputi pusat kegiatan dan fungsi pengembangan yang sudah dispesifikkan. Diantaranya:

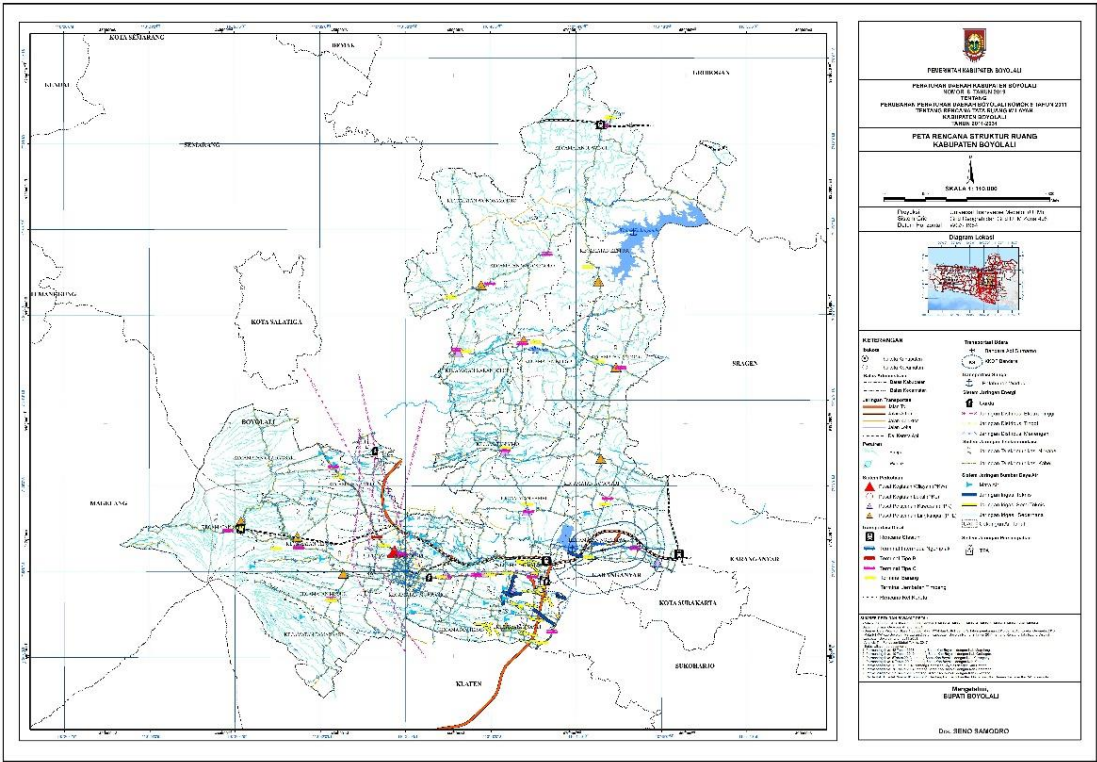
- a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Kecamatan Boyolali merupakan pusat kegiatan skala wilayah yang melayani

sampai beberapa daerah di sekitarnya yang memiliki fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;

- b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di Kecamatan Ampel merupakan pusat kegiatan skala lokal regional daerah yang memiliki fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, industri, perekonomian untuk skala regional, pendidikan, kesehatan dan peribadatan;
- c. Pusat Pengembangan Kawasan (PPK) meliputi beberapa Kecamatan di Kabupaten Boyolali, diantaranya Kecamatan Ngemplak, Mojosongo, Banyudono, Karanggede, Simo, Teras, dan Sambi. PPK memiliki fungsi sebagai kawasan pusat pelayanan skala antar kecamatan yaitu fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, dan perekonomian skala lokal.
- d. Rencana Pengembangan Pusat Pemerintahan Kecamatan Baru meliputi beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Ampel, Musuk, Wonosegoro, dan Juwangi.

2. Rencana Pengembangan Sistem Perdesaan

Rencana pengembangan sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk PPL. Pengembangan PPL di Kabupaten Boyolali meliputi Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Sawit, Nogosari, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, dan Juwangi.



Gambar 2. 4. Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031

Pada peta struktur ruang dapat dilihat bahwa pola perencanaan pengembangan wilayah Kabupaten Boyolali terpusat di wilayah selatan, atau di wilayah perkotaan yang merupakan pusat administrasi Kabupaten Boyolali, sehingga memang berkembang dengan pesat. Selain itu daerah selatan Kabupaten Boyolali juga dilalui oleh jalur TOL sehingga memang perkembangan daerahnya terjadi lebih cepat. Selain keberadaan jalur TOL dan pusat administrasi kabupaten, wilayah selatan Kabupaten Boyolali atau lebih tepatnya di Kecamatan Ngemplak, terdapat Bandara Adi Soemarmo, walaupun secara kewenangan bukan kewenangan kabupaten, namun sarana prasarana pendukung yang terbangun di sekitar bandara menjadi potensi pengembangan wilayah yang cukup potensial untuk Kabupaten Boyolali.

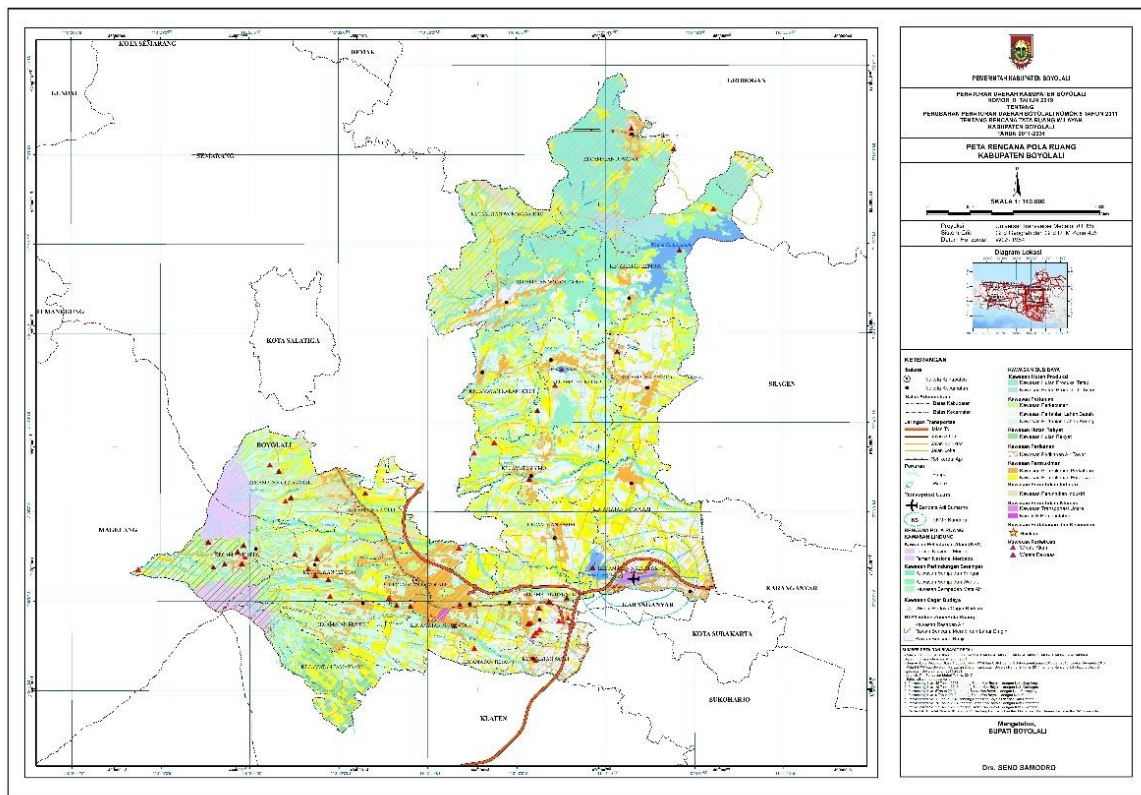
B. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Rencana pengembangan sistem prasarana wilayah dibagi menjadi dua yakni prasarana utama dan prasarana lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 8. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten Boyolali

No	Sistem Prasarana	Rencana Pengembangan
1.	Sistem Prasarana Utama	
	Sistem jaringan transportasi darat	- sistem jaringan jalan; - sistem jaringan sungai dan penyeberangan; - sistem jaringan kereta api; - jaringan transportasi perkotaan.
	Sistem jaringan transportasi udara	Pengembangan sarana dan prasarana Bandar Udara Internasional Adi Soemarmo Boyolali yang berada di Kecamatan Ngemplak
2.	Sistem prasarana lainnya	- Sistem jaringan energi - Sistem jaringan telekomunikasi - Sistem jaringan sumber daya air - Sistem penyediaan air minum - Sistem jaringan drainase - Sistem jaringan persampahan - Sistem pengelolaan limbah - Sistem jaringan evakuasi bencana

2.1.2.2. Rencana Pola Ruang



Gambar 2. 5. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali

Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031

Rencana pola ruang Kabupaten Boyolali dikembangkan berdasarkan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Untuk lebih jelasnya terkait rencana pengembangan Pola Ruang di Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 9. Rencana Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Boyolali

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pengembangan
Kawasan Lindung		
1.	Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya	- Kawasan lindung yang dikelola oleh masyarakat seluas kurang lebih 1.418 hektar - Kawasan resapan air luas kurang lebih 21.651 hektar
2.	Kawasan perlindungan setempat	- Kawasan sempadan sungai - Kawasan sekitar waduk - Kawasan sekitar mata air - Kawasan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan seluas kurang lebih 9.724 hektar
3.	Kawasan konservasi	Kawasan pelestarian alam seluas kurang lebih 3.829 ha, meliputi: - Taman Nasional Gunung Merapi

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pengembangan
		- Taman Nasional Gunung Merbabu
4.	Kawasan rawan bencana alam	- Daerah rawan banjir - Daerah rawan lahar dingin - Daerah rawan tanah longsor - Daerah rawan kebakaran hutan - Daerah rawan angin topan - Daerah rawan kekeringan - Daerah rawan letusan gunung merapi - Daerah rawan gempa bumi
5.	Kawasan lindung geologi	Berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi: - Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali; - Cekungan Air Tanah Salatiga - Cekungan Air Tanah Magelang-Temanggung
6.	Kawasan lindung lainnya	- Kawasan cagar budaya seluas kurang lebih 866 hektar. - Kawasan perlindungan plasma nutfah seluas kurang lebih 100 hektar berada di Kecamatan Mojosongo

Kawasan Budidaya

1.	Kawasan peruntukan hutan produksi	- Hutan produksi tetap kurang lebih 12.461 hektar - Hutan produksi terbatas kurang lebih 1.204 hektar
2.	Kawasan peruntukan hutan rakyat	Seluas 19.993 hektar
3.	Kawasan peruntukan pertanian	- Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 23.387 hektar - Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.234 hektar - Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi : - o Kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 16.500,99 hektar - o Cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 4.193,00 hektar - Kawasan pertanian hortikultura; - Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 9.689 hektar - Kawasan peternakan, terdiri atas ternak besar, ternak kecil, ternak kecil khusus babi, unggas dan pengembangan Rumah

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pengembangan
		Potong Hewan (RPH)
4.	Kawasan peruntukan perikanan	- Kawasan perikanan tangkap - Kawasan perikanan budidaya - Kawasan pengolahan ikan
5.	Kawasan peruntukan pertambangan	- kawasan peruntukan pertambangan mineral - kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi.
6.	Kawasan peruntukan industri	- Kawasan peruntukan industri dapat digunakan untuk industri besar, industri sedang dan industri kecil - Industri rumah tangga berada di seluruh kecamatan.
7.	Kawasan peruntukan pariwisata	- Kawasan wisata alam - Kawasan wisata budaya - Kawasan wisata rekreasi
8.	Kawasan peruntukan permukiman	- Permukiman perkotaan - Permukiman perdesaan
9.	Kawasan peruntukan lainnya	- Kawasan pertahanan dan keamanan - Kawasan perdagangan dan jasa - Kawasan pemerintahan

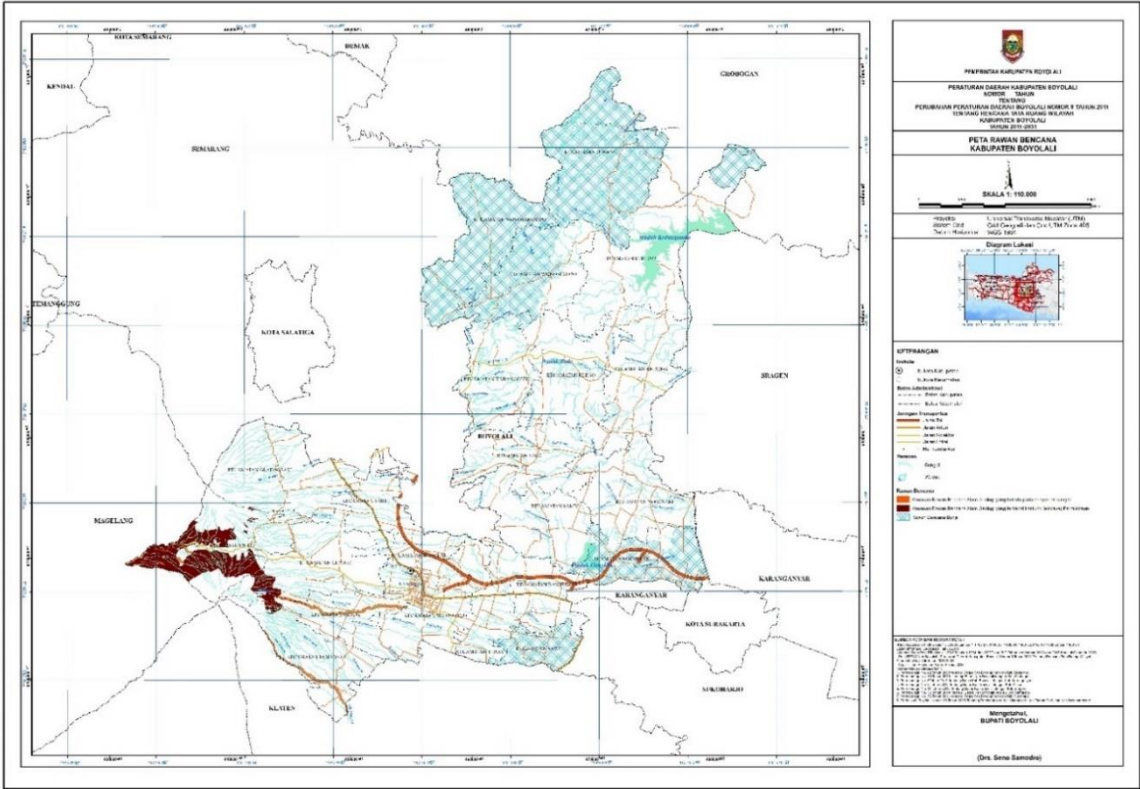
2.1.2.3. Cakupan RDTR Kecamatan

Wilayah Kabupaten Boyolali terbagi menjadi 22 kecamatan, kemudian pada tahun 2021 Kecamatan Sawit telah menyusun RDTR. Kecamatan Sawit merupakan satu-satunya kecamatan yang saat ini telah menyusun RDTR dan sedang dalam tahapan diresmikan dengan perbup. Tujuan dari disusunnya RDTR Kecamatan Sawit adalah untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Sawit dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Penyusunan RDTR Kecamatan Sawit tentu saja telah diselaraskan dengan perencanaan dalam RTRW Kabupaten Boyolali.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Boyolali merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam, sehingga memiliki kemungkinan untuk mengalami beberapa jenis bencana. Bencana alam yang terjadi bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Beberapa bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Boyolali adalah banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, angin topan, kekeringan dan

gempa bumi. Berikut adalah jenis bencana berdasarkan wilayah yang berpotensi.



Gambar 2. 6. Peta Rawan Bencana di Kabupaten Boyolali
Sumber: RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031

Tabel 2. 10. Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Boyolali

No	Bencana Alam	Kawasan/Wilayah
1	Banjir	Kecamatan Juwangi, Wonosamodro, Ngemplak, Nogosari, Sawit, Banyudono, Kemusu, dan Wonosegoro.
2	Banjir lahar dingin	Kecamatan Selo, Gladagsari, Musuk, Cepogo, Ampel, Boyolali dan Mojosongo.
3	Tanah longsor/ Gerakan tanah	Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Kemusu, Klego dan Musuk.
4	Letusan gunung berapi	Kecamatan Selo (Desa Suroteleng), Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk.
5	Kebakaran hutan	Kecamatan Ampel, Selo, Musuk, Cepogo, Juwangi dan Wonosegoro
6	Angin Topan	Semua kecamatan di Boyolali

No	Bencana Alam	Kawasan/Wilayah
7	Kekeringan	Kecamatan Musuk, Sambu, Nogosari, Simo, Andong, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi.
8	Gempa bumi	Kecamatan Selo, Musuk, Cepogo, Banyudono dan Sawit.

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali

2.1.4. Demografi

Kondisi demografis Kabupaten Boyolali dapat dianalisis dengan melihat dua indikator utama yaitu jumlah penduduk dan struktur penduduk sebagai berikut.

2.1.4.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali saat ini (tahun 2020) mencapai 1.066.409 jiwa yang tersebar di 22 kecamatan. Jika dihitung berdasarkan peningkatan per tahun, maka jumlah penduduk tumbuh rata-rata 1%. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Boyolali terhitung sebesar yaitu 986.346 jiwa dan meningkat secara perlahan-lahan ke angka 1.066.409 pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan penduduk sangat rendah, tapi hal ini tetap menjadi bahan analisis karena akan berpengaruh terhadap berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan.

Tabel 2. 11. Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Per Kecamatan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

NO	KECAMATAN	2016		2017		2018		2019		2020	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SELO	14.547	13.746	14.670	13.893	14.819	13.909	15.244	14.319	15.503	14.595
2	AMPEL	39.047	38.960	39.119	39.170	40.159	40.094	20.317	20.281	20.508	20.536
3	CEPOGO	28.061	27.792	28.294	28.034	29.232	28.941	30.071	29.648	30.328	30.214
4	MUSUK	29.269	28.969	29.472	29.379	30.176	29.887	16.199	15.996	16.223	16.231
5	BOYOLALI	33.767	34.253	33.732	34.328	34.915	35.585	35.761	36.382	36.244	36.945
6	MOJOSONGO	26.702	26.822	26.985	27.317	27.900	28.179	28.961	29.147	29.385	29.731
7	TERAS	22.894	23.007	23.007	23.109	23.856	24.026	24.718	24.741	24.965	25.087
8	SAWIT	15.500	15.677	15.492	15.729	16.119	16.263	16.393	16.566	16.166	16.404
9	BANYUDONO	24.819	24.975	24.734	24.851	25.656	25.792	26.323	26.309	26.387	26.559
10	SAMBI	22.361	22.615	22.439	22.717	23.068	23.442	23.817	24.048	23.779	24.115
11	NGEMPLAK	41.781	41.057	41.930	41.211	43.516	42.898	44.637	43.864	45.502	44.875
12	NOGOSARI	33.309	32.575	33.729	33.199	35.263	34.794	36.551	35.905	36.440	36.247
13	SIMO	23.480	23.097	23.595	23.343	24.538	24.177	25.286	24.933	25.532	25.400
14	KARANGGEDE	21.744	21.582	21.889	21.709	22.694	22.611	23.303	23.139	23.437	23.346
15	KLEGO	23.187	22.468	23.478	22.771	23.989	23.401	24.958	24.146	25.149	24.429
16	ANDONG	29.526	29.236	29.717	29.492	30.296	30.118	31.013	30.750	31.196	31.090
17	KEMUSU	21.816	21.122	21.986	21.459	22.677	21.881	17.668	16.972	17.920	17.241
18	WONOSEGORO	27.108	26.469	27.523	27.066	28.387	27.736	19.754	19.331	19.944	19.648
19	JUWANGI	16.788	16.218	16.918	16.441	17.789	17.251	18.090	17.463	18.182	17.584
20	GLADAGSARI							20.971	20.876	21.300	21.329
21	TAMANSARI							14.740	14.485	14.915	14.860
22	WONOSAMODRO							15.340	14.910	15.630	15.308
Jumlah		495.706	490.640	498.709	495.218	515.049	510.985	530.115	524.211	534.635	531.774

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Boyolali tersebut tersebar hampir merata di 22 kecamatan meskipun dari sisi kepadatan sangat variatif. Tabel di bawah menunjukkan bahwa tiga kecamatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Boyolali, Kecamatan Banyudono, dan Kecamatan Ngemplak yang memiliki kepadatan lebih dari 2000 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan empat kecamatan memiliki kepadatan rendah yaitu sekitar 400-500 jiwa per kilometer yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Kemusu, Kecamatan Wonosamodro, dan Kecamatan Juwangi.

Tabel 2. 12. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali Dirinci per Kecamatan Tahun 2020

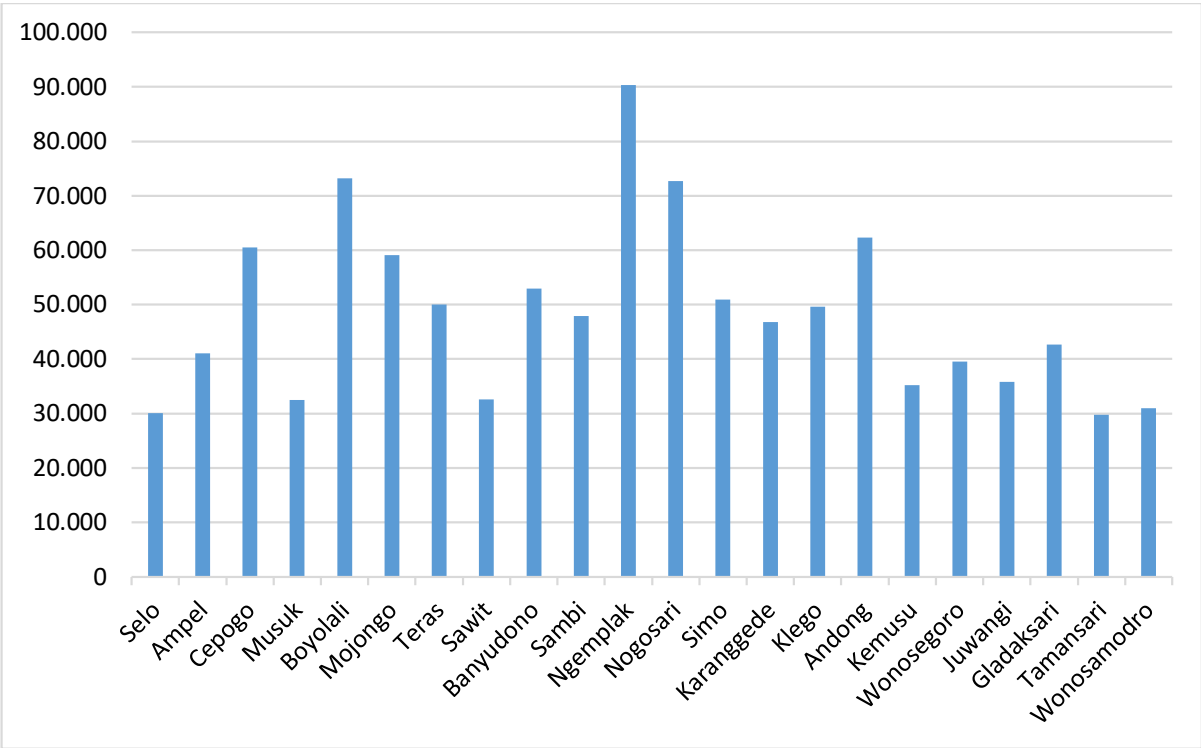
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Selo	30.098	537
2	Ampel	41.044	1.351
3	Cepogo	60.542	1.142
4	Musuk	32.454	1.063
5	Boyolali	73.189	2.788
6	Mojosongo	59.116	1.362
7	Teras	50.052	1.672
8	Sawit	32.570	1.890
9	Banyudono	52.946	2.086
10	Sambi	47.894	1.030
11	Ngemplak	90.377	2.346
12	Nogosari	72.687	1.320
13	Simo	50.932	1.060
14	Karanggede	46.783	1.120
15	Klego	49.578	956
16	Andong	62.286	1.142
17	Kemusu	35.161	432
18	Wonosegoro	39.592	764
19	Juwangi	35.766	447
20	Gladagsari	42.629	710
21	Tamansari	29.775	863
22	Wonosamodro	30.938	526
	Jumlah	1.066.409	1.051

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Tingkat kepadatan penduduk per kecamatan berbanding lurus dengan distribusi penduduk seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Boyolali dan Kecamatan Nogosari menjadi tiga kecamatan dengan penduduk terbanyak di Boyolali dengan total sekitar 22% dari total keseluruhan penduduk atau berjumlah 236.253 jiwa dari total 1.066.409. Berikutnya, tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cepogo, Kecamatan Mojosongo, dan Kecamatan Andong berada di kelompok berikutnya dengan distribusi masing-masing kecamatan lebih dari 5% dari total seluruh penduduk Boyolali. Grafik di bawah juga menunjukkan bahwa tiga kecamatan hanya memiliki proporsi kurang dari 3% dari total keseluruhan penduduk Boyolali yaitu Kecamatan Selo, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro.

Grafik 2. 1. Distribusi Penduduk di Tiap Kecamatan Tahun 2020



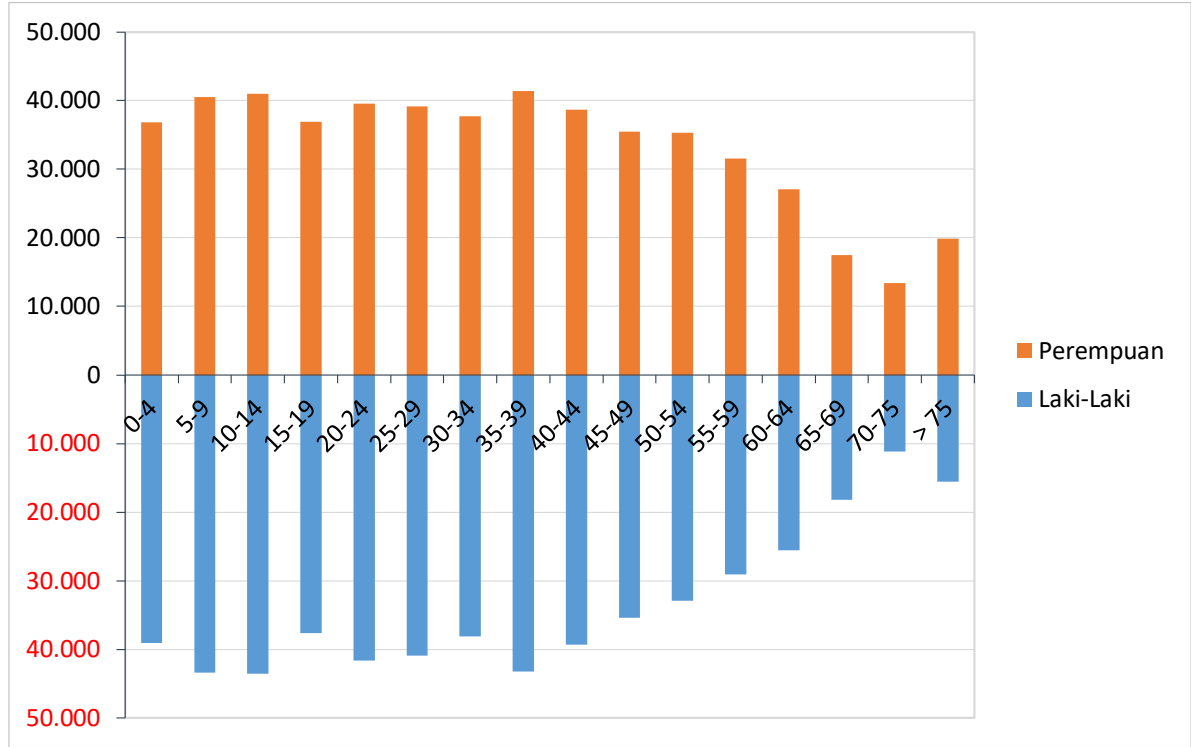
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Dari aspek demografis, dapat disimpulkan beberapa poin yaitu: pertama, pertumbuhan penduduk secara keseluruhan tergolong rendah yaitu hanya sekitar 1% per tahun. Hal ini tentu bisa menjadi peluang dan juga tantangan bagi perencanaan pembangunan ke depan. Kedua, kepadatan penduduk di tiap kecamatan sangat tidak merata dan terkonsentrasi di beberapa kecamatan sehingga perlu menjadi acuan bagi perencanaan kebijakan terutama yang menyangkut pembangunan manusia. Ketiga, dari sisi distribusi, penduduk Boyolali tersebar secara tidak merata di antara 22 kecamatan dan terkonsentrasi dengan banyak di 6 kecamatan. Oleh karena itu, data ini menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

2.1.4.2. Struktur Penduduk

Kondisi demografi juga dapat dilihat dari sisi struktur penduduk yaitu jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur. Berdasarkan data tahun 2020, komposisi penduduk di Boyolali adalah penduduk usia 0-14 tahun mencapai 238.765 jiwa atau sekitar 22,39% dari total penduduk Boyolali yaitu 1.066.409 jiwa. Kelompok berikutnya yaitu usia produktif antara 15-29 tahun mencapai 243.329 jiwa atau 22,82% dari total keseluruhan. Kelompok usia 30 hingga 49 tahun juga memiliki jumlah cukup lebih banyak yaitu 311.610 jiwa atau 29,06% disusul kelompok usia 50-64 sebanyak 176.973 jiwa atau 16,60%. Terakhir kelompok usia lebih dari 65 juga memiliki jumlah sebanyak 95.732 jiwa atau 8,98% dari total seluruh penduduk.

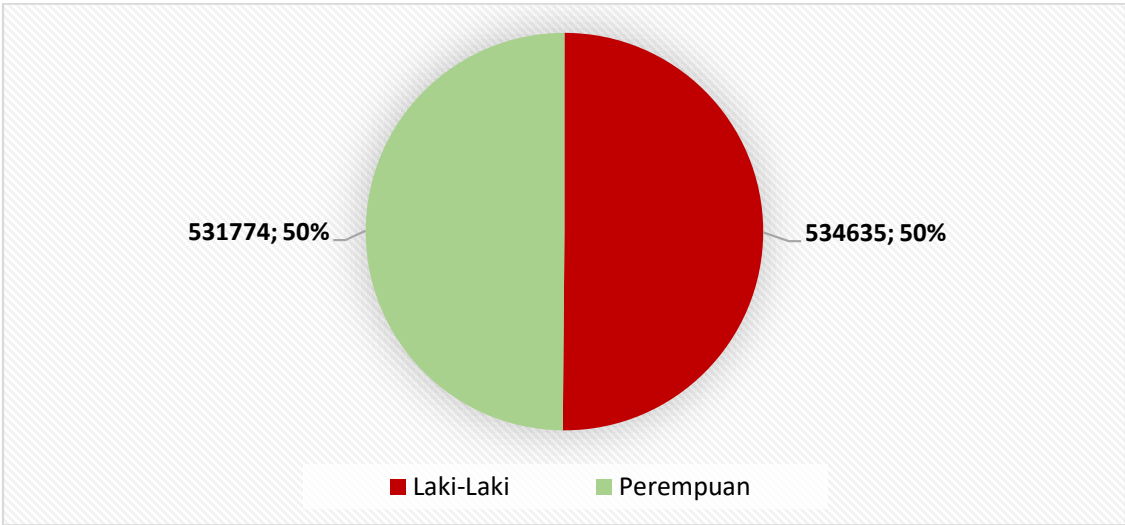
Grafik 2. 2. Struktur Penduduk Kabupaten Boyolali Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, 2021

Struktur piramida di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan distribusi penduduk Kabupaten Boyolali merata di semua umur. Struktur kependudukan tersebut juga dapat dilengkapi dengan analisis piramida penduduk berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Grafik 2. 3.Struktur Penduduk Kabupaten Boyolali
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Seperti terlihat pada grafik di atas, penduduk Kabupaten Boyolali didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan proporsi sebanyak 50,13%. Sedangkan, penduduk perempuan hanya terpaut sedikit di bawahnya yaitu 49,87%. Secara keseluruhan, bisa disimpulkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Boyolali berdasarkan jenis kelamin cukup berimbang.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat berisi tentang capaian-capaian makro pembangunan yang mengindikasikan tentang kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat. Aspek ini terdiri atas fokus pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Detail tentang analisis pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut.

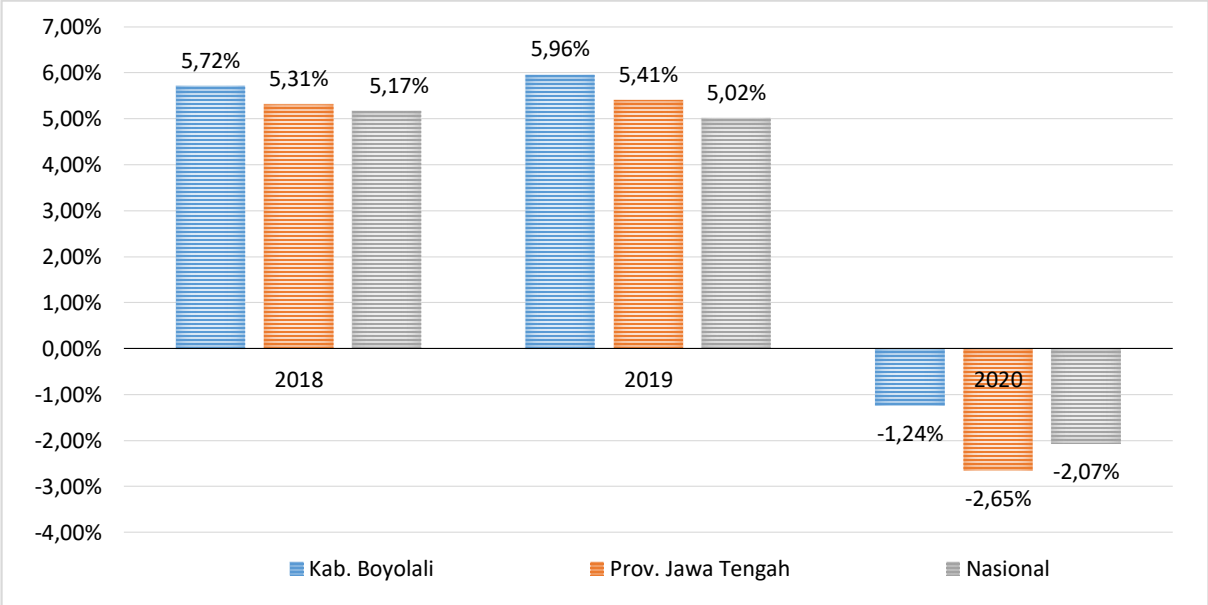
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Hal tersebut dapat diindikasikan oleh beberapa indikator makro seperti PDRB, Laju Inflasi, Indeks Gini, dan IPM.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali selama tahun 2018-2020 memiliki trend fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali tahun 2019 naik sebesar 5,96% dari 5,72% dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,24% akibat pandemi Covid-19.

Grafik 2. 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Boyolali
Tahun 2018-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali relatif masih tinggi. Hal tersebut karena sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Boyolali cukup tinggi dan skala pengembangan industri pengolahan yang cukup berkembang. Namun, kondisi perekonomian baik skala daerah hingga nasional mengalami kontraksi cukup dalam akibat kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020. Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), *work from home*, *study at home*, pelarangan mudik dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar membawa dampak cukup signifikan terhadap seluruh sektor perekonomian.

Tabel 2. 13. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Tahun Dasar 2010 di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Perubahan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Perubahan
2016	25.756.715,67	9,29	19.139.359,22	5,33
2017	27.914.646,55	8,38	20.248.849,44	5,80
2018	30.258.836,39	8,40	21.406.268,93	5,72
2019	32.704.381,16	8,08	22.681.097,81	5,96
2020	32.671.750,14	-0,10	22.399.517,50	-1,24

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021

Selama periode tahun 2016-2020, nilai total PDRB ADHB dan PDRB ADHK selalu mengalami pertumbuhan. Nilai PDRB ADHB terhitung

sebesar Rp 25,75T pada tahun 2016 naik sebesar Rp 32,67T pada tahun 2020. Kenaikan PDRB ADHB sejalan dengan kenaikan nilai PDRB ADHK dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,31% per tahun dari Rp 19,13T pada tahun 2016 menjadi Rp 22,39T pada tahun 2020. Meskipun demikian, baik PDRB ADHB maupun PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami kontraksi masing-masing -0,10 dan -1,24 dibanding tahun sebelumnya. Kontraksi PDRB ADHB pada tahun 2020 didominasi oleh penurunan yang signifikan sebesar 55% pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Begitupun kontraksi PDRB ADHK pada tahun 2020 didominasi oleh penurunan yang signifikan sebesar 57,88% pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan.

Jika dilihat dari persebaran lapangan usaha, PDRB Kabupaten Boyolali dihasilkan terutama dari tiga sektor yaitu Industri Pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta Perdagangan Besar maupun Eceran. Ketiga lapangan usaha tersebut mampu menghasilkan sekitar 63,08% dari total keseluruhan PDRB Kabupaten Boyolali. Lapangan usaha lain yang juga berkontribusi besar terhadap perekonomian Boyolali adalah Konstruksi, Pendidikan, dan Transportasi dan Pergudangan dengan total nilai PDRB sebesar 18,6% dari PDRB keseluruhan. Sektor-sektor tersebut merupakan lapangan usaha unggulan yang menjadi penopang ekonomi Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 14. Distribusi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persen)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,50	22,25	22,16	21,62	22,49
B	Pertambangan dan Penggalian	4,28	4,26	4,12	4,03	4,26
C	Industri Pengolahan	28,09	28,66	28,58	28,79	30,14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05
F	Konstruksi	6,48	6,57	6,71	6,89	6,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	12,79	12,75	12,69	12,67	12,42

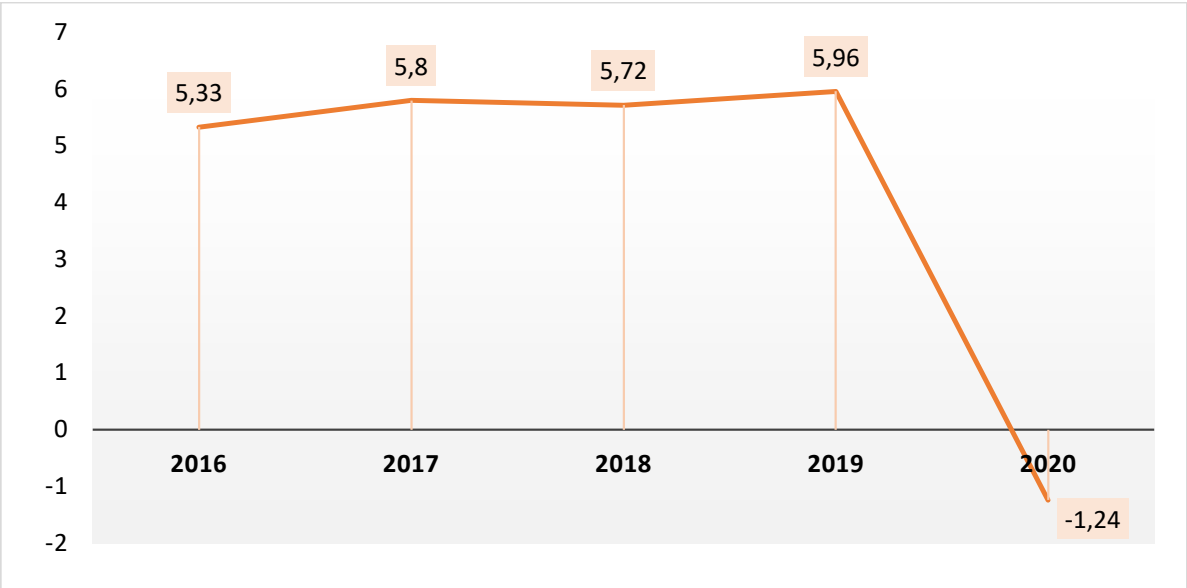
No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	5,22	5,35	5,44	5,50	3,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,60	2,59	2,57	2,59	2,48
J	Informasi dan Komunikasi	2,24	2,45	2,60	2,76	3,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,36	2,32	2,24	2,32
L	Real Estate	1,08	1,10	1,10	1,10	1,09
M, N	Jasa Perusahaan	0,35	0,37	0,39	0,41	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,64	2,53	2,43	2,46
P	Jasa Pendidikan	5,67	5,94	6,06	6,21	6,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95	0,98	1,00	1,01	1,11
R,S, T,U	Jasa lainnya	1,64	1,67	1,68	1,69	1,59
Total Persentase		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: diolah dari data BPS Kabupaten Boyolali 2021

Jika dilihat dari pertumbuhan per sektor, PDRB dari sektor industri pengolahan selalu dominan dengan kontribusi sebesar 30,14% pada tahun 2020. Kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dari 23,50% menjadi 22,49%. Sektor lain yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, dan jasa lainnya. Sebaliknya, terdapat juga beberapa sektor yang kontribusinya terhadap PDRB meningkat dibanding tahun 2019 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan

asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

**Grafik 2. 5. Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010
Atas Dasar Harga Konstan Secara Total Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang berimbas pada berbagai sektor yang terjadi secara merata bukan hanya di Kabupaten Boyolali saja melainkan juga daerah lain di Indonesia.

Jika dilihat pertumbuhan per sektor, maka terdapat sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif dan juga positif. Beberapa sektor yang tercatat mengalami pertumbuhan negatif antara lain pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, serta jasa lainnya.

Tabel 2. 15. Pertumbuhan PDRB Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016 – 2020 (%)

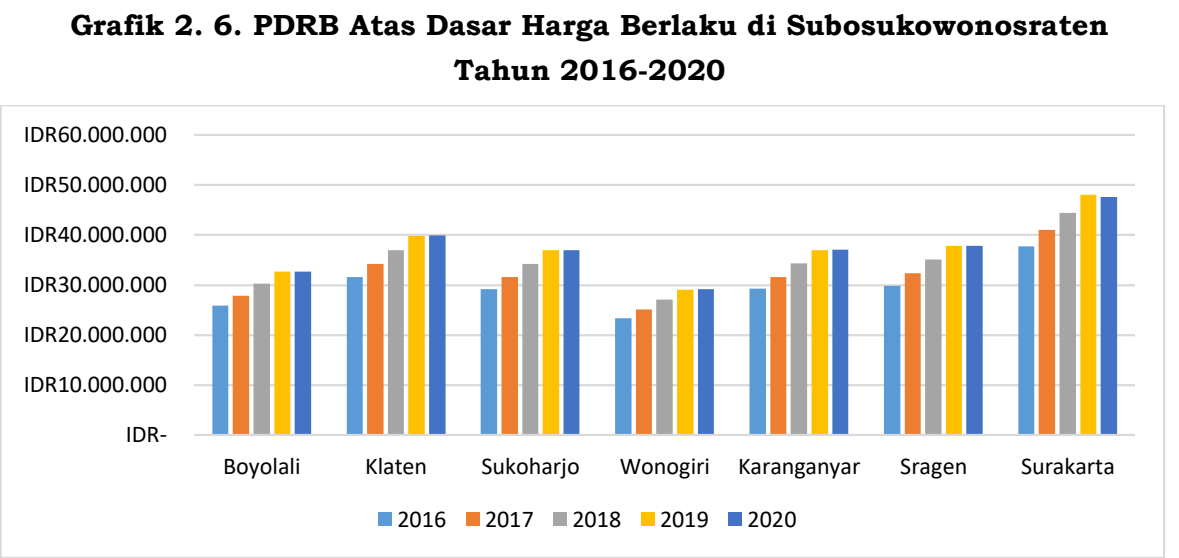
No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,22	0,69	4,66	3,36	2,01
2	Pertambangan dan Penggalian	(0,51)	4,59	3,66	4,49	2,47

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
3	Industri Pengolahan	5,08	7,86	5,09	7,06	1,83
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,09	4,83	5,29	5,30	-2,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,80	4,67	(10,76)	13,37	-0,01
6	Konstruksi	7,46	7,13	5,90	5,79	-3,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,38	5,50	5,55	5,55	-3,72
8	Transportasi dan Pergudangan	6,81	7,91	7,93	5,71	-42,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,52	6,56	6,41	7,62	-5,55
10	Informasi dan Komunikasi	9,57	14,35	14,14	13,49	18,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,41	6,28	3,19	2,70	3,12
12	Real Estate	8,64	7,06	5,64	6,19	-1,24
13	Jasa Perusahaan	8,82	9,46	9,97	10,49	-4,73
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,30	2,19	2,49	2,40	-0,02
15	Jasa Pendidikan	9,62	8,10	8,02	7,89	-0,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,15	9,29	9,89	7,10	6,37
17	Jasa lainnya	6,64	8,25	8,09	8,17	-7,09
	Laju Pertumbuhan Total	5,33	5,80	5,72	5,96	-1,24

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Kondisi perekonomian Kabupaten Boyolali juga dapat dilihat dari perbandingannya dengan PDRB kabupaten lain di Subosukowonosraten seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini. Jumlah PDRB ADHB Kabupaten Boyolali termasuk lebih rendah dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan

Kabupaten Sragen. PDRB Kabupaten Boyolali hanya lebih baik dari PDRB Kabupaten Wonogiri yang relatif memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda.

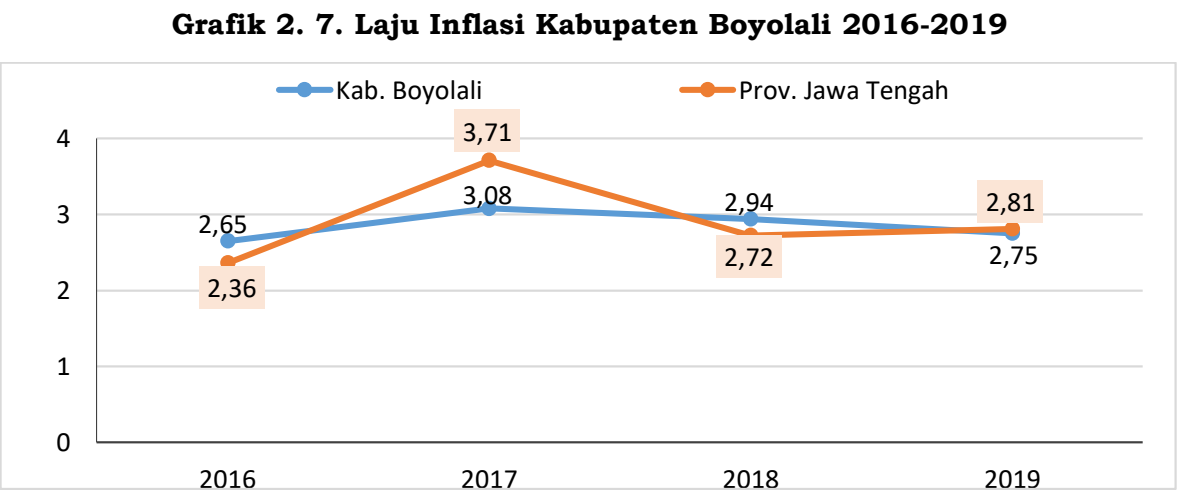


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2020

Dengan demikian, aktivitas perekonomian di Kabupaten Boyolali seperti tergambar dari nilai PDRB masih perlu ditingkatkan ke titik yang maksimal. Kabupaten Boyolali masih memiliki banyak sektor potensial yang dapat mendorong peningkatan PDRB. Data-data ini perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dokumen perencanaan lima tahunan.

2.2.1.2. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai tolok ukur bagi kemampuan finansial daerah dan kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi dapat dinilai menggunakan indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Berikut adalah kondisi laju inflasi Kabupaten Boyolali.



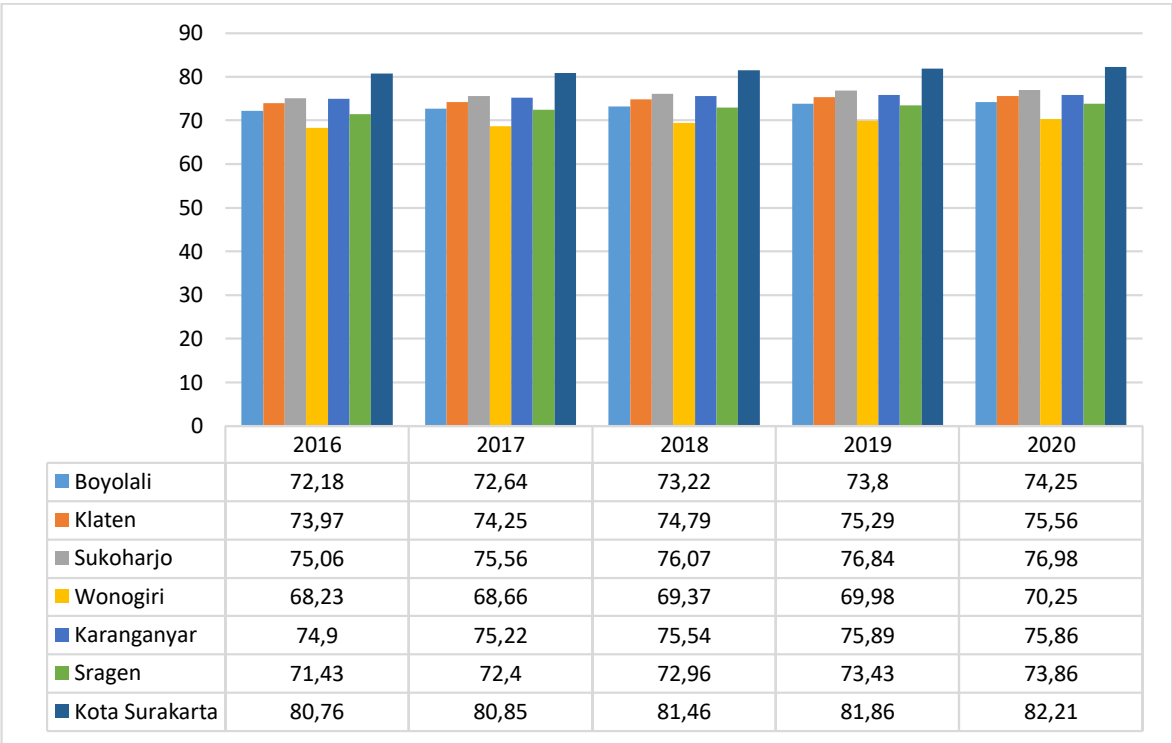
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah, 2020

Tingkat inflasi Kabupaten Boyolali selama periode tahun 2016-2019 relatif cukup baik yakni diangka 2-3%. Tingkat inflasi Kabupaten Boyolali relatif masih lebih baik dibanding dengan inflasi Jawa Tengah. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 3,08%, kemudian turun menjadi 2,75% pada tahun 2019.

2.2.1.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Aspek kesejahteraan penduduk juga dapat dilihat dari capaian kualitas pembangunan manusia yaitu melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM menunjukkan capaian pembangunan manusia pada tiga aspek utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Secara keseluruhan, capaian IPM Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir meskipun masih dibawah capaian IPM beberapa kabupaten sekitar seperti ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 8. Perbandingan IPM Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020



Sumber: diolah dari BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

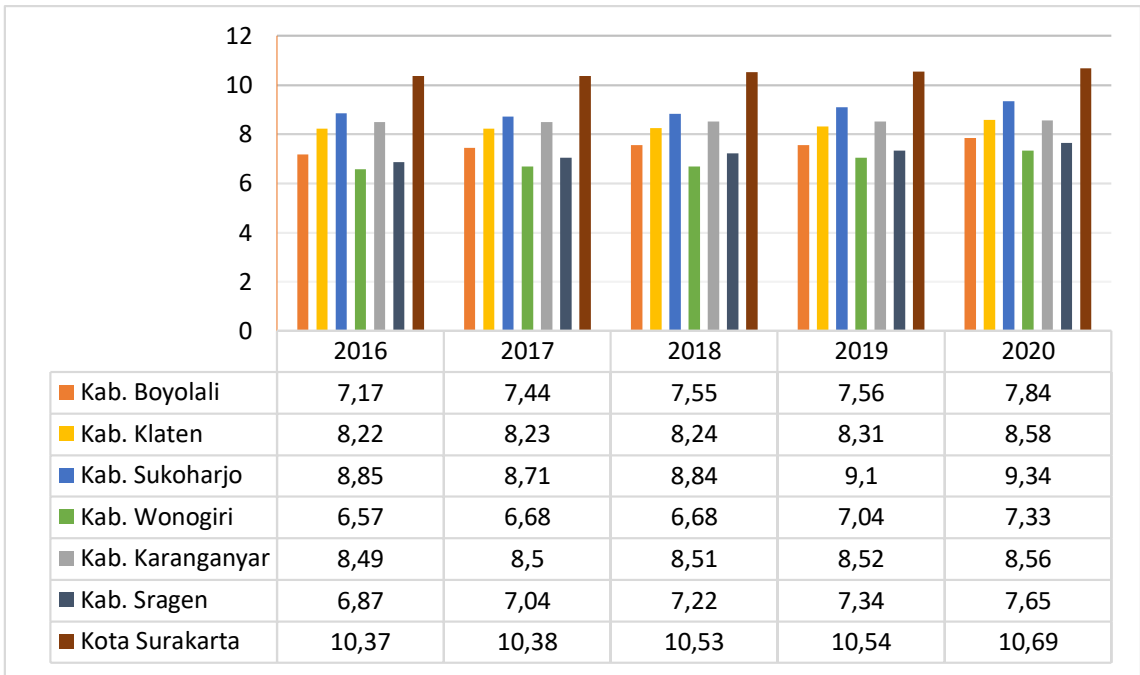
Grafik di atas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan yang cukup besar 0,41 poin per tahun dari 72,18 pada tahun 2016 menjadi 74,25 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Subosukowonosraten, IPM Boyolali masih berada di bawah IPM Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar, serta Kota Surakarta yang sudah mencapai angka 75 ke atas. Artinya, kualitas pembangunan manusia pada aspek pendidikan,

kesehatan, dan pendapatan keluarga Kabupaten Boyolali masih tertinggal jika dibandingkan dengan 4 daerah tersebut. Sebaliknya, IPM Boyolali masih sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen yang masih berada di angka 73 ke bawah. Dengan kondisi geografis yang lebih baik dan kawasan yang sangat strategis tentunya IPM Kabupaten Boyolali memiliki peluang untuk bisa setara atau lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain.

2.2.1.3.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Capaian rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun efektif yang dicapai penduduk untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, mulai jenjang SD hingga SMA (12 Tahun). Semakin tinggi, capaian RLS, maka kualitas SDM masyarakat semakin tinggi. Penghitungan tersebut tanpa memperhatikan aspek pernah tinggal kelas atau tidak. Selama periode 5 tahun (2016-2020), capaian RLS Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari 7,17 ke 7,84. Capaian tersebut masih tergolong kurang karena masih berada pada angka 7. Artinya rata-rata penduduk dapat lulus sekolah selama 7 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP.

Grafik 2. 9. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Jika dibandingkan dengan capaian RLS dengan daerah lain di Subosukowonosraten, maka capaian RLS Kabupaten Boyolali terendah ketiga setelah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Capaian tertinggi yaitu Kota Surakarta sebesar 10,69 atau setara kelas 1 SMA. Tingginya capaian RLS Kota Surakarta dikarenakan fasilitas publik sebagai daerah kota lebih memadai dibanding dengan daerah kabupaten.

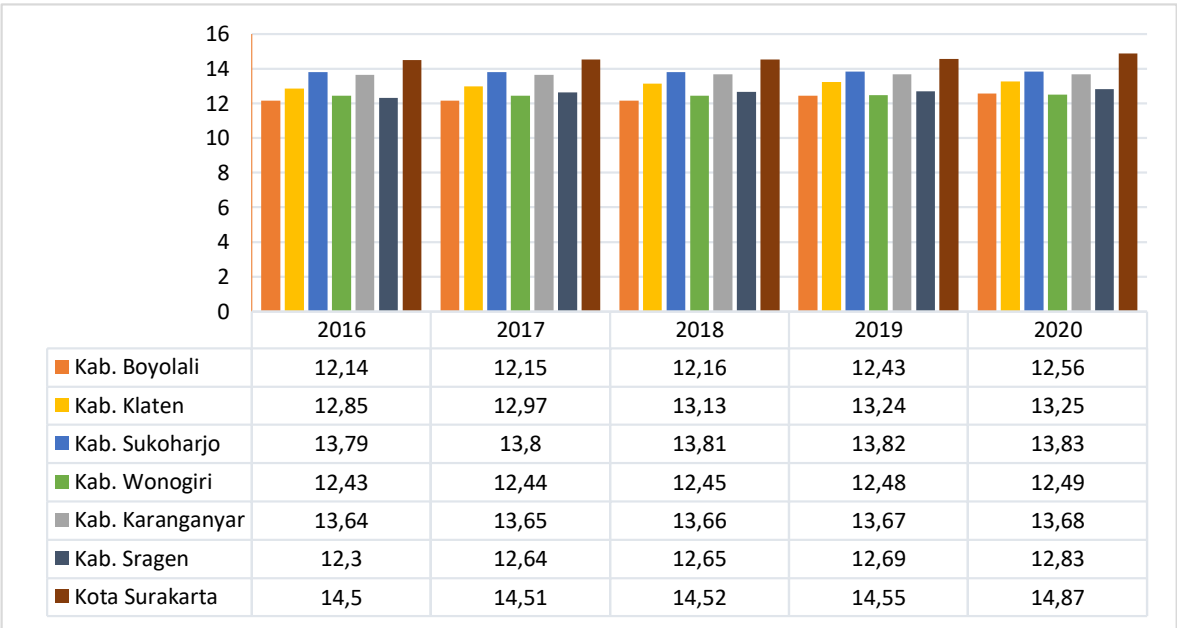
Capaian tertinggi kedua yaitu Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,34 atau setara kelas 3 SMP. Pada tahun 2020, capaian RLS Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali selisih sekitar 2 tahun dengan nilai masing-masing 9,34 dan 7,84. Selisih tersebut dapat dikejar dengan intervensi kebijakan pendidikan selama periode pembangunan 5 tahun kedepan. Selain itu, mempertimbangkan program wajib belajar 9 tahun, maka capaian RLS Kabupaten Boyolali minimal harus bisa memenuhi standar minimal tersebut.

2.2.1.3.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah yang diharapkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang. Selama periode 5 tahun (2016-2020), capaian HLS Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari 12,13 menjadi 12,56. Capaian tersebut tergolong kurang tinggi karena masih berada pada angka 12 atau setara dengan 3 SMA.

Grafik 2. 10. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020



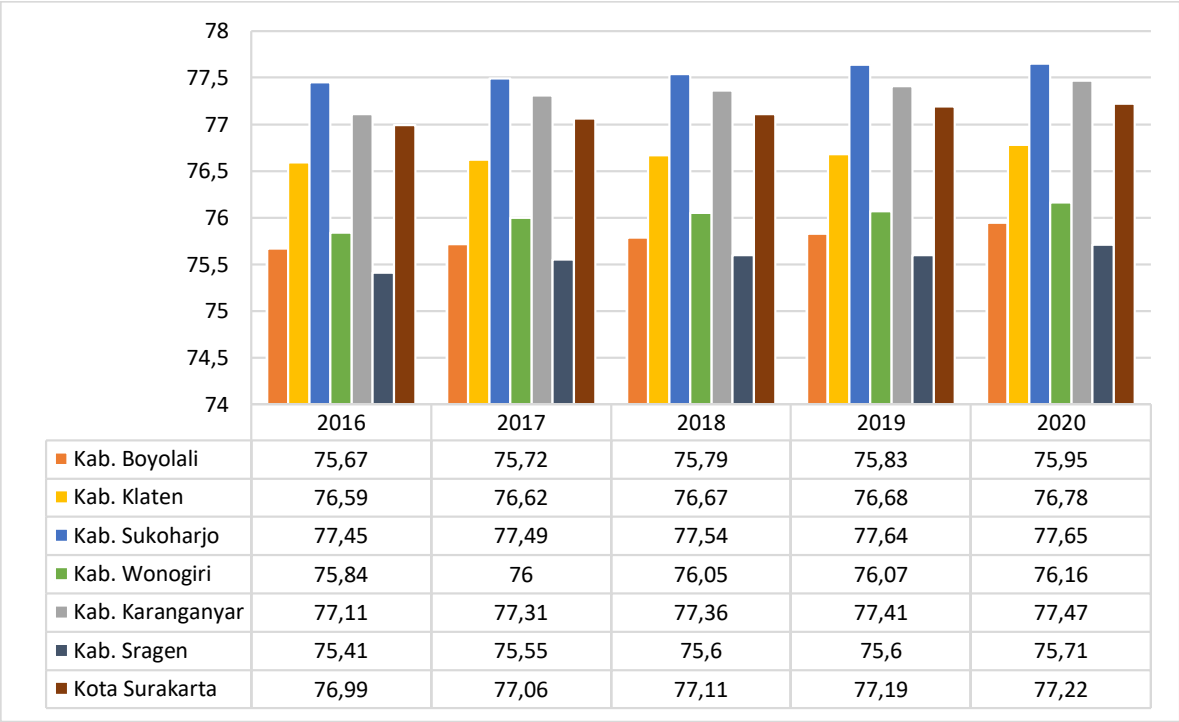
Grafik diatas menunjukkan bahwa capaian HLS Kabupaten Boyolali berada pada posisi terendah kedua setelah Kabupaten Wonogiri. Capaian HLS tertinggi diperoleh oleh Kota Surakarta, kemudian disusul Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2020, rata-rata capaian HLS pada tujuh wilayah tersebut pada angka 13-14 tahun, hanya ada dua daerah yang berada pada angka 12 tahun yaitu Kabupaten Boyolali sebesar 12,56 dan Kabupaten Wonogiri 12,49. Artinya, capaian HLS Kabupaten Boyolali hampir sama dengan Kabupaten Wonogiri yaitu

setara kelas 3 SMA. Untuk mencapai daya saing SDM yang berkualitas, maka angka HLS harus terus ditingkatkan.

2.2.1.3.3. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator untuk mengevaluasi kinerja pelayanan kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin tinggi UHH, maka semakin tinggi kualitas kesehatan masyarakat. UHH Kabupaten Boyolali selama periode 5 tahun (2016-2020) mengalami peningkatan dari 75,67 menjadi 75,95. Meskipun peningkatannya kurang terlalu signifikan, capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan seperti pelayanan kesehatan, kondisi ekonomi, budaya dan pendidikan masyarakat.

Grafik 2. 11. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020

Dari 7 wilayah Subosukowonosraten, daerah yang memiliki UHH terendah yaitu Kabupaten Sragen sebesar 75,71 kemudian disusul Kabupaten Boyolali sebesar 75,95. Keduanya memiliki selisih yang tidak terpaut jauh, untuk itu selama periode pembangunan kedepan maka UHH Kabupaten Boyolali bisa untuk lebih ditingkatkan. Sedangkan UHH tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai sebesar 77,65, kemudian disusul Kabupaten Karanganyar sebesar 77,47 dan Kota Surakarta sebesar 77,22. Jika dibanding dengan Kabupaten Boyolali, maka UHH Kabupaten Boyolali memiliki selisih 2 tahun dengan UHH Kabupaten Sukoharjo.

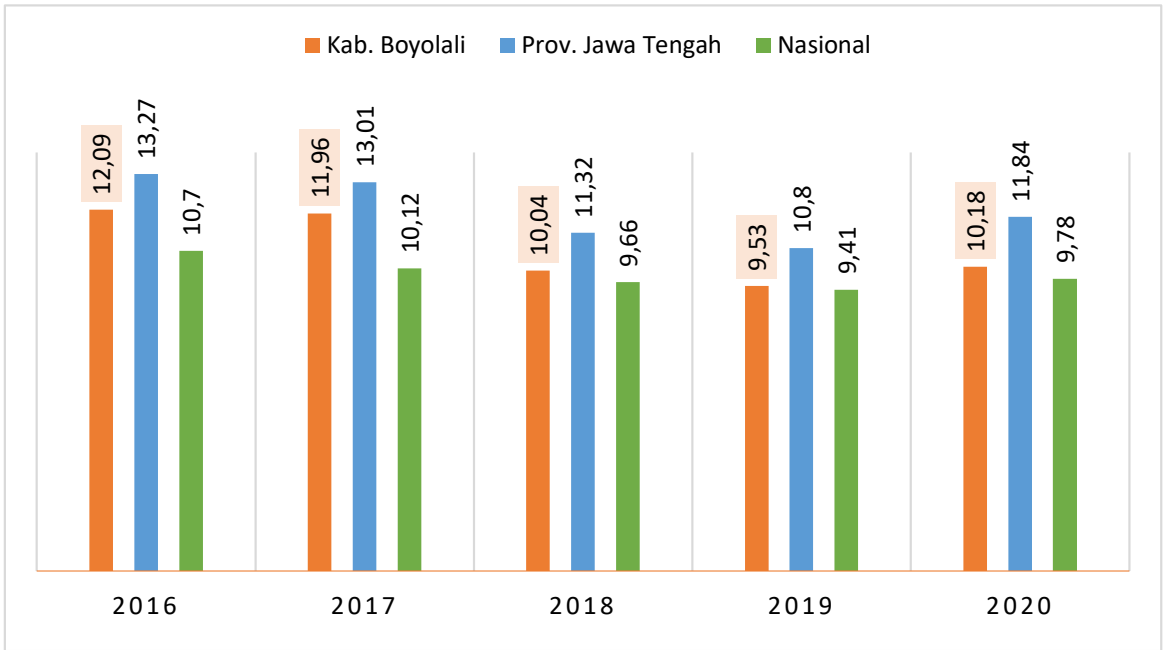
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial berisi tentang analisis terhadap indikator-indikator makro pembangunan seperti Angka Kemiskinan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Balita Gizi Kurang, dan Persentase Balita Pendek (stunting).

2.2.2.1. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Selama periode 5 tahun (2015-2019), persentase kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengalami penurunan sekitar 3%.

Grafik 2. 12. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

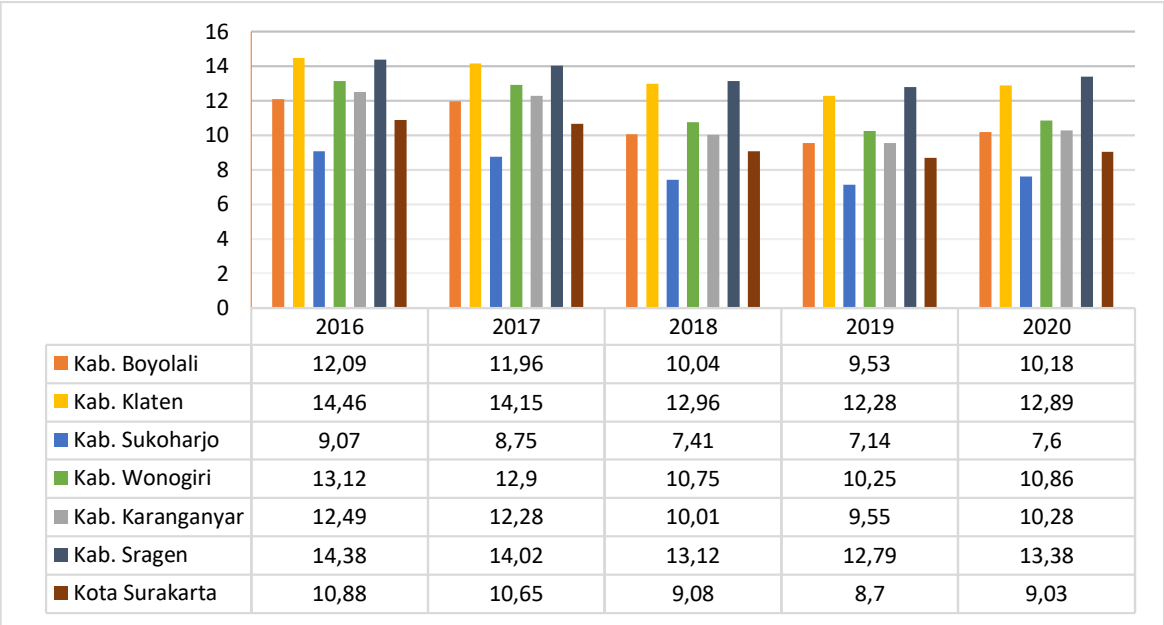


Sumber: BPS, 2021

Tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali selama tahun 2016-2019 menunjukkan trend penurunan dari 12,09% pada tahun 2016 turun menjadi 9,53% pada tahun 2019. Angka tersebut kemudian naik 0,65% atau menjadi sebesar 10,18% pada tahun 2020. Kenaikan angka kemiskinan disebabkan karena pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada hampir semua sektor perekonomian, sehingga berpengaruh terhadap persentase kenaikan angka kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali masih lebih rendah sekitar 1% selama periode 2016-2020. Kondisi tersebut berbalik apabila dibandingkan dengan persentase kemiskinan secara nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Boyolali selalu lebih tinggi sekitar 1% dibanding rata-rata

nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa capaian persentase kemiskinan Kabupaten Boyolali masih perlu untuk terus ditingkatkan.

Grafik 2. 13. Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten/Kota Lain di Wilayah Subosukowonosraten Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Meskipun persentase kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan selama periode 2016-2019, namun jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Subosukowonosraten, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Boyolali masih berada dibawah Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta. Artinya, dari 7 wilayah Subosukowonosraten, Kabupaten Boyolali menempati posisi terendah ketiga, kemudian disusul Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Pada tahun 2020, persentase kemiskinan di seluruh wilayah Subosukowonosraten mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Persentase kenaikan kemiskinan terbesar pada Kabupaten Karanganyar sebesar 0,73%, kemudian disusul Kabupaten Boyolali sebesar 0,65%. Sedangkan Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan kemiskinan relatif rendah yakni sebesar 0,46%. Tingginya penambahan angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali mengindikasikan perlu adanya upaya lebih untuk menekan angka tersebut. Diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder untuk mengintervensi angka kemiskinan di berbagai sektor.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Garis Kemiskinan (GK) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Seseorang dinyatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. GK diukur

dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GK selalu naik setiap tahunnya mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan dan bukan makanan. GK Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar Rp 347.520 per kapita per bulan atau sekitar Rp 4.170.240 per orang per tahun.

Tabel 2. 16. Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Garis Kemiskinan (GK)	293.405	304.575	332.996	347.520
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,96	1,26	1,02	1,30
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,53	0,25	0,14	0,23

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Boyolali selama periode tahun 2017-2019 menunjukkan tren menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Namun, kondisi tersebut mengalami peningkatan saat terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020, sehingga mengalami kenaikan sebesar 1,30 untuk P1 dan 0,23 untuk P2.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga menjabarkan tentang indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi seni budaya dan olahraga di Kabupaten Boyolali. Beberapa data yang di analisis meliputi persentase cagar budaya yang dilestarikan, kegiatan seni budaya yang diselenggarakan, berbagai sarana seni budaya yang tersedia, prestasi olahraga, klub olahraga, dan sarana olahraga yang ada di Kabupaten Boyolali.

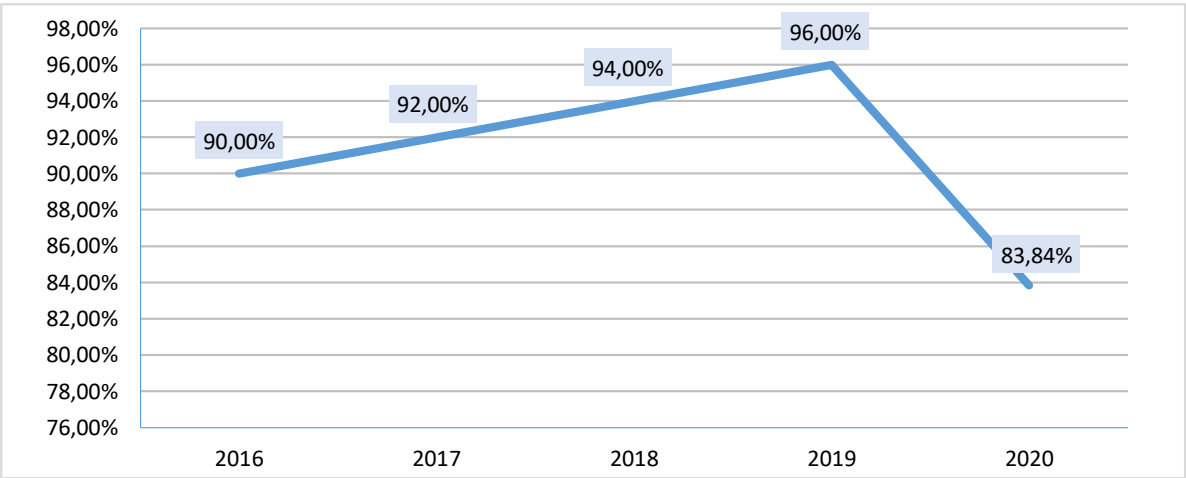
2.2.3.1. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) budaya adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Dengan demikian, budaya adalah suatu kebiasaan, adat istiadat dan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kapanpun (jangka panjang). Budaya diciptakan sekelompok yang mendiami wilayah tertentu dengan tujuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik dan menjadi ciri khas dari kelompok yang bersangkutan. Adapun budaya yang ada di Boyolali

diantaranya Sedekah Gunung, Saparan Pengging, Buka Luwur, Padusan Sawit, Padusan Pengging, Kirab Budaya dan sebagainya.

Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki cagar budaya yang sudah terdaftar dan ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Berikut persentase cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Boyolali tahun 2015-2019.

Grafik 2. 14. Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian kinerja pelestarian cagar budaya Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan selama periode 2016-2019 yakni mencapai 96%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 83,84%. Penurunan tersebut disebabkan karena masih adanya benda-benda cagar alam baru yang belum terdaftar atau belum diketahui kepastiannya. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan Kerjasama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang ada di Boyolali maupun di Yogyakarta.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Boyolali memiliki 2 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). *Pertama*, Tradisi Sebaran Apem Kukus Keong Mas yang digelar setiap bulan Sapar pada penanggalan Jawa. *Kedua*, Tradisi Turonggo Seto yang bercerita tentang pasukan berkuda Pangeran Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Kedua WBTB tersebut dapat berdampak pada perekonomian masyarakat karena meningkatkan kunjungan wisatawan.

Selain itu, Kabupaten Boyolali memiliki prestasi dibidang budaya diantaranya:

1. Terciptanya kreasi seni tari baru seperti Tari Kolo Krido, Tari Sekar Merapi, Tari Gotong Royong, Tari Kusuma Bangsa, Tari Boyolali Tani,

Tari Ikan Boyolali. Kreasi tersebut ditampilkan di luar negeri melalui event pengiriman Duta Seni Kabupaten Boyolali sejak tahun 2013-2019.

2. Terciptanya kreasi wayang baru seperti Wayang Religi (group kesenian/kebudayaan di Kecamatan Andong).

Tabel 2. 17. Perkembangan Seni dan Budaya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	57 kali	313 kali	258 kali	162 kali	49 kali
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	9 sarana	9 sarana	9 sarana	12 sarana	12 sarana

Sumber: Lampiran IKK pada Dokumen LPPD Kabupaten Boyolali 2016-2020

Salah satu upaya pelestarian dan pengembangan budaya melalui penyelenggaraan festival seni dan budaya secara rutin. Jumlah festival seni dan budaya di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan hampir 4 kali lipat dibanding tahun awal 2015 yakni 43 kali menjadi 162 kali pada tahun 2019. Namun, kondisi tersebut turun signifikan pada tahun 2020 yakni sebanyak 49 kali. Hal tersebut akibat kondisi pandemi Covid-19 yang dihimbau tidak menyelenggarakan festival seni secara *offline* karena berpotensi untuk mengundang kerumuman. Disisi lain, penyelenggaraan festival seni merupakan aspek penting. Selain bermanfaat untuk melestarikan budaya lokal juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, penyelenggaraan festival seni kedepan harus dikelola yang lebih inovatif sesuai perkembangan kondisi pada masyarakat.

Tabel 2. 18. Tempat Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

NO.	URAIAN
1	Joglo Mandala Krida
2	<i>Ampi theathre Banyudono</i> di Objek Wisata Pengging
3	Gedung Kapujanggan (Ngestipuro) Pengging
4	Panggung Objek Wisata Tlatar
5	Panggung terbuka Alun-Alun Kab. Boyolali
6	Simpang Lima

NO.	URAIAN
7	Pendopo Gede Kabupaten Boyolali
8	Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati
9	Taman Pandan Alas
10	Gelanggang Anuraga
11	Balai Mahesa
12	Pendapa Pracimoharjo Paras
13	Taman Kali Gede
14	Alun-alun Utara

Sumber: Lampiran IKK pada Dokumen LPPD Kabupaten Boyolali, 2020

Ketersediaan jumlah gedung seni dapat mendukung berkembangnya kegiatan seni budaya di Kabupaten Boyolali. Jumlah gedung seni mengalami peningkatan dari 5 unit pada tahun 2015 menjadi 14 unit pada tahun 2017. Dilihat dari lokasi gedung seni masih terkonsentrasi di area pusat perkotaan. Kedepan, pembangunan gedung seni dapat dilakukan diluar pusat perkotaan untuk menjangkau para pelaku seni di daerah. Selain itu, belajar dari kondisi pandemi tahun 2019 dimana para pelaku seni sangat terbatas dalam melakukan pentas, maka pengembangan seni budaya kedepan bisa mulai diarahkan ke pertunjukan secara *online*.

2.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan aspek pembangunan sumber daya manusia sekaligus sebagai sarana untuk menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda dalam meningkatkan prestasi olahraga. Pembinaan dibidang olahraga dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat diberbagai cabang olahraga serta menyediakan fasilitas pendukung seperti tenaga pelatih, sarana prasarana dan teknologi. Berikut perkembangan bidang olahraga di Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 2. 19. Perkembangan Capaian Bidang Olahraga di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No.	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Peringkat PORDA tingkat Provinsi	14	N/A	17	7	N/A
2	Jumlah klub olahraga	29	30	31	33	33
3	Jumlah lapangan olahraga	2	2	3	3	1

Sumber: Dokumen LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Pekan Olahraga Daerah (PORDA) merupakan penyelenggaraan turnamen olahraga pada level provinsi. Pada tahun 2017 dan 2020, Provinsi Jawa Tengah tidak menyelenggarakan PORDA, sehingga data peringkat PORDA Boyolali N/A. Selama periode 5 tahun (2016-2020), Kabupaten Boyolali berhasil meningkatkan prestasi peringkat PORDA dari peringkat 14 pada tahun 2016 menjadi peringkat 7 pada tahun 2019. Keberhasilan tersebut dikarenakan proses manajemen pengelolaan atlet serta menambah keikutsertaan berbagai turnamen untuk meningkatkan bakat saat bertanding. Selama periode pembangunan mendatang, peringkat PORDA bisa terus untuk ditingkatkan.

Jumlah klub olahraga di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dari 29 klub (2016) menjadi 33 klub (2020). Peningkatan tersebut tergolong cukup rendah jika dibanding dengan banyaknya variasi cabang olahraga yang ada. Rendahnya jumlah klub olahraga dikarenakan masih banyaknya klub olahraga yang belum terdaftar ke pengurus cabang dan masih banyak klub olahraga yang pasif dalam berbagai turnamen. Ke depan, pemerintah dapat meningkatkan jumlah serta keikutsertaan turnamen olahraga pada masing-masing cabang olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum berisi tentang analisis capaian kinerja pada layanan urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan. Aspek ini berhubungan erat dengan capaian penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode sebelumnya dan menjadi basis bagi perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun mendatang.

2.2.4. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

Analisis pada fokus layanan urusan pemerintahan wajib terdiri atas capaian-capaian pada layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar terdiri atas enam urusan, sedangkan layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar terdiri atas 18 urusan.

2.3.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

Layanan urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi analisis pada capaian urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan

umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

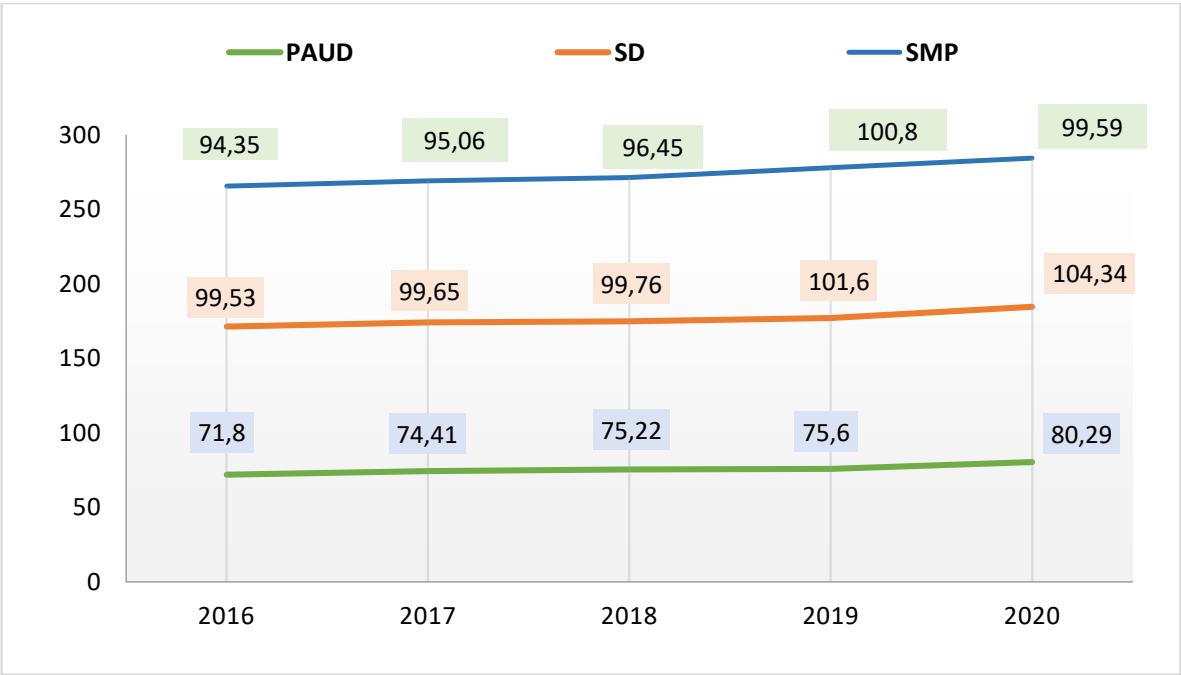
2.3.1.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sesuai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Capaian pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah rasio jumlah siswa (berapapun usianya) pada tingkat pendidikan SD/SMP/SMA sederajat dibagi jumlah penduduk berusia 3-18 tahun. APK merupakan indikator sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan. Berikut capaian APK Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020.

Grafik 2. 15. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



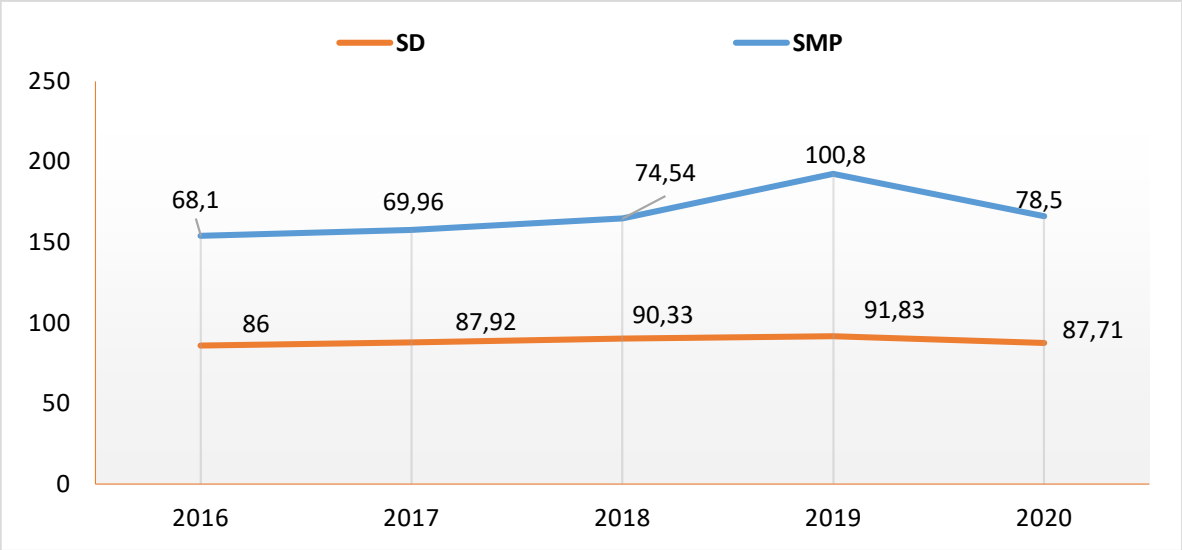
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2020

Selama periode 5 tahun (2016-2020), kondisi APK PAUD hingga SMP mengalami peningkatan. Peningkatan APK SD dan SMP relatif tidak terlalu besar, namun dari segi angka capaiannya relatif cukup bagus yaitu diatas 100%. Sedangkan capaian APK PAUD lebih rendah dibanding SD dan SMP yakni sebesar 80,29% pada tahun 2020. Dengan demikian, diperlukan intervensi khusus untuk mengembangkan jenjang pendidikan PAUD di Kabupaten Boyolali.

2. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Jika dibandingkan dengan APK, APM lebih baik karena melihat partisipasi penduduk kelompok usia sesuai standar umur pada masing-masing jenjang pendidikan. Berikut perkembangan APM Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020.

Grafik 2. 16. Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2020

Secara umum, capaian APM SD dan SMP Kabupaten Boyolali selama periode 2016-2019 mengalami tren yang meningkat. Namun, mengalami penurunan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan APK yang sudah mencapai 100%, capaian APM Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 masih dibawah 100% yaitu 87,71 untuk APM SD dan 78,5 untuk APM SMP. Untuk itu, selama periode pembangunan kedepan perlu adanya peningkatan APM pada masing-masing jenjang.

Tabel 2. 20. Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019 (%)

APM	2015		2016		2017		2018		2019	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
SD	87,66	84,30	87,23	84,71	89,36	86,34	90,03	86,69	90,74	91,77
SMP	69,25	69,5	67,99	67,08	69,19	67,93	71,54	70,93	74,81	76,54

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2020

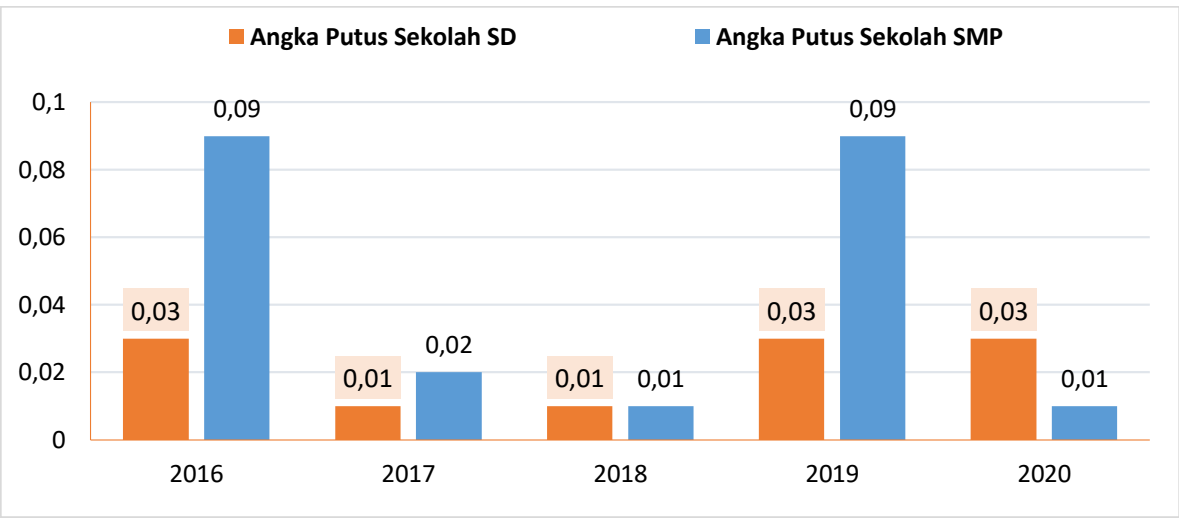
Dilihat dari persentase APM berdasarkan jenis kelamin, APM SD selama periode 2015-2019 didominasi oleh laki-laki, kecuali pada tahun 2019 lebih banyak APM perempuan. Sedangkan APM SMP persentasenya cukup fluktuatif. Namun pada tahun 2019, APM SMP paling banyak pada

perempuan yakni sebesar 76,54% dan laki-laki 74,81%. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah partisipasi perempuan baik pada jenjang SD maupun SMP. Kedepan, jumlah persentase tersebut dapat terus ditingkatkan agar baik perempuan maupun laki-laki dapat mengenyam pendidikan yang sama.

3. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang kurang baik dan sebaliknya. Berikut angka putus sekolah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Grafik 2. 17. Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



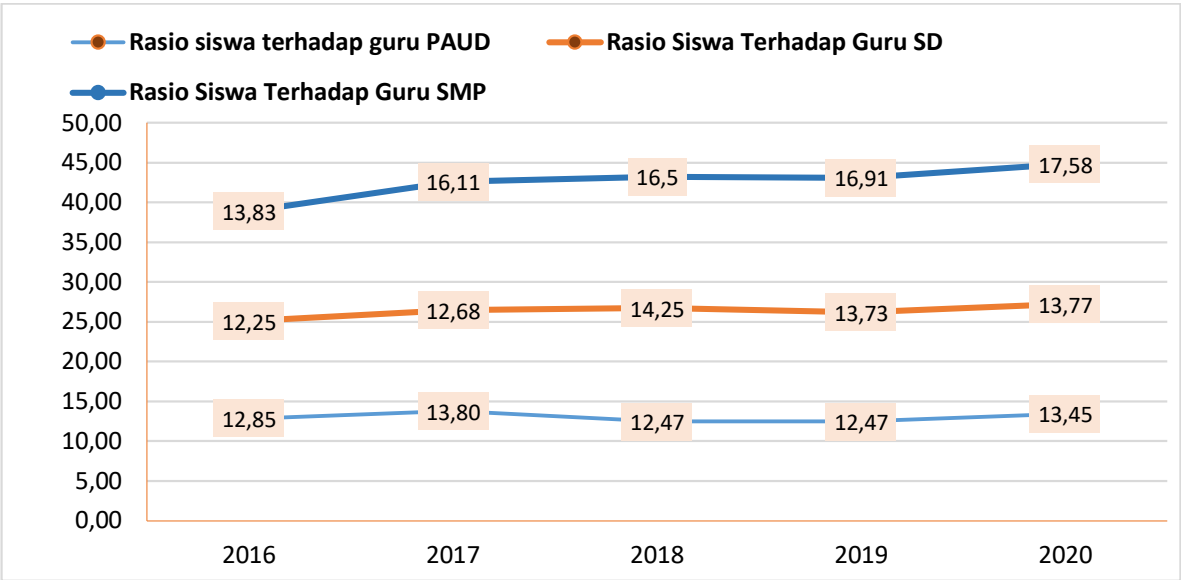
Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Secara umum capaian angka putus sekolah SD dan SMP di Kabupaten Boyolali selama periode tahun 2016-2020 tergolong baik dengan nilai dibawah 1%. Keberhasilan tersebut karena adanya pemberian beasiswa untuk siswa miskin dan penerapan sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

4. Rasio Guru-Murid

Rasio guru-murid adalah indikator yang menggambarkan beban kerja guru dan mutu pengajaran. Semakin tinggi nilai rasio, semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid, sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Berikut rasio murid-guru Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Grafik 2. 18. Perkembangan Rasio Guru-Murid SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, setiap SD tersedia satu orang guru untuk 32 peserta didik dan setiap SMP tersedia satu orang guru untuk 36 peserta didik. Adapun jumlah guru pada masing-masing jenjang pendidikan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2. 21. Jumlah Guru pada Jenjang Pendidikan PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

JUMLAH GURU		TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
PAUD	PNS	23	24	23	21	19
	Non PNS	1.664	1.595	1.632	1.641	1.331
SD	PNS	5.689	5.419	4.589	5.041	4.635
	Non PNS	2.221	2.196	2.104	2.188	2.157
SMP	PNS	2.200	2.125	2.097	1.701	2.080
	Non PNS	1.103	927	932	562	851

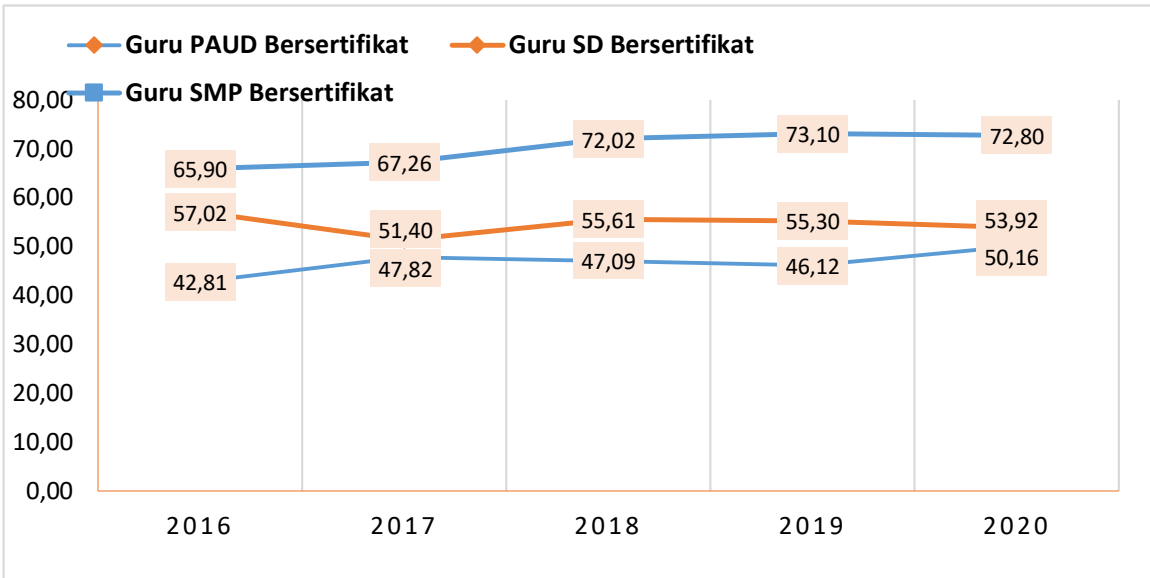
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali

Selama periode 5 tahun (2016-2020), rasio guru-murid baik jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Boyolali dalam kategori baik karena nilai rasionya diatas standar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun dari segi ketersediaan guru mencukupi, aspek kualitas pendidikan harus tetap diperhatikan. Selain itu, data Kemendikud menunjukkan bahwa sebanyak 85.650 guru akan pensiun pada tahun 2022. Untuk itu, harus ada antisipasi terkait ketersediaan guru khususnya di Kabupaten Boyolali.

5. Persentase Guru Bersertifikat

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Sertifikasi bertujuan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Berikut persentase guru bersertifikat di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Grafik 2. 19. Persentase Guru PAUD, SD dan SMP Bersertifikat di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian guru SMP bersertifikasi selama periode 5 tahun (2016-2020) jauh lebih tinggi dibanding guru SD. Masih rendahnya capaian persentase guru SD bersertifikasi disebabkan oleh banyaknya jumlah guru bersertifikasi yang masuk usia pensiun. Selain itu, untuk meningkatkan capaian keduanya diperlukan upaya peningkatan kualitas guru sebelum sertifikasi yakni dengan pembekalan materi-materi sertifikasi guru.

Adapun data guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 masing-masing jenjang pendidikan disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2. 22. Jumlah Guru yang Layak Mengajar dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 pada Jenjang Pendidikan TK, SD dan SMP di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	TK	964	1.155	1.556	1.801	1.223
2	SD	6.584	6.73	6.222	5.086	4.500
3	SMP	3.025	2.807	2.902	1.874	1.865

6. Jumlah Sekolah Formal, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan

Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan tidak hanya didukung oleh keberadaan sekolah formal, melainkan perlu adanya peran pendidikan non formal dan kesetaraan yang ada di masyarakat. Berikut jumlah sekolah formal, non formal dan pendidikan kesetaraan Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 23. Jumlah Sekolah Formal, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Bermain	215	217	219	224	220
2	Jumlah Tempat Penitipan Anak	15	15	16	16	16
3	Jumlah Satuan Paud Sejenis	65	65	66	66	65
4	Jumlah Taman Kanak-Kanak	569	570	573	574	572
5	Jumlah Sekolah Dasar	600	598	597	597	583
6	Jumlah Sekolah Menengah Pertama	92	95	96	97	98
7	Jumlah Sanggar Kegiatan Belajar	3	1	1	1	1
8	Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Mengajar	17	17	17	17	15
9	Jumlah Lembaga Pendidikan Kursus	54	54	59	60	25

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2021

Berdasarkan data diatas, jumlah sekolah formal, non formal dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Boyolali relatif cukup banyak. Jumlah Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak relatif sama yakni hampir 600 sekolah. Jumlah Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak mengalami peningkatan yang relatif sedikit yakni sekitar 1,5% selama 5 tahun. Berbeda dengan jumlah PAUD dan sejenisnya yang jumlahnya hampir stagnan setiap tahunnya yaitu sebanyak 65 sekolah. Sedangkan Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar dan Lembaga Pendidikan Kursus mengalami penurunan setiap periode 2016-2020. Untuk itu perlu upaya peningkatan jumlah dan sarana prasana sekolah baik formal, non formal dan pendidikan kesetaraan untuk mendukung kualitas pendidikan secara keseluruhan.

2.3.1.1.2. Kesehatan

Urusan bidang kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat. Kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung proses dan dinamika pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam urusan kesehatan mencakup 5 aspek diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi Upaya Kesehatan Perorangan.
- 2) Ketersediaan segala bentuk Upaya Kesehatan yang bermutu, efisien, dan terjangkau.
- 3) Ketersediaan lingkungan tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
- 4) Ketersediaan akses informasi edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya.
- 5) Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.

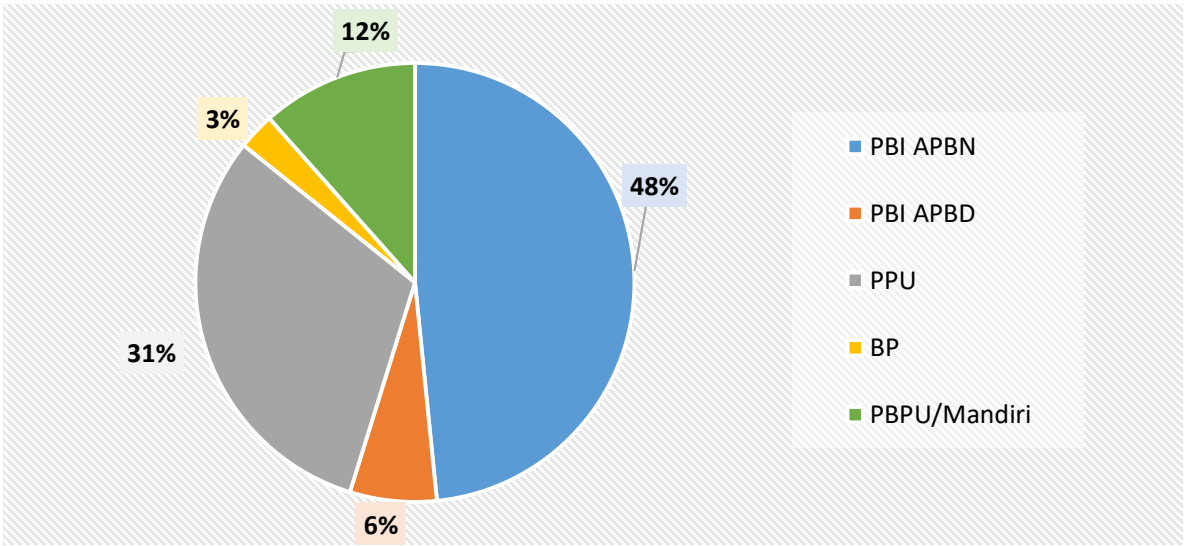
Berdasarkan 5 aspek cakupan tanggungjawab pemerintah daerah dalam urusan kesehatan, berikut data hasil capaian kinerja selama periode 2019-2020.

1. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi Upaya Kesehatan Perorangan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kebutuhan dasar kesehatan. Kepesertaan JKN dibagi menjadi 5 yaitu:

1. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBN
2. Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) APBD Provinsi dan Kabupaten
3. Pekerja Penerima Upah (PPU)
4. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri
5. Bukan Pekerja

Grafik 2. 20. Persentase Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Sampai dengan tahun 2020, persentase kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Boyolali sebesar 81,4% dari total jumlah penduduk. Persentase terbesar kepesertaan JKN berasal dari PBI APBN, kemudian disusul PPU dan PBPU, sehingga masih ada sekitar 18,6% penduduk yang belum tercover dalam layanan jaminan kesehatan nasional.

2. Ketersediaan segala bentuk Upaya Kesehatan yang bermutu, efisien, dan terjangkau

Tabel 2. 24. Jumlah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Menurut Kepemilikan Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola						Jumlah
		Kemenkes	Pem. Prov	Pem. Kab/ Kota	TNI/ POLRI	BUMN/ BUMD	Swasta	
Rumah Sakit								
1	Rumah Sakit Umum	-	-	3	-	-	8	11
2	Rumah Sakit Khusus	-	-	-	-	-	-	-
Puskemas dan Jaringannya								
1	Jumlah Puskesmas Rawat Inap	-	-	14	-	-	-	14
	Jumlah Tempat Tidur	-	-	140	-	-	-	140
2	Puskesmas Non	-	-	11	-	-	-	11

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola						Jumlah
		Kemenkes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	TNI/POLRI	BUMN/BUMD	Swasta	
	Rawan Inap							
3	Puskesmas Keliling	-	-	-	-	-	-	-
4	Puskemas Pembantu	-	-	41	-	-	-	41
Sarana Pelayanan Lain								
1	Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-	-
2	Klinik Pratama	-	-	-	2	-	21	23
3	Klinik Utama	-	-	-	-	-	4	4
4	Balai Pengobatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Praktik Dokter Bersama	-	-	-	-	-	-	-
6	Praktik Dokter Umum Perorangan	-	-	-	-	-	104	104
7	Praktik Dokter Gigi Perorangan	-	-	-	-	-	37	37
8	Praktik Dokter Spesialis Perorangan	-	-	-	-	-	6	6
9	Praktik Pengobatan Tradisional	-	-			-	196	196
10	Bank Darah Rumah Sakit	-	-	3	-	-	3	6
11	Unit Tranfusi Darah	-	-	1	-	-		1
12	Laboratorium Kesenatan	-	-	1	-	-	2	3
Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian								
1	Industri Farmasi	-	-	-	-	-	-	-
2	Industri Obat Tradisional	-	-	-	-	-	-	-
3	Usaha Kecil Obat Tradisional	-	-	-	-	-	2	2
4	Produksi Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Pedagang Besar Farmasi (cabang)	-	-	-	-	-	1	1

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola						Jumlah
		Kemenkes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	TNI/POLRI	BUMN/BUMD	Swasta	
6	Apotek	-	-	-	-	1	102	103
7	Apotek PRB	-	-	-	-	1	2	3
8	Toko Obat	-	-	-	-	-	1	1
9	Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel diatas, fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020 disediakan oleh pemerintah dan swasta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas Kesehatan milik pemerintah:

 - 3 RSUD
 - 25 Puskesmas
 - 2 Klinik Pratama (TNI/POLRI)
 - 1 Laboratorium Kesehatan
- b. Fasilitas Kesehatan Milik Swasta:

 - 8 Rumah Sakit swasta
 - 21 Klinik Pratama
 - 4 Klinik Utama
 - 104 Praktek Dokter Umum Perorangan
 - 37 Praktek Dokter Gigi Perorangan
 - 6 Praktek Dokter Spesialis Perorangan
 - 196 Praktek Pengobatan Tradisional
 - 2 Laboratorium Kesehatan
- c. Unit Transfusi Darah/PMI

Tabel 2. 25. Ketersediaan Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit Kabupaten Boyolali per Februari 2020

No	Rumah Sakit	TT Kelas I	TT Kelas II	TT Kelas III	Super VIP	VIP	Jumlah TT
1	RSUD Pandan Arang	46	47	82	8	35	218
2	RSUD Waras Wiris	12	11	36	-	-	59
3	RSUD Simo	10	16	25	-	-	51
4	RSU PKU Aisyiyah Singkil	21	30	39	5	42	137
5	RSU Umi Barokah	15	12	20	-	-	47

No	Rumah Sakit	TT Kelas I	TT Kelas II	TT Kelas III	Super VIP	VIP	Jumlah TT
6	RSU Sisma Medika	6	16	36	-	5	63
7	RSU Hidayah	19	22	37	9	14	101
8	RSU Banyu Bening	8	14	17	13	5	57
9	RSU Asyifa Sambu	24	26	39		12	101
10	RSU Natalia	10	10	15		10	45
11	RSU Indriati	8	12	20		4	44
	JUMLAH	179	216	366	35	127	923

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel diatas jumlah ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Kabupaten Boyolali sebanyak 923 Tempat Tidur dengan jumlah penduduk sebanyak 1.066.409 jiwa. Dilihat dari standar WHO terkait rasio ideal jumlah Tempat Tidur (*bed to population ratio*) yaitu sebesar 1:1.000, maka ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Boyolali belum memenuhi standar.

Tabel 2. 26. Kebutuhan Tempat Tidur Rumah Sakit untuk Pelayanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Tahun 2020

KELAS PESERTA BPJS	JUMLAH PESERTA	JUMLAH TT IDEAL	JUMLAH TT EXSISTING	GAP Kebutuhan	KETERANGAN
I	84.889	85	164	79	Kelebihan
II	226.110	226	196	-30	Kekurangan
III	542.706	543	330	-213	Kekurangan
Jumlah	853.705	854	690	-164	

Sumber: Data BPJS, November, 2020

Berdasarkan data BPJS per November 2020, kebutuhan ideal untuk peserta BPJS masih ada kekurangan Tempat Tidur untuk kelas II sebanyak 30 TT dan kelas III sebanyak 213 TT. Untuk itu, masih diperlukan penambahan ketersediaan Tempat Tidur baik secara keseluruhan maupun dalam pemenuhan kebutuhan peserta BPJS.

3. Ketersediaan lingkungan tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Tabel 2. 27. Data Sarana Jamban Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/ Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Selo	Selo	9,773	0	1,579	972	972	7,222	7,222
2	Ampel	Ampel	13,984	0	0	192	192	12,741	13,792
3	Gladagsari	Gladagsari	12,829	0	1,621	708	708	9,378	10,500
4	Cepogo	Cepogo	15,837	0	796	2,917	2,917	12,117	12,124
5	Musuk	Musuk	10,577	182	290	722	722	9,565	9,565
6	Tamansari	Tamansari	9,134	35	46	146	146	8,942	8,942
7	Boyolali	Boyolali 1	12,090	61	61	957	957	11,072	11,072
8	Boyolali	Boyolali 2	11,851	94	182	321	321	7,480	11,348
9	Mojosongo	Mojosongo	17,106	0	289	3,437	3,437	13,380	13,380
10	Teras	Teras	13,730	744	744	241	241	12,745	12,745
11	Sawit	Sawit	10,223	13	1,768	98	98	7,095	8,357
12	Banyudono	Banyudono 1	8,815	0	350	39	39	7,019	8,426
13	Banyudono	Banyudono 2	6,447	0	931	0	0	5,516	5,516
14	Sambi	Sambi	12,829	51	179	976	976	11,674	11,674

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	Sharing/ Komunal		Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)		Jamban Sehat Permanen (JSP)	
				Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna	Jumlah Sarana	Jumlah KK Pengguna
15	Ngemplak	Ngemplak	22,465	0	1,090	920	920	19,826	20,455
16	Nogosari	Nogosari	24,483	1,874	3,784	2,925	2,925	17,695	17,774
17	Simo	Simo	14,679	631	631	388	388	13,660	13,660
18	Karanggede	Karanggede	16,823	0	897	28	28	15,898	15,898
19	Klego	Klego 1	7,586	378	378	225	225	6,983	6,983
20	Klego	Klego 2	7,079	327	327	256	256	6,496	6,496
21	Andong	Andong	17,991	505	2,366	1,049	4,886	9,922	10,739
22	Kemususu	Kemususu	13,238	0	5,153	1,537	3,025	4,583	5,060
23	Wonosegoro	Wonosegoro	12,493	2,648	2,648	1,819	1,819	8,026	8,026
24	Wonosamodro	Wonosamodro	9,431	0	2,770	882	882	5,779	5,779
25	Juwangi	Juwangi	10,744	0	2,612	362	362	7,770	7,770
Jumlah (Kab/Kota)			322,237	7,543	31,492	22,117	27,442	252,584	263,303

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel diatas dari 322.237 KK, masih ada 31.492 KK yang menggunakan jamban komunal/sharing pada jamban JSSP dan JSP. Dari data yang ada, sarana jamban di beberapa kecamatan masih menunjukkan angka 0, sehingga belum bisa dibandingkan.

Namun, jika dilihat dari jumlah pengguna jamban komunal/ sharing terbanyak terdapat di Kecamatan Kemusu sebanyak 5.153 KK dan ketersediaan sarana jamban terbanyak terdapat di Kecamatan Wonosegoro sebanyak 2.648 buah.

Jumlah pengguna Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sebanyak 27.442 KK. Jumlah tersebut lebih sedikit dari pengguna jamban komunal/sharing. Dilihat dari pengguna JSSP paling banyak terdapat di Kecamatan Andong, Mojosongo dan Kemusu.

Jumlah pengguna Jamban Sehat Permanen (JSP) sebanyak 263.303 KK. Capaian tersebut cukup bagus yakni diatas 80%, namun demikian masuk perlu upaya peningkatan hingga mencapai 100%. Dilihat dari jumlah pengguna JSP terbanyak terdapat di Kecamatan Ngemplak sebanyak 20.455 .

Tabel 2. 28. Capaian 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Per Puskesmas Tahun 2019

NO	PUSKESMAS	PILAR 1			PILAR 2			PILAR 4			PILAR 5		
		JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%
1	SELO	9,773	9,773	100	9,773	9,773	100	9,773	5,265	54	9,773	4,939	51
2	AMPEL	13,984	13,984	100	13,984	13,984	100	13,984	11,578	83	13,984	11,444	82
3	GLADAGSARI	12,829	12,829	100	12,829	12,742	99	12,829	11,548	90	12,829	10,214	80
4	CEPOGO	17,555	17,555	100	17,555	17,555	100	17,555	12,572	72	17,555	11,195	64
5	MUSUK	10,577	10,577	100	10,577	10,577	100	10,577	10,577	100	10,577	9,519	90
6	TAMANSARI	9,134	9,134	100	9,134	9,134	100	9,134	7,147	78	9,134	5,010	55
7	BOYOLALI 1	12,090	12,090	100	12,090	11,518	95	12,090	10,639	88	12,090	6,170	51
8	BOYOLALI 2	11,851	11,851	100	11,851	11,851	100	11,851	9,643	81	11,851	9,164	77
9	MOJOSONGO	17,106	17,106	100	17,106	17,106	100	17,106	14,050	82	17,106	10,610	62
10	TERAS	16,512	16,512	100	16,512	16,512	100	16,512	8,253	50	16,512	8,253	50
11	SAWIT	10,223	10,223	100	10,223	10,223	100	10,223	8,494	83	10,223	7,481	73
12	BANYUDONO 1	8,815	8,815	100	8,815	8,634	98	8,815	7,509	85	8,815	6,957	79

NO	PUSKESMAS	PILAR 1			PILAR 2			PILAR 4			PILAR 5		
		JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%	JML KK	CAPAIAN	%
13	BANYUDONO 2	6,447	6,447	100	6,447	5,664	88	6,447	4,077	63	6,447	5,684	88
14	SIMO	14,679	14,679	100	14,679	14,679	100	14,679	8,088	55	14,679	7,296	50
15	SAMBI	13,544	13,544	100	13,544	13,175	97	13,544	10,762	79	13,544	10,135	75
16	NGEMPLAK	22,465	22,465	100	22,465	22,465	100	22,465	18,706	83	22,465	16,802	75
17	NOGOSARI	23,630	23,630	100	23,630	23,630	100	23,630	16,874	71	23,630	12,235	52
18	KARANGGEDE	16,823	16,823	100	16,823	16,823	100	16,823	10,218	61	16,823	9,467	56
19	KLEGO 1	7,586	7,586	100	7,586	6,851	90	7,586	6,284	83	7,586	3,718	49
20	KLEGO 2	7,079	7,079	100	7,079	7,079	100	7,079	4,919	69	7,079	3,759	53
21	ANDONG	18,165	18,165	100	18,165	18,165	100	18,165	10,421	57	18,165	14,885	82
22	WONOSEGORO	12,493	12,493	100	12,493	12,493	100	12,493	7,876	63	12,493	7,270	58
23	WONOSAMODRO	9,431	9,431	100	9,431	9,431	100	9,431	6,274	67	9,431	4,258	45
24	KEMUSU	9,664	9,664	100	9,664	9,355	97	9,664	6,073	63	9,664	3,804	39
25	JUWANGI	10,485	10,485	100	10,485	10,485	100	10,485	7,890	75	10,485	6,516	62
JUMLAH		322,940	322,940	100	322,940	319,904	99	322,940	235,737	73	322,940	206,785	64

Berdasarkan tabel diatas, berikut capaian 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

- 1. Pilar 1: Stop buang air sembarangan sudah mencapai 100%.
Hal tersebut mengindikasikan seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali telah memiliki akses jamban, meskipun untuk kepemilikan sarana jamban belum semuanya memiliki.
- 2. Pilar 2: Cuci Tangan Pakai Sabun sudah mencapai 99%.
Hal tersebut mengindikasikan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Boyolali telah memiliki perilaku atau kebiasaan CPTS.
- 3. Pilar 3: Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sudah mencapai 97%.
- 4. Pilar 4: Pengelolaan sampah rumah tangga sebesar 64%.
Hal tersebut mengindikasikan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga.
- 5. Pilar 5: Pengelolaan limbah cair rumah tangga sebesar 64%.
Hampir sama dengan persentase pengelolaan sampah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga masih sangat kurang.

4. **Ketersediaan akses informasi edukasi dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya**

a. **Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)**

Desa *Universal Child Immunization* (UCI) adalah tercapainya minimal 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (0-11 bulan). Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis Polio oral (BOPV) dan 1 dosis Measles Rubella (MR). Berikut capaian Desa UCI Kabupaten Boyolali tahun 2015-2019.

Tabel 2. 29. Persentase Desa *Universal Child Immunization* (UCI) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Desa <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: *Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020*

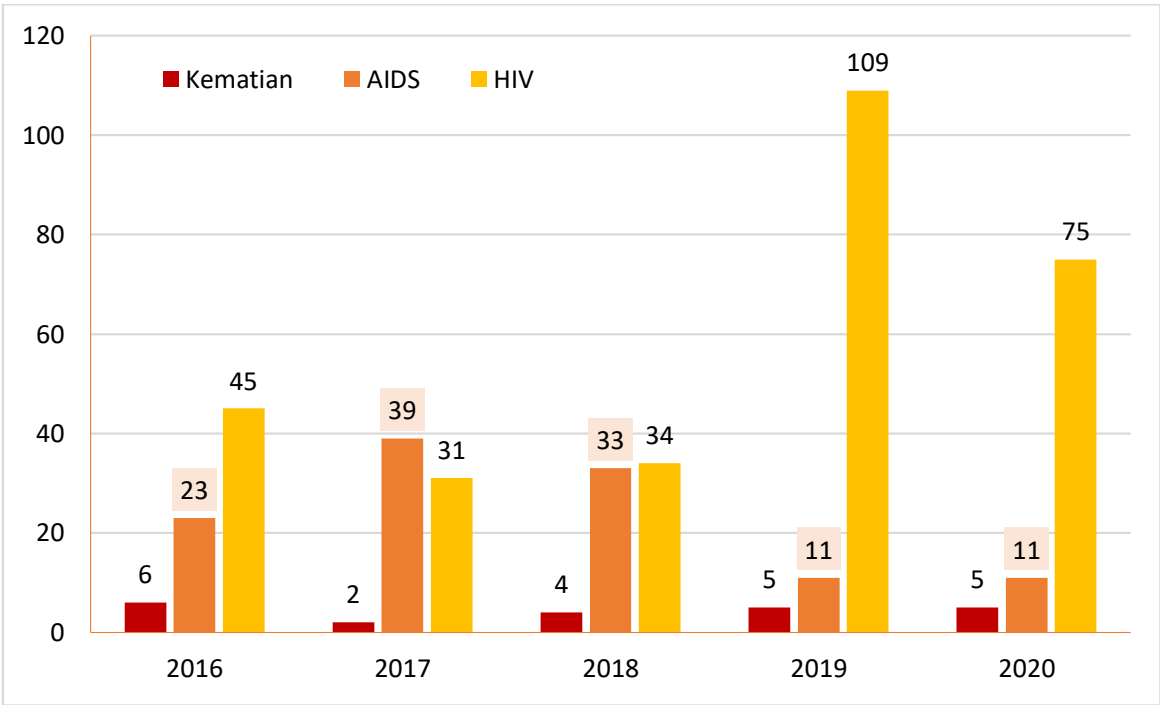
Kabupaten Boyolali memiliki 267 desa/kelurahan UCI. Sejak tahun 2016 hingga 2020, persentase Desa UCI menunjukkan angka 100%. Hal ini menunjukkan seluruh bayi, ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar di desa/kelurahan UCI telah mendapatkan imunisasi

dasar. Capaian ini harus dipertahankan pada periode pembangunan selanjutnya.

b. Upaya Pengendalian Penyakit Menular

Upaya pengendalian penyakit menular yaitu program pelayanan puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular/infeksi (misalnya TBC, HIV/AIDS, Kusta, Pneumonia, Diare, dll). Berikut data perkembangan penyakit menular di Kabupaten Boyolali.

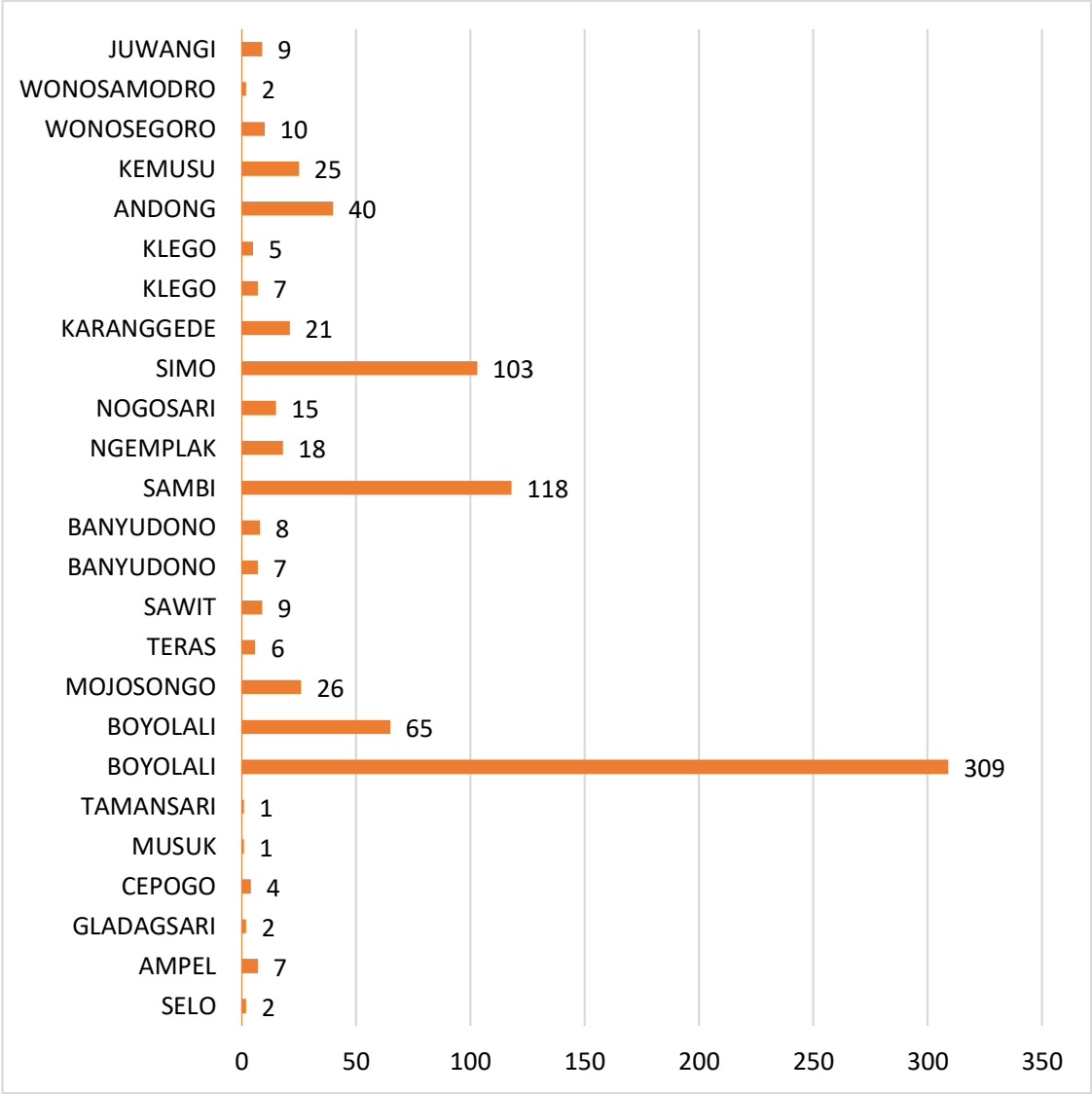
Grafik 2. 21. Kasus HIV/AIDS dan Kematian per Tahun di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah kasus HIV/AIDS tahun 2016-2020 sebanyak 411 penderita, dengan jumlah terbanyak pada tahun 2019 sebanyak 109 penderita. Jika dilihat dari kelompok umur, sebagian besar penderita HIV/AIDS didominasi usia produktif 30-39 tahun dengan persentase 70,5%. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin, persentase terbanyak pada laki-laki sebanyak 63,3%.

Grafik 2. 22. Case Notification Rate (CNR) Seluruh Kasus TB Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



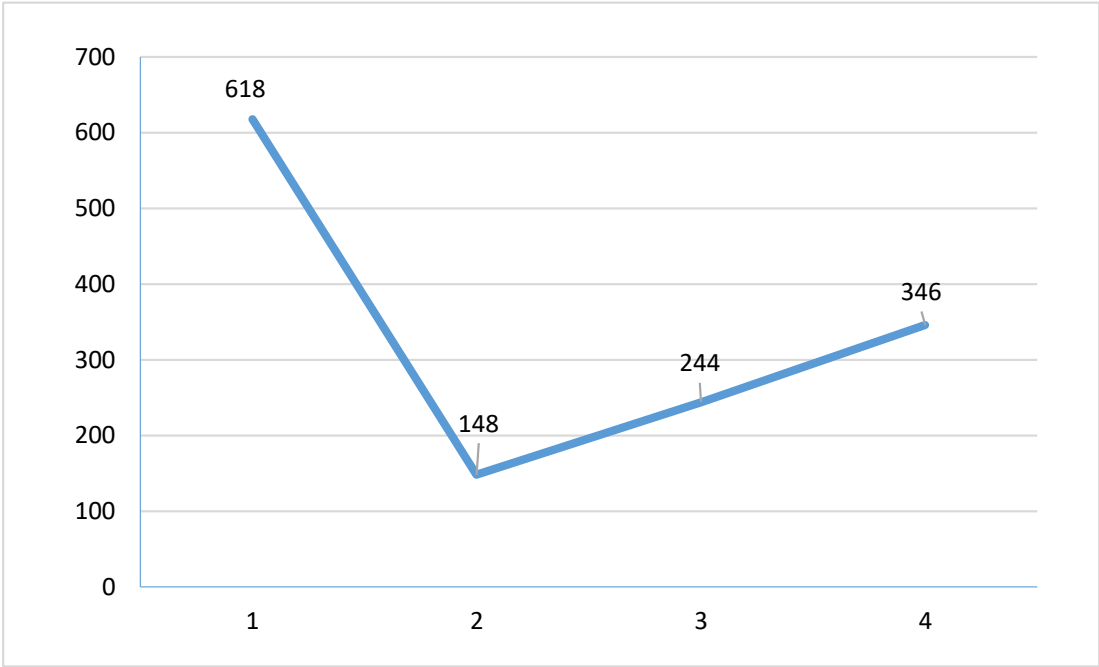
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah semua kasus Tuberkulosis (CNR) pada tahun 2020 tercatat sebanyak 820 kasus. Kasus paling banyak terdapat di Puskesmas Boyolali 2 sebanyak 309 penderita. Sedangkan orang yang terduga Tuberkulosis sebanyak 4.705 kasus dengan sasaran orang yang terduga Tuberkulosis sebesar 10.029 kasus. Angka kesakitan TBC di Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebanyak 77 per 100.000 penduduk atau sebanyak 2.447 kasus. Pada Tahun 2020.

c. Pengendalian Pandemi Covid-19

Covid-19 sudah menjadi isu internasional yang harus dihadapi oleh seluruh level pemerintahan dari pusat sampai daerah. Covid-19 selain berpengaruh pada kesehatan juga berdampak pada sosial ekonomi masyarakat sehingga Pemerintah Kabupaten Boyolali harus sigap dalam mengendalikan penyakit menular tersebut. Berikut perkembangan Covid-19 di Kabupaten Boyolali.

Grafik 2. 23. Perkembangan Kasus Covid-19 Empat Minggu Terakhir Bulan Januari 2021 di Kabupaten Boyolali



Sumber: Data diolah dari covid19.boyolali.go.id

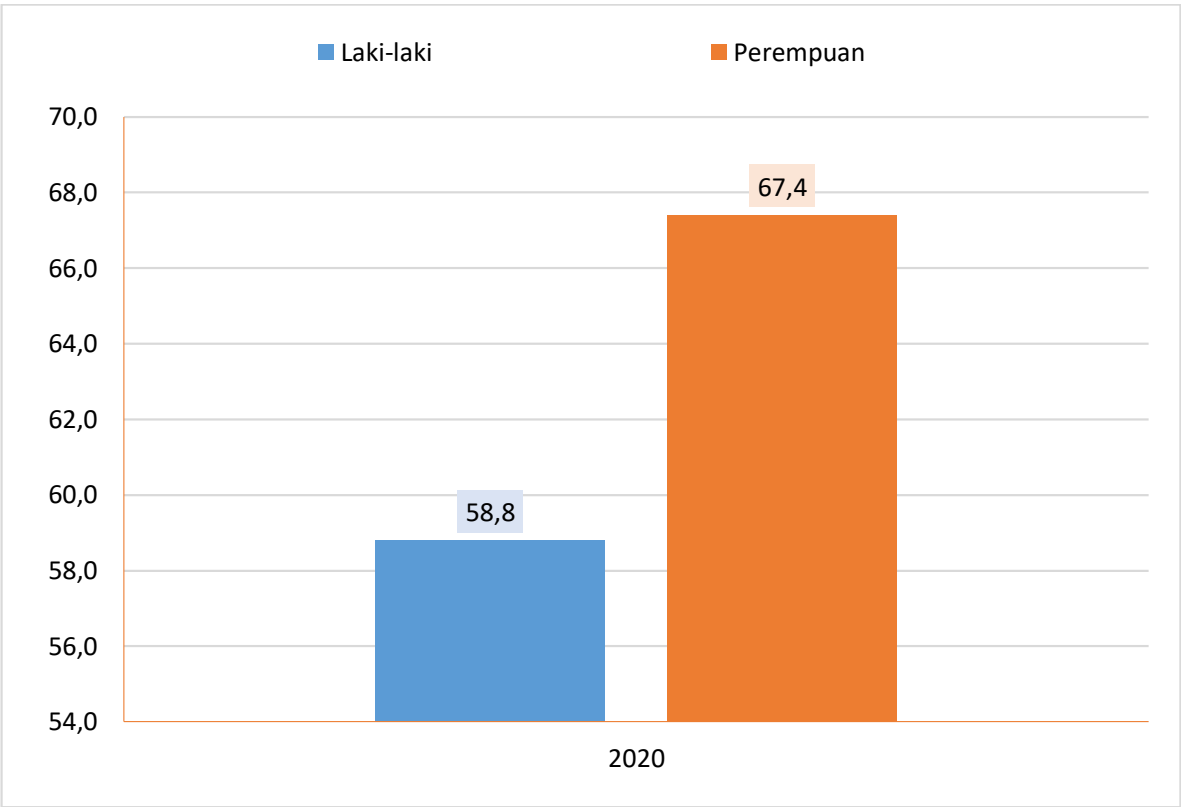
Grafik diatas menunjukkan bahwa kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Boyolali dalam satu bulan terakhir menunjukkan bahwa belum terkendali. Sempat terjadi penurunan jumlah kasus baru yang signifikan pada minggu kedua, tetapi kembali mengalami peningkatan pada minggu ketiga dan keempat. Secara akumulatif, data per tanggal 25 Januari 2021 menunjukkan bahwa terdapat total 4090 kasus konfirmasi Covid-19 di Kabupaten Boyolali dengan rincian 250 pasien dirawat, 206 pasien isolasi mandiri, 3512 pasien sembuh, dan 122 pasien meninggal.

Angka kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Boyolali sebesar 2,98%. Angka tersebut masih lebih tinggi dibanding standar WHO yaitu 2,39% sehingga masih perlu upaya peningkatan penanganan dan pengendalian kasus Covid-19 di Kabupaten Boyolali.

d. Upaya Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Upaya pengendalian penyakit tidak menular yaitu program pelayanan puskesmas untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dll. Berikut data perkembangan penyakit tidak menular di Kabupaten Boyolali.

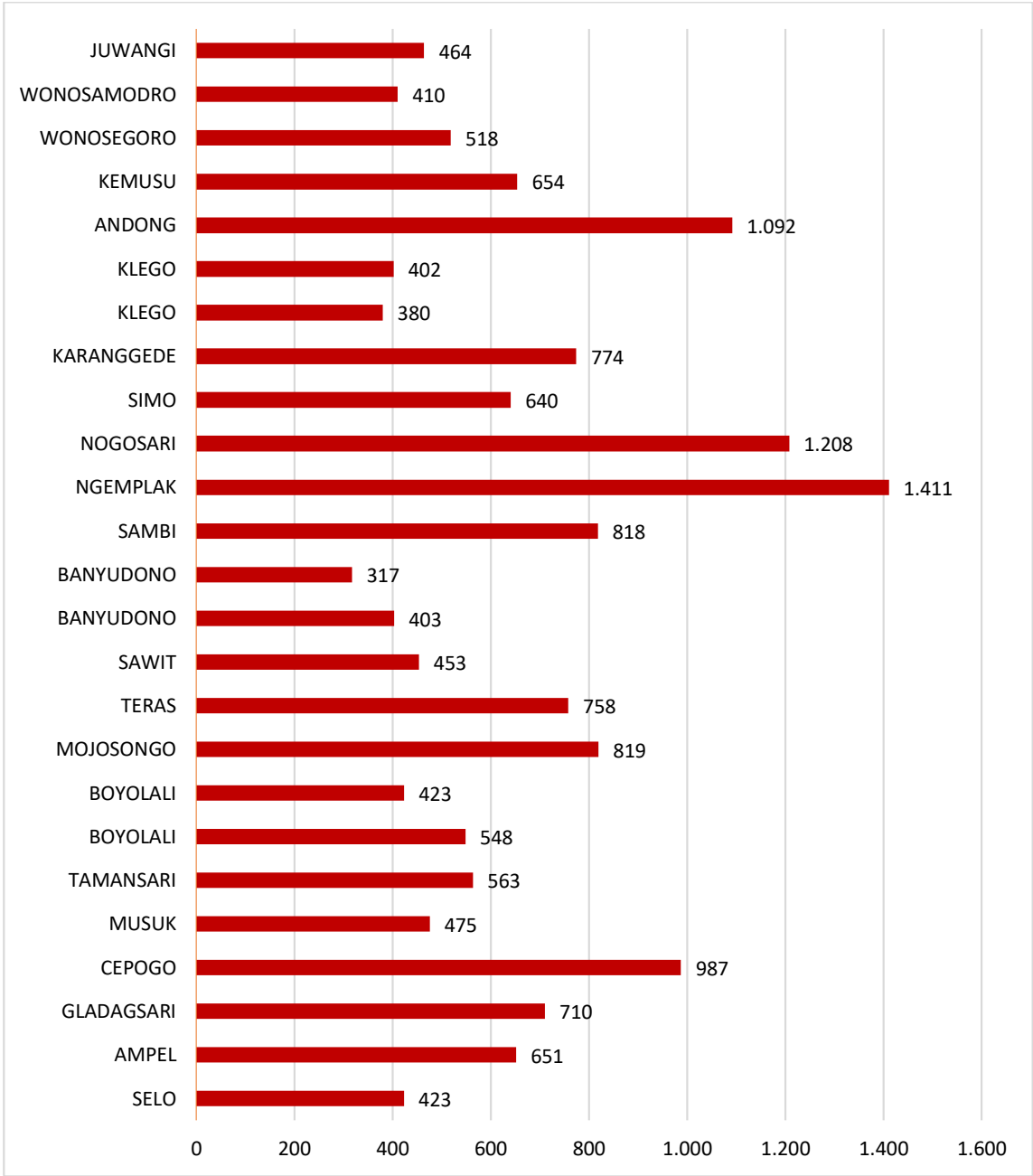
Grafik 2. 24. Jumlah Kasus Hipertensi Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah penyakit tidak menular terbanyak yaitu penyakit Hipertensi. prevalensi penderita Hipertensi di Kabupaten Boyolali sebesar pada tahun 2020 adalah 63,2%. Artinya jumlah perkiraan penderita hipertensi sebesar 196.977. Angka kejadian hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan menurut jenis kelamin untuk laki-laki sebesar 58,8%, sedangkan perempuan 67,4%. Sedangkan prevalensi penderita Hipertensi Provinsi Jawa Tengah sebesar 37,57% dan Nasional sebesar 34,11%, sehingga prevalensi di Kabupaten Boyolali diatas prevalensi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

Grafik 2. 25. Jumlah Kasus Diabetes Melitus Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

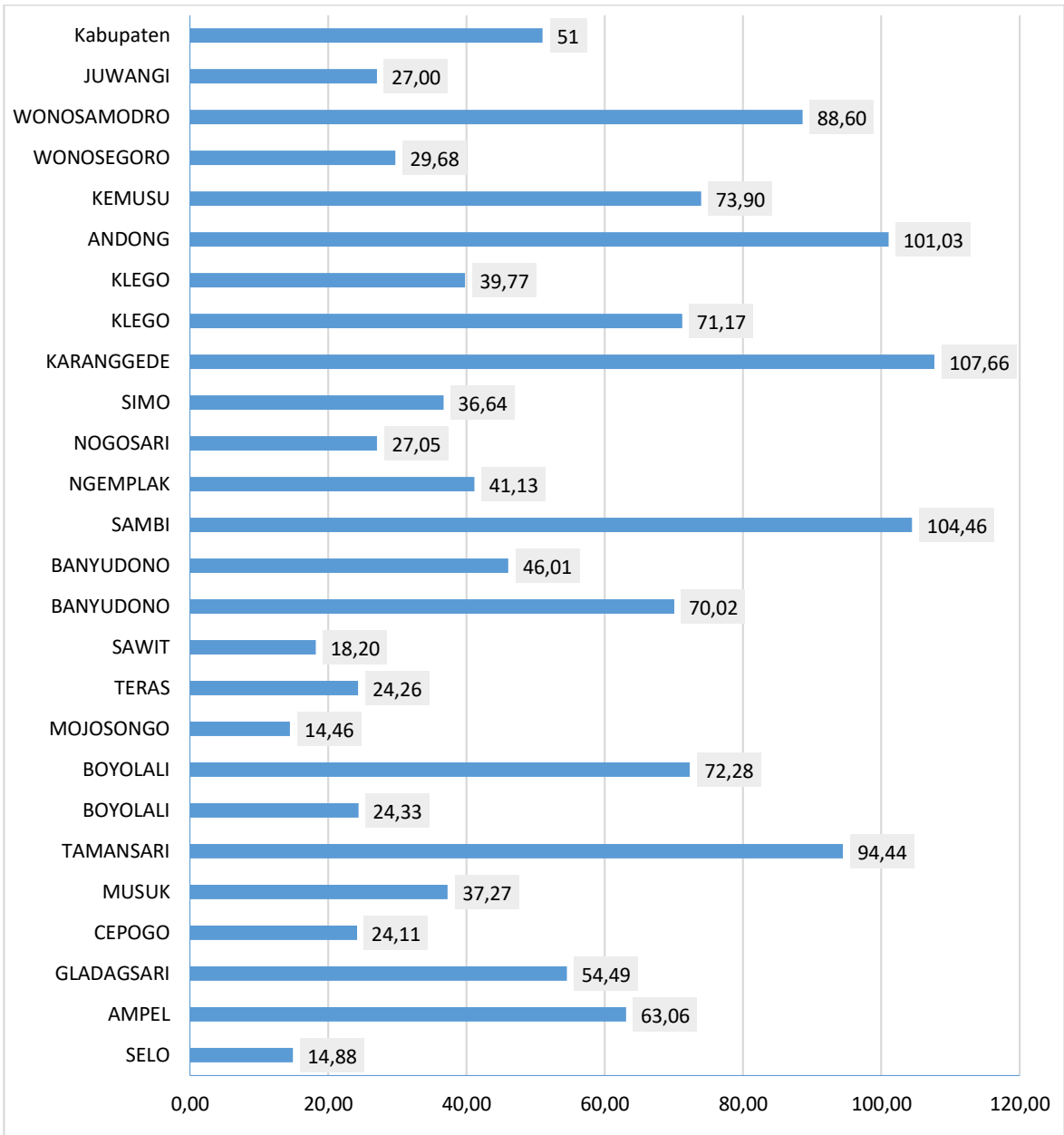


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Penderita diabetes melitus di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 adalah sebesar 16.302 orang. Prevalensi diabetes melitus Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,09, sehingga prevalensi Kabupaten Boyolali dibawah Provinsi Jawa Tengah.

Dari 16.302 penderita diabetes melitus, baru 16.069 penderita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sedangkan sisanya belum mendapatkan pelayanan kesehatan standar dikarenakan berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyakit diabetes melitus.

**Grafik 2. 26. Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020**



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah ODGJ di Kabupaten Boyolali tergolong besar. Pada tahun 2020, terdapat 2.636 penderita dan baru 1.343 penderita (51%) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Persentase penderita terbanyak pada puskesmas Karanggede sebesar 107,66% dan paling rendah pada puskesmas Mojosongo sebesar 14.46%.

5. Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan

Penanggungjawab Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Tingkat Pertama dilakukan oleh Puskesmas dan Jaringannya termasuk pihak swasta dan dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan dengan dukungan lintas sektor dan partisipasi penduduk.

Sedangkan, pananggungjawab Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat kedua adalah Dinas Kesehatan. Untuk itu, selain fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah, perlu upaya peran aktif masyarakat (pemberdayaan masyarakat) maupun peran aktif swasta dalam membangun derajat kesehatan.

a. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, sehingga wilayah kerja puskesmas maksimal satu kecamatan. Sedangkan, dalam kondisi tertentu dalam satu kecamatan dapat didirikan lebih dari satu puskesmas untuk meningkatkan jangkauan pelayanan puskesmas terhadap wilayah kerjanya. Pada tahun 2020, Kabupaten Boyolali memiliki 25 unit puskesmas yang terdiri dari 14 puskesmas rawat inap dan 11 puskesmas rawat jalan.

Tabel 2. 30. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Uraian	2020
1	Jumlah puskesmas	25
2	Jumlah puskesmas Pembantu	41
3	Jumlah Puskesmas Keliling	0
4	Jumlah Poskesdes	209
5	Jumlah Penduduk	1.066.409
6	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	2/100.000

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Pada tahun 2020, rasio puskesmas terhadap satuan penduduk di Kabupaten Boyolali sebesar 2 per 100.000. Artinya, setiap 100.000 penduduk dilayani 2 puskesmas. Sedangkan jumlah puskesmas yang harus tersedia dalam suatu wilayah berdasarkan SNI 03-1733-2004 yaitu 120.000 penduduk harus terdapat minimal 1 puskesmas. Jumlah penduduk Boyolali tahun 2020 sebanyak 1.066.409 jiwa, maka kebutuhan puskesmas minimal yang harus dipenuhi sebanyak 9 unit. Artinya, jumlah puskesmas yang tersedia

sudah cukup ideal. Namun demikian, pelayanan di puskesmas masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan.

b. Cakupan Pelayanan Rumah Sakit

Rumah Sakit sebagai pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukan. Pada tahun 2020, jumlah Rumah Sakit Umum di Kabupaten Boyolali sebanyak 11 unit. Selain itu terdapat 23 klinik pratama dan 4 klinik utama yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Boyolali. Tingkat keberhasilan pelayanan di rumah sakit dapat dilihat dari pemanfaatan sarana, mutu dan efisiensi pelayanan.

Tabel 2. 31. Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Nama Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR) (%)	Bed Turn Over (BTO) (kali)	Turn of Interval (TOI) (Hari)	Length of Stay (LOS) (Hari)
1	RSUD PANDAN ARANG BOYOLALI	43.6	51	4	3
2	RSUD SIMO	44.9	55	4	3
3	RS HIDAYAH BOYOLALI	54.4	52	3	5
4	RSI BANYU BENING	30.3	52	5	2
5	RSUD WARAS WIRIS	38.1	41	5	3
6	RS UMI BAROKAH BOYOLALI	60.6	81	2	3
7	RSU ASY SYIFA SAMBI	66.2	81	2	3
8	RS SISMA MEDIKA KARANGGEDE	45.2	65	3	3
9	RS PKU AISYIYAH	68.4	60	2	4
10	RS INDRIATI BOYOLALI	52.8	65	3	3
11	RS NATALIA BOYOLALI	6.5	11	30	1
KABUPATEN		48.6	56.2	3.3	3.2

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel diatas, *Bed Occupancy Rate* (BOR) sebesar 48,6%. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR sebesar 75%-85%, sehingga capaian BOR Kabupaten Boyolali tergolong kurang. Selain itu, jika dilihat dari Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001, bahwa setiap 240.000 penduduk harus tersedia satu unit Rumah Sakit. Jika melihat jumlah penduduk Kabupaten Boyolali 1.066.409 jiwa (2020), maka jumlah Rumah Sakit yang dibutuhkan 5 Unit. Artinya,

jumlah yang tersedia sudah memenuhi standar minimal, namun dari segi kualitas pelayanan harus tetap ditingkatkan.

c. Rasio Tenaga Kesehatan

Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025. Berikut rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Boyolali tahun 2019.

Tabel 2. 32. Rasio Tenaga Kesehatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Jenis Tenaga	Jumlah			Penduduk	Rasio	
		L	P	Total		/100.000 Penduduk	Ideal
1	Dokter Spesialis	82	38	120	1.066.409	11	11
2	Dokter Umum	86	109	195		18	45
3	Dokter Gigi	9	45	54		5	13
4	Perawat	281	873	1154		108	180
5	Bidan	-	649	649		61	120
6	Apoteker	6	68	74		7	12
7	Tenaga Teknis Kefarmasian	13	104	117		11	24
8	Kesehatan Masyarakat	3	39	42		4	16
9	Kesehatan Lingkungan	16	20	36		3	18
10	Gizi	5	54	59		6	14
11	Keteknisan Medis	36	160	196		18	16
12	Keterapian Fisik	21	44	65		6	5
13	Ahli Laboratorium Medik	21	108	129		12	-
14	Tehnik Biomedik	35	130	165		3	-

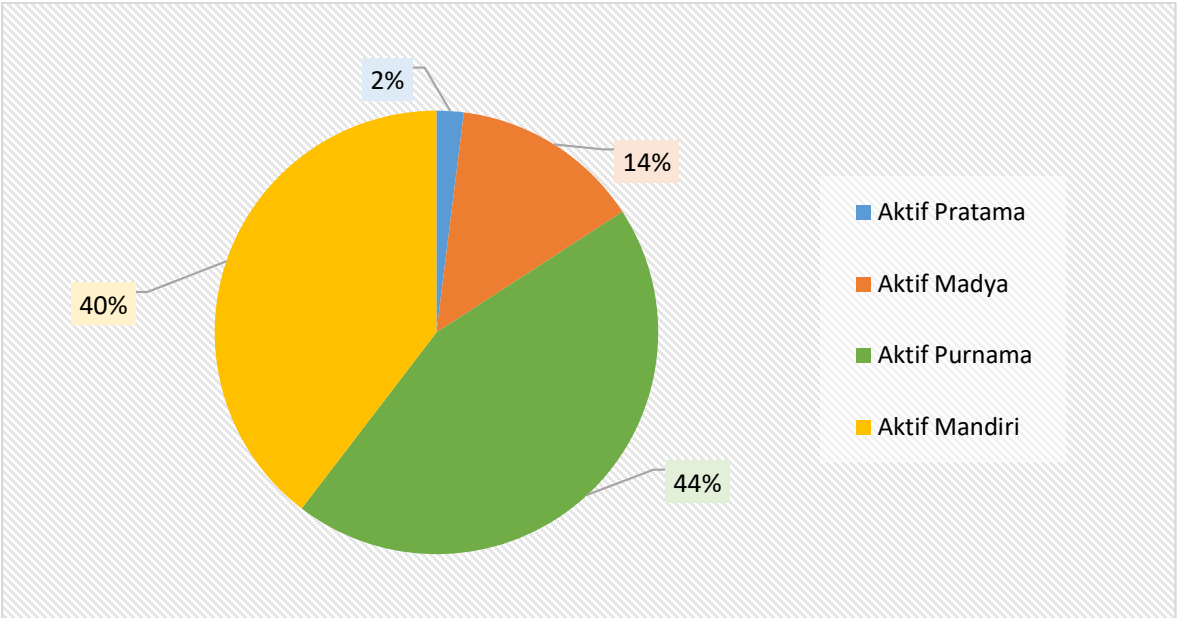
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukan keberadaan tenaga keteknisan medis dan keterapian fisik sudah memenuhi target rasio per 100.000 penduduk. Namun, untuk tenaga kesehatan lain seperti dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, tenaga kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan nutrisisionis masi belum memenuhi target rasio ideal. Untuk itu, kedepan perlu adanya penambahan tenaga kesehatan yang jumlahnya belum memenuhi target rasio per 100.000 penduduk.

d. Proporsi Posyandu Aktif

Posyandu merupakan kegiatan yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat guna memberdayakan dan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Berikut persentase posyandu di Kabupaten Boyolali tahun 2020.

Grafik 2. 27. Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



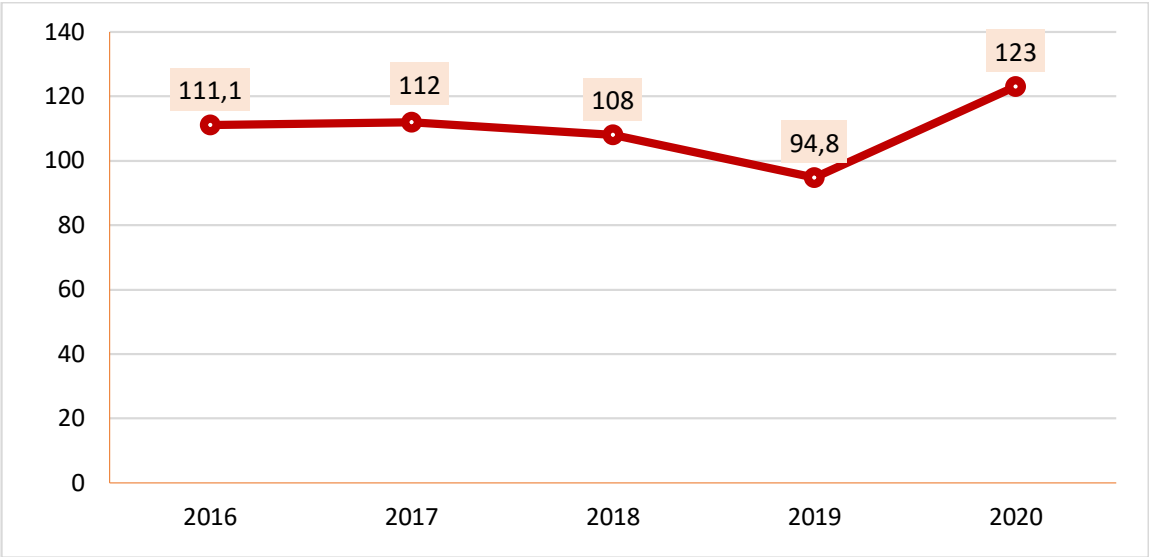
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Pada tahun 2020, terdapat 1.835 posyandu yang terbagi menjadi 4 strata (strata pertama, strata madya, strata purnama, strata mandiri). Sedangkan posyandu aktif berjumlah 1.657 posyandu (90.03%) terdiri dari posyandu strata purnama dan mandiri. Persentase tersebut tergolong baik, namun harus terus ditingkatkan. Selain itu, untuk rasio posyandu per 100 balita sebanyak 2,5. Artinya setiap 100 balita yang ada dilayani oleh 2 posyandu.

6. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu adalah kematian perempuan yang terjadi saat kehamilan atau dalam 42 hari pasca melahirkan. Kematian ibu menjadi salah satu indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi angka kematian ibu hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Grafik 2. 28. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali 2020

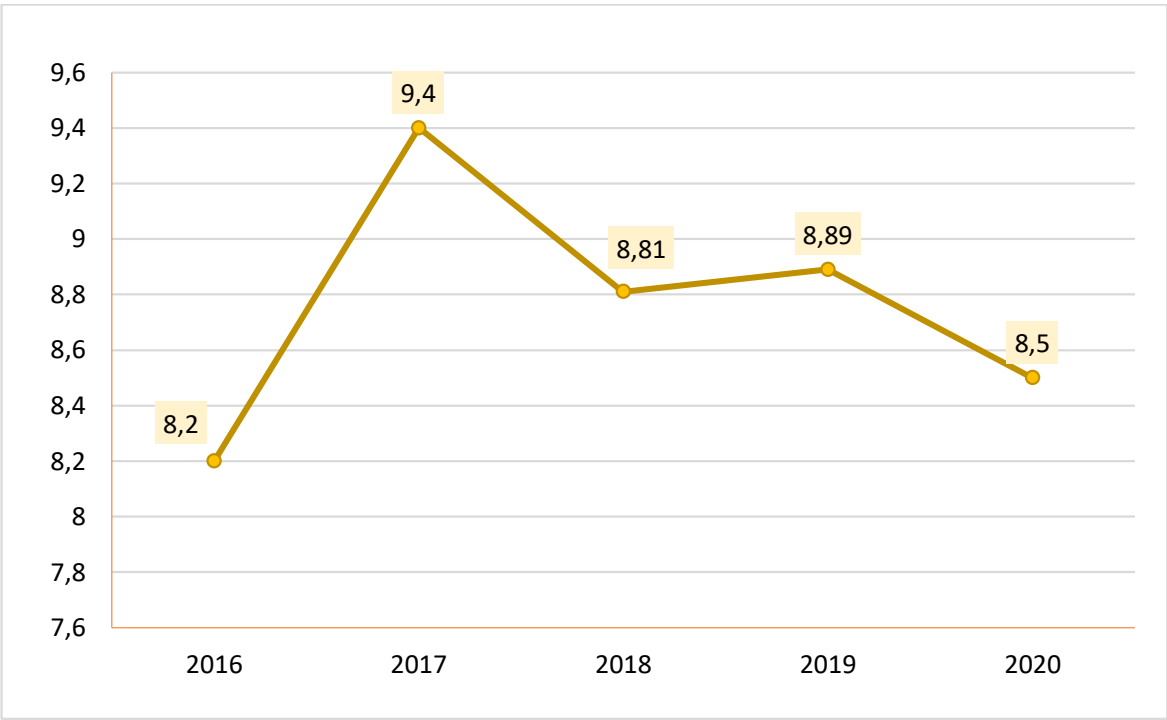
Angka Kematian Ibu (AKI) di Boyolali mengalami tren yang menurun sejak tahun 2016 hingga 2019. Namun, mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020. Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2020 mencapai angka 17 orang, dengan rincian 14 orang usia 20-34 tahun dan 3 orang usia diatas usia 35 tahun. Jumlah angka tersebut masih jauh dari target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020, penyebab utama kematian ibu didominasi oleh pendarahan saat melahirkan dan hipertensi dalam kehamilan.

Selain itu, ada beberapa hambatan yang menyebabkan AKI tinggi. *Pertama*, deteksi dini terhadap kasus yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan keterlambatan penanganan. *Kedua*, keterbatasan puskesmas yang bisa melakukan PONED (pelayanan kasus kegawatdaruratan *obsetetric neonatal*), sedangkan rujukan ke RS yang mampu PONEK jarak tempuhnya cukup jauh.

7. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan kematian saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun. AKB adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Kematian bayi menjadi salah satu indikator SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu mengurangi angka kematian bayi hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

**Grafik 2. 29. Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Boyolali
Tahun 2016-2020**



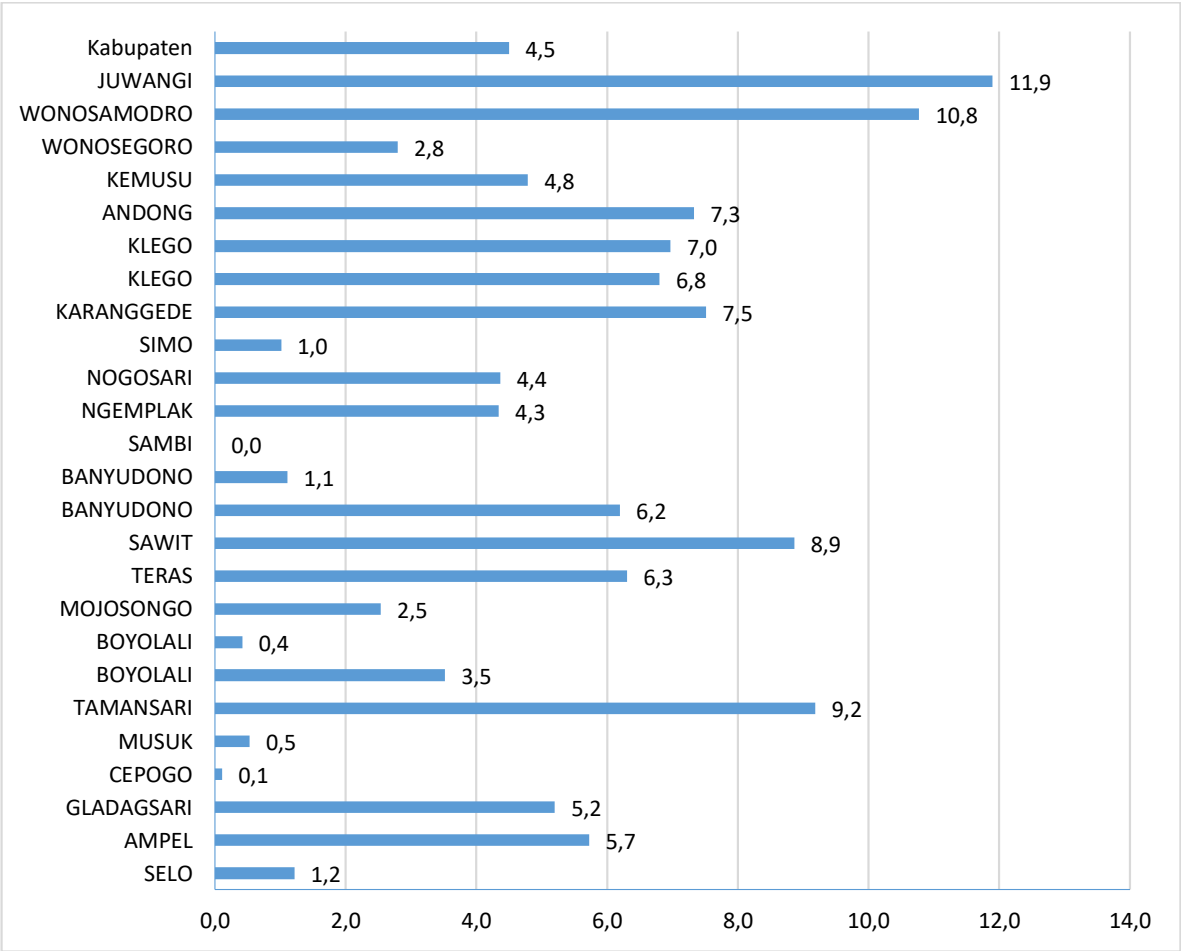
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Selama periode 5 tahun (2016-2020), AKB di Kabupaten Boyolali dibawah target TPB 12/1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2020, AKB di Kabupaten Boyolali berada pada angka 8,5 per 1.000 kelahiran hidup. Namun demikian, upaya penurunan angka kematian bayi perlu untuk terus ditingkatkan hingga mencapai 0 kematian. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020, penyebab kematian bayi di Kabupaten Boyolali adalah BBLR 36%, asfiksia 16%, sepsis 4%, dan lain-lain 44%. Akar penyebab BBLR adalah masih banyaknya ibu hamil anemi dan KEK.

8. Persentase Balita Gizi Kurang

Balita Gizi Kurang adalah status gizi yang didasarkan pada indeks berat badan menurut umur yang merupakan gabungan dari istilah gizi buruk dan gizi kurang dengan Z score ≤ 2 standar deviasi. Berikut persentase balita kurang gizi per kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Grafik 2. 30. Persentase Balita Gizi Kurang Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



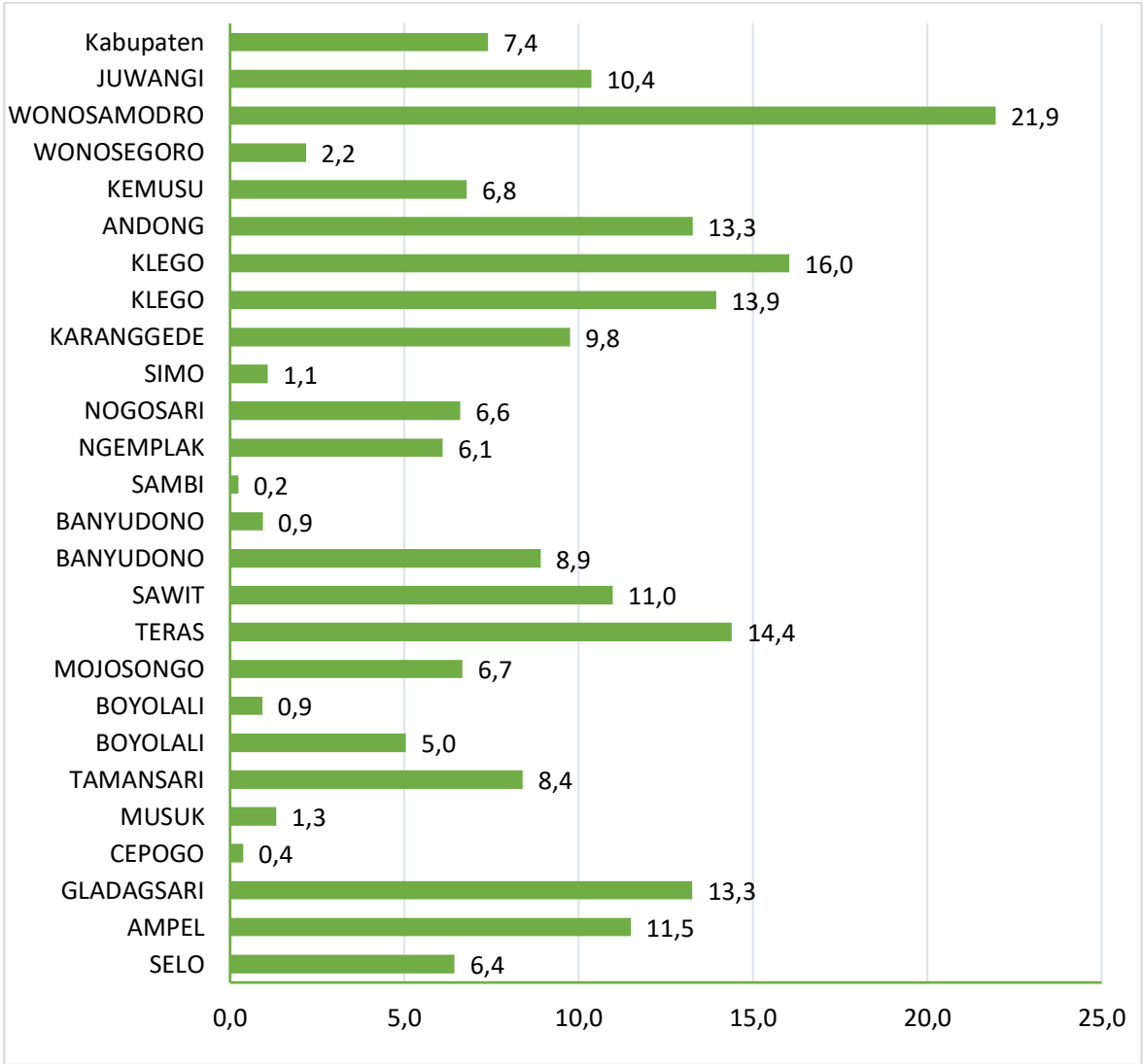
Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020, dari 63.664 balita yang ditimbang, ada sekitar 4,5% balita masuk kategori balita gizi kurang. Persentase balita gizi kurang paling banyak terdapat pada Kecamatan Juwangi. Kemudian disusul Kecamatan Tamansari dan Wonosamodro. Dari segi lokasi, ketiga kecamatan tersebut terletak jauh dari ibukota kabupaten dan berbatasan langsung dengan kabupaten lain (Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang). Dari segi fasilitas kesehatan dan kondisi daerah secara umum masih perlu perbaikan pada semua bidang.

9. Persentase Balita Pendek (*Stunting*)

Balita pendek (*stunting*) merupakan status gizi balita yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur. *Stunting* merupakan masalah gizi yang sedang dihadapi Indonesia. Hal ini menjadi penting karena menyangkut kualitas SDM Indonesia di masa mendatang. Berikut grafik balita pendek (*stunting*) di Kabupaten Boyolali tahun 2020.

Grafik 2. 31. Persentase Balita Pendek (Stunting) Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

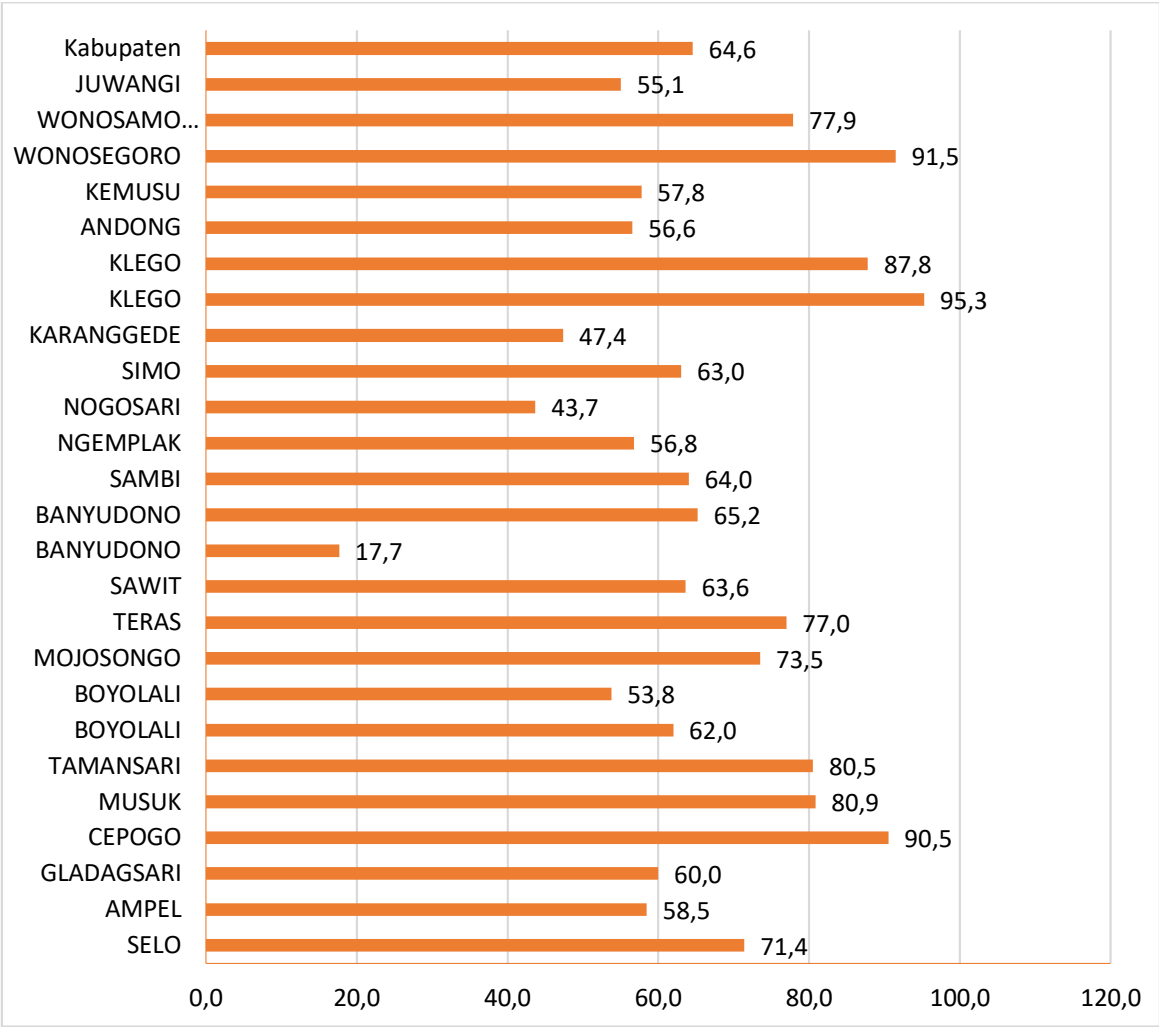


Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Boyolali tahun 2020, dari 58.623 balita, ada 4.433 (atau 7,4%) balita masuk kategori *stunting*. Kecamatan yang memiliki persentase balita *stunting* paling banyak terdapat pada kecamatan Wonosamodro. Kecamatan tersebut juga merupakan salah satu kecamatan dengan kasus tertinggi dalam persentase balita kurang gizi. Untuk itu, selama periode 5 tahun mendatang, pembangunan dibidang perbaikan gizi balita bisa difokuskan pada kecamatan tersebut.

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pemenuhan gizi bayi usia 0-6 bulan dengan kebutuhan ASI Eksklusif. Berikut persentase bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif tahun 2020.

Grafik 2. 32. Persentase Bayi Mendapatkan ASI Eksklusif Per Puskesmas di Kabupaten Boyolali Tahun 2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2020

Persentase bayi mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Boyolali tergolong sedang yaitu 64,6%. Ada 3 puskesmas yang memiliki persentase dibawah 50% yaitu puskesmas Nogosari, Karanggede dan Banyudono. Upaya peningkatan pentingnya pemberian ASI Eksklusif harus terus ditingkatkan untuk membantu perbaikan gizi balita dan terhindar dari *stunting*.

2.3.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat melalui beberapa indikator utama. Uraian mengenai kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang difokuskan pada aspek ketersediaan dan kualitas. Beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian meliputi infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, bangunan dan penataan ruang.

Tabel 2. 33. Panjang Jalan Berdasarkan Kewenangan Pengelolaan (km)

Kecamatan	Pemerintahan yang Berwenang			Jumlah
	Negara	Provinsi	Kabupaten	
Selo	-	9,60	21,65	31,25
Ampel	7,54	-	14,77	22,31
Gladagsari	-	-	28,16	28,16
Cepogo	-	13,30	34,12	47,42
Musuk	-	-	33,09	33,09
Tamansari	-	-	19,41	19,41
Boyolali	13,89	2,10	67,15	83,14
Mojosongo	2,62	5,80	55,28	63,70
Teras	3,92	-	37,96	41,88
Sawit	-	-	19,29	19,29
Banyudono	4,82	-	21,26	26,08
Sambi	-	-	30,21	30,21
Ngemplak	-	0,30	35,91	36,21
Nogosari	-	-	39,77	39,77
Simo	-	-	47,36	47,36
Karanggede	-	7,92	26,25	34,17
Klego	-	7,70	25,39	33,09
Andong	-	5,30	29,98	35,28
Kemus	-	-	25,18	25,18
Wonosamodro	-	-	17,86	17,86
Wonosegoro	-	-	22,41	22,41
Juwangi	-	-	25,58	25,58
Total	32,79	52,02	678,00	762,81

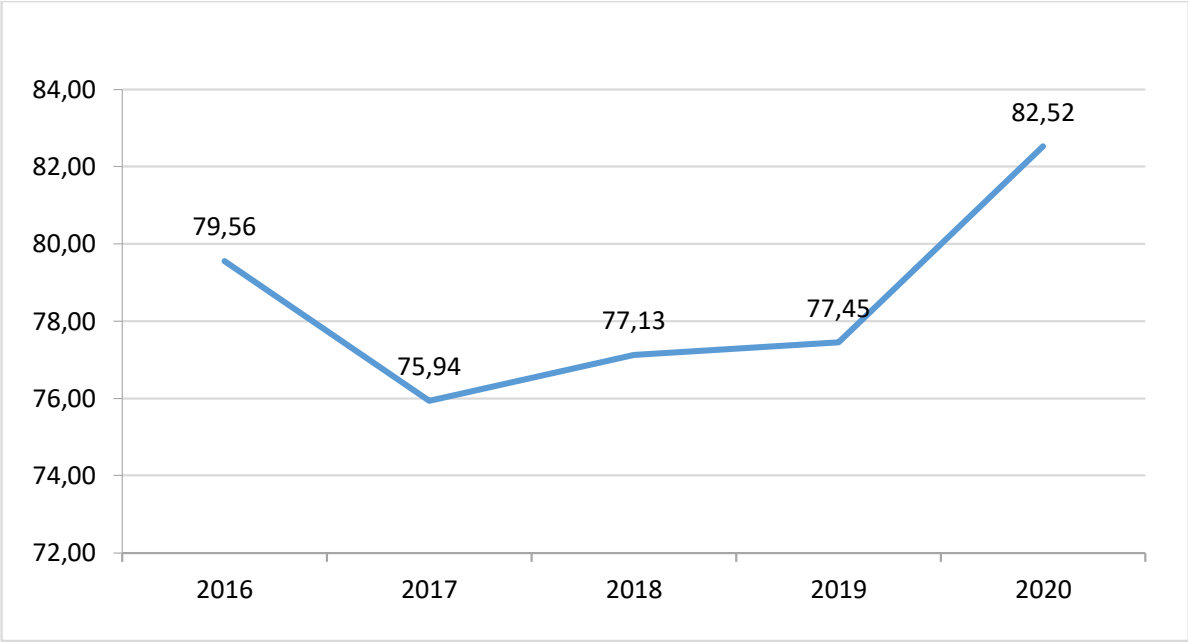
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali

Berdasarkan kewenangan pengelolaan jalan, 88,88% jalan di Kabupaten Boyolali dikelola oleh pemerintah kabupaten, 6,82% dikelola oleh provinsi, dan 4,29% dikelola oleh pemerintah pusat. Ini berarti, beban pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali cukup besar. Selain data yang telah disajikan tersebut masih ada ruas jalan yang membelah wilayah Kabupaten Boyolali yakni jalan Tol ruas Semarang Solo sepanjang ±17,2 kilometer kemudian jalan Tol ruas Solo

Ngawi sepanjang ± 12,8 kilometer serta pembangunan jalan Tol ruas Solo Yogyakarta sepanjang ± 6,4 kilometer.

Di samping ketersediaan jalan, kualitas infrastruktur jalan juga perlu menjadi perhatian. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan, 70,54% jalan di Kabupaten Boyolali berupa aspal, 4,88% berupa kerikil, 0,34% berupa tanah dan 24,25% sisanya berupa *rigid pavement*. Selain itu, jika dilihat berdasarkan kondisi, sebagian besar jalan di Kabupaten Boyolali masih dalam keadaan baik. Berikut ini merupakan detail perkembangan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap:

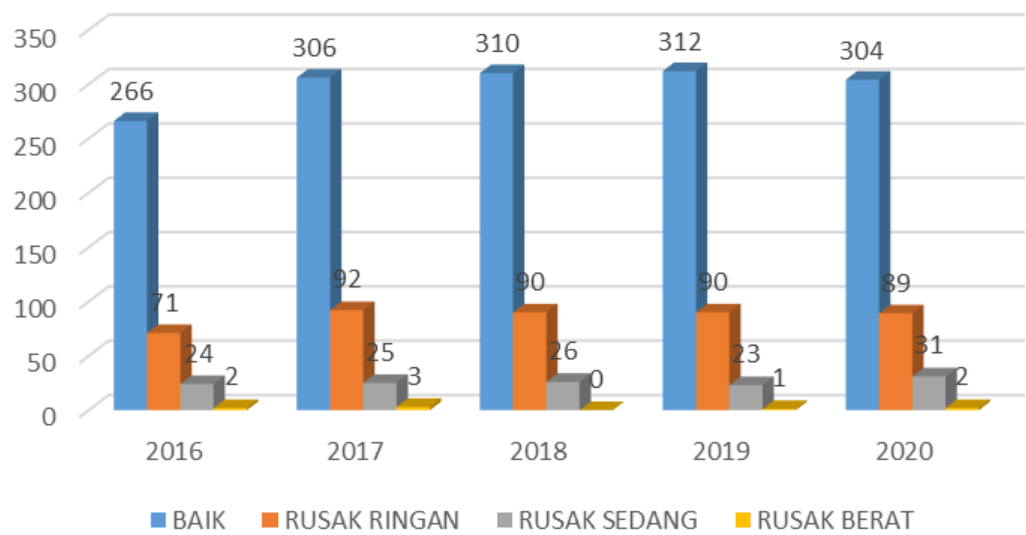
Grafik 2. 33. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Pada tahun 2016 hingga 2020, proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap mengalami peningkatan setiap tahun. Meskipun demikian, peningkatan tersebut tidak cukup signifikan yaitu hanya mencapai 0,9% per tahun. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya laju kerusakan jalan dan tingginya beban pemeliharaan jalan. Kerusakan jalan disebabkan oleh kondisi tanah yang kurang stabil. Sebagian jalan kabupaten berada pada tanah labil sehingga dibutuhkan penanganan khusus seperti peningkatan jalan dengan konstruksi *rigid pavement*. Penyebab lainnya adalah banyaknya kendaraan barang yang membawa Galian C dengan beban melebihi kapasitas (*overload*) yang melintas di sekitar Kabupaten Boyolali.

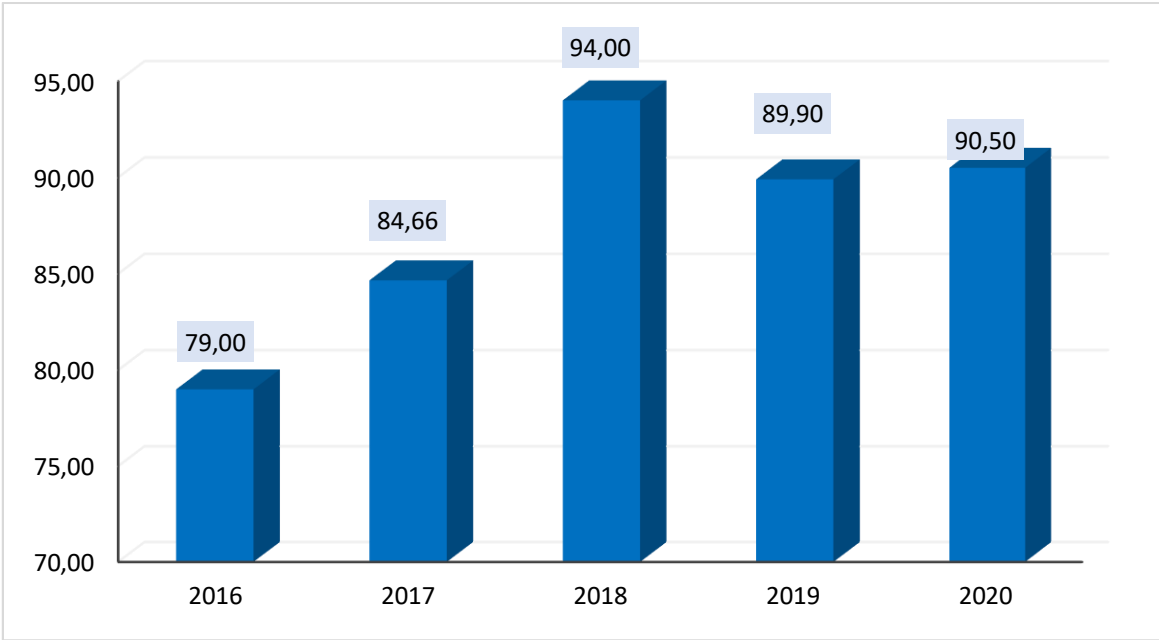
**Grafik 2. 34. Data Kondisi Jembatan Kabupaten Boyolali
2016-2020**



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang
Kabupaten Boyolali, 2020*

Bentang alam di Kabupaten Boyolali yang berupa pegunungan sampai dengan dataran rendah, mengakibatkan banyak terbentuk sungai. Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Boyolali dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi maupun kepentingan lainnya, baik alami maupun buatan. Sungai sungai yang memotong jalan, membutuhkan jembatan untuk dapat dilalui masyarakat dalam rangka melaksanakan berbagai aktivitas. Mengingat peran strategis jembatan dalam berbagai aktivitas masyarakat, perlu direncanakan pembangunan, pemeliharaan dan perawatan jembatan. Jumlah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten sampai dengan tahun 2020 berjumlah 426 jembatan dengan perincian: 304 kondisi baik (71,36%), 89 rusak ringan (20,89%), 31 rusak sedang (7,28%), dan 2 rusak berat (0,47%). Beberapa faktor mempengaruhi kerusakan jembatan antara lain : muatan yang melebihi batas ketentuan, pengambilan material di sekitar badan jembatan, usia jembatan, banjir. Selain jembatan yang merupakan kewenangan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Boyolali juga bertanggung atas jembatan yang menghubungkan antar desa, antar kecamatan yang secara teknis maupun anggaran tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah desa yang bersangkutan.

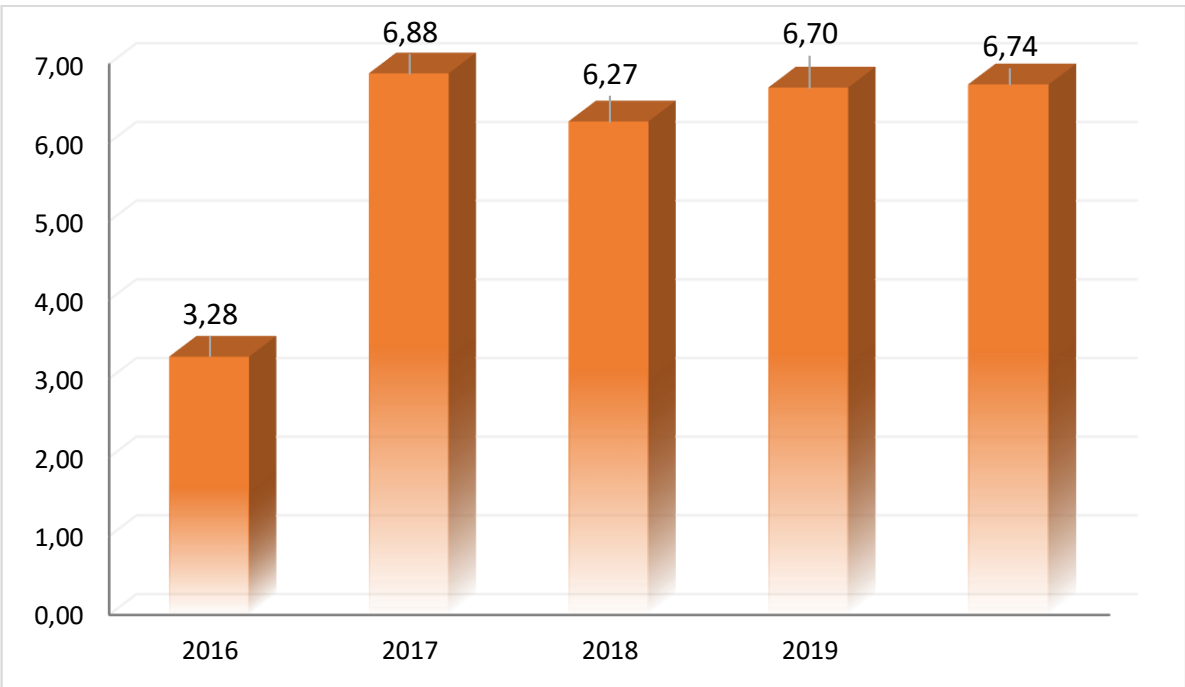
Grafik 2. 35. Persentase Penduduk yang Terlayani Penggunaan Air Baku



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang
Kabupaten Boyolali, 2020*

Indikator terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang juga harus diperhatikan adalah terkait penyediaan air baku. Penyediaan air baku untuk penduduk telah mencapai 90,50% pada tahun 2020. Capaian tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yang mencapai 94%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah masih kurangnya pembangunan embung dan sulitnya mencari sumber mata air.

Grafik 2. 36. Persentase Ketersediaan Air Baku



*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang
Kabupaten Boyolali, 2020*

Meskipun persentase penduduk yang terlayani air baku sudah mencapai 90,50%, ketersediaan air baku di Kabupaten Boyolali pada dasarnya masih sangat minim. Mulai tahun 2017 persentase ketersediaan air baku mencapai lebih dari 6%, dua kali lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 3,28%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya 6% dari total kebutuhan air baku daerah yang sudah terpenuhi. Minimnya ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir dan bersifat porous.

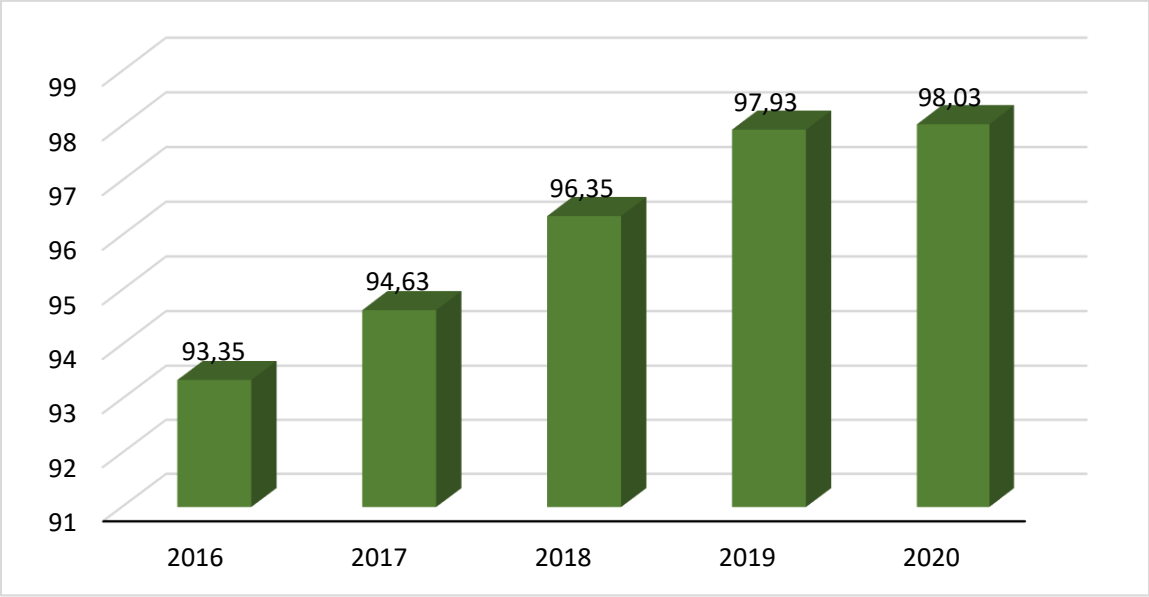
Tabel 2. 34. Cakupan Penduduk yang Mengakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Penduduk yang Mengakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	86,61	87,58	89,78	90,99	90,5
Cakupan Penduduk Perkotaan yang Mengakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	12,97	13,76	15,19	14,50	35,89
Cakupan Penduduk Perdesaan yang Mengakses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	71,82	74,77	75,28	77,90	64,11

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali Tahun 2019 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Cakupan penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,11% per tahun. Jika dibedakan berdasarkan kawasan perkotaan dan perdesaan, akses penduduk di kawasan perkotaan terhadap air minum layak dan berkelanjutan lebih rendah dibandingkan dengan penduduk di kawasan perdesaan. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya potensi sumber air yang dekat dengan perkotaan. Identifikasi sumber air baru dan optimalisasi pembangunan prasarana dan sarana air minum perlu untuk dilakukan guna meningkatkan capaian indikator ini.

Grafik 2. 37. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan Tahun 2016-2020



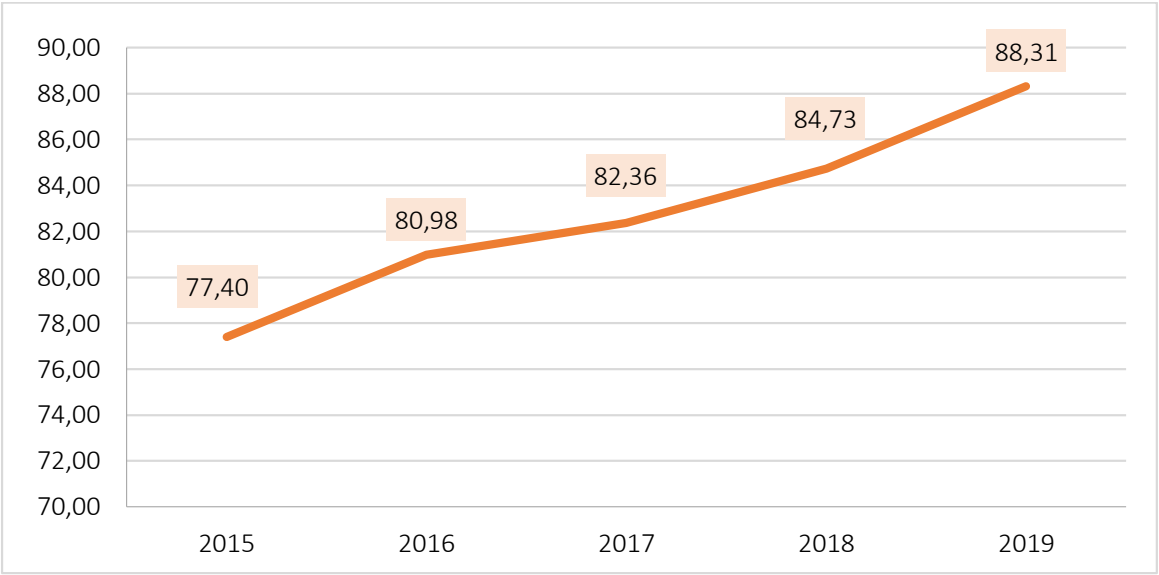
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian kinerja pada urusan pekerjaan umum yang juga perlu untuk diperhatikan adalah akses terhadap sanitasi layak dan berkelanjutan. Indikator ini merupakan salah satu amanat SDGs yang perlu untuk terus ditingkatkan. Pada tahun 2016 hingga 2020, persentase rumah tangga memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,23% per tahun.

Jenis pelayanan dasar urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Boyolali berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimum Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis pelayanan tersebut meliputi:

- a. Pelayanan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- b. Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik dengan indikatornya adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

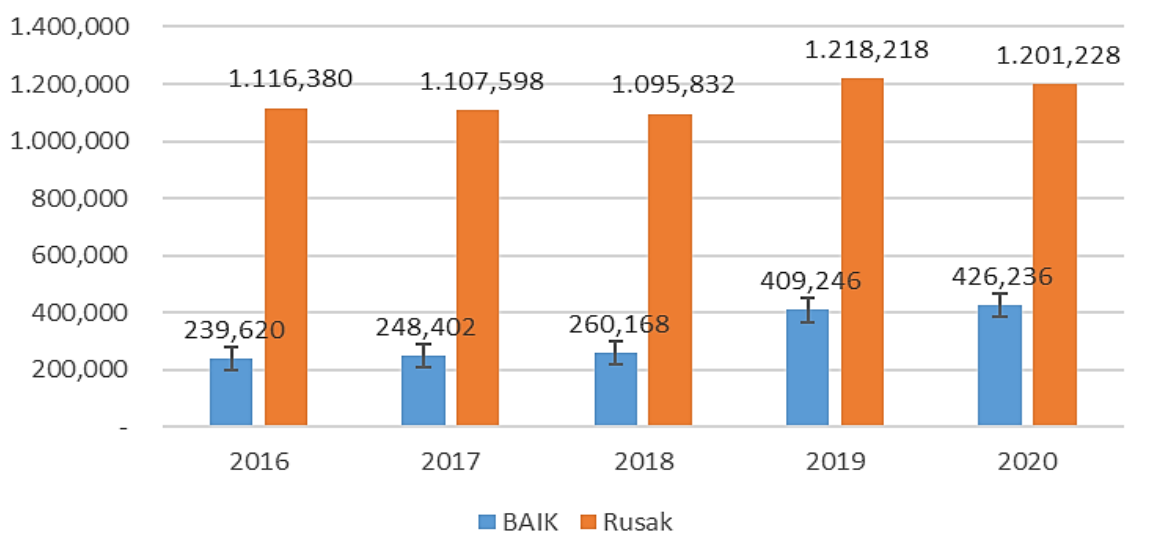
Grafik 2. 38. Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Boyolali Tahun 2015 – 2019



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Indikator persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata 3,36% per tahun. Hambatan dalam pencapaian indikator ini adalah banyaknya jaringan irigasi yang sudah berumur, sebagian besar jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Boyolali merupakan jaringan irigasi peninggalan Belanda. Laju rehabilitasi jaringan irigasi belum dapat mengimbangi kebocoran jaringan irigasi yang ada.

Grafik 2. 39. Kondisi Drainase Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Sampai dengan tahun 2020 kondisi drainase di Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik sepanjang 426,236 km atau 26,19%, sedangkan drainase dalam kondisi rusak sepanjang 1201,228 Km atau 73,81%. Jika dilihat dari tahun 2016 hingga tahun 2020 kondisi drainase dalam kondisi baik

terus mengalami peningkatan, namun kondisi yang rusak masih sangat tinggi.

Kerusakan drainase disebabkan antara lain karena: kelainan kemiringan melintang, retak pada saluran pasangan batu atau beton, perubahan penampang, lubang. Faktor yang menyebabkan kerusakan drainase antara lain: penutupan drainase oleh masyarakat untuk aktivitas di atas badan drainase, sedimentasi, banyaknya kotoran/sampah yang masuk ke drainase.

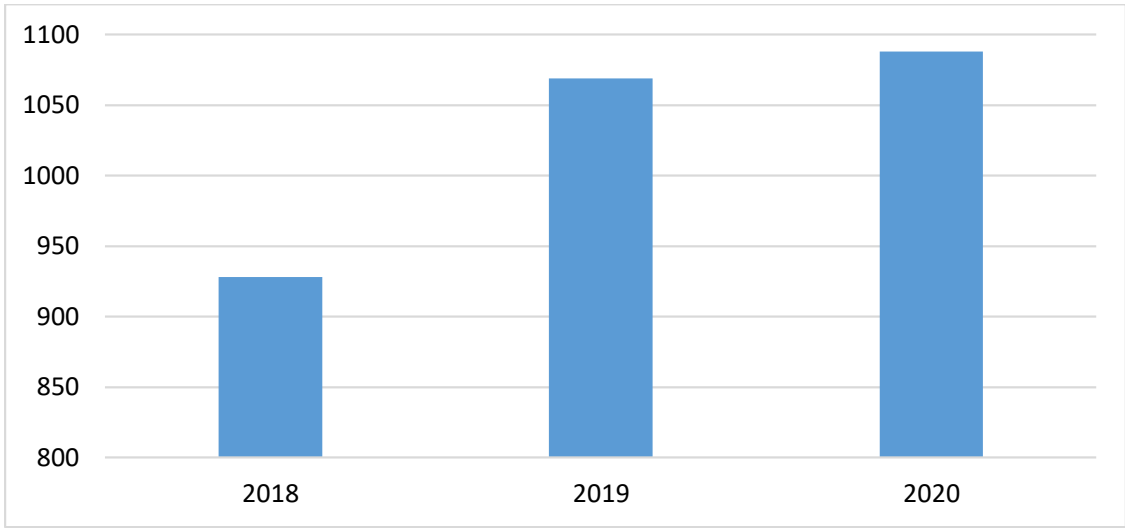
Tabel 2. 35. Capaian Indikator Tata Ruang Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	78,09	80,59	83,09	85,12	88,80
Cakupan kawasan yang telah memiliki RDTR	58,00	68,00	79,00	68,18	77,27

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Pada bidang tata ruang, indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,27% per tahun. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan terkait aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang kabupaten. Sementara itu, cakupan kawasan yang telah memiliki RDTR masih belum mencapai 100%. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan data yang akurat dan kapasitas SDM. Di samping itu, capaian yang mengalami penurunan pada tahun 2019 disebabkan oleh adanya pemekaran kecamatan, yaitu dari 19 kecamatan menjadi 22 kecamatan. RDTR berdasarkan Perda RTRW, merupakan rencana rinci tata ruang yang perlu disusun di setiap kecamatan. RDTR yang dimaksud dalam capaian ini berupa kajian dan/atau studi yang belum dilegalisasi dalam bentuk peraturan kepala daerah. Legalisasi RDTR perlu mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN sebelum diundangkan di daerah.

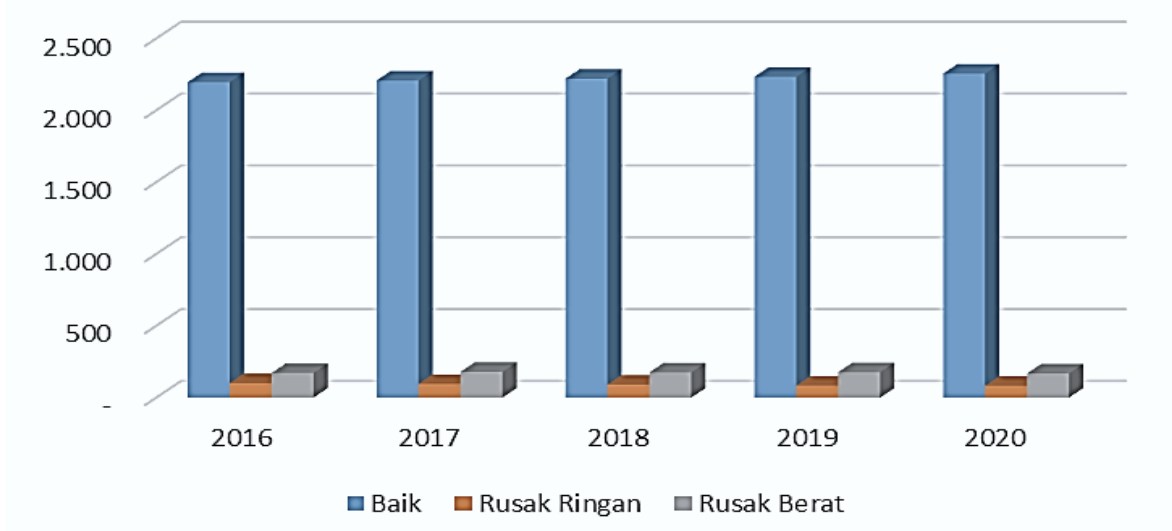
Grafik 2. 40. Jumlah Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang berdasarkan Perda RTRW



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Upaya peningkatan kesesuaian tata ruang dalam pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW dapat dilihat dari Jumlah Permohonan Informasi Kesesuaian Tata Ruang yang mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2019, jumlah permohonan informasi kesesuaian tata ruang berdasarkan Perda RTRW mengalami peningkatan sebesar 15,2% dari total sebelumnya 928 menjadi 1.069. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2020 yaitu meningkat sebesar 1,8%. Peningkatan capaian tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menyadari untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan Perda RTRW terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang.

Grafik 2. 41. Data Kondisi Bangunan Gedung 2016-2020



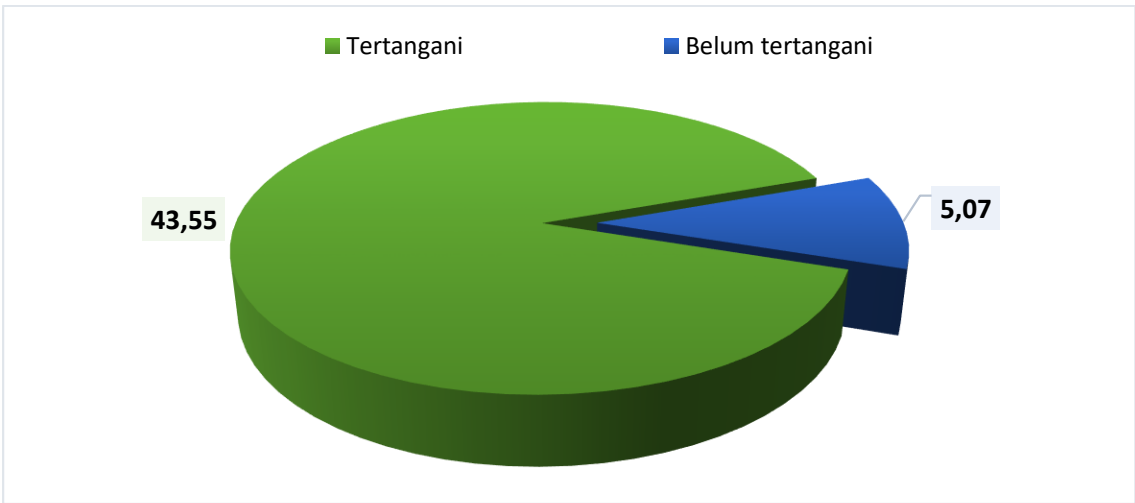
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali, 2020

Kondisi bangunan Gedung di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2020 dalam kondisi baik sebanyak 2.256 atau 89,95 %, rusak ringan 83 atau 3,31 5 dan rusak berat 169 atau 6,74 %. Gedung yang rusak ringan dapat diperbaiki dengan melakukan pemeliharaan rutin, sedangkan gedung yang rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi atau penggantian Gedung. Selain itu sesuai dengan semangat pelayanan kepada masyarakat dimungkinkan pula membangun gedung baru dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

2.3.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi upaya penanganan kawasan kumuh dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk ditingkatkan. Berdasarkan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017, luas kawasan kumuh Kabupaten Boyolali adalah 48.62 ha, dimana luasan kumuh tersebut baru mencakup luasan kumuh yang berada di 5 Kecamatan dan 14 Desa. Penanganan kawasan kumuh dilakukan pada tahun 2017–2020 dengan capaian masing-masing per tahun sebesar 7,4 ha, 3,3 ha, 29,07 ha dan 3,78 ha. Dengan demikian, luasan kumuh yang tertangani seluas 43,55 ha dan luasan kumuh yang belum tertangani sesuai Keputusan Bupati Boyolali tersebut seluas 5,07 ha atau sekitar 10,43%. Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan perkembangan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali.

Grafik 2. 42. Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani dan Belum Tertangani di Kabupaten Boyolali (Ha)



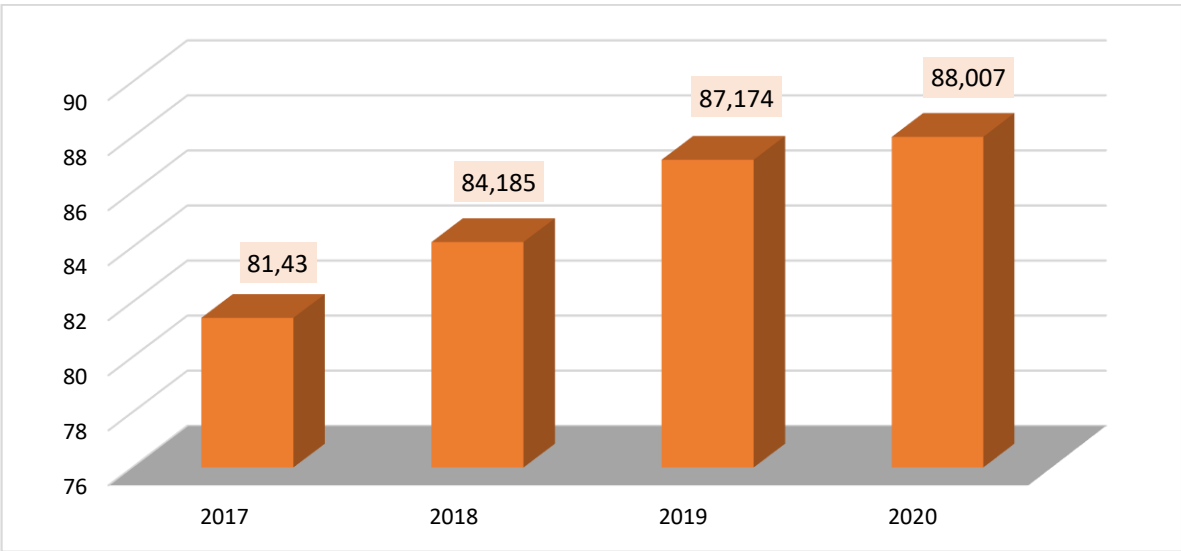
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

Meskipun upaya penanganan kawasan kumuh menggambarkan kinerja yang cukup baik, akan tetapi setelah dilakukan pendataan lagi dengan penambahan jumlah kecamatan (menjadi 6 kecamatan) dan jumlah desa (22 desa) diperoleh luasan kawasan kumuh yang perlu segera ditangani dan telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 663/773 Tahun 2020 tertanggal 2 Desember 2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali mencapai 87,85 ha. Dalam RPJMD 2022-2026 akan diupayakan pendataan luasan kawasan kumuh di seluruh kabupaten yang meliputi 22 kecamatan di 267 desa/kelurahan.

Secara umum, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten dalam upaya penyediaan permukiman layak huni. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku/pola hidup sehat. Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan status kawasan kumuh yang sudah tertangani.

Di samping penanganan kawasan kumuh, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman juga mencakup penyediaan rumah layak huni. Sebuah rumah dikatakan layak huni jika memenuhi empat kriteria yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum, dan akses sanitasi layak. Berikut ini merupakan capaian penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Boyolali.

Grafik 2. 43. Persentase Rumah Layak Huni



Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

Ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan setiap tahun. Rata-rata peningkatan ketersediaan rumah layak huni mencapai 2,91% per tahun. Pada tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni mencapai 88,007%. Artinya, 11,993% atau sekitar

38.384 unit rumah di Boyolali masih termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni. Jumlah *backlog* rumah di Kabupaten Boyolali mencapai 46.434 unit, jumlah ini berdasarkan data jumlah rumah di Kabupaten Boyolali di akhir 2020 yang mencapai 320.058 unit, sedangkan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 366.492 KK. Pengurangan jumlah *backlog* di Kabupaten Boyolali sebagian besar masih mengandalkan pendanaan dari Pengembang Perumahan baik rumah subsidi maupun non subsidi, penambahan jumlah rumah pada tahun 2018 sebanyak 1.663 unit, 2019 sebanyak 1.761 unit dan 2020 sebanyak 2.767 unit atau berada pada kisaran 1.600-2.800 unit per tahun. Di samping adanya pembangunan rumah swadaya. Di RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 melalui APBD Kabupaten Boyolali akan memulai untuk memfasilitasi pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) jika memungkinkan dari sisi pendanaan.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penanganan rumah tidak layak huni adalah kurang akuratnya sumber data terkait jumlah rumah tidak layak huni dan jumlah secara keseluruhan, tetapi sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 sudah dilakukan survey ulang data RTLH di seluruh Kabupaten Boyolali dan di tahun 2020 sampai semester 1 tahun 2021 dilakukan sinkronisasi terhadap hasil survey tersebut, dengan demikian diharapkan data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi riil jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2021 yang akan dijadikan kondisi awal RPJMD 2022-2026.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada dua jenis pelayanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah yang diberlakukan sejak tahun 2019.

Dalam pelaksanaan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten Boyolali, pada tahun 2019 baru dimulai dengan pengumpulan data dan verifikasi rumah korban bencana mulai tahun 2018 sampai 2019. Hasil pendataan dan verifikasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa semua rumah warga yang terkena bencana sudah dibangun/direhabilitasi kembali dengan berbagai sumber

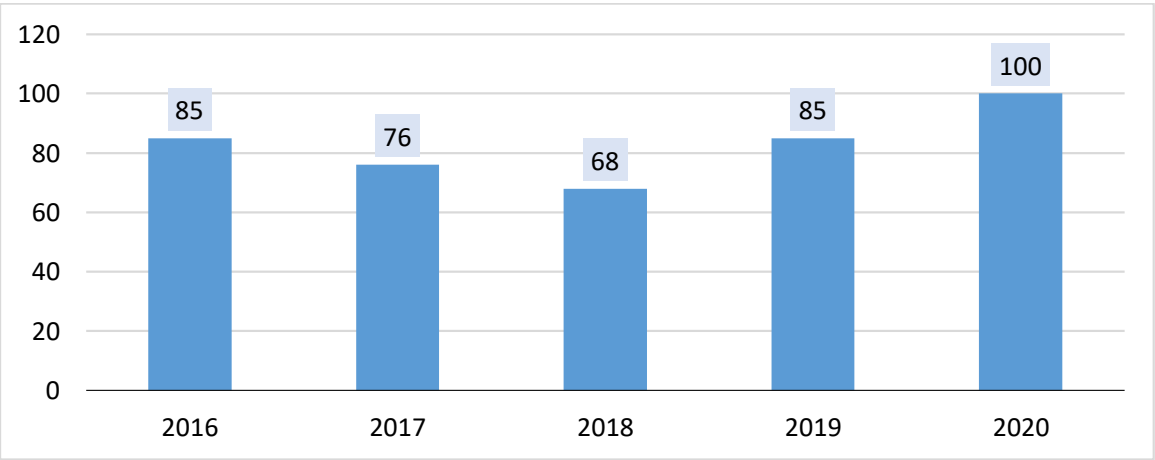
pendanaan. Pada tahun 2020, jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi sebanyak 14 unit.

Adapun pelaksanaan SPM fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, pada tahun 2019 pemerintah telah merelokasi 9 unit rumah karena terkena proyek jembatan. Pada tahun 2020, upaya fasilitasi tersebut dilakukan dengan penggantian aset tanah/bangunan milik masyarakat yang terkena proyek Pemerintah Kabupaten, yaitu sebanyak 19 aset tanah/bangunan milik masyarakat. Selain itu, sejak tahun 2020 juga dilaksanakan identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman yang selanjutnya akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana relokasi pada tahun-tahun mendatang menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan.

2.3.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Secara umum capaian pelayanan guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Boyolali sudah cukup baik. Beberapa indikator yang menggambarkan Kabupaten Boyolali cukup kondusif antara lain penurunan jumlah pelanggaran perda, penurunan jumlah kejadian kriminalitas, penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3) serta beberapa indikator lainnya. Selain itu, pada aspek kebencanaan terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan seperti partisipasi masyarakat dalam pembentukan desa tangguh bencana, pemahaman masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana, pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana dan hal lain yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

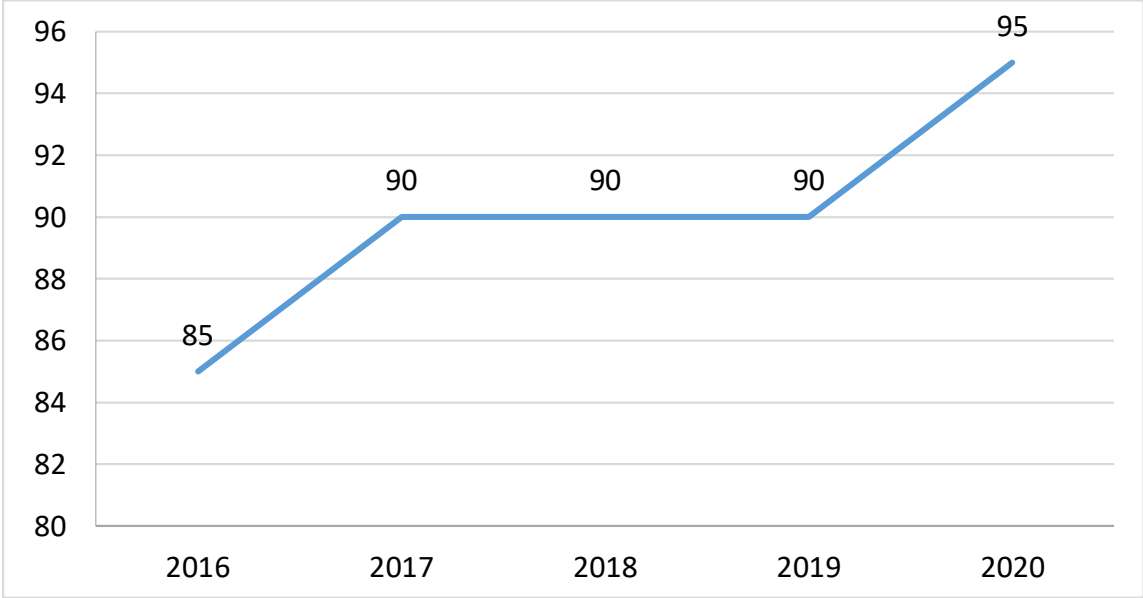
Grafik 2. 44. Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Satpol PP Kabupaten Boyolali, 2020

Persentase pelanggaran perda di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2019 menunjukkan trend yang fluktuatif. Persentase terendah pada tahun 2018 sebesar 68%, kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2020. Adapun upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Perda diantaranya operasi tipiring, operasi cukai tembakau, operasi PKL dan operasi reklame. Selain itu, dilakukan juga kegiatan penyuluhan ke beberapa tempat yang berpotensi menjadi sumber berkembangnya kegiatan prostitusi seperti tempat karaoke, panti pijat dan sebagainya.

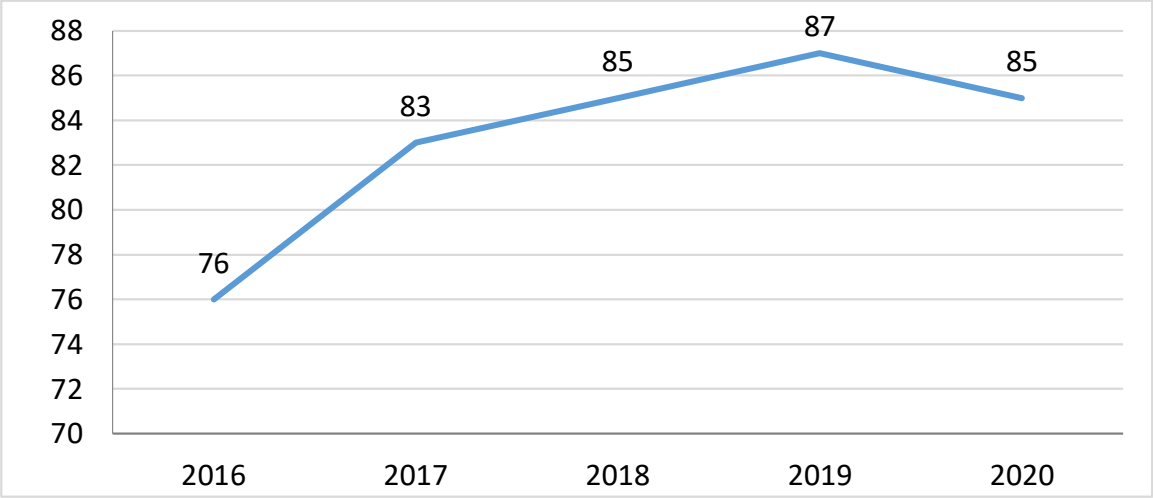
Grafik 2. 45. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Satpol PP Kabupaten Boyolali, 2020

Selama periode 2016-2020, capaian tingkat penyelesaian K3 di Kabupaten Boyolali naik sebesar 10%. Namun, kenaikan tersebut hanya terjadi pada tahun pertama dan terakhir, sedangkan tiga tahun periode 2017-2019 mengalami stagnasi sebesar 90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian K3 di Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi intensif mulai dari pemerintahan di level desa, kecamatan hingga instansi di level daerah untuk menjaga kondusivitas wilayah. Beberapa upaya yang telah dilakukan guna menurunkan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten boyolali diantaranya kegiatan patroli wilayah, PAM Terpadu yang dilaksanakan pada saat hari raya dan tahun baru, kegiatan PAM *Car Free Day* dan kegiatan terpadu antar instansi lainnya.

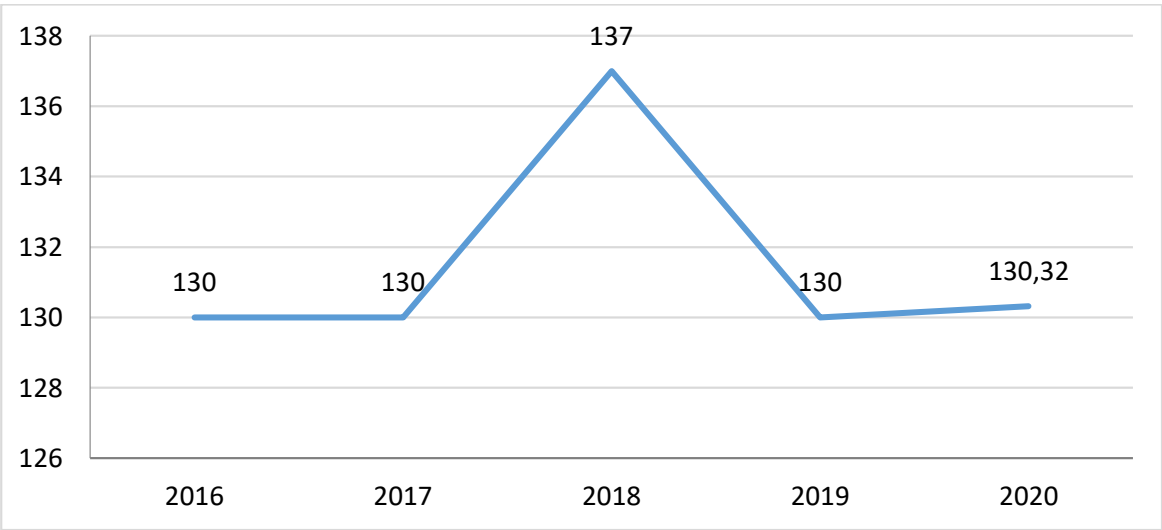
Grafik 2. 46. Jumlah Tindak Kriminalitas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah tindak kriminalitas di Kabupaten Boyolali mengalami tren cenderung meningkat sejak tahun 2016 hingga 2019, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut patut diapresiasi karena saat terjadi pandemic Covid-19 angka kriminalitas di Kabupaten Boyolali cenderung turun. Namun demikian, upaya pencegahan harus tetap dilakukan angka kriminalitas bisa ditekan dan tidak naik kembali. Adapun upaya yang bisa dilakukan seperti pembinaan, pelatihan dan koordinasi dari berbagai sektor seperti desa, kecamatan serta instansi terkait lainnya. Optimalisasi serta konsistensi dalam menekan angka kriminalitas menjadi fokus guna terwujudnya Kabupaten Boyolali yang aman dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Grafik 2. 47. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

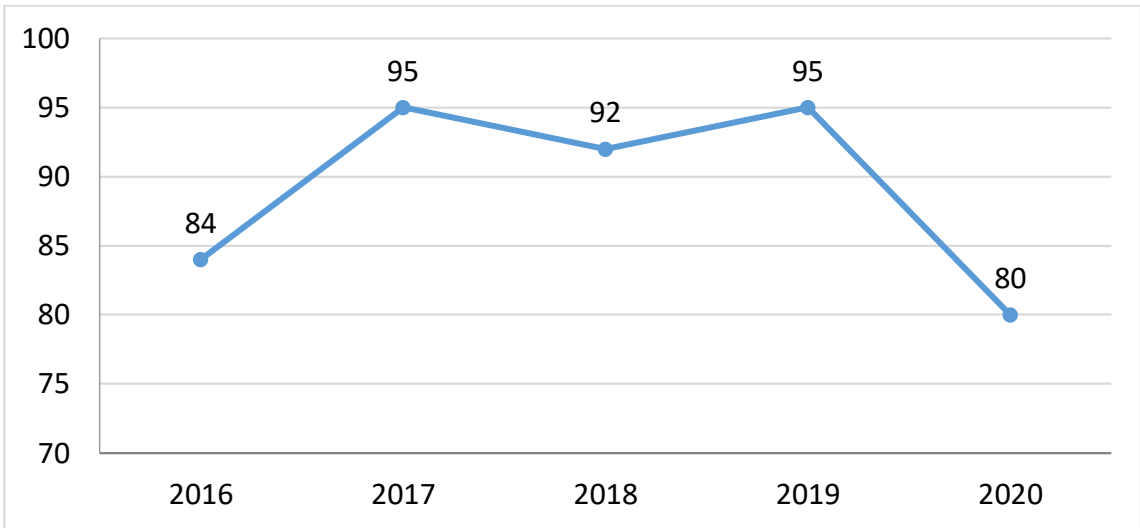


Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2021

Skor Indeks Resiko Bencana (IRBI) di Kabupaten Boyolali selama periode 2016-2020 mengalami trend yang fluktuatif. Skor tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 137, sedangkan rata-rata skor selama lima periode

sebesar selama 130. Rata-rata tersebut masuk dalam kategori sedang. Capaian tersebut perlu ditingkatkan mengingat Kabupaten Boyolali masuk dalam area kawasan Merapi.

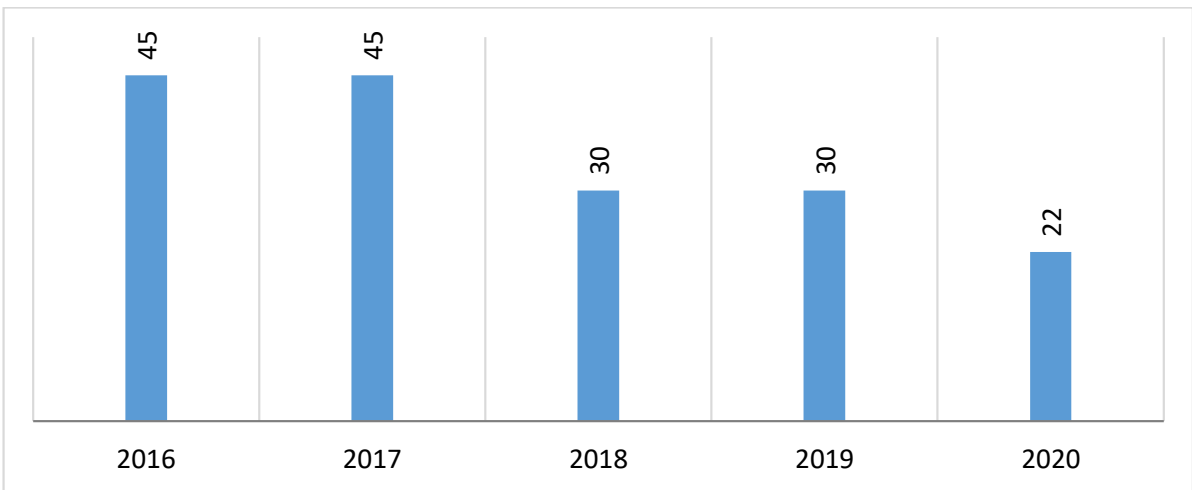
Grafik 2. 48. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Satpol PP Kabupaten Boyolali, 2021

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020 menunjukkan trend fluktuatif. Secara umum, capaian tertinggi pada tahun 2017-2019 yakni diatas 90%. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 80%. Cakupan pelayanan kebakaran merupakan indikator penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana setiap tahun ditargetkan 100%. Untuk itu, selama periode lima tahun kedepan upaya pelayanan kebakaran Kabupaten Boyolali harus ditingkatkan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pemadam kebakaran, peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran dan peningkatan *response time rate*.

Grafik 2. 49. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Satpol PP Kabupaten Boyolali, 2021

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) yaitu total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman. Artinya, semakin sedikit waktu yang diperlukan, maka semakin cepat kebakaran tertangani. Berdasarkan tabel diatas, tingkat waktu tanggap Kabupaten Boyolali menunjukan trend positif yaitu dari 45 menit pada tahun 2016 menjadi 22 menit pada tahun 2020.

Tabel 2. 36. Jumlah Desa Tangguh Bencana Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

Tahun	Jumlah Desa Tangguh Bencana
2016	4 Desa
2017	4 Desa
2018	2 Desa
2019	2 Desa
2020	1 Desa
Total	13 Desa

Sumber: BPBD Kabupaten Boyolali, 2021

Jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Boyolali setiap tahunnya mengalami penurunan. Dari bertambah 4 desa pada tahun 2016, menjadi bertambah 1 desa pada tahun 2020, sehingga total desa Tangguh bencana Kabupaten Boyolali selama 2016-2020 hanya terbentuk 13 desa. Kabupaten Boyolali sebagai daerah rawan erupsi Merapi serta potensi bencana lainnya masih perlu upaya peningkatan jumlah desa Tangguh bencana.

2.3.1.1.6. Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan pelayanan sosial guna untuk memenuhi kebutuhan dasar satiap warganya. Pelayanan sosial tersebut terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta. Pemerintah melalui Dinas Sosial melakukan pelayanan sosial terutama kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari 30 jenis PMKS. Berikut data jumlah PMKS di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 2. 37. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016- 2020

No	JENIS PMKS	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tuna Netra	533	608	540	333	409
2	Tuna Tubuh	1.691	1.996	1.869	1.445	1.686
3	Tuna Mental	888	1.347	1.091	591	1.026
4	Tuna Runggu	630	667	598	368	478
5	Anak Balita Terlantar	230	135	122	50	50
6	Anak Terlantar	572	1.206	1.191	679	689
7	Anak Korban Kekerasan	0	1	0	5	5
8	Anak Nakal	0	0	0	0	315
9	Anak Jalanan	0	0	9	0	1
10	Anak Cacat	56	945	1.150	242	156
11	Wanita Rawan Ekonomi	670	764	626	330	330
12	Wanita Korban Kekerasan	25	0	3	1	12
13	Lanjut Usia Terlantar	1.430	1.110	1.082	646	1.386
14	Lanjut Usia Korban Kekerasan	0	0	0	0	0
15	Penyandng cacat	0	4.016	4.402	155	155
16	Penyandang HIV	3	1	18	3	3
17	Tuna Susila	0	0	3	7	5
18	Pengemis	28	6	10	56	68
19	Gelandangan	0	6	2	13	15
20	Bekas Narapidana	67	56	59	14	14
21	Pekerja Migran Bermasalah	0	0	0	1	0
22	Korban Penyalahgunaan Napza	0	1	2	11	1
23	Keluarga Fakir Miskin	63.697	85.019	88.755	60.351	64.362
24	Keluarga berumah tak layak huni	0	0	0	0	0
25	Keluarga bermasalah psikologi	33	46	36	12	11
26	Keluarga Rentan	0	0	0	0	0
27	Komunitas Adat Terpencil	0	0	0	0	0
28	Masyarakat tinggal di daerah bencana	0	0	0	0	0
29	Korban Bencana Alam	17	45	39	96	169
30	Korban Bencana Sosial	21	0	0	0	0
Total		70.591	97.975	101.607	65.409	71.346

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 2020

Berdasarkan tabel di atas, jumlah PMKS di Kabupaten Boyolali selama periode 2016-2020 menunjukkan trend fluktuatif. Jumlah PMKS tertinggi pada tahun 2018 sebanyak 101.607 jiwa dan terendah pada tahun 2019 sebanyak 65.409 jiwa, namun meningkat menjadi 71.346 pada tahun 2020 akibat pandemi Covid19 yang menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Jenis PMKS terbanyak selama periode lima tahun yaitu keluarga fakir miskin sebanyak 88.755 jiwa pada tahun 2018.

Sedangkan jenis PMKS yang mengalami jumlah penurunan cukup signifikan diantaranya balita terlantar dan penyandang cacat. Jenis PMKS yang jumlahnya relatif cukup besar diantaranya penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, pengemis dan wanita rawan ekonomi. Namun demikian, semua jenis PMKS memerlukan penyelesaian melalui berbagai intervensi.

Selain data jumlah PMKS, kinerja pelayanan sosial dilihat dari cakupan pelayanan sosial PMKS yang tertangani. Berikut cakupan PMKS yang tertangani di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 2. 38. Cakupan PMKS yang Tertangani di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

NO	TAHUN	CAKUPAN PMKS YANG TERTANGANI
1	2016	35,70%
2	2017	78,12%
3	2018	75,48%
4	2019	87,5%
5	2020	90,54%

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Kabupaten Boyolali, 2021

Capaian PMKS yang tertangani di Kabupaten Boyolali selama periode 2016-2020 menunjukkan trend fluktuatif. Persentase PMKS yang tertangani terendah pada tahun 2016 sebesar 35,70% dan persentase PMKS yang tertangani tertinggi pada tahun 2020 sebesar 90,54%. Kenaikan tersebut menunjukkan peningkatan sangat signifikan karena hampir mendekati 100%. Penanganan PMKS di Kabupaten Boyolali dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan sosial, pelatihan dan pemberian bantuan sosial kepada anak terlantar, penyandang disabilitas, lansia terlantar, fakir miskin dan PMKS lainnya serta penanganan korban bencana. Selama periode lima tahun mendatang, capaian penanganan PMKS harus dipertahankan dan diupayakan untuk terus meningkat.

Dalam meningkatkan pelayanan sosial dibutuhkan sarana sosial berupa panti. Panti pelayanan sosial ada yang dimiliki pemerintah provinsi, kabupaten dan swasta. Untuk kabupaten Boyolali, terdapat 1 rumah singgah digunakan sebagai tempat tinggal sementara untuk menampung penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis. Sedangkan panti sosial yang dimiliki swasta

sebanyak 16 panti dengan daya tampung penghuni sebanyak 504 orang. Berikut daftar panti sosial di Kabupaten.

Tabel 2. 39. Daftar Panti Sosial di Kabupaten Boyolali

No	Nama Panti	Lokasi	Jumlah Penghuni panti
1	PYAP Muhamaddiyah	Andong	31
2	PA Yatim Aisyiyah 1	Boyolali	5
3	PA Yatim Aisyiyah 2	Boyolali	15
4	PA Filla Delfia	Boyolali	22
5	PA Darul Hadlonah	Boyolali	12
6	PA Darul Hadlonah 2	Boyolali	35
7	PA Widya Kasih	Boyolali	15
8	PA Yatim Aisyiyah 3	Banyudono	11
9	YPALB	Cepogo	58
10	RHBL MENTAL Wisma Budi Makarti	Boyolali	134
11	PA Yakini Mulia	Mojosongo	12
12	PW. Yuswa Mulya	Mojosongo	12
13	PA. Yatim Abd R	Nogosari	54
14	PA.Al-Huda	Sawit	9
15	PA.Yatim Aisyiyah 4	Simo	51
16	Rumah Peduli Anak Anugrah	Mojosongo	28
Jumlah			504

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 2021

Berdasarkan tabel diatas, panti sosial di Kabupaten Boyolali tersebar hanya di beberapa kecamatan saja, sehingga kurang menjangkau para PMKS di kecamatan lainnya. Keberadaan panti sosial cukup membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial. Untuk itu, upaya pengembangan maupun penambahan jumlah panti sosial melalui berbagai skema kerjasama perlu dilakukan selama periode kedepan. Selain panti sosial, dalam mendukung penanganan PMKS juga bisa dengan mengoptimalkan kerjasama dengan para Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Berikut data PSKS di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 2. 40. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Jenis PSKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	557	557	645	645	645
2	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	34	34	34	50	50
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	20	20	22	24	22
4	Karang Taruna	257	257	162	167	162
5	Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1
6	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	19	19	19	22	22
7	Dunia Usaha	102	102	102	102	627
TOTAL		990	990	985	1.011	1.529

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Boyolali 2020

Data jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2020 sebanyak 1.529 jiwa. Jumlah PSKS tahun-tahun sebelumnya berkisar pada angka 900 hingga 1000 jiwa. Data Dunia Usaha tahun 2019 sebanyak 102 tidak termasuk Dunia Usaha Kecil. Data Dunia Usaha Tahun 2020 sebanyak 627 terdiri dari Dunia Usaha Besar 70, Sedang 34 dan kecil 513. Besarnya jumlah PSKS yang ada dapat dioptimalkan untuk menangani permasalahan sosial serta pelayanan sosial yang ada di Kabupaten Boyolali. Peningkatan kerjasama dengan PSKS dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM PSKS, perbaikan sarana dan prasarana pendukung hingga membuat program/kegiatan yang lebih efektif dalam melakukan pelayanan.

2.3.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

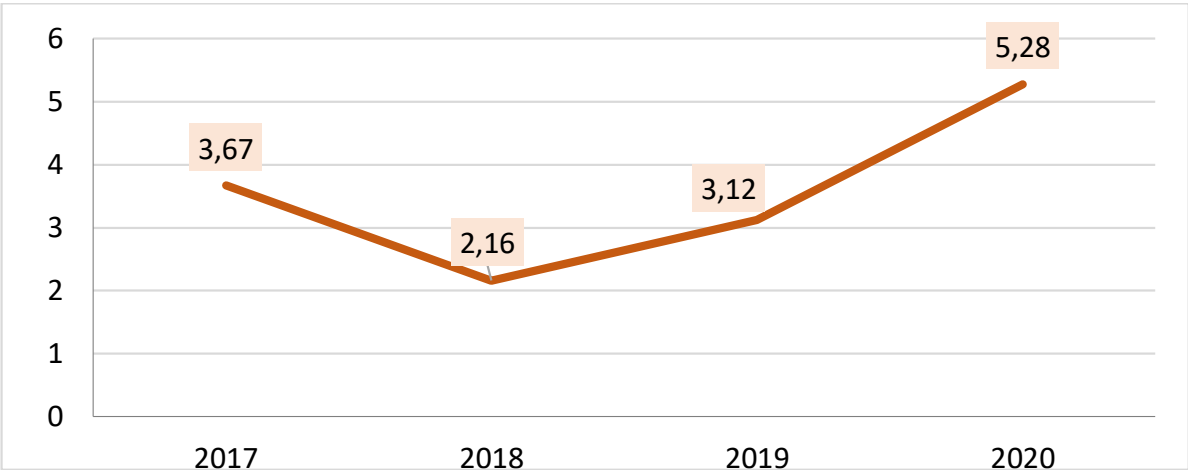
Layanan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi analisis capaian kinerja pada urusan tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan

olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

2.3.1.2.1. Tenaga Kerja

Urusan wajib non pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan mencakup pelayanan ketenagakerjaan dari sisi partisipasi angkatan kerja, pendidikan terakhir yang ditamatkan, sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja. Berikut beberapa data terkait urusan ketenagakerjaan.

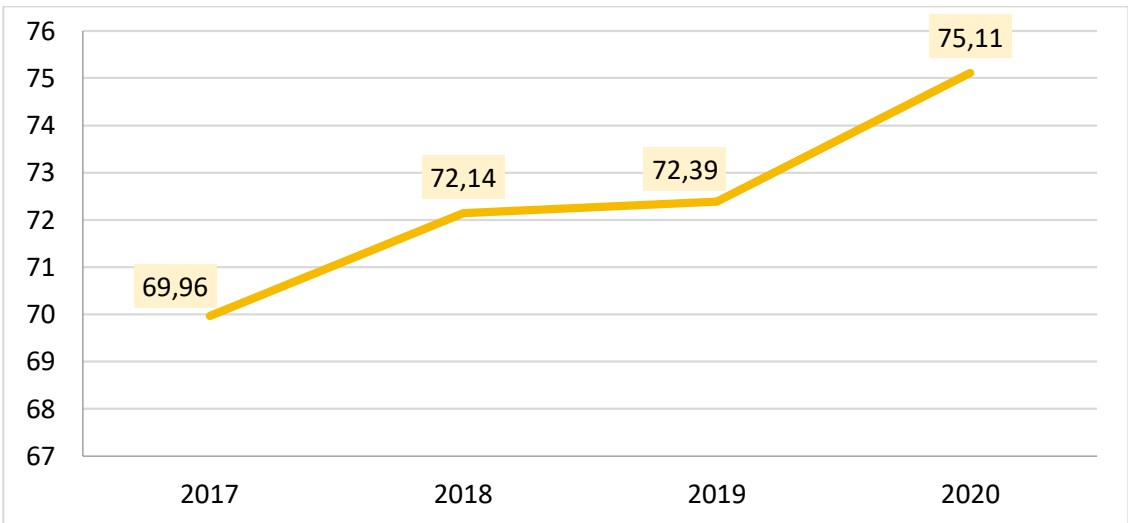
Grafik 2. 50. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Boyolali 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021

Berdasarkan data selama empat tahun terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi yang cukup tajam terutama pada tahun 2020 yakni sebesar 5,28. Hal ini menunjukkan bahwa serapan tenaga kerja belum menunjukkan konsistensi sehingga jumlah pengangguran mengalami kenaikan dan penurunan.

Grafik 2. 51. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Boyolali 2017-2020

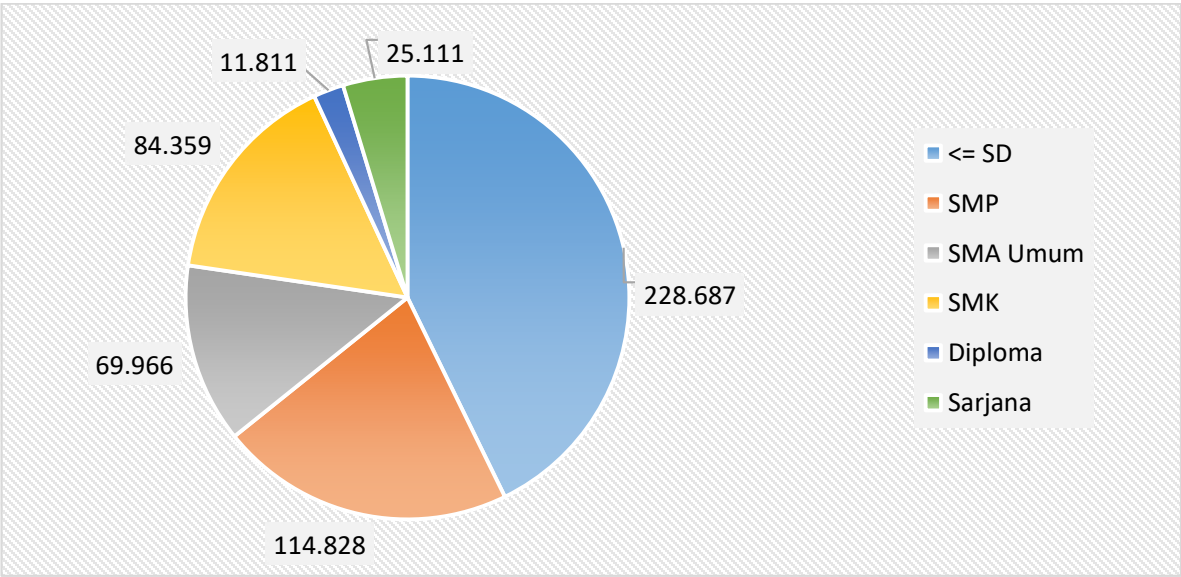


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Boyolali tahun 2017-2020 terus mengalami peningkatan meskipun masih dibawah angka 80%. Hal itu menunjukkan bahwa mendekati tiga perempat dari jumlah penduduk usia kerja dapat terserap di dunia kerja. Dengan perhitungan tersebut, masih terdapat sekitar 24,89% penduduk usia kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian, hal ini menjadi bahan untuk perbaikan kinerja urusan ketenagakerjaan pada periode perencanaan berikutnya.

Aspek ketenagakerjaan juga dapat dilihat dari kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja. Berdasarkan data tahun 2019, kualifikasi tenaga kerja di Kabupaten Boyolali masih didominasi oleh lulusan setara pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 42,76% atau 228.687 dari total pekerja sebanyak 534.762. Pekerja berijazah SMP sebesar 21,47%, disusul oleh pekerja dengan pendidikan terakhir SMK dan SMA (masing-masing sebesar 15,78% dan 13,08%). Pada tahun yang sama, pekerja dengan gelar sarjana dan diploma hanya masing-masing sebesar 4,70% dan 2,21%. Data tersebut menunjukkan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Boyolali mayoritas masih berada pada pekerjaan-pekerjaan dengan pendidikan rendah pada sektor-sektor non-formal. Fakta tersebut menjadi bahan yang berguna bagi perumusan kebijakan yang terarah dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kerja.

Grafik 2. 52. Jumlah Penduduk Bekerja berdasarkan Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan Pada Tahun 2019

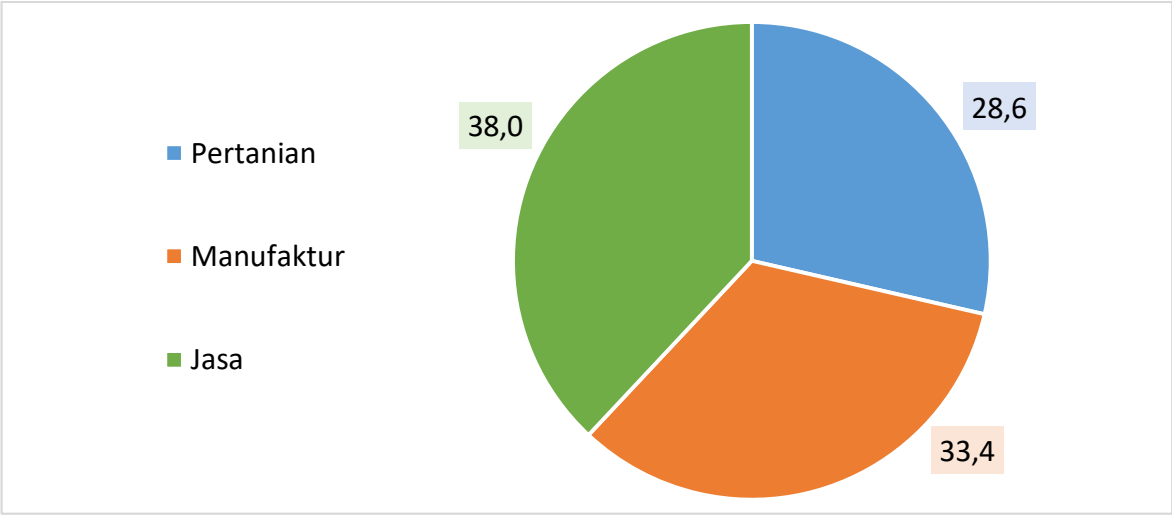


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2019

Jika dilihat dari sektor lapangan pekerjaannya, tiga sektor utama penyerap tenaga kerja di Boyolali adalah jasa, manufaktur, dan pertanian. Sektor jasa mampu menyerap 38,0% tenaga kerja, sedangkan manufaktur

dan pertanian mempekerjakan sekitar 33,4% dan 28,6% tenaga kerja. Jika dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi Kabupaten Boyolali, maka data tersebut sangat konsisten mengingat sektor pertanian, jasa, dan industri manufaktur menjadi penyokong utama perekonomian daerah. Data ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk pengembangan ekonomi dan ketenagakerjaan ke depan, apakah akan fokus pada penguatan pada sektor ini atau melakukan penguatan pada sektor lain sebagai upaya pemerataan.

Grafik 2. 53. Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor Pekerjaan Pada Tahun 2019



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, Agustus 2019

Aspek kesejahteraan tenaga kerja juga menjadi hal yang penting untuk mengukur kinerja pelayanan urusan ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Boyolali terus mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kabupaten lain terutama kabupaten Sukoharjo dan Klaten, maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja di Boyolali masih lebih rendah.

Tabel 2. 41. Perkembangan UMK di Boyolali Tahun 2016-2020

Tahun	KHL	UMK	Persentase Kenaikan	Jumlah Kenaikan dari Tahun Sebelumnya (Rp)
2016	1.403.500,00	1.403.500,00	17,17%	205.700,00
2017	1.519.289,00	1.519.289,00	8,25%	115.789,00
2018	1.651.650,00	1.651.650,00	8,71%	132.361,00
2019	1.790.000,00	1.790.000,00	8,38%	138.350,00
2020	1.942.329,00	1.942.500,00	8,52%	152.500,00

Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2020

Secara keseluruhan, kondisi pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali sudah menunjukkan kinerja positif dengan ditandai berkurangnya pengangguran dan semakin tingginya serapan tenaga kerja. Namun demikian, kualifikasi tenaga kerja yang masih didominasi oleh pekerja lulusan SD dan juga serapan tenaga kerja harus menjadi perhatian pada periode perencanaan berikutnya. Selain itu, jauhnya perbedaan kemampuan antar sektor dalam menyerap tenaga kerja juga perlu menjadi bahan perumusan kebijakan daerah dalam sektor perekonomian secara umum.

Selain itu, kondusifitas ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali dapat dilihat melalui jumlah perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Berikut adalah data mengenai perselisihan hubungan industrial.

Tabel 2. 42. Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial Kabupaten Boyolali 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	14	6	8	7	7

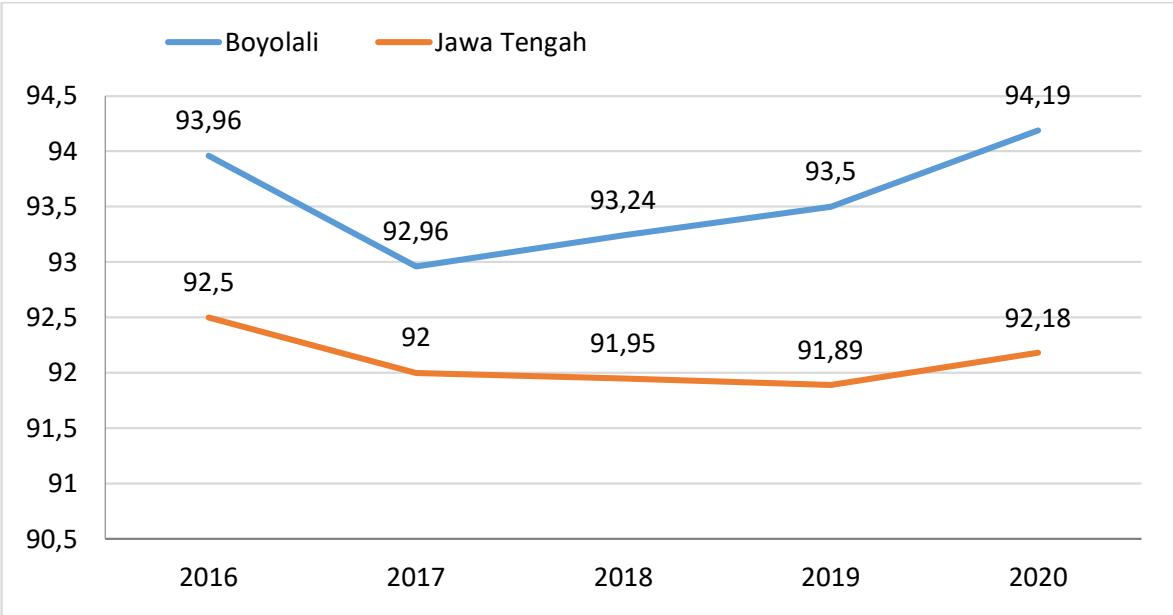
Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Boyolali cenderung menurun dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2018. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya permasalahan dan sengketa ketenagakerjaan yang terjadi antara perusahaan dan karyawannya sehingga Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui dinas teknis terkait perlu untuk berperan dalam rangka terus menekan perselisihan hubungan industrial.

2.3.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan aspek serius dalam pembangunan manusia. Capaian pemberdayaan perempuan biasanya diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator IPG mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan indikator IDG menunjukkan seberapa jauh perempuan mampu memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

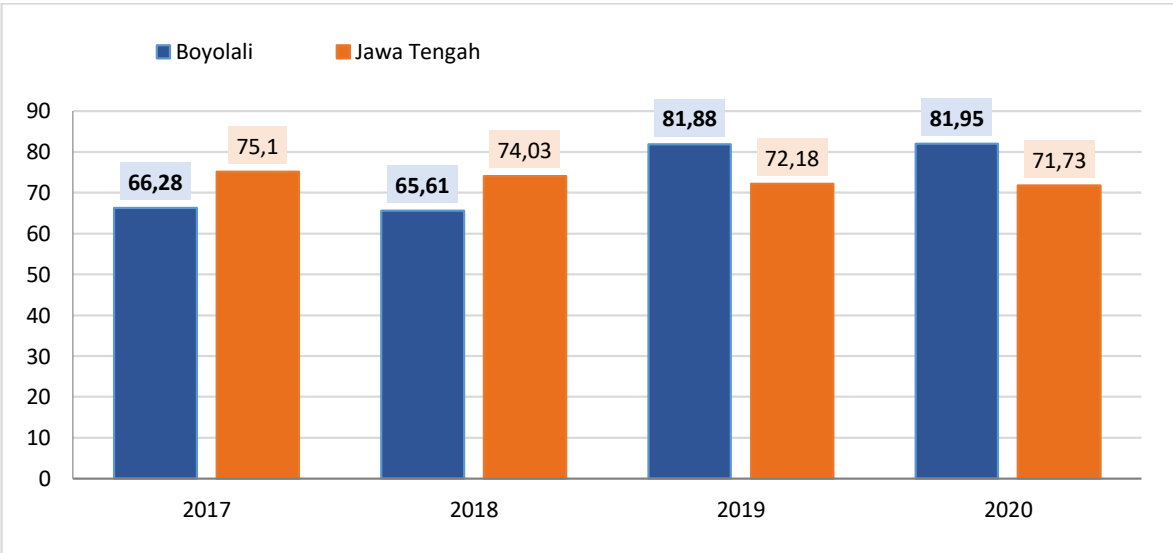
Grafik 2. 54. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian IPG Kabupaten Boyolali selama tahun 2016-2020 menunjukkan trend yang fluktuatif. Namun demikian, capaian IPG Kabupaten Boyolali tergolong cukup baik karena berada diatas angka 90. Capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 94,19. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding dengan capaian provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18 pada tahun yang sama. Tingginya capaian IPG Kabupaten Boyolali menunjukan semakin setara antara kondisi perempuan dan laki-laki dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita.

Grafik 2. 55. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

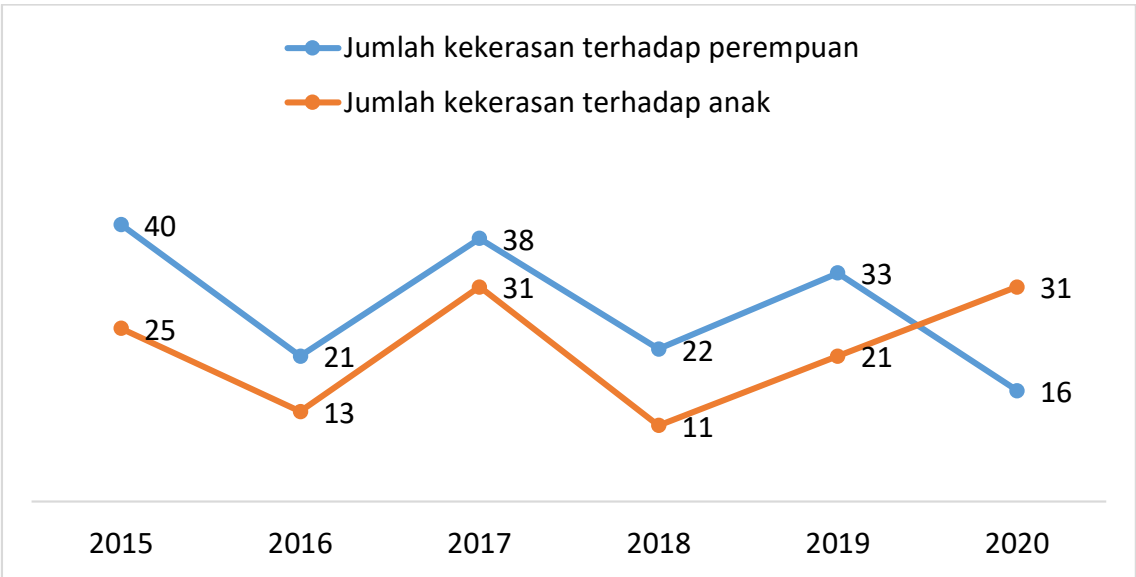


Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian IDG Kabupaten Boyolali tahun 2017-2020 menunjukan trend naik, kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 65,61.

Capaian IDG tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 81,95. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73. Semakin membaiknya capaian IDG mengindikasikan bahwa semakin tingginya partisipasi perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Grafik 2. 56. Perkembangan Jumlah Kekerasan di Kabupaten Boyolali 2015-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Boyolali, 2021

Di samping dua indikator pemberdayaan perempuan di atas, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh daerah. Berdasarkan data yang ada, angka kekerasan perempuan dan anak tahun 2015-2020 mengalami trend yang fluktuatif. Selama periode 2015-2019, angka kekerasan perempuan dan anak selalu mengalami trend yang sama baik meningkat/menurun. Namun, kondisi tersebut berbeda pada tahun 2020 dimana angka kekerasan anak lebih tinggi dibanding kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan hasil kajian selama pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa anak lebih rentan mengalami kekerasan selama pandemi akibat ketidaksiapan para orangtua dalam mendampingi *school from home* maupun mengelola dampak ekonomi keluarga akibat pandemic Covid-19.

2.3.1.2.3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi kecukupan, ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan terpenuhinya kebutuhan pangan baik secara kualitatif maupun kuantitatif bagi masyarakat untuk menuju masyarakat yang sehat sejahtera dan produktif. Berikut capaian kinerja bidang ketahanan pangan Kabupaten Boyolali tahun 2015-2020.

Tabel 2. 43. Capaian Kinerja Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

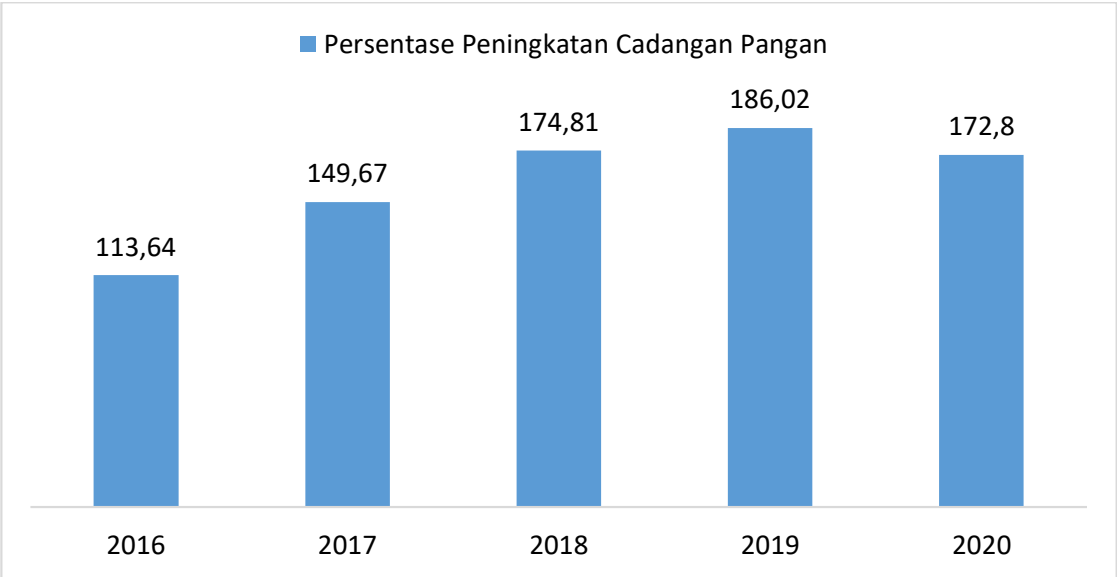
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,5	86,8	86,9	90	87
Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	17,60%	19,47%	21,35%	23,33%	25,09%

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2021

Penghitungan skor PPH bertujuan untuk menganalisis pola konsumsi pangan masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang ideal dengan memperhatikan aspek kombinasi ragam pangan, kebutuhan gizi, cita rasa dan daya beli masyarakat. Skor PPH Kabupaten Boyolali selama periode 2016-2020 tergolong cukup baik yakni diatas 85%. Peningkatan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 90%, kemudian turun menjadi 87% pada tahun 2020. Peningkatan skor PPH disebabkan karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya pola makan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA). Capaian ini harus dipertahankan dan terus ditingkatkan pada periode pembangunan berikutnya. Peningkatan PPH dapat dilakukan melalui peningkatan pengelolaan pasca panen, pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dan sebagainya.

Selain itu, untuk mendukung ketersediaan pangan diperlukan lumbung pangan masyarakat. Selama periode lima, persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) meningkat sebesar 7,49% dengan rata-rata kenaikan per tahun sebesar 1,87%. Meskipun persentase kenaikan cukup besar, namun jika dibandingkan dengan jumlah desa secara keseluruhan, maka masih perlu upaya untuk peningkatan jumlah desa yang memiliki LPMD. Pada tahun 2020, baru 25,09% desa yang sudah memiliki LPMD.

Grafik 2. 57. Persentase Peningkatan Cadangan Pangan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2021

Ketersediaan cadangan pangan penting bagi daerah untuk menjaga dan memastikan konsumsi masyarakat serta kestabilan harga pangan utama. Ketersediaan pangan di daerah dapat dilihat melalui persentase peningkatan cadangan pangan. Selama periode 2016-2019, cadangan pangan Kabupaten Boyolali cenderung meningkat, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Meskipun turun, jumlah tersebut tergolong cukup tinggi yakni 172,8% pada tahun 2020. Tingginya ketersediaan pangan menunjukkan bahwa jumlah cadangan pangan yang tersedia lebih banyak dibandingkan kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga cadangan dan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Boyolali terjaga.

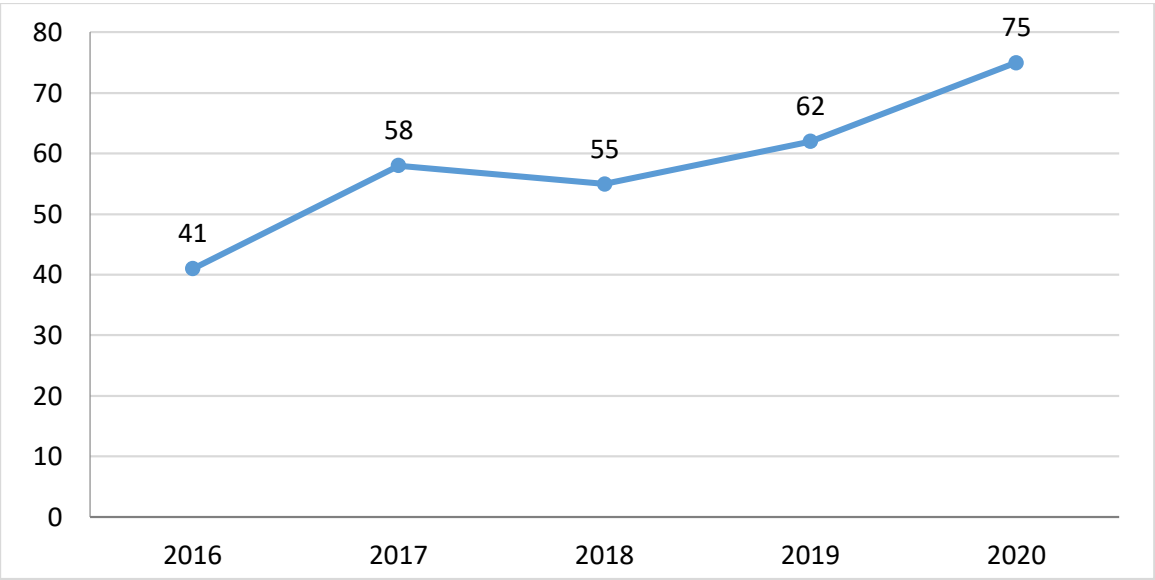
Keberhasilan Kabupaten Boyolali dalam meningkatkan cadangan pangan salah satunya disebabkan karena tercapainya surplus ketersediaan beras di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 sebesar 54.880 ton, sehingga cadangan pangan di Kabupaten Boyolali sebesar 2.553 ton per hari (186,02%). Kemudian Kabupaten Boyolali mampu surplus 7 dari 10 komoditas strategis dan mampu swasembada pangan yakni padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur ayam.

2.3.1.2.4. Pertanahan

Terkait kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah meliputi, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota, penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembagian oleh Pemerintah Daerah,

penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah, penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten, penerbitan izin membuka tanah dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah. pembangunan urusan pertanahan di Kabupaten Boyolali ditunjukan dengan indikator cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan.

Grafik 2. 58. Cakupan Permasalahan Pertanahan yang Diselesaikan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



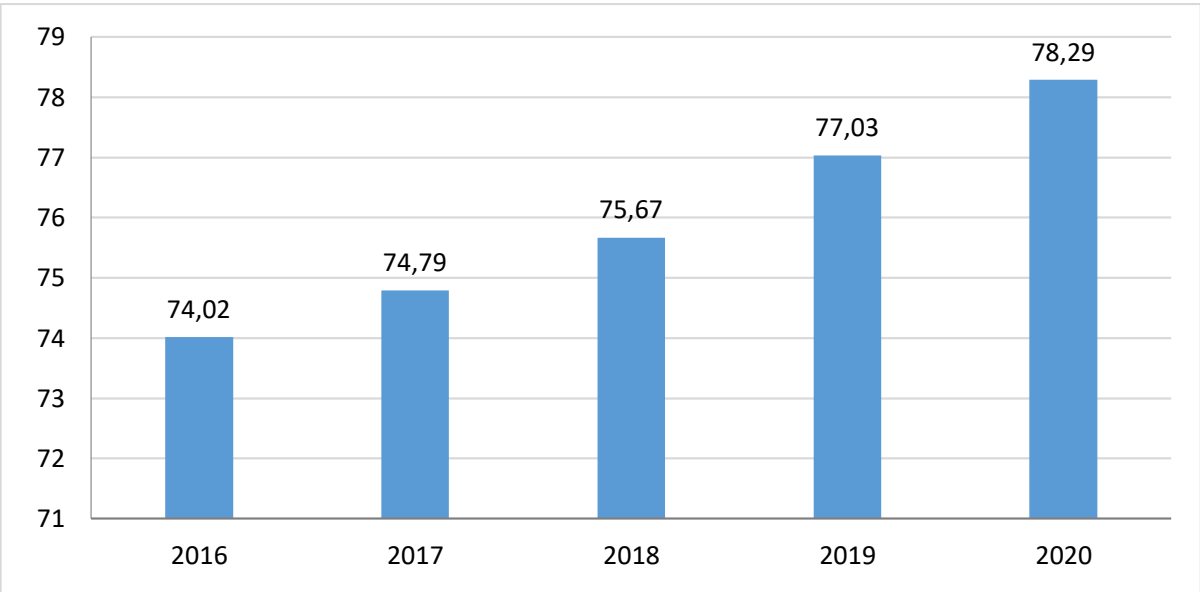
Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2021

Pembangunan dalam urusan pertanahan di Kabupaten Boyolali mengalami tren peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah pertanahan di Kabupaten Boyolali semakin baik. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam urusan pertanahan adalah terkait pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penatagunaan lahan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kondisi tersebut juga erat kaitannya dengan optimalisasi kerjasama antar institusi terkait dalam menyelesaikan sengketa pertanahan.

Selain sengketa pertanahan, kinerja pada bidang pertanahan dapat diukur dari capaian pensertifikatan tanah pada masyarakat. Untuk mendukung capaian pensertifikatan tanah, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN meluncurkan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Program tersebut bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat

secara gratis. Berikut capaian sertifikasi tanah di Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Grafik 2. 59 Persentase Pensertifikatan Tanah di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



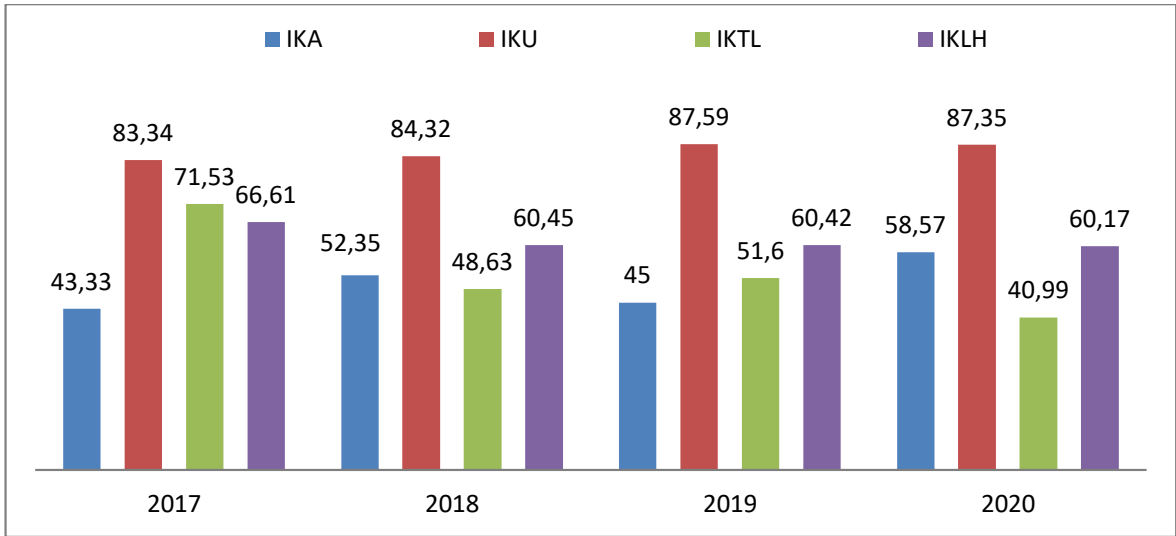
Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kab. Boyolali, 2021

Capaian kinerja pensertifikatan tanah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 pensertifikatan tanah sebesar 74,02%, naik menjadi 78,29% pada tahun 2020. Selama periode 2016-2020, capaian tersebut naik sebesar 4,27%. Kenaikan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pensertifikasian tanah di Kabupaten Boyolali cukup bagus. Namun demikian, kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan pada periode selanjutnya agar capaian kinerja bisa mendekati 100%.

2.3.1.2.5. Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan Daerah harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, indikator-indikator terkait lingkungan hidup juga penting untuk diperhatikan guna memastikan terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH merupakan indikasi awal yang dapat menggambarkan suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup periode tertentu.

Grafik 2. 60. Data IKLH-IKA-IKU-IKL Kabupaten Boyolali 2017-2020

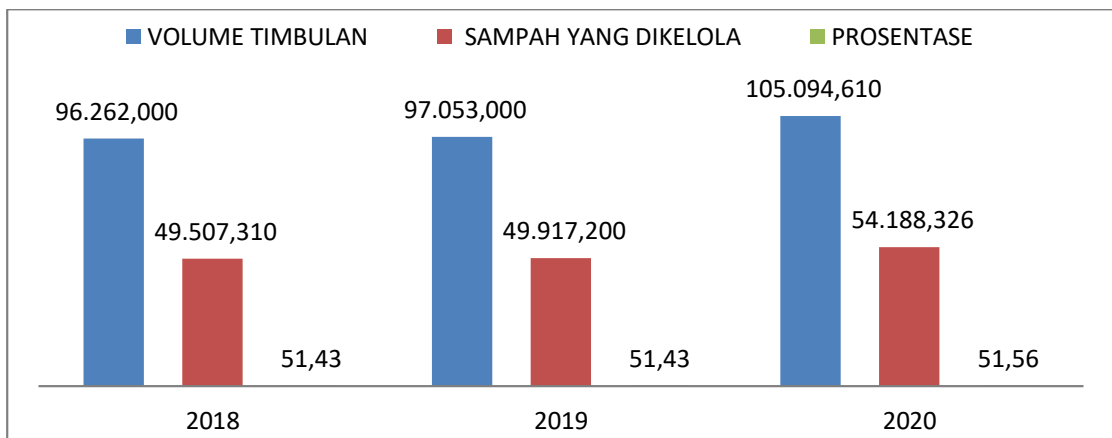


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2020

IKLH Kabupaten Boyolali pada tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan meskipun masih dalam kategori cukup baik. Capaian IKLH pada tahun 2017 jauh lebih tinggi karena terdapat perbedaan cara perhitungan IKLH, terutama pada komponen tutupan lahan. Data tutupan lahan diperoleh dengan menggunakan NDVI melalui citra landsat, sedangkan pada tahun 2018 hingga 2020, dilakukan perhitungan tutupan lahan secara manual.

Indikator lain yang perlu diperhatikan dalam urusan lingkungan hidup adalah terkait pengelolaan persampahan. Berdasarkan survei aspek sosial pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2018 hingga 2020 67% warga masih melakukan pembakaran sampah, 7% membuang sampahnya ke jurang atau sungai, dan sisanya melakukan pengomposan, menimbun dengan membuat jugangan, dan membawa sampah ke TPS. Hal ini menunjukkan pengelolaan sampah yang belum cukup baik.

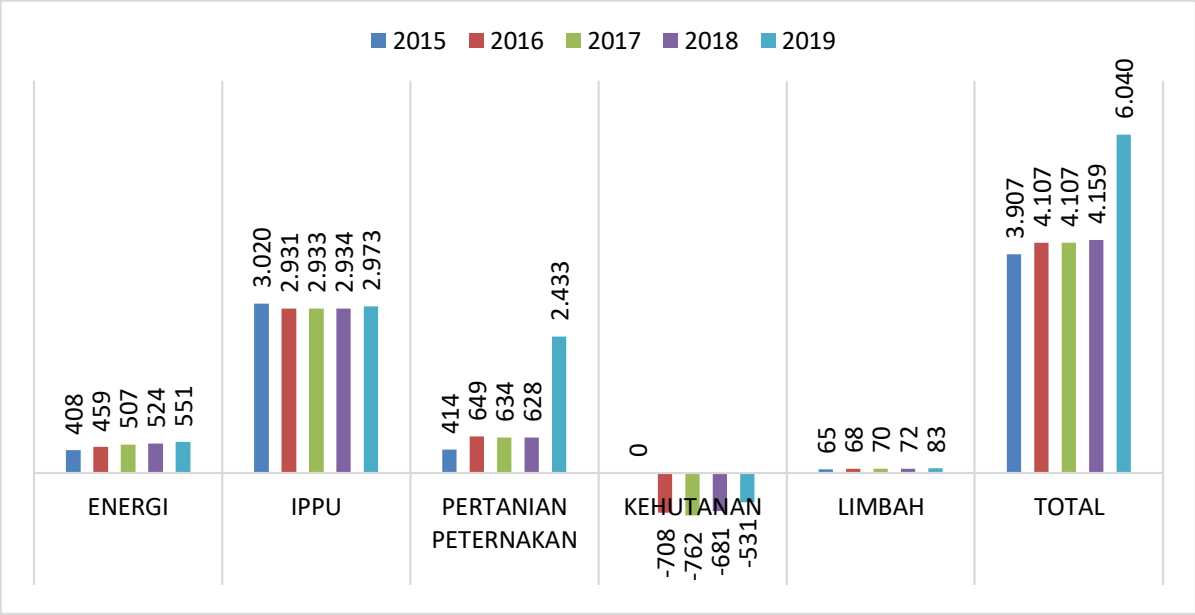
Grafik 2. 61. Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2020

Persentase sampah yang telah dikelola Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Boyolali sudah mencapai setengah dari jumlah timbunan sampah yang ada. Peningkatan pengelolaan sampah terus meningkat sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Capaian tersebut harus terus ditingkatkan agar jumlah sampah yang ada dapat terkelola secara maksimal, sehingga mengurangi kondisi lingkungan yang terdampak persampahan.

Grafik 2. 62. Data Inventarisasi Gas Rumah Kaca Kabupaten Boyolali Tahun 2015-2019



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali, 2020

Hasil perhitungan total emisi gas rumah kaca dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami kenaikan dengan kontributor terbesar dari sektor pertanian dan peternakan. Emisi gas rumah kaca dari sektor pertanian dan peternakan sebesar 47.768 tCO2-eq. Kontributor terbesar selanjutnya yaitu dari sektor energi dengan total emisi sebesar 2.449 tCO2-eq. Sumber emisi dari sektor pertanian berasal dari sektor pertanian konvensional yang masih masif dalam penggunaan pupuk kimia, pupuk yang belum terfermentasi dan pembakaran jerami di lahan pertanian. Aktivitas peternakan, emisi gas rumah kaca berasal dari kotoran ternak yang dihasilkan. Total gas emisi gas rumah kaca yang selalu mengalami kenaikan, berimplikasi terhadap kondisi perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Boyolali. Dengan demikian, upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca memiliki urgensi yang tinggi untuk diimplementasikan.

2.3.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencakup tertib administrasi. Indikator paling penting untuk mengukur kinerja pelaksanaan urusan ini berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan seperti e-KTP, akta kelahiran, dan juga kartu keluarga. Berdasarkan data pada tabel di bawah, persentase penduduk yang memiliki e-KTP sudah mendekati mencapai angka 101,23 %. Demikian juga dengan persentase kepemilikan kartu keluarga yang sudah mencapai angka 100. Artinya, cakupan pelayanan administrasi kependudukan sudah cukup maksimal.

Tabel 2. 44. Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Jenis Data	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk yang memiliki e-KTP	97,74	99,97	99,1	99,34	101,23
2	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran	63,88	64,95	64,84	65,22	66,3
3	Persentase penduduk yang memiliki kartu keluarga	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boyolali 2020

Indikator presentasi kepemilikan E-KTP memiliki jumlah presentase yaitu 101,23% hal ini disebabkan oleh penambahan kependudukan pindah datang sehingga penduduk yang wajib E-KTP dengan penduduk yang telah memiliki E-KTP memiliki perbedaan yang signifikan. Indikator lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, indikator ini mengalami kenaikan yaitu menjadi 66,3%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 33,7% penduduk Boyolali yang belum memiliki akta kelahiran. Oleh karena itu, hal ini menjadi poin penting dalam rangka memperbaiki cakupan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Boyolali. Sedangkan presentase penduduk yang memiliki kartu keluarga telah tercapai 100%, sehingga hanya perlu untuk meneruskan pencatatan selanjutnya.

2.3.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui proses pendampingan hingga pembagian sumber daya serta akses pembangunan. Pemberdayaa masyarakat dikatakan berhasil apabila masyarakat menjadi subjek pembangunan bukan objek pembangunan. Artinya, masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

Dalam pemerintahan daerah, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup pelaksanaan upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dan juga tugas pembantuan yang dilaksanakan di desa. Terdapat empat indikator utama dalam menggambarkan pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 45. Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2019 (%)

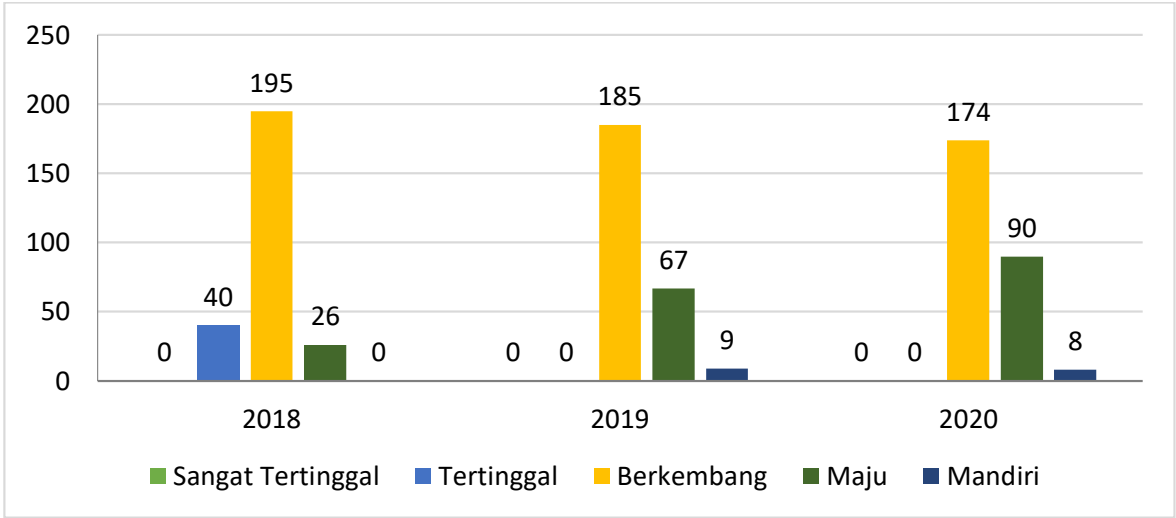
Indikator	Tahun			
	2016	2017	2018	2019
Kelompok Binaan PKK	100	31,36	100	101,05
LSM yang dibina	100	100	100	100
PKK Aktif	100	100	100	101,05
Posyandu Aktif	100	141,88	100	100

Sumber: LKPJ Kabupaten Boyolali 2020

Data di atas menunjukkan bahwa pencapaian pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kelompok PKK sudah cukup maksimal yaitu mencapai 100% atau sebanyak 287 PKK, yang terdiri dari kelompok PKK di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. Pada periode yang sama, capaian kinerja pembinaan posyandu juga menunjukan angka optimal (100%) dengan jumlah posyandu aktif sebanyak 1.539. Selain itu, pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga tercapai 100% dengan jumlah LSM yang dibina sebanyak 267. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang baru, nomenklatur Lembaga Swadaya Masyarakat diganti dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu LPMD untuk Desa dan LPMK untuk Kelurahan.

Selain itu, untuk melihat perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diukur dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang diukur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi setiap tahunnya. IDM memiliki 5 kategori penilaian yaitu sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. IDM Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 0,6970 dengan status berkembang. Nilai tersebut menempati peringkat 82 dari 434 kabupaten se-Indonesia.

Grafik 2. 63. Jumlah Status Kemandirian Desa di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2020



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah desa di Kabupaten Boyolali sebanyak 267 yang terdiri dari 261 desa dan 6 kelurahan. Berdasarkan IDM tahun 2020, jumlah desa mandiri turun 1 angka dari 9 desa menjadi 8 desa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 1 desa yang memiliki penurunan status dari segi ketahanan sosial, ekonomi maupun lingkungan. Upaya mempertahankan status desa dengan optimalisasi potensi desa oleh karena itu masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, capaian *outcome* pembangunan desa di Kabupaten Boyolali cukup baik dengan tidak adanya desa tertinggal.

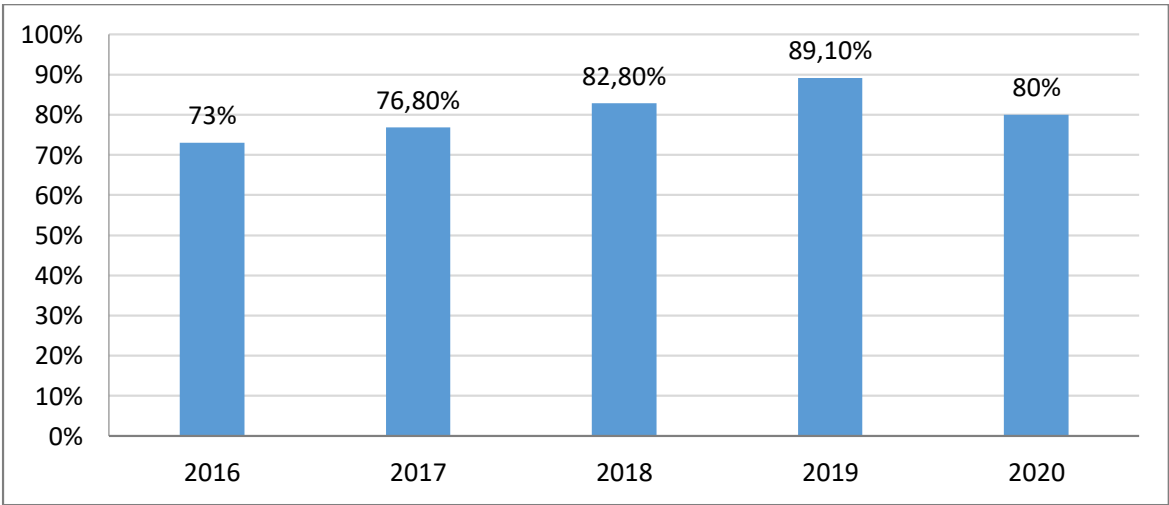
Dalam konteks tata kelola desa, Kabupaten Boyolali juga memiliki capaian baik dengan mendapat penghargaan sebagai Pemerintah Daerah terbaik pertama dalam kinerja penyaluran dana desa dari Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah pada 2019. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diurai untuk meningkatkan kemandirian desa, antara lain terkait optimalisasi potensi dan aset desa sebagai sarana peningkatan keberdayaan masyarakat desa, serta penguatan peran pendamping desa.

Kabupaten Boyolali juga memiliki kebijakan strategis terkait Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2020. Pembangunan kawasan perdesaan perlu sinergis dengan pembangunan desa, sekaligus sinergis antar perangkat daerah yang memiliki program dan kegiatan pembangunan di kawasan perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan di dalam perda didefinisikan sebagai pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi pengusulan Kawasan Perdesaan, penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan, pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

2.3.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelayanan wajib non pelayanan dasar urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berkaitan dengan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk pada level keluarga. Salah satu indikator utama yang bersifat proses adalah peserta KB Aktif di kalangan pasangan usia subur. Berdasarkan grafik di bawah ini, perkembangan peserta KB Aktif di Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan signifikan terutama sejak tahun 2016 dengan pertumbuhan rata-rata sebanyak 3-7 persen per tahun dari 73,00 menjadi 80,00 dari total sebanyak 174.263 pasangan usia subur (PUS).

Grafik 2. 64. Persentase Peserta KB Aktif di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Meskipun belum mencapai 100 persen, peningkatan jumlah peserta KB aktif menunjukkan adanya kinerja positif dalam rangka pengendalian

penduduk dengan target pasangan usia subur. Dilihat dari peserta KB aktif per kecamatan, persentase peserta KB aktif terbanyak pada Kecamatan Juwangi sebesar 255,80% dan Kecamatan Tamansari 145%. Tingginya persentase peserta KB aktif tersebut akibat jumlah peserta KB aktif lebih banyak dibanding jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada setiap kecamatan.

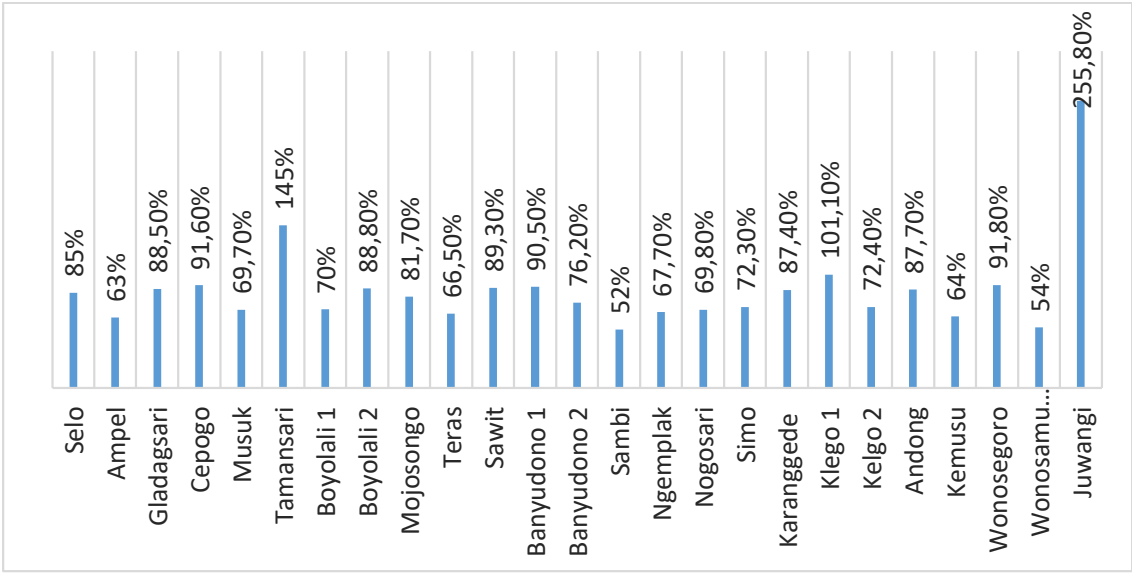
Tabel 2. 46. Persentase *Unmet need* Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Unmeet need	10,44	9,84	13,97	14,29	13,22

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Boyolali, 2021

Dalam pengendalian jumlah penduduk, ketersediaan alat kontrasepsi untuk penundaan kehamilan sangat dibutuhkan. Terbatasnya alat kontrasepsi bisa dilihat dari angka *unmet need*. Persentase *unmet need* Kabupaten Boyolali cukup fluktuatif selama periode 2016-2020. Jika di rata-rata, angka *unmet need* Kabupaten Boyolali sebesar 13%. Artinya masih cukup banyak Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi kebutuhan untuk ber-KB.

Grafik 2. 65. Persentase KB Aktif Kabupaten Boyolali Per Kecamatan Tahun 2020



Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Jika dihubungkan dengan total pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali dengan tingkat pertumbuhan 0,51%, maka pengendalian penduduk sudah optimal. Namun demikian, persebaran pertumbuhan penduduk per kecamatan yang timpang dan juga jumlah PUS per

kecamatan yang tidak seimbang harus menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2.3.1.2.9. Perhubungan

Gambaran mengenai layanan urusan perhubungan menunjukkan tingkat akses dan kualitas transportasi di suatu daerah. Urusan ini memiliki fokus utama untuk memperlancar konektivitas antar wilayah sehingga mempercepat mobilitas orang dan/atau barang dan jasa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berikut ini merupakan capaian kinerja pada urusan perhubungan.

Tabel 2. 47. Layanan Transportasi dan Jumlah Kendaraan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kendaraan Umum	830	942	543	374	390
	Angkutan Perkotaan	264	240	145	86	87
	Angkutan Perdesaan	86	86	86	86	16
	Angkutan AKDP	306	390	177	83	83
	Taksi	95	115	115	100	100
	Angkutan Pariwisata	79	111	90	91	104
2.	Jumlah Kendaraan Bermotor	325.633	357.924	388.726	418.192	422.375
3.	Jumlah Kecamatan Terlayani Transportasi Umum	19	19	13	13	13
4.	Jumlah izin trayek	169	115	25	21	4

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Jumlah kendaraan umum mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 53% sedangkan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan selama rata -rata 6,78 % per tahun. Sementara itu, layanan transportasi umum di Kabupaten Boyolali antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sudah dapat menjangkau 19 kecamatan sedangkan untuk tahun 2018 sampai tahun 2020 hanya 13 kecamatan. Lebih dari itu, armada yang melayani trayek-trayek tersebut semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Pesatnya perkembangan angkutan berbasis online dengan pelayanan yang lebih baik menjadi salah satu penyebab menurunnya minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum. Adapun layanan izin trayek mulai

bulan Juni tahun 2019 kewenangan mengeluarkan izin trayek menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Salah satu upaya Kabupaten Boyolali untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap transportasi umum adalah pengembangan angkutan aglomerasi. Angkutan aglomerasi merupakan angkutan yang melayani orang dan/atau barang dalam satu wilayah yang saling berkaitan satu sama lain. Pengembangan angkutan aglomerasi ini merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan di wilayah Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) sesuai dengan amanat RTRW Provinsi. Rencana pengembangan angkutan aglomerasi wilayah Subosukawonosraten dan diluar wilayah Subosukawonosraten yaitu Salatiga dan Semarang. Rencana pengembangan angkutan aglomerasi di wilayah Subosukawonosraten meliputi Boyolali–Surakarta, Boyolali–Sukoharjo, Boyolali–Klaten, sedangkan di luar wilayah Subosukawonosraten meliputi Surakarta–Sragen– Sukoharjo–Klaten–Boyolali–Kabupaten Semarang–Kota Salatiga–Kota Semarang.

Hingga saat ini, angkutan aglomerasi yang sudah tersedia di Kabupaten Boyolali adalah angkutan yang menghubungkan Bandara Adisumarmo ke wilayah Kabupaten Sukoharjo dan ke Kota Surakarta yang dilayani oleh Batik Solo Trans (BST), sedangkan angkutan aglomerasi yang sudah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah angkutan aglomerasi Trans Jateng yang menghubungkan Solo – Boyolali, Solo – Sukoharjo, Solo – Karanganyar, Solo – Wonogiri, Solo – Sragen, dan Solo – Klaten untuk mendukung KSPN Sangiran. Pengembangan angkutan aglomerasi perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur pendukung berupa halte, penyediaan jaringan trayek, penyediaan angkutan, serta fasilitas pendukung lainnya (marka dan rambu).

Tabel 2. 48. Data Terminal di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Nama Terminal	Luas (m2)	Kondisi (baik/ sedang/ rusak)	Status Tanah			Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal (%)	Rata-Rata Jumlah Kendaraan yang masuk Terminal/ hari	Rata-Rata Jumlah Penumpang naik/turun di Terminal/ hari
				Hak	Sertifikat	Kepe milikan			
1	Cepogo	1035	Sedang	Pakai	HP. No.11 Th. 2004	Pemkab	50	20	100
2	Tambak	9322	Rusak	Pakai	-	Desa	25	8	40
3	Musuk/ Tamansari	800	Rusak	Pakai/ Belum Sertifika	-	Desa	25	37	185

No	Nama Terminal	Luas (m2)	Kondisi (baik/ sedang/ rusak)	Status Tanah			Pemenuhan Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal (%)	Rata-Rata Jumlah Kendaraan yang masuk Terminal/ hari	Rata-Rata Jumlah Penumpang naik/turun di Terminal/ hari
				Hak	Sertifikat	Kepermilikan			
				t					
4	Randuasri	-	Sedang	Pakai	-	Pemukab	25	38	190
5	Pasar Sunggingan	11000	Baik	Pakai	-	Pemukab	50	68	340
6	Ampel	10000	Sedang	Pakai	-	Pemukab	50	28	140
7	Selo	172	Sedang	Pakai	-	Desa	25	8	40
8	Karanggede	3541	Sedang	Pakai	1631/B/14/ 1995	Pemukab	80	74	370
9	Guwo	980	Rusak	Pakai	-	Desa	50	10	50
10	Simo	-	Baik	Pakai	-	Pemukab	25	26	130
11	Nogosari	3800	Baik	Pakai	3369/B/2003	Pemukab	75	11	55
12	Bangak	2000	Sedang	Pakai	3941/II/1988	Pemukab	75	6	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Kabupaten Boyolali memiliki 12 terminal tipe C. Dari 12 terminal tersebut, 25% di antaranya dalam keadaan baik, 50% dalam keadaan sedang, dan 25% sisanya dalam keadaan rusak. Beberapa terminal seperti Terminal Tambak, Musuk, Selo dan Guwo masih menjadi aset desa. Di samping itu, dari 12 terminal yang ada, hanya 4 terminal yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan aset.

Tabel 2. 49. Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Jenis Perlengkapan Jalan	Satuan	Ketersediaan	Kebutuhan
1	Rambu Lalu Lintas	Titik	1,753	3,506
2	RPPJ	Titik	119	216
3	Pagar Pengaman Jalan	m	3,036	5,060
4	Marka	m ²	51,115	92,936
5	Paku Jalan	Unit	1,882	2,689
6	Traffic Light	Titik	24	28
7	Warning Light	Titik	34	50
8	Penerangan Jalan Umum	unit	41,856	50,429

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Ketersediaan perlengkapan jalan di Kabupaten Boyolali masih perlu mendapatkan perhatian, ketersediaan perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas dan marka jalan baru mencapai 50% dari total kebutuhan. Rata-rata ketersediaan perlengkapan jalan lain sudah mencapai 80%, namun belum ada yang mencapai 100% dari total kebutuhan, sehingga masih perlu intervensi lebih untuk dapat mencapai target kebutuhan.

Tabel 2. 50. Tingkat *Load Factor* Angkutan Umum Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

TAHUN	KAPASITAS PENUMPANG	JUMLAH PENUMPANG	
		NAIK	TURUN
2020	799,362	0.21	0.24
2019	610,002	0.20	0.23
2018	771,174	0.20	0.22
2017	768,618	0.27	0.30
2016	1,363,320	0.23	0.26
JUMLAH	4,312,476	0.22	0.25
RATA-RATA	862,495	0.26	0.30

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Faktor muatan (load factor) merupakan perbandingan antara jumlah penumpang dengan kapasitas tempat duduk pada satuan waktu tertentu. Tingkat load factor di Kabupaten Boyolali selalu berada pada nilai kurang dari 1 pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Artinya, banyaknya angkutan umum di Kabupaten Boyolali masih bisa dengan baik mengakomodir penumpang yang ada. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat seperti bekerja maupun sekolah tidak lagi secara signifikan memanfaatkan angkutan umum yang ada, dan bergeser pada kendaraan pribadi.

Tabel 2. 51. Capaian Rasio Konektivitas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Konektivitas	0,42	0,40	0,40	0,38	0,36

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2020

Capaian rasio konektivitas pada tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan tren yang menurun. Rasio konektivitas tersebut dihitung dengan

membandingkan bobot trayek yang beroperasi dengan jumlah jalur trayek yang ada di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 52. Level of Service Jalan Kabupaten yang Berada di Tengah Kota Tahun 2020

No	Nama Ruas Jalan	V/C Ratio	LOS
1	Prof. Soeharso	0.34	B
2	Garuda	0.27	B
3	Merapi	0.32	B
4	Merbabu	0.34	B
5	Pemuda	0.31	B
6	Pisang	0.31	B
7	Nanas	0.29	B
8	Anggrek	0.31	B
9	Jambu	0.30	B
10	Asrikanto	0.30	B
11	Bawang	0.19	A
12	Brambang	0.18	A
13	Boncis	0.25	B
14	Cemara	0.32	B
15	Bayem	0.32	B
16	Kates	0.45	C
17	Pahlawan	0.46	C

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2020

Level of Sevice atau tingkat pelayanan jalan di Kabupaten Boyolali atau lebih tepatnya di jalan-jalan perkotaan masih dalam kategori tingkat pelayanan arus bebas (A) dan arus stabil (B) yang menandakan tidak terjadi kemacetan. Jalan dengan kategori A dan B masih dapat dikembangkan untuk merancang jalan antarkota. Hanya dua ruas jalan dengan kategori pelayanan arus stabil (C) di Kabupaten Boyolali yakni Jalan Kates dan Jalan Pahlawan, sehingga pengembangan jalan hanya dirancang untuk jalan perkotaan saja.

Kemacetan di beberapa ruas jalan mungkin juga disebabkan oleh kondisi pelayanan parkir yang kurang optimal, atau parkir di badan jalan. Di Kabupaten Boyolali terdapat 148 titik parkir, 134 titik parkir sudah dikelola dan 14 titik parkir atau 9,46% sisanya masih belum dikelola dengan baik.

Tabel 2. 53. Angka Kecelakaan di titik *Blackspot* Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Ruas Jalan	Tahun Kejadian					Kelas Jalan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jalan Semarang - Solo	186	159	256	189	146	Nasional
2	Jalan Pandanaran	23	24	39	27	17	Nasional
3	Jalan Andong - Klego	20	22	23	21	11	Provinsi
4	Jalan Sambu - Bangak	19	14	10	10	13	Kabupaten
5	Jalan Sambu - Simo	19	8	25	19	11	Kabupaten
6	Jalan Klego - Simo	18	19	23	11	22	Kabupaten
7	Jalan Perintis Kemerdekaan	18	16	13	10	10	Nasional
8	Jalan Klego - Karanggede	14	11	18	13	2	Kabupaten
9	Jalan Boyolali - Klaten	13	9	9	9	10	Kabupaten
10	Jalan Ngangkruk-Pengging	8	4	8	4	3	Kabupaten
11	Jalan Kalioso - Nogosari	7	1	10	6	6	Kabupaten
12	Jalan Ampel-Simo	7	4	6	9	3	Kabupaten
13	Jalan Boyolali-Musuk	7	3	4	7	5	Kabupaten
14	Jalan Karanggede - Wonosegoro	7	3	6	18	3	Kabupaten
15	Jalan Prof. Soeharso	7	1	11	5	1	Kabupaten
16	Jalan Boyolali - Cepogo	7	6	27	18	22	Kabupaten
17	Jalan Dibal - Mangu	6	3	6	6	1	Kabupaten
18	Jalan Nogosari - Simo	6	5	13	17	14	Kabupaten
19	Jalan Simo – Sambu	5	8	24	19	18	Kabupaten
20	Jalan Boyolali-Jatinom	4	5	15	7	5	Provinsi
21	Jalan Bangak - Simo	3	2	5	7	3	Kabupaten
22	Jalan Cendana	3	4	3	8	4	Kabupaten
23	Jalan Ngangkruk - Sonolayu	3	2	3	10	3	Kabupaten
24	Jalan Catur - Sambu	0	2	2	2	3	Kabupaten
25	Jalan Pengging - Sawit	0	4	12	4	5	Kabupaten
26	Jalan Andong - Gemolong	0	3	4	0	6	Provinsi
27	Jalan Mojosoongo - Tlatar	0	1	4	2	2	Kabupaten
28	Jalan Tentara Pelajar	4	3	3	2	2	Kabupaten
29	Jalan Jambu	3	0	3	4	0	Kabupaten
30	Jalan Tlatar – Kenteng	3	1	3	0	2	Kabupaten
31	Jalan Tol Semarang-Solo	0	0	0	22	0	Kabupaten

No	Ruas Jalan	Tahun Kejadian					Kelas Jalan
		2016	2017	2018	2019	2020	
32	Jalan Karanggede-Sruwen	0	0	0	9	0	Provinsi
33	Jalan Simo-Kacangan	1	5	0	6	0	Kabupaten
34	Jalan Dibal-Ketitang	2	0	6	1	0	Kabupaten
35	Jalan Mangu-Sambi	2	0	0	9	0	Kabupaten
JUMLAH		425	352	594	511	353	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Terdapat 35 ruas jalan di Kabupaten Boyolali yang termasuk dalam kategori titik *Blackspot* yang memang rawan terjadi kecelakaan. Terbukti, setiap tahunnya angka kecelakaan yang terjadi lebih dari 300 kejadian. Hal ini perlu dilakukan rekayasa lalu lintas agar angka kecelakaan dapat ditekan, misalkan dengan menambah rambu-rambu lalu lintas ataupun rekayasa lain peringatan di titik-titik *blackspot* tersebut.

Tabel 2. 54. Daftar Perlintasan Kereta Api di Kabupaten Boyolali Tahun 2021

No	Lintas	Lebar Jalan	Konstr. Jalan	Nama Jalan / Daerah	Status				
					Resmi Dijaga			Resmi Tidak Dijaga	Liar
					PT KAI		Pemda /		
					OP	JJ	Instansi Lain		
1	SM - SLO	3	Tanah	Gebangan					V
2	SM - SLO	2.5	Tanah	Ngandong				V	
3	SM - SLO	4.5	Aspal	Juwangi	V				
4	SM - SLO	1.5	Tanah	Bendungan				V	
5	SM - SLO	1.5	Tanah	Blibis				V	
6	SM - SLO	2	Tanah	Duwaran				V	
7	SM - SLO	3	Aspal	Bentak				V	
8	SM - SLO	1	Tanah	Payaman				V	
9	SM - SLO	1	Tanah	Payaman					V
10	SM - SLO	2	Tanah	Ngleses				V	
11	SM - SLO	2	Aspal	Jambean				V	

Sumber: Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Tengah, 2021

Terdapat 1 stasiun kereta api yang terletak di Kabupaten Boyolali, yakni Stasiun Telawa yang berada di Kecamatan Juwangi. Dari 11 pintu perlintasan kereta api, hanya 1 pintu perlintasan yang resmi dijaga oleh PT KAI, sedangkan 10 lainnya tidak resmi dijaga bahkan 2 di antaranya merupakan perlintasan liar. Perlu dilakukan intervensi agar pintu perlintasan kereta api menjadi aman dengan adanya penjagaan baik secara resmi dari PT KAI ataupun dari pemerintah daerah, agar tidak terjadi kecelakaan.

Tabel 2. 55. Uji KIR di Kabupaten Boyolali di Kabupaten Boyolali Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR (%)	93,92	101,28	97,52	94,58	85,18
	Jumlah kendaraan diuji (KIR)	13.445	14.270	14.719	15.092	13.887
	Jumlah kendaraan wajib uji (KIR)	14.316	14.090	15.093	15.957	16.303
2	Lama uji KIR	40 menit	24 menit	24 menit	24 menit	24 menit
3	Biaya uji KIR					
	JBB ≤ 2.500 kg	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
	JBB < 5.000-5000 kg	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	JBB <5.001-7.500 kg	Rp.35.000	Rp.35.000	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.40.000
	JBB <7.501-10.000 kg	Rp.40.000	Rp.40.000	Rp.45.000	Rp.45.000	Rp.45.000
	JBB ≥ 10.000kg	Rp.45.000	Rp.45.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp. 50.000
		Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp.50.000	Rp. 55.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Upaya pemenuhan layanan transportasi yang berkualitas harus tetap dilakukan oleh pemerintah daerah. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui uji KIR kendaraan. Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR mencapai lebih dari 90% setiap tahun. Bahkan di tahun 2015 dan 2017 persentase kendaraan yang melakukan uji KIR mencapai 103,92% dan 101,28%. Kondisi ini disebabkan oleh adanya beberapa kendaraan yang menumpang uji KIR di Kabupaten Boyolali. Layanan uji KIR di Kabupaten Boyolali juga menunjukkan kondisi yang

semakin membaik. Hal ini ditunjukkan dengan lama uji KIR yang semakin singkat, yaitu dari 40 menit di tahun 2015 – 2016 menjadi 24 menit sejak tahun 2017.

Kinerja layanan di bidang perhubungan lainnya yang juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah layanan parkir. Berikut ini merupakan data parkir khusus dan parkir tepi jalan umum di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 56 Data Parkir Khusus di Kabupaten Boyolali Tahun 2021

No	Titik Parkir	Sudah Dikelola	Belum Dikelola
1	Halaman Dinas Perhubungan (Penggung)	√	
2	Terminal Pasar Sunggingan	√	
3	Halaman Kantor Terpadu	√	
4	Halaman Kantor Disdukcapil	√	
5	Halaman Kantor Diskopnaker	√	
6	Halaman Spesial Sambal Banyudono (Ex. RSUD Banyudono)	√	
7	Kebun Raya Indrokilo	√	
8	Simpang Tiga Menara	√	
9	Alun - Alun Lor	√	
10	Alun - Alun Pengging	√	
11	Pasar Ampel	√	
12	Pasar Boyolali	√	
13	Pasar Sunggingan	√	
14	Pasar Mojosongo	√	
15	Pasar Ngebong	√	
16	Pasar Sidodadi	√	
17	Pasar Sayur Cepogo	√	
18	Pasar Drajidan		√
19	Pasar Karanggede	√	
20	Pasar Wonosegoro	√	
21	Pasar Mongkrong		√
22	Pasar Umum Simo	√	
23	Pasar Pengging	√	
24	Pasar Sambi	√	
25	Pasar Ngancar	√	
26	Pasar Hewan Ampel 1	√	
27	Pasar Hewan Ampel 2	√	

No	Titik Parkir	Sudah Dikelola	Belum Dikelola
28	Pasar Hewan Karanggede	√	
29	Pasar Kebon Agung	√	
30	Pasar Bangak	√	
31	Pasar Pundung	√	
32	Pasar Mliwis Cepogo	√	
33	Pasar Hewan Jelok		√
34	Pasar Hewan Purworejo/Jeron		√
35	Halaman Pasar Rakyat Kacangan	√	
36	Obyek Wisata Waduk Cengklik Zona B	√	
37	Obyek Wisata Waduk Cengklik Zona A	√	
38	Obyek Wisata Waduk Bade	√	
39	Obyek Wisata New Selo (Joglo Selo)	√	
40	Sirkuit Gokart	√	
41	Pasar Batangan		√

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Tabel 2. 57 Data Parkir Tepi Jalan Umum di Kabupaten Boyolali Tahun 2021

NO	TITIK PARKIR	SUDAH DIKELOLA	BELUM DIKELOLA
1	Bakso Malang/TB Mulya Jaya	√	
2	Wilayah Sunggingan (2)	√	
3	Tepi Pasar Cepogo	√	
4	Pasar Juwangi	√	
5	BCA - Jamu Jago - Solchick	√	
6	Soto Hj. Fatimah Manunggal	√	
7	Pasar Simo	√	
8	Pengging Utara Jembatan	√	
9	Pengging Selatan Jembatan	√	
10	Depan Luwes/Toko Rejo/Timur Kantor Pos	√	
11	Salon Mugen/Pasar Sunggingan (1)	√	
12	Soto Hj. Fatimah Jl. Garuda (1)	√	
13	BRI Sunggingan	√	
14	Soto Nggopir	√	
15	Wilayah Pasar Karanggede	√	
16	Bakso Pak Slamet	√	
17	Soto Mbok Giyem - Royden	√	
18	Toko Widodo	√	

NO	TITIK PARKIR	SUDAH DIKELOLA	BELUM DIKELOLA
19	Tepi Jalan Andong	√	
20	Pasar Sunggingan (3)	√	
21	Taman Pandanalas	√	
22	Star Steak Banaran	√	
23	Soto Sopyonyono	√	
24	TB. Seiko	√	
25	Jl. Cendana	√	
26	Toko Pomo s/d Mie Ayam Pakdhe	√	
27	Apotik Miranti	√	
28	Tumpang KUD	√	
29	Sate Ngebong	√	
30	Bakso Kadipolo Depan RSUD Pandanarang	√	
31	Toko Bunga Daryono	√	
32	Mie Ayam Sonolayu	√	
33	Bank Syariah	√	
34	Soto Hj. Fatimah Depan Satlantas	√	
35	Sop Ayam Pak Min	√	
36	Depan Kator Pos (Ke Barat)	√	
37	Bakso Miroso Timur Amigo	√	
38	Timur RSUD Pandanarang	√	
39	RM Odong-Odong Ampel	√	
40	RM Padang Murah	√	
41	Pasar Gagan	√	
42	Soto Seger Mbok Giyem selatan RSUD Pandanarang	√	
43	Sate Tacung	√	
44	Gudeg Bu Dul	√	
45	Ayam Goreng Pak Pono Jl. Perintis	√	
46	Rocket Chicken Banaran	√	
47	Depan dr. Thomas - Centra Nusantara	√	
48	Dokter. Indra	√	
49	Soto Sedap - BPR Nusamba	√	
50	Warung Makan Riyanti Ampel	√	
51	Pule, Penggung (Shift Malam)	√	
52	BRI Sawahan	√	
53	Semarang Motor	√	
54	Tegalwire	√	
55	Fotocopy Sriwijaya	√	

NO	TITIK PARKIR	SUDAH DIKELOLA	BELUM DIKELOLA
56	RM. Sumber Perah Ampel	√	
57	Pasar Sapi Ampel	√	
58	BRI Mangu	√	
59	Depan Apotik Sunggingan	√	
60	Depan Toko Roti Buana Bakery	√	
61	Simpang Lima Malam	√	
62	Mi Ayam Batas Kota	√	
63	INDOMARET	√	
64	Penyet Suroboyo	√	
65	Bakso Alex	√	
66	Timur Tangsi Pasar Sunggingan (4)	√	
67	Ini Baru Steak	√	
68	Depan Pasar Selo (Sebelah Selatan Jalan)	√	
69	Depan Swalayan Mitra	√	
70	Soto Hj. Fatimah Garuda (2)	√	
71	Toko Teratai (Malam)	√	
72	PKPN, Toko Abadiku, Tumpang Bu Is Popeye 2	√	
73	Depan Bank Jateng Sunggingan	√	
74	Bank BTPN	√	
75	Cafe O'Pallet	√	
76	Depan Agen Sosis Tempura/Frozen Food	√	
77	Barat Pintu Masuk Pasar Sunggingan Sebelah utara	√	
78	Simpang Utara Kantor Pengadilan Agama-Iga Bakar Pak Wid-RM Niki Eco	√	
79	Rocket Chicken Pulisen	√	
80	Toko Oleh-Oleh Mutiara Jaya s/d Toko Mbak Nonik	√	
81	Depan Toko Komputer XP	√	
82	Depan Bank Mandiri - Bank BNI	√	
83	Depan Depot Daging s/d Toko Stempel Setia Kawan	√	
84	Tah Kupat Dan Mie Bakso Pak Mie Good	√	
85	Star Steak Kemiri	√	
86	Depan Alfamart Banaran	√	
87	Depan Apotik Kimia Farma	√	
88	Pak Pinggir Jl. Perintis	√	
89	BRI Simo	√	

NO	TITIK PARKIR	SUDAH DIKELOLA	BELUM DIKELOLA
90	Kedai Matmon	√	
91	Depan Roti Kris	√	
92	Toko Buah ABC	√	
93	Bubur Ayam Jakarta	√	
94	Depan Toko Eiger	√	
95	Depan Waduk Cengklik	√	
96	Warung Jukay	√	
97	Star Steak Merbabu	√	
98	TEPI PASAR SUMUR UMUM	√	
99	Kopi Djuwos		√
100	RM. Mbak Apri Ngangkruk		√
101	Sate Lulut Depan Pom Teras		√
102	Pak Pono Teras		√
103	Jembatan Gantung Sepi Selo		√
104	Tepi Jalan Pasar Sambu		√
105	Ayam Bakar Mbak Menuk		√
106	Soto Omprong		√
107	Lamongan Pak Ji		√

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Di Kabupaten Boyolali terdapat 148 titik parkir. Dari seluruh titik parkir tersebut, 90,54% atau 134 titik parkir di antaranya sudah dikelola dan 9,46% atau 14 titik parkir sisanya masih belum dikelola dengan baik.

2.3.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pada era digital, kemudahan akses terhadap informasi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Penyediaan layanan komunikasi dan informatika perlu dilakukan untuk meningkatkan diseminasi informasi inter maupun intra daerah. Selain itu, penyebarluasan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah penting untuk dilakukan sebagai bentuk dari akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini merupakan capaian indikator urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 58. Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020 (%)

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi <i>E-government</i>	39	40	57	84	84
2.	Cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah	89	90	90	91	92
3.	Persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	40	48	49	50	51

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2021

Sebagian besar Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali telah mengembangkan aplikasi *e-government*, terutama Perangkat Daerah yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat secara langsung. Penerapan *e-government* memberikan kemudahan bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yaitu rendahnya kapasitas SDM dalam bidang IT, masih kurangnya perangkat untuk mengembangkan internet, dan fiber optik yang belum menjangkau desa/kelurahan.

Tercapainya indikator cakupan penyebarluasan informasi pembangunan daerah didukung oleh terdokumentasikannya program/kegiatan pemerintah dan masyarakat Boyolali dengan baik. Indikator persentase kelompok informasi masyarakat yang aktif juga mengalami peningkatan setiap tahun. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya strategi penyebaran informasi, kurang memadainya kapasitas SDM, dan masih adanya masyarakat yang tidak memanfaatkan perkembangan teknologi.

Tabel 2. 59. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon dan Komputer/Laptop di Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020

Tahun	Alat Komunikasi	
	Telepon	Komputer
2017	0,98	13,09
2018	1,32	20,09
2019	1,50	15,18
2020	1,59	15,53

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Boyolali, BPS, 2020

Perkembangan era modern menuntut kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui perangkat komunikasi seperti telepon pintar dan komputer. Dilihat dari persentase kepemilikan telepon pada rumah tangga di Kabupaten Boyolali sampai dengan tahun 2020 cenderung rendah yakni pada kisaran 1%. Sedangkan kepemilikan komputer lebih besar yakni pada kisaran 15%. Namun demikian, dilihat dari trend perkembangannya, persentase kepemilikan komputer menurun dan sebaliknya persentase kepemilikan telepon meningkat. Masyarakat cenderung memilih telepon karena dianggap lebih praktis dan dapat memenuhi kebutuhan komunikasi secara lebih cepat.

2.3.1.2.11. Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

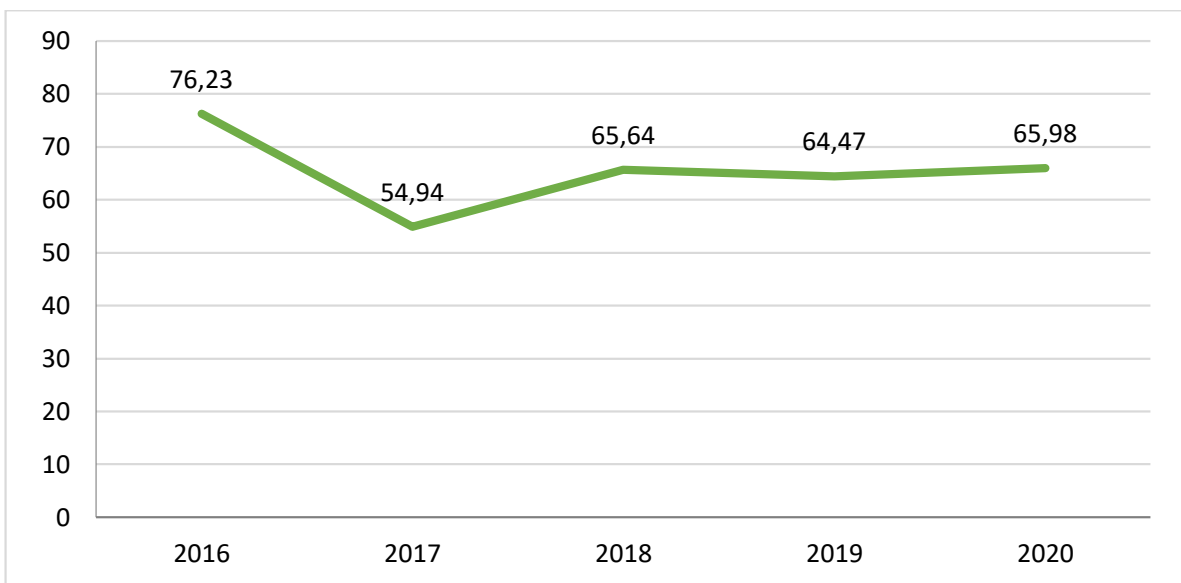
Koperasi di Kabupaten Boyolali keberadaannya sangat penting karena banyak usaha-usaha masyarakat di berbagai sektor khususnya pertanian dan peternakan sebagai sektor andalan di kabupaten Boyolali yang akan terbantu oleh koperasi. Selain itu, UMKM juga merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi di Kabupaten Boyolali karena di Kabupaten Boyolali banyak UMKM unggulan yang sudah memiliki pasar tersendiri seperti dalam bidang peternakan, produk kerajinan tembaga dan kuningan, dan industri minyak atsiri.

Koperasi dan UMKM merupakan sektor yang dapat membantu pengembangan ekonomi kerakyatan di daerah. Peran koperasi dan UMKM dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan di daerah dapat dilihat dengan berbagai indikator diantaranya persentase koperasi aktif, pertumbuhan dan omzet UMKM, serta penyaluran permodalan bagi koperasi dan UMKM.

1. Persentase Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat bagaimana koperasi berperan dalam perekonomian masyarakat. Keberadaan koperasi sangat berkaitan dengan pengembangan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro serta pengembangan sektor potensial seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan berbagai sektor lainnya.

**Grafik 2. 66. Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Boyolali
Tahun 2016-2020**

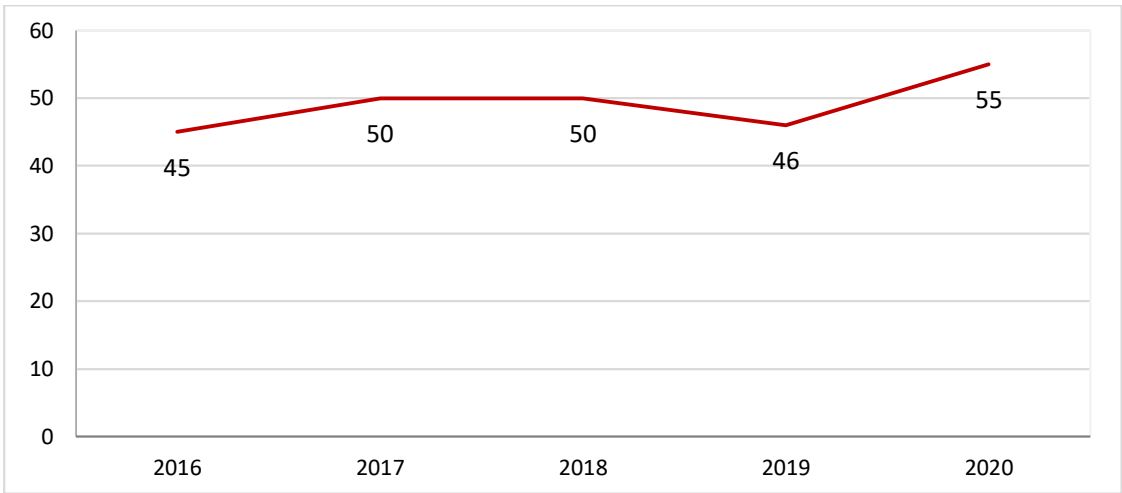


Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2021.

Persentase koperasi aktif cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir dan meningkat tipis pada tahun 2020 dengan peningkatan sebesar 1,51%. Dengan demikian berarti pada tahun 2020 terdapat 34,02% koperasi yang non aktif. Data tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya penyelesaian-penyelesaian permasalahan yang terjadi khususnya pada koperasi pertanian. Banyaknya jumlah koperasi yang tidak aktif tersebut akan berpengaruh pada ekonomi kerakyatan dan kelembagaan koperasi itu sendiri. Mengingat Kabupaten Boyolali memiliki potensi dalam sektor pertanian dan peternakan, keberadaan koperasi pertanian yang aktif menjadi sangat penting untuk membantu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui berbagai manfaat yang bisa diberikan oleh koperasi.

Jumlah koperasi yang aktif juga dipengaruhi oleh kesehatan koperasi dimana koperasi yang sehat secara kelembagaan akan mampu bertahan dan memberikan manfaat kepada para anggotanya, sedangkan koperasi yang tidak sehat maka kemungkinan besar koperasi tersebut tidak akan mampu bertahan lama. Maka dari itu, kesehatan koperasi bisa menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberlangsungan koperasi itu sendiri.

Grafik 2. 67. Jumlah Koperasi yang Dibina yang Meningkatkan Nilai Kesehatannya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020



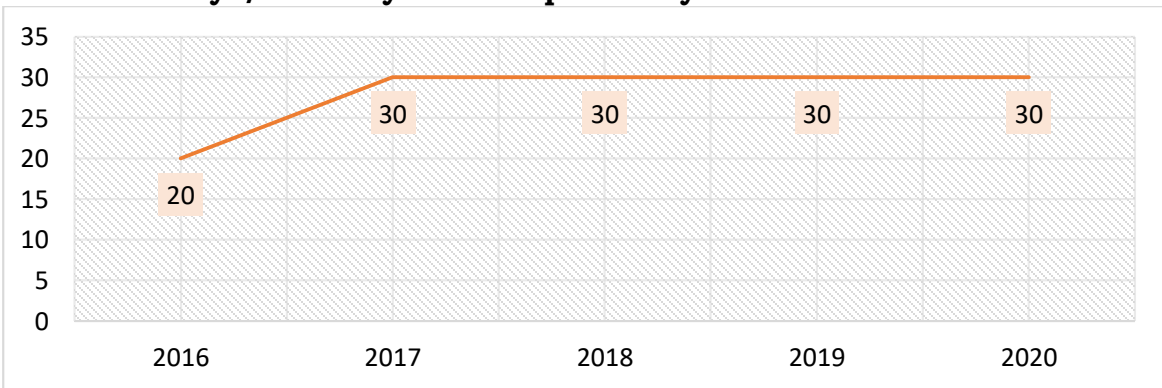
Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan data tersebut, jumlah koperasi yang dibina pada tahun 2020 merupakan jumlah terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Total terdapat 246 koperasi yang sudah dibina yang meningkat nilai kesehatannya hingga tahun 2020. Angka tersebut masih belum memenuhi capaian target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 295 koperasi. Hal tersebut diakibatkan beberapa permasalahan baik dari SDM penilai dan koperasi itu sendiri seperti kurangnya SDM yang bersertifikat dalam penilaian kesehatan koperasi dan kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan.

2. Jumlah UMKM yang Meningkatkan Usahanya/Omzetnya

Usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM) merupakan fondasi ekonomi kerakyatan pada level kecil. Sektor ini mampu menyerap dan membuka lapangan pekerjaan dalam skala yang besar sehingga mampu berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan. Jumlah UMKM serta UMKM yang meningkat usahanya/omzetnya tentu akan berpengaruh pada penyerapan dan ketersediaan lapangan kerja.

Grafik 2. 68. Jumlah UMKM yang dibina yang Meningkatkan Usahanya/Omzetnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2021.

Jumlah UMKM yang dibina yang meningkat nilai usahanya/omzetnya mengalami peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 kemudian stagnan pada tahun-tahun selanjutnya sampai tahun 2019. Meskipun demikian, target capaian UMKM yang dibina yang meningkat usahanya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut diakibatkan oleh berbagai usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui berbagai macam pelatihan yang diberikan kepada UMKM, pembinaan dari segi produksi, permodalan, dan kemampuan manajerial, menjalin kemitraan antara UMKM dengan pasar modern dan usaha dagang lainnya, serta mengikutsertakan UMKM dalam pelatihan pemasaran baik secara *online* maupun *offline*. Meskipun demikian, UMKM yang dibina yang memiliki potensi untuk ditingkatkan usahanya masih belum optimal jumlahnya dikarenakan masih rendahnya UMKM melakukan legalitas terhadap usahanya yang akan berpengaruh pada kemitraan pihak lain dengan UMKM yang bersangkutan, serta belum meratanya kesempatan pelatihan usaha dikarenakan beragamnya jenis usaha UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali.

3. Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM

Permodalan merupakan salah satu hal yang mendasar untuk keberlangsungan koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan dan usahanya. Melalui penyaluran permodalan maka sektor ekonomi kerakyatan diharapkan akan berjalan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. 60. Cakupan Penyaluran Permodalan Kepada Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Cakupan Penyaluran Permodalan kepada Koperasi dan UMKM	45%	64%	97%	80%	98%

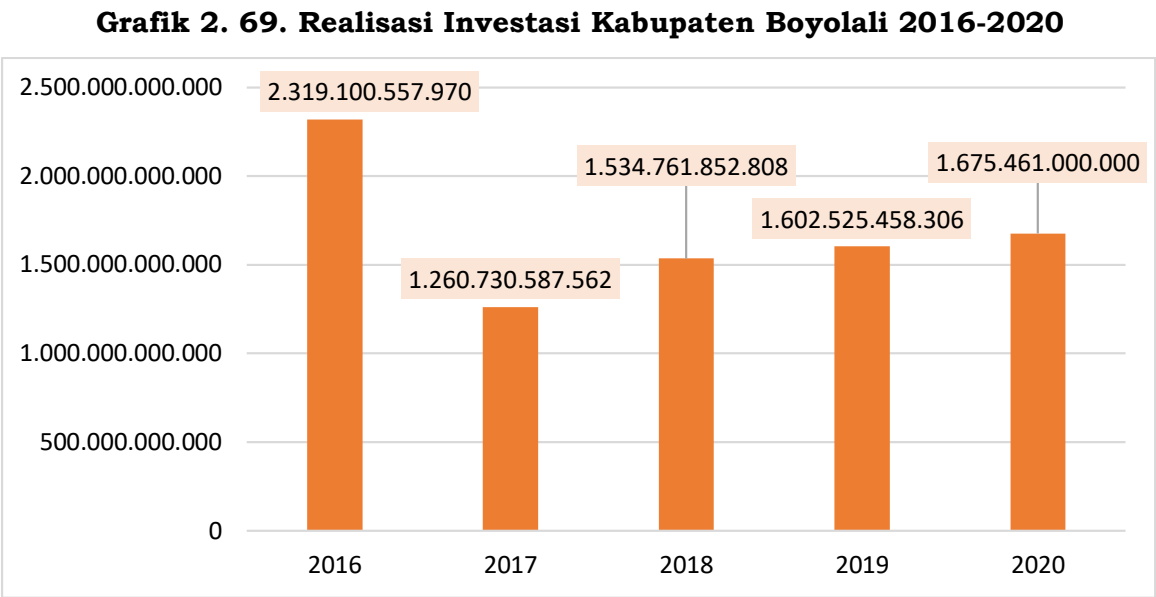
Sumber: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali, 2020

Cakupan penyaluran permodalan kepada koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2019 namun kembali meningkat pada tahun 2020 dan telah mencapai 98%. Meskipun demikian, capaian tersebut telah melebihi target tahunan yang sudah ditetapkan. Keberhasilan capaian tersebut salah satunya karena terjalinnya kerjasama antara lembaga

penyedia permodalan dengan Koperasi dan UMKM. Beberapa lembaga yang menyalurkan permodalan pada Koperasi dan UMKM diantaranya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) (LKJiP Kabupaten Boyolali, 2019).

2.3.1.2.12. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal memiliki peran penting dalam mencapai prioritas Kabupaten Boyolali periode 2016-2021 sebagai daerah yang pro investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Urusan ini terkait kewenangan pengembangan iklim, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, serta data dan sistem informasi penanaman modal. Realisasi investasi dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 sebagai berikut:

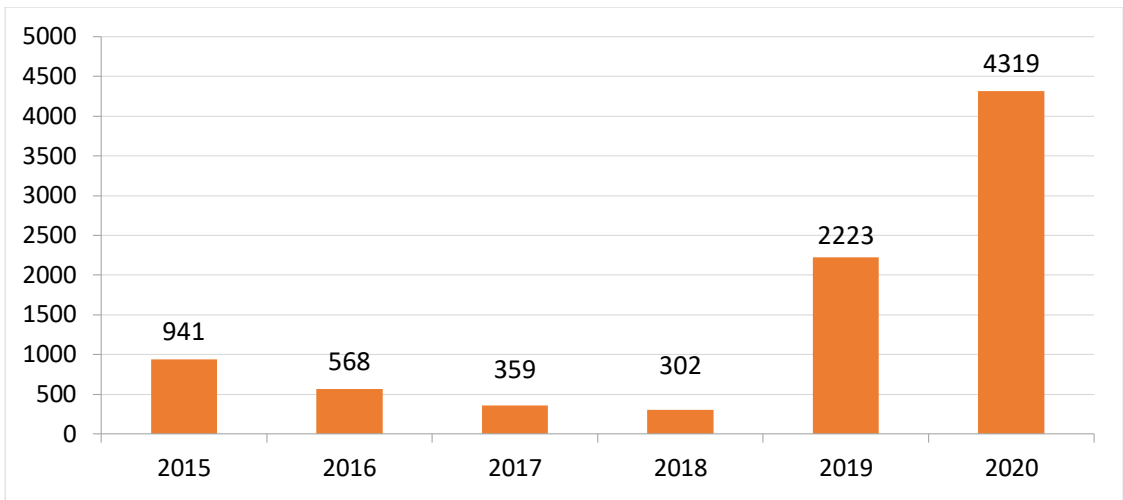


Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2020

Realisasi investasi di Kabupaten Boyolali relatif mengalami peningkatan, meskipun pernah mengalami kondisi yang sangat fluktuatif, yaitu penurunan yang besar dari tahun 2016 ke 2017, dan terus meningkat pada 2017 hingga tahun 2020. Meskipun demikian, realisasi investasi tersebut selalu melebihi target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Adapun jumlah penanam modal di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan sangat besar pada tahun 2018 dan tahun 2019. Realisasi investasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu pertumbuhan penduduk, inflasi, ketersediaan lahan, regulasi, ketersediaan infrastruktur dan sarana-prasarana pendukung. Kebijakan teknis yang telah dijalankan di Kabupaten Boyolali, salah satunya memberikan ruang yang kondusif bagi investasi. Dalam hal ini terdapat kebijakan revisi RTRW, namun tetap dengan menjaga lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Secara

kewilayahan, kecamatan yang terdapat banyak investasi adalah Mojosongo. Adapun wilayah Boyolali bagian utara yang awalnya masih jarang terdapat investasi, kemudian mulai menjadi sasaran investasi seiring penciptaan iklim yang kondusif.

Grafik 2. 70. Jumlah Investor di Kabupaten Boyolali 2015-2020



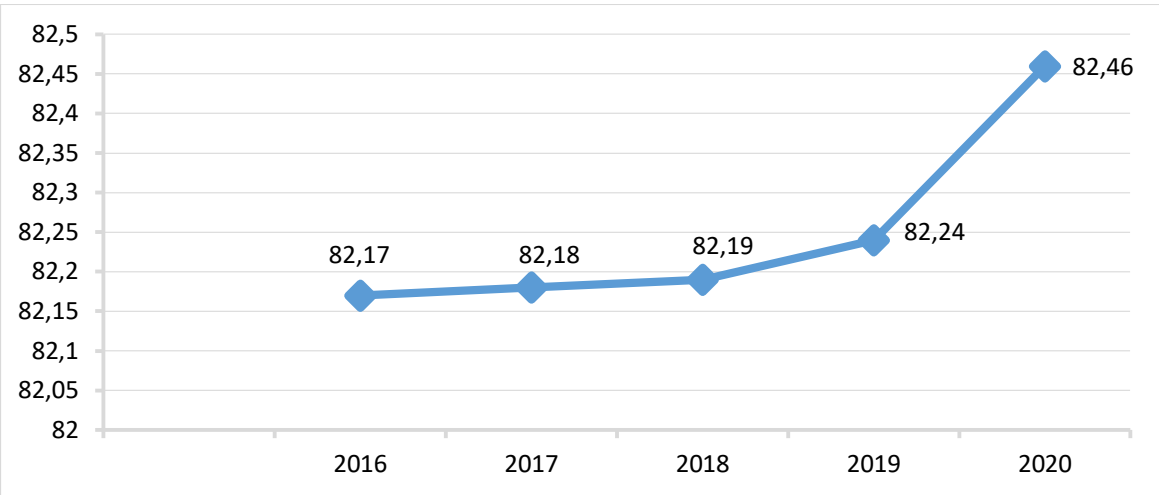
Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021

Kebijakan dan kegiatan penanaman modal tidak lepas dari urusan perizinan. Kabupaten Boyolali telah menjalankan kebijakan nasional *Online Single Submission* (OSS) sejak Agustus 2018. Penerapan OSS diarahkan semakin mempercepat dan mempermudah perizinan, yang pada kondisi terkini sudah menggunakan OSS versi 1.1. Secara kelembagaan terdapat Tim Teknis Perizinan dan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Berusaha untuk mendukung kecepatan proses perizinan. Institusi tersebut berperan sebagai ruang koordinasi antar perangkat daerah yang terlibat dalam proses perizinan. Kondisi *existing* perizinan tidak menjadi domain Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) semata, namun terdapat perangkat daerah lain yang berwenang memberikan rekomendasi teknis. Proses tersebut yang kadang membuat perizinan masih berjalan lama, sehingga kehadiran tim teknis dan satgas berperan mempercepat proses perizinan. Secara kelembagaan pula, terdapat kebijakan yang berupaya menguraikan kerumitan perizinan dengan menyederhanakan dari 30 perda menjadi menjadi 3 perda terkait perizinan.

Dukungan teknologi informasi telah diterapkan di Boyolali untuk mempermudah proses perizinan. Beberapa aplikasi yang sudah diterapkan adalah aplikasi perizinan *online*, aplikasi SMS Gateway, aplikasi sistem informasi potensi investasi, aplikasi e-dokumen, aplikasi *touch screen*, penerapan GIS survey, *barcode*, dan aplikasi TV informasi

layanan perizinan. Fungsi berbagai aplikasi tersebut antara lain mempermudah pengunduhan berkas perizinan dan pendaftaran secara *online*, kemudahan mendapatkan informasi potensi investasi, serta legalisasi dan keamanan izin dengan adanya *barcode*. Masyarakat juga dapat mengawasi perjalanan proses perizinan dengan adanya aplikasi *tracking system*.

Grafik 2. 71. Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boyolali 2016-2020



Sumber: Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2021

Berbagai aplikasi untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dan penanaman modal membawa dampak pada peningkatan indeks kepuasan masyarakat. Kualitas layanan di dalam PTSP sendiri didukung oleh pengembangan aplikasi perizinan, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP) berbasis *tracking system*, menyatukan seluruh prosedur perizinan dan rekomendasi teknis di dalam DPMPTSP, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang representatif, penerapan standar operasional prosedur, penetapan Wilayah Bebas Korupsi sejak 2019, peningkatan kapasitas SDM, layanan aduan masyarakat melalui e-lapor, dan penyusunan survei kepuasan masyarakat yang melibatkan masyarakat melalui aplikasi *touch screen* (LKJiP Kabupaten Boyolali, 2019). Instansi DPMPTSP Boyolali sendiri, selain telah menerapkan WBK, juga mendapatkan beberapa penghargaan atas kinerja terkait penanaman modal dan perizinan satu pintu, yaitu sebagai *role model* pelayanan publik dengan kategori sangat baik dan pelopor perubahan pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.3.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang ideal bagi pemuda dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi, bakat dan minatnya melalui berbagai kegiatan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, perencanaan pembangunan kepemudaan dimaknai sebagai rencana pelayanan kepemudaan yang berfungsi untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta pelaporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berikut peran kepemudaan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 61. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Boyolali Tahun 2019

No	Uraian	2020
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,053%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat	6%
3	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	1
4	Persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan	81,2%
5	Jumlah klub olahraga	33 klub
6	Jumlah lapangan olahraga	3 lapangan

Sumber: Lampiran IKK pada Dokumen LPPD Kabupaten Boyolali 2015-2019

Indikator capaian kinerja urusan kepemudaan baru ada tahun 2019, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Secara umum, capaian urusan kepemudaan masih tergolong rendah yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri masih 3,3%. Angka tersebut berasal dari jumlah pemuda (16-30 tahun) sebanyak 219.856 jiwa, yang berwirausaha baru 7.285 jiwa. Demikian juga dengan persentase pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, dari 219.856 jiwa baru 13.802 jiwa yang aktif dalam berorganisasi. Untuk itu, partisipasi pemuda para periode pembangunan kedepan perlu untuk ditingkatkan. Selain itu, meskipun capaian urusan olahraga menunjukkan angka yang cukup baik, juga tetap perlu ditingkatkan pada periode pembangunan kedepan.

2.3.1.2.14. Statistik

Ketersediaan data dan informasi yang terpercaya adalah kunci keberhasilan sebuah perencanaan pembangunan. Data dan informasi yang berkualitas menjadi sumber informasi tentang kondisi berbagai hal yang dapat diketahui oleh pihak-pihak terkait dalam memahami permasalahan dan tantangan. Pengumpulan, pengelolaan dan penyediaan data merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS.

Tabel 2. 62. Dokumen Statistik Daerah yang Dipublikasikan Tahun 2016-2020

Dokumen	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Persentase dokumen statistik daerah yang hasil dipublikasikan merupakan data olahan dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan BPS. Selama periode tahun 2015-2020, jumlah dokumen yang dipublikasikan setiap tahunnya cenderung stagnan yaitu 7 dokumen. Kendala dalam pengumpulan data yang dihadapi selama ini yaitu lambatnya pengumpulan data di setiap kecamatan. Untuk itu, kedepan dapat meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dalam penyusunan data statistik. Selain itu, bisa menambah variasi jenis dokumen yang dipublikasikan, sehingga jumlah dokumen yang dipublikasikan bisa bertambah.

2.3.1.2.15. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan persandian merupakan urusan konkuren yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota. Urusan persandian telah diselenggarakan di Kabupaten Boyolali melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2. 63. Capaian Kinerja Urusan Persandian di Kabupaten Boyolali

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Terlaksananya fasilitasi layanan persandian (%)	100	100	100	100	100

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Secara umum, layanan persandian sudah dapat mencukupi semua kebutuhan. Kondisi ini diindikasikan dari indikator terlaksananya fasilitasi layanan persandian. Akan tetapi, masih terdapat beberapa hambatan yaitu kurang memadainya kapasitas SDM di bidang persandian. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan tentang persandian masih sangat dibutuhkan.

2.3.1.2.16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan semua daerah. Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menentukan kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Di sisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan diwujudkan melalui proses relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya. Berikut perkembangan bidang kebudayaan di Kabupaten Boyolali tahun 2015-2019.

Tabel 2. 64. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Budaya yang Dilestarikan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	10 budaya	13 budaya	11 budaya	12 budaya	14 budaya
2	Persentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	99%	92%	94%	96%	94%
3	Jumlah tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	9 tempat	9 tempat	9 tempat	12 tempat	12 tempat
4	Pelaku seni yang dikembangkan	38	39	39	66	125
5	Jumlah pelaksanaan gelar seni dan budaya	57 kali	56 kali	56 kali	57 kali	33 kali
6	Jumlah event seni dan budaya	6 kali	4 kali	6 kali	5 kali	2 kali
7	Organisasi Kesenian Terdaftar dan Bersertifikat	211	249	266	373	385

Sumber: Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Boyolali dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, 2020

Rata-rata capaian kinerja seni dan budaya Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Capaian paling banyak pada pelaku seni yang dikembangkan dari 38 pada tahun 2016 menjadi 125 pada tahun 2020. Selain itu, jumlah organisasi kesenian

yang terdaftar dan bersertifikat juga mengalami peningkatan dari 200 menjadi 385 organisasi. Penambahan tersebut dapat dioptimalkan untuk pengembangan dan pagelaran budaya di Kabupaten Boyolali.

2.3.1.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.

Tabel 2. 65. Perkembangan Layanan Perpustakaan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah perpustakaan kabupaten	1	1	1	1	1
Jumlah perpustakaan desa	44	47	53	53	53
Jumlah perpustakaan keliling	1	3	4	4	4
Jumlah judul koleksi perpustakaan kabupaten	297.374	32.310	33.440	35.069	35.251
Jumlah exlemplar koleksi perpustakaan kabupaten	44.862	48.600	50.740	53.519	53.857
Jumlah pengunjung perpustakaan kabupaten dan perpus keliling	41.339	37.906	59.606	12.312	13.376

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali, 2020

Perkembangan layanan perpustakaan di Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, peningkatan tersebut masih diukur dari segi output, sehingga dampak dari tersedianya pelayanan yang ada terhadap peningkatan pengetahuan serta minat baca masyarakat belum terlihat. Untuk itu, selama periode pembangunan mendatang perlu pengukuran terhadap indikator minat baca masyarakat maupun indikator lainnya yang relevan.

2.3.1.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan di Kabupaten Boyolali diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pengelolaan arsip di daerah kabupaten meliputi arsip statis dan arsip dinamis yang diciptakan dalam lingkup kabupaten. Kondisi pengelolaan arsip di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. 66. Kondisi Pengelolaan Arsip di Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengolahan dan Pelestarian Arsip					
	Jumlah Arsip yang Masuk/Akuisisi (berkas)	Na	Na	3	3	5
	Jumlah Arsip yang Diolah/lestarikan (berkas)	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	Arsiparis (orang)	-	-	-	-	-
3	Jumlah Pengguna Arsip (orang)	10	10	15	76	100
4	Jumlah Arsip yang dialih media					
	Foto		1.500	1.000	1.000	1.000
	Video	479	Na	Na	Na	Na
	Tekstual	Na	Na	Na	847	400
5	Pengembangan Kearsipan Berbasis TI		1 SIKD	1 SIKD	1 SIKD	1 SIKD

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Boyolali belum memiliki tenaga fungsional arsiparis. Di sisi lain, pengguna arsip mengalami peningkatan setiap tahun, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2019 dan 2020 yaitu masing-masing mencapai 76 dan 100 orang. Selain itu, beberapa arsip sudah dialihkan dalam bentuk media seperti foto, video dan tekstual.

**Tabel 2. 67. Capaian Pengelolaan Arsip di Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100	100	100	84,91	100
Cakupan pengelolaan arsip daerah	40,0	41,4	45,0	68,25	55,0

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku sebesar 100%. Di samping itu, cakupan pengelolaan arsip daerah mencapai 55%. Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan arsip adalah belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk diolah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, petugas pengelola kearsipan di Satuan Kerja masih sering dibebani tugas-tugas lain dan sering terjadi pergantian petugas, serta kurangnya sarana tata kearsipan di Satuan Kerja sehingga arsip belum seluruhnya dapat tertata secara baik dan benar.

2.2.5. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

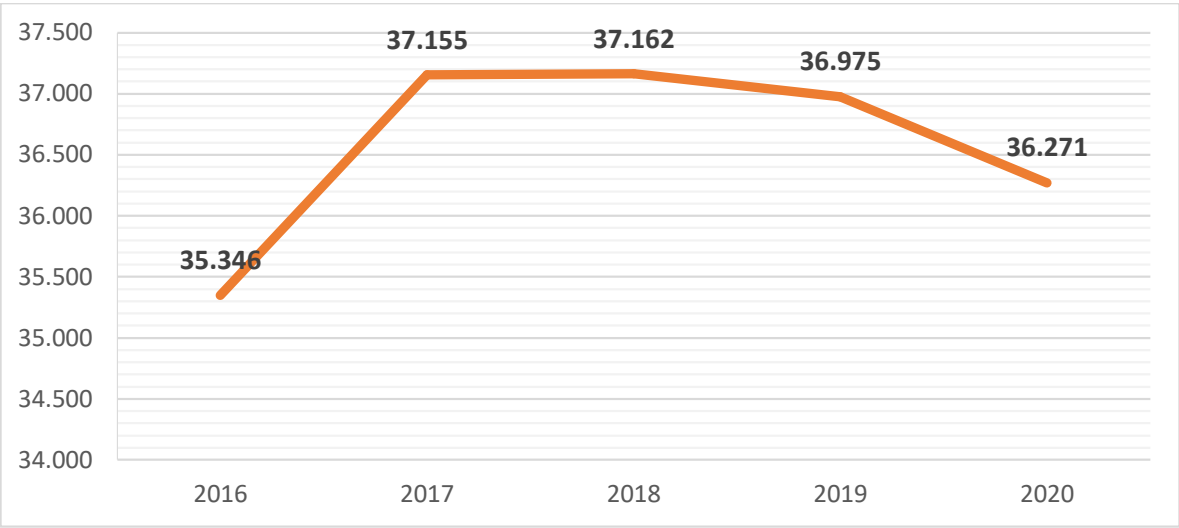
Fokus layanan urusan pemerintah pilihan meliputi analisis capaian kinerja pada urusan kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata,

dan berbagai sektor potensial lainnya yang berpengaruh terhadap berbagai indikator makro daerah. Berikut ini merupakan capaian beberapa sektor yang termasuk dalam urusan pilihan di Kabupaten Boyolali.

2.2.5.1. Kelautan dan Perikanan

Secara geografis Kabupaten Boyolali tidak memiliki kekayaan laut, sehingga optimalisasi potensi perikanan darat menjadi fokus utama Pemerintah Daerah. sasaran pembangunan dalam urusan perikanan dalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi, menyediakan bahan olahan serta meningkatkan sektor ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Boyolali.

Grafik 2. 72. Produksi Ikan Hasil Ternak Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Produksi ikan hasil ternak di Kabupaten Boyolali mengalami tren yang cenderung meningkat, walaupun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 namun selalu melampaui target. Tren produksi ikan yang cenderung meningkat turut diiringi dengan meningkatnya Angka Konsumsi Ikan (AKI) dari tahun 2018 sebesar 20,21 Kg/kapita/tahun menjadi 20,28 Kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Meningkatnya angka konsumsi ikan di Kabupaten Boyolali dipengaruhi oleh meningkatnya produksi pengolahan ikan.

Tabel 2. 68. Produksi Ikan Menurut Jenis dan Asalnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 (Kg)

Kecamatan	Kolam	Perairan Umum	
		KJA	Tangkap
Udang	505	-	212.230
Tawes	-	81.274	305.109
Mujair	-	-	227.773
Nila	10.960	974.169	669.971

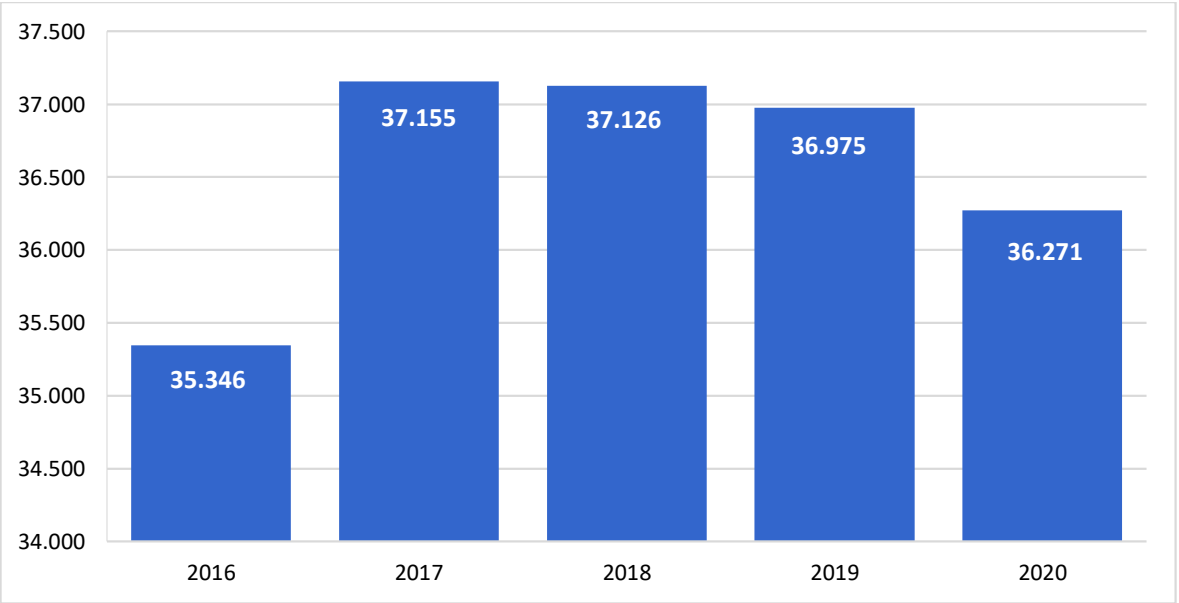
Kecamatan	Kolam	Perairan Umum	
		KJA	Tangkap
Lele	6.960.662	22.638	56.477
Gabus	-	-	68.451
Karper/ Mas	-	297.879	149.829
Rucah	-	-	612.208
Betutu	-	-	69.278
Red Devil	-	-	124.427
Kabupaten Boyolali	6.972.127	1.375.960	2.495.753

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Boyolali

Produksi tangkap berdasarkan data dari BPS Boyolali diperoleh dari hasil tangkap menggunakan jaring dan pancing ikan di Waduk Kedung Ombo dengan total 4 ton per hari atau 1.460 ton pada tahun 2019. Selain itu, untuk produksi budidaya didukung oleh kegiatan budidaya pembesaran ikan yang tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Teras, Kemusu, dan Ngemplak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa lele menjadi potensi utama dalam bidang perikanan yang perlu dioptimalkan. Guna mengoptimalkan potensi tersebut perlu adanya pengembangan bibit unggul serta pendampingan kelompok tani pembudidaya ikan agar turut membantu dalam hal produksi, pengelolaan hingga pemasaran.

Perikanan menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Boyolali. Salah satu perikanan unggulan di Kabupaten Boyolali adalah produksi ikan lele di Desa Tegalrejo yang mampu untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lokal maupun nasional. Berikut adalah data produksi ikan di Boyolali :

Grafik 2. 73. Produksi Ikan (ton) di Kabupaten Boyolali



Sumber: Diolah dari LKJiP Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Produksi ikan di Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018 kemudian pada tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Meskipun demikian, kinerja produksi ikan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu melampaui target. Tingginya produksi ikan tersebut didorong oleh keberhasilan penguatan kelompok pembudidaya dan fasilitasi terhadap pembudidaya ikan. Selain itu, Kabupaten Boyolali juga memiliki ikon lele berupa Demplot Kampung Lele dengan produksi 34-40 ton per hari.

Tabel 2. 69. Produksi Benih Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Kecamatan		BBIKPI		Kolam	
		Luas (Ha)	Produksi (Ekor)	Luas (Ha)	Produksi (Ekor)
1	Selo	-	-	-	6.169
2	Ampel	-	-	0,60	253.149
3	Gladagsari	-	-	-	-
4	Cepogo	-	-	0,30	115.238
5	Musuk	-	-	0,10	321.357
6	Tamansari	-	-	-	-
7	Boyolali	1,00	68.00	1,20	819.601
8	Mojosongo	-	-	0,80	600.888
9	Teras	-	-	0,85	9.047.573
10	Sawit	-	-	0,70	11.544.835
11	Banyudono	2,30	592.008	1,40	1.067.844
12	Sambi	-	-	01,0	628.024
13	Ngemplak	-	-	2,30	3.005.605
14	Nogosari	-	-	0,40	187.997
15	Simo	-	-	0,50	970.978
16	Karanggede	-	-	0,54	575.450
17	Klego	-	-	0,12	92.646
18	Andong	-	-	0,65	73.666
19	Kemusu	-	-	0,40	5.361.491
20	Wonosegoro	-	-	0,40	20.519
21	Wonosamodro	-	-	-	-
22	Juwangi	-	-	0,10	152.149
Kabupaten Boyolali		3,30	66.008	11,46	34.845.179

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020

Produksi benih ikan di Kabupaten Boyolali berasal dari BBIKPI dan Kolam. Dari 22 kecamatan, hanya ada 3 kecamatan yang tidak memiliki benih pembibitan ikan yaitu kecamatan Gladagsari, Tamansari dan

Wonosamodro. Sedangkan 2 kecamatan terbesar dalam penghasil bibit ikan yaitu Kecamatan Boyolali dan Banyudono.

2.2.5.2. Perindustrian

Urusan perindustrian dalam lingkup Pemerintahan Daerah meliputi perencanaan pembangunan industri, perizinan dan sistem informasi industri nasional. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Boyolali diarahkan pada peningkatan aktivitas dan daya saing. Beberapa jenis industri yang terdapat di Kabupaten Boyolali diantaranya adalah industri pengolahan pertanian dan peternakan, industri logam, industri olahan kayu, industri kimia dan industri tekstil.

Tabel 2. 70. Jumlah dan Jenis Industri Kab. Boyolali Tahun 2020

No	Jenis Industri	Jumlah Industri
1	Industri Pengolahan Daging	21
2	Industri Pengolahan Padi	355
3	Industri Makanan Lainnya	3259
4	Industri Minuman	338
5	Industri Pengolahan Tembakau	617
6	Industri Penggergajian dan Pengawetan	61
7	Industri Olahan Kayu dan Anyaman	1530
8	Industri Penerbitan	36
9	Industri Barang Kimia	35
10	Industri Pengolahan Tanah Liat	41
11	Industri Semen	-
12	Industri Furniture	985
13	Industri Barang Logam	353
14	Industri Pakaian Jadi	186
15	Industri Pengolahan Lainnnya	711

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2021

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Boyolali, yaitu sebesar 28,79%. Pengolahan kayu dan anyaman menjadi sektor yang memiliki jumlah industri terbanyak di Kabupaten Boyolali diikuti dengan industri barang logam dan pengolahan tembakau. Industri pengolahan kayu dan anyaman menjadi salah satu industri kreatif potensial yang dapat dikembangkan. Kondisi tersebut diikuti oleh pertumbuhan industri di Kabupaten Boyolali yang terus meningkat.

Tabel 2.69. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

NO	KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sosialisasi HKI	30				

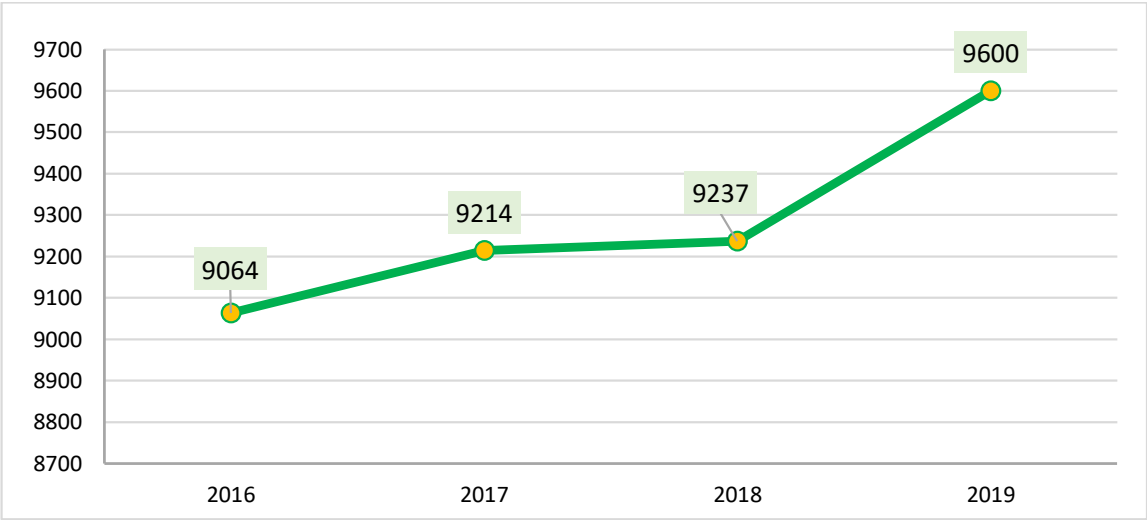
NO	KEGIATAN	2016	2017	2018	2019	2020
2	Tembakau	30	30	35	50	
3	GMP (Makanan)	30		30		
4	KONVEKSI	30	30	60		50
5	AMT	30	30	40	30	
6	Minyak Atsiri	30				
7	PIRT (MAKANAN)		10			
8	Merek		20			30
9	Kemasan		30		30	
10	Logam		30		75	
11	Aneka Kerajinan		30		60	
12	Sosialisasi Ijin Olahan Susu			30		
13	Gula Kelapa			30		
14	Aneka Keripik			30		
15	Sablon			30	30	
16	FGD Makanan Minuman			30		
17	Kayu				30	
18	Makanan				30	
19	Batik				30	30
20	Olahan Susu					20
21	Elektronik					20
22	Perbengkelan Roda Dua					20

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2020.

Cakupan kelompok pengrajin yang dibina dari tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlahnya terus meningkat kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan. Selain itu jenis industri yang dibina variatif. Tercatat pada tahun 2016 terdapat 180 pembinaan terhadap 6 jenis kegiatan industri, tahun 2017 terdapat 210 pembinaan terhadap 8 jenis kegiatan industri, tahun 2018 terdapat 315 kegiatan terhadap 9 jenis kegiatan industri, tahun 2019 terdapat 365 pembinaan terhadap 9 jenis kegiatan industri, dan pada tahun 2020 terdapat 170 pembinaan terhadap 6 jenis kegiatan industri.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian di Kabupaten Boyolali, yaitu sebesar 28,79%. Pengolahan kayu dan anyaman menjadi sektor yang memiliki jumlah industri terbanyak di Kabupaten Boyolali diikuti dengan industri barang logam dan pengolahan tembakau. Industri pengolahan kayu dan anyaman menjadi salah satu industri kreatif potensial yang dapat dikembangkan. Kondisi tersebut diikuti oleh pertumbuhan industri di Kabupaten Boyolali yang terus meningkat.

Grafik 2. 74. Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2019



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2019

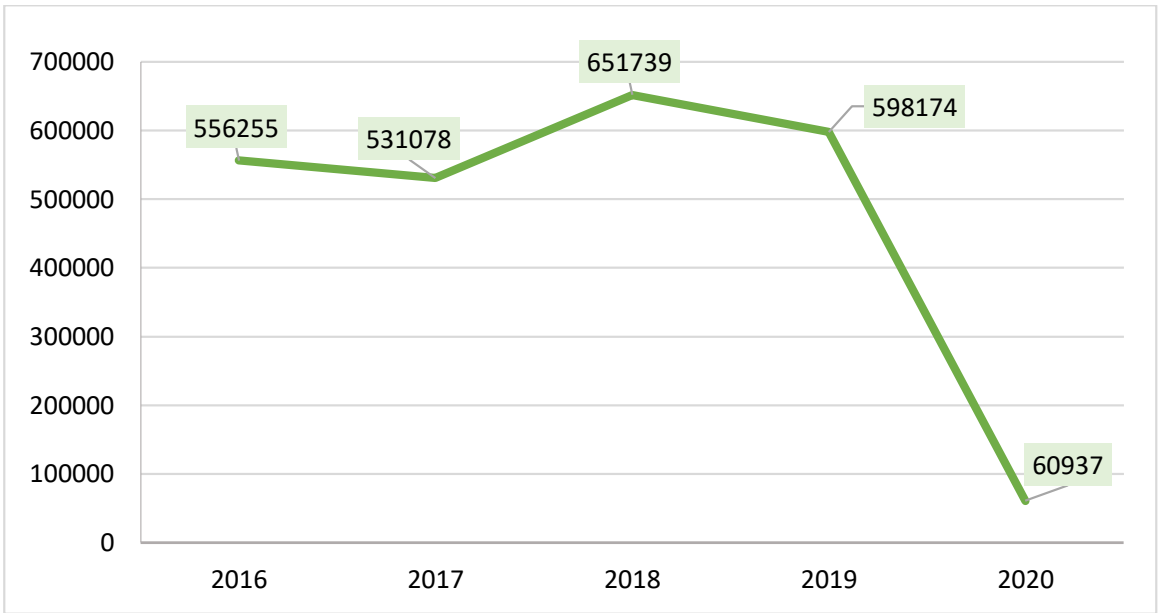
Laju pertumbuhan industri di Kabupaten Boyolali mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan sebanyak 536 unit dalam kurun waktu 4 tahun terakhir atau rata-rata 178 unit setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sekitar 363 unit. Sebaran industri terbanyak di Kabupaten Boyolali terdapat di Kecamatan Ampel, Boyolali, Mojosongo dan Banyudono.

2.2.5.3. Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang penting dalam menopang perekonomian daerah. Kabupaten Boyolali memiliki berbagai potensi pariwisata yang khususnya pariwisata yang berbasis alam serta wisata yang sifatnya atraktif di sektor pertanian, peternakan, serta wisata sejarah. Kabupaten Boyolali yang terletak di kaki sebelah timur Gunung Merapi dan Merbabu membuat Kabupaten Boyolali banyak dikunjungi oleh wisatawan khususnya para pendaki Gunung Merapi dan Merbabu yang menjadikan Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pintu masuk dan tempat peristirahatan wisatawan pendaki,

Perkembangan pariwisata Kabupaten Boyolali dapat dilihat dari angka jumlah kunjungan wisatawan serta jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pariwisata.

**Grafik 2. 75. Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Boyolali
Tahun 2016 – 2020**



Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, 2020.

Data jumlah kunjungan wisatawan tersebut merupakan jumlah kunjungan wisatawan yang melalui retribusi dan beberapa objek wisata yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali. Data menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan di Kabupaten Boyolali dari tahun 2016 sampai tahun 2020 jumlahnya fluktuatif. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 25.177 wisatawan, kemudian tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan sebanyak 120.661 wisatawan, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan sebanyak 537.237 wisatawan. Penurunan signifikan yang terjadi pada tahun 2020 diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat sehingga mengurangi aktivitas pariwisata.

Selain dari jumlah kunjungan wisatawan, peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pariwisata setiap tahunnya.

**Tabel 2. 71. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Bidang Pariwisata
Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020**

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD Bidang Pariwisata	Rp (.000)	1.329.212	1.219.981	1.884.310	1.618.298	1.111.734

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, 2020.

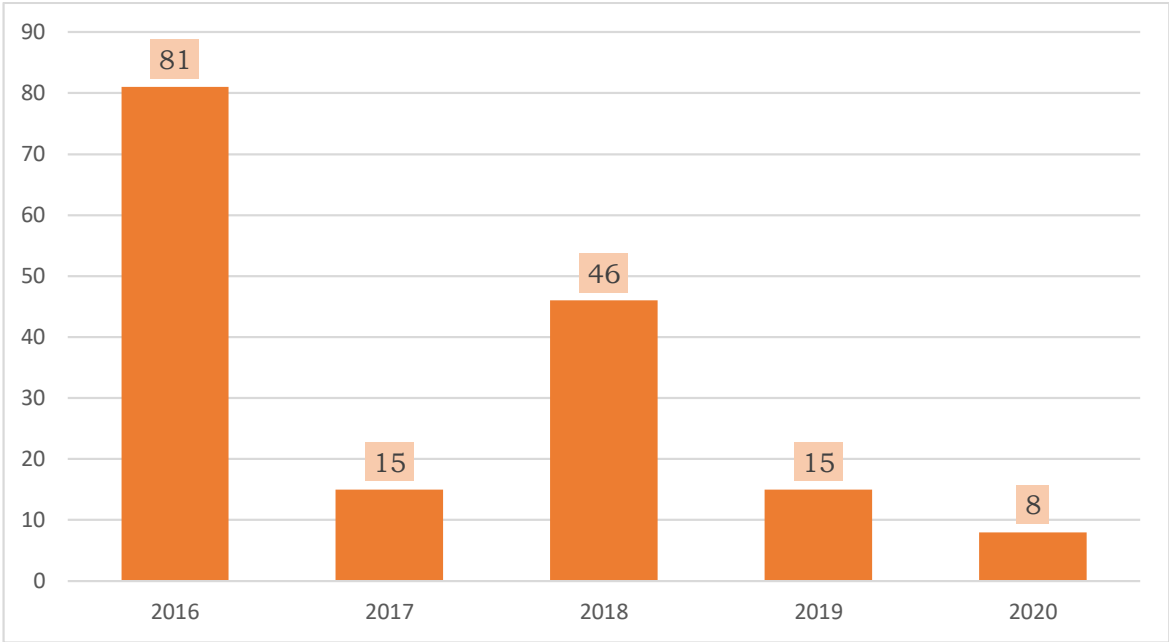
Jumlah PAD dari tahun 2016 sampai tahun 2017 cenderung fluktuatif. Data menunjukkan PAD pariwisata dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menurun dengan total penurunan sebesar 772.576. Pada tahun 2020 jumlah penurunannya tergolong signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan aktivitas sosial dan pariwisata. Selain itu, data PAD bidang pariwisata menunjukkan tren kenaikan dan penurunan yang sama dengan jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada korelasi antara jumlah kunjungan wisatawan dengan PAD bidang pariwisata yang didapatkan oleh Kabupaten Boyolali, sehingga jika ingin meningkatkan PAD bidang pariwisata maka jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Boyolali perlu ditingkatkan.

Data tersebut merupakan jumlah PAD bidang pariwisata yang merupakan hasil dari pendapatan retribusi yang berada di objek wisata, belum termasuk pendapatan bidang usaha pariwisata lain seperti pajak usaha pariwisata dan parkir di lokasi pariwisata non retribusi.

2.2.5.4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kewenangan urusan energi sumber daya mineral pada level daerah kabupaten hanya mencakup pemanfaatan energi baru terbarukan. Dalam konteks Kabupaten Boyolali, pengembangan energi alternatif yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah sumber energi biogas yang berasal dari kotoran sapi. Beberapa daerah yang memiliki potensi tersebut adalah Kecamatan Selo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Musuk, Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Nogosari, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Simo, Kecamatan Sambu, dan Kecamatan Karanggede. Capaian mengenai pengembangan energi alternatif di Kabupaten Boyolali adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 76. Terbangunnya Sumber Energi Baru Terbarukan (unit)



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Pada tahun 2016 hingga 2020, jumlah sumber energi baru terbarukan berupa IPAL Biogas yang dibangun mengalami fluktuasi. Pembangunan IPAL Biogas paling banyak terjadi di tahun 2016 yaitu mencapai 81 unit. Pembangunan IPAL Biogas di Kabupaten Boyolali masih belum mencapai target yang diinginkan. Pada tahun 2016 hingga 2020 total jumlah IPAL Biogas yang terbangun hanya mencapai 165 unit atau sekitar 73% dari target akhir periode yaitu 225 unit. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan biogas adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap perawatan unit IPAL Biogas. Di samping itu, persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah IPAL Biogas dirasa masih cukup memberatkan.

2.2.5.5. Pertanian

Sektor pertanian dibagi ke dalam beberapa sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Masing-masing sub sektor memiliki indikator yang berbeda untuk menilai kinerja pengembangannya. Berikut adalah data terkait pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Boyolali:

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kinerja sektor pertanian dapat dilihat menggunakan indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Semakin besar kontribusi pertanian maka semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2. 72. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB (%) di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,50%	22,25%	22,16%	21,64%	22,49%

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2020.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Boyolali dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami penurunan. Meskipun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Boyolali merupakan yang terbesar kedua setelah industri pengolahan. Hal tersebut menunjukan bahwa kontribusi dan keberadaan sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Boyolali.

2. Produksi Pangan Utama

Produksi pangan utama di Kabupaten Boyolali yang terdiri dari padi, jagung, dan kedelai sangat penting keberlangsungannya bagi daerah. Produksi pangan utama tersebut diharapkan mampu untuk mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat serta diharapkan dapat dijadikan sebagai komoditas unggul untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 73. Produksi Pangan Utama dan Bahan Pangan Utama Lainnya di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi (Ton)	Ton	300.123	275.073	295.736	292.987	283.331
2	Jagung	Ton	180.439	124.904	149.976	139.506	147.200
3	Kedelai	Ton	4.803,72	5.587	3.488	5.608	1.663

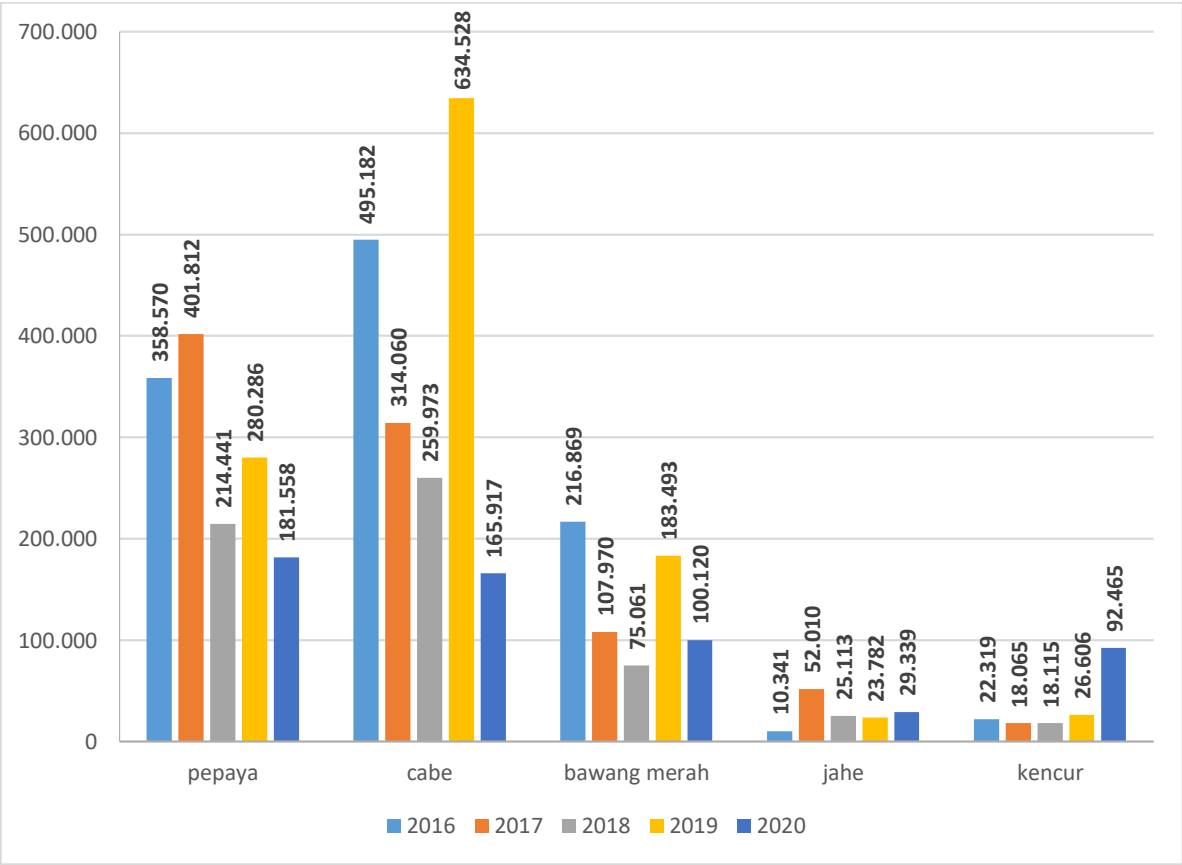
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2020.

Data di atas menunjukkan terjadinya fluktuasi dan cenderung menurun dalam hal jumlah produksi pangan utama sehingga menjadi persoalan yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, penurunan tersebut dapat dicari akar permasalahannya terutama pada aspek sarana dan prasarana, tenaga kerja, serta kemungkinan adanya bencana pertanian.

3. Produksi Tanaman Hortikultura Utama

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman sayuran dan buah-buahan. Tanaman hortikultura yang banyak di tanam di Kabupaten Boyolali adalah pepaya, cabe, bawang merah, jahe, dan kencur.

Grafik 2. 77. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Utama di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2021

Sama halnya dengan tanaman pangan, produksi hortikultura utama juga mengalami fluktuatif dari tahun 2016-2019. Beberapa penyebab utama antara lain, terkait cabe misalnya, terjadi peningkatan signifikan tahun 2019 disebabkan oleh banyaknya petani yang antusias untuk menanam cabe karena kebutuhan pasar yang terus meningkat dan harga jual cabe di Kabupaten Boyolali yang relatif stabil sehingga cabe dinilai cukup menguntungkan para petani dari sisi ekonomi. Sedangkan produksi bawang merah mengalami kenaikan pada 2019 akibat adanya pengembangan tanaman bawang merah baik yang bersumber dari dana APBN-TP maupun APBD. Pada saat yang sama, peningkatan produksi pada tahun 2019 disebabkan oleh tingginya permintaan kencur dalam bentuk segar maupun berbentuk bubuk yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan jamu.

4. Produksi Tanaman Perkebunan

Produksi tanaman perkebunan yang banyak di tanam di Kabupaten Boyolali antara lain: cengkeh, kopi, kelapa, tembakau, tebu, lada, dan atsiri.

Tabel 2. 74. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cengkeh	Ton	411,97	-	583,44	547,70	696,48
2	Kopi	Ton	247,17	247,57	368,65	138,92	430,69
3	Kelapa	Ton	5.726,23	3.279,38	2.781,71	2.851,73	2.825,15
4	Tembakau	Ton	4.108,12	3.867	4.718,42	7.404,51	5.703,98
5	Tebu	Ton	213.315,93	20.690,64	20.380,17	17.157	16.754,63
6	Lada	Ton	18,89	19,79	12,80	12,9	14,15
7	Atsiri	Kuintal	61,65	103,01	62,60	57,38	120,07

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali 2020

Produksi cengkeh dari tahun 2016 ke tahun 2018 mengalami peningkatan produksi sebesar 17.147 ton dan mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 36 ton. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2019, tetapi jumlah produksi tersebut sudah mencapai target sasaran yang sudah ditetapkan dengan capaian 158% dari target. Capaian tersebut terjadi karena telah dilakukan pemberian bantuan bibit, sarana angkut, dan pestisida kepada petani.

Porduksi Kopi dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan penurunan 229,73 ton. Meskipun demikian, angka tersebut sudah mencapai target capaian kinerja produksi kopi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tercapai target produksi dengan capaian 205,98%, tahun 2017 sebesar 196,48%, tahun 2018 sebesar 278,65%, dan tahun 2019 sebesar 266,79%.

Produksi kelapa dari tahun 2016 mengalami penurunan hingga tahun 2018, kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 meskipun dengan angka peningkatan yang tidak signifikan. Hal tersebut terjadi karena banyak tanaman kelapa yang sudah tua sehingga produksinya menurun serta lamanya waktu yang dibutuhkan kelapa dari mulai tanam hingga dapat mulai produksi, dan banyak petani yang memetik kelapa dalam bentuk kelapa muda dengan alasan harga jual lebih tinggi.

Produksi tembakau mengalami penurunan sebesar 241,12 ton pada tahun 2017, kemudian selanjutnya pada tahun 2018 mengalami peningkatan produksi sebesar 851,42 ton dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan produksi. Peningkatan tersebut disebabkan karena banyaknya bantuan untuk komoditas tembakau, baik yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten. Bantuan tersebut berupa sarana penunjang budi daya serta bantuan pasca panen tembakau.

Produksi tebu dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan jumlah produksi dan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena berkurangnya areal pertanaman tebu akibat beralih ke tanaman padi dan jagung, serta usia ratoon yang sudah cukup tua sehingga produksinya menurun.

Produksi lada mengalami fluktuasi. Secara umum, rendahnya jumlah produksi lada diakibatkan oleh banyaknya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada tanaman lada sehingga mengakibatkan tanaman menjadi mati.

5. Cakupan Bina Kelomok Tani

Kelompok tani merupakan organisasi kaum tani yang tidak bisa ditinggalkan dalam kegiatan penyuluhan pertanian, bahkan keberhasilan penyuluhan pertanian selalu dikaitkan dengan keragaan dan keberadaan kelompok tani. Upaya pembinaan kelompok tani dijalankan melalui penyuluhan pertanian untuk memberdayaan petani. Berikut adalah data mengenai cakupan bina kelompok petani di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2.75 Jumlah Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Petani yang mendapatkan pelatihan, bantuan, registrasi kebun dan sertifikat mutu	850	1.360	1.040	1.440	1.200

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Cakupan bina kelompok tani di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuasi pada tahun 2016 hingga 2020. Fluktuasi ini terjadi karena bantuan yang diberikan kepada petani menyesuaikan kegiatan dan jumlah anggaran yag

tersedia. Cakupan bina kelompok petani mengalami peningkatan pada tahun 2017 dan 2019 karena banyaknya bantuan untuk komoditas tembakau yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Bantuan tersebut berupa sarana penunjang budi daya serta bantuan pasca panen tembakau. Cakupan bina kelompok petani mengalami penurunan pada tahun 2020 karena adanya fefocusing anggaran APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

6. Peternakan

Salah satu cakupan pertanian adalah termasuk peternakan. Peternakan di Kabupaten Boyolali memiliki potensi yang sangat besar khususnya ternak besar. Kabupaten Boyolali yang terkenal dengan peternakan sapi khususnya sapi perah menunjukkan kinerja yang baik dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 76. Jumlah Ternak dan Produksi Peternakan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

No	Jenis Ternak/Produki Ternak	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	Ekor	95.651	96.066	99.311	106.599	106.765
2	Sapi Perah	Ekor	89.844	92.619	92.856	94.088	94.143
3	Kambing dan Domba	Ekor	139.128	143.379	146.145	156.830	159.718
4	Produksi Daging	Ton	11.361	11.960	13.294	14.148	14.081
5	Produksi Susu	Kilo Liter	49.000	49.129	49.540	49.717	49.988

Sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, 2020.

Jumlah populasi hewan ternak besar dan tenak kecil yaitu sapi potong, sapi perah, kambing dan domba dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 selalu mengalami peningkatan jumlah populasi. Begitupun dengan produksi susu yang menunjukkan jumlah produksi yang selalu meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Keberhasilan peningkatan dikarenakan beberapa hal diantaranya:

- Keberhasilan kegiatan IB/Upsus Siwab yang telah menyumbang peningkatan populasi sebanyak 20% (17.949 ekor) untuk sapi potong dan 7% (6.078 ekor) sapi perah pada tahun 2019, serta pelaksanaan pengendalian penyakit ternak.
- Terselenggaranya pembinaan kelompok/ masyarakat peternak kambing dan keberhasilan kegiatan IB petugas lapangan/UPT Puskesmas, sehingga kegiatan tersebut menyumbang peningkatan populasi sebanyak 12% (10.685) ekor.

- c. Pemotongan sapi betina yang tidak produktif serta permintaan daging sapi yang meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yang menyebabkan peningkatan produksi daging sapi.
- d. Terselenggaranya kegiatan pelatihan kualitas dan gizi pakan ternak sehingga peternak mampu menyediakan pakan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai dan berkelanjutan.
- e. Faktor usaha/pengembangan usaha dengan adanya program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS).

Tabel 2. 75. Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

No	Unggas	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ayam Kampung	815.585	792.753	780.255	778.799	788.580
2	Ayam Petelur	2.357.886	2.512.773	2.512.941	2.339.364	2.500.411
3	Ayam Pedaging	14.501.873	9.505.564	10.990.245	12.170.494	13.307.908
4	Itik	158.830	167.114	166.687	166.168	167.645

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2020.

Jumlah populasi ayam kampung dari tahun 2016 sampai tahun 2019 selalu mengalami penurunan jumlah populasi, kemudian pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan. Berbeda halnya dengan ayam petelur, ayam pedaging, dan itik yang mengalami fluktuasi jumlah populasi dan cenderung lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor terutama intervensi untuk mempertahankan populasi ayam kampung masih belum maksimal.

2.2.5.6. Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Besaran indikator tersebut didapat dari nilai ekspor barang serta kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

1. Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kontribusi langsung dari aktivitas perdagangan di suatu daerah. Besaran indikator tersebut didapat dari nilai ekspor barang serta kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB:

Tabel 2. 76. Nilai Ekspor dan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Ekspor Barang	US\$	242.684	145.522,72	274.079,82	370.193,74	272.560,39
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb	%	12,70	12,94	13,52	12,84	12,42

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2020.

Nilai ekspor barang Kabupaten Boyolali sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 sebesar US\$233.055, kemudian kembali meningkat pada tahun 2018 dan 2019 sebelum akhirnya kembali menurun signifikan sebesar US\$97.633,35.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan sebesar 1,1% pada tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya penurunan daya beli masyarakat terhadap barang/produk yang beredar terutama perdagangan besar.

2. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan cerminan aktivitas ekonomi kerakyatan di suatu daerah. Pasar tradisional dapat berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat yang berkaitan langsung dengan konsumsi dan daya beli masyarakat. Berikut merupakan data pasar tradisional yang terdapat di Kabupaten Boyolali :

Tabel 2. 77. Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Kabupaten Boyolali Beserta Kategorinya Tahun 2020

Total Jumlah Pasar Tradisional	Pasar Kategori Baik	Pasar Kategori Sedang	Pasar Kategori Tidak Baik
44 Pasar	33 Pasar	6 Pasar	5 Pasar

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2020

Jumlah pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali berjumlah 44 pasar dengan didominasi pasar yang berkategori baik sebanyak 33 pasar, 6 pasar berkategori sedang, dan 5 pasar berkategori tidak baik.

Selain itu, pasar tradisional juga memberikan pendapatan secara langsung bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui retribusi pasar.

**Tabel 2. 78. Pendapatan Retribusi Pasar Daerah yang Dikelola
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020**

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Retribusi Pasar	Rp. (000)	5.219.768	5.889.175	7.111.897,82	9.405.173,01	7.363.926

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2021.

Jumlah pendapatan dari retribusi pasar daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali terus meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp (000) 2.041.247,01. Hal tersebut tidak terlepas dari Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan dan aktivitas masyarakat sehingga retribusi pasar pada tahun 2020 menurun.

Tabel 2.78. Cakupan Bina Kelompok Pedagang Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pedagang yang dibina	13.647	13.647	14.365	14.786	14.506

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Boyolali, 2020.

Jumlah pedagang pasar yang dibina pada tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung meningkat dengan total peningkatan sebesar 1.139 pedagang. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 280 pedagang. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 diakibatkan adanya beberapa pembangunan pasar oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali.

2.2.6. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan

2.3.3.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan merupakan urusan penunjang dalam pelaksanaan urusan pilihan dan wajib. Perencanaan pembangunan memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD. Dalam urusan perencanaan, ketersediaan dan akurasi arah pembangunan menjadi fokus utama. Guna memastikan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat perlu dilakukan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah saat ini dituntut untuk semakin berkualitas dan kompetitif, baik dalam hal pelayanan publik maupun akuntabilitas berbasis kinerja. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang harus baik dan

tepat dengan melibatkan seluruh *stakeholders* pembangunan secara komprehensif. Integrasi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi dalam penerapan *e-government* menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berkualitas. Berikut adalah capaian bidang perencanaan Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 79. Ketersediaan Dokumen Perencanaan

Uraian	2016	2017	2018	2019
Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD)	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2019

Secara umum ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Boyolali sudah terpenuhi. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2019. Salah satu faktor yang mendukung terpenuhinya kebutuhan dokumen perencanaan di Kabupaten Boyolali adalah penerapan aplikasi perencanaan (*e-palnning*) SiBangun, sehingga mempercepat dan mempermudah penyusunan dokumen perencanaan.

Meskipun ketersediaan dokumen perencanaan di Kabupaten Boyolali sudah terpenuhi, masih perlu dilakukan optimalisasi. Salah satu upaya untuk mengoptimalisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Boyolali adalah perlu dilakukannya penyelarasan antara dokumen-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja), Anggaran (KUA-PPAS, RKA/DPA) dan kinerja (Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja) secara bertahap sesuai siklus perencanaan.

Tabel 2. 80. Ketersediaan Dokumen Evaluasi

Uraian	2016	2017	2018	2019
Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali tahun 2019

Selain dokumen perencanaan, dokumen hasil evaluasi terhadap RPJMD dan RKPD juga sudah terpenuhi sejak tahun 2016 hingga 2019. Kondisi tersebut dapat dicapai karena adanya asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali kepada seluruh perangkat daerah. selain itu capaian ini didukung oleh adanya penggunaan beberapa aplikasi seperti E-Monev RKPD yang digunakan untuk pengumpulan data evaluasi RKPD, E-Monev RPJMD untuk mengumpulkan data evaluasi RPJMD dan E-Laporan yang digunakan untuk penyusunan laporan kegiatan setiap bulan. Kondisi

yang sudah dicapai perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan di tahun yang akan datang guna menunjang upaya pembangunan daerah.

Tabel 2. 81. Ketersediaan Dokumen Pelaporan

Uraian	2016	2017	2018	2019
Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJ AMJ, LPPD AMJ dan LKJiP)	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Ketersediaan dokumen pelaporan menjadi indikator lain yang penting untuk dipenuhi. Ketersediaan dokumen pelaporan di Kabupaten Boyolali sudah terpenuhi. Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 hingga 2019. Ketersediaan dokumen pelaporan di Kabupaten Boyolali dapat terpenuhi berkat adanya asistensi kepada perangkat daerah pengampu indikator dalam menyusun dokumen LKPJ, LPPD, ILPPD dan LKJIP .

Capaian indikator tersebut terpenuhi bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pemenuhan indikator ini adalah masih rendahnya perhatian dan pertanggungjawaban dari beberapa Perangkat Daerah. Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan dalam menyusun dokumen pelaporan. Kendala lain yang dihadapi adalah waktu penyusunan LKPJ/LPPD dengan LKJIP yang dilakukan secara bersamaan. Hal ini berpengaruh terhadap fokus tim penyusun yang menjadi terpecah.

2.3.3.2. Keuangan

Urusan keuangan daerah dalam pembangunan berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. berkaitan dengan pendapatan daerah, kinerja keuangan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD). Secara umum kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilihat dari capaian opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dalam hal pendapatan maupun belanja. Berikut adalah kinerja urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 82. Opini Laporan Keuangan Daerah

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Opini Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Opini BPK 2016-2020

Secara umum kondisi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Boyolali berada dalam kategori baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan konsistensi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan oleh BPK sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Penyerahan laporan keuangan ke BPK RI perwakilan Jawa Tengah secara tepat waktu menjadi salah satu faktor yang menunjang capaian tersebut. Menjaga tren positif yang sudah dicapai menjadi fokus utama dalam urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selain opini WTP yang dicapai, secara postur keuangan daerah Kabupaten Boyolali termasuk ke dalam kategori yang sehat. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan perbandingan antara pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai pada tahun 2019. Berikut adalah tabel perbandingan pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai Kabupaten Boyolali pada tahun 2019.

Tabel 2. 83. Perbandingan Pendapatan Umum Daerah dengan Belanja Pegawai Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Umum Daerah						
1	PAD	292,310,032,2 26	388,014,897,3 86	342,957,213,7 26	395,431,863,4 02	451,543,58 2,894
2	DBH	154,020,132,0 36	153,098,739,5 64	150,794,982,2 20	145,486,344,3 36	166,257,50 5,109
3	DAU	1,032,744,010, 000	1,014,602,019 ,000	1,014,602,019 ,000	1,045,669,922 ,000	956,428,55 6,000
A	Jumlah	1,479,074,174, 262	1,555,715,655 ,950	1,508,354,214 ,946	1,586,588,129 ,738	1,574,229, 644,003
Belanja Pegawai ASN						
B	Total Belanja Pegawai	948,770,734,6 62	837,365,211,9 39	833,970,400,0 78	855,488,577,2 58	821,098,65 8,131
	KKD (A-B)	530,303,439, 600	718,350,444, 011	674,383,814, 868	731,099,552, 480	753,130,9 85,872
Komposisi		64:36	54:36	55:45	54:46	52:48

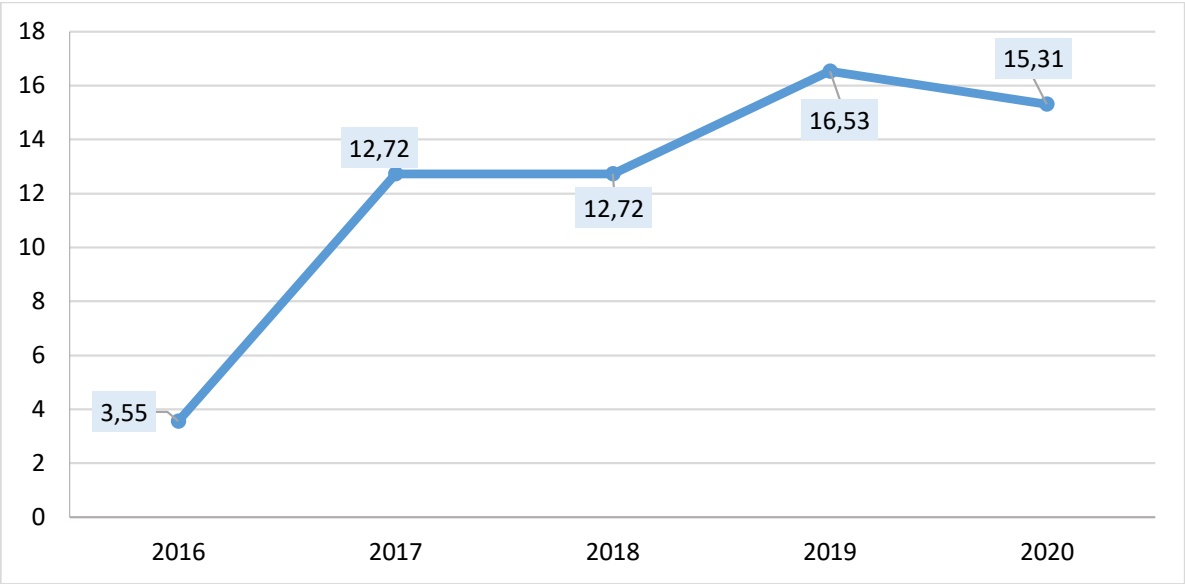
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, Kemampuan Keuangan Daetah (KKD) Kabupaten Boyolali berada dalam kategori tinggi. Kondisi tersebut didukung dengan penyelenggaraan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dengan melaksanakan beberapa kegiatan seperti penyusunan Analisis Standar Belanja, Penyusunan Standar Harga

Satuan, Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Penyusunan sistem serta prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah secara umum, indikator lain yang digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah dengan melihat peningkatan pendapatan daerah. Kabupaten Boyolali memiliki tren yang baik dalam urusan pendapatan daerah. berikut adalah gambaran umum terkait pendapatan daerah Kabupaten Boyolali

Grafik 2. 78. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2019

Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Boyolali mengalami tren yang positif dengan total peningkatan 11,76% sejak tahun 2106 hingga 2020. Rata-rata peningkatan pendapatan yang dialami Kabupaten Boyolali adalah 2,94% per tahun. Capaian kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal seperti meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak, bertambahnya objek pajak baru serta intensifikasi penagihan kepada wajib pajak.

Tren positif yang sudah dicapai masih perlu untuk ditingkatkan. Beberapa hal yang masih perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta melakukan identifikasi objek pajak yang hingga saat ini masih belum terjangkau.

2.3.3.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian merupakan unsur penunjang yang memiliki fungsi mengelola ASN. Urusan kepegawaian erat kaitannya dengan beberapa aspek seperti manajemen kepegawaian, pengadaan calon ASN, mutasi, promosi, dan pemberhentian ASN, serta pengembangan kompetensi dan

kapasitas ASN. Salah satu kinerja urusan kepegawaian dapat dilihat dari persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi pegawai.

Jumlah ASN di kabupaten Boyolali pada tahun 2019 sebanyak 8.458 orang dengan komposisi 3.826 orang laki-laki dan 4.632 orang perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2018 yang mencapai 8.606 orang dengan komposisi 4.034 orang laki-laki dan 4.572 perempuan. Berikut adalah jumlah ASN menurut golongan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 84. Jumlah Pegawai di Kabupaten Boyolali Berdasarkan Golongan.

No	Golongan	2016	2017	2018	2019
1	Golongan I	142	126	110	99
2	Golongan II	1.508	1.388	1.212	1.131
3	Golongan III	3.798	3.848	3.755	4.113
4	Golongan IV	4.080	3.832	3.529	3.115

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2017-2020

ASN di wilayah Kabupaten Boyolali terdiri dari pegawai vertikal dan pegawai Otonomi daerah. pegawai otonomi daerah Kabupaten Boyolali tahun 2019 merupakan jumlah terendah sejak tahun 2016 hingga 2019. Jumlah ASN tahun 2019 mengalami penurunan 4,19% dari tahun 2018. Rata-rata penurunan jumlah ASN per tahun sejak tahun 2016 hingga 2019 adalah 9,24%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti banyak pegawai pensiun dan mutasi.

Upaya peningkatan pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan kualitas pemberi layanan. Beberapa hal yang menjadi fokus pengembangan adalah efektifitas dan produktivitas kinerja aparatur, peningkatan kapasitas tersebut dilakukan melalui pendidikan maupun pelatihan serta pembinaan pegawai. Upaya peningkatan kapasitas aparatur dilakukan guna mewujudkan penempatan jabatan sesuai kompetensi yang dimiliki pegawai. Berikut adalah persentase ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Tabel 2. 85. Persentase Pejabat Struktural yang Telah Lulus Pendidikan dan Pelatihan

Uraian	2016	2017	2018	2019
Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	80.15	71.7	95.9	82.75

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali Tahun 2019

Persentase pejabat struktural yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan mengalami tren yang fluktuatif sejak tahun 2016 hingga 2019. Persentase pejabat struktural yang lulus dalam pendidikan dan pelatihan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebanyak 8.45% dan 15.13% pada tahun 2019. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 86. Persentase ASN yang Menempati Jabatan Sesuai Kompetensi

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase ASN yang menempati jabatan sesuai dengan Kompetensi	80,16	80,47	80,00	80,00	85,00

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

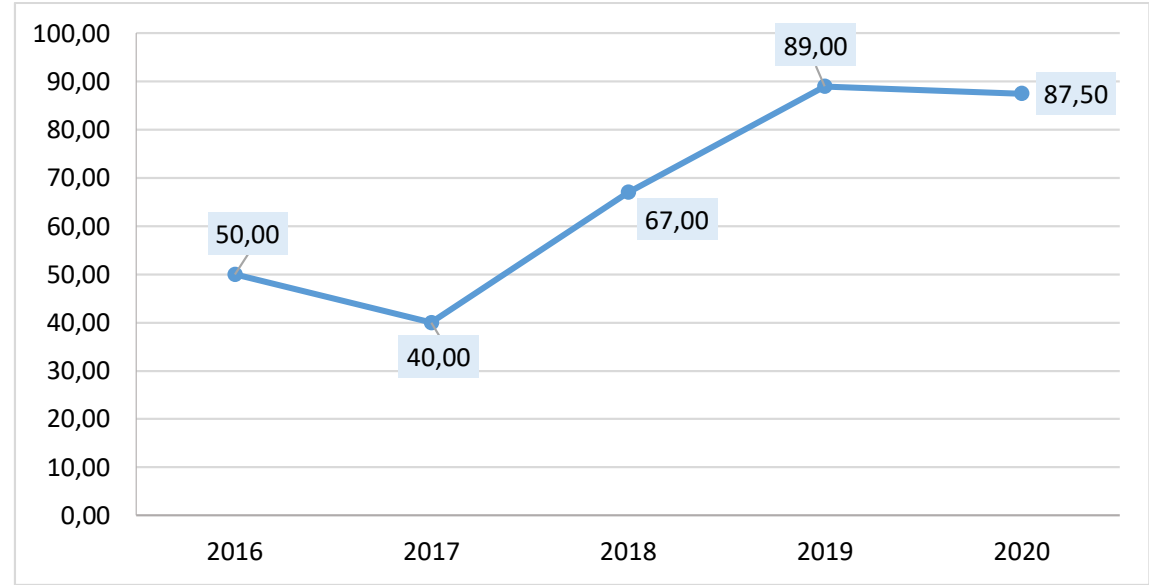
Persentase ASN di Kabupaten Boyolali yang menempati jabatan sesuai kompetensi bekisar pada angka 80% hingga 85% sejak tahun 2016 hingga 2020. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jabatan yang diisi oleh ASN dengan latar belakang pendidikan yang berbeda dengan jabatan yang diisi. Perbedaan latar belakang pendidikan dengan jabatan yang diisi semata-mata terjadi karena kebutuhan organisasi dan masih kurangnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang tersedia.

2.3.3.4. Penelitian dan Pengembangan

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara *stakeholders* menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing. Instansi yang terkait memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam bidang pemerintahan dalam negeri. Tugas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah serta daya saing daerah melalui penelitian dan pengembangan.

Penelitian dan pengembangan merupakan pendukung perencanaan dalam memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan. Beberapa fungsi kelitbangan antara lain adalah menyusun kebijakan teknis, program, anggaran penelitian, melaksanakan kelitbangan, memberikan rekomendasi kebijakan dan regulasi serta melaksanakan administrasi kelitbangan. Berikut adalah gambaran hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan.

Grafik 2. 79. Cakupan Hasil Penelitian dan Inovasi yang Diimplementasikan



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan mengalami tren yang meningkat sejak tahun 2016 hingga 2020. Persentase tertinggi berada pada tahun 2019, mencapai 89%. Namun demikian hasil penelitian dan inovasi daerah ini masih didominasi oleh pelajar dan masyarakat umum dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh LIPI dalam lomba kreativitas dan inovasi. Kondisi ini menunjukkan masih belum optimalnya peran lembaga kelitbangan dalam melakukan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah di Kabupaten Boyolali.

2.3.3.5. Pengawasan

Salah satu fungsi penunjang pemerintahan adalah pengawasan. Fungsi pengawasan terkait pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Capaian fungsi pengawasan di Kabupaten Boyolali dengan beberapa indikator makro (*outcome*) yang sudah memenuhi target nasional, terutama Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP, yaitu:

Tabel 2. 87. Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Boyolali 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Maturitas SPIP	1	3	3	3	3
Kapabilitas APIP	1	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Boyolali, 2021

Kabupaten Boyolali telah mencapai target nasional maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sejak 2017. Capaian tersebut ditopang dengan berbagai kinerja. Dalam konteks sumber daya manusia, Inspektorat Boyolali didukung oleh kinerja aparatur fungsional 27 auditor dan 4 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD). Sedangkan secara kelembagaan capaian maturitas SPIP antara lain didukung oleh penerapan kebijakan operasional dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di level kabupaten, satgas SPIP di tingkat kabupaten dan Perangkat Daerah, komitmen pimpinan daerah beserta struktur di bawahnya, adanya pentahapan penerapan SPIP yang jelas, pemantauan berkelanjutan, serta pelaporan. Sedangkan capaian Kapabilitas APIP ditopang oleh koordinasi dan pendampingan intensif dari BPKP Jawa Tengah, pelaksanaan pengawasan yang mengacu Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, serta adanya rencana aksis dan tindak lanjut rencana aksi.

Tugas pengendalian terkait laporan keuangan Pemerintah Daerah dijalankan dengan aktivitas pendampingan dan koordinasi intensif dengan perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan dan penataan aset. Pelaksanaan audit keuangan juga telah menyasar pemerintah desa. Auditor melakukan pendampingan penyusunan neraca desa. Implementasi sistem tersebut kemudian menopang pencapaian kinerja tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mendekati 100%.

Tabel 2. 88. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal	96%	96%	97%	98%	98%
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	99,31%	98,94%	99,32%	99,59%	99,65%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Boyolali, 2021

Kabupaten Boyolali telah memperkuat upaya penerapan integritas bagi aparatur pemerintah, terutama dalam pelaporan harta kekayaan. Inovasi yang dihasilkan dan diimplementasikan adalah Sistem Informasi Harta Kekayaan Kabupaten Boyolali (Siharkaboy) sebagai instrumen pelaporan harta kekayaan bagi pegawai BUMD, BULD, dan pemerintah desa.

Aplikasi ini memperkuat sistem yang sudah berjalan secara nasional, yaitu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Capaian aparaturnya yang melaporkan harta kekayaan menggunakan aplikasi nasional adalah:

Tabel 2. 89. Persentase Penyelenggara Negara yang Melaporkan Harta Kekayaan

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
LHKPN	70%	80%	100%	100%	100%
LHKASN	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Boyolali, 2021

Kabupaten Boyolali menjadi instansi pemerintah se-Indonesia yang telah 100% melaporkan harta kekayaan pejabat sejak tahun 2018. Hal ini ditopang dengan kebijakan berupa sanksi administratif bagi pejabat yang tidak patuh, antara lain berupa peninjauan kembali pengangkatan jabatan struktural/fungsional, kenaikan gaji berkala dan pangkat, hak pensiun, serta pemotongan tambahan penghasilan pegawai (Surat Edaran Nomor 700/895/11/2019).

Upaya memperkuat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan ditopang dengan pencegahan gratifikasi dengan menjalankan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Tim *saber pungi* juga telah berjalan dengan koordinasi dan dukungan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pencegahan gratifikasi didukung pula oleh misalnya kebijakan mengkonversi *fee bank* menjadi tanggung jawab sosial perusahaan. Akses dan perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan pengaduan dibuka dengan pemberlakuan aplikasi *whistle blower system*. Berbagai kebijakan tersebut menopang pencapaian indeks persepsi korupsi Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 sebesar 88,51%. Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Boyolali dengan indeks persepsi korupsi terbaik di Indonesia.

2.3.3.6. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi untuk memfasilitasi anggota DPRD dalam membuat kebijakan daerah dan penyusunan produk hukum daerah. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat Dewan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

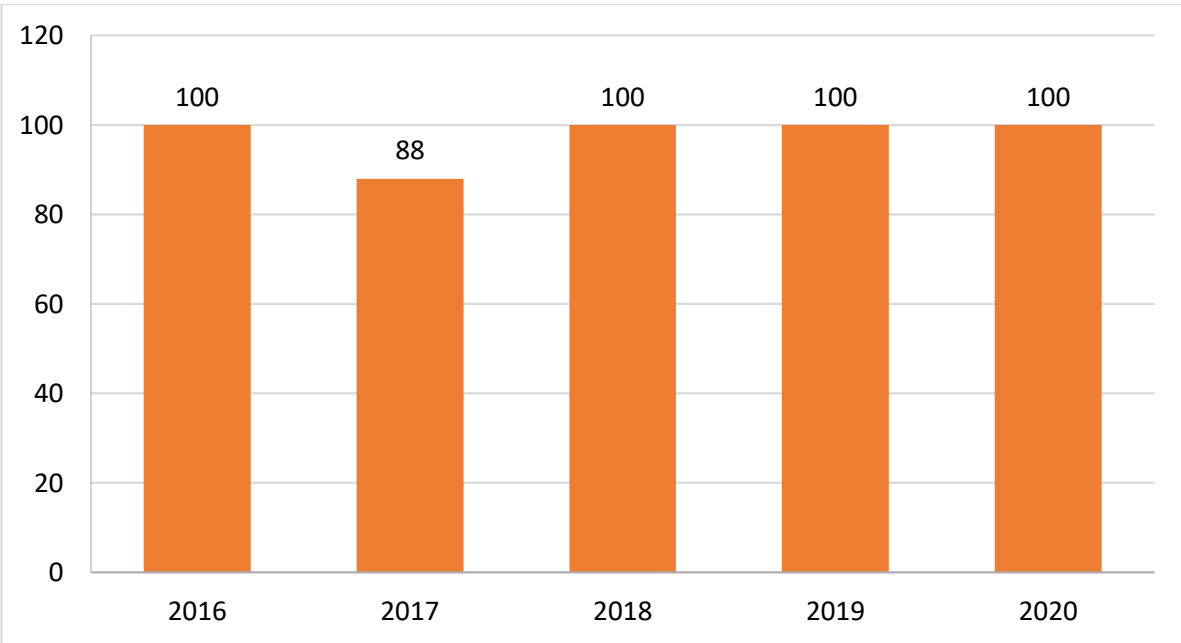
Tabel 2. 90. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Partai Politik	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	24	11	35
Golongan Karya (Golkar)	3	1	4
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	1	3
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	-	1	1
Partai Amanat Nasional (PAN)	-	-	-
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	-	2
Partai Demokrat (PD)	-	-	-
Kab. Boyolali	31	14	45

Sumber: Kabupaten Boyolali Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel diatas, anggota DPRD Kabupaten Boyolali didominasi oleh jenis kelamin laki-laki. Persentase anggota DPRD berjenis kelamin laki-laki sebesar 68,88% dan perempuan sebesar 31,11%. Persentase tersebut memenuhi standar minimal keterwakilan perempuan pada anggota dewan sebesar 30%. Namun demikian, angka tersebut selisih sangat sedikit dengan angka minimal. Untuk itu, pada periode selanjutnya diharapkan persentase keterwakilan perempuan pada anggota dewan semakin meningkat dan isu kesetaraan gender bisa dikawal dengan lebih baik.

Grafik 2. 80. Persentase Layanan Fasilitasi DPRD Tahun 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Dilihat dari persentase layanan fasilitas DPRD tahun 2016-2020, capaian kinerja Sekretariat Dewan dalam memfasilitasi 45 anggota DPRD tergolong cukup bagus yakni rata-rata mencapai target kerja 100%. Keberhasilan paling besar dalam fasilitasi persiapan pembentukan Peraturan Daerah. Namun, dalam hal pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah mengalami kendala seperti budaya disiplin dan motivasi yang belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan, banyaknya agenda kegiatan pada masing-masing partai, serta kompetensi anggota yang sangat bervariasi. Selain itu, perubahan regulasi dari pusat yang sangat cepat belum diimbangi dengan kemampuan merespon perubahan tersebut, sehingga sering terjadi keterlambatan menindaklanjuti beberapa amanat Peraturan Perundang-undangan.

2.3.3.7. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah bagian dari urusan penunjang pemerintahan yang mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali. Sekretariat Daerah tidak lepas dari tugas dan fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi berbagai kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Perangkat daerah tersebut menjadi koordinator pencapaian beberapa indikator kinerja makro (*outcome*), salah satunya adalah capaian nilai Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi berupaya mencapai sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas birokrasi, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2016-2020 diperoleh dari penilaian mandiri dan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

Tabel 2. 91. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali 2016-2020

Tahun	Nilai
2016	62,04
2017	63,26
2018	85,30
2019	65,01
2020	56,84

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Tabel 2. 92. Nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Boyolali dari Kemenpan-RB Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai
2016	62,04
2017	63,26
2018	52,57
2019	56,84
2020	61,72

Sumber: Kemenpan-RB, 2016-2020

Capaian nilai reformasi birokrasi Kabupaten Boyolali belum optimal. Hal ini terkonfirmasi dari hasil penilaian mandiri, sekaligus penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan capaian nilai lebih rendah. Pelembagaan reformasi birokrasi di Kabupaten Boyolali masih perlu diperkuat dengan manajemen pembagian kewenangan yang baik kepada perangkat daerah terkait yang dikoordinasi oleh Bupati dan Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selama ini pelaksanaan reformasi birokrasi masih bergantung kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang memiliki kewenangan terbatas. Capaian nilai reformasi birokrasi menandakan pula beberapa komponen pembentuk reformasi birokrasi belum berjalan dengan baik, meskipun terdapat pula komponen yang memenuhi target optimal, misalnya Opini BPK WTP. Komponen pembentuk reformasi birokrasi yang belum optimal, misalnya capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), meskipun mengalami peningkatan nilai setiap tahun, yaitu:

Tabel 2. 93. Nilai SAKIP Kabupaten Boyolali 2016-2020

Tahun	Nilai	Predikat
2016	56,46	CC
2017	61,24	B
2018	66,45	B
2019	67,18	B
2020	68,75	B

Sumber: Kemenpan-RB, 2016-2020

Capaian nilai SAKIP tersebut dibentuk oleh beberapa komponen, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, capaian dan evaluasi kinerja. Pemerintah Kabupaten Boyolali berupaya memperbaiki perencanaan kinerja dengan memastikan adanya bagan alir yang jelas antara indikator

kinerja Bupati dan Wakil Bupati dengan masing-masing kepala Perangkat Daerah. Tantangan lain terkait penerapan SAKIP adalah pelembagaan perencanaan kinerja yang masih bergantung pada sumber daya manusia perencana. Adapun sumber daya perencana tersebut kadang mengalami mutasi. Tindak lanjut penerapan SAKIP antara lain penggunaan komponen kinerja dalam menentukan TPP, serta penerapan e-SAKIP yang terus diperbaiki.

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) juga menjadi representasi capaian manajemen kinerja yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah. EKPPD merupakan penilaian atas indikator kinerja kunci Pemerintah Daerah yang terdiri dari komponen tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Capaian EKPPD Kabupaten Boyolali mulai dari 2015 hingga 2018 mengalami fluktuasi, namun terdapat capaian peringkat dan skor kinerja yang sangat meningkat pada 2018.

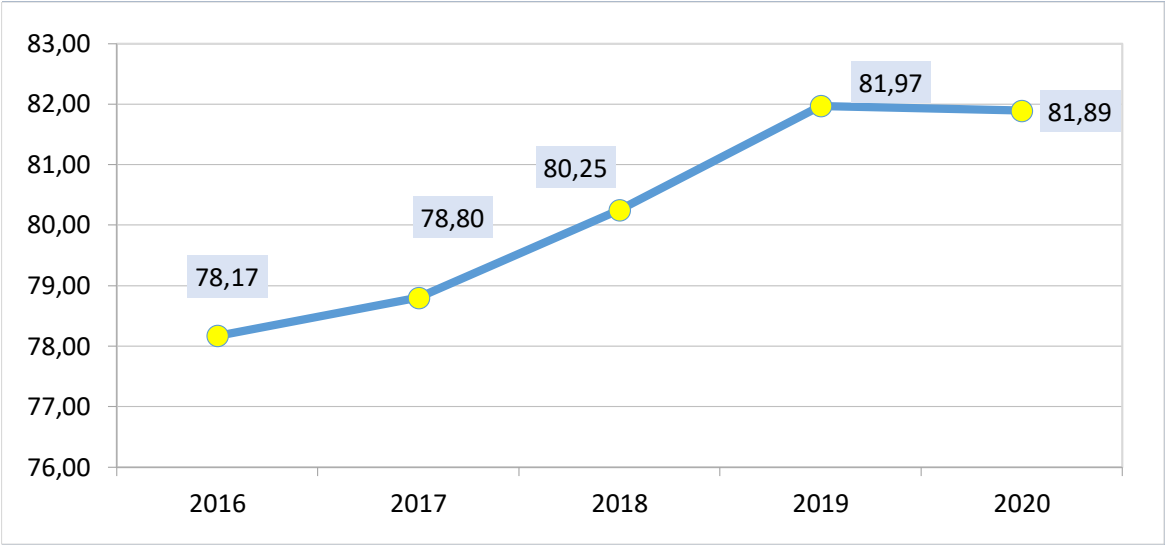
Tabel 2. 94. Peringkat, Skor, dan Status EKPPD Kabupaten Boyolali secara Nasional

Tahun	Peringkat	Skor	Status
2015	13	3,4142	Sangat Tinggi
2016	70	3,2560	Sangat Tinggi
2017	47	3,1428	Sangat Tinggi
2018	4	3,4619	Sangat Tinggi

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2015-2018

Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah didukung oleh capaian indikator di seluruh aspek pelayanan wajib dasar, non-dasar, pilihan dan unsur penunjang. Capaian dalam seluruh aspek pelayanan tersebut ditunjang oleh penerapan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian atas kualitas pelayanan publik sekaligus membuka akses partisipasi masyarakat. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 dalam kategori cukup baik yakni pada rentang 75-80. Capaian ini dibangun dari pendampingan intensif kepada masing-masing unit pelayanan/perangkat daerah dalam rangka pembinaan pelayanan dan penyusunan instrumen SKM, serta didukung pula oleh penerapan aplikasi dari Kemenpan-RB, yaitu LAPORSP4N.

Grafik 2. 81. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali 2016-2020



Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terkait dengan perumusan dan sinkronisasi kebijakan. Peran ini sangat penting karena terkait efektivitas kebijakan Bupati dan Wakil Bupati yang dijalankan oleh Perangkat Daerah. Tantangan yang masih dihadapi adalah adanya tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk beberapa struktur di dalam Sekretariat Daerah yang masih menjalankan kewenangan teknis. Meskipun demikian, kebijakan yang sinkron telah diarusutamakan di dalam tata kelola Pemerintahan Daerah, terutama dengan menempatkannya sebagai indikator kinerja.

Tabel 2. 95. Indikator Terkait Kebijakan

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Dokumen kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan		5	5	5	4
Dokumen kebijakan teknis bidang kelembagaan	33	1	30	11	3
Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	85%	68,97%	87,5%	122,2%	105,6%
Dokumen rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	218	153	68	86	102
Persentase kerjasama yang	100%	90%	90%	90%	90%

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
difasilitasi dan dikoordinasi hingga ke program aksi					
Kebijakan teknis bidang pemberitaan, pengumpulan, distribusi informasi dan protokol yang dihasilkan	6	6	7	7	13
Skor Kualitas layanan <i>e-procurement</i>	86,61	83,28	83,13	83,87	87,46
Persentase sanggahan lelang	1,88%	1,73%	1,62	2,33%	4,70%

Sumber: LKJiP Kabupaten Boyolali, 2020

Beberapa hal yang mendukung capaian kinerja maupun persoalan terkait perumusan dan sinkronisasi kebijakan, yaitu:

- Kebijakan administrasi kewilayahan berupa proses pemekaran kecamatan yang telah tuntas. Keberhasilan kebijakan ini dibangun oleh dukungan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat desa dan kelurahan di kecamatan yang dimekarkan.
- Kebijakan teknis kelembagaan terkait penataan perangkat daerah dan memperjelas uraian kerja setiap jabatan di dalam Perangkat Daerah.
- Capaian perumusan produk hukum daerah dibentuk dari pengawalan produk hukum yang diajukan oleh perangkat daerah maupun insiatif DPRD. Namun kendala yang masih dihadapi adalah komunikasi dan koordinasi antara tim perumus produk hukum tersebut, terutama antar tim Perangkat Daerah.
- Capaian rumusan kebijakan teknis di berbagai bidang ditunjang oleh fasilitasi dan koordinasi antara pengampu urusan dengan struktur Bagian Sekretariat Daerah yang terkait.
- Indikator terkait fasilitasi kerjasama dicapai melalui peran Perangkat Daerah untuk mengawal proses kerjasama mulai dari pembahasan nota kesepakatan dan kerjasama baik dengan antar daerah, pihak ketiga dan instansi vertikal.
- Terkait kinerja pemberitaan dan layanan protokol merupakan kerjasama antara Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, namun masih terdapat persoalan terkait peralatan media liputan yang kurang dan masih perlunya media yang lebih luas untuk distribusi informasi publik.
- Upaya mencapai layanan *e-procurement* yang berkualitas ditunjang oleh penerapan standar pelayanan. Meskipun demikian, masih

terdapat hambatan berupa standar pelayanan yang belum sederhana, jumlah petugas layanan terbatas, kuesioner yang diedarkan ke satuan kerja tidak diisi dengan benar, kompetensi petugas pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa.

Sedangkan terkait sanggahan lelang yang persentasenya justru semakin naik, disebabkan oleh beberapa hal, yaitu jumlah aparatur pemerintah yang bersertifikat pengadaan barang/jasa belum memenuhi standar Korsupgah KPK, belum seluruh PPK dan pejabat pengadaan yang memahami *e-procurement* dan manajemen kontrak, masih terdapat ketidaksesuaian antara KAK yang diajukan Perangkat Daerah dengan pekerjaan, serta penyedia barang/jasa masih ada yang tidak memahami ketentuan dan persyaratan pelelangan, sehingga penawaran banyak yang gugur.

2.3.3.8. Kewilayahan

Unsur kewilayahan dijalankan oleh kecamatan yang memiliki tugas berupa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Salah satu kinerja *outcome* kecamatan direpresentasikan oleh capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM mengukur kualitas pelayanan publik atau penerapan standar pelayanan publik. IKM sekaligus representasi akuntabilitas sosial instansi pemerintah kepada masyarakat. Seluruh kecamatan di Boyolali telah mengukur IKM, termasuk tiga kecamatan hasil pemekaran, yaitu Tamansari, Gladagsari dan Wonosamodro. Capaian tahun 2020, kecamatan yang memiliki IKM paling tinggi adalah Ampel dengan skor 91,02, sedangkan kecamatan yang memiliki skor paling rendah adalah Wonosegoro, yaitu 80,36. Adapun capaian secara umum setiap kecamatan mengalami peningkatan skor IKM. Hal ini diharapkan menjadi representasi nyata dari perbaikan kualitas pelayanan publik yang dijalankan oleh kecamatan.

Tabel 2. 96. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan se-Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Boyolali	79,21	82,64	83,24	84,84	85,00
2	Musuk	81,26	81,26	81,26	81,67	-

No	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				
		2016	2017	2018	2019	2020
3	Mojosongo	-	81,40	82,03	84,65	-
4	Teras	-	77,11	81,59	81,59	82,94
5	Banyudono	79,31	80,42	81,24	83,88	-
6	Sawit	-	80,80	84,45	86,33	-
7	Sambi	-	82,53	82,94	84,86	83,22
8	Ngemplak	81,25	81,25	82,09	83,13	82,77
9	Simo	-	95,27	77,18	83,88	-
10	Nogosari	-	-	-	88,91	88,27
11	Klego	79,83	84,83	84,23	84,29	84,32
12	Andong	79,82	80,86	81,00	81,08	-
13	Wonosegoro	78,62	79,31	79,31	79,04	80,36
14	Karanggede	79,19	79,15	79,95	83,16	-
15	Kemususu	81,37	82,40	82,43	82,53	82,64
16	Juwangi	-		85,63	85,02	-
17	Ampel	80,51	78,56	86,33	90,01	91,02
18	Cepogo	98,03	98,03	102,4	84,65	82,78
19	Selo	77,34	85,57	77,34	81,77	82,55
20	Tamansari	-	-	-	80,25	-
21	Gladagsari	-	-	-	81,84	-
22	Wonosamodro	-	-	-	82,55	-

Sumber: IKM Kecamatan se-Kabupaten Boyolali 2015-2020

Capaian IKM tersebut ditunjang oleh pelimpahan kewenangan kepada kecamatan dari kabupaten, maupun penerapan inovasi pelayanan. Pelimpahan kewenangan pelayanan publik baik terkait perizinan maupun non-perizinan, misalnya perizinan UMKM/*home industry* serta pelayanan rekam dan cetak KTP. Adanya pelimpahan kewenangan tetap disertai evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dari Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah. Adapun inovasi pelayanan yang dijalankan di kecamatan berbasis aplikasi adalah Sistem Informasi Kecamatan Terpadu (Simantap). Inovasi ini bagian dari pelimpahan kewenangan perizinan di kecamatan dan terintegrasi dengan DPMPSTP.

Fungsi lain yang dijalankan oleh kecamatan adalah pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pembangunan desa. Fungsi pemberdayaan dijalankan melalui penyelenggaraan pelatihan kepada lembaga desa, misalnya PKK, Linmas, dan Karang Taruna. Sedangkan dalam rangka mendorong pembangunan desa, Kecamatan menjalankan fungsi asistensi ke desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran desa, sekaligus melaksanakan evaluasi atas RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa. Kendala yang masih dihadapi dalam proses pembangunan desa adalah belum optimalnya ketersediaan *database* desa di kecamatan yang mutakhir.

2.3.3.9. Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Beberapa capaian kinerja di Kabupaten Boyolali, antara lain berupa cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani, yang memiliki kinerja pada 2020 belum memenuhi target RPJMD, yakni 85,71% dengan target 100%. Hal ini membutuhkan adanya deteksi dini dan penanganan yang semakin intensif melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kinerja yang belum optimal tersebut juga dibentuk dari kinerja program pengembangan wawasan kebangsaan, antara lain berupa fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap kecamatan yang hanya tercapai 83,16%, fasilitasi wawasan kebangsaan di level SMA yang hanya tercapai 88,37%, dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang tercapai 61,06% dari target. Sedangkan dalam konteks pembangunan partisipasi politik dalam pemilihan umum, capaian Kabupaten Boyolali memenuhi 100% dari target, yakni dengan target partisipasi pemilih 82% (Laporan Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020).

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing merupakan aspek penting untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Aspek daya saing dapat dilihat dari fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim, dan fokus sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

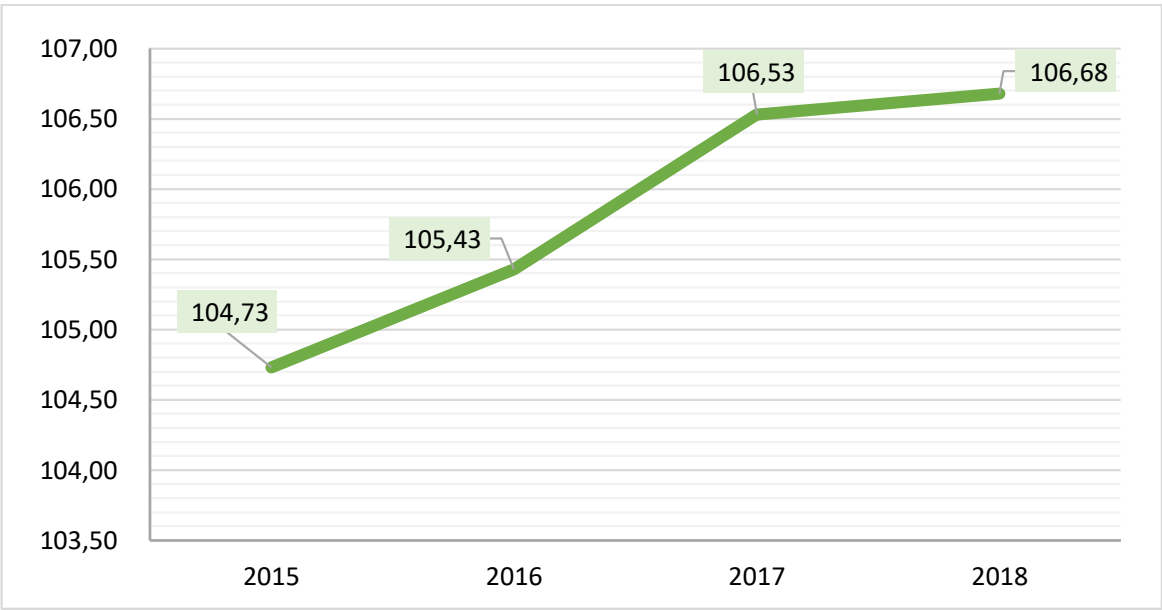
Analisis terkait fokus kemampuan ekonomi daerah dilakukan dengan melihat beberapa indikator yaitu Nilai Tukar Petani (NTP) dan pengeluaran

rata-rata per kapita. Berikut ini merupakan deskripsi mengenai indikator-indikator tersebut.

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator *proxy* kesejahteraan petani yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP dapat dijadikan salah satu indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani.

**Grafik 2. 82. Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Boyolali
Tahun 2015 – 2018**



Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, 2020.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Boyolali sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,48. Angka NTP Kabupaten Boyolali sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 selalu menunjukkan angka di atas 100 yang artinya secara relatif menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Boyolali memiliki tingkat kemampuan atau daya beli petani yang tinggi.

2.4.1.2. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata perkapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyak anggota rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran kebutuhan rumah tangga bukan kebutuhan usaha. Angka konsumsi pengeluaran rata-rata perkapita diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga terhadap jumlah penduduk.

Tabel 2. 97. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
Padi-padian	52.582	45.307	52.671	46.902	49.065
Umbi-umbian	2.065	2.505	2.545	2.327	3.380
Ikan	11.088	13.132	13.974	14.470	14.339
Daging	14.210	16.160	17.349	16.270	14.831
Telur dan susu	23.573	23.869	26.262	30.452	34.449
Sayur-sayuran	23.681	35.670	32.767	29.239	36.614
Kacang-kacangan	14.666	12.721	13.198	13.468	12.982
Buah-buahan	17.622	15.724	22.023	19.927	20.913
Minyak dan lemak	14.072	12.960	12.899	11.912	12.858
Bahan minuman	16.256	17.098	18.238	17.672	19.742
Bumbu-bumbuan	8.153	8.124	9.711	9.145	10.757
Konsumsi lainnya	8.666	9.287	8.928	8.406	8.491
Makanan dan minuman jadi	91.607	115.540	135.232	157.575	156.943
Tembakau dan sirih	39.281	50.111	44.801	53.487	61.677
Total	337.522	378.209	410.598	431.251	457.040

Sumber: Boyolali Dalam Angka 2016-2020

Pengeluaran untuk konsumsi dihitung selama seminggu terakhir. Angka pengeluaran perkapita makanan di Kabupaten Boyolali mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pengeluaran perkapita tahun 2016 sebesar Rp337.522,00 dan naik menjadi Rp457.040,00 pada tahun 2020. Kenaikan tersebut cenderung tidak terlalu tinggi karena selama 5 tahun hanya mengalami kenaikan sebesar Rp119.518,00. Pengeluaran terbesar pada konsumsi makanan dan minuman jadi, sedangkan paling rendah konsumsi umbi-umbian.

Tabel 2. 98. Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengeluaran rumah tangga perumahan dan fasilitas rumah tangga	167.723	161.446	207.779	195.551	229.712
Aneka barang dan jasa	96.064	92.869	126.098	123.527	141.191
Pakaian, alas kaki dan	22.506	21.408	26.725	26.522	27.577

Kelompok Makanan	2016	2017	2018	2019	2020
tutup kepala					
Barang yang tahan lama	81.649	41.046	84.406	66.456	65.353
Pajak pemakaian dan premi asuransi	14.936	26.546	29.524	30.284	37.655
Keperluan pesta dan upacara	13.015	31.075	33.072	18.512	22.094
Total	395.893	374.390	507.604	460.811	523.581

Sumber: Boyolali Dalam Angka 2016-2020

Pengeluaran bukan konsumsi dihitung sebulan dan setahun terakhir. Pengeluaran perkapita non makanan selama periode tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Pengeluaran terendah pada tahun 2017 sebesar Rp374.390,00 dan tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp523.604,58100. Pengeluaran terbesar pada pengeluaran rumah tangga dan fasilitas rumah tangga. Sedangkan pengeluaran terendah pada keperluan pesta dan upacara.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek daya saing daerah pada fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur diarahkan untuk meninjau indikator-indikator yang menunjukkan kondisi fasilitas maupun infrastruktur yang tersedia di sebuah daerah. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur daerah sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran mobilitas orang serta barang dan jasa guna mendorong kegiatan perekonomian.

2.4.2.1. Perhubungan

Keberhasilan pembangunan pada urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu linttas dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti kurangnya perlengkapan dan keamanan jalan, kepatuhan pengemudi/*human error*, dan kondisi kendaraan yang digunakan. Kejadian kecelakaan yang fatal bahkan dapat mengakibatkan kematian. Oleh karena itu penting untuk melihat data mengenai angka kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2. 99. Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kecelakaan lalu lintas	636	508	856	896	648

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah korban kecelakaan lalu lintas	752	772	858	993	761
	- Meninggal Dunia	16	36	51	36	38
	- Luka Berat	43	16	11	10	1
	- Luka ringan	693	720	796	947	722

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Boyolali, 2021

Pada tahun 2016 hingga 2020 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan setiap tahun, dengan jumlah tertinggi mencapai 1.065 kejadian pada tahun 2018. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 16% pada tahun 2019. Meskipun demikian, jumlah korban kecelakaan lalu lintas terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 13% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat keparahan kecelakaan semakin meningkat.

Data lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi perhubungan di suatu daerah adalah rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Berikut ini merupakan data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 2. 100. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0.0023	0.0021	0.0019	0.0018	0.0018

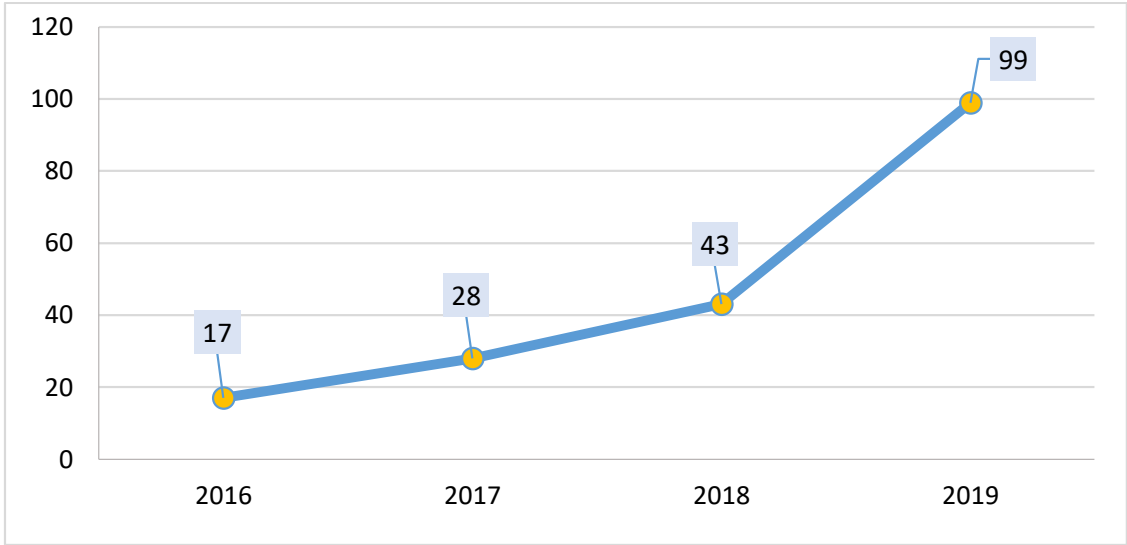
Sumber: Pengukuran Kinerja Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Boyolali memiliki tren yang semakin menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju penambahan jumlah kendaraan yang ada tidak sebanding dengan laju ketersediaan panjang jalan.

2.4.2.2. Sarana Perekonomian

Infrastruktur kewilayahan lain yang menjadi fokus pembangunan adalah terkait sarana perekonomian. Infrastruktur penunjang perekonomian perlu menjadi perhatian guna dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Boyolali. Beberapa sarana perekonomian yang dapat mendukung pariwisata di Kabupaten Boyolali adalah hotel dan restoran. Berikut adalah jumlah hotel dan restoran yang ada di Kabupaten Boyolali.

Grafik 2. 83. Jumlah Restoran di Kabupaten Boyolali



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun 2020

Jumlah restoran di Kabupaten Boyolali terus meningkat sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Penambahan yang signifikan terjadi pada tahun 2019 yaitu bertambah 56 restoran. Restoran yang ada di Kabupaten Boyolali tersebar di berbagai kecamatan, terutama yang berada di wilayah pusat perkotaan seperti Kecamatan Boyolali dan Mojosongo. Jumlah restoran yang berada di Kecamatan Boyolali adalah 33 restoran dan di Kecamatan Mojosongo terdapat 20 restoran.

Tabel 2. 101. Jumlah Hotel dan Homestay di Kabupaten Boyolali

Jumlah Hotel dan Homestay di Kabupaten Boyolali	2018		2019	
	Hotel	Homestay	Hotel	Homestay
	20	104	21	104

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali Tahun, 2020

Seiring dengan bertumbuhnya jumlah restoran di Kabupaten Boyolali, fasilitas penginapan di Kabupaten Boyolali juga turut meningkat. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan penambahan jumlah hotel yang ada di Kecamatan Banyudono, sehingga jumlah hotel yang ada di Kabupaten Boyolali pada tahun 2019 adalah 21 hotel. Peningkatan jumlah sarana perekonomian tersebut sangat berdampak positif terhadap upaya peningkatan pariwisata di Kabupaten Boyolali.

2.4.2.3. Jaringan Listrik

Fokus pengembangan infrastruktur kewilayahan yang lain adalah terkait jaringan kelistrikan. Kebijakan tersebut diupayakan agar setiap desa memiliki sumber kelistrikan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan yang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa desa yang masih belum teraliri listrik seperti

desa yang berada di bawah lereng gunung. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan listrik di desa-desa adalah terkait lokasi geografis beberapa distrik yang sulit dijangkau atau terhalang kawasan hutan lindung. Upaya lain yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan salah satu fokus pembangunan Kabupaten Boyolali. Sinkronisasi peraturan baik pusat maupun daerah terkait investasi, perbaikan pelayanan, dan penyederhanaan birokrasi masih perlu untuk terus ditingkatkan guna mewujudkan iklim investasi yang semakin kondusif. Beberapa indikator yang dicermati dalam bagian ini antara lain:

Tabel 2. 102. Kondisi-kondisi Iklim Investasi di Kabupaten Boyolali

No	Jenis Data	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kriminalitas*	351	184	150	180	370
2	Jumlah Demonstrasi*					1
3	Lama Proses Perizinan (per jenis izin)	8	7	7	7	7
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	0	0	0	0	1
5	Jumlah Produk Hukum yang mendukung investasi	1	0	1	1	1

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu *Polres Kabupaten Boyolali

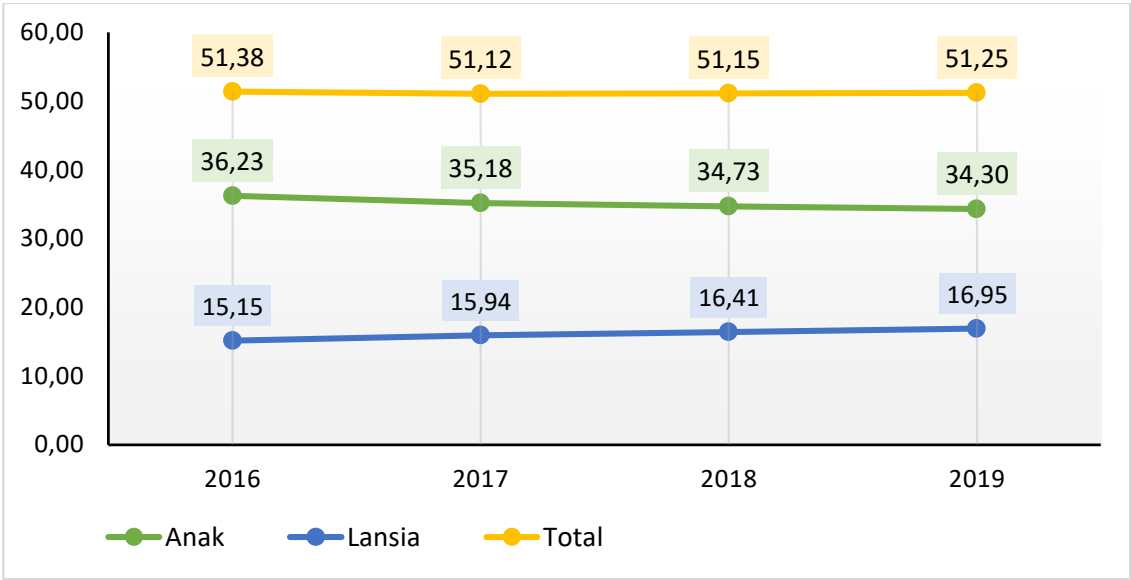
Pada tahun 2015 – 2019, angka kriminalitas di Kabupaten Boyolali mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2019, yaitu 370 kasus. Lama proses perizinan juga semakin menunjukkan perbaikan, dari 8 hari di tahun 2015 menjadi 7 hari sejak tahun 2016. Di samping itu, Kabupaten Boyolali juga sudah memiliki produk hukum yang mendukung iklim investasi.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek saing daerah pada fokus sumber daya manusia dapat dilihat melalui indikator rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk bukan angkatan kerja (kelompok usia 0-14 tahun dan kelompok usia lebih dari 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja (usia 15-64). Semakin tinggi angka Rasio

Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sementara itu, semakin rendah Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut ini merupakan rasio ketergantungan di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 -2019.

Grafik 2. 84. Rasio Ketergantungan Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2019 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020, diolah

Rasio ketergantungan pada tahun 2016 hingga 2019 mencapai 51%. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 51 orang. Beban ketergantungan didominasi oleh anak-anak yaitu usia 0-14 tahun. Pada tahun 2019, rasio ketergantungan anak-anak mencapai 34,30%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 36,23%. Sementara itu, rasio ketergantungan lansia mencapai 16,95%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 15,15%.

2.4.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka

penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM.

Pemerintah Kabupaten Boyolali berusaha untuk melaksanakan kebijakan mengenai pelayanan publik yang prima melalui penyusunan, penetapan dan penerapan SPM secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Penerapan SPM di Kabupaten Boyolali pada Tahun 2020 diuraikan lebih rinci pada bagian berikut ini.

Tabel 2. 103. Realisasi Capaian SPM Kabupaten Boyolali Tahun 2020

No	Urusan/Bidang	Indikator SPM	Capaian
1	Pendidikan	Jumlah anak usia dini yang sudah tamat atau sedang belajar paud	92.7%
		Anak usia 7 - 12 tahun sudah atau sedang belajar	94.7%
		Anak usia 12 - 15 tahun sudah atau sedang belajar	83.3%
		Anak usia 7 - 18 yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan	10.4 %
2	Kesehatan	Jumlah ibu hamil di suatu kabupaten/kota yang mendapat pelayanan	93.2%
		Jumlah ibu bersalin mendapat pelayanan di wilayah kerja kabupaten / kota bersangkutan	99.7%
		Jumlah bayi baru lahir mendapat pelayanan	98.7%
		Jumlah balita usia 12 -59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	88.6%

No	Urusan/Bidang	Indikator SPM	Capaian
		Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	84.9%
		Jumlah orang usia 15 - 59 tahun di kabupaten / kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatah sesuai standart	59.8%
		Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas mendapat pelayanan	98.8%
		Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan	63.2%
		Jumlah ODGJ mendapat pelayanan	50.9%
		Jumlah orang terduga TBC mendapat pelayanan	35.6%
		Jumlah orang resiko HIV yang mendapat prlayanan	57.2%
		Pelayanan kesehatan terhadap orang penderita diabetes melitus	98.6%
3	Pekerjaan Umum	Jumlah kumutalif masyarakat / rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah kab. / kota	90.5%
		Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di PLT , dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	96.2%
4	Perumahan rakyat	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100.0%
		Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan / bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah Tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100.0%
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum ,dan Perlindungan masyarakat	Jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum akibat pelanggaran perda kabupaten/kota dan perda serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik	100.0%
		Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana daerah kabupaten kota	100.0%

No	Urusan/Bidang	Indikator SPM	Capaian
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tingkat kabupaten/kota	100.0%
		Jumlah Warga negara yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana tingkat kabupaten/kota	90.2%
		Jumlah warga negara yang mendapat pelayanan pemadaman ,penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kabupaten/kota	127.9%
6	Sosial	jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100.0%
		Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100.0%
	Sosial	Jumlah lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100.0%
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100.0%
		Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100.0%

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, 2020, diolah

Capaian SPM Kabupaten Boyolali tahun 2020 relatif cukup baik. Capaian SPM paling baik yakni pada urusan Sosial yakni semua sudah 100%. Rata-rata tingkat capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum ,dan Perlindungan masyarakat sudah diatas 90%. Sedangkan urusan Pendidikan dan Kesehatan masih perlu peningkatan karena beberapa aspek tingkat capaiannya dibawah 50%. Tingkat capaian yang masih mendapat catatan yakni tingkat partisipasi anak usia 7-18 yang sedang belajar pada pendidikan kesetaraan masih 10,4%, jumlah ODGJ mendapat pelayanan 50,9% dan jumlah orang terduga TBC mendapat pelayanan 35,6%.

2.5. Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021

Tabel 2. 104. Hasil Evaluasi Capaian RPJMD 2016 – 2021

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan						
	Program Pendidikan Anak Usia Dini						
1	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD usia 3-6 tahun	69,80%	82%	80,29%	97,91%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun						
2	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/SDLB/Paket A	99,35%	102,50%	100,02%	97,58%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
3	Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/SMPLB/Paket B	94,20%	100,20%	98,62%	98,42%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/Paket A	86,01%	87,50%	87,71%	100,24%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
5	Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB/Paket B	69,95%	75,50%	78,5%	103,97%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
6	Persentase peserta didik SD/SDLB putus sekolah	0,05%	0,03%	0,03%	100,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
7	Persentase peserta didik SMP/ SMPLB putus sekolah	0,21%	0,15%	0,1%	133,33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
8	Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan yang ke jenjang SMP	98,40%	99,50%	99,55%	100,05%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Persentase RK SD dalam kondisi baik	94,06%	95%	98,86%	104,06%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
10	Persentase RK SMP dalam kondisi baik	96,60%	98,70%	97,9%	99,19%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan							
11	Persentase guru SD bersertifikat pendidik	50,58%	62,50%	53,92%	86,27%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
12	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	53,92%	75%	72,8%	97,07%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
13	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SD	12,23%	20%	13,77%	68,85%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
14	Rasio Guru terhadap Jumlah Siswa SMP	13,71%	20%	17,58%	87,90%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Pendidikan Non Formal							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,34%	0,15%	0,32%	-13,33%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
16	Presentase SD berakreditasi minimal B	87%	95%	98,63%	103,82%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
17	Presentase SMP berakreditasi minimal B	78,26%	85%	92,85%	109,24%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Kesehatan							
Program Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga							
18	Cakupan kunjungan bayi	0%	95%	113,9%	119,89%	DINAS KESEHATAN	
19	Cakupan pelayanan anak balita	0%	95%	74,9%	78,84%	DINAS KESEHATAN	
20	Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan	0%	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lansia						
21	Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	0%	90%	95,38%	105,98%	DINAS KESEHATAN	
	Program Pembiayaan kesehatan masyarakat						
22	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi masyarakat/penduduk miskin	36,90%	40%	44,55%	111,38%	DINAS KESEHATAN	
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						
23	Prosentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	0%	90%	93%	103,33%	DINAS KESEHATAN	
24	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Kefarmasian	0%	45%	46%	102,22%	DINAS KESEHATAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan						
25	Proporsi Pembinaan dan Pengawasan Produksi, Makanan, dan Minuman	0%	45%	54%	120,00%	DINAS KESEHATAN	
	Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit						
26	Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR)	50.4 per 100,000	47.5 per 100,000	11 per 100,000	176,84%	DINAS KESEHATAN	
27	Angka kematian DBD (CFR)	1.9 % dari jumlah penderita	1.6 % dari jumlah penderita	1,73 % dari jumlah penderita	91,88%	DINAS KESEHATAN	
28	Prosentase orang dilakukan test HIV dan menerima hasil dari kelompok resiko	0%	50%	59,79%	119,58%	DINAS KESEHATAN	
29	Angka keberhasilan pengobatan TB yang	58,67%	85%	86%	101,18%	DINAS KESEHATAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	terkonfirmasi						
30	Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	0%	50%	54%	108,00%	DINAS KESEHATAN	
31	Cakupan Desa UCI	100%	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan						
32	Puskesmas terakreditasi	0 Pusk	10 Pusk	29 Pusk	290,00%	DINAS KESEHATAN	
33	Cakupan rawat jalan (pusk)	18%	15%	18 %	120,00%	DINAS KESEHATAN	
34	Cakupan Rawat inap (pusk)	1,60%	1,50%	0,56%	37,33%	DINAS KESEHATAN	
35	Cakupan respon aduan kegawatdaruratan kesehatan yang ditangani	0%	90%	100%	111,11%	DINAS KESEHATAN	
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Cakupan SPM di Puskesmas (upaya kesehatan masyarakat)	0%	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD							
37	Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya kesehatan perorangan)	0%	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN	
38	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	69%	84,21%	44,96%	53,39%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
39	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	3,64 Hari	6 Hari	2,98 Hari	150,33%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
40	<i>Turn Over Internal</i> (TOI)	1.64 Hari	2 Hari	4,39 Hari	219,50%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
41	<i>Bed Turn Over</i> (BTO)	66.89 Pasien (kali)	59.81 Pasien (kali)	17,86 Pasien (kali)	29,86%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
42	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	1,44%	1,10%	2,71%	-46,36%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
43	<i>Gross Death Rate</i> (GDR)	2,47%	2,01%	4,02%	0,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
44	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	59%	75%	48%	64,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
45	Lama tinggal (<i>Length of Stay/ LOS</i>)	4.6 Hari	6 Hari	3,4 Hari	56,67%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
46	<i>Turn Over Internal (TOI)</i>	3.2 Hari	2 Hari	7 Hari	350,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
47	<i>Bed Turn Over (BTO)</i>	46 (kali)	48 (kali)	10 (kali)	20,83%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
48	Angka kematian murni (<i>Net Death Rate/ NDR</i>)	1,10%	0,50%	0,56 %	88,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
49	<i>Gross Death Rate (GDR)</i>	2,60%	1%	2,1 %	-10,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
50	Tingkat hunian (<i>Bed Occupancy Rate/ BOR</i>)	69,25%	73,15%	46 %	62,88%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
51	Lama tinggal (<i>Length of</i>	4.87 Hari	4.51 Hari	2 Hari	155,65%	RUMAH SAKIT	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stay/ LOS)					UMUM DAERAH SIMO	
52	Turn Over Internal (TOI)	2.68 Hari	1.92 Hari	3 Hari	156,25%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
53	Bed Turn Over (BTO)	36.92 Pasien(kali)	46.1 Pasien(kali)	51 Pasien(kali)	110,63%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
54	Angka kematian murni (Net Death Rate/ NDR)	0,24%	0,21%	0,45%	-14,29%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
55	Gross Death Rate (GDR)	0,83%	0,73%	1%	63,01%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Permenkes	0%	20,69%	20%	96,67%	DINAS KESEHATAN	
Program Pengembangan sumber daya kesehatan							
57	Dokter dan tenaga kesehatan dikirim pelatihan	10 Orang	50 Orang	15 Orang	30,00%	DINAS KESEHATAN	
58	Rasio dokter	15,10%	17%	29,7%	174,71%	DINAS KESEHATAN	
59	Rasio dokter gigi	3,90%	5,90%	5,1%	86,44%	DINAS KESEHATAN	
60	Rasio perawat	87,50%	100,30%	108,6%	108,28%	DINAS KESEHATAN	
61	Rasio bidan	56,50%	58,40%	61,1%	104,62%	DINAS KESEHATAN	
Program Manajemen informasi dan regulasi kesehatan							
62	Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	0%	100%	100%	100,00%	DINAS KESEHATAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat						
63	Desa /Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	42 Desa	120 Desa	111 Desa	92,50%	DINAS KESEHATAN	
64	Proporsi Rumah Tangga Sehat	69%	75%	87,85%	117,13%	DINAS KESEHATAN	
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						
65	Desa STBM	0 Desa	267 Desa	159 Desa	59,55%	DINAS KESEHATAN	
	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;						
66	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	0%	95%	71,3%	75,05%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
67	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	45%	100%	100%	100,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Pemenuhan standart sarana dan prasarana rumah sakit	54%	80%	75%	93,75%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan						
69	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	0%	95%	50,3%	52,95%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	
70	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	40%	100%	90%	90,00%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	
71	Pemenuhan standart pelayanan kesehatan rumah sakit	50%	85%	77%	90,59%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	
	Pekerjaan umum dan penataan ruang						
	Program Pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
72	Gabungan Petani Pemakai Air (GP3A) yang melaksanakan pengelolaan irigasi secara partisipatif	5 Kelompok	16 Kelompok	15 Kelompok	93,75%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pembangunan jalan dan jembatan							
73	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	391.7993 Km	417.284045670764 Km	390 Km	93,46%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
74	Terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kab boyolali dengan pembangunan jalan baru (km)	3944.9 Km	7125 Km	11858 Km	166,43%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pembangunan turap/talud/bronjong							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Panjang talud tebing sungai yang dibangun	0 Km	7031.82970838571 Km	1840,87 Km	26,18%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
76	Panjang Talud jalan yang dibangun	1448.6316090566 Km	5834.625436365 Km	5078,25 Km	87,04%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan							
77	Panjang Jaringan Jalan yang dipertahankan dalam kondisi baik	11.9593732333873 Km	131.2019920944 Km	187,2 Km	142,68%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong							
78	Panjang drainase dibangun sebagai bangunan pelengkap jalan	2976 Km	8240 Km	2000 Km	24,27%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya						
79	Luas sawah yang dapat dialiri air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	8348.09 Ha	8737.67015 Ha	9276 Ha	106,16%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Program Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya						
80	Tersedianya air baku Melalui pembangunan embung	2 Unit	49 Unit	44 Unit	89,80%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
81	Bertambahnya sanitasi berupa IPAL	7 Unit	34 Unit	26 Unit	76,47%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Tersedianya data potensi air bawah tanah(data potensi air tanah/Sumur Uji)	1 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
83	Sambungan Rumah terbangun untuk mendapatkan akses air minum yang aman/Cakupan rumah tangga pengguna air bersih	300 Unit	425 Unit	400 Unit	94,12%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pengawasan jasa konstruksi							
84	SIUJK yang diterbitkan	92 Lembar	245 Lembar	234 Lembar	95,51%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Perencanaan Tata Ruang							
85	Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang	0 Dokumen	11 Dokumen	14 Dokumen	127,27%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	(RDTR)					PENATAAN RUANG	
86	Tersusunnya peta dasar RDTR	0 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	150,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
87	Pelayanan Legalisasi rekomteks IMB	554 Rekomendasi	1440 Rekomendasi	1380 Rekomendasi	95,83%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
88	Pelayanan Legalisasi site plan	0 Dokumen	288 Dokumen	184 Dokumen	63,89%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pembangunan infrastruktur perdesaan							
89	Desa/kelurahan Terbangun infrastrukturnya	0 Desa	100 Desa	474 Desa	474,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan pengelolaan penerangan jalan umum						
90	Penambahan titik lampu	11933 Unit	10240 Unit	4933 Unit	48,17%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Perumahan dan kawasan pemukiman						
	Program Pengembangan Perumahan						
91	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	472 Unit	1875 Unit	2867 Unit	152,91%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
92	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi Gakin	1000 Unit	6000 Unit	4720 Unit	78,67%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
93	Terwujudnya pembangunan rumah tidak layak huni	190 Unit	60 Unit	2959 Unit	4.931,67%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
94	Terwujudnya bantuan stimulan rumah tidak layak	0 Unit	2670 Unit	2009 Unit	75,24%	DINAS PEMBERDAYAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	huni bagi Gakin					MASYARAKAT DAN DESA	
	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat						
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan						
95	Kegiatan penyiapan tenaga, pengendalian kebisingan dan pengendalian keamanan lingkungan	3 Kegiatan	18 Kegiatan	22 Kegiatan	122,22%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
96	Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	0%	100%	85,71%	85,71%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
97	Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	0 Kegiatan	95 Kegiatan	76 Kegiatan	80,00%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
98	Kegiatan untuk operasi penyakit masyarakat	20 Kegiatan	90 Kegiatan	90 Kegiatan	100,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
99	Cakupan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	0,32%	2,21%	1,89%	85,52%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Program peningkatan penanggulangan bahaya kebakaran							
100	Ketersediaan Kebijakan	2 Buah	27 Buah	23 Buah	85,19%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
101	Ketersediaan Lembaga	2 Buah	25 Buah	29 Buah	116,00%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
102	Tingkat waktu tanggap rata-rata se-Kabupaten	55 menit	225 menit	170 menit	75,56%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pendidikan Politik Masyarakat						
103	Prosentase LSM yang mempunyai SKT (Surat Keterangan Terdaftar)	0%	100%	98,78%	98,78%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
104	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	0%	82%	82%	100,00%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
105	Cakupan sosialisasi/fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	0%	100%	88,37%	88,37%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
106	Fasilitasi pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan di setiap Kecamatan	0 Kegiatan	190 Kegiatan	158 Kegiatan	83,16%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
107	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan	3 Keg	113 Keg	69 Keg	61,06%	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
108	Kegiatan event pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan.	20 Kegiatan	120 Kegiatan	100 Kegiatan	83,33%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
109	Cakupan penyelesaian konflik antar umat beragama	100%	100%	100%	100,00%	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Program Peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana							
110	Peningkatan Kebijakan dan Kelembagaan	19.09 Skor	27.45 Skor	79,56 Skor	289,80%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
111	Peningkatan Kajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	8.48 Skor	12.12 Skor	35,15 Skor	290,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Peningkatan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	27.57 Skor	39.57 Skor	114,72 Skor	289,89%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
113	Peningkatan Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	10.60 Skor	15.36 Skor	44,49 Skor	289,59%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
114	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	21.21 Skor	30.24 Skor	87,72 Skor	290,07%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
115	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	48.78 Skor	69.71 Skor	202,16 Skor	290,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
116	Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	8.48 Skor	12.12Skor	35,15 Skor	290,00%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	Sosial						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial						
117	Persentase fakir miskin yang diberdayakan	0%	35%	28,3 %	80,86%	DINAS SOSIAL	
	Program Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial						
118	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan sosial	0%	35%	90,54%	258,69%	DINAS SOSIAL	
	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma						
119	Prosentase Penyandang disabilitas yang mendapatkan pembinaan dan pelayanan sosial	8%	48%	42,89%	89,35%	DINAS SOSIAL	
	Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo						
120	Pelayanan dan pembinaan bagi panti asuhan	16 Rumah	16 Rumah	8 Rumah	50,00%	DINAS SOSIAL	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial						
121	Meningkatnya pemahaman PSKS dalam penanganan PMKS serta peran aktif dan kepedulian masyarakat dalam UKS	16 Desa	16 Desa	4 Desa	25,00%	DINAS SOSIAL	
	Program Pembinaan anak terlantar						
122	Prosentase anak terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	30%	30%	37%	123,33%	DINAS SOSIAL	
	Kebudayaan						
	Program Pengembangan Nilai Budaya						
123	Budaya tradisi lokal yang dilestarikan	7 Budaya	12 Budaya	8 Budaya	66,67%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
124	Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan.	90%	100%	94%	94,00%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Program Pengelolaan Keragaman Budaya							
125	Tempat penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya	7 Tempat	59 Tempat	51 Tempat	86,44%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
126	Pelaku seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	0 Group	240 Group	182 Group	75,83%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
127	Pelaksanaan Gelar Seni dan Budaya	43 Kali	339 Kali	235 Kali	69,32%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
128	Event seni dan budaya	4 Kali	24 Kali	21 Kali	87,50%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Pertanahan							
Program Penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Terlaksananya fasilitasi penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan							
130	Tersusunnya Sistem Informasi Pertanahan	1 Dokumen	5 Dokumen	8 Dokumen	160,00%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Pangan							
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan							
131	Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	16,85%	26,97%	25,09%	93,03%	DINAS KETAHANAN PANGAN	
132	Skor Pola Pangan Harapan	87.1 Skor	92 Skor	87 Skor	94,57%	DINAS KETAHANAN PANGAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lingkungan Hidup						
	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)						
133	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1190322 m2	1437322 m2	1464435 m2	101,89%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
134	% ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	2,65%	3,21%	3%	93,59%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan						
135	jumlah pelaku usaha/kegiatan yang memiliki rekomendasi UKL/UPL, kelayakan Amdal , dan atau izin lingkungan	0 pelaku usaha	233 pelaku usaha	579 pelaku usaha	248,50%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
136	Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau	100%	100%	100%	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	perusakan lingkungan ditindak lanjuti						
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH						
137	Data SDA dan LH	5 paket	6 paket	6 paket	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Program Peningkatan Pengendalian Polusi						
138	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	6 BOD mg/L (100%)	6 BOD mg/L (100%)	6 BOD mg/L (100%)	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
139	Hasil uji kualitas udara ambien (SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230)	632 ug/Nm3 (100%)	632 ug/Nm3 (100%)	632 ug/Nm3 (100%)	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
140	Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	271 Unit	225 Unit	150 Unit	66,67%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
141	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	0 COD mg/L (100%)	50 COD mg/L (100%)	50 COD mg/L (100%)	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
142	hasil perhitungan beban pencemaran yang meliputi parameter BOD, COD, TSS air sungai dan waduk	0 TSS mg/L (100%)	400 TSS mg/L (100%)	400 TSS mg/L (100%)	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
143	Hasil uji kualitas udara ambien (SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230)	15000 ug/Nm3	15000 ug/Nm3	1500 ug/Nm3	10,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
144	Hasil uji kualitas udara ambien (SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230)	316 ug/Nm3	316 ug/Nm3	316 ug/Nm3	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
145	Hasil uji kualitas udara ambien (SO2 632, CO 15000, NO2 316, TSP 230)	230 ug/Nm3	230 ug/Nm3	230 ug/Nm3	100,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA						
146	Peningkatan cadangan air tanah	5930 unit	9240 unit	6738 unit	72,92%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Program Pengembangan Kinerja pengelolaan Persampahan						
147	Cakupan wilayah yang melakukan pengelolaan sampah mandiri di lingkungan perkotaan	5 desa/kel	12 desa/kel	9 desa/kel	75,00%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
148	Persentasi Pengurangan persampahan	4,51%	19,73%	22,38%	113,43%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
149	Persentasi Pengangkutan Sampah	16%	69,30%	92,28%	133,16%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
150	Persentasi Pengelolaan TPA	15%	65,53%	60,165%	91,81%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
151	Cakupan penerbitan kartu keluarga	0%	100%	100%	100,00%	DISDUKCAPIL	
152	Cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran dari jumlah penduduk	0%	85%	66,4%	78,12%	DISDUKCAPIL	
153	Cakupan penerbitan kutipan akte kematian	0%	10%	100%	1000,00%	DISDUKCAPIL	
154	Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	0%	100%	95,45%	95,45%	DISDUKCAPIL	
155	cakupan penerbitan kutipan akte kelahiran penduduk usia 0-18th	0%	95%	84,97%	89,44%	DISDUKCAPIL	
156	cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	0%	100%	99,69%	99,69%	DISDUKCAPIL	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan						
157	Kemampuan kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K).	47 Desa	322 Desa	618 Desa	191,93%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
158	Pembangunan infrastruktur desa yang difasilitasi pelaksanaannya	37 Desa	36 Desa	27 Desa	75,00%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
159	Kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	40 Desa	317 Desa	398 Desa	125,55%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
160	Jumlah TTG/Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan	6 Inovasi	36 Inovasi	30 Desa	83,33%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	kesejahteraan masyarakat					DESA	
161	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olahraga.	19 Kec.	19 Kec.	22 Kec	115,79%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
162	Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.	19 Kec.	19 Kec.	22 Kec	115,79%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/kelurahan						
163	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	40 Orang	460 Orang	735 Orang	159,78%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
164	Meningkatnya kemampuan pengelola aset modal usaha untuk mendukung kebutuhan masyarakat	19 Kec. / desa	285 Kec. / desa	247 Kec. / desa	86,67%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
165	Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	102 kelompok	152 kelompok	139 kelompok	91,45%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
166	Cakupan pemberian stimulan pembangunan desa/kelurahan	25%	50%	64,8%	129,60%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan/kelurahan							
167	Pengurus PKK Desa/Kelurahan kemampuannya meningkat.	49 Desa	323 Desa	265 Desa	82,04%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
168	Terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi perempuan	0 kecamatan	19 kecamatan	22 kecamatan	115,79%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan							
169	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Bagi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera	10%	21%	21%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
170	Peningkatan Pemahaman tentang Kesetaraan gender dalam pembangunan.	10 Organisasi Wanita	87 Organisasi Wanita	45 Organisasi Wanita	51,72%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan							
171	Meningkatnya Pemahaman Kesetaraan Gender, Perempuan dan Anak	0 Kegiatan	4 Kegiatan	5 Kegiatan	125,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak						
172	Pemenuhan Hak Anak.	19 Desa	159 Desa	125 Desa	78,62%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
173	Meningkatnya penanganan kasus pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
174	Peningkatan Kapasitas Jaringan Kelembagaan Perempuan dan Anak.	5%	100%	100%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
175	Meningkatnya Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan.	20%	75%	65%	86,67%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.							
176	Meningkatnya Kualitas Tribina.	21%	21%	21%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri						
177	Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	3 Dokumen	18 Dokumen	15 Dokumen	83,33%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
178	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Program KB.	1 Kegiatan	6 Kegiatan	5 Kegiatan	83,33%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Keluarga Berencana						
179	Meningkatnya Pelayanan KB.	75%	80%	80%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PERLINDUNGAN ANAK	
180	Pelayanan KB (Peran PPKBD)	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Pelayanan Kontrasepsi						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
181	Capaian Peserta KB MKJP.	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program Kesehatan Reproduksi Remaja							
182	Cakupan Jumlah Kelompok KRR Yang Aktif	10,84%	100%	55%	55,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR						
183	Berkembangnya Kelompok PIK Remaja.	9 Kelompok	72 Kelompok	71 Kelompok	98,61%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AID's						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
184	Cakupan Pemahaman Perempuan dan Remaja tentang Narkoba dan HIV/AIDS.	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Program Peningkatan Informasi Kependudukan dan KB							
185	Terpenuhinya Dokumen rumusan kebijakan kependudukan	0 Dokumen	10 Dokumen	8 Dokumen	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						ANAK	
186	Meningkatnya Koordinasi dengan Perangkat Daerah	0 Kegiatan	10 Kegiatan	8 Kegiatan	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
187	Meningkatnya pengelolaan data dan informasi kependudukan dan KB	0 Dokumen	25 Dokumen	20 Dokumen	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
188	Meningkatnya Pemahaman terhadap Informasi Kependudukan dan KB	0 Kegiatan	5 Kegiatan	4 Kegiatan	80,00%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	Perhubungan						
	Program Peningkatan pelayanan angkutan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
189	Tersedianya sarpras pelayanan angkutan umum	22 Buah	132 Buah	108 Buah	81,82%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ						
190	Terpeliharanya sarpras dan fasilitas LLAJ	12 Buah	72 Buah	60 Buah	83,33%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan						
191	Tersusunnya Dokumen kajian perhubungan	0 Dokumen	13 Dokumen	12 Dokumen	92,31%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas						
192	Tersedianya sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	
	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor						
193	Tersedianya kelengkapan layanan uji kelayakan	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PERHUBUNGAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	kendaraan bermotor						
	Komunikasi dan Informatika						
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi						
194	Tersedianya kelompok informasi masyarakat yang aktif	47%	52%	51%	98,08%	DINAS KOMINFO	
	Program Kerjasama informasi dan media masa						
195	Terwujudnya penyebaran informasi pembangunan daerah	88%	93%	92%	98,92%	DINAS KOMINFO	
196	Rumusan kebijakan teknis kerjasama informasi dengan media massa	12 Dokumen	40 Dokumen	35 Dokumen	87,50%	DINAS KOMINFO	
	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
197	Tersedianya sarana telekomunikasi dan informasi yang mendukung pelayanan kepada masyarakat	38%	77%	71%	92,21%	DINAS KOMINFO	
198	Cakupan publikasi hasil-hasil pembangunan	100%	100%	100%	100,00%	DINAS KOMINFO	
Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi							
199	Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi dan protokol	5 Dokumen	43 Dokumen	34 Dokumen	79,07%	DINAS KOMINFO	
Statistik							
Program Pengembangan data/informasi/ statistik daerah							
200	Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 Dokumen	42 Dokumen	31 Dokumen	73,81%	DINAS KOMINFO	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Persandian						
	Program Penyelenggaraan persandian						
201	Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100%	100%	100%	100,00%	DINAS KOMINFO	
	Ketenagakerjaan						
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja						
202	Penempatan pencari kerja yang terdaftar (jiwa)	3863 Jiwa	16500 Jiwa	23114 Jiwa	140,08%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja						
203	Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya (jiwa)	240 Jiwa	1440 Jiwa	3126 Jiwa	217,08%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan						
204	Cakupan perusahaan yang membayar sesuai regulasi	100%	100%	94%	94,00%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Koperasi dan UKM						
	Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif						
205	UMKM yang melaksanakan pola kemitraan	1 UMKM	11 UMKM	19UMKM	172,73%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM						
206	SDM UMKM yang terlatih	30 UMKM	180 UMKM	390 UMKM	216,67%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi						
207	Koperasi yang di bina yang meningkat nilai kesehatannya	40 Koperasi	295 Koperasi	246 Koperasi	83,39%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM						
208	Koperasi dan UMKM yang mengakses kredit	20 Koperasi	175 Koperasi	599 Koperasi	342,29%	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	
	Penanaman Modal						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
209	Rata - rata lama pengurusan perizinan	8 hari	7 hari	7 hari	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	
210	Peningkatan jumlah tenaga kerja bagi perusahaan yang mempunyai izin	13840 TK	64684 TK	54199 TK	83,79%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi						
211	Peningkatan nilai investasi (Rp 000)	1.096.545.000	1.475.475.174.249	1.481.780.950	100,43%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	
212	Peningkatan jumlah investor	941 Investor	1043 Investor	4319 Investor	414,09%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						SATU PINTU (PTSP)	
213	Meningkatnya sarana dan prasarana promosi.	1 Paket	2 Paket	3 Paket	150,00%	BAGIAN PEREKONOMIAN	
	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah						
214	Penambahan jumlah produk hukum daerah yang pro investasi	1 dok	5 dok	5 dok	100,00%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	
	Kepemudaan dan Olah Raga						
	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan						
215	Pemuda mendapat penghargaan tingkat propinsi	6 orang	52 orang	58 orang	111,54%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda						
216	Jumlah Pemuda dalam Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	2 orang	32 orang	25 orang	78,13%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga						
217	Peringkat PORDA	11 peringkat	8 peringkat	0 peringkat	200,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
218	Bertambahnya Cabang Olahraga	0 Pengcab	6 Pengcab	6 Pengcab	100,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga						
219	Bertambahnya Lapangan Olahraga	1 Lapangan	18 Lapangan	11 Lapangan	61,11%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Perpustakaan						
	Program Pengembangan Budaya baca dan pembinaan Perpustakaan						
220	Peningkatan upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca	32756 orang	35000 orang	33950 orang	97,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Kearsipan						
	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan						
221	Tertibnya penyimpanan arsip dinamis in aktif dari satuan kerja	0%	25%	22%	88,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi						
222	Peningkatan pemahaman pengelolaan kearsipan bagi pejabat dilingkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100%	100%	100%	100,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasara kearsipan						
223	Termonitor dan terevaluasinya pengelolaan kearsipan dilinkungan Pemerintah Kab. Boyolali	100%	100%	85%	85,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah						
224	Tertibnya penyimpanan arsip in aktif dari satuan kerja	100%	100%	97%	97,00%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Administatif dan Pelayanan						
	Program Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan						
225	Terlaksananya pengisian perangkat desa/kelurahan	0 Kecamatan	19 Kecamatan	14 Kecamatan	73,68%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
226	Rumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan desa	27 Dokumen	405 Dokumen	351 Dokumen	86,67%	DINAS PEMBERDAYAAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						MASYARAKAT DAN DESA	
227	Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan desa/kelurahan.	0 Kecamatan	19 Kecamatan	22 Kecamatan	115,79%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Program Peningkatan Pelayanan Publik							
228	Pendampingan pelaksanaan PATEN di kecamatan sehingga fungsi layanan di kecamatan menjadi lebih baik	19 Kec	19 Kec	19 Kec	100,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
229	Nilai IKM Kabupaten Boyolali	78,77	80	81,86	110,80%	BAGIAN ORGANISASI	
230	Kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana serta kepegawaian	1 Dokumen	70 Dokumen	21 Dokumen	30,00%	BAGIAN ORGANISASI	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						
231	Terlaksananya Rakor Muspika/Perangkat Kelurahan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100,00%	BAGIAN OTONOMI DAERAH	
232	Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administrasi	51 Dokumen	371 Dokumen	181 Dokumen	48,79%	BAGIAN UMUM	
	Program Penataan Daerah Otonomi Baru						
233	tersusunnya kebijakan teknis di bidang administrasi kewilayahan	0	25	9	36,00%	BAGIAN OTONOMI DAERAH	
234	Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	0 Dokumen	58 Dokumen	77 Dokumen	132,76%	BAGIAN ORGANISASI	
	Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
235	Prosentase sanggahan lelang	6%	4%	0%	200,00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	
236	Kualitas layanan <i>e-procurement</i>	78,97%	81%	87,45%	107,96%	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	
	Program Peningkatan Ketatalaksanaan						
237	Rata-rata tingkat penerapan ketatalaksanaan Perangkat Daerah	0%	90%	85%	94,44%	BAGIAN ORGANISASI	
	Program Pengembangan Data/Informasi Jabatan						
238	Cakupan ketersediaan data/informasi jabatan	50%	100%	25%	25,00%	BAGIAN ORGANISASI	
	Program Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
239	Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	70 Skor	56 Skor	80,00%	BAGIAN ORGANISASI	
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
240	Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	68%	90%	23,48%	26,09%	BAGIAN HUKUM	
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah							
241	Cakupan kerjasama antar daerah yang difasilitasi sampai dengan rencana aksi	100%	90%	90%	100,00%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan Publik Kecamatan							
242	Terlaksananya fungsi layanan di Kecamatan	100%	100%	100%	100,00%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Kesekretariatan DPRD							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah						
243	Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	75%	100%	100%	100,00%	SEKRETARIAT DPRD	
	Pembinaan dan Pengawasan						
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH						
244	Menurunnya temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	0 Temuan/ Rekomendasi	25 Temuan/ Rekomendasi	25 Temuan/ Rekomendasi	100,00%	INSPEKTORAT	
	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan						
245	Prosentase tenaga pemeriksa dan aparat	0%	86%	90%	104,65%	INSPEKTORAT	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengawasan yang profesional						
	Administrasi Umum Pada Semua Perangkat Daerah						
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
246	Cakupan tingkat ketaatan aparatur terhadap peraturan kepegawaian	100%	100%	100%	100,00%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						
247	Terlaksananya fungsi layanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100,00%	PD Sekab Boyolali	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
248	Terlaksananya fungsi layanan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100,00%	PD Sekab Boyolali	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
249	Terwujudnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100,00%	PD Sekab Boyolali	
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan							
250	Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.	100%	100%	100%	100,00%	PD Sekab Boyolali	
Pariwisata							
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
251	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara.	430.760 Orang	452.731 Orang	60.937 Orang	13,46%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
252	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara.	2.007 Orang	2.117 Orang	0 Orang	0,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
253	Prosentase sarana dan prasarana pariwisata yang layak	0%	85%	75%	88,24%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
254	Potensi wisata yang akan dibangun menjadi obyek wisata	0 Obyek	2 Obyek	2 Obyek	100,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
255	Prosentase peningkatan jumlah pelaku usaha pariwisata	0%	19%	45,83%	241,21%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
256	Cakupan Sarana Promosi Pariwisata yang dikembangkan	100%	100%	100%	100,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
257	Kerjasama Promosi antar daerah	2 Forum	12 Forum	12 Forum	100,00%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
Program Pengembangan Kemitraan							
258	Desa Wisata	4 Desa	33 Desa	31 Desa	93,94%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
259	Kelompok Sadar Wisata	11 Kelompok	83 Kelompok	67 Kelompok	80,72%	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	
Pertanian							
Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
260	Produksi pangan utama (Ton) : Padi	279260 Ton	298751 Ton	283331 Ton	94,84%	DINAS PERTANIAN	
261	Produksi pangan lainnya (Ton) - Jagung	109430 Ton	138456 Ton	145200 Ton	104,87%	DINAS PERTANIAN	
262	Produksi pangan lainnya (Ton) - Kedelai	5062 Ton	6898 Ton	1663 Ton	24,11%	DINAS PERTANIAN	
263	Produksi tanaman hortikultura utama : - Pepaya	214217 Kuintal	126121 Kuintal	109058 Kuintal	86,47%	DINAS PERTANIAN	
264	Produksi tanaman hortikultura utama : - Cabe	103318 Kuintal	115611 Kuintal	63965 Kuintal	55,33%	DINAS PERTANIAN	
265	Produksi tanaman hortikultura utama : - Bawang Merah	104357 Kuintal	31530 Kuintal	150120 Kuintal	476,12%	DINAS PERTANIAN	
266	Produksi tanaman	10180 Kuintal	10773 Kuintal	29339 Kuintal	272,34%	DINAS PERTANIAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	hortikultura utama : - Jahe						
267	Produksi tanaman hortikultura utama : - Kencur	12140 Kuintal	17342 Kuintal	92462 Kuintal	533,17%	DINAS PERTANIAN	
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan						
268	Kelompok tani yang meningkat kelas kelembagaannya	0 Kelompok	600 Kelompok	506 Kelompok	84,33%	DINAS PERTANIAN	
269	Produksi tanaman perkebunan: - Cengkeh	413.35 Ton	382.88 Ton	696,48 Ton	181,91%	DINAS PERTANIAN	
270	Produksi tanaman perkebunan: - Kopi	240.85 Ton	153.15 Ton	431,69 Ton	281,87%	DINAS PERTANIAN	
271	Produksi tanaman perkebunan: - Kelapa	4366 Ton	5572.25 Ton	2855,15 Ton	51,24%	DINAS PERTANIAN	
272	Produksi tanaman perkebunan: - Tembakau	4101 Ton	5234.03 Ton	5703,98 Ton	108,98%	DINAS PERTANIAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
273	Produksi tanaman perkebunan: - Tebu	28410 Ton	36246.4 Ton	16755,13 Ton	46,23%	DINAS PERTANIAN	
274	Produksi tanaman perkebunan: - Lada	19.78 Ton	24.25 Ton	100,01 Ton	412,41%	DINAS PERTANIAN	
275	Produksi tanaman perkebunan: - Atsiri	13.47 Kw Minyak	59.99 Kw Minyak	120,07 Kw Minyak	200,15%	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan							
276	Balai Penyuluhan yang meningkat kelas kelembagaannya	0 Unit BP3K	21 Unit BP3K	18 Unit BP3K	85,71%	DINAS PERTANIAN	
277	Volume perdagangan produk usaha pertanian	0 Ton	83857.78 Ton	462734,38 Ton	551,81%	DINAS PERTANIAN	
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
278	Cakupan petani yang mendapat pelatihan, bantuan, registrasi kebun	0 Orang	1219 Orang	1123 Orang	92,12%	DINAS PERTANIAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan sertifikat mutu						
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan						
279	Meningkatnya produksi daging	8.209,23 Ton	8.460 Ton	14.081 Ton	166,44%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
280	Meningkatnya produksi susu (kilo liter)	45.540 Kilo Liter	48.201 Kilo Liter	49.988 Kilo Liter	103,71%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
	Program Peningkatan Produksi Peternakan						
281	Pertambahan populasi ternak sapi, kambing dan domba	0	320.731	360.626	112,44%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
282	Sapi potong	86.990 Ekor	90.000 Ekor	10.6765 Ekor	118,63%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
283	Sapi perah	86.360 Ekor	89.310 Ekor	94.143 Ekor	105,41%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
284	Kambing dan domba	136.690 Ekor	141.421 Ekor	15.9718 Ekor	112,94%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							
285	Pengobatan ternak	40000 Ekor(Ayam)	35000 Ekor(Ayam)	17771 Ekor	50,77%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
286	Pengobatan ternak	700 Sampel	1050 Sampel	1364 Sampel	129,90%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
Kelautan dan perikanan							
Program Pengembangan Budidaya Perikanan							
287	Meningkatnya produksi ikan (ton)	33655 Ton	33602 Ton	36271 Ton	107,94%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan							
288	Meningkatnya produk olahan ikan (ton)	35 Ton	409 Ton	378 Ton	92,42%	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
Perdagangan							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri						
289	Meningkatnya sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	60 Unit	495 Unit	879 Unit	177,58%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
290	Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	4989335 Rp	5239335000 Rp	7363926694 Rp	140,55%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan						
291	Lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	2 Lokasi	30 Lokasi	97 Lokasi	323,33%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
292	Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4200 Pelaku usaha dan konsumen	25200 Pelaku usaha dan konsumen	18461 Pelaku usaha dan konsumen	73,26%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor							
293	Nilai ekspor barang (USD)	125.000 USD	884.209 USD	947.705,6 USD	107,18%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Perindustrian							
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
294	Semakin berkembangnya IKM	29 IKM	182 IKM	225 IKM	123,63%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
295	Meningkatnya penerapan teknologi dan standart produk industri daerah	65 IKM	188 IKM	0 IKM	0,00%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Industri							
296	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk unggulan	30 IKM	60 IKM	60 IKM	100,00%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana							
297	Terbentuknya kawasan peruntukkan industri	1 Kawasan	2 Kawasan	1 Kawasan	50,00%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
Perencanaan							
Program Perencanaan pembangunan daerah							
298	Tersusunnya Profil Kelurahan dan terlaksananya pembinaan	6 Dokumen	36 Dokumen	18Dokumen	50,00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	kelurahan						
299	Dokumen laporan Pertanggungjawaban	6 Dokumen	30 Dokumen	41 Dokumen	136,67%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	
300	Dokumen RKPD dan RPJMD	2 Dokumen	14 Dokumen	12 Dokumen	85,71%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
301	Dokumen Renja dan Renstra PD	2 Dokumen	14 Dokumen	11 Dokumen	78,57%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
302	Tersusunnya DSP usulan kegiatan Kecamatan/Kelurahan	25 Dokumen	150 Dokumen	128 Dokumen	85,33%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
303	Dokumen Evaluasi	2 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83,33%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
304	Tersusunnya dokumen KUA PPAS APBD	2 Dokumen	12 Dokumen	10 Dokumen	83,33%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
305	Tersusunnya dokumen perencanaan tata ruang	2 Dokumen	12 Dokumen	11 Dokumen	91,67%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
306	Terverifikasinya RKA SKPD	98 Dokumen	588 Dokumen	514 Dokumen	87,41%	BADAN PERENCANAAN,	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan						
307	Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	34%	80%	30%	37,50%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
	Program Pengembangan data/informasi						
308	Dokumen data/informasi pembangunan daerah yang dipublikasikan	4 Dokumen	27 Dokumen	22 Dokumen	81,48%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Perencanaan pembangunan ekonomi						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
309	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan ekonomi	3 Dokumen	16 Dokumen	14 Dokumen	87,50%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Perencanaan pembangunan sosial budaya						
310	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan sosial budaya	3 Dokumen	27 Dokumen	23 Dokumen	85,19%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam						
311	Kajian rencana pengembangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	50,00%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						DAERAH	
	Program Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana						
312	Tersusunnya studi data infrastruktur dan potensi rawan bencana	0 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	80,00%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh						
313	Rumusan kebijakan/kajian teknis perencanaan pembangunan prasarana dan sumber daya alam (proposal)	15 Dokumen	90 Dokumen	77 Dokumen	85,56%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Program Perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
314	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan permukiman perdesaan	1 Dokumen	26 Dokumen	18 Dokumen	69,23%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar							
315	Rumusan kebijakan teknis perencanaan pengembangan air minum/air bersih dan sanitasi	1 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	87,50%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Program Kerjasama pembangunan daerah							
316	Kerjasama pembangunan daerah yang diimplementasikan	2 Kegiatan	17 Kegiatan	14 Kegiatan	82,35%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
						DAERAH	
	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah						
317	Cakupan peningkatan kemampuan teknis aparatur perencana	100%	100%	75%	75,00%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Penelitian dan pengembangan						
	Program Penelitian dan pengembangan inovasi daerah						
318	Inovasi hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	4 inovasi	8 inovasi	7 Inovasi	87,50%	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Keuangan						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pengendalian Kerugian Daerah						
319	Pengembalian kerugian daerah (Rp. 000)	9000 Rp	1200 Rp	306 Rp	174,50%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah						
320	Bertambahnya PAD	242348841 Rp	412068642 Rp	564591274 Rp	137,01%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
321	Peningkatan PAD per tahun	14842346 Rp	39304005 Rp	275457675 Rp	700,84%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
322	Opini WTP BPK atas laporan	100%	100%	100%	100,00%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
323	Peningkatan PAD per tahun	6,52%	10,54%	27%	256,07%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
324	Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah	12 Dokumen	72 Dokumen	103 Dokumen	143,06%	BADAN KEUANGAN DAERAH	
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan							
Program Pendidikan kedinasan							
325	Prosentase pejabat struktural yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai tingkatan	78%	85%	83%	97,65%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
Program Peningkatan kapasitas sumber daya							
326	Prosentase Aparatur yang memiliki sertifikasi pendidikan dan pelatihan teknis sesuai bidang tugasnya	0%	12%	8,46%	70,50%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur						
327	Prosentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas yang menjadi tanggung jawabnya	75%	81%	76%	93,83%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
328	Prosentase penyelesaian kasus - kasus kepegawaian	90%	90%	66%	73,33%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	Program Fasilitas pindah/purna tugas						
329	Prosentase pegawai yang memperoleh keputusan pensiun tepat waktu	100%	100%	99%	99,00%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
	Peningkatan Disiplin Aparatur						

No	Urusan/Program/Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan 2015	Target pada Akhir Tahun Perencanaan	Capaian Pada Akhir Tahun Perencanaan Tahun 2020	Rasio Capaian Akhir s/d Tahun 2020	Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
330	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas aparatur beserta perlengkapannya	0%	100%	0%	0,00%	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	
Rata-rata Capaian					127,26%		

Keterangan:

 = telah tercapai		 = akan tercapai		 = perlu perhatian/upaya keras

Berdasarkan tabel hasil evaluasi RPJMD di atas, dari 330 indikator kinerja, telah tercapai sebanyak 161 indikator, dan akan segera tercapai sejumlah 161 indikator. Sementara 8 indikator lainnya masih membutuhkan upaya keras agar dapat memenuhi target.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menganalisis kondisi keuangan Pemerintah Daerah. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka mendanai pembangunan Daerah. Data dan informasi yang digunakan dalam bab ini, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan neraca daerah dengan durasi waktu minimal 5 tahun sebelumnya. Sebelum menganalisis APBD periode sebelumnya, terlebih dahulu akan dilakukan analisis terhadap kondisi perekonomian nasional dan daerah sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan proyeksi APBD ke depan.

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,07 persen. Kondisi ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia bahkan hampir seluruh negara di dunia. Berbagai kebijakan untuk menangani Pandemi Covid-19 telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui stimulus fiskal sebagai instrument untuk mengendalikan dan menangani permasalahan tersebut maupun kebijakan penanganan Covid-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali.

Kebijakan atau program yang telah dikeluarkan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan kondisi nasional sehingga kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan normal kembali. Kebijakan berupa insentif pajak maupun kebijakan belanja negara dan pembiayaan untuk pemulihan kondisi perekonomian diharapkan mampu mendorong berbagai kegiatan sektoral sehingga dapat berjalan seperti sediakala. Selain itu, program untuk menjamin daya beli masyarakat perlu diteruskan, begitu juga dengan dukungan terhadap sector swasta. Dengan

demikian, kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan solusi yang terbaik bagi pemulihan kondisi negara dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Secara nasional kondisi pandemik Covid-19 menjadi faktor utama memburuknya kondisi perekonomian negara. Hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kontraksi minus 2,65 persen sepanjang tahun 2020. Kondisi ini selain disebabkan oleh Pandemi Covid-19 juga kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terkait pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Kabupaten Boyolali yang notabene merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari permasalahan Covid-19. Meskipun kondisi perekonomian daerah mengalami kontraksi, namun masih lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional maupun provinsi, yaitu hanya terkontraksi minus 1,24 persen. Sektor yang penurunannya sangat signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan, yaitu -42,10 persen, diikuti sektor lainnya, yaitu -7,09 persen. Sementara sektor yang masih mengalami pertumbuhan positif adalah sektor informasi dan komunikasi disusul jasa Kesehatan dan kegiatan sosial.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 10,18 persen dari tahun sebelumnya hanya 9,53 persen. Sementara tingkat pengangguran mengalami peningkatan 5,28 persen dari tahun sebelumnya hanya 3,12 persen. Hal inilah yang kemudian berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah di Kabupaten Boyolali.

Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mampu membuat pergerakan positif terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu gerakan boyolali di rumah saja. Kebijakan ini efektif membuat perbaiki perekonomian daerah.

3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Boyolali penting untuk dilakukan karena bertujuan untuk melihat capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Kabupaten Boyolali. Capain tersebut dapat membantu dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk satu periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Boyolali.

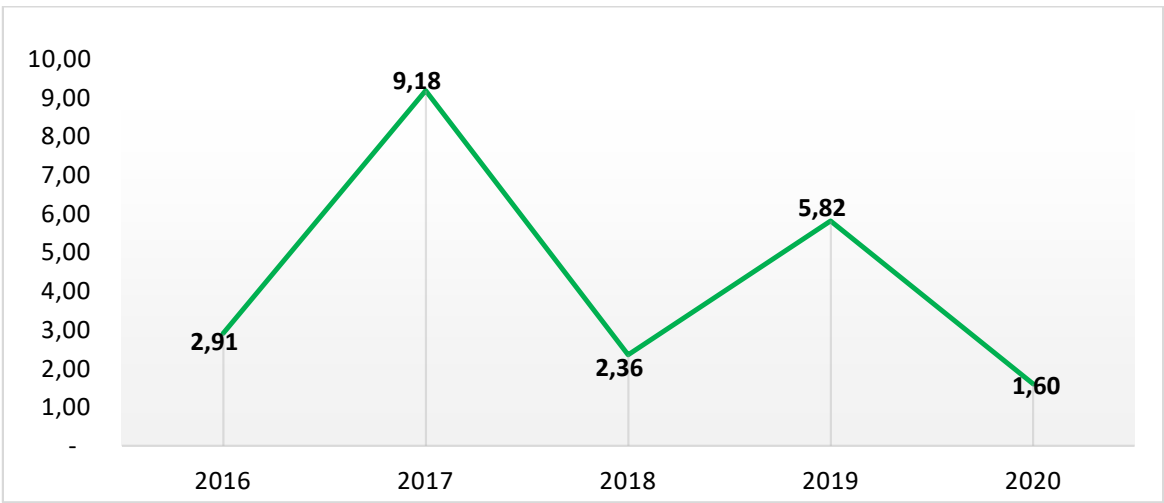
3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD periode sebelumnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Boyolali tahun 2015-2020. Analisis dilakukan sesuai struktur APBD yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk memproyeksi pertumbuhan APBD periode yang akan datang. Berikut ini adalah uraian analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Boyolali.

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Komponen pendapatan daerah meliputi PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah grafik pendapatan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Grafik 3. 1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Pada tahun 2019, pendapatan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 3,46 persen dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020 pendapatan daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 4,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum berjalan optimal. Persoalan ini terjadi disebabkan oleh adanya penurunan kontribusi komponen pendapatan daerah, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pajak daerah. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh kasus covid-19.

Analisis kinerja pendapatan daerah juga dapat dilihat dari kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah. Kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah. Berikut ini adalah uraian kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Boyolali.

Tabel 3. 1. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian Akun	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
PENDAPATAN	1,993,495,112,162.00	2,176,496,270,254.00	2,227,780,710,062.00	2,357,487,210,573.00	2,382,403,220,150.00	4.60
Pendapatan Asli Daerah	292,310,032,226.00	388,014,897,386.00	342,957,213,726.00	395,431,863,402.00	451,543,582,894.00	12.65
Pajak daerah	84,362,391,724.00	103,389,100,380.00	134,430,549,029.00	149,666,539,729.00	140,732,284,319.00	14.49
Retribusi daerah	14,899,472,525.00	14,753,885,679.00	16,089,868,680.00	21,088,974,161.00	17,102,684,753.00	5.06
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	9,344,479,904.00	15,138,775,318.00	18,987,096,778.00	13,970,406,527.00	18,542,139,505.50	23.43
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	183,703,688,073.00	254,733,136,009.00	173,449,699,239.00	210,705,942,985.00	275,166,474,316.50	14.71
Pendapatan Transfer	1,686,185,079,936.00	1,775,272,436,868.00	1,803,665,066,405.00	1,872,257,957,642.00	1,836,521,334,533.00	2.19
Transfer Pemerintah Pusat	1,526,245,583,320.00	1,616,361,147,868.00	1,655,027,093,300.00	1,702,777,599,225.00	1,680,234,244,571.00	2.46
Dana perimbangan	1,358,444,509,320.00	1,354,438,480,868.00	1,438,528,619,300.00	1,436,635,314,225.00	1,356,374,607,571.00	0.05
Dana insentif daerah	5,000,000,000.00	54,099,022,000.00	23,500,000,000.00	46,340,200,000.00	106,878,179,000.00	288.31
Dana otonomi khusus				0	-	-
Dana keistimewaan				0	-	-
Dana desa	162,801,074,000.00	207,823,645,000.00	192,998,474,000.00	219,802,085,000.00	216,981,458,000.00	8.28

Uraian Akun	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Transfer Antar-Daerah	159,939,496,616.00	158,911,289,000.00	148,637,973,105.00	169,480,358,417.00	156,287,089,962.00	(0.22)
Pendapatan bagi hasil	107,894,687,616.00	123,876,899,000.00	127,480,524,105.00	134,175,358,417.00	122,992,708,962.00	3.66
Bantuan keuangan.	52,044,809,000.00	35,034,390,000.00	21,157,449,000.00	35,305,000,000.00	33,294,381,000.00	(2.78)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15,000,000,000.00	13,208,936,000.00	81,158,429,931.00	89,797,389,529.00	94,338,302,723.00	129.55
Hibah	15,000,000,000.00	13,208,936,000.00	4,925,000,000.00	9,573,584,000.00	4,937,000,000.00	(7.17)
Dana darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah Dana BOS	0	0	76,233,429,931.00	80,223,805,529.00	89,401,302,723.00	-

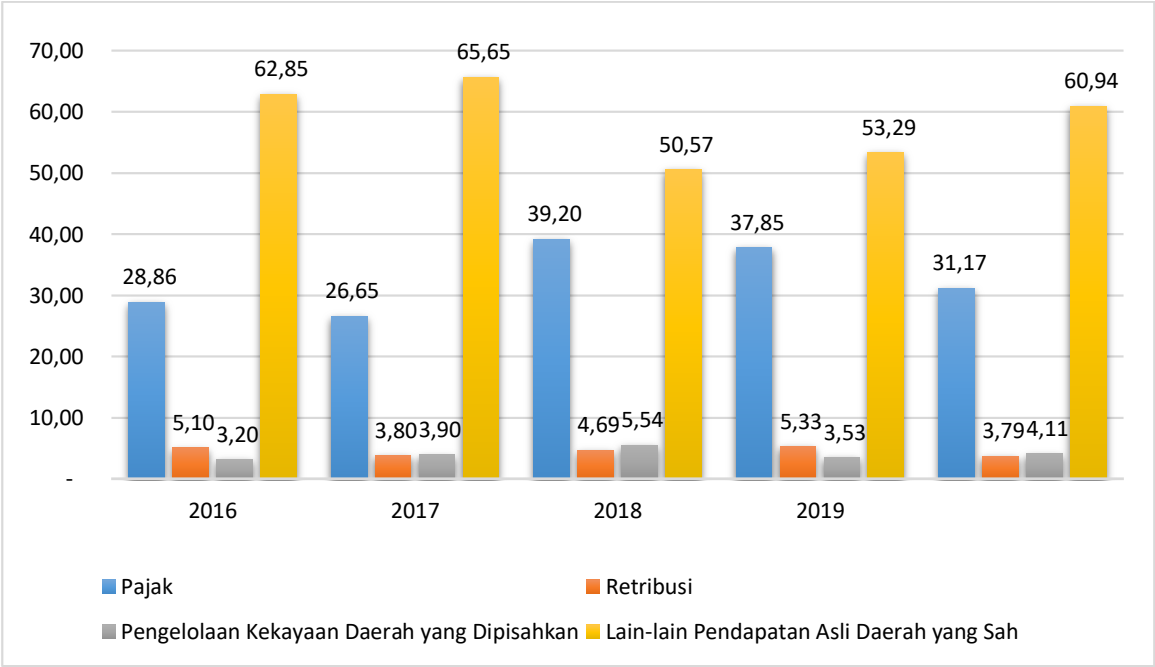
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Secara umum, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali sebesar 4,60 persen. Komponen pendapatan daerah yang pertumbuhannya paling tinggi, yaitu berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, diikuti PAD dan pendapatan transfer. Meskipun rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sangat rendah, namun memiliki kontribusi terhadap pendapatan daerah paling besar, yaitu dengan besaran proporsi rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 80,72 persen, diikuti oleh PAD sebesar 16,72 persen, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan transfer terutama transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusunan pendapatan daerah Kabupaten Boyolali. Ketergantungan terhadap pendapapatan transfer tersebut berasal dari dana perimbangan.

3.3.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dari ketiga komponen pembentuk pendapatan daerah, PAD memiliki rata-rata pertumbuhan sudah baik. Pertumbuhan PAD ini tentu saja didukung oleh kontribusi dari masing-masing komponen dalam PAD itu sendiri. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD Kabupaten Boyolali.

Grafik 3. 2. Persentase Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)



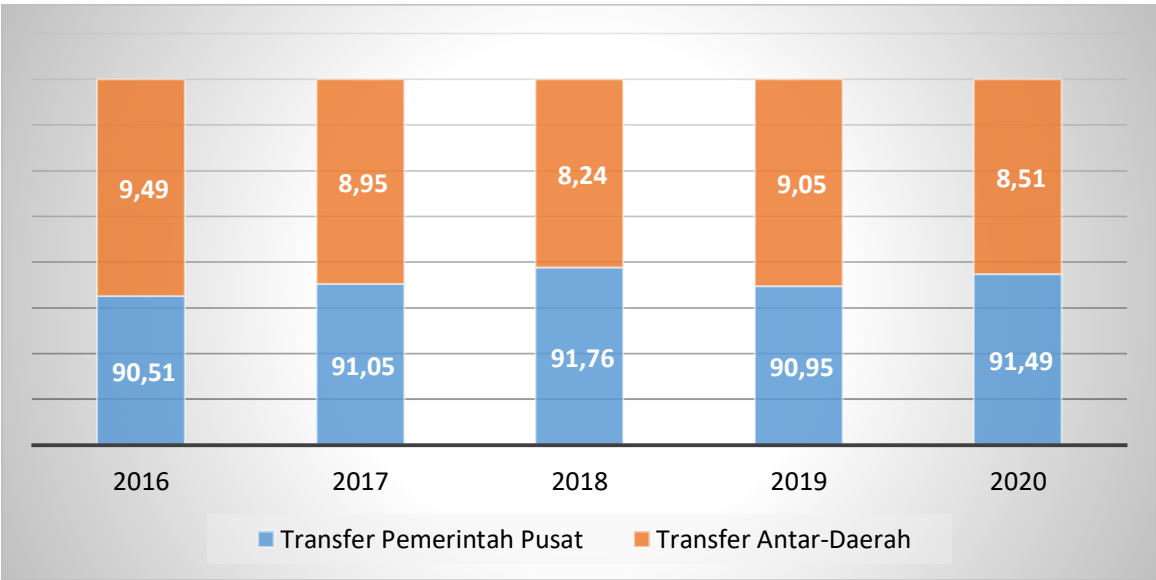
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Rata-rata kontribusi komponen PAD terhadap total PAD paling tinggi berasal dari lain-lain PAD yang sah, diikuti oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hal lain yang penting untuk diperhatikan dari kontribusi masing-masing komponen PAD adalah tingkat pertumbuhan seluruh komponen tersebut masih berjalan fluktuatif. Selain itu, pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan, sementara pengelolaah kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi karena masih belum optimalnya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD dan masih lemahnya data terkait sumber-sumber PAD, seperti pajak dan retribusi. Hal ini perlu diantisipasi karena bisa berdampak pada penurunan PAD yang selanjutnya berpengaruh pada pendapatan daerah itu sendiri.

3.3.1.1.2. Pendapatan Transfer

Kontribusi pendapatan transfer masih menjadi komponen utama dalam pendapatan daerah Kabupaten Boyolali. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan transfer terhadap kapasitas keuangan daerah masih signifikan. Berikut ini adalah gambaran kontribusi masing-masing komponen pendapatan transfer Kabupaten Boyolali.

Grafik 3. 3. Persentase Kontribusi Pendapatan Transfer Terhadap Total Pendapatan Transfer Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

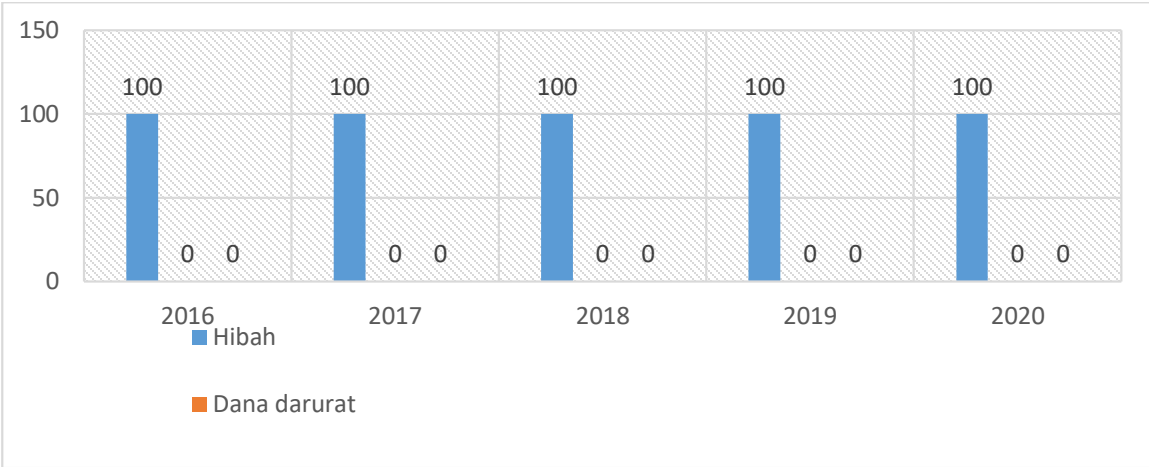
Persentase kontribusi komponen pendapatan transfer masih didominasi oleh ransfer pemerintah pusat yang berasal dari dana perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID), dan

sebagainya. Rata-rata pertumbuhan seluruh komponen pendapatan transfer mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2020, seperti dana perimbangan, bagi hasil, dan lain-lain. Sementara itu, DID mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar 130,64 persen. Kondisi ini perlu diantisipasi karena alokasi dana dari pemerintah pusat sangat tergantung pada kondisi APBN. Di tambah lagi, negara Indonesia dihadapkan pada masalah pandemi Covid-19 dan sampai saat ini masih belum menunjukkan adanya penurunan kasus. Hal ini tentu saja berimplikasi pada alokasi anggaran pemerintah pusat yang sebagian besar masih difokuskan untuk menangani masalah pandemik tersebut.

3.3.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sudah baik di Kabupaten Boyolali. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya kontribusi dari masing-masing komponen dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini adalah tabel persentase kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Grafik 3. 4. Persentase Kontribusi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Persentase kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan dana BOS. Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata pertumbuhan dana BOS, yaitu sebesar 100 persen. Sementara itu, komponen dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum memiliki kontribusi terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah belum

optimal karena belum seluruh komponen memiliki kontribusi terhadap lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.3.1.2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah merupakan semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut ini adalah tabel gambaran pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

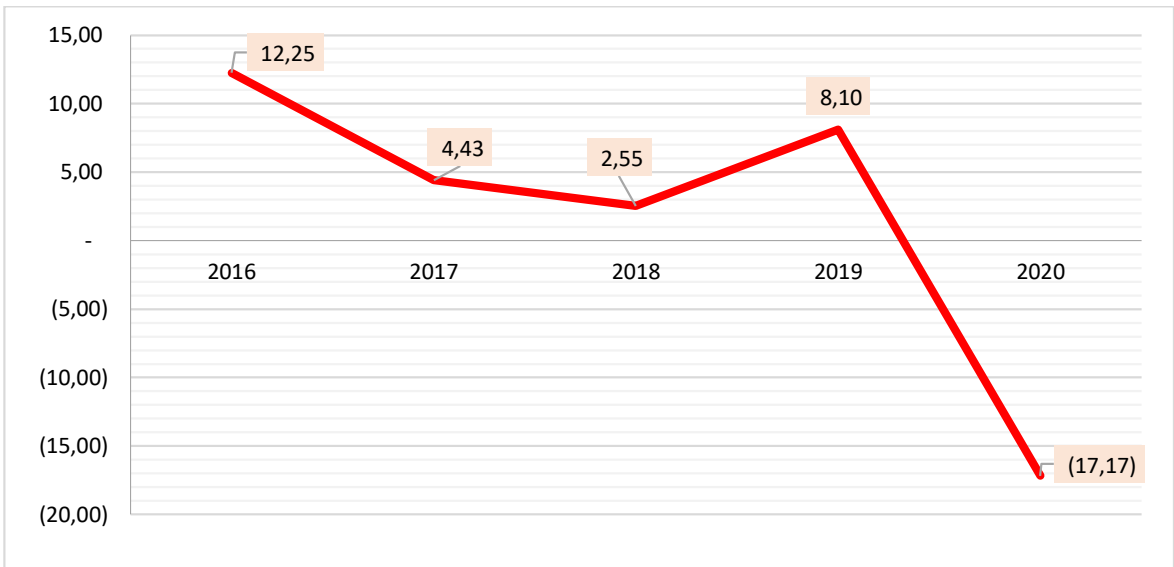
Tabel 3. 2. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian Akun	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
BELANJA	2,057,281,803,196.50	2,148,428,355,037.00	2,203,112,762,252.00	2,381,601,864,739.00	1,972,664,326,304.00	(0.52)
Belanja operasi	1,356,128,700,816.50	1,366,155,429,830.00	1,360,520,316,489.00	1,466,732,795,862.00	1,423,041,795,634.00	1.29
Belanja pegawai	991,308,779,124.00	879,903,256,401.00	876,508,444,540.00	898,026,621,720.00	863,836,702,593.00	(3.24)
Belanja barang dan jasa	300,987,886,527.50	434,054,107,439.00	433,961,804,449.00	514,875,231,142.00	463,985,975,237.00	13.24
Belanja bunga	0	0	0	0		-
Belanja subsidi	0	0	0	0		-
Belanja hibah	53,684,260,165.00	31,007,099,990.00	34,486,830,000.00	39,492,443,000.00	80,007,467,804.00	21.52
Belanja bantuan sosial	10,147,775,000.00	21,190,966,000.00	15,563,237,500.00	14,338,500,000.00	15,211,650,000.00	20.12
Belanja modal	373,915,606,382.00	420,149,743,344.00	498,972,083,904.00	530,593,843,520.00	405,110,958,145.00	3.45
Belanja tidak terduga	0	828,824,278.00	912,524.00	665,277,140.00	144,511,572,525.00	31,442.43
Belanja transfer	327,237,495,998.00	361,294,357,585.00	343,619,449,335.00	383,609,948,217.00	367,141,190,721.00	3.22
Belanja bagi Hasil	8,897,316,650.00	5,841,497,000.00	14,953,727,000.00	11,021,120,500.00	11,993,185,240.00	26.04
Belanja bantuan Keuangan	318,340,179,348.00	355,452,860,585.00	328,665,722,335.00	372,588,827,717.00	355,148,005,481.00	3.20

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Boyolali mengalami kontraksi, yaitu -0,52 persen. Hal ini terjadi disebabkan oleh penurunan belanja daerah pada tahun 2020, yang berasal dari belanja pegawai dan belanja modal. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 3. 5. Persentase Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, persentase pertumbuhan belanja di Kabupaten Boyolali mengalami fluktuatif dan cenderung menurun. Pertumbuhan belanja daerah paling rendah berada pada tahun 2020, yaitu - 17,17 persen atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 8,99 persen.

3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Analisis terhadap pembiayaan daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Boyolali pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus maupun defisit belanja daerah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa depan. Adapun hasil analisis pembiayaan daerah Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbu han (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PEMBIAYAAN	206,869,504,937.00	125,651,115,702.50	206,869,504,937.00	128,063,611,766.50	91,213,269,388.00	3.33
3.1	Penerimaan Pembiayaan	236,101,504,937.00	153,343,928,335.50	164,314,295,216.00	156,499,611,776.50	108,946,985,388.00	(0.01)
3.1.1	Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	235,731,906,707.00	143,082,813,902.50	153,553,180,773.50	146,436,754,697.50	103,935,870,945.00	0.68
3.1.2	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	261,114,462.00	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Titipan Uang Jaminan	108,483,768.00	-	108,483,768.00	-	-	-
3.1.8	Penerimaan Kembali Piutang	-	761,114,433.00	261,114,462.00	2,331,114,443.00	2,261,114,443.00	222.94
3.1.9	Pinjaman Dalam Negeri	-	9,500,000,000.00	10,500,000,000.00-	7,900,000,000.00	2,750,000,000.00	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	29,232,000,000.00	27,692,812,633.00	42,551,000,000.00	28,436,000,000	17,733,716,000.00	(3.85)
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	29,232,000,000.00	24,670,167,821.00	28,051,000,000.00	10,836,000,000.00	14,183,716,000.00	(10.20)
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	3,000,000,000.00	-	5,000,000,000.00	-	-
3.2.5	Pengembalian Titipan Uang Jaminan	-	22,644,812.00	-	-	-	-
3.2.6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-	9,500,000,000.00	17,600,000,000.00	3,550,000,000.00	-

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami *trend* fluktuatif dan cenderung turun. Pada tahun 2020, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami penurunan. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya pengeluaran pembiayaan yang tinggi dan penurunan SiLPA pada tahun 2020.

Trend pertumbuhan penerimaan pembiayaan daerah mengalami kondisi yang sama dengan realisasi pembiayaan daerah, yaitu mengalami tren fluktuatif dan cenderung turun. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan SiLPA pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada pengeluaran pembiayaan, yaitu rata-rata pertumbuhan pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pengeluaran pembiayaan di komponen penyertaan modal (investasi daerah) mengalami penurunan juga.

3.3.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan dana ekuiditas. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah gambaran pertumbuhan neraca daerah Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 3. 4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Kas Daerah	127,586,689,935.00	134,201,707,935.00	138,185,924,238.00	84,134,109,943.00	88,997,974,715.00	(13.46)
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	6,615,500.00	5,081,000.00	121,500.00	111,500.00	20,414,333.00	3,617.20
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	33,551,380.00	40,549,215.00	121,672.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	Kas di BLUD	15,456,299,292.50	14,505,461,931.50	6,635,881,300.50	16,554,716,407.00	39,001,545,763	45.04
1.1.4.1	Kas di Bendahara FKTP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.2	Kas di Bendahara BOS	0.00	0.00	1,609,194,316.00	3,254,508,089.00	5,826,284,957	0.00
1.1.5	Kas Lainnya	3,099,478,910.00	4,966,230,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	Setara Kas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.8	Piutang Pendapatan	63,398,088,859.41	57,150,557,983.34	117,710,976,188.29	92,298,173,918.60	76,246,034,693.59	13.82
1.1.9	Piutang Lainnya	760,256,623.41	760,256,632.82	3,175,784,159.23	1,929,548,631.64	1,926,548,631.05	55.67
1.1.10	Penyisihan Piutang	(28,092,331,440.04)	(12,460,505,468.84)	(27,359,053,295.67)	(25,153,234,876.82)	-18,616,715,562.10	7.47
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	62,496,569.33	144,425,346.82	131,483,248.17	101,665,229.59	3,335,158.82	9.75
1.1.12	Persediaan	39,056,033,972.92	32,292,898,513.31	25,908,265,424.95	32,137,642,667.18	59,027,300,687.66	42.94
	Jumlah Aset	221,367,179,602.53	231,606,663,926.95	265,998,698,751.48	205,257,241,509.20	252,432,723,377.02	(0.53)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Lancar						
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						
1.2.1	INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN						
1.2.1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	Investasi dalam Obligasi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	Dana Bergulir	3,377,436,294.00	5,867,064,294.00	10,840,774,294.00	10,796,274,294.00	8,785,274,294.00	34.86
1.2.1.5	Deposito Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2.1.7	Penyisihan Dana Bergulir	(889,936,294.00)	(1,082,064,294.00)	(2,165,774,294.00)	(3,796,274,294.00)	-4,785,274,294.00	55.77
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	2,487,500,000.00	4,785,000,000.00	8,675,000,000.00	7,000,000,000.00	4,000,000,000.00	18.75
1.2.2	INVESTASI JANGKA PANJANG						

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PARMANEN						
1.2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	184,106,811,740.86	205,380,031,170.74	341,995,212,556.53	287,461,173,150.12	316,268,449,803.65	19.75
1.2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	2,070,000,000.00	2,070,000,000.00	0.00	0.00	0,00	
1.2.2.3	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	186,176,811,740.86	207,450,031,170.74	341,995,212,556.53	287,461,173,150.12	316,268,449,803.65	19.67
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	188,664,311,740.86	212,235,031,170.74	350,670,212,556.53	294,461,173,150.12	320,268,449,803.65	19.51
1.3	ASET TETAP						
1.3.1	Tanah	485,962,412,564.70	526,916,785,504.70	577,164,347,509.70	920,783,194,839.09	1,026,921,897,113.61	21.35
1.3.2	Peralatan dan Mesin	413,744,519,978.40	449,618,042,684.25	485,558,023,098.06	574,238,704,388.86	737,497,003,465.86	14.29
1.3.3	Gedung dan Bangunan	922,478,050,640.12	932,137,859,891.32	1,099,573,651,418.79	1,216,710,933,054.79	1,333,589,976,640.79	8.40
1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,191,199,136,404.34	1,336,246,630,406.95	1,459,802,794,770.96	1,729,808,691,293.75	1,888,381,444,818.76	13.35
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	78,038,546,010.10	86,383,006,654.10	89,231,193,322.64	105,139,485,182.47	116,781,470,548.47	8.97
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22,803,666,678.00	27,839,857,428.00	19,035,601,123.00	17,043,525,785.00	17,052,272,188.00	0.45
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(938,480,631,876.59)	(1,241,198,955,079.98)	(1,325,322,289,571.89)	(1,361,759,150,868.84)	-1,531,382,253,738.12	11.85

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Jumlah Aset Tetap	2,175,745,700,399.07	2,117,943,227,489.35	2,405,043,321,671.25	3,201,965,383,675.12	3,588,841,811,037.37	14.03
1.4	DANA CADANGAN						
1.4.1	Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ASET LAINNYA						
1.5.1	Tagihan Jangka Panjang	1,044,457,750.49	783,343,308.08	522,228,865.67	261,114,423.26	0.00	0.00
1.5.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0.00	0.00	0.00	0.00	4,356,495,110.09	0.00
1.5.3	Aset Tidak Berwujud	11,224,935,614.00	12,670,183,821.00	15,711,519,421.00	19,360,671,471.00	25,707,414,621.00	48.14
1.5.4	Aset Lain-lain	80,606,944,914.60	56,955,616,997.33	87,372,617,987.38	107,673,514,607.90	75,985,002,778.19	(0.08)
1.5.5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4,575,391,457.20)	(6,412,905,182.80)	(9,227,635,408.40)	(12,722,293,784.00)	-16,769,625,569.60	47.83
1.5.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(62,446,834,655.50)	(11,788,136,036.80)	0.00	(46,112,727,850.17)	-23,131,281,422.77	
	Jumlah Aset Lainnya	25,854,112,166.39	52,208,102,906.82	94,378,730,865.65	68,460,278,867.99	66,148,005,516.91	34.34
	JUMLAH ASET	2,611,631,303,908.85	2,613,993,025,493.86	3,116,090,963,844.90	3,770,144,077,202.44	4,227,690,989,734.95	12.59
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA						

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	342,205.00	0.00	0.00	0.00	35,247,255.00	0.00
2.1.2	Utang Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1,294,061,937.18	2,510,571,275.14	6,406,469,215.28	5,995,809,761.86	5,837,761,418.59	44.29
2.1.5	Utang Beban	10,784,212,472.00	14,051,286,384.00	14,787,729,962.00	19,126,197,877.90	25,175,544,122.57	25.20
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	223,452,336.00	9,646,557,027.00	10,545,867,800.00	800,000,000.00	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	12,302,068,950.18	26,208,414,686.14	31,740,066,977.28	25,922,007,639.76	31,048,552,796.16	31.92
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH	12,302,068,950.18	26,208,414,686.14	31,740,066,977.28	25,922,007,639.76	31,048,552,796.16	31.92

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	KEWAJIBAN						
3	EKUITAS DANA						
	JUMLAH EKUITAS DANA	2,599,329,234,958.67	2,587,784,610,807.72	3,084,350,896,867.62	3,744,222,069,562.68	4,196,642,436,938.79	12.54
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2,611,631,303,908.85	2,613,993,025,493.86	3,116,090,963,844.90	3,770,144,077,202.44	4,227,690,989,734.95	12.59

Sumber: Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, rata-rata pertumbuhan aset daerah Kabupaten Boyolali sebesar 12,59 persen. Sementara itu, pertumbuhan aset lancar hanya sebesar -0,53 persen. Rendahnya pertumbuhan tersebut disebabkan posisi kas daerah mengalami penurunan sebesar -13,46 persen, yang terjadi karena penurunan pada SiLPA tahun berjalan, yaitu sebesar Rp. 103,935,870,945.00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 153.553.180.773,50.

Pertumbuhan aset tetap mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,30 persen. Komponen aset tetap yang meningkat signifikan adalah aset tanah dan jalan, irigasi, dan jaringan. Kondisi ini disesuaikan dengan peningkatan yang tidak signifikan pada komponen konstruksi dalam pengerjaan.

Pertumbuhan kewajiban mengalami rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 31,92 persen. Penurunan ini disebabkan karena ada utang perhitungan pihak ketiga pada tahun terakhir dan penurunan pendapatan diterima di muka serta utang jangka pendek lainnya. Sementara itu, utang beban mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 25,20 persen.

Dari hasil analisis terhadap neraca daerah di atas, selanjutnya dilakukan analisis rasio keuangan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan dan posisi keuangan Kabupaten Boyolali dari satu periode ke periode berikutnya. Instrumen yang digunakan untuk menghitung rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini adalah uraian analisis terhadap masing-masing rasio di atas.

3.3.2.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar/*current ratio* dan rasio cepat/*ratio quick*. Berikut ini adalah ulasan terkait rasio lancar dan rasio cepat.

3.3.2.1.1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar atau aset lancar. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan apakah Pemda memiliki aset yang cukup untuk melunasi hutangnya. Adapun rumus rasio lancar adalah membandingkan

aktiva lancar dengan hutang lancar (**Rasio Lancar = Aktiva Lancar/Hutang Lancar**). Berikut ini adalah hasil analisis rasio lancara Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Tabel 3. 5. Analisis Rasio Lancar Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Aktiva Lancar	Kewajiban Jangka Pendek/Hutang Lancar	Rasio Lancar
1	2016	221,367,179,602.53	12,302,068,950.18	17,99
2	2017	231,606,663,926.95	26,208,414,686.14	8,84
3	2018	265,998,698,751.48	31,740,066,977.28	8,38
4	2019	205,257,241,509.20	25,922,007,639.76	7,92
5	2020	252,432,723,377.02	31,048,552,796.16	8.13

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Rasio lancar Pemerintah Daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh adanya kenaikan aktiva lancar. Meskipun demikian, rasio lancar sebesar 8,13 persen pada tahun 2020, dapat dikatakan baik karena nilai tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancarnya sebanyak 8 (delapan) kali peminjaman selama satu tahun.

3.3.2.1.2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio *quick* adalah ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang lebih likuid atau aset yang paling mendekati uang tunai (aset cepat). Rasio ini menunjukkan kekuatan atau kelemahan finansial Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak utang jangka pendek Pemerintah Daerah yang dapat dipenuhi dengan menjual semua aset likuid Pemerintah Daerah dalam waktu yang paling singkat. Semakin besar nilai rasio cepat, maka semakin baik. Adapun rumus rasio cepat adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar (**Rasio Cepat = (Aktiva Lancar - Persediaan) / Kewajiban lancar**). Berikut ini adalah hasil analisis rasio cepat Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 6. Rasio Cepat Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Aktiva Lancar	Persediaan	Kewajiban Jangka Pendek	Rasio Quick
1	2016	221,367,179,602.53	39,056,033,972.92	12,302,068,950.18	14.82
2	2017	231,606,663,926.95	32,292,898,513.31	26,208,414,686.14	7.60
3	2018	265,998,698,751.48	25,908,265,424.95	31,740,066,977.28	7.56
4	2019	205,257,241,509.20	32,137,642,667.18	25,922,007,639.76	6.68
5	2020	252,432,723,377.02	59,027,300,687.66	31,048,552,796.16	6.23

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Perkembangan rasio cepat Pemerintah Daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini terjadi karena utang lancar mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata sebesar 31,92 persen. Meskipun demikian, secara keseluruhan rasio cepat Pemerintah Pemerintah dalam kondisi baik, karena nilainya di atas 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan dengan utang lancar. Dengan demikian, Pemerintah Daerah mampu melunasi utang jangka pendeknya melalui pencairan aset lancarnya.

3.3.2.2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Selain itu, rasio ini juga menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Ada 2 (dua) rasio yang digunakan dalam rasio solvabilitas, yaitu rasio total hutang terhadap total aset dan rasio hutang terhadap modal.

3.3.2.2.1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio ini mengukur seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh utang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Utang di sini adalah utang Pemerintah Daerah, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan seberapa jauh utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik tingkat keamanannya. Adapun rumus rasio total hutang terhadap aset adalah total hutang dibagi dengan total aset (**Rasio Hutang Terhadap Total Aset=Total Hutang/Total Aset**). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Tabel 3. 7. Rasio Hutang Terhadap Total Aset Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Total Utang	Total Aset	Rasio Hutang Terhadap Total Aset
1	2016	12,302,068,950.18	2,611,631,303,908.85	0.47
2	2017	26,208,414,686.14	2,613,993,025,493.86	1.00
3	2018	31,740,066,977.28	3,116,090,963,844.90	1.02
4	2019	25,922,007,639.76	3,770,144,077,202.44	0.69
5	2020	31,048,552,796.16	4,227,690,989,734.95	0.73

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Perkembangan rasio hutang terhadap total aset Pemerintah Daerah mengalami perkembangan fluktuatif. Perkembangan rasio hutang yang paling tinggi berada pada tahun 2018, yaitu sebesar 1,02 persen. Kondisi ini terjadi karena kenaikan total hutang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan total aset yang masing-masing sebesar 21,11 persen dan 19,21 persen pada tahun 2018.

Pada tahun 2020, rasio hutang terhadap total aset mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terjadi karena adanya kenaikan total hutang yang lebih tinggi dibandingkan dengan total aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah semakin solvabel, karena memiliki aset semakin besar untuk menutupi hutang, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendeknya. Meskipun demikian, Pemerintah Daerah harus mengantisipasi kenaikan hutang ke depan supaya dapat mempertahankan kondisi solvabelnya.

3.3.2.2.2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Rasio ini sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kesehatan keuangan daerah saat pemeriksaan. Semakin kecil nilainya, menunjukkan semakin mandiri keuangan daerah atau tidak tergantung pembiayaan dari hutang. Adapun rumus rasio hutang terhadap modal adalah total hutang dibagi dengan modal (**Rasio Hutang Terhadap Modal = Total Hutang/Modal**). **Berikut ini hasil perhitungan rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Boyolali.**

Tabel 3. 8. Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)

No	Tahun	Total Utang	Total Modal	Rasio Hutang Terhadap Total Modal
1	2016	12,302,068,950.18	2,599,329,234,958.67	0,47
2	2017	26,208,414,686.14	2,587,784,610,807.72	1,01
3	2018	31,740,066,977.28	3,084,350,896,867.62	1,03
4	2019	25,922,007,639.76	3,744,222,069,562.68	0,69
5	2020	31,048,552,796.16	4,196,642,436,938.79	0.74

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Perkembangan rasio hutang terhadap modal Pemerintah Daerah mengalami perkembangan fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dan 2018, nilai rasio hutang terhadap modal berada di angka 1 (satu) yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah harus mewaspadai kondisi tersebut karena nilai tersebut menunjukkan kemandirian keuangan kurang baik. Meskipun demikian, pada tahun 2019 dan 2020 rasio hutang terhadap modal mengalami penurunan di bawah angka 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa posisi kemampuan keuangan daerah dalam kondisi baik untuk memenuhi seluruh kewajibannya.

3.3.2.3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio untuk melihat efektifitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, rasio ini mengukur seberapa efektif Pemerintah Daerah menggunakan persediaan, piutang, dan aset tetapnya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Rasio ini diukur melalui rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan.

3.3.2.3.1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang

Rasio rata-rata umur piutang merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang atau merubah piutang menjadi kas. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang didapatkan dari perhitungan pendapatan daerah dibagi dengan rata-rata piutang pendapatan daerah, di mana rata-rata piutang pendapatan daerah didapatkan dari saldo awal ditambah saldo akhir piutang dibagi 2 (dua).

Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur piutang Kabupaten Boyolali.

Tabel 3. 9. Rasio Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (Hari)

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Umur Piutang	91.97	100.41	102.78	108.76	109.91

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Rata-tata umur piutang Pemerintah Daerah mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan piutang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan secara efisien. Meskipun demikian, Pemda harus mengantisipasi jangka waktu pelunasan karena semakin meningkat, maka menunjukkan jangka waktu pelunasan semakin lama. Hal ini menimbulkan resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang semakin besar.

3.3.2.3.2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan

Rata-rata umur persediaan adalah rasio untuk melihat berapa lama dana yang tertanam dalam bentuk persediaan. Persediaan yang dimiliki digunakan untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini dihitung dengan membandingkan 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata umur persediaan.

Tabel 3. 10. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Rata-Rata Umur Persediaan	347	420	524	422	230

Sumber: Diolah dari Laporan Neraca Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014-2019

Rata-rata umur persediaan Pemerintah Daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan pengelolaan persediaan oleh Pemerintah Daerah sudah berjalan efisien. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dapat mengendalikan persediaannya untuk memberikan pelayanan publik secara efisien.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu Pemerintah Daerah. Instrumen yang digunakan untuk melihat kinerja pengelolaan keuangan daerah masa lalu adalah analisis kesehatan keuangan daerah, realisasi kebijakan belanja daerah dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Informasi yang diperoleh dari analisis ini digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi anggaran untuk pembangunan daerah ke depan.

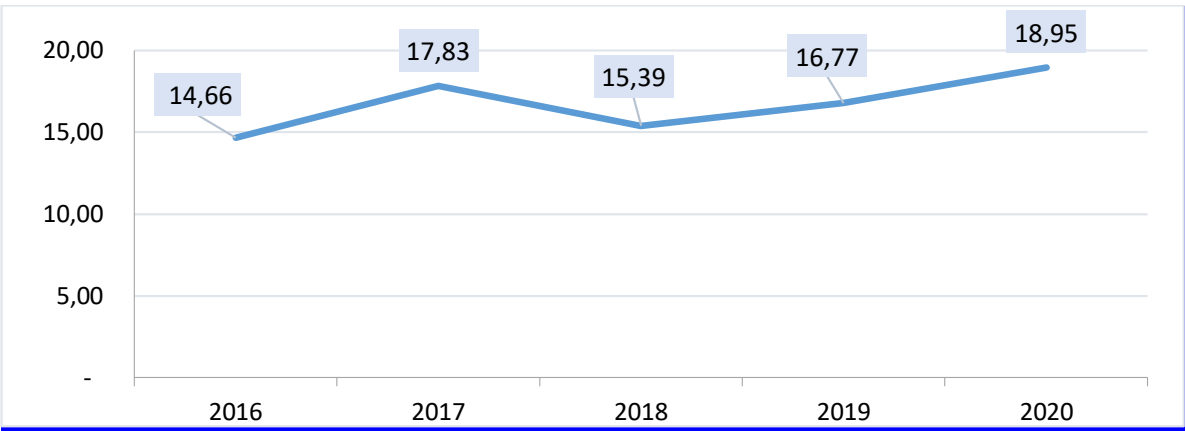
3.4.1. Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

Analisis Kesehatan keuangan daerah dapat diukur dari tingkat kemandirian keuangan daerah, ruang fiskal daerah, tax rasio, rasio belanja pegawai, dan rasio belanja modal. Adapun hasil analisis Kesehatan keuangan daerah dapat dilihat pada sub bab berikut ini.

3.4.1.1. Kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari realisasi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD terhadap pendapatan daerah, maka semakin tingkat kemandirian daerah semakin baik, dan sebaliknya. Adapun realisasi PAD terhadap pendapatan daerah Kabupaten Boyolali dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3. 6. Realisasi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



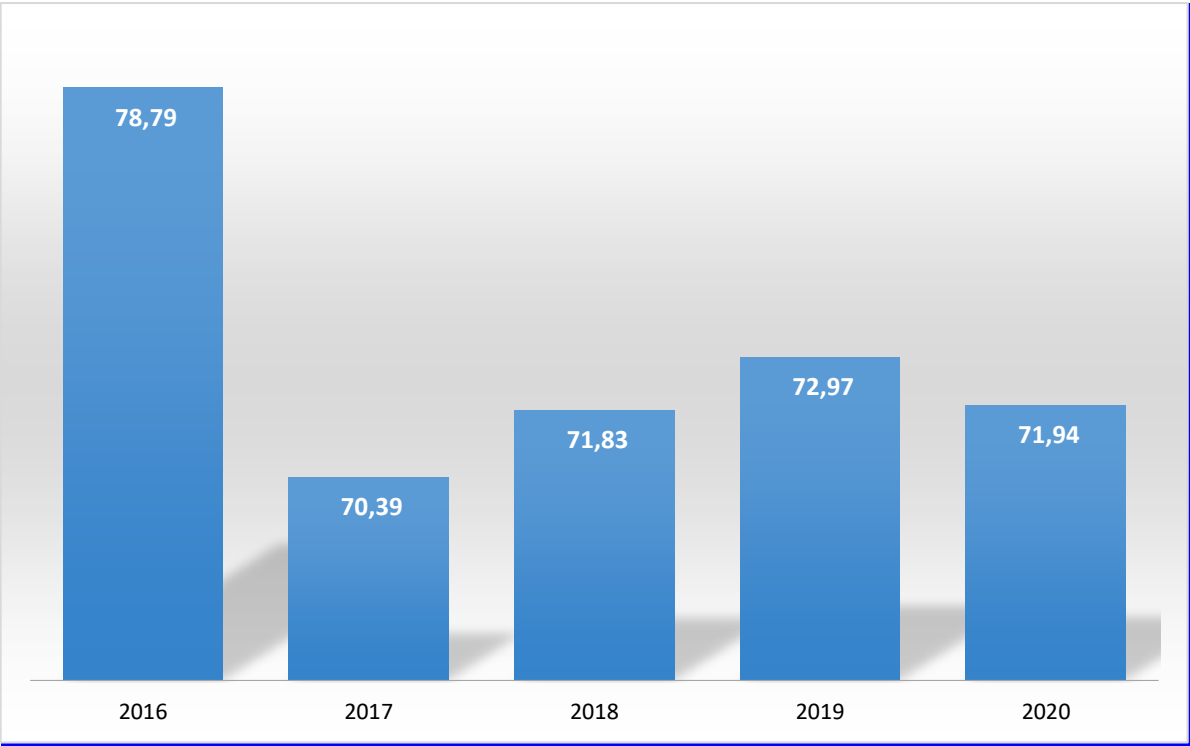
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemda Boyolali dalam meningkatkan PAD sudah berjalan baik. Meskipun demikian, kemampuan keuangan daerah dalam mendukung otonomi daerah masih belum optimal karena angkanya masih berada di bawah 20 persen.

3.4.1.2. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal merupakan indikator untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh Pemda dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal adalah selisih pendapatan daerah dikurang pendapatan yang bersifat *earmarked* dan belanja rutin seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin tinggi ruang fiskal maka semakin baik karena Pemda memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan APBD untuk pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini ruang fiskal Daerah:

Grafik 3. 7. Realisasi Ruang Fiskal Terhadap Total Pendapatan APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Ruang fiskal Daerah mengalami perkembangan fluktuatif dari tahun ke tahun. Ruang fiskal paling tinggi berada pada tahun 2016 sebesar 78,79%, sedangkan paling rendah berada pada tahun 2017 sebesar

70,39%. Pada tahun 2020, ruang fiskal Kabupaten Boyolali mengalami penurunan sebesar lebih besar atau sama dengan 1,03% dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang telah diperuntukan dan belanja rutin.

3.4.1.3. Tax Ratio

Rasio merupakan indikatro untuk melihat tingkat kepatuhan pembayaran **pajak oleh masyarakat di suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui perkiraan** besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Berikut ini adalah tex ratio Kabupaten Boyolali tahun 2016-2020.

Tabel 3. 11. Tax Ratio Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Tahun	Pajak	PDRB	Tax Ratio
2016	84,362,391,724.00	25,756,715,670,000.00	0.33
2017	103,389,100,380.00	27,914,646,550,000.00	0.37
2018	134,430,549,029.00	30,258,836,390,000.00	0.44
2019	149,666,539,729.00	32,665,981,160,000.00	0.46
2020	140,732,284,319.00	32,671,750,140,000.00	0.43

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020; Boyolali Dalam Angka Tahun 2021

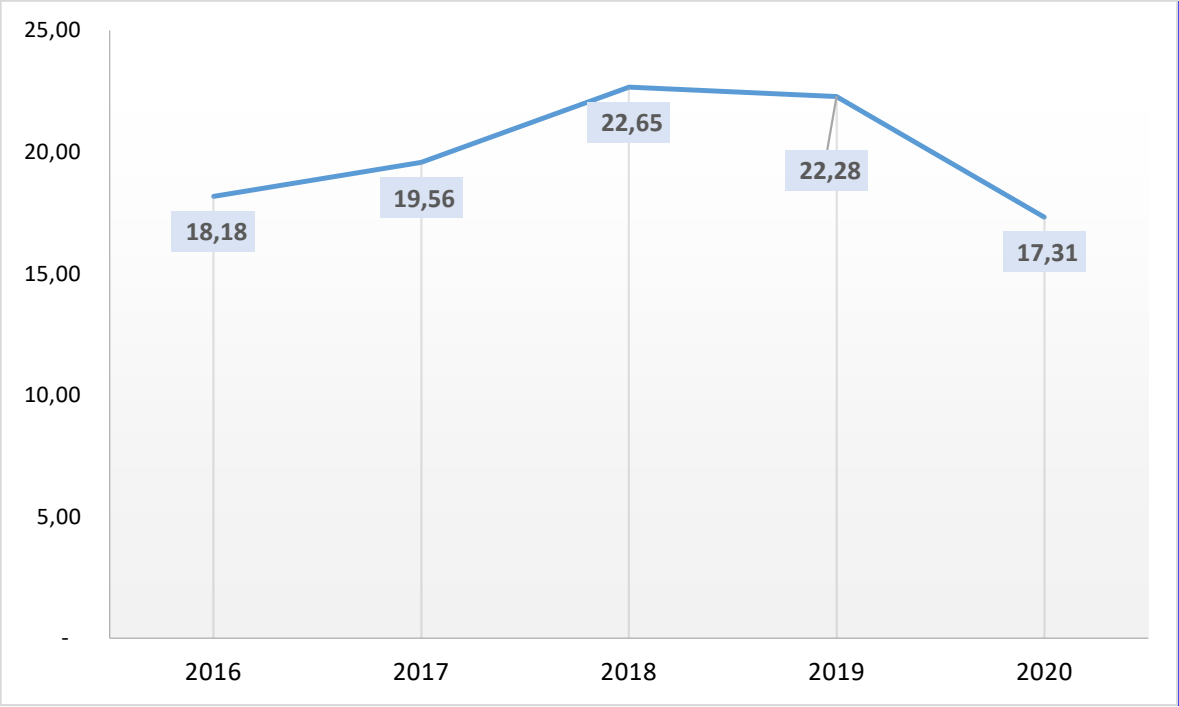
Tax Ratio Kabupaten Boyolali mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun pada tahun 2016 hingga 2020. Angka 0,43 pada tahun 2019 merupakan angka yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pembayaran pajak belum berjalan optimal, data objek pajak belum optimal. Meskipun demikian, angka PDRB tersebut masih sangat sementara sehingga masih memungkinkan untuk berubah persentasenya.

3.4.1.4. Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD

Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator yang mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah dalam rangka pemberian layanan kepada masyarakat. Semakin tinggi realisasi belanja modal terhadap total belanja

daerah maka semakin baik. Berikut ini adalah grafik realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Boyolali.

Grafik 3. 8. Realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



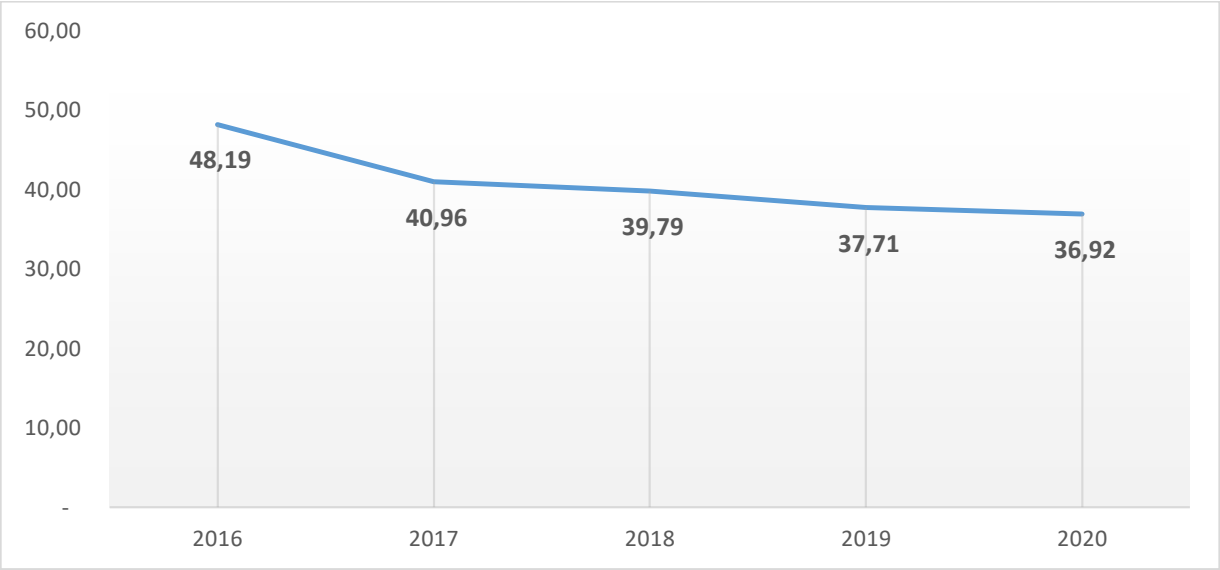
Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Pada tahun 2016 hingga 2019, realisasi belanja modal terhadap realisasi total belanja APBD Kabupaten Boyolali mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi disebabkan oleh tingginya penurunan belanja modal jika dibandingkan dengan realisasi belanja daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya penurunan belanja untuk pelayanan kepada masyarakat.

3.4.1.5. Realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD

Realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD merupakan indikator untuk mengukur seberapa besar porsi belanja pegawai terhadap total belanja. Semakin tinggi porsi belanja pegawai maka kebijakan pengelolaan belanja daerah dinilai kurang proporsional. Hal ini terjadi karena belanja untuk kebutuhan masyarakat akan semakin berkurang. Berikut ini adalah realisasi belanja pegawai terhadap realisasi total belanja APBD.

Grafik 3. 9. Realisasi Belanja Pegawai Terhadap Realisasi Total Belanja APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020



Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan realisasi belanja pegawai terhadap total belanja daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa porsi belanja pemenuhan kebutuhan pegawai semakin menurun. Dengan demikian, maka kebijakan pengelolaan keuangan Daerah sudah berjalan baik karena porsi belanja untuk kebutuhan masyarakat dan pembangunan Daerah semakin meningkat.

3.4.2. Analisis Belanja Daerah

Analisis kinerja belanja daerah bertujuan untuk menyajikan data analisis terkait proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, realisasi belanja pegawai dan analisis pengeluaran periodik, wajib, dan mengikat. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan kebijakan efisiensi dan efektifitas anggaran pada periode ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis proporsi penggunaan anggaran Pemerintah Daerah.

3.4.2.1. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja bertujuan untuk mendapatkan gambaran kinerja pelaksanaan anggaran belanja. Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja merupakan perbandingan antara realisasi dengan anggaran (target), yang kemudian diperoleh tingkat realisasi belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja Daerah tahun 2016-2020.

Tabel 3. 12. Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja dan Proporsi Rata-rata Komponen Belanja Terhadap Total Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016			2017			2018		
		APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%
4	BELANJA	2,207,164,867,000.00	2,057,281,803,196.50	93.21	2,291,888,106,000.00	2,148,428,355,037.00	93.74	2,327,157,536,000.00	2,203,112,762,252.00	94.67
4.1	Belanja Operasi	1,473,104,129,000.00	1,356,128,700,816.50	92.06	1,478,087,784,000.00	1,366,155,429,830.00	92.43	1,454,596,942,000.00	1,360,520,316,489.00	93.53
4.1.2	Belanja Pegawai	1,060,898,073,500.00	991,308,779,124.00	93.44	940,438,036,500.00	879,903,256,401.00	93.56	926,102,447,000.00	876,508,444,540.00	94.64
4.1.3	Belanja Barang dan Jasa	374,919,340,500.00	300,987,886,527.50	80.28	480,750,460,500.00	434,054,107,439.00	90.29	470,504,830,000.00	433,961,804,449.00	92.23
4.1.4	Belanja Bunga									
4.1.5	Belanja Subsidi									
4.1.6	Belanja Hibah	26,336,715,000.00	23,365,711,000.00	88.72	35,209,287,000.00	31,007,099,990.00	88.07	42,094,665,000.00	34,486,830,000.00	81.93
4.1.7	Belanja Bantuan Sosial	10,950,000,000.00	10,147,775,000.00	92.67	21,690,000,000.00	21,190,966,000.00	97.70	15,895,000,000.00	15,563,237,500.00	97.91
4.2	Belanja Modal	396,101,472,000.00	373,915,606,382.00	94.40	443,972,271,000.00	420,149,743,344.00	94.63	521,345,462,000.00	498,972,083,904.00	95.71
4.3	Belanja Tidak Terduga	2,000,000,000.00	-	-	2,050,000,000.00	828,824,278.00	40.43	2,000,000,000.00	912,524.00	0.05
4.4	Belanja Transfer	335,959,266,000.00	327,237,495,998.00	97.40	367,778,051,000.00	361,294,357,585.00	98.24	349,215,132,000.00	343,619,449,335.00	98.40
4.4.1	Bagi Hasil	9,068,266,000.00	8,897,316,650.00	98.11	10,341,662,000.00	5,841,497,000.00	56.49	18,510,930,000.00	14,953,727,000.00	80.78
4.4.2	Bantuan Keuangan	326,891,000,000.00	318,340,179,348.00	97.38	357,436,389,000.00	355,452,860,585.00	99.45	330,704,202,000.00	328,665,722,335.00	99.38

No	Uraian	2019			2020			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proposisi Rata-Rata Realisasi Komponen Belanja terhadap Total Realisasi Belanja (%)
		APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%		
4	BELANJA	2,468,421,561,000.00	2,381,601,864,739.00	96.48	2,413,330,871,634.00	2,339,805,517,025.00	96.95	95.01	100.00
4.1	Belanja Operasi	1,523,194,262,000.00	1,466,732,795,862.00	96.29	1,423,041,795,634.00	1,423,041,795,634.00	100.00	94.86	64.78
4.1.2	Belanja Pegawai	913,647,765,000.00	898,026,621,720.00	98.29	883,726,790,000.00	863,836,702,593.00	97.75	95.54	41.90
4.1.3	Belanja Barang dan Jasa	555,152,262,000.00	514,875,231,142.00	92.74	500,319,274,000.00	463,985,975,237.00	92.74	89.66	19.96
4.1.4	Belanja Bunga								-
4.1.5	Belanja Subsidi								-
4.1.6	Belanja Hibah	39,865,235,000.00	39,492,443,000.00	99.06	81,536,554,000.00	80,007,467,804.00	98.12	91.18	2.22
4.1.7	Belanja Bantuan Sosial	14,529,000,000.00	14,338,500,000.00	98.69	15,347,550,000.00	15,211,650,000.00	99.11	97.22	0.71
4.2	Belanja Modal	555,017,953,000.00	530,593,843,520.00	95.60	450,292,480,000.00	405,110,958,145.00	89.97	94.06	20.71
4.3	Belanja Tidak	2,000,000,000.00	665,277,140.00	33.26	171,884,068,000.00	144,511,572,525.00	84.08	31.56	1.36

No	Uraian	2019			2020			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proposisi Rata-Rata Realisasi Komponen Belanja terhadap Total Realisasi Belanja (%)
		APBD	Realisasi	%	APBD	Realisasi	%		
	Terduga								
4.4	Belanja Transfer	388,209,346,000.00	383,609,948,217.00	98.82	368,112,528,000.00	367,141,190,721.00	99.74	98.52	16.56
4.4.1	Bagi Hasil	15,051,567,000.00	11,021,120,500.00	73.22	12,615,026,000.00	11,993,185,240.00	95.07	80.74	0.49
4.4.2	Bantuan Keuangan	373,157,779,000.00	372,588,827,717.00	99.85	355,497,502,000.00	355,148,005,481.00	99.90	99.19	16.08

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga terjadi pada komponen belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan anggaran belanja sudah baik karena secara umum peningkatan penyerapan belanja maupun komponen belanja sudah di atas 90%.

Selain proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja, penting juga melihat proporsi realisasi masing-masing komponen belanja terhadap total belanja. Hal ini diperlukan karena dapat menggambarkan komponen apa saja yang memiliki proporsi paling besar terhadap total belanja. Berikut ini adalah tabel proporsi realisasi komponen belanja terhadap total belanja.

Proporsi rata-rata realisasi belanja tidak langsung masih menjadi komponen yang paling tinggi terhadap total realisasi belanja, yaitu sebesar 61.47%. Komponen belanja tidak langsung yang paling besar proporsinya adalah belanja pegawai, diikuti belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, dan seterusnya. Sementara proporsi belanja langsung terhadap total realisasi belanja hanya sebesar 38,53%. Komponen belanja langsung yang proporsinya paling tinggi adalah belanja modal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk kebutuhan operasional Pemerintah Daerah masih menjadi alokasi utama belanja, meskipun demikian proporsi belanja modal yang notabene adalah belanja untuk pembangunan dan masyarakat sudah baik, baik dari sisi proporsinya maupun tingkat realisasinya.

3.4.2.2. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Analisis terhadap belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Boyolali sangat penting untuk dilakukan. Analisis tersebut bertujuan untuk mengetahui gambaran riil alokasi anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Hasil analisis yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan prioritas kebijakan alokasi anggaran ke depan. Berikut ini adalah proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 13. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	704,635,406,072.00	613,442,799,913.00	595,534,245,542.00	601,643,224,918.00	584,552,043,761.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	277,727,685,430.00	256,461,199,998.00	269,081,153,597.00	282,685,594,325.00	266,706,059,204.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	3,974,400,000.00	5,173,800,000.00	6,163,200,000.00	8,435,100,000.00	8,508,000,000.00
4	Belanja Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	4,444,834,122.00	4,580,659,990.00	5,642,673,901.00	5,167,372,807.00	4,070,599,628.00
5	Belanja Bahan Pakai Habis	12,401,556,527.00	17,695,933,517.00	14,858,578,955.00	19,669,280,030.00	31,320,720,310.00
6	Belanja Jasa kantor	72,116,692,806.00	94,534,682,024.00	94,389,198,668.00	105,066,603,573.00	61,620,370,261.00
7	Belanja perawatan motor	3,258,881,149.00	3,464,864,706.00	3,759,272,332.00	3,990,658,436.00	2,963,989,148.00
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	5,320,817,450.00	6,072,873,149.00	7,119,466,355.00	7,442,882,142.00	4,159,414,020.00
9	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,075,633,599.00	1,012,869,750.00	1,198,264,650.00	1,578,768,430.00	793,459,350.00
10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kanto	376,567,500.00	315,298,500.00	374,247,250.00	718,601,000.00	59,270,000.00
11	Belanja Honorarium	63,700,367,202.00	73,641,361,754.00	66,325,921,658.00	62,960,102,623.00	56,841,888,199.00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-
13	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	3,895,212,500.00	4,378,908,800.00	4,458,251,170.00	5,209,645,050.00	5,244,712,500.00

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
14	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	3,447,950,000.00	3,510,252,000.00	4,846,734,300.00	13,514,457,868.00	15,465,514,903.00
15	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	11,260,428,325.00	14,342,896,891.00	13,357,565,504.00	16,964,285,909.00	7,308,903,390.00
16	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	479,002,450.00	383,680,750.00	660,234,100.00	679,585,600.00	547,411,925.00
17	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	465,262,600.00	1,068,946,520.00	437,785,200.00	219,964,000.00	253,799,420.00
18	Belanja Perjalanan Dinas	24,197,994,632.00	34,419,864,292.00	32,837,942,015.00	31,978,534,318.00	16,987,118,643.00
19	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	
Total		1,192,778,692,364.00	1,134,500,892,554.00	1,121,044,735,197.00	1,167,924,661,029.00	1,067,403,274,662.00

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemda Kabupaten Boyolali menunjukkan *trend* fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh belanja gaji dan tunjangan serta belanja tambahan penghasilan mengalami penurunan.

Selain analisis terhadap realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, analisis terhadap proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur juga penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengeluaran daerah untuk membiayai kebutuhan aparatur. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dihitung melalui perbandingan total belanja pemenuhan aparatur dengan total pengeluaran daerah. Berikut ini adalah tabel proporsi belanja pemenuhan aparatur.

Tabel 3. 14. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Presentase
1	2016	1,192,778,692,364.00	2,086,513,803,196.50	57.17
2	2017	1,134,500,892,554.00	2,176,121,167,670.00	52.13
3	2018	1,121,044,735,197.00	2,232,344,762,252.00	50.22
4	2019	1,167,924,661,029.00	2,424,152,864,739.00	48.18
5	2020	1,067,403,274,662.00	2,357,539,233,025.00	45.28

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Proporsi belanja pemenuhan aparatur Daerah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi belanja pemenuhan aparatur tersebut mengalami penurunan dengan rata-rata kurang lebih sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa porsi belanja untuk pembangunan dan masyarakat di Daerah mengalami peningkatan.

3.4.2.3. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama ini dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat merupakan

belanja yang wajib dibayar dan tidak dapat ditunda pembayarannya setiap tahun. Sedangkan belanja periodik adalah pengeluaran yang harus dibayar secara periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah. Berikut ini adalah tabel belanja periodik, wajib dan mengikat Pemerintah Daerah.

Tabel 3. 15. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumb uhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
A	Belanja Operasi	1,313,574,987,500.00	1,236,372,157,496.00	1,214,398,048,474.00	1,276,373,867,460.00	1,226,907,293,686.00	(1.61)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	704,635,406,072.00	613,442,799,913.00	595,534,245,542.00	601,643,224,918.00	584,552,043,761.00	(4.42)
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	277,727,685,430.00	256,461,199,998.00	269,081,153,597.00	282,685,594,325.00	266,706,059,204.00	(0.83)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	3,974,400,000.00	5,173,800,000.00	6,163,200,000.00	8,435,100,000.00	8,508,000,000.00	21.76
4	Belanja Bunga	-	-	-	-		
5	Belanja Bagi Hasil	8,897,316,650.00	5,841,497,000.00	14,953,727,000.00	11,021,120,500.00	11,993,185,240.00	26.04
6	Belanja Bantuan	318,340,179,348.00	355,452,860,585.00	328,665,722,335.00	372,588,827,717.00	355,148,005,481.00	3.20
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29,232,000,000.00	24,670,167,821.00	29,232,000,000.00	28,051,000,000.00	14,183,716,000.00	(12.65)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	29,232,000,000.00	24,670,167,821.00	29,232,000,000.00	28,051,000,000.00	14,183,716,000.00	(12.65)
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-		
TOTAL (A+B)		1,342,806,987,500.00	1,261,042,325,317.00	1,243,630,048,474.00	1,304,424,867,460.00	1,241,091,009,686.00	(1.86)

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Dari tahun 2016 hingga 2020, pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Daerah mengalami pertumbuhan negatif, yaitu dengan rata-rata pertumbuhan -1,23%. Belanja operasi dan pembiayaan daerah juga mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu, masing-masing sebesar -1,61% dan -12,65%. Pertumbuhan yang negatif tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pada komponen belanja tambahan penghasilan PNS dan belanja gaji dan tunjangan serta beberapa belanja lainnya.

3.4.3. Analisis Pembiayaan Daerah

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah tahun sebelumnya atau periode sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dilakukan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa akan datang dan untuk menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis realisasi SiLPA, analisis defisit, analisis sumber penutup defisit riil, analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), dan analisis sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

3.4.3.1. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan APBD ke depan. Berikut ini adalah hasil analisis sumber penutup defisit riil.

Tabel 3. 16. Analisis Sumber Penutup Defisit Riil Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Daerah	1,993,495,112,162.00	2,176,496,270,254.00	2,227,780,710,062.00	2,357,487,210,573.00	2,382,403,220,150.00
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2,057,281,803,196.50	2,148,428,355,037.00	2,203,112,762,252.00	2,381,601,864,739.00	2,339,805,517,025.00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29,232,000,000.00	27,692,812,633.00	29,232,000,000.00	42,551,000,000.00	17,733,716,000.00
A.	Defisit Riil	(93,018,691,034.50)	375,102,584.00	(4,564,052,190.00)	(66,665,654,166.00)	24,863,987,125.00
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	235,731,906,707.00	143,082,813,902.50	235,731,906,707.00	153,553,180,773.50	103,935,870,945.00
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		9,500,000,000.00	10,500,000,000.00	7,900,000,000.00	2,750,000,000.00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	261,114,462.00	761,114,433.00	261,114,443.00	2,331,114,443.00	2,261,114,443.00
6	Penerimaan Piutang Daerah					
B.	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	235,993,021,169.00	153,343,928,335.50	246,493,021,150.00	163,784,295,216.50	108,946,985,388.00
A- B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	142,974,330,134.50	153,719,030,919.50	241,928,968,960.00	97,118,641,050.50	133,810,972,513.00

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Hasil perhitungan analisis penutup defisit di atas, menunjukkan bahwa sumber penutup defisit keuangan daerah Kabupaten Boyolali masih berasal dari SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Setelah mengetahui sumber penutup defisit utama, kemudian hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menghitung komposisi penutup defisit riil Kabupaten Boyolali. Berikut ini adalah tabel komposisi penutup defisit riil Kabupaten Boyolali.

Tabel 3. 17. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
A.	Defisit Riil	(93,018,691,034.50)	375,102,584.00	(4,564,052,190.00)	(66,665,654,166.00)	392,005,177,846.00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	253.42	-	5,164.97	230.33	-
2	Pencairan Dana Cadangan			-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-		-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah			-		-
5	Penerimaan Piutang Daerah			-		-
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.36	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	153.70	-	5,300.75	145.68	-

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020.

Dari tahun 2016 hingga 2020, defisit riil Kabupaten Boyolali berada pada tahun 2016, 2018, dan 2019. Defisit riil ini ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun anggaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA memiliki posisi yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali.

3.4.3.2. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam menghitung kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah tabel sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan.

Tabel 3. 18. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Boyolali Tahun Berkenaan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Saldo kas neraca daerah	146,182,635,017.50	153,719,030,919.50	146,431,243,026.50	103,943,445,939.00	133,846,219,768.00
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	142,974,330,134.50	153,719,030,919.50	241,928,968,960.00	97,118,641,050.50	133,810,972,513.00

Sumber: Diolah dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pememerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2020

Sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran Kabupaten Boyolali menunjukkan *trend* fluktuatif dan cenderung meningkat. Kondisi tersebut terjadi karena APBD Kabupaten Boyolali mengalami surplus pada tahun 2020. Dalam konteks penyusunan APBD, angka SILPA seharusnya sama dengan nol. Hal ini dimaksudkan bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

3.5. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 1 periode ke depan. Kerangka pendanaan ini dirancang secara efisien untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif, baik dalam konteks kinerja maupun efisiensi anggaran. Struktur APBD yang digunakan dalam sub bab ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, teknik yang digunakan dalam memproyeksi APBD Kabupaten Boyolali adalah teknik peramalan (*Forecasting*). Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Teknik ini tidak memberikan informasi secara pasti, namun berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik.

3.5.1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Boyolali

Proyeksi APBD Kabupaten Boyolali selama 1 (satu) periode ke depan mempertimbangkan beberapa kondisi, sebagai berikut; *pertama*, *trend* rata-rata pertumbuhan, proporsi, dan tingkat realisasi masing-masing komponen APBD pada periode sebelumnya dan APBD tahun 2021; *kedua*, Persoalan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kemudian membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; dan *ketiga*, melihat potensi perkembangan perekonomian mikro dan makro (tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi) dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada APBD.

Proyeksi APBD Kabupaten Boyolali menggunakan *baseline* APBD murni tahun 2021. Hal ini dilakukan karena dalam APBD tahun 2021 diasumsikan telah disusun dan ditetapkan melalui berbagai pertimbangan, seperti pandemi Covid-19 dan sebagainya. Berikut ini adalah proyeksi APBD Kabupaten Boyolali tahun 2021-2026.

Tabel 3. 19. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

No	Uraian	Baseline	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		APBD Murni 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pendapatan Daerah	2,263,727,502,000.00	2,263,258,508,000.00	2,277,336,038,000.00	2,302,206,938,000.00	2,326,493,304,000.00	2,353,433,800,000.00	0.78
1.1	Pendapatan Asli Daerah	358,772,843,000.00	358,303,849,000.00	372,381,379,000.00	397,252,279,000.00	421,538,645,000.00	448,479,141,000.00	4.60
1.1.1	Pajak daerah	132,050,000,000.00	138,652,500,000.00	145,585,125,000.00	156,504,010,000.00	168,241,809,000.00	180,859,944,000.00	6.50
1.1.2	Retribusi daerah	15,066,745,000.00	12,845,251,000.00	13,305,156,000.00	14,615,171,000.00	15,568,138,000.00	16,168,779,000.00	1.81
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	16,548,499,000.00	16,548,499,000.00	16,548,499,000.00	16,548,499,000.00	16,548,499,000.00	16,548,499,000.00	-
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	195,107,599,000.00	190,257,599,000.00	196,942,599,000.00	209,584,599,000.00	221,180,199,000.00	234,901,919,000.00	3.84
1.2	Pendapatan Transfer	1,823,792,159,000.00	1,823,792,159,000.00	1,823,792,159,000.00	1,823,792,159,000.00	1,823,792,159,000.00	1,823,792,159,000.00	-
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,688,787,062,000.00	1,688,787,062,000.00	1,688,787,062,000.00	1,688,787,062,000.00	1,688,787,062,000.00	1,688,787,062,000.00	-
1.2.1.1	Dana perimbangan	1,435,790,098,000.00	1,435,790,098,000.00	1,435,790,098,000.00	1,435,790,098,000.00	1,435,790,098,000.00	1,435,790,098,000.00	-
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	41,124,437,000.00	41,124,437,000.00	41,124,437,000.00	41,124,437,000.00	41,124,437,000.00	41,124,437,000.00	-
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	976,154,843,000.00	976,154,843,000.00	976,154,843,000.00	976,154,843,000.00	976,154,843,000.00	976,154,843,000.00	-
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	418,510,818,000.00	418,510,818,000.00	418,510,818,000.00	418,510,818,000.00	418,510,818,000.00	418,510,818,000.00	-
1.2.1.2	Dana insentif daerah	36,015,506,000.00	36,015,506,000.00	36,015,506,000.00	36,015,506,000.00	36,015,506,000.00	36,015,506,000.00	-
1.2.1.3	Dana otonomi khusus	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana keistimewaan	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.5	Dana desa	216,981,458,000.00	216,981,458,000.00	216,981,458,000.00	216,981,458,000.00	216,981,458,000.00	216,981,458,000.00	-
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	-
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	135,005,097,000.00	-
1.2.2.2	Bantuan keuangan.	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Baseline	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		APBD Murni 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	-
1.3.1	Hibah	0.00	-	-	-	-	-	
1.3.2	Dana darurat	0.00	-	-	-	-	-	
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0.00	-	-	-	-	-	
1.3.3.1	Pendapatan Hibah Dana BOS	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	81,162,500,000.00	-
2	BELANJA	2,282,488,616,000.00	2,265,308,508,000.00	2,283,336,038,000.00	2,316,943,021,000.00	2,339,993,304,000.00	2,376,933,800,000.00	0.82
2.1	Belanja operasi	1,430,391,981,000.00	1,523,618,669,000.00	1,501,137,428,000.00	1,516,275,899,000.00	1,474,184,131,000.00	1,485,630,288,000.00	0.78
2.1.1	Belanja pegawai	970,353,530,000.00	1,032,836,527,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	0.17
2.1.2	Belanja barang dan jasa	409,296,460,000.00	398,965,030,000.00	461,293,222,000.00	476,431,693,000.00	479,339,925,000.00	490,786,082,000.00	3.79
2.1.3	Belanja bunga		-	-	-	-	-	
2.1.4	Belanja subsidi		-	-	-	-	-	
2.1.5	Belanja hibah	47,328,209,000.00	64,940,312,000.00	52,420,300,000.00	52,420,300,000.00	7,420,300,000.00	7,420,300,000.00	87.26
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3,413,782,000.00	26,876,800,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00	33.02
2.2	Belanja modal	458,698,832,000.00	330,834,622,000.00	387,527,297,000.00	391,849,763,000.00	455,722,737,000.00	479,895,199,000.00	1.35
2.3	Belanja tidak terduga	24,782,250,000.00	35,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	(3.86)
2.4	Belanja transfer	368,595,553,000.00	375,855,217,000.00	374,671,313,000.00	388,817,359,000.00	390,086,436,000.00	391,408,313,000.00	1.25
2.4.1	Belanja bagi Hasil	14,214,051,000.00	15,149,776,000.00	15,889,029,000.00	17,111,918,000.00	18,380,995,000.00	19,702,872,000.00	6.75
2.4.2	Belanja bantuan Keuangan	354,381,502,000.00	360,705,441,000.00	358,782,284,000.00	371,705,441,000.00	371,705,441,000.00	371,705,441,000.00	1.00

No	Uraian	Baseline	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		APBD Murni 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Defisit/Surplus	-18,761,114,000.00	-2,050,000,000.00	-6,000,000,000.00	-14,736,083,000.00	-13,500,000,000.00	-23,500,000,000.00	62.98
3	Pembiayaan Daerah	18,761,114,000.00	2,050,000,000.00	6,000,000,000.00	14,736,083,000.00	13,500,000,000.00	23,500,000,000.00	62.98
3.1	Penerimaan Pembiayaan	31,761,114,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	(5.20)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	(0.00)
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada perusahaan Daerah	8,261,114,000.00	-	-	-	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	13,000,000,000.00	21,450,000,000.00	17,500,000,000.00	8,763,917,000.00	10,000,000,000.00	-	(17.85)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13,000,000,000.00	21,450,000,000.00	17,500,000,000.00	8,763,917,000.00	10,000,000,000.00	-	(18.59)
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-	-

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,78 persen dari tahun 2022 hingga 2026. Komponen pendapatan daerah yang memiliki kontribusi yang paling tinggi adalah PAD. Komponen PAD yang memiliki pertumbuhan yang paling tinggi adalah pajak daerah, yaitu sebesar 6,50 persen. Asumsi peningkatan pajak ini dengan mempertimbangkan trend realisasi pajak daerah pada periode sebelumnya yang sudah tinggi, selain itu kontribusi sumber pajak yang paling tinggi berasal dari PPhTB yang notabene tidak terpengaruh oleh Covid-19 secara signifikan. Selain kedua asumsi tersebut, asumsi lain juga didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah yang diproyeksikan meningkat diangka 3,68 – 6-15 persen pada tahun 2022 hingga 2026. Sementara untuk komponen retribusi daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena masih dalam fase pemulihan. Hal yang sama juga terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang diproyeksikan mengalami stagnan karena investasi pemerintah mengalami penurunan dan kinerja BUMD juga belum berjalan baik karena kondisi Covid-19. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 3,84 persen. Asumsi yang digunakan, yaitu dengan melihat *trend* peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada periode sebelumnya yang tertinggi dibandingkan dengan komponen lain di PAD.

Sementara untuk pendapatan transfer diproyeksikan sama dengan APBD tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Asumsi yang digunakan karena APBN masih difokuskan dalam penanganan Covid-19 yang sampai saat ini belum mengalami penurunan secara signifikan.

Untuk mencapai target-target pendapatan daerah tahun 2022-2026, terutama PAD yang notabene kewenangan daerah, maka upaya atau kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan kapasitas pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Upaya intensifikasi melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil;

6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;

Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui strategi:

1. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
2. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah;

Belanja daerah Kabupaten Boyolali disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan daerah, permasalahan pembangunan daerah, dan memperkirakan situasi dan kondisi di masa mendatang. Berangkat dari hal tersebut, maka proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 0,82 persen atau lebih tinggi dari proyeksi pendapatan daerah di atas. Hal ini terjadi karena kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah lebih bersifat ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah ke depan dan kondisi yang dihadapi saat ini. Komponen belanja daerah yang meningkat paling tinggi adalah belanja modal, diikuti belanja transfer, belanja operasi, dan belanja tak terduga. Tingginya belanja modal ini disebabkan oleh adanya fokus kebijakan untuk masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana sebagai instrument untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Boyolali, seperti menciptakan lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan sebagainya. Sementara belanja tranfer pertumbuhan paling tinggi berada di komponen belanja bagi hasil, yaitu sebesar 6,75 persen, sedangkan belanja bantuan keuangan hanya 1 persen. Belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami peningkatan. Hal ini dilakukan untuk merespon adanya penerimaan CASN tahun 2021. Sementara komponen yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah belanja hibah. Kenaikkan yang signifikan tersebut terutama pada tahun 2023 dan 2024 karena akan dialokasikan untuk Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. Sementara untuk belanja bantuan sosial mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan berjalan stagnan. Hal yang sama juga terjadi pada belanja tak terduga. Asumsi proyeksi belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga ini disebabkan oleh optimisme kasus pandemi Covid-19 akan segera turun secara signifikan terutama pada tahun 2023 dan seterusnya.

Berangkat dari hal tersebut maka kebijakan belanja daerah tahun 2022-2026 diarahkan untuk:

1. Program-program yang langsung mendukung permasalahan daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, kualitas SDM, serta ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana;
2. Memenuhi program-program prioritas kepala daerah berdasarkan visi misi dan terutama yang berasal dari usulan masyarakat;
3. Memenuhi belanja wajib terutama yang berkaitan dengan pemenuhan capaian pada standar pelayanan minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Mengoptimalkan alokasi belanja daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, seperti Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.

Proyeksi pembiayaan daerah mengalami pertumbuhan sebesar 62,98 persen. Untuk penerimaan daerah mengalami pertumbuhan minus 5,20 persen. Pada tahun 2022 hingga 2026, sumber penerimaan pembiayaan hanya berasal dari SiLPA. SiLPA inilah yang kemudian menjadi sumber penutup defisit karena APBD diproyeksikan akan mengalami defisit selama satu periode ke depan karena kebijakan umum keuangan daerah yang bersifat ekspansif. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah hanya dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka untuk memenuhi kewajiban penyertaan modal BUMD. Namun pada tahun 2026, belum ada kebijakan penyertaan modal karena belum ada peraturannya.

3.5.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Pembahasan sub bab ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya dalam 1 (satu) periode ke depan. Dalam menghitung kapasitas riil kemampuan daerah, sebelumnya harus diuraikan terlebih dahulu mengenai proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat. Adapun proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Daerah adalah sebagai berikut.

3.5.2.1. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi terhadap pengeluaran yang bersifat mengikat dan wajib penting untuk dilakukan sebagai bahan untuk menghitung kerangka pendanaan dalam membiayai pembangunan daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan

oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Sementara belanja yang bersifat wajib adalah alokasi anggaran atau belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah proyeksi belanja yang bersifat mengikat dan wajib Daerah.

Tabel 3. 20. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026							
No	Uraian	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2022	2023	2024	2025	2026	
A	Belanja Mengikat	1,340,954,522,250.00	1,348,409,262,000.00	1,353,164,653,000.00	1,358,632,552,000.00	1,364,873,552,000.00	0.44
1	Belanja Pegawai	1,032,836,527,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	-1.32
2	Belanja Barang dan Jasa	308,117,995,250.00	370,035,667,000.00	374,791,058,000.00	380,258,957,000.00	386,499,957,000.00	6.12
B	Belanja Wajib	638,992,423,000.00	633,385,541,000.00	646,126,006,000.00	859,424,714,000.00	755,274,642,000.00	5.51
1	Pendidikan	165,499,357,000.00	165,479,357,000.00	165,479,357,000	165,479,357,000	165,479,357,000	0.00
2	Kesehatan	273,962,697,000.00	281,797,697,000.00	291,439,697,000.00	303,035,297,000.00	316,757,017,000.00	3.70
3	Infrastruktur	194,548,960,000.00	181,127,078,000.00	184,225,543,000.00	246,004,125,000.00	268,056,859,000.00	9.33
4	Pendidikan dan Pelatihan ASN	4,376,116,000.00	4,376,116,000.00	4,376,116,000.00	4,376,116,000.00	4,376,116,000.00	0.00
5	Pengawasan	605,293,000.00	605,293,000.00	605,293,000.00	605,293,000.00	605,293,000.00	0.00
6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	-	-
C	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
2	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	0
TOTAL BELANJA DAN PENGELUARAN WAJIB DAN MENGIKAT		1,979,946,945,250.00	1,981,794,803,000.00	1,999,290,659,000.00	2,078,132,740,000.00	2,120,148,194,000.00	1.74

Proyeksi belanja yang bersifat mengikat mengalami peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan, yaitu sebesar 0.44%. Kenaikan ini terjadi seiring dengan adanya kenaikan pendapatan daerah ke depan. Pertumbuhan belanja pegawai mengalami peningkatan pada tahun 2022 saja. Sedangkan pada tahun 2023 hingga 2026 mengalami stagnan. Untuk belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 6,12 persen. Proyeksi belanja mengikat ini dilakukan dengan asumsi adanya penerimaan CASN tahun 2021 dan akan aktif pada tahun 2022.

Sementara untuk belanja wajib mengalami peningkatan sebesar 5,51 persen. Untuk belanja pendidikan, belanja pengawasan, serta belanja pendidikan dan pelatihan ASN berjalan stagnan karena prioritas daerah lebih pada kesehatan dan infrastruktur. Prioritas pada kesehatan disebabkan karena kasus Covid-19 belum menurun secara signifikan. Sementara untuk belanja infrastruktur dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas pemerintah daerah terkait investasi daerah.

3.5.2.2. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah bertujuan untuk mengetahui gambaran kemampuan riil keuangan daerah yang akan dimiliki untuk membiayai pembangunan Daerah untuk 1 (satu) periode ke depan. Perhitungan kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan mengurangkan penerimaan daerah dengan pengeluaran wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Penggunaan komponen pengeluaran wajib dan mengikat dalam perhitungan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh karena itu, komponen belanja tidak langsung tidak digunakan dalam penentuan kapasitas riil keuangan Daerah ini. Berikut ini adalah proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah ke depan.

Tabel 3. 21. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

No	Uraian					
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2,263,258,508,000.00	2,277,336,038,000.00	2,302,206,938,000.00	2,326,493,304,000.00	2,353,433,800,000.00
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00	23,500,000,000.00
	Total Penerimaan	2,286,758,508,000.00	2,300,836,038,000.00	2,325,706,938,000.00	2,349,993,304,000.00	2,376,933,800,000.00
	Dikurangi					
4	Pengeluaran Wajib dan Mengikat	1,979,946,945,250.00	1,981,794,803,000.00	1,999,290,659,000.00	2,078,132,740,000.00	2,120,148,194,000.00
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		306,811,562,750.00	319,041,235,000.00	326,416,279,000.00	271,860,564,000.00	256,785,606,000.00

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) periode ke depan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan kapasitas riil kemampuan Keuangan Daerah mengalami berjalan fluktuatif dan cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan daerah pada tahun 2025 hanya sebesar 1,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,09 persen. Selain itu, pada tahun 2025 adanya peningkatan belanja wajib secara signifikan di bidang kesehatan dan infrastruktur. Kapasitas riil kemampuan Keuangan daerah ini kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan daerah ke depan di luar pengeluaran wajib dan mengikat.

3.5.2.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan rencana penggunaan kapasitas riil kapasitas Keuangan Daerah selama 1 (satu) periode ke depan. Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) prioritas penggunaan anggaran. Berikut ini adalah tabel rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah.

Tabel 3. 22. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022-2026

Uraian	Proyeksi				
	2022	2023	2024	2025	2026
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2,286,758,508,000.00	2,300,836,038,000.00	2,325,706,938,000.00	2,349,993,304,000.00	2,376,933,800,000.00
Prioritas I	1,979,946,945,250.00	1,981,794,803,000.00	1,999,290,659,000.00	2,078,132,740,000.00	2,120,148,194,000.00
Prioritas II dan III	306,811,562,750.00	319,041,235,000.00	326,416,279,000.00	271,860,564,000.00	256,785,606,000.00

Rencana penggunaan kapasitas riil Keuangan Daerah ke depan di bagi ke dalam 2 (dua) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, yaitu dialokasikan untuk membiayai pengeluaran wajib dan mengikat serta pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas II dan III, yaitu dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah dan membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Alokasi anggaran untuk prioritas II dan III tidak termasuk dalam membiayai anggaran pada komponen prioritas I yang terkait dengan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang alokasinya telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan dalam kebijakan alokasi anggaran Daerah.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab IV RPJMD mencakup identifikasi permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. Penyusunan Bab IV dilakukan melalui analisis atas gambaran umum kondisi daerah yang berisi tentang capaian kinerja pembangunan pada Bab II. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara target di dalam perencanaan dengan realisasi. Adanya permasalahan pembangunan kemudian dielaborasi dengan berbagai lingkungan strategis bersifat yang membawa potensi sekaligus tantangan bagi pembangunan daerah. Lingkungan strategis yang menjadi bahan pertimbangan antara lain isu internasional, nasional, provinsi maupun daerah sekitar Kabupaten Boyolali. Elaborasi antara permasalahan pembangunan di setiap urusan dengan lingkungan strategis menjadi dasar bagi perumusan isu strategis Daerah yang harus diintervensi pada periode pembangunan tahun 2021-2026. Selanjutnya, permasalahan dan isu strategis ini akan menjadi bahan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Daerah.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara yang akan dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sebagaimana uraian pada Bab II, kinerja pembangunan Daerah di satu sisi telah memunculkan *outcome* yang bermanfaat kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, serta memenuhi target kinerja, namun di sisi lain masih terdapat beberapa capaian pembangunan yang belum memenuhi target dan belum tercipta *outcome* yang optimal bagi pemangku kepentingan. Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sehingga penyusunan permasalahan pembangunan daerah disusun menggunakan metode analisis pohon masalah. Dalam metode ini permasalahan diklasifikasikan ke dalam tiga level yang memiliki hubungan kausalitas atau sebab-akibat, yaitu masalah pokok, masalah dan akar masalah. Klasifikasi ini pada tahap selanjutnya akan membantu dalam perumusan intervensi pembangunan mulai dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan atau disebut metode *fold grand cascading*.

4.1.1. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Terkait Pelayanan Dasar

4.1.1.1. Pendidikan

Pelaksanaan urusan pendidikan masih berhadapan dengan dengan masalah pokok yaitu belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan terutama pada tingkat dasar dan menengah. Penyebab utamanya adalah berkaitan dengan belum maksimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD dan juga belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SD dan SMP. Pada tingkat PAUD, akar masalah yang paling menonjol adalah standardisasi pelaksanaan sekolah PAUD yang belum maksimal. Selama ini, pelaksanaan pendidikan tingkat PAUD sebagian besar dilaksanakan oleh pihak non pemerintah. Pada saat yang sama, proses penyediaan sarana dan prasarana serta standardisasi pendidikan oleh dinas belum maksimal. Pada tingkat SD dan SMP, akar masalah utamanya berkaitan dengan kurangnya tenaga pengajar berstatus PNS karena proses sertifikasi yang seringkali terlambat sehingga mendekati usia pensiun. Selain itu, ketersediaan sarana dan sarana sekolah juga memerlukan rehabilitasi karena kualitas yang ada belum setara.

Tabel 4. 1. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah	Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Belum maksimalnya koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non-pemerintah
		Standardisasi penyelenggaraan PAUD belum terlaksana sesuai standar nasional.
		Kurangnya dorongan pemerintah dalam mendorong partisipasi pendidikan PAUD
		Belum optimalnya ketersediaan alat peraga pendidikan tingkat PAUD (alat permainan edukatif, dll)
		Belum optimalnya gedung sekolah PAUD yang memadai
	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan	Belum optimalnya peran guru PNS pada tingkat sekolah dasar karena pengangkatan seringkali mendekati usia pensiun
		Dorongan bagi siswa SMP untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya yang perlu

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dioptimalkan
		Belum optimalnya upaya akselerasi pendidikan dimasa maupun pasca pandemi Covid-19
		Belum optimalnya penerapan pembelajaran berbasis digital
		Belum optimalnya implementasi revolusi mental dalam penyelenggaraan pendidikan
	Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD (perlu pembaharuan)
		Masih adanya sarana pendidikan tingkat SMP yang perlu diperbaharui
		Belum optimalnya upaya pengintegrasian data siswa antara sekolah dan dinas
	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kesetaraan	Cakupan ketersediaan sekolah kesetaraan belum merata
		Belum optimalnya diversifikasi kompetensi pada sekolah penyetaraan

4.1.1.2. Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Kondisi kesehatan masyarakat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, mengingat urusan kesehatan menjadi salah satu komponen yang menunjang ketercapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) baik di level daerah maupun nasional. Upaya pembangunan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Boyolali masih menyisakan beberapa permasalahan umum seperti kematian ibu, kematian bayi, penanganan gizi buruk dan penanganan *stunting*, prevalensi penyakit tidak menular Diabetes melitus, Hipertensi dan penanganan ODGJ. Selain beberapa permasalahan tersebut, bencana global yang terjadi pada tahun 2020 ini menjadi hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di setiap daerah, yaitu terkait pengendalian Covid 19. Penanganan Covid 19 di Kabupaten

Boyolali masih belum optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Berikut adalah rumusan permasalahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 2. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya penanganan gizi buruk dan <i>stunting</i>	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
		Belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap pemenuhan gizi anak
		Akses terhadap fasilitas kesehatan belum optimal
	Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan belum optimal
		Bayi Berat Lahir Rendah masih tinggi
		Sistem rujukan belum optimal
	Tingginya temuan penyakit menular (TBC dan HIV)	Belum optimalnya pemenuhan gizi
		Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
	Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ)	Belum optimalnya pola hidup sehat masyarakat
		Belum optimalnya deteksi dini penyakit tidak menular
		ODGJ seringkali dikucilkan dan kurang mendapat perhatian keluarga
	Masih tingginya angka kesakitan Covid 19	Perilaku masyarakat kurang taat protokol kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Belum optimalnya peran pemerintah dalam menekan angka penularan covid-19
		Masih kurangnya ketersediaan tenaga Kesehatan
		Belum optimalnya peran swasta dalam pembangunan Kesehatan
		Masih kurangnya dokter spesialis karena rendahnya insentif daerah
		Belum tercukupinya ketersediaan dokter dan nakes untuk beberapa poli
		Komitmen dokter PGDS (Pendayagunaan Dokter Spesialis) perlu ditingkatkan
	Rendahnya kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
		Adanya data kependudukan dan data kemiskinan yang belum tersinkronisasi secara berkala
		Pembiayaan pelayanan kesehatan belum optimal

4.1.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Boyolali masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok berkaitan dengan kualitas infrastruktur dasar, air bersih, dan tata ruang. Kualitas infrastruktur dasar belum optimal sehingga masih memerlukan intervensi untuk mengoptimalkan kualitas jalan, jaringan irigasi, dan drainase.

Masyarakat Kabupaten Boyolali juga masih dihadapkan pada terbatasnya akses pada air bersih di beberapa wilayah karena disebabkan oleh kondisi tanah yang bersifat *porous* dan sarana dan prasarana air minum. Jika ditelusuri lebih lanjut, maka ditemukan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh belum optimalnya jaringan air bersih dan belum optimalnya identifikasi sumber air. Di samping itu, kondisi tata ruang juga masih menjadi persoalan di Kabupaten Boyolali karena belum optimalnya perencanaan dan pengendalian tata ruang.

Tabel 4. 3. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Lambatnya rehabilitasi jalan dan jembatan rusak
		Rendahnya ketaatan pengguna jalan terhadap ketentuan muatan maksimal
		Belum optimalnya monitoring dan pengawasan jaringan jalan
	Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi	Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi
	Belum optimalnya kualitas jaringan drainase	belum adanya masterplan pembangunan drainase
		belum tersedianya data yang valid terkait kondisi drainase
	Belum optimalnya kualitas dan pemanfaatan trotoar	Belum optimalnya pembangunan dan pengaturan penggunaan/pemanfaatan trotoar
Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap air baku	Belum optimalnya pembangunan jaringan air bersih	Kondisi tanah yang bersifat <i>porous</i> terutama di wilayah bagian utara
	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air minum	Belum optimalnya identifikasi sumber air

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Masih kurangnya pemahaman atas aturan-aturan yang berlaku tentang rencana tata ruang Kabupaten
		Masih adanya wilayah yang belum memiliki RDTR (belum memadainya SDM dan perangkat analisis)
Belum optimalnya akses terhadap sanitasi layak	Belum optimalnya ketersediaan sanitasi layak	Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya sanitasi sehat dan layak
Belum optimalnya dukungan pelayanan masyarakat secara prima	Belum optimalnya infrastruktur penunjang pelayanan publik	Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

4.1.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masih mengalami permasalahan dalam hal pemenuhan rumah yang layak huni dan masih adanya kawasan kumuh yang belum tertangani. Data pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase rumah layak huni. Meskipun demikian di Kabupaten Boyolali masih terdapat 38.384 unit rumah berkategori tidak layak huni. Sama halnya dengan kawasan kumuh di Kabupaten Boyolali, data menunjukkan dari total kawasan kumuh 48,62 ha hanya tersisa 5,07 ha atau sekitar 10,43% pada tahun 2020. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan karena survei kawasan kumuh hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten melainkan hanya dapat menjangkau 5 kecamatan sehingga masih ada potensi bertambahnya kawasan kumuh di Kabupaten

Boyolali. Tantangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

Tabel 4. 4. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya akses permukiman layak huni	Belum optimalnya akses RLH	Masih terbatasnya ketersediaan data RTLH yang valid
		Belum optimalnya penanganan rehabilitasi rumah korban bencana
		Belum optimalnya fasilitasi rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Masih kurangnya akses terhadap sanitasi layak
		Masih kurangnya akses terhadap air bersih
	Belum optimalnya kualitas lingkungan permukiman	Belum optimalnya ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (listrik)
		Belum optimalnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga lingkungan permukiman agar tidak kumuh

4.1.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Kabupaten Boyolali, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama serta penanggulangan bencana. Pada aspek persentase penegakan produk hukum di Kabupaten Boyolali, terjadi peningkatan setiap tahunnya. Upaya peningkatan penegakan produk hukum selama ini terkendala pada belum optimalnya sinergi kewenangan dan koordinasi antar instansi terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Ketenteraman Ketertiban Umum di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 5. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum maksimalnya penegakan produk hukum (Reklame, PKL, PMKS)	Belum adanya sinergi kewenangan antar Perangkat Daerah	Kurangnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait
		Keterbatasan jumlah PPNS

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang ada
Belum optimalnya kualitas penanganan bencana	Belum optimalnya upaya mitigasi dan penanggulangan bencana	Belum optimalnya pembentukan Desa Tangguh Bencana
		Belum optimalnya program <i>sister village</i>
		Belum optimalnya kesadaran masyarakat terkait kebencanaan
		Belum adanya unit pemadam kebakaran di perwakilan wilayah
		Belum memadainya kapasitas SDM kebencanaan
		Masih terbatasnya sarana prasarana
		Belum memadainya ketersediaan logistik
		Belum optimalnya pemanfaatan Sikabi (Sistem Informasi Kebencanaan)

4.1.1.6. Sosial

Urusan kesejahteraan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Urusan kesejahteraan sosial dicapai melalui penyelenggaraan pelayanan sosial yang terdiri dari 4 pilar yaitu perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum Kabupaten Boyolali sudah melaksanakan fungsi pelayanan sosial, namun upaya tersebut masih perlu untuk ditingkatkan. Dilihat dari persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 3% selama periode 2015-2019. Meskipun mengalami penurunan, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Boyolali masih menunjukkan angka cukup tinggi yakni 65.409 jiwa pada tahun 2019.

Jenis PMKS paling banyak di Daerah diantaranya keluarga miskin, wanita korban kekerasan, tuna tubuh, lanjut usia terlantar, anak terlantar, balita terlantar dan sebagainya. Sedangkan cakupan PMKS yang tertangani

pada tahun 2019 baru mencapai 89,7%. Artinya masih perlu upaya peningkatan cakupan pelayanan PMKS. Di Kabupaten Boyolali terdapat 16 panti sosial dengan jumlah penghuni 432 jiwa, 1 rumah singgah serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebanyak 1.011. Dengan demikian, upaya peningkatan pelayanan sosial dapat dilakukan melalui penambahan/perbaikan sarana prasarana panti sosial/rumah singgah, perbaikan data penerima bantuan sosial, peningkatan kapasitas SDM pengelola, serta optimalisasi kerjasama dengan PSKS. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Tabel 4. 6. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Sosial

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Masih adanya penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran	Validitas DTKS yang masih belum optimal
		Belum optimalnya peranan desa dalam verifikasi dan validasi data
		Belum optimalnya koordinasi dengan instansi vertikal dalam penyediaan data menuju Satu Data Indonesia
		Kurangnya koordinasi lembaga/orang yang terlibat dalam penyaluran bantuan hingga ke tangan masyarakat
		Belum Optimalnya Kapasitas SDM pengelola bantuan sosial
	Banyaknya pengaduan masalah sosial yang belum tertangani (ODGJ, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, pengemis, disabilitas)	Terbatasnya kapasitas panti sosial atau rumah singgah untuk menampung PMKS
		Belum optimalnya kerjasama dengan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam mengatasi masalah sosial
		Belum optimalnya koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam menangani PMKS

4.1.2. Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

4.1.2.1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Boyolali masih belum optimal khususnya dalam serapan tenaga kerja. Data pada tahun 2020, berdasarkan data Boyolali Dalam Angka 2021 (bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional BPS) menunjukkan Tingkat Kesempatan Kerja di Kabupaten Boyolali sebesar 71.15%, nilai ini diperoleh dari data penduduk yang bekerja yang yang berusia 15 tahun keatas yaitu sebanyak 549.582 orang, dibagi jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas yaitu sebanyak 772.466 orang. Selain itu, kualifikasi tenaga kerja yang sedang bekerja pada tahun 2020 didominasi oleh lulusan setara SD sebesar 41,49%, SMP 21,73%, SMK/SMA 29,17%, dan sarjana/diploma 7,61%. Hal tersebut menunjukan masih adanya tantangan untuk menyerap penduduk usia kerja agar mampu bekerja serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja. Maka dari itu, ada beberapa tantangan urusan ketenagakerjaan yang perlu diperhatikan yaitu:

Tabel 4. 7. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Masih adanya kesenjangan kualifikasi/ kompetensi pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia	Belum tersedianya data yang telah divalidasi dan verifikasi tentang ketersediaan tenaga kerja serta kebutuhan lapangan kerja
		Belum optimalnya fasilitasi pelatihan tenaga kerja
		Belum optimalnya fasilitasi bursa kerja bagi pencari kerja
Masih adanya perselisihan industrial antara perusahaan dan karyawan (upah, pesangon, cuti, dll)	Masih adanya perusahaan yang tidak taat terhadap aturan	Belum optimalnya deteksi dini perselisihan hubungan industrial

4.1.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan yang erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender dalam program

pembangunan nasional. Isu tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas hidup perempuan dalam pembangunan. Selain itu, urusan ini memiliki fokus untuk menghapuskan diskriminasi gender serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pembangunan daerah yang memperhatikan isu gender adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain fokus pemberdayaan perempuan, upaya penanganan kekerasan terhadap anak juga masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4. 8. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya fasilitas pendampingan perempuan dan anak	Terbatasnya SDM layanan, sejauh ini hanya dibantu kader-kader yang sifatnya relawan
		Kapasitas kader dalam pendampingan perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya kerjasama antar lembaga dalam pendampingan perempuan dan anak
	Angka pernikahan dini yang cukup tinggi	Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pernikahan
		Angka putus sekolah di daerah Selo cukup tinggi, rata-rata lulus SD langsung menikah
	Belum optimalnya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kondisi orang tua/Keluarga yang rentan
		Pergaulan atau lingkungan yang kurang baik
		Kurang optimalnya peran orang tua dalam mendidik anak

4.1.2.3. Pangan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk dioptimalkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya daerah rawan pangan meskipun dari sisi cadangan pangan tercukupi. Hal lain adalah keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata, belum optimalnya penganekaragaman pangan lokal yang disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah. Rincian mengenai permasalahan pembangunan pada bidang urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih belum optimalnya ketahanan pangan daerah	Masih adanya daerah rawan pangan	Belum optimalnya penanganan daerah rawan pangan
		Perlunya data ketersediaan pangan yang akurat
	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Panjangnya rantai pasok dan jaringan distribusi pangan
		Rendahnya akses pangan pada kondisi tertentu
	Belum optimalnya penganeekaragaman dan keamanan pangan lokal	Belum optimalnya promosi keanekaragaman pangan lokal kepada masyarakat, pengusaha warung makan dan lembaga umum
		Kurangnya pengelolaan lahan pekarangan untuk diversifikasi tanaman pangan
		Sarana dan prasarana untuk menguji keamanan pangan belum memadai
		Belum terlaksananya sertifikasi uji mutu komoditas beras

4.1.2.4. Pertanahan

Penyelenggaraan urusan pertanahan di Kabupaten Boyolali masih dihadapkan pada adanya konflik pertanahan yang belum terselesaikan. Pada tahun 2019, persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan hanya mencapai 62%. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu kurang optimalnya kerjasama antar instansi terkait, tidak tercapainya kesepakatan antar pihak yang bersengketa, dan masih adanya pengelolaan pertanahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun detail pemetaan permasalahan pada bidang urusan pertanahan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan pertanahan	Masih adanya konflik pertanahan	Kurang optimalnya kerjasama antar instansi terkait dalam deteksi dini dan resolusi konflik
		Masih adanya pengelolaan pertanahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.2.5. Lingkungan Hidup

Terciptanya kemajuan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan merupakan salah satu cita-cita pembangunan. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan (pada tahun 2019 IKLH mencapai 60,42 lebih rendah 0,03 poin dibandingkan tahun 2018). Nilai IKLH Kabupaten Boyolali tersebut menempati predikat cukup baik karena berada pada rentang 60-70, sehingga masih perlu ditingkatkan untuk mencapai predikat baik, agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali lebih baik, Beberapa permasalahan yang dihadapi pada bidang urusan lingkungan hidup adalah masih tingginya volume sampah yang belum terkelola dengan baik, masih perlunya peningkatan ketersediaan RTH, dan belum optimalnya pengelolaan limbah ternak dan industri. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup	Volume sampah yang belum tertangani masih tinggi	Kapasitas TPA semakin terbatas
		Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri
	Ketersediaan RTH (Publik) masih rendah	Sulitnya mencari lahan milik pemkab dengan luasan yang memadai
	Masih adanya persoalan pencemaran udara	Belum optimalnya pengendalian atas aktivitas yang mencemari udara
	Belum optimalnya pengelolaan limbah ternak dan industri	Masih terbatasnya kesadaran peternak dalam pengelolaan limbah ternak
		Belum optimalnya pengembangan IPAL Biogas

4.1.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat erat kaitannya dengan penyediaan data kependudukan yang komprehensif sebagai salah satu basis yang digunakan dalam menentukan arah pembangunan daerah. Secara umum, kualitas data kependudukan di Kabupaten Boyolali masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian. Selain itu, adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Boyolali

juga menjadi tantangan tersendiri. Hingga saat ini, data administrasi kependudukan di tiga kecamatan baru yaitu Kecamatan Wonosamodro, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Gladagsari masih belum terselesaikan.

Tabel 4. 12. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan pengadministrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Belum optimalnya kualitas <i>data base</i> kependudukan	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pada peristiwa-peristiwa penting terkait dengan perubahan atau penambahan data pada dokumen kependudukan
		Masih adanya proses pengelolaan data administrasi kependudukan di tiga kecamatan baru (Wonosamodro, Tamansari, dan Gladagsari)

4.1.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Boyolali masih memiliki tantangan berupa peningkatan status desa dari sebagian besar berkembang dan maju menjadi desa mandiri. Optimalisasi potensi desa, penguatan tata kelola pemerintahan desa, serta perluasan Pembangunan Kawasan Perdesaan menjadi agenda mendesak seiring dengan upaya mengurai peta permasalahan sebagai berikut:

Tabel 4. 13. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kemandirian desa	Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa	Perlunya diversifikasi mata pencaharian masyarakat desa
		Pengembangan potensi desa belum optimal
		Belum optimalnya peran pendamping desa
	Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan desa	Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan desa

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Perlunya optimalisasi dan perluasan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Belum optimalnya sarana dan prasarana kawasan perdesaan, misalnya infrastruktur jalan antar desa/kecamatan
		Perlunya sinergi antar perangkat daerah dalam pembangunan kawasan perdesaan dan pembangunan desa

4.1.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan lain yang perlu menjadi fokus pembangunan adalah terkait pengendalian penduduk dan pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan salah satu program nasional yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, kelahiran anak dan menekan angka kematian ibu. Beberapa permasalahan terkait pengendalian penduduk dan KB di Kabupaten Boyolali adalah terkait partisipasi penduduk dalam program KB yang masih rendah. Berikut adalah rumusan masalah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB.

Tabel 4. 14. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Penyelenggaraan program KB	Angka putus pakai (<i>Drop Out</i>) kontrasepsinya masih tinggi	Pemakaian kontrasepsi jangka panjang masih rendah
	Masih tingginya unmeetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	Persepsi masyarakat terhadap KB masih kurang baik
	Peserta KB aktif belum optimal	Data pencatatan belum optimal
		Masih adanya ketidakpahaman masyarakat tentang KB

4.1.2.9. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan sangat erat kaitannya dalam upaya menciptakan kenyamanan dan keselamatan transportasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi tersebut adalah angka kecelakaan. Jumlah kecelakaan di Kabupaten Boyolali fluktuasi selama periode tahun 2015 hingga tahun 2019. Jumlah kecelakaan tertinggi mencapai 1.065 kasus pada tahun 2018. Meskipun demikian

jumlah korban kecelakaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah korban tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1.194 orang. Adapun detail permasalahan pembangunan pada bidang urusan perhubungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan perhubungan darat	Belum optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (terutama PJU)
		Belum memadainya pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan
	Belum memadainya pelayanan transportasi umum	Belum optimalnya kualitas prasarana lalu lintas
		Semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap transportasi umum

4.1.2.10. Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika belum maksimal karena pemanfaatan teknologi informasi belum terintegrasi dengan baik. Selain karena sarana pengelolaan jaringan yang belum memadai juga disebabkan oleh jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi. Beberapa persoalan berkaitan dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi berkaitan dengan jaringan fiber optik yang rawan terkena gangguan karena masih menggunakan jalur atas. Selain itu, jaringan fiber optik juga belum mencakup semua desa sehingga pengintegrasian data masih terfragmentasi.

Tabel 4. 16. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi yang	Sarana pengelolaan jaringan komunikasi belum optimal	Fiber optik masih menggunakan jalur atas sehingga berisiko terkena gangguan
		Data fiber optik masih terbatas dan tersebar di masing-masing internal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
terintegrasi		Perangkat Daerah
		Jaringan fiber optik belum mencakup semua desa
	Belum optimalnya jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi	Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan sistem data belum dilaksanakan
		Penggunaan aplikasi elektronik di kalangan pejabat belum optimal
		Belum adanya sertifikasi PPID

4.1.2.11.Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan sektor yang dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi capaian kinerja dalam urusan koperasi dan UMKM belum menunjukkan kinerja yang optimal. Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi kelembagaan koperasi yang masih memerlukan penataan serta pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Boyolali yang masih terhambat akibat sulitnya perizinan dan juga akses permodalan. Tantangan atau permasalahan kedepan yang dihadapi untuk memperbaiki sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Boyolali antara lain:

Tabel 4. 17. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kapasitas koperasi	Belum optimalnya kualitas kelembagaan koperasi	Masih banyaknya koperasi yang tidak aktif
		Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
	Masih rendahnya kapasitas manajemen keuangan koperasi/ rendahnya proporsi koperasi yang sehat	Belum optimalnya kualitas SDM koperasi
		Adanya kredit yang macet pada koperasi
		Belum optimalnya penilaian kesehatan koperasi secara menyeluruh
		Kurangnya kesadaran koperasi untuk melakukan penilaian kesehatan koperasi
Belum optimalnya kontribusi	Belum optimalnya pertumbuhan dan pengembangan UMKM	Sulitnya mendapatkan standarisasi izin bagi UMKM khususnya standarisasi kesehatan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
UMKM terhadap perekonomian daerah		Rendahnya proporsi UKM yang mendapatkan pelatihan
		Kurang optimalnya pengetahuan dan kemampuan kemandirian berwirausaha
		Kurang optimalnya fasilitasi permodalan

4.1.2.12. Penanaman Modal

Urusan penanaman modal pada periode tahun 2016-2021 masih mengalami fluktuasi terkait realisasi investasi dan jumlah investor, meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2019. Capaian yang menandai kualitas dan akuntabilitas sosial dalam hal perizinan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang mengalami peningkatan 82,19 pada tahun +2018 menjadi 82,24 pada tahun 2019. Urusan penanaman modal menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Boyolali pada beberapa tahun ke depan, oleh karena itu masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diurai untuk melanjutkan arah pembangunan Boyolali yang pro investasi, yaitu:

Tabel 4. 18. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang kondusif	Belum optimalnya penyediaan ruang untuk investasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
		Belum optimalnya penyediaan dan akses peta potensi investasi
	Masih perlunya penciptaan iklim investasi yang ramah lingkungan	Masih perlunya penguatan <i>green company, green strategy, green process</i> , dan <i>green product</i> dalam proses bisnis perusahaan
Masih perlunya penguatan kelembagaan perizinan satu pintu	Masih perlunya penguatan tim teknis perizinan dan satgas percepatan berusaha	Belum optimalnya sinergi antar Perangkat Daerah
	Masih perlunya peningkatan kemudahan perizinan berbasis aplikasi	Masih perlunya peningkatan aplikasi perizinan dan pemantauan proses perizinan

4.1.2.13. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Boyolali. Tantangan terbesar dalam pelaksanaan urusan kepemudaan adalah belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan yang disebabkan oleh pengembangan pemuda yang belum optimal. Hal itu disebabkan oleh pembinaan organisasi pemuda yang belum optimal karena belum mencakup ke seluruh desa. Selain itu, pengembangan pemuda belum diarahkan pada tema-tema yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan masyarakat lokal secara real. Dari sisi keolahragaan, prestasi olahraga Kabupaten Boyolali secara keseluruhan juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya sarana dan prasarana keolahragaan karena persebarannya yang kurang merata dan masih terbatas pada jenis olahraga tertentu. Di samping itu, pengembangan SDM belum optimal karena pembibitan atlet belum terstruktur dengan baik serta belum adanya *event-event* olahraga reguler sebagai sarana pembibitan.

Tabel 4. 19. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Belum optimalnya pendataan organisasi kepemudaan
		Pembinaan organisasi pemuda belum mencakup seluruh desa
		Pengembangan pemuda belum diarahkan secara tematik dan peningkatan keterampilan, misalnya pada isu-isu tertentu yang sifatnya inovatif
		Diversifikasi peran organisasi kepemudaan belum optimal
Perlu ditingkatkannya prestasi olahraga	Sarana dan prasarana keolahragaan belum optimal	Persebaran fasilitas olahraga tidak merata
		Sarana keolahragaan masih terbatas pada olahraga tertentu, seperti sepak bola dan voli
	Pengembangan SDM keolahragaan belum optimal	Pembibitan atlet masih belum terstruktur
		Tidak adanya kompetisi reguler dan berjenjang sebagai sarana pembibitan

4.1.2.14. Statistik

Pelaksanaan urusan statistik di Kabupaten Boyolali masih belum optimal. Hingga saat ini, fungsi statistik melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti tercantum pada tabel di bawah ini, masalah terbesar pelaksanaan urusan Statistik adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi. Penyebab utama dari masalah pokok tersebut yaitu belum optimalnya kapasitas kelembagaan baik dari sisi kewenangan maupun SDM.

Tabel 4. 20. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Statistik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketersediaan data statistik yang terintegrasi	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan statistik	Adanya tumpang tindih kewenangan dengan BPS terutama Seksi Statistik
		Kurangnya kompetensi SDM pengelola statistik
		Belum optimalnya standar pelayanan pengelolaan data statistik sektoral

4.1.2.15. Persandian

Di Kabupaten Boyolali, pelaksanaan urusan persandian juga belum menunjukkan progress yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sama dengan Statistik, urusan Persandian juga masih melekat pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Permasalahan pokok yang ada adalah belum optimalnya layanan persandian akibat dari prosedur penggunaan persandian yang masih minim.

Tabel 4. 21. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Persandian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan persandian	Prosedur penggunaan persandian (seperti tanda tangan elektronik, tata naskah dinas, tanda tangan, kearsipan) belum optimal	Kurangnya SDM yang memadai di bidang persandian
		Masih perlunya penguatan kapasitas dan pemahaman terkait urgensi persandian

4.1.2.16. Kebudayaan

Pada urusan kebudayaan, minimnya upaya menjadikan budaya lokal sebagai katalisator pembangunan daerah menjadi masalah pokok. Hal ini berkaitan dengan bagaimana menjadikan kebudayaan sebagai bahan

pengembangan sektor pariwisata. Upaya ini belum tercapai karena situs-situs kebudayaan belum dijadikan sebagai objek pembangunan pariwisata.

Tabel 4. 22. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perlu ditingkatkannya budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Masih perlu ditingkatkannya fasilitas terhadap kelompok kesenian
		Masih perlunya revitalisasi nilai tradisi
		Belum optimalnya inventarisasi benda cagar budaya
		Belum optimalnya upaya menjadikan cagar budaya sebagai sarana edukasi

4.1.2.17. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan, disebutkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Perpustakaan memiliki andil besar dalam melestarikan hasil karya manusia, baik berupa karya cetak maupun karya rekam lainnya untuk dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas. Secara umum, kinerja layanan perpustakaan di Kabupaten Boyolali sudah cukup baik. Namun, layanan tersebut perlu ditingkatkan dengan mengembangkan perpustakaan berbasis inklusif yakni perpustakaan tidak hanya sebagai tempat membaca tetapi memiliki fungsi lain seperti sebagai tempat diskusi, tempat pelatihan, mini studi dan sebagainya, sehingga semakin memperluas sarana proses belajar masyarakat. Dalam mewujudkan perpustakaan inklusif diperlukan berbagai upaya diantaranya pembangunan sarana prasarana, perluasan layanan, peningkatan kapasitas SDM pengelola dan sebagainya. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Perpustakaan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 23. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pengembangan	Belum optimalnya cakupan layanan perpustakaan	Perluasan fungsi perpustakaan tidak hanya untuk membaca tetapi ada ruang diskusi, mini studio, tempat pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
literasi	yang inklusif	dan sebagainya
		Perlunya pengembangan perpustakaan hingga level desa
		Perlunya perluasan dan penambahan layanan perpustakaan keliling
		Perlunya peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan

4.1.2.18. Kearsipan

Urusan kearsipan diarahkan untuk penyelamatan dan pelestarian arsip daerah serta peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang kearsipan. Arsip sebagai bukti terkait terjadinya peristiwa, kebijakan pemerintah dan sebagainya. Kinerja layanan kerasipan dapat dilihat dari indikator cakupan pengelolaan arsip daerah dan persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Secara umum, kedua indikator tersebut masih belum menunjukkan kondisi yang baik. Hal tersebut dikarenakan belum semua Perangkat Daerah mengirimkan arsipnya untuk dikelola Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sarana prasana kearsipan pada level daerah dan satuan kerja masih terbatas, serta SDM pengelola arsip masih kurang. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Kearsipan di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 24. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sistem kearsipan daerah	Belum optimalnya pengelolaan depot arsip daerah	Terbatasnya ketersediaan depot arsip daerah
		Belum semua dan Perpustakaan memiliki depot arsip yang baik
		Belum ada berita acara dalam penghapusan arsip sehingga banyak arsip menumpuk (belum ada SOP)
		Belum optimalnya sistem perawatan dan pemeliharaan arsip
		Masih kurangnya tenaga arsiparis

4.1.3. **Urusan Pilihan**

4.1.4.1. **Perikanan dan Kelautan**

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor peternakan dan perikanan. Susu dan ikan lele merupakan beberapa produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor peternakan dan perikanan bisa menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Dukungan serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang peternakan dan perikanan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil ternak dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 4. 25. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perikanan dan Kelautan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
Belum optimalnya pemasaran perikanan di dalam daerah	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kesadaran masyarakat tentang gizi/protein hewani belum optimal
		belum optimalnya pengelolaan harga ikan lokal
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Kurangnya ketersediaan bibit ikan	Kapasitas produksi BBI belum optimal
		Kapasitas produksi dari UPR belum optimal
	Besarnya porsi biaya dan tingginya harga pakan	Pabrik pakan skala rumah tangga belum berkembang dengan baik
		Kenaikan harga ikan tidak seimbang dengan kenaikan harga pakan
	Skala Usaha Pembudidaya Ikan	Pembudidaya ikan di Boyolali didominasi oleh pembudidaya skala kecil sehingga porsi biaya tetap yang dikeluarkan menjadi besar.
		Sebagian besar kualitas SDM pembudidaya ikan masih terbatas
	Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya	Prosedur perbankan yang sulit dipenuhi bagi pembudidaya skala kecil
		Tingkat suku bunga kredit yang masih relatif tinggi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Maslaah
	terbatas	
	Akses pemasaran terbatas	Masih rendahnya angka konsumsi ikan
		Daya saing produk olahan ikan masih relatif rendah
		Belum optimalnya pemanfaatan system penjualan <i>online</i>
	Teknologi dan sistem produksi	Akses terhadap teknologi terbatas
		Umumnya masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif.
		Infrastruktur pendukung masih terbatas
	Adanya penurunan kualitas sumber daya perairan umum	Ikan lebih mudah terkena penyakit
		Kematian ikan mendadak dalam jumlah besar akibat perubahan musim
		Terjadi konflik kepentingan dengan pengguna lain

4.1.4.2. Perindustrian

Perindustrian merupakan salah satu sektor unggulan yang menopang perekonomian Kabupaten Boyolali. Sebaran industri terbanyak di Kabupaten Boyolali terdapat di Kecamatan Ampel, Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo dan Kecamatan Banyudono. Permasalahan pembangunan yang dihadapi pada sektor perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 26. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya laju pertumbuhan sektor industri terhadap PDRB	Belum optimalnya pembinaan perindustrian	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar <i>stakeholder</i> untuk pengembangan perindustrian
		Belum optimalnya peruntukan kawasan industri
		Masih adanya industri kecil di kecamatan yang belum terdata
		Kompetensi IKM yang masih perlu ditingkatkan

4.1.4.3. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial di Kabupaten Boyolali terutama di wilayah bagian barat. Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata (KSPN) Candi Borobudur yang saat ini menjadi prioritas nasional. Tingginya potensi tersebut belum diimbangi oleh dua penyebab yaitu minimnya sarana dan prasarana wilayah dan juga belum optimalnya dukungan SDM. Kedua aspek tersebut merupakan hal krusial dalam menopang peningkatan kegiatan wisata di Boyolali. Minimnya sarana dan prasarana pariwisata dapat dilihat dari beberapa penyebab seperti masih terkonsentrasinya destinasi wisata di beberapa titik misalnya di Kecamatan Selo dan Cepogo. Selain itu, destinasi yang ada saat ini masih sulit diakses bagi wisatawan nasional dan juga diversifikasi paket wisata yang masih kurang. Dari sisi dukungan SDM, pengembangan pariwisata masih terkendala oleh masih lemahnya pola pikir pariwisata di kalangan masyarakat. Akibatnya, upaya-upaya menarik wisatawan berbasis desa/komunitas belum berkembang secara maksimal.

Tabel 4. 27. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya potensi kepariwisataan Boyolali sebagai bagian dari KSPN Candi Borobudur	Belum optimalnya pengembangan atraksi, amenitas, akomodasi pariwisata	Belum tersedianya data potensi wisata daerah
		Destinasi wisata yang belum tersebar
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pariwisata
		Paket wisata belum terdiversifikasi
		Belum banyaknya akomodasi pariwisata yang sesuai kebutuhan wisatawan
		Belum optimalnya upaya menarik wisatawan lokal
	Belum optimalnya pengembangan SDM dan kelembagaan pariwisata	Belum optimalnya kompetensi SDM masyarakat desa
		Belum optimalnya integrasi desa wisata dengan pembangunan desa

4.1.4.4. Pertanian

Kabupaten Boyolali merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pada sektor pertanian dan peternakan. Beberapa keunggulan sektor pertanian dan peternakan adalah pada komoditas pertanian pangan,

ternak sapi perah, sapi potong dan jagung hibrida, hortikultura sayuran dan buah-buahan. Sektor pertanian di Kabupaten Boyolali merupakan penyumbang PDRB terbesar dengan capaian rata-rata 35,6% dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,76%. Optimalisasi serta penyelesaian beberapa permasalahan dalam bidang pertanian dan peternakan menjadi penting untuk dilakukan guna mengoptimalkan potensi yang ada. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam bidang ini adalah terkait manajemen pengelolaan produk hasil pertanian dan peternakan dan optimalisasi pemasaran produk hasil ternak.

Tabel 4. 28. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertanian		
Belum optimalnya kesejahteraan petani	Belum optimalnya kualitas hasil pertanian	Belum optimalnya kapasitas SDM petani
		Belum optimalnya peran kelembagaan petani
		Semakin menurunnya jumlah petani
		Ketersedian sarana prasarana pertanian yang masih kurang
		Belum optimalnya penerapan <i>Good Agriculture Practices</i> (GAP) dengan memperhatikan konservasi tanah dan air di lingkungannya.
	Belum optimalnya produktivitas lahan pertanian	Semakin menurunnya tingkat kesuburan tanah
		Belum optimalnya ketersediaan sumber daya air pertanian
		Belum optimalnya penggunaan pupuk berimbang
		Belum optimalnya kepatuhan penerapan pola tanam petani
	Belum optimalnya pemasaran dan diversifikasi produk pertanian	Perlunya peningkatan minat petani dalam mengolah produk hasil pertanian
		Belum optimalnya fasilitasi akses pasar
Peternakan		
Belum optimalnya produksi,	Keterbatasan ketersediaan bibit ternak unggul	Tingkat pengetahuan peternak dalam usaha perbibitan dan manajemen reproduksi ternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak		masih kurang
		Modal usaha perbibitan ternak yang besar
		Belum berkembangnya kawasan peternakan berupa kluster perbibitan ternak
		Keterbatasan jumlah sarana prasarana Inseminasi Buatan
	Belum optimalnya diversifikasi produk olahan susu	Belum berkembangnya usaha susu dan produk olahan susu dan peningkatan nilai tambah susu
	Keterbatasan ketersediaan pakan ternak	Keterbatasan lahan dan persaingan penggunaan lahan dengan tanaman pangan
		Belum optimalnya ketersediaan pakan
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengawetan pakan ternak
	Tingkat pengetahuan dan SDM Peternak belum optimal	Tingkat pendidikan yang rendah dan sebagian pelaku usaha peternakan dalam katageri usia non produktif
		Kurangnya minat generasi muda dalam usaha peternakan
	Skala usaha peternakan belum optimal	Belum optimalnya pendataan kelompok peternak
		Keterbatasan akses modal
		Belum berkembangnya kelembagaan korporasi peternak
		Kurang akuratnya data <i>supply demand</i> produk hasil ternak
		Belum optimalnya peran kelembagaan asosiasi peternak
		Belum optimalnya kemitraan usaha peternakan
	Tingginya risiko kerugian usaha akibat kematian ternak	Kabupaten Boyolali merupakan daerah endemik penyakit hewan menular strategis (PHMS)
		Kurangnya pengetahuan peternak

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dalam penerapan cara budidaya ternak yang baik
		Kurangnya tingkat kesadaran peternak dalam program asuransi ternak
	Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana dan pemanfaatan alat mesin peternakan	Keterbatasan ketersediaan air untuk budidaya ternak
		Belum optimalnya pemanfaatan alat mesin peternakan
		Keterbatasan akses pemasaran produk hasil ternak

4.1.4.5. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis untuk mendukung kelancaran penyaluran barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan. Secara umum, sektor perdagangan di Kabupaten Boyolali belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan perbaikan layanan urusan perdagangan. Selama periode 5 (lima) tahun (2015-2019), kinerja urusan perdagangan cukup baik pada pengelolaan retribusi pasar daerah serta perbaikan sarana prasarana perdagangan (pasar, toko, kios, fasilitas pasar). Namun, untuk masalah ekspor barang dan pembinaan usaha perdagangan masih perlu dioptimalkan.

Tabel 4. 29. Permasalahan Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pembinaan usaha perdagangan	Belum optimalnya pendataan potensi perdagangan
		Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder untuk pengembangan perdagangan
		Perlu peningkatan kapasitas SDM perdagangan
		Fasilitasi izin usaha perdagangan belum optimal
		Masih perlunya peningkatan upaya promosi usaha perdagangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan UPT	Belum optimalnya peningkatan sewa TERA untuk alat ukur
		Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya peningkatan retribusi pasar

4.1.4. Unsur Penunjang, Pendukung, Pengawasan Urusan Pemerintahan, serta Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

4.1.4.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan menentukan efektivitas proses pembangunan dan membawa dampak signifikan bagi penerapan akuntabilitas kinerja di Kabupaten Boyolali. Capaian fungsi perencanaan belum optimal untuk mendukung SAKIP yang masih berpredikat “B” hingga tahun 2020. Orientasi pembangunan berbasis kinerja *outcome/impact* perlu ditingkatkan, serta belum terbangunnya manajemen kinerja yang baik berupa pembagian indikator kinerja yang saling mendukung dan terkait antara Bupati dan Wakil Bupati dengan kepala Perangkat Daerah dan struktur di bawahnya. Beberapa kinerja perencanaan masih berorientasi *output* berupa ketersediaan dokumen perencanaan. Pemetaan permasalahan dalam fungsi perencanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 30. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Perencanaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Belum terbangunnya sistem manajemen kinerja	Pembagian dan sinergi target kinerja antara kepala daerah dengan perangkat daerah belum terbangun
		Indikator kinerja masih banyak berorientasi level <i>output</i> belum <i>outcome/impact</i>
		Penetapan target kinerja dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran
	Belum optimalnya kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja	Belum terbangunnya sistem pengelolaan data kinerja yang baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya sinergi antara <i>e-planning</i> dengan <i>e-kinerja</i>
		Pengendalian dan evaluasi belum mengawal capaian kinerja <i>outcome</i>
	Belum optimalnya implemementasi perencanaan sektoral dan berbasis isu strategis	Belum terbangunnya instrumen pengendalian implementasi, misalnya perencanaan berupa Rencana Aksi Daerah (RAD)
		Perlunya kejelasan tugas dan fungsi antar bidang perencanaan dalam mengawal perencanaan sektoral

4.1.4.2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 PAD di Kabupaten Boyolali terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan 4,32% per tahun. Meskipun demikian, terdapat tantangan untuk mengoptimalkan pendapatan tersebut khususnya yang bersumber dari pajak. Unsur penunjang pemerintahan keuangan juga memiliki isu atau permasalahan urgen berupa upaya mempertahankan capaian akuntabilitas keuangan yang telah mendapatkan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 4. 31. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Keuangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya efisiensi belanja	Masih adanya potensi pendapatan pajak yang tidak terealisasi	Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak
		Masih adanya objek pajak yang belum membayar pajak sesuai ketentuan
		Belum optimalnya data Objek Pajak
		Belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi pelanggar pajak
	Masih adanya potensi penurunan	Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah penghasil

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belanja modal	Belum optimalnya pemanfaatan objek retribusi

4.1.4.3. Kepegawaian

Kepegawaian merupakan urusan krusial dalam upaya peningkatan tatakelola pemerintahan. Di Kabupaten Boyolali, masalah pokok dari urusan kepegawaian, yaitu belum optimalnya kualitas kepegawaian yang disebabkan oleh manajemen kepegawaian yang belum maksimal. Beberapa persoalan mikro yang teridentifikasi antara lain tidak meratanya distribusi pegawai antara Perangkat Daerah, kurangnya SDM di beberapa posisi, serta proses mutasi yang seringkali tidak berjalan lancar.

Tabel 4. 32. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Kepegawaian

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kepegawaian	Manajemen kepegawaian belum optimal	Tidak meratanya distribusi pegawai antar Perangkat Daerah
		Kurangnya SDM di berbagai posisi, misalnya terdapat Kassubag yang tidak memiliki staf
		Proses mutasi yang kadang tidak berjalan lancar

4.1.4.4. Pendidikan dan Pelatihan

Belum optimalnya manajemen ASN, juga terkait belum optimalnya peningkatan kompetensi aparatur. Hal ini antara lain disebabkan oleh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan masih terpusat, serta skala prioritas pelaksanaan diklat yang berubah. Pemetaan masalah terkait pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Boyolali sebagai berikut:

Tabel 4. 33. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kompetensi ASN	Belum optimalnya peningkatan kompetensi ASN	Pelaksanaan diklat terpusat di BKP2D
		Permohonan diklat dari Perangkat Daerah seringkali tidak bisa terakomodir karena skala prioritas yang berubah

4.1.4.5. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan merupakan aspek krusial yang menjadi basis pengambilan kebijakan. Namun demikian, tujuan tersebut belum bisa terwujud karena minimnya ketersediaan hasil penelitian yang bisa dijadikan basis perumusan kebijakan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kapasitas untuk melakukan riset oleh Perangkat Daerah yang mengampu urusan penelitian dan pengembangan. Pada saat yang sama penelitian juga dilaksanakan secara terbagi-bagi/terpecah-pecah di tingkat Perangkat Daerah dengan koordinasi yang lemah. Selanjutnya, rantai persoalan ini menyebabkan kegiatan riset belum sepenuhnya menjadi dasar perumusan kebijakan. Dalam perumusan kebijakan juga dibutuhkan kemampuan inovasi daerah. Hingga saat ini inovasi yang dihasilkan di Boyolali masih perlu ditingkatkan. Adanya lomba kreasi dan invonasi belum sepenuhnya berhasil ditindaklanjuti ke tahapan yang lebih praktis. Inovasi oleh masyarakat juga belum sepenuhnya dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah karena lemahnya sumber daya manusia.

Tabel 4. 34. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya pengembangan penelitian dan inovasi	Minimnya ketersediaan hasil penelitian untuk basis perumusan kebijakan	Masih minimnya kegiatan penelitian karena tidak adanya SDM fungsional peneliti
		Tidak adanya hasil penelitian yang terstruktur karena penelitian masih tersebar di tingkat Perangkat Daerah
		Belum optimalnya koordinasi kelitbangan
	Belum optimalnya inovasi daerah	Belum optimalnya tindaklanjut dari Kreasi dan Inovasi (KRENOVA)
		Belum adanya fasilitasi pendaftaran HAKI
		Belum optimalnya fasilitasi pengembangan inovasi masyarakat

4.1.4.6. Pengawasan

Capaian fungsi pengawasan di Kabupaten Boyolali telah memenuhi target nasional, yakni Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang berada di Level 3. Capaian tersebut diperkuat dengan peningkatan integritas aparatur yang ditandai dengan transparansi kegiatan dan kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk penguatan fungsi pengawasan di masa depan, yaitu:

Tabel 4. 35. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya penguatan sistem dan aparatur pengendalian intern pemerintah	Masih perlunya penguatan kelembagaan SPIP	Masih perlunya peningkatan kinerja satgas SPIP di level Kabupaten dan Perangkat Daerah
		Masih perlunya pemantauan tahapan penerapan SPIP
Masih perlunya penguatan integritas di lingkungan pemerintah daerah	Belum optimalnya Perangkat Daerah yang mencanangkan dan menerapkan zona integritas dan WBK/WBBM	Belum optimalnya asistensi kepada setiap Perangkat Daerah
	Masih perlunya penguatan akses dan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Masih perlunya penguatan penerapan <i>whistle blowing system</i>

4.1.4.7. Sekretariat DPRD

DPRD merupakan mitra Bupati dan Wakil Bupati yang berkedudukan sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Dalam melaksanakan fungsinya, DPRD difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Adapun tugas Sekretariat DPRD diantaranya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD. Secara umum, kinerja capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali cukup baik yakni sudah mencapai target yang ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan tugas fasilitasi masih mengalami beberapa kendala seperti manajemen internal di sekretariat DPRD, kinerja anggota Dewan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. Berikut adalah rumusan permasalahan terkait urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 36. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya fasilitasi anggota dewan	Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota	Manajemen pembagian tugas yang kurang efektif
		SDM aparatur Setwan yang perlu ditingkatkan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dewan	Belum memiliki staf khusus dibidang IT untuk mengelola aplikasi ASPIRA (dari masyarakat untuk anggota dewan)
		Belum optimalnya fasilitasi peningkatan kapasitas anggota dewan berbasis kebutuhan daerah

4.1.4.8. Sekretariat Daerah

Fungsi yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah terkait dengan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati. Fungsi tersebut menopang kualitas tata kelola pemerintahan yang berjalan di Daerah. Beberapa capaian kinerja yang menandai kualitas tata kelola pemerintahan belum optimal, antara lain terkait Nilai Reformasi Birokrasi dan penerapan SAKIP. Adapun koordinasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik telah menghasilkan nilai IKM yang meningkat setiap tahun. Tantangan yang masih dihadapi fungsi Sekretariat Daerah, yaitu:

Tabel 4. 37. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pendukung Sekretariat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Belum optimalnya penerapan komponen pengungkit reformasi birokrasi	Belum optimalnya pelembagaan dan sinergi antar perangkat daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi
		Masih perlunya peningkatan pengendalian kualitas pelayanan publik
	Belum optimalnya penerapan SAKIP	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penerapan kebijakan daerah	Belum optimalnya koordinasi antar perumus kebijakan/produk hukum daerah	Belum optimalnya koordinasi antar Perangkat Daerah
		Masih perlunya asistensi Setda kepada perangkat daerah pengusul kebijakan
	Belum optimalnya pengendalian kebijakan	Masih adanya tumpang tindih kewenangan antara struktur Bagian Setda dengan Perangkat Daerah teknis. Belum adanya instrumen

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengendalian dan pengukuran keberhasilan kebijakan
	Belum optimalnya kualitas pelayanan <i>e-procurement</i>	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi proses pengadaan barang dan jasa di setiap satuan kerja
		Standar pelayanan yang kurang sederhana
		Belum optimalnya kuantitas dan kompetensi petugas pelayanan
	Belum optimalnya diseminasi informasi publik	Belum optimalnya jumlah media sebagai sarana diseminasi informasi publik

4.1.4.9. Kewilayahan

Fungsi kewilayahan yang dijalankan oleh kecamatan, salah satunya dalam rangka menopang kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh kecamatan telah menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagai instrumen pengendalian kualitas pelayanan dan bentuk akuntabilitas sosial. Capaian IKM di seluruh kecamatan mengalami peningkatan setiap tahun. Adapun yang masih menjadi kendala terkait implementasi fungsi kecamatan, yakni dalam rangka asistensi pembangunan desa, terutama dalam menyusun database pembangunan desa. Beberapa permasalahan terkait fungsi kecamatan yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

Tabel 4. 38. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Kewilayahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Masih perlunya penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	Masih perlunya SKM secara reguler sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan
	Belum optimalnya pelayanan kependudukan di kecamatan baru	Belum optimalnya pendistribusian sarana dan prasarana pelayanan
Masih perlunya penguatan fungsi pemberdayaan masyarakat dan	Belum optimalnya asistensi pembangunan desa berpijak pada	Belum optimalnya pemutakhiran <i>database</i> pembangunan desa
		Masih perlunya peningkatan asistensi penyusunan dan evaluasi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
asistensi pembangunan desa	<i>evidence based</i>	atas perencanaan dan penganggaran desa
Belum optimalnya pengembangan potensi kewilayahan	Belum optimalnya fungsi koordinasi kewilayahan	Belum optimalnya peran kecamatan sebagai instansi terdepan dalam menyusun peta masalah dan potensi kecamatan

4.1.4.10. Pemerintahan Umum-Kesatuan Bangsa dan Politik

Urusan pemerintahan umum terkait pelaksanaan unsur kesatuan bangsa dan politik, sehingga terkait upaya membangun kohesivitas sosial dan peningkatan demokrasi dan kehidupan politik yang kondusif di daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Boyolali memiliki beberapa tantangan sebagai berikut:

Tabel 4. 39. Permasalahan Pembangunan Daerah Unsur Pemerintahan Umum

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Belum optimalnya deteksi dini dan kewaspadaan dini gangguan stabilitas wilayah	Minimnya SDM untuk deteksi dan kewaspadaan dini
		Belum optimalnya pendataan dan peran Ormas
		Pengembangan nilai-nilai kebangsaaan dan multikulturalisme yang belum efektif

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis selain menggambarkan berbagai permasalahan dan peluang pembangunan yang berbasis kewenangan dan urusan daerah, juga menggambarkan lingkungan strategis supra daerah yang meliputi dinamika lingkungan skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang.

4.2.1. Isu Internasional

Kondisi global yang dinamis memunculkan berbagai isu internasional yang harus direspon pemerintah nasional maupun sub nasional di berbagai negara. Terdapat isu yang berangkat dari kesepakatan internasional berupa SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang secara nasional telah direspon dengan kebijakan berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, kondisi global yang dinamis tercermin dari revolusi industri 4.0 yang membawa peluang sekaligus tantangan bagi komponen masyarakat maupun institusi pemerintah untuk meresponnya dengan mengedepankan digitalisasi yang menekankan efektivitas dan efisiensi. Kondisi global semakin dinamis bahkan berdampak besar dengan adanya Pandemi Covid-19. Seluruh level pemerintahan terdampak, dimana terdapat tuntutan penanganan pandemi agar tidak semakin berdampak kepada kesehatan masyarakat maupun tuntutan pemulihan perekonomian nasional dan daerah.

4.1.4.11. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kesepakatan global sebagai tindak lanjut dari *Milennium Development Goals*. *Sustainable Development Goals* (SDGs) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Sustainable Development Goals* (SDGs) memuat 17 tujuan pembangunan yang meliputi berbagai aspek pembangunan berkelanjutan, yang terdiri dari empat pilar yaitu 1) Pembangunan Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; 4) Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuh belas tujuan SDGs dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu. Target-target SDGs tersebut menjadi mandat internasional yang bukan hanya harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, tetapi juga harus diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten. Oleh karena itu, evaluasi mengenai pencapaian target-target SDGs perlu dilakukan secara berkala. Adapun rekap capaian target-target SDGs di Kabupaten Boyolali berdasarkan tujuannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 40. Rekap Capaian Target-Target SDGs di Kabupaten Boyolali							
No	TPB	Indikator	Kategori				
			SS	SB	TT	NA	TKD
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23	9	8	1	5	0
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	10	1	0	0	0
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	21	10	0	0	3
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13	6	4	1	2	0
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	8	4	0	2	0
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	16	5	4	4	1	2
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2	1	0	1	0	0
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	6	3	1	9	0
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh,	12	4	1	3	3	1

No	TPB	Indikator	Kategori				
			SS	SB	TT	NA	TKD
	Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi						
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	7	2	2	1	2	0
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	8	4	0	1	3	0
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5	1	1	2	1	0
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2	0	0	1	1	0
14	Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan	0	0	0	0	0	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4	2	0	0	2	0
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di	21	12	4	3	2	0

No	TPB	Indikator	Kategori				
			SS	SB	TT	NA	TKD
	Semua Tingkatan						
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	15	10	4	0	1	0
Jumlah		206	101	46	19	34	6
%			49,03	22,33	9,22	16,50	2,91

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali, 2020

Keterangan

SS = Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target

SB = Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target

TT = Belum dilaksanakan

NA = Belum ada data

TKD = Tidak sesuai dengan kewenangan daerah

4.1.4.12.Revolusi Industri 4.0

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi atau dikenal sebagai revolusi industri 4.0 yang semakin massif dewasa ini memberikan dampak signifikan bagi sektor publik. Banyak pihak memprediksi bahwa kekuatan revolusi industri 4.0 akan mampu meningkatkan otonomi warga negara dan juga mendisrupsi praktik-praktik tradisional dalam berpemerintahan. Sebagai contoh, warganegara mempunyai akses yang lebih luas terhadap data-data publik dan mampu memproduksi serta menyebarkan isu-isu publik ke khalayak. Pada saat yang sama, ekspektasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga semakin meningkat akibat adanya tuntutan efisiensi dan kecepatan pelayanan, otomatisasi pelayanan publik, serta penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek pembangunan.

Pada akhirnya, hadirnya revolusi industri 4.0 menghadirkan tantangan yang lebih kuat bagi sektor-sektor publik terutama dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan di Indonesia. Salah satu poin paling krusial dari revolusi industri 4.0 adalah proses digitalisasi. Proses digitalisasi termasuk penggunaan teknologi dalam berbagai sektor pembangunan dan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan,

perdagangan, perindustrian, perizinan, pariwisata dan sektor lainnya. Berkaitan dengan itu, pemerintah pusat telah menjadikan digitalisasi sebagai suatu katalisator dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Pada akhir tahun 2020, *Asian Development Bank* (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masingnya sebesar 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Data lain juga disebutkan berdasarkan *E-Government Survey 2020* yang dilakukan oleh *United Nations* mencatat bahwa tingkat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indonesia berada pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Dengan demikian, dari sisi daya saing penyelenggaraan *e-government* di Indonesia masih berada di bawah negara-negara lain di ASEAN.

Kebijakan transformasi digital di Indonesia diarahkan pada dua sektor prioritas yaitu pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Transformasi digital dalam pelayanan publik bersinggungan dengan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan publik berbasis elektronik atau yang dikenal sebagai *e-government*. Kebijakan pemerintah berbasis elektronik sudah digulirkan jauh sebelum isu digitalisasi di Indonesia muncul menjadi agenda publik. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pengembangan *e-government* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik.

Transformasi digital pada bidang ekonomi juga telah digalakkan pemerintah pusat melalui berbagai instrument kebijakan. Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dengan pengguna internet yang terus mengalami kenaikan. Ada lima teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, kelima hal tersebut yaitu *mobile internet*, *big data*, *internet of things*, *automation of knowledge*, dan *cloud technology*. Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada tahun 2030. Selain itu,

besarnya potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 10% PDB pada tahun 2025.

Namun demikian, potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena beberapa tantangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal menyebut setidaknya terdapat 5 Tantangan Digital Ekonomi di Indonesia dari perspektif investasi yaitu: 1) *cyber security* atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan jaringan internet; dan 5) regulasi yang belum *agile* dan mengikuti perkembangan jaman.

Pada level daerah, digitalisasi pelayanan publik dan digitalisasi ekonomi juga memberikan tantangan dan peluang. Di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan perizinan yang lebih responsif. Namun demikian, tantangan pada sisi infrastruktur dan kesiapan SDM juga menjadi hal yang harus diintervensi. Demikian halnya dengan peluang ekonomi digital yang terus tumbuh di daerah. Problem terbesar yang dihadapi adalah kualitas SDM dan juga jaringan internet yang tidak memiliki kualitas setara di berbagai daerah. Dengan demikian, isu ini harus menjadi pedoman bagi daerah dalam perumusan isu dan kebijakan strategis di masa yang akan datang.

4.1.4.13. Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada permasalahan kesehatan yaitu Covid-19 yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas (kontraksi) sosial dan juga perekonomian. Pada awal Maret tahun 2020, WHO menyatakan Covid-19 sebagai suatu pandemi yang harus direspon dan dicegah secara baik di seluruh dunia. Akibatnya pada semester I tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 yang memerlukan pembatasan fisik (*physical distancing*) dan pembatasan sosial (*social distancing*) yang berpengaruh pada aktivitas sosial dan juga perekonomian secara nasional.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 November 2020, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah di triwulan III tahun 2020 dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2019 (YoY) negatif 3,93%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2020 (q-to-q) pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 4,66%. Hal tersebut menunjukkan adanya sinyal

positif perbaikan perekonomian setelah diterapkannya kebijakan *new normal*. Meskipun demikian, perlu adanya suatu kebijakan dan respon khusus daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pasalnya, belum ditemukannya vaksin dan pertumbuhan kasus aktif secara nasional masih terus mengalami peningkatan sehingga tidak menutup kemungkinan Pandemi Covid-19 akan menimbulkan efek yang lebih parah sehingga dapat mempengaruhi rencana pembangunan daerah.

Tabel 4. 41. Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Triwulan III-2020 terhadap Triwulan III-2019

Sektor yang cenderung mengalami kontraksi selama masa pandemi Covid-19 (y-on-y)	Sektor yang mengalami pertumbuhan selama masa pandemi Covid-19 (y-on-y)
1. Industri Pengolahan; 2. Konstruksi; 3. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 4. Transportasi dan Pergudangan; 5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; 6. Real Estate; 7. Jasa Perusahaan; 8. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; 9. Jasa Pendidikan; dan 10.Jasa Lainnya.	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 2. Pertambangan dan Penggalian; 3. Pengadaan Listrik, Gas; 4. Pengadaan Air; 5. Informasi dan Komunikasi; 6. Jasa Keuangan; 7. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Tabel tersebut menunjukan bahwa kondisi yang sama pada tahun lalu sebelum terjadinya Pandemi Covid-19 dan kondisi saat ini ketika sudah ada pandemi Covid-19 menunjukan ada beberapa sektor usaha yang mengalami kontraksi serta ada yang mengalami pertumbuhan. Namun secara umum, Pandemi Covid-19 menyebabkan lebih banyak penurunan sektor usaha dibandingkan peningkatan atau pertumbuhan. Sektor usaha yang paling terdampak oleh Covid-19 yaitu Industri Pengolahan (-7,01%), Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (-7,10%), Transportasi dan Pergudangan (-37,68%), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (-7,34%), Jasa Perusahaan (-10,66%), dan Jasa Lainnya (-8,80%). Sedangkan sektor usaha yang mengalami peningkatan signifikan di masa Pandemi Covid-19 yaitu Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan (6,39%), Informasi dan Komunikasi (18,96%), dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,43%).

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi tentunya akan menyebabkan berbagai permasalahan lain yang saling berkaitan seperti peningkatan tingkat pengangguran terbuka yang akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Boyolali, peningkatan tingkat inflasi, dan ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tentunya perlu kebijakan khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang sifatnya preventif dan responsif sehingga berbagai dampak negatif dari pandemi Covid-19 bisa lebih diminimalkan. Dengan demikian, Covid-19 merupakan isu krusial yang harus menjadi perhatian dalam perumusan dokumen perencanaan hingga lima tahun ke depan.

4.2.2. Isu Nasional di dalam RPJMN 2020-2024

Isu strategis nasional tidak lepas dari Arahannya Presiden Republik Indonesia sebagai dasar penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu:

1. **Pembangunan SDM:** membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri.
2. **Pembangunan Infrastruktur:** melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi:** menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* terutama menerbitkan 2 undang-undang, yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKMs.
4. **Penyederhanaan Birokrasi:** memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi:** melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lima Arahannya Presiden diinstrumentasikan ke dalam 7 Agenda Pembangunan dan masing-masing agenda pembangunan memiliki lingkungan dan isu strategis sebagai berikut:

Tabel 4. 42. Tujuh Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan: Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	• Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan • Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital	• Keberlanjutan dan ketersediaan SDA sebagai modal utama pembangunan makin berkurang. • Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi menghadapi tantangan terkait daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, keterbatasan infrastruktur, penataan ruang, serta kesejahteraan petani-nelayan dan masyarakat yang bergantung penghidupannya pada pemanfaatan SDA • Transformasi struktural berjalan lambat, yaitu Indonesia belum mampu melanjutkan transformasi sosial ekonomi yang terhenti akibat krisis moneter • Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, yaitu Indonesia memiliki keunggulan dalam hal harga, namun tertinggal dalam infrastruktur serta kesiapan dan pemanfaatan oleh masyarakat dan institusi pemerintahan.
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan: Bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan	• Pengembangan sektor/komoditas/ kegiatan unggulan daerah • Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang • Penguatan kemampuan SDM	• Tingginya angka kemiskinan di wilayah timur Indonesia (18%) • Masih adanya ketimpangan pendapatan dengan rasio gini perdesaan 0,317 dan perkotaan 0,392 • Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi di Kawasan Barat Indonesia, terutama Pulau Jawa • Terbatasnya sarana prasarana, aksesibilitas, dan belum

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	dan Iptek berbasis keunggulan wilayah • Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata • Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	optimalnya pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal, desa, kawasan pedesaan, kawasan transmigrasi, dan kawasan perbatasan
3	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing: Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	• Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan • Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial • Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta • Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas • Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda • Pengentasan kemiskinan • Peningkatan produktivitas dan daya saing	• Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan bonus demografi, jika tidak dikelola baik dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran, konflik sosial, serta tekanan pada pangan dan lingkungan • Kesejahteraan penduduk meningkat, namun jumlah penduduk yang rentan jatuh miskin saat terjadi guncangan masih cukup tinggi • Derajat kesehatan dan tingkat pendidikan membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk • Perlindungan dan pemenuhan hak anak belum optimal, kesenjangan gender masih relatif tinggi dan kelembagaan PUG belum efektif, serta peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal, serta sebagian memiliki perilaku beresiko • Elastisitas terhadap tingkat

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			kemiskinan menurun sehingga laju penurunan kemiskinan cenderung melambat • Produktivitas dan daya saing yang masih perlu ditingkatkan. Peringkat SDM Indonesia 65 dari 130 negara
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan: Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	• Revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila • Pemajuan dan pelestarian kebudayaan • Moderasi beragama • Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas	• Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa • Belum optimalnya pemajuan kebudayaan Indonesia • Belum mantapnya pendidikan karakter dan budi pekerti • Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama • Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan • Belum optimalnya peran keluarga • Rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar: bertujuan mendukung aktivitas	• Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar • Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi • Pembangunan infrastruktur	• Keterbatasan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau • Belum optimalnya peningkatan akses air minum layak dan aman • Belum optimalnya peningkatan akses layanan sanitasi layak dan aman • Pengelolaan air tanah dan air

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
	perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	perkotaan • Pembangunan energi dan ketenagalistrikan • Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital	baku berkelanjutan yang masih menghadapi tantangan tingkat layanan penyediaan, kuantitas dan kualitas air, dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin air baku • Keselamatan dan keamanan transportasi yang masih menghadapi permasalahan tingginya angka kematian akibat kecelakaan • Ketahanan kebencanaan infrastruktur • Waduk multiguna dan modernisasi irigasi yang menghadapi tantangan kapasitas tampungan air masih rendah karena terbatasnya jumlah bendungan, embung, dan penampung air lainnya • Infrastruktur ekonomi yang menghadapi tantangan pada aspek konektivitas jalan, kereta api, laut, udara, dan darat • Infrastruktur perkotaan yang masih menghadapi tantangan: transportasi perkotaan; energi dan ketenagalistrikan perkotaan; infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan; penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman di perkotaan; serta penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, terjangkau di perkotaan. • Energi dan ketenagalistrikan yang menghadapi tantangan keberlanjutan penyediaan, akses dan keterjangkauan,

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
			serta kecukupan penyediaan Transformasi digital memiliki tantangan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta fasilitas pendukung transformasi digital
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim: Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana dan perubahan iklim	- Peningkatan kualitas lingkungan hidup - Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim - Pembangunan rendah karbon	- Tren IKLH nasional menunjukkan kualitas air semakin memburuk, kualitas udara secara absolut menurun, dan tutupan lahan mengalami perbaikan - Indonesia memiliki riwayat kejadian bencana yang tinggi - Penurunan emisi gas rumah kaca yang mendekati target
7	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik: Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan berkualitas - Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan - Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola	- Dinamika geopolitik global, antara lain depolarisasi pusat gravitasi politik internasional, instabilitas kawasan Timur Tengah, dinamika kebijakan luar negeri negara adidaya, melemahnya tata kelola global dan menguatnya uniteralisme - Tantangan nasional berupa demokrasi prosedural, kompleksitas pelayanan birokrasi dan penegakan hukum, perilaku koruptif, potensi ancaman kedaulatan negara, dan kecenderungan meningkatnya kejahatan

No	Agenda Pembangunan	Uraian	Lingkungan dan Isu Strategis
		keamanan siber • Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi • Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri • Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industri pertahanan	transnasional

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023

Isu strategis Provinsi Jawa Tengah di dalam RPJMD 2018-2023, yaitu:

- 1. Penanggulangan kemiskinan:** sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah didominasi wilayah pedesaan sebesar 12,8%, sedangkan di perkotaan 9,67%. Tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan, terutama dari kelompok petani (buruh petani, petani gurem, dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan nelayan kecil). Adapun tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada di 40% penduduk berpendapatan terbawah adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh, usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga, serta penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar; lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan; ketidakberdayaan, keterisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, dan munculnya gejala kultur komodifikasi data; adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan dan lokasi intervensi; serta dimensi politik dengan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum optimal.
- 2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia:** capaian IPM Provinsi Jawa Tengah sampai 2017 sebesar 70,52 yang masih berada di bawah capaian nasional sebesar 70,81. Beberapa

tantangan yang mendesak ditangani adalah sistem pendidikan yang dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah, serta memperkuat pendidikan budaya dan karakter; pemanfaatan bonus demografi untuk percepatan pembangunan daerah, serta sebagai angkatan kerja yang berkualitas dan berdaya saing; angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dari daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi; ancaman yang bersifat nasional berupa melemahnya pemahaman budaya bangsa dan kebinekatunggalikaan, munculnya radikalisme dan terorisme, ancaman kekerasan terhadap perempuan dan anak, peredaran NAPZA, serta tantangan internalisasi nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha:

ekonomi Jawa Tengah dalam konteks nasional dinilai baik dengan tiga sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, pertanian, serta perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi dalam pengembangan tiga sektor tersebut, yakni: industri pengolahan didominasi oleh industri padat karya di tengah perkembangan menuju industri 4.0 dan ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor; sektor perdagangan dan jasa memiliki tren meningkat namun menghadapi masalah defisit neraca perdagangan; sektor produksi didominasi oleh UMKM yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha; perlunya pengembangan sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi baru; sektor pertanian yang menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah menghadapi persoalan kurangnya minat angkatan kerja dan semakin terbatasnya lahan pertanian di tengah meningkatnya peralihan fungsi lahan; serta realisasi investasi semakin meningkat, namun masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya kecepatan pelayanan perizinan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi, penggunaan teknologi, serta birokrasi yang belum efisien.

4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam:

beberapa tantangan pengelolaan lingkungan di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih, pengelolaan hutan yang belum mampu memenuhi standar hutan lestari, peningkatan jumlah timbulan sampah karena peningkatan jumlah penduduk, maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin, kerusakan sumberdaya pesisir, masih rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, serta meningkatnya kejadian bencana yang ditambah dengan belum optimalnya mitigasi dini bencana.

- 5. Kedaulatan pangan dan energi:** produksi beras mencukupi kebutuhan pangan utama dan berkontribusi pada kebutuhan pangan nasional, namun tidak demikian halnya dengan produksi jagung dan kedelai, adanya arus impor tidak disertai dengan mekanisme pengamanan yang kuat, tantangan membangun sistem logistik daerah, masih perlunya peningkatan keragaman konsumsi dan mutu pangan; sedangkan terkait energi terdapat tantangan yang sama secara nasional yaitu ketergantungan kepada energi fosil, selain itu adanya tantangan penyediaan energi untuk industri, penguatan kehandalan sistem pasokan bagi pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah.
- 6. Kesenjangan wilayah:** terdapat kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan desa dengan kota. Meningkatkan akses antar wilayah menjadi isu penting dengan menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa.
- 7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah:** hal penting yang perlu diperhatikan terkait upaya peningkatan tata kelola pemerintahan adalah kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, dan pelayanan publik yang prima. Sedangkan upaya peningkatan kondusivitas wilayah dilaksanakan melalui kerjasama antar tingkat pemerintahan dan lintas sektor untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran.

4.2.4. Isu Strategis Daerah Sekitar Kabupaten Boyolali

Telaah perencanaan pembangunan daerah lain bertujuan untuk menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh antar daerah. Isu strategis daerah sekitar yang ditelaah adalah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magelang yang sedang menjalankan proses pembangunan periode 2019-2024. Isu strategis kedua daerah tersebut, yaitu:

Tabel 4. 43. Isu Strategis Daerah Sekitar

No	Daerah Sekitar	Isu Strategis
1	Kabupaten Karanganyar	• Pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan • Penguatan produktivitas ekonomi dan daya saing

No	Daerah Sekitar	Isu Strategis
		daerah • Pembangunan kualitas sumber daya manusia, yang terdiri dari pembangunan masyarakat pembelajar dan pembangunan derajat kesehatan masyarakat • Kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari isu penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan ketahanan sosial • Pembangunan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan • Tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, akuntabel dan mengayomi. Isu ini terkait dengan manajemen data dan informasi pembangunan, smart city, kemampuan keuangan daerah, inovasi daerah, pemerintahan kolaboratif, kondusivitas dan dan harmoni sosial beradasar hukum yang berkeadilan, kualitas pelayanan publik, dan reformasi birokrasi/integritas dan akuntabilitas ASN.
2	Kabupaten Magelang	• Kualitas sumber daya manusia. • Daya saing daerah, terkait permasalahan pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah, namun di sisi lain Kabupaten Magelang memiliki 3 potensi besar, yaitu pariwisata, pertanian, dan industri kecil menengah. • Tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel

4.2.5. Isu Strategis Jangka Panjang Kabupaten Boyolali di dalam RPJPD 2005-2025

Isu strategis jangka panjang Kabupaten Boyolali yang terdapat di dalam RPJPD 2005-2025 sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan;
2. Masih rendahnya produktivitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya pertanian;
3. Belum optimalnya infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan industri dan jasa;

4. Masih rendahnya dukungan *stakeholder* dalam kegiatan penanaman modal;
5. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah;
6. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat;
7. Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan;
8. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah;
9. Menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat;
10. Kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan;
11. Masih cukup tingginya jumlah pencari kerja dan pengangguran terbuka;
12. Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat yang memadai terhadap akses pelayanan perumahan;
13. Belum terpenuhinya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender; dan
14. Masih lemahnya kerjasama kemitraan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran pemerintah guna membiayai pembangunan.

4.2.6. Telaah RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berpedoman pada tujuan RTRW Kabupaten Boyolali 2011-2031, yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan terintegrasi di seluruh wilayah kabupaten berbasis pertanian dan pengembangan aneka industri yang berwawasan lingkungan. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan menjadi tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalisir terjadinya krisis tata ruang. Penataan ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tujuan tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan perencanaan ruang wilayah, yaitu:

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan yang meliputi:
 - a. Membentuk pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki;
 - b. Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara sinergis.

2. Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi darat dan udara yang meliputi:
 - a. Mengembangkan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan pembangunan;
 - b. Mengoptimalkan pengembangan sistem transportasi masal dan infrastruktur pendukungnya;
 - c. Mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang;
 - d. Mengoptimalkan tingkat kenyamanan dan keselamatan;
 - e. Menerapkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kawasan bandar udara.
3. Strategi pengendalian dan pelestarian kawasan lindung yang meliputi:
 - a. Memulihkan fungsi lindung;
 - b. Mengembalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung;
 - c. Menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun;
 - d. Mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan.
4. Strategi pengendalian dan pengembangan kawasan pertanian yang meliputi:
 - a. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
 - c. Mengoptimalkan kawasan pertanian basah;
 - d. Mengoptimalkan kawasan pertanian kering;
 - e. Mengoptimalkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
5. Strategi pengoptimalan produktivitas kawasan pertanian yang meliputi:
 - a. Mengoptimalkan produktivitas kawasan peruntukan perikanan;
 - b. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan ramah lingkungan.
6. Strategi pengembangan kawasan peruntukan industri yang meliputi:
 - a. Mengembangkan industri kecil, industri menengah, dan industri besar;

- b. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang berwawasan lingkungan;
 - c. Pengembangan kawasan industri tidak berada pada lahan pertanian.
- 7. Strategi pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi:
 - a. Mengembangkan destinasi pariwisata;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata.
- 8. Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara yang meliputi:
 - a. Mendukung penetapan kawasan strategi nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga;
 - d. Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.
- 9. Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang meliputi:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - b. Mengembangkan kawasan agropolitan;
 - c. Mengembangkan kawasan minipolitan.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Boyolali terdiri atas:

- 1. Rencana pengembangan sistem perkotaan yang terdiri atas:
 - a. PKW yang berada di kawasan perkotaan Boyolali
 - b. PKL yang berada di kawasan perkotaan Ampel;
 - c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten meliputi PPK di kawasan perkotaan Ngemplak, Mojosongo, Banyudono, Karanggede, Simo, Teras dan Tembi, serta PPL di kawasan Desa Selo, Cepogo, Musuk, Kemas, Glonggong, Klego, Andong, Klewor, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Karangkendal dan Garagan.
- 2. Rencana sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
 - a. Rencana pengembangan sistem jaringan Transportasi;
 - b. Rencana pengembangan sistem jaringan energi;
 - c. Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;

- d. Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air;
- e. Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

Rencana pola ruang Kabupaten Boyolali terdiri atas:

1. Rencana Kawasan lindung, yang meliputi:
 - a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air seluas 48.618 Ha, meliputi:
 - 1) Kecamatan Selo;
 - 2) Kecamatan ampel;
 - 3) Kecamatan Cepogo;
 - 4) Kecamatan Musuk;
 - 5) Kecamatan Andong;
 - 6) Kecamatan Banyudono;
 - 7) Kecamatan Boyolali;
 - 8) Kecamatan Karanggede;
 - 9) Kecamatan Kemusu;
 - 10) Kecamatan Klego;
 - 11) Kecamatan Mojosongo;
 - 12) Kecamatan Sambu;
 - 13) Kecamatan Sawit;
 - 14) Kecamatan Simo;
 - 15) Kecamatan Teras;
 - 16) Kecamatan Wonosegoro;
 - 17) Kecamatan Gladagsari;
 - 18) Kecamatan Tamansari;
 - 19) Kecamatan Wonosamodro.
 - b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas:
 - 1) Kawasan sempadan sungai seluas 4.780 Ha berada di seluruh kecamatan yang dilewati sungai.
 - 2) Kawasan sekitar waduk seluas 399 Ha. Meliputi Waduk cengklik, Waduk Bade dan Waduk Kedungombo.
 - 3) Kawasan mata air seluas 213 ha yang berada di kawasan Kecamatan Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Nogosari dan Klego
 - 4) Kawasan RTH perkotaan seluas 4.378 Ha di kawasan perkotaan seluruh kecamatan.
 - c. Kawasan Konservasi berupa kawasan pelestarian alam seluas 3.694 Ha yang meliputi:

- 1) Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.427 Ha yang berada di Kecamatan: Selo, Cepogo, Musuk dan Tamansari.
 - 2) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas 2.267 Ha yang berada di Kecamatan: Selo dan Gladagsari.
- d. Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:
- 1) Daerah rawan banjir yang meliputi wilayah Kecamatan: Sawit, Ngemplak, Wonosegor, Wonosamodro, dan Juwangi.
 - 2) Daerah rawan banjir lahar dingin yang meliputi Kecamatan Selo, Cepogo dan Tamansari.
 - 3) Daerah Rawan tanah longsor yang meliputi Kecamatan: Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Tamansari, Boyolali, Kemusu, Teras, Wonosegoro dan Wonosamodro.
 - 4) Daerah rawan kebakaran hutan yang meliputi Kecamatan: Selo, Ample, Gladagsari, Cepogo, Tamansari, Wonosegoro, Wonosamodro dan Juwangi.
 - 5) Daerah rawan angin topan yang meliputi Kecamatan: Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo, Tamansari, Musuk, Kemusu, Wonosegoro dan Wonosamodro.
 - 6) Daerah rawan letusan gunung berapi yang meliputi Kecamatan: Selo, Cepogo, Musuk, dan Tamansari
 - 7) Daerah rawan gempa bumi yang berada di Kecamatan Sawit.
- e. Kawasan lindung geologi adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah berupa kawasan imbuhan air yang berada di:
- 1) Cekungan air tanah Karanganyar – Boyolali
 - 2) Cekungan air tanah Salatiga
 - 3) Cekungan air tanah Magelang - Temangggung
- f. Kawasan cagar budaya yang meliputi Kecamatan: Selo, cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit Banyudono, Sambi, Ngemplak, Simo, Karanggede, Nogosari, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
2. Rencana Kawasan Budidaya yang memiliki nilai strategis yang terdiri atas:
- a. Kawasan Hutan Produksi yang meliputi:
- 1) Hutan produksi tetap seluas 12.596 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan: Andong, Juwangi, karanggede, Kemusu, Klego, Simo, Wonosegoro, dan Wonosamodro.

- 2) Hutan produksi terbatas seluas 1.183 Ha yang tersebar di wilayah Kecamatan: Klego, Kemusu, Juwangi, Wonosegoro, dan Wonosamodro.
- b. Kawasan hutan rakyat seluas 1.656 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
- c. Kawasan peruntukan pertanian yang terdiri atas:
 - 1) Kawasan tanaman pangan yang bearada di kecamatan: Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari dan Wonosamodro.
 - 2) Kawasan tanaman hortikultura yang berada di kecamatan: Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari dan Wonosamodro.
 - 3) Kawasan perkebunan seluas 14.620 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
 - 4) Kawasan peternakan yang berada di wilayah kecamatan: Cepogo, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Juwangi.
- d. Kawasan perikanan terdiri atas:
 - 1) Perikanan tangkap yang berada di kecamatan: Ngemplak, Klego, dan Kemusu.
 - 2) Perikanan budidaya yang berada di seluruh kecamatan
 - 3) Kawasan pengolahan ikan yang berada di Kecamatan: teras, banyudono, dan Sawit.
- e. Kawasan pertambangan berupa kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:
 - 1) Pertambangan mineral bukan logam yang berada di kecamatan: Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
 - 2) Pertambangan batuan yang berada di Kecamatan: Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.

- f. Kawasan peruntukan industri seluas 2.130 Ha yang meliputi Kecamatan: Selo, Cepogo, Ampel, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, dan Wonosamodro.
- g. Kawasan pariwisata terdiri atas:
 - 1) Kawasan wisata alam yang berada di Kecamatan: Selo, Gladagsari, Cepogo, Musuk, Boyolali, Banyudono, Teras, Sawit, Simo, Klego, Kemusu, Mojosongo
 - 2) Kawasan wisata religi yang berada di Kecamatan: Selo, Gladagsari, Ampel, Cepogo, Mojosongo, Banyudono, Sambu dan Juwangi.
 - 3) Kawasan wisata budaya yang berada di Kecamatan: Selo, Cepogo, Banyudono, Juwangi, Simo, dan Sawit
 - 4) Kawasan wisata rekreasi yang berada di Kecamatan: Selo, Gladagsari, Ampel, Cepogo, Musuk, Boyolali, Mojosongo, Banyudono, Ngemplak, Simo, Klego dan Kemusu.
- h. Kawasan permukiman yang terdiri dari:
 - 1) Permukiman perkotaan seluas 8.834 Ha meliputi kecamatan: Selo, Ampel Cepogo, Musuk, Boyolali Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
 - 2) Permukiman perdesaan seluas 19.913 meliputi Kecamatan: Selo, Ampel Cepogo, Musuk, Boyolali Mojosongo, Teras, Sawit, Banyudono, Sambu, Ngemplak, Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Kemusu, Wonosegoro, Juwangi, Gladagsari, Tamansari dan Wonosamodro.
- i. Kawasan pertahanan dan keamanan; terdiri atas
 - 1) Daerah latihan militer;
 - 2) Pangkalan TNI AU;
 - 3) Markas Komando Distrik Militer 0724/Boyolali;
 - 4) Komando Rayon Militer;
 - 5) Kompi Senapan B Batalyon Infanteri 408/SBH;
 - 6) Perkantoran kepolisian.
- j. Kawasan pemerintahan berupa kantor pemerintahan Daerah seluas 81 Ha yang meliputi Kecamatan Boyolali dan Mojosongo.
- k. Kawasan bandar udara seluas 245 Ha berada di Kecamatan Ngemplak.

Kawasan strategis Kabupaten merupakan kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan strategis di Kabupaten Boyolali terdiri atas:

- a. Koridor kawasan strategis Subosukowonostraten meliputi Kecamatan Banyudono, teras, Mojosongo, Ngemplak, Boyolali dan Ampel.
- b. Jalur kawasan Solo-Selo-Borobudur meliputi Kecamatan banyudono, Teras, Mojosongo, Boyolali, Cepogo dan Selo.
- c. Jalur wisata Joglosemar meliputi Kecamatan Sawit, Banyudono, Teras, Mojosongo, Boyolali dan Ampel.
- d. Kawasan Minipolitan meliputi Kecamatan Teras, Sawit dan banyudono.
- e. Kawasan Agropolitan meliputi Kecamatan Selo, Ampel, Gladagsari, Cepogo dan Boyolali.

4.2.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi isu strategis, tim kelompok kerja KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali menentukan tingkat kepentingan dan prioritas masing-masing isu. Tabel berikut merupakan kesepakatan isu prioritas pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali.

Tabel 4. 44. Daftar Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali

No	Isu Prioritas PB	Prioritas
1	Kemiskinan dan kesenjangan	1
2	Perekonomian masyarakat	2
3	Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan	3
4	Penyediaan air bersih belum optimal	4
5	Infrastruktur wilayah belum optimal	5
6	Pelayanan publik belum maksimal	6
7	Kualitas permukiman dan sanitasi	7
8	Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal	8
9	Penataan ruang dan alih fungsi lahan	9
10	Ketahanan pangan masyarakat	10
11	Pendapatan daerah belum optimal	11
12	Kerusakan dan pencemaran lingkungan	12

No	Isu Prioritas PB	Prioritas
13	Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan	13
14	Masih tingginya risiko bencana	14

Sumber: Analisis Tim KLHS RPJMD Kabupaten Boyolali, 2020

4.2.8. Penetapan Isu Strategis Kabupaten Boyolali

Penetapan isu strategis dilakukan dengan menggunakan prinsip *Dynamic Governance System* yang menggunakan prinsip *think ahead, think again, dan think across*. Dalam proses *think ahead*, penentuan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan berbagai tantangan di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, seperti revolusi industri 4.0. Proses ini juga meliputi penelaahan terkait amanat SDGs dan berbagai dokumen perencanaan yang bersifat jangka Panjang. Proses *think again* dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan. Dalam proses ini, analisis terhadap data-data terkait capaian pembangunan dilakukan untuk melihat berbagai permasalahan yang dihadapi pada berbagai bidang urusan. Sedangkan proses *think across* dilakukan dengan memperbandingkan kondisi internal Kabupaten Boyolali dengan daerah sekitar serta memperhatikan isu-isu strategis yang dihadapi oleh daerah sekitar.

4.2.8.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan secara luas baik pada level global, nasional, maupun daerah tidak lepas dari pembangunan bidang ekonomi. Dalam RPJMN 2020-2024, pertumbuhan ekonomi disinggung pada salah satu dari 7 Agenda Pembangunan nasional yaitu: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Pemerintah Pusat dengan gencar menarik investor dengan cara memperbaiki iklim investasi. Terlepas dari polemik yang muncul, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru disahkan menggambarkan komitmen pemerintah dalam memotong mata rantai birokrasi yang rumit, meningkatkan ketersediaan infrastruktur penunjang, meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kerja, serta menyediakan dukungan stabilitas sosial politik untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pada level daerah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 juga secara implisit menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu agenda utama. Salahsatu poin isu strategis RPJMD Jateng adalah ‘Daya Saing

Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha'. Kalimat ini mengisyaratkan adanya target meningkatkan daya saing ekonomi melalui peningkatan usaha dengan cara memperbaiki kesempatan berinvestasi. Adanya upaya mendorong investasi di level provinsi ini merupakan peluang besar bagi Kabupaten Boyolali sehingga kesiapan investasi di level kabupaten menjadi poin kunci dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali juga sudah tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025. Terdapat tiga isu strategis berupa persoalan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yaitu: 1) Masih rendahnya dukungan *stakeholder* dalam kegiatan penanaman modal; 2) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat; serta 3) Masih rendahnya produktifitas dan nilai tambah sektor-sektor produktif seperti pertanian dalam arti luas. Rencana pembangunan jangka panjang tersebut memetakan peta jalan yang luas dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Boyolali yang berbasis pertumbuhan ekonomi.

Pada level perencanaan jangka menengah (RPJMD), pertumbuhan ekonomi masih menjadi pintu masuk bagi pengembangan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Boyolali tumbuh di angka sekitar 5,9% pada dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun demikian, angka tersebut masih bisa digenjot ke angka yang lebih tinggi dengan membuka peluang investasi yang lebih tinggi. Boyolali merupakan daerah dengan potensi investasi sangat terbuka mengingat dari sisi akses cukup mudah karena dilalui oleh jalan tol menuju Semarang dan dekat dengan salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tenggara Jawa Tengah yaitu Kota Surakarta. Potensi investasi ada di berbagai sektor terutama pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.

Namun demikian, adanya kebutuhan untuk menggenjot perekonomian melalui peningkatan peluang investasi di Boyolali juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui investasi merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dengan kondisi lingkungan yang berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung kewilayahan. Dengan demikian isu strategis yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi sangat tepat jika dirumuskan sebagai berikut: Pertumbuhan Ekonomi dan Iklim Investasi

yang Berwawasan Lingkungan. Isu ini cukup merepresentasikan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah ke depan yang juga selaras dengan isu strategis pada level provinsi dan sejalan dengan spirit pembangunan ekonomi nasional.

4.2.8.2. Penanggulangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Kemiskinan merupakan isu umum baik secara global, nasional maupun daerah yang urgen untuk diselesaikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Secara umum, capaian Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam menanggulangi kemiskinan sudah berjalan cukup baik. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan menurunnya persentase penduduk miskin dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 berada pada angka 9,53%, mengalami penurunan sebanyak 2,92% dari tahun 2015. Rata-rata penurunan penduduk miskin di Kabupaten Boyolali per tahun mencapai 0,73%. Menurunnya persentase kemiskinan juga turut disertai dengan capaian positif indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan yang mengalami penurunan di setiap tahunnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan, mengingat jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu 66.885. Tercatat 90.23% atau 60.351 dari total jumlah PMKS adalah berasal dari keluarga miskin. Kondisi kemiskinan dapat menyebabkan terbatasnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Masalah lain yang perlu diselesaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali adalah terkait tumpang tindihnya data penduduk miskin. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pemberian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pemutakhiran dan verifikasi data penduduk miskin menjadi penting untuk dilakukan dalam periode pembangunan yang akan datang, guna meningkatkan akurasi pemberian bantuan agar lebih tepat sasaran. Selain itu, intervensi yang lebih menyeluruh perlu dilakukan, tidak hanya pada pemberian bantuan sosial tetapi penanganan lintas sektor melalui pengembangan ekonomi dan peningkatan fasilitas dasar.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Boyolali perlu diikuti dengan upaya mengurangi tingkat kesenjangan sosial. Adanya isu kesenjangan sosial merupakan indikasi tidak meratanya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi di suatu daerah. Kondisi tersebut dapat terlihat dari sebaran masyarakat miskin yang hanya terkonsentrasi di beberapa wilayah. Mayoritas rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali berada di wilayah bagian timur, yakni di Kecamatan Nogosari, Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Andong dengan total mencapai 27.042 atau 20,7% dari total rumah tangga miskin di Kabupaten Boyolali. Kondisi ini masyarakat perlu menjadi fokus lain dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Sejalan dengan tujuan perencanaan pembangunan lainnya seperti Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam pilar pembangunan sosial dan ekonomi, tujuan RPJMN untuk pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan, RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang fokus dalam mengurangi kemiskinan serta RPJPD Kabupaten Boyolali yang fokus dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, maka isu penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan di Kabupaten Boyolali sangat penting untuk diprioritaskan dalam periode pembangunan mendatang.

Perumusan dan implementasi program serta kegiatan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Keberhasilan daerah dalam menanggulangi kemiskinan dan mengurangi tingkat kesenjangan akan turut serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan di tingkat nasional.

4.2.8.3. Pembangunan SDM yang Inklusif dan Berdaya Saing

Isu pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Boyolali merupakan penjabaran dari isu utama yang menjadi target pembangunan berjenjang dari level internasional, nasional, dan daerah. Pembangunan SDM merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam pilar pembangunan sosial. Dalam konteks nasional, pembangunan SDM dituangkan dalam tujuh Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing dan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Tujuan tersebut kemudian selaras dengan isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018–2023 yaitu Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, serta isu strategis RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025 yaitu

Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia dari Aspek Pendidikan dan Kesehatan.

Secara umum, pembangunan SDM yang inklusif dimaknai sebagai pembangunan yang merata untuk semua lapisan. Artinya, rencana pembangunan yang akan dilaksanakan harus bisa menjangkau lapisan masyarakat mampu maupun kurang mampu. Selain itu, pembangunan dalam berbagai aspek didorong untuk responsif gender, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan. Sedangkan pembangunan yang berdaya saing fokus pada peningkatan kualitas SDM. Kualitas SDM dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari tiga aspek yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Nilai IPM Kabupaten Boyolali tahun 2020 sebesar 74,25 dengan rata-rata pertumbuhan 0,51 per tahun. Jika dibanding dengan daerah sekitar, capaian IPM Kabupaten Boyolali masih perlu ditingkatkan.

Dilihat dari aspek pendidikan, angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Boyolali sebesar 7,84 tahun. Artinya, rata-rata penduduk di Boyolali dapat menempuh pendidikan setara kelas 1 SMP. Merujuk pada program wajib belajar sembilan tahun, maka capaian tersebut perlu ditingkatkan. Pada aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) cukup tinggi yaitu sebesar 75,95. Namun, dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 123 per 100.000 kelahiran hidup masih di atas rata-rata target capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mengharuskan berada pada angka 70 per 100.000. Selain itu, masih perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan dan peningkatan pada semua jenis pelayanan kesehatan.

Selain dimensi IPM, peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing dan inklusif juga harus memperhatikan aspek kesetaraan gender dalam setiap proses pembangunan. Kesetaraan gender dapat dilihat Indeks Pembangunan Gender (IPG). Selama periode 2016-2020, capaian IPG Kabupaten Boyolali cukup bagus yakni di atas angka 90. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kondisi kesetaraan secara penuh. Untuk itu, masih perlu upaya pengarusutamaan gender dalam setiap pembangunan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, kontrol, menikmati manfaat pembangunan hingga evaluasi pembangunan. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan menitikberatkan aspek kolaborasi antara perempuan dan laki-laki sehingga menciptakan kesetaraan akses dan keberdayaan dalam pembangunan.

4.2.8.4. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk terus ditingkatkan. Meskipun seluruh kecamatan sudah terhubung dengan jaringan jalan, kualitas jalan di Kabupaten Boyolali masih perlu untuk ditingkatkan. Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan, 70,54% jalan di Kabupaten Boyolali berupa aspal, 4,88% berupa kerikil, 0,34% berupa tanah dan 24,25% sisanya berupa *rigid pavement*. Lebih dari itu, pada tahun 2020, sekitar 17,75% dari total panjang jalan sudah dalam kondisi rusak dan rusak berat.

Di samping ketersediaan jalan, peningkatan konektivitas wilayah juga perlu didukung dengan transportasi umum yang memadai. Kondisi transportasi umum di Kabupaten Boyolali saat ini sedang menghadapi tantangan yang cukup serius. Kondisi ini ditandai dengan semakin menurunnya armada yang melayani trayek angkutan. Selain itu, kenyamanan dan keselamatan transportasi juga perlu untuk ditingkatkan. Jumlah korban kecelakaan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, jumlah korban tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 1.194 orang. Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan edukasi kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas masih perlu untuk dilakukan.

Terkait akses terhadap air, persentase penduduk yang terlayani penggunaan air baku pada tahun 2019 mencapai 89,90%. Meskipun demikian, persentase ketersediaan air baku masih mencapai 6,70%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hanya 6,70% dari total kebutuhan air baku daerah yang sudah terpenuhi. Ketersediaan air masih menjadi tantangan bagi Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan oleh kondisi alam yang sebagian berupa tanah berbatu dan pasir dan bersifat porous. Di samping itu, pada tahun 2020 cakupan penduduk yang mengakses air minum layak dan berkelanjutan masih berada pada angka 90,50%, artinya belum mencapai target SDGs yaitu sebesar 100%.

Pembangunan infrastruktur dasar juga bertujuan untuk meningkatkan kelayakhunian. Upaya ini meliputi pengembangan kawasan permukiman yang memenuhi standar teknis kelayakan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Pada tahun 2020, sisa luas kawasan kumuh yang belum tertangani adalah sebesar 5,07 ha atau sekitar 10,43% dari total luas kawasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati Boyolali Nomor 662.1/324 Tahun 2017. Di samping itu, berdasarkan SK Kumuh yang

ditetapkan pada tahun 2020, luas kawasan kumuh yang harus segera ditangani adalah sebesar 87,85 Ha. Selain itu, penyediaan rumah layak huni juga masih perlu untuk ditingkatkan. Pada tahun 2020, ketersediaan rumah layak huni mencapai 88,007%. Data yang tersedia menunjukkan bahwa 11,993% atau sekitar 38.384 unit rumah di Boyolali masih termasuk dalam kategori rumah tidak layak huni.

Berbagai tantangan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Boyolali masih dihadapkan pada isu strategis perlunya peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Isu strategis ini juga selaras dengan tujuh agenda pembangunan nasional 2020–2024 yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Pada level Provinsi, isu strategis ini juga memiliki relevansi dengan isu strategis Provinsi Jawa Tengah tentang kesenjangan wilayah. Selain itu, isu ini juga mendukung amanat RPJPD Kabupaten Boyolali 2005–2025 yang berupaya untuk mendorong optimalisasi infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan industri dan jasa. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan sangat relevan untuk dijadikan sebagai salah satu fokus pembangunan Kabupaten Boyolali selama lima tahun mendatang.

4.2.8.5. Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Agile

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Boyolali telah berjalan baik di dalam beberapa aspek yang ditandai dengan capaian kinerja yang memenuhi target nasional. Aspek pengawasan memiliki Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3, serta kinerja penguatan integritas aparatur dan pejabat negara yang menjadi tolok ukur nasional dengan 100% kepatuhan pelaporan harta kekayaan. Aspek akuntabilitas keuangan mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ditopang oleh tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berjalan sistematis dengan sinergi antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah desa. Tata kelola yang efektif dan efisien juga dibangun melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, baik dalam pelayanan publik maupun integrasi dan koordinasi antar perangkat daerah.

Isu tata kelola yang masih menjadi tantangan Kabupaten Boyolali adalah belum optimalnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan capaian SAKIP “B”. Persoalan akuntabilitas kinerja perlu diurai mulai dari sisi hulu, yakni peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, serta terciptanya manajemen kinerja berupa pembagian kinerja yang sinergis

antara kepala daerah dengan struktur perangkat daerah. Sedangkan capaian makro sebagai penanda utama reformasi birokrasi, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal meskipun mengalami peningkatan, yaitu 52,57 pada tahun 2018 menjadi 56,84 pada 2019. Pelembagaan reformasi birokrasi perlu diperkuat dengan tidak bergantung kepada salah satu perangkat daerah, misalnya Bagian Organisasi Sekretariat Daerah. Reformasi birokrasi membutuhkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah, karena setiap perangkat daerah memegang peran penting dalam pencapaian komponen pengungkit maupun komponen hasil dari reformasi birokrasi.

Isu reformasi birokrasi yang mendesak pula adalah penciptaan birokrasi yang tangkas dan lincah (*agile*) dalam memberikan pelayanan dan menjalankan pembangunan. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi mandatoris bagi pelayan publik (pemerintah) dan hak bagi setiap warga. Hal ini selaras dengan penguatan Kabupaten Boyolali sebagai daerah pro investasi. Adanya pelayanan yang tepat waktu turut menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kabupaten Boyolali telah memiliki modal dengan penerapan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Meskipun demikian, tetap perlu diperkuat perluasan akses layanan disertai komitmen dan kesepahaman antar perangkat daerah, serta penciptaan kelembagaan yang efisien dan prosedur yang tidak berbelit.

Reformasi birokrasi menjadi isu nasional sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dan 7 Agenda Pembangunan Nasional, yaitu Penyederhanaan Birokrasi dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Isu dan agenda penguatan reformasi birokrasi juga selaras dengan isu strategis Provinsi Jawa Tengah yang mengangkat aspek tata kelola pemerintahan berupa peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan dan penguatan desentralisasi fiskal, serta pelayanan publik yang prima. Dalam lingkup internasional, reformasi birokrasi bagian dari Tujuan 16 SDGs, yakni terkait pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Agenda penguatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan *agile* diharapkan mampu menjawab isu jangka panjang Kabupaten Boyolali di dalam RPJPD 2005-2025 berupa belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (*good governance*) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah.

4.2.8.6. Penanganan Bencana Alam dan Non Alam

Isu kebencanaan telah lama menjadi perhatian global dan menjadi isu penting di berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia, dalam laporan Bank Dunia (World Bank) berjudul '*Strengthening The Disaster Resilience*

of Indonesian Cities' yang dipublikasikan pada tahun 2019, merupakan salah satu negara yang memiliki kerawanan bencana paling tinggi di dunia. Hal itu disebabkan oleh kondisi geografis yang berada di jalur *ring of fire* atau Cincin Api Pasifik yang menyebabkan rawan terkena gempa bumi dan memiliki begitu banyak gunung berapi serta berbagai kondisi geografis lainnya yang menyebabkan kerawanan terjadinya bencana.

Isu bencana merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional. Agenda penanggulangan bencana secara nasional selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa bencana merupakan *“Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.”* Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Indonesia memiliki 12 jenis ancaman bencana yang berisiko tinggi. Keduabelas jenis bencana tersebut antara lain: 1) Gempabumi; 2) Kekeringan; 3) Tsunami; 4) Cuaca Ekstrem (Puting beliung); 5) Letusan Gunungapi; 6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi; 7) Gerakan Tanah (Tanah longsor); 8) Kebakaran Hutan dan Lahan; 9) Banjir; 10) Epidemi dan Wabah Penyakit; 11). Banjir Bandang; 12) Gagal Teknologi. Arah kebijakan penanggulangan bencana fokus pada tiga hal utama yaitu penguatan kelembagaan penanggulangan bencana, penguatan kesiapsiagaan, dan ketangguhan komunitas.

Pada periode perencanaan tahun 2020-2024, kebencanaan merupakan salah satu isu dari 7 agenda pembangunan nasional. Salahsatu butir agenda tersebut berbunyi “Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.” Dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah, isu kebencanaan menjadi bagian dari isu strategis daerah yang secara garis besar berkaitan dengan pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, penanggulangan bencana merupakan agenda pembangunan krusial yang menjadi isu strategis nasional maupun provinsi.

Sejalan dengan itu, Kabupaten Boyolali juga merupakan daerah rawan bencana terutama bencana alam. Kabupaten Boyolali memiliki kondisi geografis dan topografis yang beragam sehingga memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Boyolali tahun 2011-2031, empat jenis bencana yang paling rawan terjadi di Boyolali antara lain banjir, banjir lahar dingin, tanah longsor, dan kebakaran yang tersebar di semua bagian wilayah. Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Boyolali tahun 2005-2025, tingginya kerawanan bencana disebabkan oleh kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Artinya, aspek pembangunan tidak sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana.

Salah satu tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana adalah Indeks Risiko Bencana (IRB). Berdasarkan data LKPJ Tahun 2019, Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Boyolali mengalami *trend* yang menurun pada tahun 2019 menjadi 130 dari 137 poin pada tahun 2018. Artinya, penanggulangan bencana belum optimal sehingga risiko bencana masih relatif tinggi. Tingginya risiko bencana ini disebabkan terutama oleh belum optimalnya penanggulangan bencana yang dipicu oleh beberapa faktor seperti kelembagaan penanggulangan bencana yang belum memadai, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana yang masih rendah, serta belum optimalnya penggunaan sistem informasi kebencanaan.

Selain bencana alam, Kabupaten Boyolali juga tidak terlepas dari bencana non alam terutama dengan adanya pandemi. Saat ini semua daerah termasuk Boyolali sedang dilanda bencana non alam berupa pandemi Covid-19. Hingga saat ini, jumlah total kasus Covid-19 di Boyolali mencapai 3.791 dengan korban meninggal sebanyak 113 orang atau sekitar 2,9%. Jumlah kasus baru Covid-19 terus meningkat meskipun dengan jumlah peningkatan yang tidak terlalu tinggi. Namun demikian, isu pandemi ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penanggulangan bencana baik alam maupun non-alam merupakan isu strategis yang harus segera diintervensi dalam RPJMD Tahun 2022-2026.

4.2.8.7. Inovasi dan Teknologi Informatika

Semakin tingginya tuntutan publik terhadap perbaikan pelayanan publik serta semakin kompleksnya persoalan pembangunan membutuhkan adanya inovasi kebijakan. Inovasi kebijakan merupakan upaya untuk mengadopsi hal-hal baru dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Inovasi kebijakan dapat dilakukan pada berbagai tahapan kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, implementasi, hingga evaluasi. Salah satu bentuk inovasi kebijakan adalah penggunaan teknologi informasi di berbagai sektor pembangunan. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi informasi (TI) dan telekomunikasi atau dikenal sebagai revolusi industri 4.0 semakin massif sehingga memberikan dampak signifikan bagi sektor publik.

Inovasi kebijakan di Indonesia didorong ke arah adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pembangunan seiring dengan revolusi industri 4.0. Semangat inovasi penggunaan TI di mulai pada tahun 2003 ketika pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Pengembangan *e-gov* ini mencakup perbaikan penyelenggaraan perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgeting*), dan pelayanan publik berbasis elektronik. Selanjutnya, penggunaan IT juga didorong pada sektor-sektor lainnya seperti *e-health* (sektor kesehatan), *e-education* (sektor pendidikan), *e-procurement* (sektor pengadaan).

Dua dekade sejak semangat inovasi dijalankan, pada akhir tahun 2020, Asian Development Bank (ADB) mencatat bahwa tingkat inovasi dan digitalisasi Indonesia hanya sebesar 0,08, jauh di bawah Thailand dan Vietnam yang masing-masingnya sebesar 0,62 dan 0,44. Lebih dari itu, peringkat Indonesia juga masih berada di bawah negara ASEAN lainnya yaitu Filipina sebesar 0,14 dan Kamboja sebesar 0,12. Karena itu, proses digitalisasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan meskipun sudah menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, inovasi dan digitalisasi merupakan dua isu penting yang menjadi katalisator pembangunan nasional.

Pada level daerah, inovasi kebijakan publik sudah didukung secara regulasi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Di tingkat provinsi seperti tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, inovasi daerah dilekatkan pada upaya digitalisasi pembangunan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha. Pada titik ini, inovasi merupakan instrumen untuk mempercepat capaian pembangunan terutama pembangunan bidang sumber daya manusia dan ekonomi.

Sejalan dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan provinsi, isu strategis lain yang juga mendesak untuk dikedepankan dalam lima tahun ke depan adalah inovasi kebijakan publik melalui penggunaan teknologi informasi yang masif. Inovasi kebijakan dibutuhkan untuk menopang pencapaian visi dan misi daerah terutama dalam rangka: meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan responsivitas dan efektivitas pelayanan publik, serta menjadi katalisator pembangunan sektoral terutama sektor-sektor unggulan daerah. Dengan dasar tersebut, dorongan terhadap inovasi (baik yang berasal dari pemerintah maupun non-pemerintah) akan menjadi penentu cepat atau lambatnya pembangunan Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, inovasi merupakan isu yang strategis dan sangat penting untuk dijadikan spirit pada periode perencanaan lima tahun ke depan.

Tabel 4. 45. Identifikasi Isu Strategis Daerah

Isu Internasional (Pengarutamaan TPB/SDGs)	Isu Nasional (7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Pembangunan Ekonomi, dan Pilar Pembangunan Sosial	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha	Masih rendahnya dukungan <i>stakeholder</i> dalam kegiatan penanaman modal	Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan
			Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha ekonomi rakyat	
		Kedaulatan pangan dan energi	Masih rendahnya produktivitas, nilai tambah produk-produk pertanian dalam arti luas dan belum optimalnya pendayagunaan serta pengembangan sumber daya pertanian	
TPB Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penanggulangan kemiskinan	Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam penurunan angka kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan wilayah
			Masih cukup tingginya jumlah pencari kerja dan pengangguran terbuka	

Isu Internasional (Pengarusutamaan TPB/SDGs)	Isu Nasional (7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
TPB Pilar Pembangunan Sosial	Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan	Pembangunan SDM yang inklusif dan berdaya saing
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		Menurunnya kesadaran terhadap nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta keamanan dan ketenteraman masyarakat	
TPB Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Ekonomi	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Kesenjangan wilayah (Peningkatan akses antar wilayah dan kemudahan distribusi barang-jasa)	Belum optimalnya infrastruktur dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan industri dan jasa	Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
			Belum optimalnya kualitas hidup masyarakat yang memadai terhadap akses pelayanan perumahan	Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana	Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam	Kurang terintegrasinya pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan	

Isu Internasional (Pengarutamaan TPB/SDGs)	Isu Nasional (7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024)	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah RPJMD 2018-2023	Isu Strategis RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025	Isu Strategis RPJMD 2021-2026
	dan perubahan iklim		bencana guna mendukung pembangunan berkelanjutan	
TPB Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah daerah	Reformasi birokrasi yang akuntabel dan <i>agile</i>
			Belum terpenuhinya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta kesetaraan gender	Inovasi dan Teknologi Informasi
			Masih lemahnya kerjasama kemitraan pemerintah daerah dan terbatasnya anggaran pemerintah guna membiayai pembangunan	
			Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah	

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab 5 memuat tentang rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Daerah pada periode tahun 2021-2026. Visi pembangunan Daerah merupakan rumusan visi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih yang secara substansi memuat tentang rumusan umum mengenai keadaan yang akan dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Kondisi yang akan dicapai dalam bentuk visi, kemudian dijabarkan oleh misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tidak lepas dari amanat RPJPD Kabupaten Boyolali 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Boyolali adalah **“Terwujudnya Kabupaten Boyolali yang Berdaya Saing, Konstitusional, Aman, Mandiri, dan Sejahtera”**. Adapun sasaran pokok dalam periode keempat pembangunan jangka panjang berupa:

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang amanah dan dipercaya oleh masyarakat;
2. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan politik yang demokratis;
3. Terwujudnya penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil kepada seluruh anggota masyarakat dan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
4. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
5. Tingginya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
6. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bertumpu pada sektor unggulan;
7. Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dengan didukung tingkat investasi; yang tinggi dan penguasaan IPTEK bagi pengembang industri dan terwujudnya pelayanan perizinan yang prima serta kerjasama kemitraan;

8. Terwujudnya penurunan angka pengangguran dan kemiskinan ditandai dengan ketercukupan lapangan pekerjaan sehingga daya beli masyarakat tinggi;
9. Semakin optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

5.1. Visi

Berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis aktual dan menjaga keberlanjutan pembangunan, maka dirumuskan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, yaitu:

“BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI”
Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

Rumusan visi tersebut memiliki muatan kondisi dan prasyarat yang akan dicapai dalam pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 5. 1. Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“ BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)	Boyolali Maju	- Proses pembangunan yang berkelanjutan dan terencana sistematis diharapkan membawa kemajuan di segala bidang. - Boyolali Maju berarti <i>no-one left behind</i>, yakni tidak ada pihak yang terlewatkan untuk merasakan kemajuan, karena semua komponen telah menjadi subyek pembangunan. - Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang semakin sejahtera dan daerah yang semakin berdaya saing yang ditopang dengan pembangunan infrastruktur wilayah berkualitas dan merata, serta tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.
	Meneruskan Pro Investasi	Pro investasi telah menjadi arah pembangunan dan identitas Kabupaten Boyolali dengan berbagai capaian pembangunan yang telah membawa manfaat bagi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		masyarakat. • Melanjutkan arah pembangunan yang pro investasi berarti tidak hanya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus membangun sinergi dengan arah pembangunan nasional, terutama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional secara sistematis dan cepat. • Arah pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, yang muaranya tetap pada kesejahteraan masyarakat Boyolali, tanpa menghadirkan ketimpangan sosial. • Pro investasi tetap dikendalikan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, yakni selain berorientasi ekonomi dan sosial, tidak kalah penting pada keberlanjutan lingkungan untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta membawa manfaat pembangunan bagi generasi masa depan.
	Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)	• Pembangunan yang efektif membutuhkan prasyarat berupa sinergi dan kolaborasi seluruh komponen <i>governance</i>, yakni masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. • Seluruh komponen daerah diharapkan mampu melangkah dan menata bersama penuh totalitas yang merupakan implementasi dari prinsip gotong royong. • Gotong royong dengan menjalankan perannya masing-masing namun saling bersinergi dan berkolaborasi dalam ikatan visi pembangunan daerah maupun landasan nilai kearifan yang tertanam kuat di tengah masyarakat berupa filosofi dari Pangeran Sambernyawa “<i>Tiji Tibeh (mati siji, mati kabeh, mukti siji mukti kabeh)</i>”.

5.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Daerah dibutuhkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pemerintah Daerah memiliki 5 (lima) misi yang mencakup keseluruhan bidang pembangunan dengan muatan prinsip dasar dan arah pembangunan di setiap misi sebagai berikut:

MISI 1: BOYOLALI MENERUSKAN PRO INVESTASI, MAJU, SINERGI DAN BERKELANJUTAN	
	Memantapkan “business friendly”, dengan mempertahankan iklim investasi yang kondusif, mendorong perusahaan yang ramah lingkungan (<i>green company</i>), strategi bisnis perusahaan (<i>green strategy</i>), dan proses bisnis yang aman, nyaman dan bersih (<i>green process</i>), serta pengembangan produk yang ramah lingkungan (<i>green product</i>) serta Pengembangan kompetensi dan perlindungan kepada sumber daya manusia (<i>green employee</i>).
	Mensinergikan manajemen pemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kehidupan yang lebih maju, dengan mengedepankan peningkatan Kualitas manusia, ekonomi yang produktif, mandiri, berdaya saing serta pembangunan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
	Pembangunan Sosial, guna pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pembangunan Lingkungan, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkualitas, keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pembangunan tata kelola pemerintahan, tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif

MISI 1: BOYOLALI MENERUSKAN PRO INVESTASI, MAJU, SINERGI DAN BERKELANJUTAN	
	untuk mewujudkan prinsip dan standar pelayanan publik yang prima.
	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat , baik melalui pelayanan kesehatan, lingkungan, ataupun perilaku dengan pendekatan keluarga peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.

MISI 2: BOYOLALI SEHAT, TANGGUH, CERDAS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA	
	Mendorong pembangunan berkelanjutan , yang memanusiakan manusia dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, berlandaskan prinsip universal, terintegrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau <i>“No-one Left Behind”</i> .
	Dengan adanya resiko bencana dan perubahan iklim dan dampaknya, mitigasi bencana dan tindakan cepat untuk mengatasi diperlukan sebagai bentuk wilayah yang tangguh.
	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana olah raga publik.
	Adanya Pemeliharaan fakir miskin, yatim, anak terlantar dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial . Demikian pula dengan Sosial and <i>Economy Safety Net</i> yakni jaminan sosial daerah baik bidang kesehatan maupun sosial seperti cukup sandang, pangan, dan papan.

MISI 2: BOYOLALI SEHAT, TANGGUH, CERDAS, BERKARAKTER DAN BERBUDAYA	
	Kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, kriminalitas, pelanggaran terhadap ketertiban umum, dan penanggulangan kerawanan sosial.
	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua , adanya akses memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan disertai tatakelola pendidikan yang baik, penerapan teknologi dan standar untuk meningkatkan daya saing.
	Pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya, mengadakan kegiatan event budaya, serta revitalisasi situs-situs sejarah dan religi untuk menghidupkan kembali daerah yang dulunya pernah hidup namun sekarang mengalami degradasi sehingga menjadi daya tarik wisata.

MISI 3: BOYOLALI KOTA SUSU, LUMBUNG PANGAN NASIONAL	
	Mempertahankan tradisi Boyolali Kota Susu , penghasil daging, pengembangan produksi perikanan darat serta sektor peternakan lainnya adalah sesuatu yang prioritas.
	Boyolali Lumbung Pangan sebagai aplikasi dari konsep ketahanan pangan (<i>food security</i>) lokal dan nasional terus dipertahankan dan dikembangkan, dengan prinsip pertanian yang maju, lestari, berdaya saing internasional, dan berkontribusi penting bagi perekonomian bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan budaya untuk mensejahterakan masyarakat yang berperadaban.

MISI 3: BOYOLALI KOTA SUSU, LUMBUNG PANGAN NASIONAL	
	Meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, perikanan darat termasuk sektor sejenis lainnya. Aplikasi <i>good farming practices</i>, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, kredit pengembangan kelompok/perorangan, pendampingan sampai dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan serta member nilai lebih pada pasca produksi.
MISI 4: BOYOLALI MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA	
	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
	Pembangunan integritas dengan menumbuhkan karakter yang baik bagi individu maupun organisasi dalam mewujudkan tindakan maupun keputusan bagi kebaikan bersama.
	Pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok <i>good and clean governance</i>. Peran masyarakat yang melahirkan kontrol terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan sangat diharapkan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

MISI 4:

BOYOLALI MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF DAN TERPERCAYA

Tidak berhenti pada *good and clean governance*, **Boyolali berusaha menumbuhkan *Smart governance***, atau pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi, dengan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi-inovasi dan adaptasi teknologi yang terpadu, yang bermuara pada efektifitas, efisiensi dan kesejahteraan masyarakat.

MISI 5:

BOYOLALI TERSENYUM, TUMBUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING



Boyolali dikenal dengan slogan Tersenyum, yang memiliki arti tertib, elok, rapi, sehat, nyaman untuk masyarakat. Tanpa meninggalkan tersenyum, **Boyolali mulai dikenal dengan slogan nyaman ditinggali, nyaman investasi, nyaman untuk *everybody***. Sebagai identitas dari kota, *city brand* akan terus dikembangkan guna memasarkan segala aktivitas terutama potensi wisata dan budayanya.

Smart Gov diharapkan dapat mendorong terwujudnya *Smart city*, *Water City* dan *Green City* yakni **konsep Boyolali Kota cerdas/pintar, kota air, yang ramah lingkungan**.

Boyolali tumbuh dengan infrastruktur yang tangguh dan ikonik, permukiman inklusif, aman, dan berkelanjutan. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. mengurangi kesenjangan intra dan antar wilayah.

MISI 5: BOYOLALI TERSENYUM, TUMBUH, MANDIRI DAN BERDAYA SAING	
	Potensi ekonomi daerah, akan terus dioptimalkan guna kemandirian daerah dengan kinerja yang inovatif, termasuk meningkatkan penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja yang terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional, serta berbagai inovasi yang tumbuh diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah. Percepatan pembangunan yang mendorong pertumbuhan investasi dipadukan dengan koperasi, umkm, pasar tradisional dan modern.

Visi dan misi pembangunan Daerah selain untuk merespon isu strategis aktual pembangunan Daerah, juga berupaya membangun sinergi dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, sehingga antar visi dan misi memiliki keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 5. 2. Keterkaitan Antara Visi-Misi RPJMD Kabupaten Boyolali dengan Visi-Misi RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Visi: “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)	Visi: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, <i>Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i>
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan	Misi 3: Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Misi 5:	Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Misi 1: Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang Religius, Toleran, dan Guyup untuk Menjaga

RPJMN 2020-2024	RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Misi 7: Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Bagi pada Seluruh Warga		NKRI Misi 4: Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan
Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, Berdaya Saing	Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional	Misi 3: Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran
Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 4: Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 2: Mempercepat Reformasi Birokrasi serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota
Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 3: Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat dan Memperluas Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran Misi 4: Menjadikan Masyarakat Jawa Tengah Lebih Sehat, Lebih Pintar, Lebih Berbudaya, dan Mencintai Lingkungan

5.3. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah menetapkan tujuan dalam rangka pencapaian visi di akhir periode dan menjalankan 5 misi pembangunan. Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan dicapai dalam merespon isu strategis perencanaan jangka menengah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai berikut:

Tabel 5. 3. Keterkaitan Misi dan Tujuan dalam Merespon Isu Strategis RPJMD dan KLHS

Misi	Tujuan	Respon	
		Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis KLHS
Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	• Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan • Penanganan bencana alam dan non alam • Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan	• Perekonomian masyarakat • Masih tingginya risiko bencana • Infrastruktur wilayah belum optimal
	Menurunnya tingkat kemiskinan	• Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan	• Kemiskinan dan kesenjangan • Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	• Pembangunan SDM yang inklusif dan berdaya saing • Penanganan bencana alam dan non alam	• Tingkat kesehatan masyarakat belum optimal • Kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan
	Meningkatnya keberdayaan sosial	• Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan	• Kemiskinan dan kesenjangan

Misi	Tujuan	Respon	
		Isu Strategis RPJMD	Isu Strategis KLHS
Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional	Meningkatnya kesejahteraan petani	• Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan • Penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan	• Perekonomian masyarakat • Ketahanan pangan masyarakat
Misi 4: Boyolali Menghadirkan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	• Reformasi birokrasi yang akuntabel dan <i>agile</i> • Inovasi dan teknologi informasi	• Pelayanan publik belum maksimal • Pendapatan daerah belum optimal
Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	• Peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan • Inovasi dan teknologi informasi	• Penyediaan air bersih belum optimal • Kualitas permukiman dan sanitasi • Penataan ruang dan alih fungsi lahan • Kerusakan dan pencemaran lingkungan

Berdasarkan Tabel 5.3, maka RPJMD Tahun 2021-2026 juga memperkuat perencanaan lintas urusan atau *cross-cutting*. Misi sebagai perumpunan urusan pemerintahan tidak bisa berdiri sendiri dalam merespon isu strategis, melainkan antar misi dan antar urusan pemerintahan memiliki keterkaitan dan saling menopang. Hal ini misalnya dalam konteks merespon isu strategis tentang “pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang berwawasan lingkungan”, maka dibutuhkan kolaborasi lintas urusan di dalam Misi 1 dan Misi 3, serta ditopang oleh Misi 5. Demikian halnya dalam konteks menjawab isu strategis tentang “penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan”, maka harus terdapat sinergi lintas urusan antara Misi 1, Misi 2, dan Misi 3. Adapun Misi 4 yang secara substansi tentang tata kelola pemerintahan (*good governance*) berperan menjadi penopang bagi efektivitas peran satu misi dan antar misi. Perencanaan yang bersifat *cross-cutting* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebut sebagai pendekatan perencanaan **holistik-tematik**, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Tidak kalah penting juga menggunakan pendekatan **integratif**, yakni menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Dalam setiap tujuan memiliki sasaran yang merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. Tujuan maupun sasaran sebagai rumusan kondisi memiliki indikator sebagai alat ukur keberhasilan yang berorientasi hasil (*outcome-impact*). Rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya dalam setiap misi sebagai berikut:

Tabel 5. 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026

Visi: “Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi”, Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	-1,24	3,68 – 5,15	4,18 – 5,40	4,68 - 5,65	5,18 - 5,90	5,68 - 6,15	5,68 - 6,15
		Meningkatnya nilai investasi	Indikator Sasaran: Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	Nilai (dalam juta)	1.675.461,70	1.711.511,59	1.771.109,26	1.830.706,93	1.890.304,60	1.949.902,26	9.153.534,64
		Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat & pelestarian lingkungan dalam segala	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan peran perusahaan	Persen		100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Indikator Sasaran: Persentase pemanfaatan BMD	Persen		100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pertumbuhan sektor	Indikator sasaran: Persentase pertumbuhan	Persen	-5,55	0,5	1,25	2	2,75	3,5	3,5
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	1,83	3,88	4,91	5,94	6,97	8,00	8,00
		Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Indikator sasaran: Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	-3,72	1	2	3	4	5	5

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya kenyamanan transportasi	Indikator sasaran: Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	82,52	82,72	82,92	83,12,	83,32,	83,52	83,52
			Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,36	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
		Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indikator sasaran: Indeks Harga Konsumen	Angka	106,89	109,89	112,89	115,39	117,89	120,39	120,39
	Menurunnya tingkat kemiskinan		Indikator tujuan: Tingkat kemiskinan	Persen	10,18	9,18 - 8,68	8,18 - 7,18	7,18 - 5,68	6,18 - 4,18	5,18 - 2,68	5,18 - 2,68
		Menurunnya pengangguran	Indikator sasaran: Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,28	4,45	4,03	3,61	3,19	2,78	2,78
		Meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi	Indikator sasaran: Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak hak pekerja (kebebasan berserikat)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		seluruh pekerja									
		Meningkatnya pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Indikator sasaran: Persentase Koperasi yang SHU nya meningkat	Persen	16,78	17,34	17,90	18,46	19,03	19,59	19,59
			Indikator sasaran: Jumlah usaha mikro yang meningkat Omzetnya	Jumlah	30	60	63	66	69	72	72
Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya	Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing		Indikator Tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,25	75,28	75,8	76,31	76,83	77,34	77,34
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indikator Sasaran: Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,65	12,74	12,82	12,91	13	13

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,95	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29	76,29
		Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Indikator Sasaran: Prosentase pembinaan cabang olahraga	Persen	75	80	90	95	100	100	100
			Indikator Sasaran: Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	4,68	5,18	5,68	6,18	6,68	7,18	7,18
		Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Indikator Sasaran: Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	83,22	84,72	86,22	87,72	89,22	90,72	90,72
		Meningkatnya pengendalian	Indikator Sasaran: Angka	Angka	1,87	2,1	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		penduduk dan keluarga yang berkualitas	Kelahiran Total (TFR)								
	Meningkatnya Keberdayaan Sosial		Indikator Tujuan: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	81,95	81,96	81,97	81,98	81,99	82,00	82,00
		Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indikator Sasaran: TPAK Perempuan	Persen	44,27	46,43	48,59	50,75	52,91	55,07	55,07
			Indikator Sasaran: Angka kekerasan terhadap perempuan	Angka	16	14	13	12	11	10	10
			Indikator Sasaran: Kategori Kabupaten Layak Anak	Status	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
	Meningkatnya keberdayaan sosial		Indikator Tujuan: Angka PMKS	Angka	71.346	70.276	69.222	68.183	67.161	66.153	66.153
		Meningkatnya kesejahteraan	Indikator Sasaran:	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		PMKS	Peningkatan keberdayaan PMKS								
	Meningkatnya keberdayaan sosial		Indikator Tujuan: Indeks Desa Membangun (IDM)	Nilai	0,6941 (Berkemba ng)	0,7297 (Maju)	0,7361 (Maju)	0,7425 (Maju)	0,7489 (Maju)	0,7553 (Maju)	0,7553 (Maju)
		Meningkatnya keberdayaan desa	Indikator Sasaran: Persentase kenaikan status desa	Persen	11,61	13,61	15,61	17,61	19,61	21,61	21,61
	Meningkatnya ketahanan sosial		Indikator Tujuan: Angka Konflik Sosial	Angka	18	16	13	12	10	8	8
		Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat	Indikator Sasaran: Angka Potensi konflik sosial	Angka	20	17	15	13	11	9	9
	Meningkatnya ketahanan sosial		Indikator Tujuan: Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Nilai	130,32	130,32	128,32	126,32	124,32	122,32	122,32
		Menurunnya resiko bencana	Indikator Sasaran: Indeks Kapasitas	Nilai	82	82	83	85	86	87	87

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
			(komponen IRBI)								
Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional	Meningkatnya kesejahteraan petani		Indikator Tujuan: Nilai Tukar Petani (NTP)	Angka	106,68	107,16	107,64	108,12	108,6	109,8	109,8
		Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Indikator Sasaran: Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	2,01	3	3	3,5	3,5	4	4
			Indikator Sasaran: Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	0,27	2	2	4	4	5	5
		Meningkatnya agro industri susu	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	Persen	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4
		Meningkatnya kualitas susu	Indikator Sasaran: Jumlah	Perusahaan	5	5	5	5	5	5	5

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
			perusahaan yang menerima produk susu boyolali								
		Meningkatnya ketahanan pangan	Indikator Sasaran: Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,62	85,25	86,88	88,51	90,14	91,77	91,77
Misi 4: Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indikator Tujuan: Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	763	800	823	833	893	903	903
			Indikator Sasaran: Nilai SAKIP	Nilai	67.13 (B)	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (BB)	80,13 (A)
			Indikator Sasaran: Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	56.84 (CC)	64,72 (B)	67,72 (B)	70,72 (BB)	73,72 (BB)	76,72 (BB)	76,72 (BB)
			Indikator Sasaran: Nilai EKPPD	Nilai	3.4190	3.4000	3.4100	3.4200	3.4300	3.4400	3.4400
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan	Indikator Sasaran: Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai		66,49	67,81	69,16	70,54	71,95	71,95

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
		daerah	(IPKD)								
			Indikator Sasaran: Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah	Indikator Sasaran: Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	88.51	88.60	88.70	88.80	88.90	89.00	89.00
			Indikator Sasaran: Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Nilai	78.13 (Sedang)	79 (Sedang)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	83 (Baik)	83 (Baik)
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81.89	82.11	82.72	83.55	84.18	85	85
		Terwujudnya <i>smart governance</i> Boyolali	Indikator Sasaran: Indeks SPBE	Nilai	2.85	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50
			Indikator Sasaran: Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	92.17	92.17	92.2	92.25	92.3	92.35	92.35

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali		Indikator Tujuan: <i>Index Smart City</i>	Angka	2.91	3.03	3.09	3.15	3.21	3.28	3.28
		Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Indikator Sasaran: Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	88.007	89.00	90.00	91.00	92.00	93.00	93.00
		Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	Indikator Sasaran: Luas Kawasan Kumuh	Ha	87.85	82.85	77.85	72.85	67.85	62.85	62.85
			Indikator Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	90.5	100	100	100	100	100	100
			Indikator	Persen	98.03	100	100	100	100	100	100

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
			Sasaran: Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan								
			Indikator Sasaran: Persentase layanan publik dan pengaduan online yang aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Indikator Sasaran: Persentase bangunan yang sesuai standar	Persen	89.95	90.4	90.9	91.4	92.4	92.4	92.4
			Indikator Sasaran: Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	88.80	90.33	92.14	93.98	95.86	97.78	97.78
	Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten		Indikator Tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	60.17	66.49	66.54	66.60	66.65	66.71	66.71

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir 2026
						2022	2023	2024	2025	2026	
	Boyolali										
		Meningkatnya kualitas air	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air	Angka	58.57	58.80	58.92	59.04	59.16	59.28	59.28
		Meningkatnya kualitas udara	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara	Angka	87.35	87.40	87.43	87.45	87.48	87.51	87.51
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	40.99	41.00	41.00	41.01	41.01	41.01	41.01
		Meningkatnya penanganan sampah	Indikator Sasaran: Persentase sampah yang tertangani	Persen	51,56	55,00	57,00	60,00	62,00	64,00	64,00

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah seperti yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dirumuskan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah. Secara umum bab ini mencakup 4 (empat) poin besar, yaitu: strategi dan arah kebijakan, arah kebijakan tahunan, integrasi program rekomendasi KLHS dan program pembangunan Daerah.

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam bentuk upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan strategi dan arah kebijakan juga memperhatikan pemetaan permasalahan pembangunan dijabarkan pada Bab IV. Strategi dan arah kebijakan ditata bersama dengan melangkah bersama penuh totalitas (METAL) secara *vision* (memiliki Visi bersama untuk kemajuan Boyolali) *understanding* (memahami kondisi saat ini) *clarity* (melakukan komunikasi berkolaborasi secara terus menerus untuk menentukan arah tujuan) dan *agility* (fleksibel dan mempertimbangkan ide-ide yang ada untuk pencapaian tujuan) dengan melibatkan seluruh *stake holder* dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan kompleks atau (situasi VUCA) yaitu *Volatility* (perubahan cepat, bergejolak, tidak stabil dan tidak terduga) *Uncertainty* (masa depan penuh ketidak pastian) *Complexity* (kondisi lebih kompleks dari sebelumnya) dan *Ambiguity* (kondisi lingkungan yang semakin membingungkan, tidak jelas, dan sulit dipahami)

ditambah dengan pandemi Covid-19 yang menyerang berbagai sektoral agar tercapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah pada periode tahun 2021-2026. Strategi dan arah kebijakan dengan demikian sebagai intervensi atas permasalahan pembangunan yang masih terjadi, yang kemudian dikonversasi menjadi rumusan program pembangunan/perangkat daerah. Oleh karena itu, pilihan program dan indikator di dalam RPJMD dipandu oleh rumusan strategi dan arah kebijakan.

Tabel 6. 1. Perumusan Strategi RPJMD Berbasis Pemetaan Masalah Pembangunan

Pemetaan Masalah	Strategi
Misi 1	
Masih adanya fluktuasi realisasi investasi dan jumlah investor	Pengembangan budaya dan citra pro investasi
	Pembinaan, pengawasan dan pemberian penghargaan
	Peningkatan peran perusahaan
	Pemanfaatan BMD
Belum optimalnya pengembangan daya saing pariwisata	Pengembangan daya tarik wisata
	Optimalisasi pemasaran destinasi wisata
	Pengembangan ekonomi kreatif
Belum optimalnya kontribusi perindustrian terhadap PDRB	Peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Belum optimalnya pengembangan UMKM	Peningkatan omzet usaha mikro
Masih rendahnya kapasitas manajemen keuangan koperasi/rendahnya proporsi koperasi yang sehat	Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi
Belum optimalnya kontribusi perdagangan terhadap perekonomian Daerah	Peningkatan kapasitas pemasaran barang
	Peningkatan kelancaran distribusi barang
Belum optimalnya serapan tenaga kerja	Peningkatan kesempatan kerja
Masih adanya perselisihan industrial antara perusahaan dan karyawan (upah, pesangon, cuti, dll)	Penurunan perselisihan hubungan industrial
Belum optimalnya kualitas infrastruktur dasar	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan
	Peningkatan pemerataan kualitas infrastruktur
	Peningkatan kualitas sistem drainase
Belum optimalnya kenyamanan dan keselamatan transportasi	Peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai
	Pengembangan sistem manajemen pelayanan perhubungan

Pemetaan Masalah	Strategi
	Peningkatan ketersediaan moda transportasi
Misi 2	
Belum optimalnya partisipasi pendidikan pada tingkat PAUD	Peningkatan partisipasi pendidikan tingkat PAUD
Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana pendidikan tingkat SD dan SMP	Peningkatan fasilitas pendidikan
	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan
Belum optimalnya pengembangan literasi	Peningkatan budaya baca dan literasi
Belum optimalnya pelayanan di fasilitas Kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan
Belum optimalnya penanganan gizi buruk dan <i>stunting</i>	Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting
Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)	Peningkatan kualitas kesehatan ibu
	Peningkatan kualitas kesehatan bayi
Tingginya temuan penyakit menular (TBC dan HIV)	Peningkatan penanganan penyakit menular (TBC dan HIV) dan tidak menular (Hipertensi, DM)
Masih tingginya angka prevalensi penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetes Melitus, ODGJ)	
Masih adanya angka penderita Covid 19	Penanganan dan pemulihan pandemi COVID 19
	Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat
Pengembangan SDM dan sarana prasarana keolahragaan belum optimal	Peningkatan olahraga rekreasi
	Peningkatan prestasi olahraga
Pengembangan kapasitas pemuda belum optimal	Pengembangan organisasi kepemudaan
	Peningkatan kualitas organisasi kepramukaan
Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya	Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai religiusitas
	Peningkatan pengelolaan permuseuman
Angka putus pakai (<i>Drop Out</i>) kontrasepsinya masih tinggi	Peningkatan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)
Masih tingginya unmetneed (kebutuhan KB yang tidak terpenuhi)	
Belum optimalnya fasilitas pendampingan perempuan	Peningkatan partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik
Belum optimalnya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan
	Peningkatan perlindungan terhadap anak
	Pemenuhan hak anak
Belum optimalnya pelayanan sosial pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS
	Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan

Pemetaan Masalah	Strategi
	makam pahlawan
	Peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan non alam
Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
Masih terdapatnya ancaman dan gangguan pada kohesivitas sosial masyarakat	Peningkatan deteksi dini terhadap gangguan stabilitas wilayah yang akan mempengaruhi investasi
Belum optimalnya penanggulangan bencana	Peningkatan penanggulangan bencana
Misi 3	
Belum optimalnya kualitas dan kuantitas hasil pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan
	Peningkatan produksi sub sektor perkebunan
Belum optimalnya produksi, produktivitas ternak, dan daya saing produk hasil ternak	Peningkatan produksi sub sektor peternakan
	Pengembangan industri sektor susu
	Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Belum optimalnya tingkat produksi perikanan dan daya saing produk ikan	Peningkatan produksi sub sektor perikanan
Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata	Peningkatan ketersediaan pangan
	Peningkatan akses distribusi pangan
Belum optimalnya pembinaan pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan	Peningkatan keamanan dan pengawasan pangan
Belum optimalnya penganeekaragaman pangan lokal	Peningkatan pemanfaatan pangan yang bervariasi
Misi 4	
Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Peningkatan kualitas perencanaan Daerah
	Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
Belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi	Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja
Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penerapan kebijakan Daerah	Peningkatan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa
Belum optimalnya PAD	Peningkatan kapasitas keuangan Daerah
Masih perlunya peningkatan akuntabilitas keuangan Daerah	Peningkatan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah
	Penguatan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Daerah
Masih perlunya penguatan sistem	Penguatan kualitas sistem pengawasan Daerah

Pemetaan Masalah	Strategi
dan aparaturnya pengendalian intern pemerintah	
Manajemen kepegawaian belum optimal	Peningkatan efektivitas penerapan sistem merit dalam birokrasi
Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik
	Penguatan dukungan terhadap fungsi kecamatan
Belum optimalnya kualitas <i>data base</i> kependudukan	Penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Belum optimalnya pengelolaan depot arsip Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan
Belum optimalnya inovasi Daerah	Penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu
Belum optimalnya jaringan komunikasi dan pengelolaan data yang terintegrasi	Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik
Misi 5	
Belum optimalnya akses RLH	Peningkatan akses rumah layak huni
	Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh
	Peningkatan akses air bersih
	Peningkatan ketersediaan sanitasi
Sarana pengelolaan jaringan komunikasi belum optimal	Pengembangan layanan publik secara <i>online</i>
Belum optimalnya infrastruktur penunjang pelayanan publik	Peningkatan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai
Masih adanya konflik pertanahan	Optimalisasi penyelesaian konflik pertanahan
Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
Belum optimalnya pengelolaan limbah ternak dan industri	Pengendalian pencemaran limbah
Adanya aktivitas yang meningkatkan pencemaran udara	Pengendalian pencemaran udara
Masih perlunya peningkatan ketersediaan RTH	Peningkatan upaya pengendalian dampak perubahan iklim
	Peningkatan kualitas tutupan lahan
Volume sampah yang belum tertangani masih tinggi	Optimalisasi pengelolaan sampah

Tabel 6. 2. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Nilai Investasi	Pengembangan budaya dan citra pro investasi	Optimalisasi identifikasi dan penyediaan peta potensi investasi
			Optimalisasi pemerataan investasi wilayah Boyolali utara
			Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi ramah lingkungan
	Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan	Pembinaan, pengawasan dan pemberian penghargaan	Penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan green company, green strategy, green process, green product, green employee
	Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat & pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya	Peningkatan peran perusahaan	Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
	Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Pemanfaatan BMD	Optimalisasi BMD
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Pengembangan daya tarik wisata	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
			Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata dengan prioritas wilayah Boyolali utara
			Pengembangan pariwisata berbasis komunitas/ desa wisata
		Optimalisasi pemasaran destinasi wisata	Optimalisasi pemasaran berbasis daring dan luring
			Optimalisasi kerjasama pengembangan destinasi wisata dengan berbagai pemangku kepentingan
		Pengembangan	Fasilitasi pengembangan sentra

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		ekonomi kreatif	dan sumber daya ekonomi kreatif
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian	Peningkatan nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan akses permodalan
			Peningkatan penggunaan teknologi tepat guna
			Penerapan metode produksi berorientasi bisnis
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Peningkatan kapasitas pemasaran barang	Optimalisasi metode pemasaran barang
			Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan
			Peningkatan fasilitasi perijinan pengembangan usaha
			Peningkatan promosi produk potensial ekspor
	Meningkatnya kenyamanan transportasi	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten
			Rekonstruksi jalan kabupaten
			Rekonstruksi dan pemeliharaan jembatan kabupaten
		Peningkatan pemerataan kualitas infrastruktur	Peningkatan kualitas infrastruktur prioritas wilayah Boyolali utara untuk menopang kawasan pertumbuhan baru
		Peningkatan kualitas sistem drainase	Peningkatan ketersediaan drainase
			Pemeliharaan drainase
		Peningkatan ketersediaan prasarana perhubungan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan
			Pembangunan PJU dengan prioritas wilayah Boyolali utara
		Pengembangan sistem manajemen pelayanan	Peningkatan kelaikan angkutan orang dan barang

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		perhubungan	
		Peningkatan ketersediaan moda transportasi	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Peningkatan kelancaran distribusi barang	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
			Peningkatan ketersediaan stok barang pokok
Menurunnya tingkat kemiskinan	Menurunnya pengangguran	Peningkatan kesempatan kerja	Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
			Peningkatan jaringan kerjasama penyaluran tenaga kerja
	Meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja	Penurunan perselisihan hubungan industrial	Peningkatan penerapan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan
			Optimalisasi fungsi mediasi dan deteksi dini perselisihan hubungan industrial
	Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM koperasi	Peningkatan kapasitas pengurus koperasi
			Peningkatan kualitas metode pengelolaan koperasi
		Peningkatan omzet usaha mikro	Peningkatan kapasitas SDM pelaku UMKM
			Peningkatan standarisasi produk UMKM
			Peningkatan akses permodalan
	Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan	Meningkatnya akses dan kualitas	Peningkatan fasilitas pendidikan	Pembaharuan sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
berdaya saing	pendidikan		Peningkatan layanan ketersediaan pendidikan kesetaraan
			Peningkatan pendidikan inklusif
			Fasilitasi beasiswa pendidikan tinggi
		Peningkatan partisipasi pendidikan tingkat PAUD	Standarisasi penyelenggaraan PAUD
			Peningkatan koordinasi dengan sekolah-sekolah PAUD non-pemerintah
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan kompetensi guru
			Peningkatan akreditasi sekolah SD dan SMP
			Optimalisasi pembelajaran berbasis digital
		Peningkatan budaya baca dan literasi	Peningkatan koleksi buku perpustakaan
			Peningkatan fasilitas perpustakaan
			Pengembangan taman baca masyarakat
			Peningkatan kapasitas SDM perpustakaan
			Peningkatan kekhasan koleksi buku perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
			Peningkatan akreditasi puskesmas dan rumah sakit
			Peningkatan kapasitas SDM tenaga kesehatan
			Peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan
		Peningkatan penanganan gizi buruk dan Stunting	Pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil
			Peningkatan gizi bayi dan balita
			Peningkatan penerapan PHBS
		Peningkatan kualitas	Peningkatan penanganan komplikasi

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		kesehatan ibu	saat kehamilan
			Peningkatan penanganan komplikasi saat persalinan
			Peningkatan penanganan komplikasi pasca persalinan/nifas
			Peningkatan kunjungan K1 dan K4
			peningkatan ibu melahirkan di fasilitas kesehatan
		Peningkatan kualitas kesehatan bayi	Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
			Peningkatan gizi bayi
			Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM)
			Penurunan bayi lahir dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
		Peningkatan penanganan penyakit menular (TBC dan HIV) dan tidak menular (Hipertensi, DM)	Peningkatan pengetahuan tentang gizi seimbang
			Peningkatan edukasi masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular
			Peningkatan fasilitas kesehatan
			Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan jiwa (ODGJ)
		Penanganan dan pemulihan pandemi COVID 19	Peningkatan disiplin protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan)
			Peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan
			Fasilitasi percepatan vaksinasi COVID 19
			Peningkatan Tracking (pelacakan), Tracing (penelusuran) dan Testing (pengujian) COVID 19 dan

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
			perawatan pasien positif COVID 19
			Menggalakan konsep JOGO TONGGO dengan menyediakan kebutuhan pokok harian, obat dan vitamin bagi pasien isolasi mandiri
			pembangunan prasarana rumah sakit untuk penanganan pasien COVID 19 dan NON COVID 19
		Peningkatan upaya kesehatan berbasis masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan
			Optimalisasi peran kader kesehatan
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan	Peningkatan olahraga rekreasi	Peningkatan fasilitas olahraga rekreasi
		Peningkatan prestasi olahraga	Pemerataan fasilitas olahraga
			Pembinaan klub olahraga
			Perbaikan manajemen pembibitan atlet
		Pengembangan organisasi kepemudaan	Optimalisasi pembinaan organisasi kepemudaan
			Pengembangan organisasi kepemudaan secara tematik dan inovatif
		Peningkatan kualitas organisasi kepramukaan	Peningkatan kualitas SDM kepramukaan tingkat Daerah
			Pengembangan kegiatan kepramukaan
	Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan	Peningkatan pengelolaan kekayaan budaya dan nilai religiusitas	Pelestarian dan nilai warisan tradisi
			Pelestarian cagar budaya
			Pengembangan kreatifitas kesenian
			Peningkatan moderasi nilai religiusitas
		Peningkatan pengelolaan	Peningkatan pemeliharaan koleksi

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		permuseumman	museum
			Peningkatan kapasitas SDM permuseumman
	Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas	Peningkatan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
			Penurunan tingkat putus pakai kontrasepsi
			Pendataan dan fasilitasi pasangan usia subur yang ingin ber KB
			Peningkatan kerjasama dengan berbagai <i>stakeholder</i> untuk pengendalian usia perkawinan dibawah umur (15-19 tahun)
			Pengembangan Grand design kependudukan
			Peningkatan ketahanan keluarga
Meningkatnya Keberdayaan Sosial	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Peningkatan partisipasi perempuan aktif dalam kegiatan ekonomi dan politik	Peningkatan pengarusutamaan gender di lingkungan pemerintah dan masyarakat
			Peningkatan akses perempuan dalam dunia politik
			Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi
		Peningkatan perlindungan terhadap perempuan	Peningkatan kerja sama antar lembaga terkait (LSM)
			Peningkatan peran masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan
			Peningkatan kapasitas kader dalam melakukan pendampingan
			Peningkatan fasilitas layanan pengaduan
		Peningkatan perlindungan terhadap anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		Pemenuhan hak anak	Peningkatan pemenuhan hak-hak anak
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS	Peningkatan upaya rehabilitasi sosial diluar panti
			Peningkatan pemberdayaan penyandang disabilitas
			Peningkatan kapasitas tenaga penyelenggara kesejahteraan sosial
			Peningkatan penanganan fakir miskin
		Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan makam pahlawan	Peningkatan sistem keamanan dan kebersihan taman makam pahlawan
		Peningkatan perlindungan sosial korban bencana alam dan non alam	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan non alam saat terjadinya bencana
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
			Peningkatan pendampingan setelah tanggap darurat bencana
	Meningkatnya keberdayaan desa	Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa
			Optimalisasi teknologi tepat guna (TTG)
			Optimalisasi potensi dan aset desa
			Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan
Meningkatnya ketahanan sosial	Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat	Peningkatan deteksi dini terhadap gangguan stabilitas wilayah yang akan mempengaruhi investasi	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan dan multikulturalisme
			Optimalisasi peran organisasi masyarakat
			Peningkatan kondusifitas sosial
	Menurunnya	Peningkatan	Pembentukan desa

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
	risiko bencana	penanggulangan bencana	tangguh bencana
			Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap kebencanaan
			Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kebencanaan
			Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan kebencanaan
			Peningkatan penanggulangan kebakaran
Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kesejahteraan petani	Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Pembangunan dan perbaikan prasarana pertanian
			Peningkatan produksi dan pengembangan sarana pertanian
			Peningkatan pendampingan dan inovasi pertanian dan peternakan
			Peningkatan penanganan bencana pertanian khususnya tanaman pangan
		Peningkatan produksi sub sektor perkebunan	Pemeliharaan sarana perkebunan
		Peningkatan produksi sub sektor peternakan	Pencegahan dan penanganan penyakit ternak
			Meningkatkan ketersediaan pangan hewani yang aman sehat halal dan utuh
			Peningkatan populasi ternak
		Peningkatan produksi sub sektor perikanan	Peningkatan produksi perikanan budidaya
			Peningkatan produksi perikanan tangkap
			Peningkatan angka

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
			konsumsi ikan
	Meningkatnya agro industri susu	Pengembangan industri sektor susu	Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu
			Peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu
		Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu	Peningkatan promosi produk olahan susu
			Fasilitasi pemasaran produk olahan susu
	Meningkatnya kualitas susu	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan	Peningkatan stok cadangan pangan
			penyediaan infrastruktur lumbung pangan
		Peningkatan akses distribusi pangan	Peningkatan kualitas informasi distribusi pangan
			Penanganan Desa Rawan Pangan
		Peningkatan keamanan dan pengawasan pangan	pembinaan dan pengawasan pangan yang beredar
		Peningkatan pemanfaatan pangan yang bervariasi	Peningkatan diversifikasi pangan non beras - non terigu
Misi 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah	Peningkatan kualitas perencanaan Daerah	Peningkatan sinergitas perencanaan di tingkat Daerah dengan perangkat Daerah
		Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Pengembangan instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
			perencanaan pembangunan Daerah
			Penguatan sistem pengelolaan data kinerja
		Pembangunan kelembagaan berbasis kinerja	Peningkatan fasilitasi perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP
			Pembangunan proses bisnis dan manajemen kinerja
			Peningkatan penataan kelembagaan
			Peningkatan ketatalaksanaan
			Peningkatan fasilitasi perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
		Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan	Pengelolaan, perlindungan, dan penyelamatan arsip
			Peningkatan sistem pengelolaan kearsipan Daerah
		Peningkatan efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah	Peningkatan sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
			Peningkatan penataan kewilayahan
			Peningkatan fasilitasi dan pembinaan penyusunan produk hukum Daerah
			Peningkatan sinkronisasi, pengendalian, dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan
			Peningkatan kapasitas BUMD
			Peningkatan pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik
			Peningkatan peran penelitian sebagai dasar

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
			perumusan kebijakan
			Peningkatan dukungan kinerja DPRD
		Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
			peningkatan tata kelola pemerintahan desa aspek perencanaan dan akuntabilitas
			Peningkatan fasilitasi penataan desa
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan kapasitas keuangan Daerah	Optimalisasi dan pemanfaatan TIK dalam pengelolaan retribusi Daerah
			Identifikasi dan pendataan sumber-sumber retribusi baru
			Optimalisasi sistem pajak Daerah
			Peningkatan pengendalian dan pengawasan sumber PAD
		Peningkatan kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah	Penguatan kinerja belanja Daerah berbasis prioritas dan kebutuhan Daerah
			Peningkatan akses publik terhadap informasi keuangan Daerah
		Penguatan kualitas pelaporan pengelolaan keuangan Daerah	Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah
			Penguatan kualitas laporan keuangan Daerah
			Peningkatan efektifitas penataa usahaan, pengamanan dan pemanfaatan aset Daerah
	Meningkatnya integritas dan kapasitas Pemerintah Daerah	Penguatan kualitas sistem pengawasan Daerah	Peningkatan kelembagaan pengawasan Daerah
			Penguatan penerapan <i>whistle blowing system</i>
			Peningkatan penilaian manajemen risiko

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi				
		Peningkatan efektifitas penerapan sistem merit dalam birokrasi	Peningkatan pemerataan distribusi pegawai	
			Penempatan jabatan berbasis sistem merit	
			Peningkatan pembinaan terhadap pegawai	
			Peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan fungsional	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan kualitas sistem pelayanan publik	Penerapan instrumen pengendalian kualitas pelayanan publik	
			Peningkatan kualitas pelayanan publik kecamatan	
		Penguatan dukungan terhadap fungsi kewilayahan	Fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat kecamatan	
			Peningkatan kapasitas ASN tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa	
			Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	
		Penguatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan database kependudukan dan catatan sipil yang valid dan update	
			Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil	
		Terwujudnya <i>smart governance</i> Boyolali	Penguatan inovasi dan adaptasi teknologi terpadu	Pengembangan SPBE berbasis G to G, G to C, G to B
				Penguatan kualitas keamanan informasi Daerah
	Penguatan kelembagaan keterbukaan informasi publik		Penguatan kapasitas PPID dan PPID pembantu	
			Peningkatan kapasitas komunitas informasi masyarakat dalam penyebaran informasi pembangunan Daerah	
Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing				

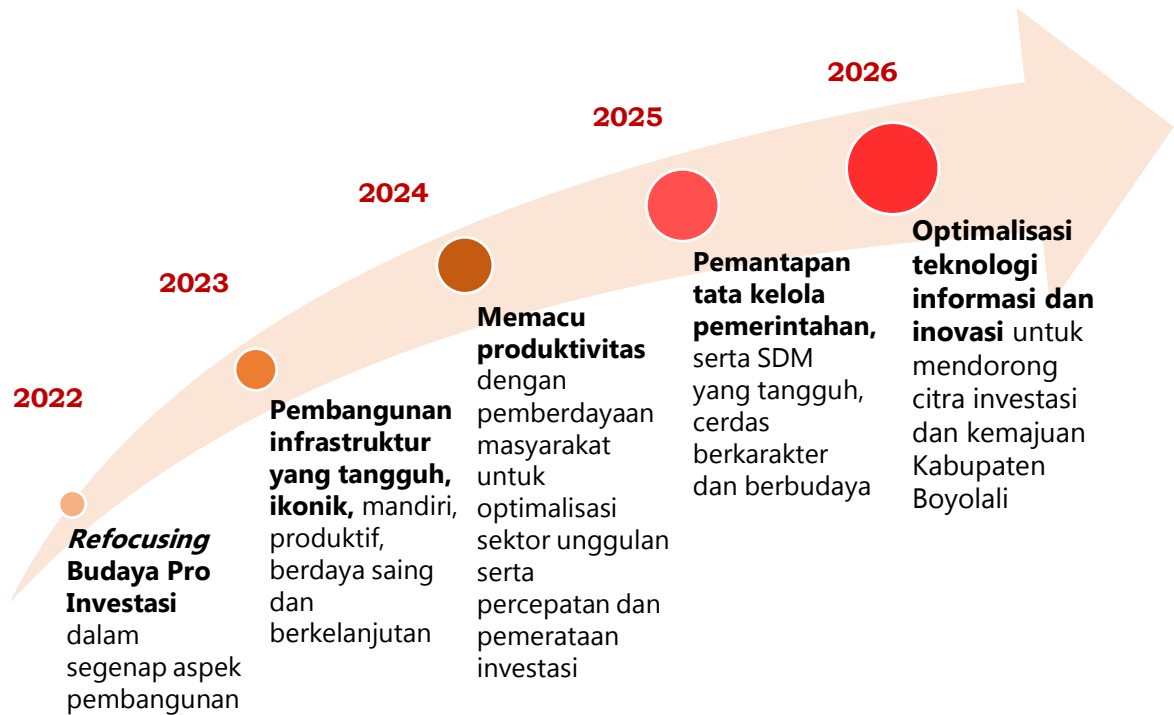
Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni	Peningkatan akses rumah layak huni Peningkatan akses rumah layak huni	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban korban bencana
			Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten
			Peningkatan kualitas rumah rusak/tidak layak huni
			Fasilitasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i>	Optimalisasi penanganan dan pencegahan kawasan kumuh	Peningkatan kualitas data kawasan kumuh
			Fasilitasi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman yang memadai
			Peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang fungsi hunian
			Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)
		Peningkatan akses air bersih	Peningkatan pengelolaan infrastruktur air baku
			Optimalisasi identifikasi sumber air
			Peningkatan pengelolaan air bersih
		Peningkatan ketersediaan sanitasi	Pengembangan sanitasi individual dan komunal
		Pengembangan layanan publik secara <i>online</i>	Pengembangan inovasi layanan publik <i>online</i>
			Peningkatan ketersediaan aplikasi layanan publik
	Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang	Peningkatan ketersediaan gedung fasilitas publik yang	Optimalisasi layanan jasa konstruksi
			Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
		memadai	fasilitas publik yang memadai
		Optimalisasi penyelesaian konflik pertanahan	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan
			Optimalisasi pengelolaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangan
		Optimalisasi penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Peningkatan ketersediaan dokumen RDTR
			Survei dan pemetaan kesesuaian tata ruang
			Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
	Meningkatnya kualitas air	Pengendalian pencemaran limbah	Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/ kegiatan dalam pengelolaan air limbah
			Peningkatan konservasi Daerah tangkapan air dan sumber-sumber air
			Optimalisasi penanganan limbah B3
			Peningkatan kualitas perencanaan lingkungan hidup
			Optimalisasi layanan pengaduan lingkungan hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Pengendalian pencemaran udara	Peningkatan kualitas udara ambien
			Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap baku emisi/ kualitas udara
		Peningkatan upaya pengendalian dampak perubahan iklim	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian emisi GRK
			Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian dampak perubahan iklim
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan kualitas tutupan lahan	Peningkatan ketersediaan RTH
			Penataan dan pemeliharaan RTH

Visi: Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi			
	Meningkatnya penanganan sampah	Optimalisasi pengelolaan sampah	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana persampahan
			Peningkatan layanan persampahan
			Peningkatan kesadaran masyarakat tentang 3R

6.2. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPJMD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD di akhir periode pembangunan.



Tabel 6. 3. Arah Kebijakan Tahunan dan Prioritas Pembangunan

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
2022	Refocusing Budaya Pro Investasi dalam segenap aspek pembangunan	Budaya pro investasi membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama untuk memperkuat implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi ekonomi, sosial, dan dikendalikan oleh aspek

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
		lingkungan. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini terkait: • Penguatan kondusivitas iklim investasi yang ditopang oleh aspek kelembagaan dan sosial masyarakat • Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi yang ramah lingkungan • Penguatan orientasi perusahaan yang menerapkan <i>green company, green strategy, green process, green product, green employee</i> • Pendataan ulang dan pendampingan UMKM/IKM, fasilitasi permodalan non tunai, serta pelatihan <i>e-commerce</i> • Mendukung percepatan prioritas pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui peningkatan fasilitas kesehatan, vaksinasi, penguatan ketahanan sosial melalui konsep <i>jogo tonggo</i> dan pemulihan dampak ekonomi
2023	Pembangunan infrastruktur yang tangguh, ikonik, mandiri, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berorientasi untuk peningkatan konektivitas antar pusat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan Boyolali, sehingga tidak terdapat ketimpangan antar wilayah. Infrastruktur juga berperan membangun ikon Daerah yang mampu mengakselerasi pembangunan pariwisata dan sektor lainnya. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini berupa: • Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat pertumbuhan dan antar kecamatan, termasuk peningkatan pembangunan infrastruktur di wilayah Boyolali utara. • Peningkatan kenyamanan transportasi melalui penguatan kualitas layanan perhubungan • Pembangunan infrastruktur ikonik, berupa taman hiburan rakyat, sarana simulasi ibadah haji, <i>prototype</i> pembangunan kantor desa dengan logo Boyolali, pembangunan ruang terbuka hijau dengan berbagai

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
		fasilitas bagi warga • Revitalisasi infrastruktur perdagangan melalui pemindahan pasar • Penataan wilayah melalui perubahan status desa/kelurahan untuk efektivitas pembangunan dan pelayanan publik. • Pembangunan RTLH untuk masyarakat yang membutuhkan dilengkapi dengan jamban sehat • Penguatan literasi masyarakat melalui penyusunan dan diseminasi bahan bacaan berbasis nilai budaya “Boyolali Kaya Cerita”, serta pembangunan perpustakaan
2024	Memacu produktivitas dengan pemberdayaan masyarakat untuk optimalisasi sektor unggulan serta percepatan dan pemerataan investasi	Identitas Boyolali Kota Susu dan Boyolali Lumbung Pangan mencerminkan sektor unggulan yang perlu semakin dioptimalkan. Optimalisasi sektor unggulan memiliki konsep terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Strategi utama yang dijalankan berupa penerapan <i>good farming practices</i>, fasilitasi kebutuhan modal, pengembangan kemitraan yang sehat, pendampingan dari hulu ke hilir hingga memberi nilai tambah pasca produksi. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini antara lain: • Peningkatan produksi tanaman pangan, inovasi pertanian dan peternakan • Pendampingan UMKM/IKM secara berkelanjutan • Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu • Peningkatan kapasitas pemasaran produk olahan susu dan peningkatan kompetensi SDM pelaku agro industri susu • Peningkatan daya saing pariwisata melalui strategi peningkatan daya tarik, promosi, kerjasama pariwisata, serta penguatan sektor ekonomi kreatif • Peningkatan pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara, terutama dalam realisasi investasi, peningkatan daya tarik

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
		wisata, dan peningkatan kualitas infrastruktur yang menopang pusat pertumbuhan baru di wilayah wilayah Boyolali utara • Peningkatan keberdayaan masyarakat desa melalui optimaliasi potensi/aset desa, penguatan BUMDesa dan pembangunan kawasan pedesaan • Peningkatan keberdayaan PMKS, dengan prioritas kelompok sasaran penyandang disabilitas dan rehabilitasi ODGJ • Pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas di setiap desa dan kecamatan
2025	Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya	Tahun 2025 merupakan tahun pemantapan untuk pembangunan tata kelola pemerintahan dan SDM. Pemantapan berarti semakin memperkuat capaian pembangunan pada periode atau tahun sebelumnya. Prioritas pembangunan pada 2025 antara lain: • Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan di seluruh perangkat Daerah • Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan • Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD • Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional • Peningkatan derajat kesehatan masyarakat • Pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif, dan merata • Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak • Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik • Pelestarian dan pengembangan budaya benda dan tak benda, baik untuk tujuan edukasi, penguatan kerukunan masyarakat, dan peningkatan perekonomian.

Tahun	Arah Kebijakan Tahunan	Prioritas Pembangunan
2026	Optimalisasi teknologi informasi dan inovasi untuk mendorong citra investasi dan kemajuan Kabupaten Boyolali	Akhir periode perencanaan 2021-2026 Boyolali semakin memperkuat citra Daerah yang Pro Investasi dengan daya saing Daerah dan masyarakat yang tinggi. Penguatan daya saing ditopang dengan penerapan <i>Smart City</i> dan <i>Smart Governance</i> dengan berbagai inovasi dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan. Prioritas pembangunan dalam arah kebijakan ini berupa: • Penguatan inovasi dan penerapan teknologi terpadu dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik • Penyebarluasan inovasi berbasis masyarakat, terutama dalam penerapan teknologi tepat guna sebagai sarana pemberdayaan masyarakat • Penguatan pemerintahan yang terbuka dan kolaboratif melalui sinergi manajemen pemerintahan, peran masyarakat, dan swasta • Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis <i>smartness</i> • Pengelolaan lingkungan yang cerdas dan meningkatkan kenyamanan hidup

Rumusan arah kebijakan perlu memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi, agar tercapai sinergi pembangunan antara level pemerintah. Kebijakan Pemerintah Pusat salah satunya tentang Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kabupaten Boyolali dalam konteks ini berperan mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan. Kabupaten Boyolali berada dalam Kawasan Pengembangan Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten). Adapun proyek strategis yang berjalan di Kabupaten Boyolali dan

dukungan arah kebijakan yang bersifat lintas sektor untuk akselerasi dampak sosial ekonomi dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6. 4. Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 Terhadap Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

No	Proyek Strategis Berdasarkan Perpres 79 Tahun 2019	Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026
1	Pembangunan Pasar Induk Simo dan Ampel	• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan • Peningkatan kapasitas SDM dan akses permodalan bagi pelaku UMKM • Optimalisasi pengelolaan pertanahan sesuai peraturan perundangan
2	Revitalisasi Waduk Cengklik	• Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian • Fasilitasi pengembangan daya tarik wisata di wilayah Boyolali utara • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata
3	Pembangunan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri Klego (masih adanya tantangan terkait pengadaan tanah, sehingga memerlukan kemitraan dengan pihak swasta/investor dalam pengadaan tanah untuk kawasan industri)	• Peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah Boyolali utara untuk menopang kawasan pertumbuhan baru • Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan • Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang • Peningkatan kemudahan perizinan dan promosi investasi ramah lingkungan • Optimalisasi pemerataan investasi di wilayah Boyolali utara • Peningkatan kelaikan angkutan orang dan barang • Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan • Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten • Rekonstruksi jalan kabupaten

Kebijakan Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah juga perlu dicermati Kabupaten Boyolali, terutama terkait Program Utama yang berlokasi di Kabupaten Boyolali. Berikut persandingan Program Utama di dalam Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 dengan dukungan arah kebijakan di dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026.

Tabel 6. 5. Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026 terhadap Program Utama Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029

No	Program Utama Perubahan RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009-2029	Dukungan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026
	Sistem Jaringan Transportasi Darat	
1	Pengembangan terminal (peningkatan dan pengembangan terminal penumpang)	• Pengembangan sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi • Peningkatan kelaikan angkutan orang dan barang • Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan • Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan kabupaten • Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan • Optimalisasi pengelolaan pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundangan • Peningkatan ketersediaan dokumen RDTR • Survei dan pemetaan kesesuaian tata ruang • Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api	
2	Pengembangan kereta api regional	
	Sistem Jaringan Transportasi Udara	
3	Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan bandar udara pengumpul skala sekunder internasional	
4	Penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan	
5	Penataan batas kawasan kebisingan	
6	Penataan Daerah lingkungan kerja	
7	Penataan Daerah lingkungan kepentingan	
	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	
8	Peningkatan Depo BBM	• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan pertanahan • Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang
	Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	
9	Kawasan Agropolitan Semarboyong (Semarang, Boyolali, Magelang)	• Peningkatan pendampingan dan inovasi pertanian dan peternakan • Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan • Peningkatan produksi perikanan budidaya dan tangkap • Peningkatan populasi ternak • Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung industri pengolahan susu • Optimalisasi pembangunan kawasan perdesaan

6.3. Integrasi Program Rekomendasi KLHS

Perumusan program pembangunan Daerah dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya pendekatan teknokratik, politik, juga memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Dokumen perencanaan yang memperhatikan *SDGs* berupaya mengarahkan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Telaah tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah dianalisis di dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merumuskan beberapa rekomendasi program pembangunan Daerah yang perlu diintegrasikan di dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dasar dari perumusan rekomendasi program tersebut didasarkan pada isu strategis prioritas yang ada di Kabupaten Boyolali. Lima isu strategis prioritas yang paling atas adalah Kemiskinan dan kesenjangan; Perekonomian masyarakat; Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; Penyediaan air bersih belum optimal; Infrastruktur wilayah belum optimal. Selain 5 isu prioritas tersebut, masih terdapat total 14 isu yang didasarkan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Boyolali terdiri dari 5 misi yang masing-masing menaungi rumpun urusan yang berbeda,. Terdapat 31 program yang menjadi rekomendasi dari kajian lingkungan hidup strategis yang menjadi salah satu masukan dalam penyusunan program dalam RPJMD, jika dijabarkan berdasarkan misi, berikut beberapa program rekomendasi KLHS yang mendukung masing-masing misi RPJMD:

- a. Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan
 - Program Hubungan Industrial
 - Program Pemasaran Pariwisata
 - Program Penempatan Tenaga Kerja
- b. Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya
 - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Rehabilitasi Sosial

- Program Penanggulangan Bencana
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Pengelolaan Pendidikan
 - Program Pengendalian Penduduk
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- c. Misi 3: Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional
- Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- d. Misi 4 : Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
- Program Pendaftaran Penduduk
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Program Pencatatan Sipil
 - Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- e. Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Program Kawasan Permukiman
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Program Pengelolaan Persampahan
 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Dari beberapa program diatas ada program rekomendasi KLHS yang mewakili kriteria kemiskinan antara lain:

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui penyediaan fasilitas buang air besar /bersama-sama bagi rumah tangga miskin
- Program Pengelolaan Pendidikan melalui kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A & kejar paket B
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat melalui Desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan posyantek desa
- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum melalui rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
- Program Kawasan Permukiman melalui penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin

Tabel 6. 6. Integrasi Rekomendasi Program KLHS dalam RPJMD Kabupaten Boyolali 2021-2026

NO	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1						Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5								
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan						Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing								
		T1				T2	T3	T4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S1	S2	S3	S4	S1	S1	S1	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S1	S2	S1	S2	S3	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7
Rekomendasi Program Berdasarkan Permendagri 90/2019															√																		
1	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																																
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								√																								

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
3	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					√																											
4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL													√																			
5	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																											√					
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																											√					

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																																
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5								
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing								
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1							
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	
7	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																								√									
8	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																									√	√							
9	PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA																√																	
10	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																					√												
11	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN																			√														

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																																
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5								
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing								
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1							
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	
	PANGAN																																	
12	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																			√														
13	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								√																									
14	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							√																										

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
15	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK											√																					
16	PRORAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)											√																					
17	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																				√												
18	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		√																														
19	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																				√												

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
	DAERAH																																
20	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					√																											
21	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																							√									
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKAT AN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT															√																	

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
23	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH																						√										
24	PROGRAM PENCATATAN SIPII																							√									
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																										√						
26	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																																√

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
27	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																																
28	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)																																
29	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH																																

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																															
		Misi 1							Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan							Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1						
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6	S 7
	BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																																
30	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT																																
31	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																																
32	PROGRAM PENCATATAN SIPIL																																

N O	REKOMENDASI PROGRAM KLHS RPJMD KABUPATEN BOYOLALI	SASARAN RPJMD KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 -2026																														
		Misi 1						Misi 2									Misi 3			Misi 4					Misi 5							
		Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan						Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya									Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional			Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya					Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing							
		T1				T 2	T 3	T 4	T1					T2			T3		T1			T1					T1					
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 1	S 1	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 1	S 2	S 3	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 1	S 2	S 3	S 4	S 5	S 6
Rekomendasi Program Berdasarkan Aspirasi Masyarakat																																

6.4. Program Pembangunan Daerah

6.4.1. Prioritas Pembangunan Daerah

Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang memiliki dimensi politik dan teknokratik. Program pembangunan Daerah dalam dimensi politik berisi prioritas pembangunan dan bersifat unggulan yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian dalam dokumen perencanaan. Prioritas pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali dalam periode 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 6. 7. Prioritas Pembangunan Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
1	Pendataan ulang UMKM/IKM	• Pendataan ulang UMKM/IKM agar terdapat data yang riil dan untuk mengetahui kriteria UMKM/IKM maju, sedang, rendah sehingga dapat menentukan intervensi pembangunan yang tepat di setiap kriteria	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
2	Pendampingan UMKM/IKM	• Pendampingan UMKM/IKM dari hulu ke hilir agar mampu menciptakan nilai tambah hasil produksi. • Pendampingan UMKM/IKM dalam mengoptimalkan potensi unggulan susu, sehingga tercipta agro industri yang mampu meningkatkan produk olahan susu.	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
3	Fasilitasi permodalan non tunai degan kredit/pinjaman bank bunga rendah	• Skema fasilitasi yang dimulai dari pemetaan UMKM/IKM yang layak mendapatkan pendampingan, fasilitasi pembuatan rekening Bank Boyolali, hingga fasilitasi kredit pinjaman bank bunga rendah.	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM
4	Pelatihan <i>e-commerce</i>	• Pelatihan <i>e-commerce</i> untuk penguatan penerapan teknologi	• Program Pemberdayaan Usaha Menengah,

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
		informasi dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM/IKM	Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Program Pengembangan UMKM
5	Pemberdayaan disabilitas dan penjaminan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	- Konsep pembangunan <i>no-one left behind</i> menjadikan berbagai kelompok masyarakat marginal harus terlibat dan merasakan manfaat pembangunan. - Dalam konteks ini, prioritas kepada kelompok disabilitas yang harus diberdayakan dalam usaha ekonomi produktif dan adanya jaminan bagi ODGJ untuk mendapat layanan kesehatan jiwa.	- Program Rehabilitasi Sosial - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Penanganan dan pemulihan Pandemi Covid-19 melalui vaksinasi	Vaksinasi menjadi program prioritas nasional yang harus didukung Daerah dalam upaya pemulihan dampak dan lepas dari Pandemi Covid-19. Dukungan Daerah dalam berbagai <i>input</i>, yaitu SDM, anggaran, sarana-prasarana, dan akses vaksin sesuai kebijakan nasional.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Perawatan bagi pasien positif Covid-19	Upaya penanganan Covid-19 dengan peningkatan fasilitas perawatan bagi pasien	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Menggalakkan konsep <i>Jogo Tonggo</i>	<i>Jogo tonggo</i> adalah upaya membangun ketahanan sosial di tengah pandemi dan relevan dengan konsep penanganan Covid-19 mulai dari skala mikro atau komunitas masyarakat. <i>Jogo tonggo</i> diimplementasikan melalui fasilitasi penyediaan kebutuhan pokok harian, obat dan vitamin bagi pasien yang menjalankan isolasi mandiri.	Program Penanganan Bencana

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
9	Pembangunan eduwisata religi manasik haji	Bagian dari pembangunan infrastruktur ikonik Daerah, serta pembangunan daya tarik wisata edukatif dan religius	Program Penataan Bangunan Gedung
10	Pemindahan Pasar Boyolali ke Sonolayu	Pemindahan pasar dalam konteks revitalisasi, penataan ruang yang layak bagi aktivitas jual beli, serta peningkatan sarana distribusi perdagangan.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11	Peningkatan aspal jalan dan pembangunan PJU	Bagian dari upaya mewujudkan kenyamanan transportasi, dan mempercepat konektivitas antar wilayah, pemerataan pembangunan di wilayah Boyolali Utara sehingga mampu mendukung iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
12	Penganggaran untuk penanganan Covid-19	Penanganan Covid-19 yang tetap menjadi prioritas memerlukan dukungan kebijakan penganggaran terutama dalam penanganan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, mendukung vaksinasi, serta pemulihan dampak sosial ekonomi,	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
13	Optimalisasi fungsi ruang RS untuk penanganan Covid-19	Optimalisasi fungsi ruang RS untuk penanganan terpisah antara Pasien Covid-19 dengan non Covid-19 dengan filter <i>screening</i> di IGD. Optimalisasi ini bagian dari upaya peningkatan fasilitas penanganan dan menekan persebaran Covid-19	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Prototipe pembangunan Kantor Desa, Kelurahan, dan Kecamatan dengan simbol logo	Prototipe pembangunan kantor Desa, kantor Kelurahan dan kantor Kecamatan bagian dari pembangunan infrastruktur ikonik,	Program Penataan Bangunan Gedung

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
	Boyolali	serta tidak kalah penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, kecamatan, dan kelurahan dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.	
15	Pembangunan perpustakaan	Pembangunan perpustakaan dengan mengoptimalkan aset Pemerintah Daerah, dan dalam rangka meningkatkan budaya baca dan literasi masyarakat.	Program Pembinaan Perpustakaan
16	Penyusunan Buku “Boyolali Kaya Cerita”	- Penyusunan buku yang dihimpun berdasarkan cerita lokal dari seluruh desa/kecamatan di Boyolali - Buku dibuat versi <i>e-book</i> dan dijadikan referensi bahan ajar muatan lokal untuk siswa TK, PAUD, dan SD, sehingga meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya dan meningkatkan kecintaan pada Boyolali	Program Pembinaan Perpustakaan
17	Penataan/Perubahan status desa/kelurahan	- Penataan wilayah dalam konteks perubahan status kelurahan menjadi desa atau desa menjadi kelurahan sangat dimungkinkan dengan mempertimbangkan aspirasi/kebutuhan masyarakat dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. - Prioritas penataan wilayah yang direncanakan adalah perubahan status Kelurahan Sambeng menjadi Desa Sambeng, Desa Karanggeneng menjadi Kelurahan Karanggeneng, dan Desa Winong menjadi Kelurahan Winong.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
		• Penataan wilayah juga terkait perubahan letak area dalam wilayah, yaitu sebagian wilayah Karanggeneng dan sebagian wilayah Kemiri (kompleks perkantoran pemda) yang dimasukkan dalam Kelurahan Siswodipuran Kecamatan Boyolali.	
18	Inventarisasi aset lahan kosong untuk dimanfaatkan sebagai RTH terintegrasi	• Aset Pemerintah Daerah perlu diinventarisasi dan dimanfaatkan/dikelola agar membawa dampak bagi tujuan pembangunan. • Pemanfaatan aset lahan kosong yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilengkapi shelter bagi PKL terdampak penertiban, fasilitas wifi, taman bermain, dan sarana hiburan rakyat. • Pembangunan sarana hiburan, yaitu Taman Hiburan Rakyat berupa Taman Wayang yang rencana berlokasi di bekas Pasar Boyolali. Pembangunan Taman Wayang sekaligus berorientasi sebagai sarana pelestarian nilai budaya dan ruang ekspresi budaya, khususnya kesenian wayang.	• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
19	Pembangunan RTLH untuk masyarakat yang membutuhkan dilengkapi dengan jamban sehat	• Perumahan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga urgen untuk meningkatkan pembangunan bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni dan dilengkapi dengan jamban sehat • Pembangunan ini didahului dengan identifikasi/pendataan	• Program Kawasan Permukiman

No	Prioritas Pembangunan	Konsep Operasional	Program Berdasarkan Nomenklatur
		masyarakat yang memiliki RTLH, terutama masyarakat tidak mampu, sehingga program dapat tepat sasaran.	
20	Pengelolaan sampah 3R di setiap desa dan kecamatan	• Pengelolaan sampah 3R di setiap desa dan kecamatan memiliki konsep pengelolaan sampah berbasis komunitas. • Pengelolaan sampah 3R berbasis komunitas sebagai bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan persampahan secara umum di Boyolali, yang berorientasi pada kenyamanan/kelestarian lingkungan, dan berpotensi menjadi peluang usaha bagi kelompok ekonomi masyarakat desa.	• Program Pengelolaan Persampahan

6.4.2. Program Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor Kabupaten Boyolali (*Cross-Cutting*)

Fokus pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah tidak lepas dari isu kemiskinan. Berbagai pendekatan terhadap pengentasan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah, namun belum menuai hasil yang maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karakteristik kemiskinan yang multidimensional. Faktor inilah yang mengharuskan standar yang digunakan untuk mengintervensi permasalahan kemiskinan harus dari berbagai sektor. Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasi standar kriteria kemiskinan menjadi 14 kriteria dan mewakili dari berbagai aspek. Pemerintah Daerah menggunakan kriteria kemiskinan tersebut dalam menangani permasalahan kemiskinannya. Adapun 14 kriteria yang digunakan oleh Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 m² per orang;
2. Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan;

3. Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester;
4. Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain;
5. Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik;
6. Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan;
7. Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah;
8. Hanya Mengonsumsi Daging/Susu/Ayam dalam satu kali Seminggu;
9. Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun.
10. Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu/Dua Kali dalam Sehari;
11. Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik;
12. Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah: Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan;
13. Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga: Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD;
14. Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya.

Kriteria kemiskinan yang disusun oleh BPS di atas mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, sosial, infrastruktur, dan sebagainya. Seluruh kriteria tersebut perlu diidentifikasi untuk menentukan keterwakilannya dalam program-program yang terdapat dalam peraturan terkait. Program yang mewakili kriteria kemiskinan akan menjadi program prioritas Pemerintah Daerah untuk satu periode ke depan. Adapun hasil identifikasi terhadap program-program yang mewakili kriteria kemiskinan, adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 8. Identifikasi Program yang Mewakili Kriteria Kemiskinan

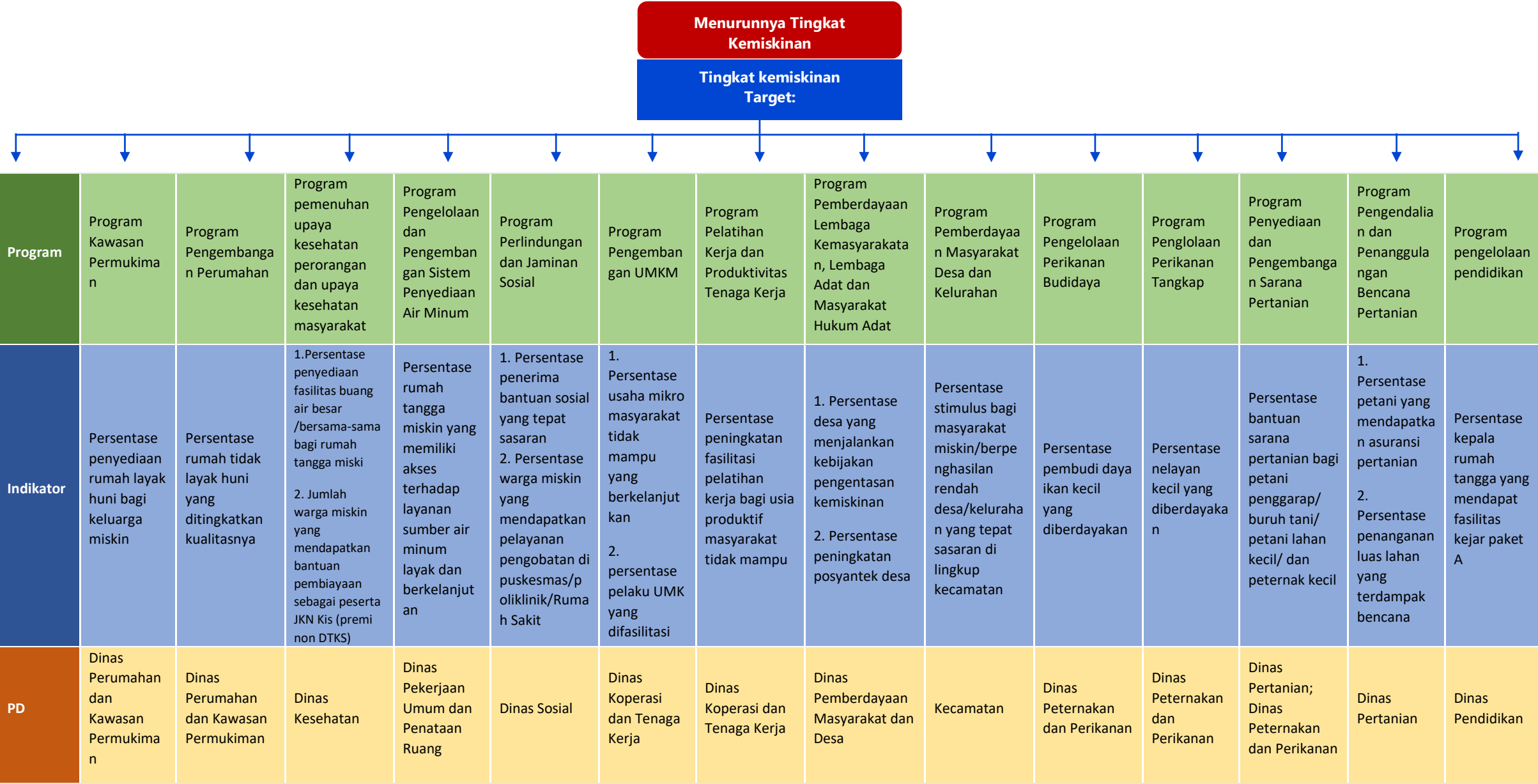
Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
RTLH	Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kurang dari 8 M2 per Orang.	Program Kawasan Permukiman	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin
	Jenis Lantai Tempat Tinggal Terbuat dari Tanah/Bambu/Kayu Murahan.	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya
	Jenis Dinding Tempat Tinggal dari Bambu/Rumbia/Kayu Berkualitas Rendah/Tembok Tanpa Diplester.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase penyediaan fasilitas buang air besar /bersama-sama bagi rumah tangga miskin
	Tidak Memiliki Fasilitas Buang Air Besar/Bersama-sama dengan Rumah Tangga Lain.		
Air Minum	Sumber Air Minum berasal dari Sumur/Mata Air tidak terlindung/Sungai/Air Hujan.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan
Pendapatan perkapita (Bantuan Sosial, Tenaga Kerja, dan Pemberdayaan)	Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak Menggunakan Listrik.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran
	Hanya Mengonsumsi Daging /Susu /Ayam dalam satu kali Seminggu.	Program Pengembangan UMKM	• Persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan • persentase pelaku UMK yang difasilitasi
	Hanya Membeli Satu Stel Pakaian Baru dalam Setahun.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan fasilitasi pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu
	Bahan Bakar untuk Memasak sehari-hari adalah Kayu Bakar/Arang/Minyak Tanah.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	• Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan • Persentase peningkatan posyantek desa
	Hanya Sanggup Makan Sebanyak Satu / Dua Kali dalam Sehari.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan

Klaster	Kriteria Kemiskinan	Program	Indikator Program
	Sumber Penghasilan Kepala Rumah Tangga adalah : Petani dengan Luas Lahan 500 M2, Buruh Tani, Nelayan, Buruh Bangunan, Buruh Perkebunan dan atau Pekerjaan Lainnya dengan Pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per Bulan.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase bantuan sarana pertanian bagi petani penggarap/ buruh tani/ petani lahan kecil/ dan peternak kecil
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	• Persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian • Persentase penanganan luas lahan yang terdampak bencana
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase nelayan kecil yang diberdayakan
	Tidak Memiliki Tabungan/Barang yang Mudah dijual dengan Minimal Rp. 500.000,- seperti Sepeda Motor Kredit/Non Kredit, Emas, Ternak, Kapal Motor, atau Barang Modal Lainnya.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan
Kesehatan	Tidak Sanggup Membayar Biaya Pengobatan di Puskesmas/Poliklinik.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/poliklinik/Rumah Sakit
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)
Pendidikan	Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga : Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD/Tamat SD.	Program pengelolaan Pendidikan	Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A

Dari hasil identifikasi terhadap program-program dalam peraturan terkait, secara umum di bagi ke dalam 5 (lima) klaster, yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), air minum, pendapatan per kapita, Kesehatan, dan Pendidikan. Klaster-klaster tersebut kemudian mewakili satu sampai beberapa program sehingga total program yang diidentifikasi, yaitu 14 program prioritas.

Program prioritas ini kemudian diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Daerah melalui pendekatan *cross-cutting*. *Cross-cutting* ini memberikan gambaran secara jelas mengenai pengentasan kemiskinan lintas sektor di Daerah. Selain itu, pendekatan *cross-cutting* ini menunjukkan bahwa dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan kolaborasi dari berbagai perangkat Daerah. Berikut ini adalah gambaran pengentasan kemiskinan lintas sektor di Daerah.

Gambar 6. 1. Pengentasan Kemiskinan Lintas Sektor di Daerah



6.4.3. Program Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan Daerah dalam dimensi teknokratik mengacu pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran, serta berdasarkan rumusan strategi yang telah dipilih. Program pembangunan dalam dimensi teknokratik juga membangun keterpaduan antara prioritas pembangunan yang bersifat politik dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang berorientasi *outcome* dan *impact*. Berikut adalah rincian seluruh program pembangunan Daerah yang dapat dilihat keselarasannya dengan sasaran pembangunan Daerah:

Tabel 6. 9. Program Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Misi 1: Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi, dan Berkelanjutan																						
Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			Persen	- 1,24	3,68-5,15		4,18-5,40		4,68-5,65		5,18-5,90		5,68-6,15		5,68-6,15					
	Meningkatnya nilai investasi	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)			Nilai (dalam juta)	1.675.462	1.711.512		1.771.109		1.830.707		1.890.305		1.949.902		9.153.535					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan peninjauan kerjasama investasi	Persen	25,00	30,00	135.640.000	35,00	135.640.000	40,00	135.640.000	45,00	135.640.000	50,00	135.640.000	50,00	678.200.000	Penanaman Modal	Dihitung dari jumlah promosi investasi tahun berkenaan		
				Persentase realisasi investasi di wilayah Boyolali utara	Persen	29,00	30,00		31,00		32,00		33,00		34,00		34,00		Penanaman Modal	Dihitung dari realisasi investasi di wilayah Boyolali utara tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi	Persen	-	9,09	813.840.000	18,18	813.840.000	27,27	813.840.000	36,36	813.840.000	45,45	813.840.000	45,45	4.069.200.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dihitung dari jumlah dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi		
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50,00	58,00	90.426.000	63,00	90.426.000	65,00	90.426.000	71,00	90.426.000	75,00	90.426.000	75,00	452.130.000	Penanaman Modal	Dihitung berdasarkan jumlah potensi investasi dalam tahun berkenaan		
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM perizinan investasi	Nilai	82,46	82,55		83,50		84,50		85,00		86,00		86,00		Penanaman Modal	Nilai IKM perizinan investasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Penanaman Modal	Dihitung dari jumlah sistem informasi dan data yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan		
			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	18,18	19,26		19,91		21,00		21,65		23,16		23,16		Penanaman Modal	Dihitung dari jumlah perusahaan wajib lapor LKPM		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan			Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah pengajuan izin Lingkungan yang teregistrasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	60,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		70,00		Lingkungan Hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH (200 perusahaan)		
				Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	1.000.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah perusahaan yang ramah lingkungan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat & pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya	Persentase peningkatan peran perusahaan			Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah perusahaan pelaksana TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)	Perusahaan		1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00		Sekretariat Daerah	Dihitung dari jumlah perusahaan pelaksana TJSLP tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD	Persentase pemanfaatan BMD			Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	BMD		1,00		2		3,00		4,00		5,00		5,00		Keuangan	Dihitung jumlah BMD yang dimanfaatkan		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata			Persen	5,55	0,50		1,25		2,00		2,75		3,50		3,50					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	4,44	6,70	10.264.018.000	8,90	10.264.018.000	11,10	10.264.018.000	13,30	10.264.018.000	15,60	10.264.018.000	15,60	51.320.090.000	Pariwisata	Dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan Obyek wisata di boyolali yg sudah terdaftar (45 obyek wisata)		
				Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	2,00	6,76		11,52		16,28		21,04		25,80		25,80		Pariwisata	Dihitung berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara	Persen	33,00	42,00	5.904.709.000	50,00	5.904.709.000	58,00	5.904.709.000	67,00	5.904.709.000	75,00	5.904.709.000	75,00	29.523.545.000	Pariwisata	Dihitung dari jumlah seluruh destinasi wisata di wilayah Boyolali utara pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	Persen	100,00	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	1.904.265.000	Pariwisata	Dihitung dari jumlah destinasi wisata yang berhasil dipasarkan pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen	5,00	11,10	207.980.000	11,10	207.980.000	13,30	207.980.000	15,60	207.980.000	15,60	207.980.000	15,60	1.039.900.000	Pariwisata	Dihitung dari jumlah keseluruhan Obyek wisata di boyolali yg sudah terdaftar pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	Persen		13,33	361.706.000	20,00	361.706.000	26,67	361.706.000	33,30	361.706.000	40,00	361.706.000	40,00	1.808.530.000	Pariwisata	Dihitung dari jumlah pelaku ekonomi kreatif yg sudah terdaftar pada tahun berke		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor peindustrian terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri			Persen	1,83	3,88		4,91		5,94		6,97		8,00		8,00					
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih	Persen	0,90	4,70	221.545.000	4,80	221.545.000	4,90	221.545.000	5,00	221.545.000	5,10	221.545.000	24,00	1.107.725.000	Perindustrian	Dihitung berdasarkan jumlah IKM pada tahun berkenaan		
				Persentase peningkatan akses permodalan	Persen		0,31		0,67		1,09		1,56		2,08		2,08		Perindustrian	Dihitung berdasarkan jumlah IKM pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna	Persen		1,04		2,08		3,12		4,15		5,19		5,19		Perindustrian	Dihitung berdasarkan jumlah IKM pada tahun berkenaan		
				Persentase IKM yang menerapkan metode produksi berorientasi bisnis	Persen		0,52		1,04		1,56		2,08		2,60		2,60		Perindustrian	Dihitung berdasarkan jumlah IKM pada tahun berkenaan		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan			Persen	3,72	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	Persen	50,00	0,62	45.213.000	0,72	45.213.000	0,77	45.213.000	0,82	45.213.000	0,97	45.213.000	0,97	226.065.000	Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah pelaku usaha tahun berkenaan		
				Persentase informasi perdagangan barang yang harus diawasi.	Persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perdagangan	Dihitung berdasarkan kuota elpiji pada tahun berkenaan		
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur	Persen	51,82	57,00	20.000.000	62,00	20.000.000	67,00	20.000.000	72,00	20.000.000	75,00	20.000.000	75,00	100.000.000	Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah alat UTTP tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perijinan pengembangan usaha toko modern yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah pengajuan rekomendasi pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang dipromosikan	Persen	12,50	20,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah UKM & IKM potensial ekspor kabupaten Boyolali pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor	Persen		11,10	470.000.000	12,16	470.000.000	12,45	470.000.000	12,50	470.000.000	12,70	470.000.000	12,70	2.350.000.000	Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah pelaku ekspor tahun berkenaan		
	Meningkatnya kenyamanan transportasi	Persentase jalan dalam kondisi mantap			Persen	82,52	82,72		82,92		83,12		83,32		83,52		83,52					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	82,52	82,72	71.675.871.100	82,92	64.259.640.100	83,12	108.358.105.850	83,32	170.136.687.520	83,52	192.189.421.621	83,52	606.619.726.191	Pekerjaan Umum	Didasarkan pada jumlah seluruh panjang jalan (678 km)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase infrastruktur berkondisi mantap yang menghubungkan pusat pertumbuhan di wilayah Boyolali utara	Persen	77,31	79,21		81,33		83,83		85,33		87,30		87,30		Pekerjaan Umum	Didasarkan pada Panjang jalan di wilayah Boyolali utara		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	26,19	26,30	2.260.667.000	26,50	2.260.667.000	26,70	2.260.667.000	26,90	2.260.667.000	27,10	2.260.667.000	27,10	11.303.335.000	Pekerjaan Umum	Didasarkan pada seluruh jumlah panjang drainase		
		Rasio konektivitas kabupaten			Rasio	0,36	0,38		0,39		0,39		40,00		0,40		0,40					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	79,50	80,00	6.230.000.000	81,00	6.230.000.000	82,00	6.230.000.000	83,00	6.230.000.000	84,00	6.230.000.000	84,00	31.150.000.000	Perhubungan	Dihitung berdasarkan jumlah total prasarana perhubungan		
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	45,00	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	46,00	1.553.078.000	46,00	7.765.390.000	Perhubungan	jumlah KBWU (kendaraan bermotor wajib uji) Angkutan Umum (1519 KBWU)		
				Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia	Persen	79,50	80,00	99.000.000	81,00	218.000.000	82,00	218.000.000	83,00	182.392.280	84,00	179.120.379	84,00	896.512.659	Perhubungan	Dihitung berdasarkan jumlah sarana prasarana pendukung aglomerasi yang tersedia		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa	Indeks Harga Konsumen			Angka	106,89	109,89		112,89		115,39		117,89		120,39		120,39					
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Persen	75,00	79,54		84,09		86,36		88,63		90,90		90,90		Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah pasar yang dimiliki pada tahun yang berkenaan		
				Persentase pedagang yang tertib lokasi	Persen	83,00	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh pedagang di lingkungan pasar pada tahun berkena		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar	Rupiah	7.534.344.000	4.000.891.600		4.000.891.600		4.808.475.000		5.212.266.700		5.212.266.700		23.234.791.600		Perdagangan	Dihitung dari jumlah pendapatan retribusi pelayanan pasar pada tahun yang berkenaan		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisiensi variasi harga antar waktu	Persen	-	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	100.000.000	Perdagangan	Dihitung berdasarkan koefisiensi variasi harga antar waktu pada tahun berkenaan		
Menurunnya tingkat kemiskinan		Tingkat Kemiskinan			Persen	10,18	9,18-8,68		8,18-7,18		7,18-5,68		6,18-4,18		5,18-2,68		5,18-2,68					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka			Persen	5,28	4,45		4,03		3,61		3,19		2,78		2,78					
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Persen		0,46	1.500.000.000	1,23	1.500.000.000	2,00	1.500.000.000	2,76	1.500.000.000	3,53	1.500.000.000	3,53	7.500.000.000	Tenaga Kerja	Didasarkan pada total tenaga kerja tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase peningkatan fasilitas pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja	Didasarkan pada fasilitas pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu tahun berkenaan		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	44,58	47,00	500.000.000	47,50	500.000.000	48,00	500.000.000	48,50	500.000.000	50,00	500.000.000	50,00	2.500.000.000	Tenaga Kerja	Didasarkan pada pencari kerja yang terdaftar tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja	Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak hak pekerja (kebebasan berserikat)			Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Persen		70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Tenaga Kerja	Didasarkan pada perusahaan yang dibina		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penangggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	42,23	42,48		42,73		42,98		43,23		43,48		43,48		Tenaga Kerja	Didasarkan pada jumlah seluruh perusahaan tahun berkenaan		
				Persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja dan kebebasan berserikat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja	Didasarkan pada jumlah seluruh perusahaan tahun berkenaan		
				Persentase perusahaan yang mempekerjakan penduduk boyolali termasuk difabel	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja	Didasarkan pada jumlah seluruh perusahaan tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian	Persentase koperasi yang SHUnya meningkat			Persen	16,78	17,34		17,90		18,46		19,03		19,59		19,59					
		Jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya			Jumlah	30,00	60,00		63,00		66,00		69,00		72,00		72,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih	Persen	27,40	41,10		54,79		68,49		82,19		95,89		95,89		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah koperasi yang ada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dibangun yang meningkatkan nilai kesehatannya	Persen	6,28	6,39		6,62		6,85		7,08		7,31		7,31		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah koperasi yang ada (876 koperasi)		
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan SDM pelaku UMKM yang terlatih	Persen	0,18	0,73	390.304.000	1,03	390.304.000	1,41	390.304.000	1,86	390.304.000	2,39	390.304.000	2,39	1.951.520.000	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah pelaku usaha mikro yang ada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase pelaku UMKM yang menerapkan metode produksi sesuai standar	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah pelaku usaha mikro yang ada tahun berkenaan		
				Persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah usaha mikro masyarakat tidak mampu		
				Persentase pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah usaha mikro yang layak difasilitasi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Persen		60,00		63,00		66,00		69,00		72,00		72,00		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah pelaku usaha mikro yang melaporkan omzetnya		
				Jumlah pengembangan usaha mikro	usaha		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1.500,00		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dihitung dari jumlah usaha mikro tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Misi 2: Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya																						
Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdayasaing																						
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	74,25	75,28		75,80		76,31		76,83		77,34		77,34					
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan																					
		Harapan Lama Sekolah (HLS)			Tahun	12,56	12,65		12,74		12,82		12,91		13,00		13,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																			
				APM SD	Persen	87,71	89,05	75.066.592.000	90,38	75.066.592.000	91,16	75.066.592.000	91,94	75.066.592.000	92,50	75.066.592.000	92,50	375.332.960.000	Pendidikan	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah Jumlah siswa usia 7 - 12 th di jenjang SD dan sederajat dibanding jumlah di kelompok usia tersebut		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				APM SMP	Persen	78,50	78,80	45.968.828.000	79,10	45.718.828.000	79,40	45.718.828.000	79,70	45.718.828.000	80,00	45.718.828.000	80,00	228.844.140.000	Pendidikan	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah Jumlah siswa usia 13 - 15 th di jenjang SMP dan sederajat dibanding jumlah di kelompok usia tersebut		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SPM)	Persen	91,01	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pendidikan	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah siswa usia 7 – 15 tahun di jenjang SD, SMP, dan sederajat dibanding jumlah di kelompok usia tersebut		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A (program kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Pendidikan	Yang dijadikan dasar perhitungan adalah 500 KK per tahun dengan rentang usia 19-45 tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Persen	10,40	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	12.500.000.000	Pendidikan	Dihitung dari jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran	Persen		100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00	5.000.000.000	Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah alokasi beasiswa pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	Persen	80,29	85,00	22.352.200.000	90,00	22.352.200.000	95,00	22.352.200.000	100,00	22.352.200.000	100,00	22.352.200.000	100,00	111.761.000.000	Pendidikan	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah anak usia 5 - 6 th yg sudah tamat/sedang belajar di satuan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Persen	92,70	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pendidikan	Dasar perhitungannya jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		
				Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	99,27	99,42		99,56		99,71		99,85		100,00		100,00		Pendidikan	Dasar perhitungan adalah seluruh jumlah SD dan SMP (588 SD dan 98 SMP)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN																			
				Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	53,73	54,47	13.638.152.000	55,50	13.638.152.000	56,68	13.638.152.000	58,16	13.638.152.000	60,37	13.638.152.000	60,37	68.190.760.000	Pendidikan	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi		
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persen	1,02	1,03	180.853.000	1,05	180.853.000	1,07	180.853.000	1,08	180.853.000	1,11	180.853.000	1,11	904.265.000	Perpustakaan	Dihitung berdasarkan koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya/dalam aksemplar dibagi Jumlah penduduk melek baca di wilayahnya		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				persentase perpustakaan sesuai standar nasional	Persen	1,03	2,29	66.820.000	3,66	67.820.000	4,81	67.820.000	5,95	67.820.000	7,09	67.820.000	7,09	338.100.000	Perpustakaan	Dihitung dari jumlah perpustakaan yang ada pada tahun berkenaan		
				SKM layanan perpustakaan	Persen	85,90	86,00	600.993.000	86,20	616.493.000	86,30	616.493.000	86,40	616.493.000	86,50	616.493.000	86,50	3.066.965.000	Perpustakaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan		
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Angka Harapan Hidup (AHH)			Tahun	75,95	76,04		76,10		76,16		76,23		76,29		76,29					
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																			
				Persentase rumah sakit terakreditasi (Permendagri 18/2020)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Kesehatan	Yang dijadikan dasar perhitungan adalah jumlah seluruh rumah sakit (12 RS)		
				Persentase capaian SPM	Persen	100,00	100,00	114.998.1	100,00	116.848.167.	100,00	120.848.167.	100,00	125.848.167.	100,00	131.848.1	100,00	610.390.83	RSUD PA			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				RS				67.000		000		000		000		67.000		5.000				
				Persentase capaian SPM RS	Persen	100,00	100,00	28.577.000.000	100,00	31.817.000.000	100,00	35.705.000.000	100,00	40.370.600.000	100,00	45.969.320.000	100,00	182.438.920.000	RSUD Waras Wiris			
				Persentase capaian SPM RS	Persen	100,00	100,00	56.962.750.000	100,00	58.557.750.000	100,00	60.311.750.000	100,00	62.241.750.000	100,00	64.364.750.000	86,00	302.438.750.000	RSUD Simo			
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Persen	100,00	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	538.517.795.000	Kesehatan	Jumlah Puskesmas 25 unit		
				Kabupaten Sehat	Status	-	6 tatanan (wiwerda)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	950.000.000	Kesehatan	Katagori padapa 4 kriteria, wiwerda 5 - 7 kriteria, wistara 8-10 kriteria		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)	Penduduk	52.720	54.829,00	25.000.000.000	57.022,00	25.000.000.000	59.303,00	25.000.000.000	61.675,00	25.000.000.000	64.142,00	25.000.000.000	64.142,00	125.000.000.000	Kesehatan			
				Persentase Desa/kelurahan STBM	Persen	59,55	65,54	1.500.000.000	85,02	1.500.000.000	88,76	1.500.000.000	92,51	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	100,00	7.500.000.000	Kesehatan	Yang dijadikan dasar perhitungan adalah 267 desa dan kelurahan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan	Dasar perhitungan adalah DTKS kriteria belum punya fasilitas BAB dengan distribusi rata 20 per tahun		
				Persentase warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	84,90	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	175.000.000	Kesehatan	Dasar perhitungan adalah jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																				kesehatan		
				Persentase warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	59,80	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan	Dasar perhitungannya adalah jumlah warga Negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Jumlah kematian warga negara usia produktif	Jiwa	936,00	931,00		926,00		921,00		916,00		911,00		911,00		Kesehatan	Dihitung berdasarkan jumlah kematian tahun berkenaan		
				Persentase warga negara lanjut usia yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	98,80	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan	Dasar perhitungannya adalah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
				Jumlah kematian warga negara usia lanjut	jiwa	1.239,00	1.229,00		1.219,00		1.209,00		1.199,00		1.189,00		1.189,00		Kesehatan	Dihitung berdasarkan jumlah kematian tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase balita gizi kurang	Persen	3,70	3,60		3,50		3,30		3,10		3,00		3,00		Kesehatan	Didasarkan pada total balita		
				Persentase balita stunting	Persen	9,40	9,30	500.000.000	9,20	500.000.000	9,10	500.000.000	9,00	500.000.000	8,80	500.000.000	8,80	2.500.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada total balita		
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persen	88,60	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	125.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada total balita		
				Jumlah kematian balita	Jiwa	118,00	116,00		115,00		113,00		112,00		110,00		110,00		Kesehatan	Dihitung berdasarkan jumlah kematian tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	99,70	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	12.174.420.000	Kesehatan	Didasarkan pada total persalinan		
				Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan ibu hamil (SPM)	Persen	93,20	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	15.588.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah ibu hamil		
				Jumlah kematian ibu	Jiwa	17,00	13,00		12,00		11,00		10,00		9,00		9,00		Kesehatan	Dihitung berdasarkan jumlah kematian tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	98,70	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	300.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah kelahiran bayi		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	35,60	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan	Didasarkan pada jumlah orang terduga TBC		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)	Persen	57,20	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan	Didasarkan pada jumlah orang terduga HIV		
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	63,20	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah orang terduga Hipertensi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	98,60	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah orang terduga DM		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	Persen	50,90	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	450.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah orang terduga ODGJ		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Angka kesakitan Covid-19	Angka	468	450	685.000.000	425	685.000.000	400	685.000.000	350	685.000.000	300	685.000.000	300	3.425.000.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah kesakitan Covid tiap 100.000 penduduk		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN																			
				Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi (pendidikan min. D3 Kesehatan)	Persen	100,00	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	678.200.000	Kesehatan	Didasarkan pada jumlah total tenaga kesehatan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN																			
				Persentase makanan Minuman yang lolos uji	Persen	87,00	88,00	618.626.000	91,00	618.626.000	93,00	618.626.000	94,00	618.626.000	95,00	618.626.000	95,00	3.093.130.000	Kesehatan	Dihitung dari jumlah makanan dan minuman yang diuji		
				Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	96,00	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000	Kesehatan	Dihitung dari jumlah tidak adanya obat kadaluarsa atau obat tanpa ijin edar pada saryanfar		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																			
				Persentase Desa/kelurahan siaga aktif mandiri	Persen	44,94 (120 desa)	48,69 (130 desa)	155.000.000	52, 43 (140 desa)	155.000.000	56,18 (150 desa)	155.000.000	59,93 (160 desa)	155.000.000	63,67 (170 desa)	155.000.000	63,67 (170 desa)	775.000.000	Kesehatan	Dihitung dari jumlah seluruh desa dan kelurahan (267)		
				Persentase Desa/Kelurahan yang menerapkan GERMAS	Persen	100,00	100,00	342.346.000	100,00	342.346.000	100,00	342.346.000	100,00	342.346.000	100,00	342.346.000	100,00	1.711.730.000	Kesehatan	Dihitung dari jumlah seluruh desa dan kelurahan (267)		
	Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangu																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	nan																					
		Prosentase pembinaan cabang olahraga				75,00	80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAA N																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Persen	72,62	72,62	1.931.580.000	72,86	1.931.580.000	73,10	1.931.580.000	73,33	1.931.580.000	73,57	1.931.580.000	73,57	9.657.900.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dihitung berdasarkan jumlah total fasilitas olahraga yang ada tahun berkenaan		
				Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	60,00	60,00	50.000.000	63,33	50.000.000	66,67	50.000.000	70,00	50.000.000	73,33	50.000.000	73,33	250.000.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dihitung berdasarkan jumlah pelatih olahraga tahun berkenaan		
				Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	-	9,30	1.444.693.000	9,67	1.444.693.000	10,05	1.444.693.000	10,43	1.444.693.000	10,81	1.444.693.000	10,81	7.223.465.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dihitung dari jumlah atlit pelajar tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan			Persen	4,68	5,18		5,68		6,18		6,68		7,18		7,18					
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																			
				Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Persen	75,00	80,00	655.215.000	85,00	655.215.000	90,00	655.215.000	95,00	655.215.000	100,00	655.215.000	100,00	3.276.075.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dihitung dari jumlah organisasi kepemudaan tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																			
				Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	100,00	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	1.356.400.000	Kepemudaan dan Olahraga	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh kelompok pramuka tahun berkenaan		
	Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan			Persen	83,22	84,72		86,22		87,72		89,22		90,72		90,72					
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA																			
				Persentase cagar budaya yang teregistrasi	Persen	84,00	85,00	1.356.400.000	86,00	1.356.400.000	87,00	1.356.400.000	88,00	1.356.400.000	90,00	1.356.400.000	90,00	6.782.000.000	Kebudayaan	Dihitung dari jumlah cagar budaya yang ada (761 cagar budaya)		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kelompok seni yang dibina	Persen	25,00	27,00	3.449.000.000	30,00	3.449.000.000	34,00	3.449.000.000	45,00	3.449.000.000	45,00	3.449.000.000	45,00	17.245.000.000	Kebudayaan	Dihitung dari jumlah kelompok seni yang terdaftar pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
				Persentase peningkatan fasilitas kegiatan keagamaan		66,36	67,00	6.322.555.000	68,00	6.322.555.000	69,00	6.322.555.000	70,00	6.322.555.000	71,00	6.322.555.000	71,00	31.612.775.000	Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah proposal usulan kegiatan keagamaan tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN																			
				Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Persen	94,00	95,00	673.500.000	96,00	673.500.000	97,00	673.500.000	98,00	673.500.000	99,00	673.500.000	99,00	3.367.500.000	Kebudayaan	Dihitung dari jumlah seluruh koleksi museum dikelola		
	Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Angka Kelahiran Total (TFR)			Angka	1,87	2,10		2,09		2,08		2,07		2,06		2,06					
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																			
				Persentase peserta KB aktif	Persen	71,20	71,26	1.490.957.000	71,32	1.490.957.000	71,38	1.490.957.000	71,44	1.490.957.000	71,50	1.490.957.000	71,50	7.454.785.000	Pengendalian penduduk dan KB	Dihitung berdasarkan jumlah pasangan usia subur		
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi	Persen	13,22	12,75		12,25		11,75		11,25		10,75		10,75		Pengendalian penduduk dan KB	Dihitung berdasarkan jumlah pasangan usia subur		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																			
				Rata-rata usia kawin pertama wanita	Usia	20,18	20,25		20,45		20,65		20,85		21,05		21,05		Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah(umur kawin pertama wanita x jumlah wanita menurut usia kawin pertama) dibagi Jumlah wanita menurut usia kawin pertama		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Presentase perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	6,00	8,00		10,00		12,00		14,00		16,00		16,00		Pengendalian penduduk dan KB	Dihitung dari jumlah perangkat daerah		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	4.55	18,18		18,18		18,18		18,18		22,73		95,45		Pengendalian penduduk dan KB	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		
Meningkatnya Keberdayaan Sosial																						
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			Angka	81,95	81, 96		81,97		81,98		81,99		82,00		82,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak																					
		TPAK Perempuan			Persen	44,27	46,43		48,59		50,75		52,91		55,07		55,07					
			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	Persen	2,45	2,50		2,52		2,54		2,56		2,58		2,58		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Dihitung dari seluruh jumlah belanja APBD tahun berkenaan		
				Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	-	10,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Dihitung dari jumlah pekerja perempuan tahun berkenaan		
				Persentase pejabat publik perempuan	Persen		6,39		6,49		6,58		6,67		6,76		6,76		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Dihitung dari jumlah pejabat publik tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Angka kekerasan terhadap perempuan			Angka	16,00	14,00		13,00		12,00		11,00		10,00		10,00					
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN																			
				Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada jumlah pengaduan kasus perempuan korban kekerasan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	Persen	0,00004	0,000035		0,00003		0,000025		0,00002		0,000015		0,000015		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada rasio korban kekerasan terhadap perempuan pada tahun berkenaan		
		Kategori Kabupaten Layak Anak			Status	Pratama	Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya		Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	6.028.445	100,00	6.028.000	100,00	6.028.000	100,00	6.028.000	100,00	6.028.000	100,00	30.140.445	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada jumlah aduan anak korban kekerasan		
				Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	Rasio	0,000111	0,000104	12.056.890	0,000097	12.056.000	0,00009	12.056.000	0,000083	12.056.000	0,000075	12.056.000	0,000075	60.280.890	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada rasio korban kekerasan terhadap anak pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase fasilitas publik layak anak	Persen	-	16,67	26.201.000	16,67	26.201.000	16,67	26.201.000	16,67	26.201.000	16,67	26.201.000	83,33	131.005.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada jumlah fasilitas publik		
				Persentase desa layak anak	Persen	63,64	68,18	26.201.000	72,73	26.201.000	77,27	26.201.000	86,36	26.201.000	100,00	26.201.000	100,00	131.005.000	Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak	Didasarkan pada jumlah 22 kecamatan		
		Angka PMKS			Angka	71.346	70.276		69.222		68.183		67.161		66.153		66.153					
	Meningkatnya kesejahteraan PMKS																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Peningkatan keberdayaan PMKS			Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																			
				Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	100,00	100,00	206.250.000	100,00	206.250.000	100,00	206.250.000	100,00	206.250.000	100,00	206.250.000	100,00	1.031.250.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah seluruh anak terlantar yang memerlukan rehab sosial tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase lanjut usia terlantr yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar Panti (SPM)	Persen	100,00	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	450.000.000	100,00	2.250.000.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah seluruh lanjut usia terlantr yang memerlukan rehab sosial tahun berkenaan		
				Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh diluar panti (SPM)	Persen	100,00	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	137.500.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah seluruh warga gelandangan yang memerlukan rehab sosial pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah	Persen	100,00	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	8.311.070.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah PMKS lainnya yang memerlukan rehab sosial pada tahun berkenaan
				Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	100,00	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	4.424.030.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah seluruh penyandang disabilitas yang memerlukan rehab sosial pada tahun berkenaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																			
				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat			16,00		18,00		20,00		21,00		23,00		98,00		Sosial	Didasarkan pada Jumlah tenaga kesejahteraan sosial tahun berkenaan		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																			
				Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	Persen	72,00	0,60	740.000.000	1,30	740.000.000	1,90	740.000.000	2,60	740.000.000	3,20	740.000.000	3,20	3.700.000.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah fakir miskin yang seharusnya memperoleh bantuan sosial tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																				berkenaan		
				Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sosial	Didasarkan pada jumlah enerima bantuan sosial tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/ poliklinik/Rumah Sakit (Program Kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sosial	Didasarkan pada jumlah warga miskin yang mendapatkan pelayanan pengobatan di puskesmas/ poliklinik/Rumah Sakit tahun berkenaan		
				Persentase PMKS yang memperoleh pelatihan	Persen	100,00	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	500.000.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah PMKS yang mendapat pelatihan pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																			
				Cakupan pengelolaan TMPN sesuai standar	Persen	100,00	100,00	431.561.000	100,00	431.561.000	100,00	431.561.000	100,00	431.561.000	100,00	431.561.000	100,00	2.157.805.000	Sosial	Didasarkan pada pengelolaan TMPN tahun berkenaan		
			PROGRAM PENANGANAN BENCANA																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	Persen	100,00	100,00	416.000.000	100,00	416.000.000	100,00	416.000.000	100,00	416.000.000	100,00	416.000.000	100,00	2.080.000.000	Sosial	Didasarkan pada jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun berkenaan		
		Indeks Desa Membangun (IDM)			Kategori	0,6941 (Berkembang)	0,7297 (Maju)		0,7361 (Maju)		0,7425 (Maju)		0,7489 (Maju)		0,7553 (Maju)		0,7553 (Maju)					
	Meningkatnya keberdayaan desa																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase kenaikan status desa			Persen	11,61	13,61		15,61		17,61		19,61		21,61		21,61					
			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGAN KEMASYARAKATAN, LEMBAGADAN ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																			
				Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persen	2,00	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	3,00	2.550.000.000	3,00	12.750.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung dari Jumlah Swadaya Masyarakat yg mendukung program pemberdayaan masyarakat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase BUMDES yang berkembang	Persen	51,34	61,34	180.000.000	71,34	180.000.000	81,34	180.000.000	90,90	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	900.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung dari jumlah desa (261)		
				Persentase peningkatan Posyantek Desa	Persen	11,11	19,00	80.000.000	27,00	80.000.000	35,00	80.000.000	43,00	80.000.000	51,00	80.000.000	51,00	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Didasarkan pada jumlah desa		
				Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	2.050.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung berdasarkan jumlah PKK yang ada		
			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			DESA																			
				Jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan	kawasan	1,00	1,00	-	1,00		1,00		1,00		1,00		6,00		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung dari jumlah kawasan perdesaan yang dikembangkan		
Meningkatnya ketahanan sosial																						
		Angka Konflik Sosial			Angka	18,00	16,00		13,00		12,00		10,00		8,00		8,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat																					
		Angka Potensi konflik sosial			Angka	20,00	17,00		15,00		13,00		11,00		9,00		9,00					
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Angka konflik yang ditangani	Angka	18,00	16,00	100.000.000	13,00	100.000.000	12,00	100.000.000	10,00	100.000.000	8,00	100.000.000	8,00	500.000.000	Kesatuan bangsa dan politik	Dihitung berdasarkan jumlah konflik tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																			
				Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	26,00	30,00	406.920.000	40,00	406.920.000	50,00	406.920.000	60,00	406.920.000	80,00	406.920.000	80,00	2.034.600.000	Kesatuan bangsa dan politik	Dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA																			
				Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	Persen	25,00	30,00		40,00		50,00		65,00		90,00		90,00		Kesatuan bangsa dan politik	Dihitung berdasarkan jumlah potensi konflik keagamaan tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																Kesatuan bangsa dan politik			
				Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	Persen	74,00	74,00	2.954.922.000	74,00	47.954.922.000	83,00	47.954.922.000	83,00	2.954.922.000	83,00	2.954.922.000	83,00	104.774.610.000	Kesatuan bangsa dan politik	Dihitung berdasarkan fasilitasi bidang politik dalam negeri		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																			
				Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	Persen	8,00	16,00		24,00		32,00		40,00		50,00		50,00		Kesatuan bangsa dan politik	Dihitung berdasarkan jumlah masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas		
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																Trantibumlinmas			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	Persen	100,00	100,00	491.870.000	100,00	491.870.000	100,00	491.870.000	100,00	491.870.000	100,00	491.870.000	100,00	2.459.350.000	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Didasarkan pada jumlah penyelesaian K3 tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Didasarkan pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada tahun berkenaan		
		Indeks Risiko Bencana (IRBI)			Nilai	130,32	130,32		128,32		126,32		124,32		122,32		122,32					
	Menurunnya resiko bencana																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Indeks Kapasitas			Nilai	82,00	82,00		83,00		85		86,00		87,00		87,00					
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	Persen	90,20	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	1.362.500.000	Ketentra man Ketertiba n Umum dan Perlindun gan Masyara kat	Didasarkan pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	2.348.012.100	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	11.783.260.100	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Didasarkan pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun berkenaan		
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	1.055.000.000	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Didasarkan pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
																				berkenaan		
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																			
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	127,90	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	6.223.235.000	Ketentrman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Didasarkan pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				(SPM)																kebakaran tahun berkenaan		
Misi 3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional																						
Meningkatnya kesejahteraan petani		Nilai Tukar Petani (NTP)			Angka	106,68	107,16		107,64		108,12		108,60		109,80		109,08					
	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian			Persen	2,01	3,00		3,00		3,50		3,50		4,00		4,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	230.029 m (26,66%)	26,89	3.985.000.000	27,12	3.985.000.000	27,35	3.985.000.000	27,58	3.985.000.000	27,81	3.985.000.000	27,81	19.925.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan jumlah prasarana pertanian		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	60,77	61,15	9.788.432.000	61,53	9.788.432.000	61,91	9.788.432.000	62,29	9.788.432.000	62,67	9.788.432.000	62,67	48.942.160.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dasar perhitungannya dari luas lahan irigasi kewenangan kabupaten		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian per ha/tahun	kuintal/ha	Produktivitas padi (57,69)	58,27	200.000.000	58,84	200.000.000	59,42	200.000.000	60,00	200.000.000	60,57	200.000.000	60,57	1.000.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					kuintal/ha	Produktivitas Jagung (49,20)	49,69	150.000.000	50,18	150.000.000	50,68	150.000.000	51,17	150.000.000	51,66	150.000.000	51,66	750.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					kuintal/ha	Produktivitas Kacang tanah (11,30)	11,41	100.000.000	11,53	100.000.000	11,64	100.000.000	11,75	100.000.000	11,87	100.000.000	11,87	500.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					kuintal/ha	Produktivitas Kencur (104)	105,04	200.000.000	106,08	200.000.000	107,12	200.000.000	108,16	200.000.000	109,20	200.000.000	109,20	1.000.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					kuintal/ha	Produktivitas Jahe (276)	278,76	200.000.000	281,52	200.000.000	284,28	200.000.000	287,04	200.000.000	289,80	200.000.000	289,80	1.000.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					kuintal/ha	Produktivitas Cabe (109)	113,36	300.000.000	117,72	300.000.000	122,08	300.000.000	126,22	300.000.000	130,80	300.000.000	130,80	1.500.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					kuintal/ha	Produktivitas Bawang Merah (32)	33,28	300.000.000	34,56	300.000.000	35,84	300.000.000	37,12	300.000.000	38,40	300.000.000	38,40	1.500.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					kuintal/ha	Produktivitas Buah Berkayu (1,33)	1,34	300.000.000	1,35	300.000.000	1,36	300.000.000	1,37	300.000.000	1,38	300.000.000	1,38	1.500.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					kuintal/ha	Produktivitas Pepaya (97)	97,97	150.000.000	98,94	150.000.000	99,91	150.000.000	100,88	150.000.000	101,85	150.000.000	101,85	750.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
					Ton/ha	Produktivitas Kopi (1,22)	1,22	170.000.000	1,23	170.000.000	1,23	170.000.000	1,23	170.000.000	1,24	170.000.000	1,24	850.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
					Ton/ha	Produktivitas Tembakau (1,17)	1,17	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	11.562.500.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan produktivitas tahun berkenaan		
				Persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil) (Program Kemiskinan)	Persen	3.216 kelompok tani	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	500.000.000	Pertanian	Dihitung dari jumlah bantuan sarana pertanian tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani		3.216 kelompok	8.675,00	180.800.000	8.675,00	180.800.000	8.675,00	180.800.000	8.675,00	180.800.000	8.675,00	180.800.000	43,38	904.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan jumlah kelompok tani pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani (Program kemiskinan)	Persen	3000 Ha	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	2.200.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman yang ditangani pada tahun berke		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase fasilitasi penanggulangan bencana yang tertangani (Program kemiskinan)	Persen	4000Ha	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	720.000.000	Pertanian	Dihitung dari luasan lahan yang mengalami kerusakan minimal 75 pada tahun berkenaan		
				Persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian (Program Kemiskinan)	Persen	-	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan luasan lahan pertanian yang mendapat asuransi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	52 kasus	5,00	494.846.000	10,00	494.846.000	15,00	494.846.000	20,00	494.846.000	25,00	494.846.000	25,00	2.474.230.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular dengan kondisi awal 52 kasus		
				Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH	Persen	12 unit usaha	20,00	86.000.000	40,00	86.000.000	60,00	86.000.000	80,00	86.000.000	100,00	86.000.000	100,00	430.000.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan sertifikasi produk ternak unit usaha ternak sapi		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha	Persen		10,00	10.000.000	20,00	10.000.000	30,00	10.000.000	40,00	10.000.000	50,00	10.000.000	50,00	50.000.000	Pertanian	Dihitung dari jumlah usaha peternakan yang mempunyai izin usaha pada tahun yang berkenaan		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan	Persen		5,00	404.266.000	10,00	404.266.000	15,00	404.266.000	20,00	404.266.000	25,00	404.266.000	25,00	2.021.330.000	Pertanian	Dihitung berdasarkan jumlah prasarana peternakan pada kondisi awal 156 unit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan	Persen		50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	1.225.000.000		Dihitung dari sarana peternakan pada tahun berkenaan		
				Produksi susu	Liter	49.988.343	50.600.000,00		50.900.000,00		51.200.000,00		51.500.000,00		51.800.000,00		51.800.000,00		Pertanian	Dihitung dari produksi susu pada tahun berkenaan		
				Produksi daging	Kg	14.081.221	14.221.221,00		14.291.221,00		14.361.221,00		14.431.221,00		14.501.221,00		14.501.221,00		Pertanian	Dihitung dari produksi daging pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Produksi telur	Kg	27.899.559	27.955.000,00		27.983.000,00		28.011.000,00		28.039.000,00		28.067.000,00		28.067.000,00		Pertanian	Dihitung dari produksi telur pada tahun berkenaan		
				Populasi ternak (sapi potong)	ekor	106.765	108.911,00		110.000,00		111.100,00		112.211,00		113.333,00		113.333,00		Pertanian	Dihitung dari populasi pada tahun berkenaan		
				Populasi ternak (sapi perah)	ekor	94.143	96.035,00		96.995,00		97.965,00		98.945,00		99.934,00		99.934,00		Pertanian	Dihitung dari populasi pada tahun berkenaan		
				Populasi ternak (kambing dan domba)	ekor	159.718	166.171,00		169.495,00		172.885,00		176.343,00		17.987,00		17.987,00		Pertanian	Dihitung dari populasi pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase sampel obat hewan yang diperiksa	Persen	40 Sampel	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pertanian	Dihitung berdasarkan sampel obat hewan yang diperiksa pada tahun berkenaan		
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan			Persen		2,00		2,00		4,00		4,00		5,00		5,00					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik	Persen		20,00	361.706.000	40,00	361.706.000	60,00	361.706.000	80,00	361.706.000	100,00	361.706.000	100,00	1.808.530.000	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari jumlah kelompok pembudidaya ikan yang menggunakan metode budidaya yang baik pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Produksi Ikan Budidaya	Ton	34.093,00	34.964,00		35.069,00		35.174,00		35.280,00		35.386,00		35.386,00	-	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari produksi tahun berkenaan		
				Persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Program Kemiskinan)	Persen		100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	2.374.700.000	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari jumlah pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan		
				Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan	Persen	15.239.0026ekor	2,00	542.560.000	4,00	542.560.000	6,00	542.560.000	8,00	542.560.000	10,00	542.560.000	10,00	2.712.800.000	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari jumlah produksi benih ikan berdasarkan kondisi awal 152.390.026 ekor		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	Persen	1 Kelompok	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	150.000.000	Kelautan dan Perikanan	Jumlah produksi perikanan tangkap		
				Produksi Ikan Tangkap	Ton	2.178	2.266,00		2.323,00		2.369,00		2.416,00		2.464,00		2.464,00	-	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari produksi tahunan berkenaan		
				Persentase nelayan kecil yang diberdayakan (Program Kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari jumlah nelayan kecil yang diberdayakan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan pada tahun berkenaan		
				Pengolahan ikan	Ton	79,86	80,70		81,00		81,03		81,12		81,20		81,20		Kelautan dan Perikanan	Dihitung dari pengolahan tahun berkenaan		
	Meningkatnya agro industri susu	Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu			Persen	1,50	2,00		2,50		3,00		3,50		4,00		4,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Industri Susu yang meningkatkan produktifitasnya	Persen	-	20,00	2.500.243.000	40,00	2.500.243.000	60,00	2.500.243.000	80,00	2.500.243.000	100,00	2.500.243.000	100,00	12.501.215.000	Perindustrian	Dihitung berdasarkan jumlah IKM industri susu pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk olahan Susu yang Dipasarkan	Persen		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Perdagangan	Dihitung berdasarkan jumlah jenis produk olahan susu pada tahun berkenaan		
	Meningkatnya kualitas susu	Jumlah perusahaan yang menerima produk susu boylali			Perusahaan	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase susu yang memenuhi standar mutu	Persen	58,00	63,00		68,00		73,00		78,00		83,00		83,00		Pertanian	Dihitung berdasarkan produksi susu tahun berkenaan		
	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan			Angka	83,62	85,25		86,88		88,51		90,14		91,77		91,77					
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	Persen	15 ton	6,67	285.000.000	13,33	285.000.000	20,00	285.000.000	26,67	285.000.000	33,33	285.000.000	33,33	1.425.000.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah cadangan pangan kabupaten/kota (15 ton)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik	Persen	31,51	47,22	474.740.000	50,00	474.740.000	52,78	474.740.000	56	474.740.000	58,33	474.740.000	58,33	2.373.700.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah lumbung pangan tahun berkenaan		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat	Persen	62,00	69,00	115.500.000	77,00	115.500.000	85,00	115.500.000	92	115.500.000	100,00	115.500.000	100,00	577.500.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah informasi harga komoditas pangan pokok yang harus ada (13 komoditas pangan)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	Persen	54,00	58,00	180.853.000	63,00	180.853.000	67,00	180.853.000	72,00	180.853.000	76,00	180.853.000	76,00	904.265.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah desa rawan pangan (78 desa)		
			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman (layak dikonsumsi)	Persen	86,39	86,50	90.426.000	87,00	90.426.000	87,50	90.426.000	88,00	90.426.000	88,50	90.426.000	88,50	452.130.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah sampel pangan (191 sampel)		
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan kelompok/UMKM yang melaksanakan Diversifikasi Pangan	Persen	20,00	23,00	965.500.000	25,00	965.500.000	28,00	965.500.000	30,00	965.500.000	35,00	965.500.000	35,00	4.827.500.000	Pangan	Didasarkan pada jumlah UMKM/KWT yang melakukan usaha pengolahan pangan (105 UMKM/KWT)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Misi 4 : Boyolali Menghadirkan Pemerintahan yang Bersih, efektif, dan Terpercaya																						
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik																						
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Nilai	763,00	800,00		823,00		833,00		893,00		903,00		903,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah																					
		Nilai Sakip			Nilai	67,13 (B)	69,13 (B)		72,13 (BB)		75,13 (BB)		77,13 (BB)		80,13 (A)		80,13 (A)					
		Indeks Reformasi Birokrasi			Nilai	56.84 (CC)	64,72 (B)		67,72 (B)		70,72 (BB)		73,72 (BB)		76,72 (BB)		76,72 (BB)					
		Nilai EKPPD			Nilai	3,42	3,40		3,41		3,42		3,43		3,44		3,44					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																			
				Persentase keterpaduan antar dokumen RPJMD dengan RKPd	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan	Dihitung berdasarkan jumlah program RPJMD tahun berken		
				Persentase kesesuaian antara RKPd dan Renja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan	Dihitung berdasarkan jumlah program RKPd tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																			
				Persentase capaian target program	Persen		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Perencanaan			
				Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah	Persen		100,00	210.000.000	100,00	414.750.000	100,00	781.750.000	100,00	871.750.000	100,00	669.750.000	100,00	2.948.000.000	Perencanaan	Dihitung berdasarkan jumlah usulan masyarakat tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL																			
				Persentase penyediaan data sektoral yang berkualitas	Persen	-	65,00		70,00		75,00		80,00		100,00		100,00		Statistik	Dihitung berdasarkan jumlah PD penyedia data sektoral		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100,00	100,00	992.212.454.260	100,00	988.516.291.000	100,00	988.121.291.000	100,00	988.123.791.000	100,00	988.113.791.000	100,00	4.945.087.618.260	Seluruh PD	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah seluruh PD		
				Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80	Persen	58,00	58,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah PD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase IKU kepala Daerah yang mencapai target	Persen	78,00	80,00		82,00		84,00		87,00		90,00		90,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan indikator IKU kepala daerah		
				Persentase perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3	Persen		82,00		86,00		90,00		94,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah PD		
				Persentase perangkat Daerah dengan tata laksana baik	Persen		20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah PD		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase PD yang memiliki nilai RB minimal baik	Persen		20,00		35,00		55,00		75,00		90,00		90,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah jumlah PD		
			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																			
				Nilai audit kearsipan	Nilai	70,00	75,00	70.484.000	80,00	70.384.000	82,00	70.384.000	85,00	70.384.000	90,00	70.384.000	90,00	352.020.000	Kearsipan	(Nilai audit LKD dikali 60) ditambah (Nilai audit rata-rata PD dikali 40)		
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan	Persen	5,00	20,00	146.482.000	30,00	144.682.000	40,00	144.682.000	50,00	144.682.000	60,00	144.682.000	60,00	725.210.000	Kearsipan	Dihitung dari jumlah arsip yang harus dilindungi dan diselamatkan pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	78,00	80,00	35.000.000	82,00	35.000.000	84,00	35.000.000	86,00	35.000.000	88,00	35.000.000	88,00	175.000.000	Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan Jumlah seluruh urusan bidang pemerintahan (4 urusan)		
				Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		90,00		92,00		95,00		98,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Jumlah seluruh urusan bidang kesejahteraan rakyat (12 urusan)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kerjasama Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	323.482.000	82,00	323.482.000	84,00	323.482.000	86,00	323.482.000	88,00	323.482.000	88,00	1.617.410.000	Sekretariat Daerah	Dihitung dari jumlah seluruh kerjasama pemerintah daerah pada tahun berkenaan		
				Persentase batas wilayah yang diselesaikan	Persen		9,09		9,09		9,09		9,09		9,09		45,45		Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan Jumlah seluruh batas wilayah Penitisan batas wilayah antar kecamatan (6 batas wilayah)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah kebijakan SPM (6 urusan)		
				Persentase ketercapaian target IKK	Persen	65,00	65,00		66,00		67,00		68,00		70,00		70,00		Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah IKK tahun berkenaan		
				Persentase produk hukum Daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	Persen	100,00	100,00	200.851.800	100,00	200.852.000	100,00	200.852.000	100,00	200.852.000	100,00	200.852.000	100,00	1.004.259.800	Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh produk hukum daerah tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																			
				Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	-	80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		88,00		Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh urusan bidang perekonomian (15 urusan)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh urusan bidang pembangunan (5 urusan)		
				Persentase kontribusi BUMD pada PAD	Persen	1,85	1,86		1,87		1,88		1,89		1,90		1,90		Sekretariat Daerah	Dihitung dari jumlah pendapatan BUMD tahun berkenaan dibagi Jumlah PAD tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	53,98	56,00	431.941.000	60,00	431.941.000	64,00	431.941.000	67,00	431.941.000	70,00	431.941.000	70,00	2.159.705.000	Sekretariat Daerah	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh pengadaan tahun berkenaan		
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																			
				Prosentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan	Persen	75,00	75,00	605.000.000	78,00	605.000.000	80,00	605.000.000	83,00	605.000.000	85,00	605.000.000	85,00	3.025.000.000	Penelitian, dan Pengembangan	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh hasil Litbang tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				kebijakan																		
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	70,00	75,00	400.000.000	78,00	400.000.000	80,00	400.000.000	83,00	400.000.000	85,00	400.000.000	85,00	2.000.000.000	Penelitian, dan Pengembangan	Dihitung berdasarkan jumlah inovasi tahun berkenaan		
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	133.764.205.000	Sekretariat DPRD	Dihitung berdasarkan Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar		
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																			
				Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	30,65	14,18		13,79		13,79		13,79		13,79		99,99	-	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung berdasarkan jumlah desa		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan (Program Kemiskinan)	Persen	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung berdasarkan jumlah desa		
			PROGRAM PENATAAN DESA																			
				Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persen	1,15	4,98	1.500.000.000	5,36	1.500.000.000	4,98	8.197.300.000	4,98	1.500.000.000	4,98	1.500.000.000	25,00	14.197.300.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dihitung berdasarkan jumlah desa		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah																					
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			Nilai		66,49		67,81		69,16		70,54		71,95		71,95					
		Opini BPK			Predikat	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penyerapan APBD tahun berjalan	Persen	92,00	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	2.260.665.000	Keuangan	Dihitung berdasarkan APBD tahun berkenaan		
				Persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan	Persen	-	55,00	356.705.441.000	55,00		55,00		55,00		55,00		55,00	356.705.441.000	Keuangan	Dihitung berdasarkan APBD tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Ketercapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	358.772.843.000	358.303.849.000	6.853.438.000	372.381.379.000	6.853.438.000	397.252.279.000	6.853.438.000	421.538.645.000	6.853.438.000	448.479.141.000	6.853.438.000	448.479.141.000	34.267.190.000	Keuangan	Dihitung berdasarkan pencapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		
			PROGRAM PENYELENGGAAN PENGAWASAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	90,00	90,00	27.128.000	91,00	27.128.000	92,00	27.128.000	93,00	27.128.000	94,00	27.128.000	94,00	135.640.000	Pengawasan	Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada tahun berkenaan		
				Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	85,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		Pengawasan	Dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Aturan	Persen	100,00	100,00	50.330.629.000	100,00	394.852.166.000	100,00	408.998.212.000	100,00	410.267.289.000	100,00	411.589.166.000	100,00	1.676.037.462.000	Keuangan	Dihitung dari tanggal 31 maret tahun berikutnya		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																			
				Persentase Aset Daerah yang diinventarisasi	Persen	100,00		2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	10.250.000.000	Keuangan	Jumlah aset tetap yang telah diinventarisasi sama dengan Belanja Modal yang menjadi aset tetap		
	Meningkatnya integritas dan kapasitas Pemerintah Daerah																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Nilai Survei penilaian integritas			Nilai	88,51	88,60		88,70		88,80		88,90		89,00		89,00					
		Indeks Profesionalitas Pegawai			Nilai	78.13 (Sedang)	79 (Sedang)		80 (Baik)		81 (Baik)		82 (Baik)		83 (Baik)		83 (Baik)					
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																Pengawasan			
				Capaian Nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK	Nilai	85,00	85,00	135.640.000	86,00	135.640.000	87,00	135.640.000	88,00	135.640.000	89,00	135.640.000	89,00	678.200.000	Pengawasan	Nilai MCP KPK		
				Indeks Manajemen Resiko	Level	-	1,00		1,00		2,00		2,00		3,00		3,00		Pengawasan	Level 1 -5, penilaian oleh BPKP		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Level	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Pengawasan	Level 1 -5, penilaian oleh BPKP		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																Pengawasan			
				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	90,00	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Pengawasan	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh aduan masyarakat tahun berkenaan		
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																Kepegawaian			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Persen	90,84	94,06	2.112.456.000	95,05	2.112.456.000	96,04	2.112.456.000	97,03	2.112.456.000	98,02	2.112.456.000	98,02	10.562.280.000	Kepegawaian	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh jabatan pada tahun berkenaan		
				Persentase pegawai yang memenuhi target SKP	Persen	99,00	99,40	13.361.000	99,50	13.361.000	99,60	13.361.000	99,70	13.361.000	99,80	13.361.000	99,80	66.805.000	Kepegawaian	Dihitung dari jumlah seluruh pegawai pada tahun berkenaan		
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,17	0,14	172.504.000	0,12	172.504.000	0,10	172.504.000	0,08	172.504.000	0,06	172.504.000	0,06	862.520.000	Kepegawaian	Dihitung dari jumlah seluruh pegawai pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																			
				Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	Persen	53,79	60,00	5.935.545.000	65,00	1.173.830.000	70,00	1.173.830.000	75,00	1.173.830.000	80,00	1.173.830.000	80,00	10.630.865.000	Pendidikan dan Pelatihan	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh Pegawai Non Guru dan Tenaga Kesehatan pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Rasio pegawai pendidikan tinggi	Persen	60,29	60,30		60,31		60,34		60,36		60,36		60,36		Pendidikan dan Pelatihan	Dihitung berdasarkan jumlah Seluruh ASN Non Guru dan Tenaga Kesehatan pada tahun berkenaan		
				Persentase PD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Persen	78,79	78,79		78,79		81,82		84,85		84,85		84,85		Pendidikan dan Pelatihan	Dihitung berdasarkan jumlah seluruh PD		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Nilai	81,89	82,11		82,72		83,55		84,18		85,00		85,00					
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																			
				Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	Persen	80,00	83,00		85,00		87,00		89,00		90,00		90,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan perhitungan adalah unit pelayanan yang wajib memiliki IKM		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Dasar yang dijadikan dasar perhitungan adalah jumlah kegiatan		
				Persentase kualitas pelayanan publik yang baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah	Dasar perhitungan adalah kualitas pelayanan publik tahun berkenaan		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Persen	84,00	85,00	4.475.034.105	86,00	4.477.000.000	87,00	4.502.500.000	88,00	4.515.000.000	89,00	4.522.500.000	89,00	22.492.034.105	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																			
				Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	650.149.000	100,00	576.933.900	100,00	602.605.150	100,00	637.537.200	100,00	689.474.000	100,00	3.156.699.250	Kewilayahan	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM																			
				Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	1.604.220.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	8.244.220.000	Kewilayahan	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	5.800.000.000	Kewilayahan	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		
				Persentase Stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan	Persen		100,00	3.492.054.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	18.505.654.000	Kewilayahan	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																Kewilayah an			
				Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kewilayah an	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	Persen	75,00	78,00	673.555.000	80,00	673.555.000	83,00	673.555.000	85,00	673.555.000	90,00	673.555.000	90,00	3.367.775.000	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung dari data Data Konsolidasi Bersih dibagi Data Pelayanan		
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																			
				Presentase ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan	Persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Pembuatan buku profil kependudukan, buku agregat		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK																			
				Persentase peningkatan kepemilikan e-KTP	Persen	99,69	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	732.500.000	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung berdasarkan jumlah penduduk wajib KTP		
				Persentase kepemilikan dokumen KIA	Persen	27,92	30,00	1.416.291.000	40,00	1.416.291.000	45,00	1.416.291.000	50,00	1.416.291.000	60,00	1.416.291.000	60,00	7.081.455.000	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung dari jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kepemilikan dokumen KK	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung dari jumlah seluruh KK		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL																			
				Persentase peningkatan kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	8,00	20,00	217.000.000	30,00	217.000.000	40,00	217.000.000	50,00	217.000.000	60,00	217.000.000	60,00	1.085.000.000	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung dari jumlah kematian		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	66,40	66,50	18.200.000	67,00	18.200.000	67,48	18.200.000	67,90	18.200.000	68,00	18.200.000	68,00	91.000.000	Administ rasi Kependu dukan dan Pencatat an Sipil	Dihitung dari jumlah kelahiran		
	Terwujudnya smart governance Boyolali																					
		Indeks SPBE			Nilai	2,85	3,10		3,20		3,30		3,40		3,50		3,50					
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik			Nilai	92,17	92,17		92,20		92,25		92,30		92,35		92,35					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																			
				Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	77,00	80,00	1.356.400.000	90,00	1.356.400.000	95,00	1.356.400.000	100,00	1.356.400.000	100,00	1.356.400.000	100,00	6.782.000.000	Komunikasi dan Informatika	Dihitung berdasarkan jumlah layanan publik		
				Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	51,00	60,00	90.426.000	65,00	90.426.000	80,00	90.426.000	80,00	90.426.000	100,00	90.426.000	100,00	452.130.000	Komunikasi dan Informatika	Dihitung berdasarkan Jumlah seluruh layanan Administrasi Pemerintahan (77 layanan administrasi)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI																			
				Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100,00	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	226.065.000		Jumlah keseluruhan sistem informasi yang ada (3 sistem informasi)		
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis Pemerintah Daerah yang menyebar informasi dan kebijakan Pemerintah Daerah	Persen	-	-		50,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Komunikasi dan Informatika	Dihitung berdasarkan jumlah kecamatan		
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	92,00	94,00		96,00		98,00		100,00		100,00		100,00		Komunikasi dan Informatika	Dihitung berdasarkan jumlah PD dan Rumah Sakit		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Misi 5: Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing																						
Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali																						
		Index Smart City			Angka	2,91	3,03		3,09		3,15		3,21		3,28		3,28					
	Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni			Persen	88,01	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00					
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																			
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	625.000.000	100,00	625.000.000	100,00	725.000.000	100,00	625.000.000	100,00	625.000.000	100,00	3.225.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Didasarkan pada jumlah korban bencana yang tertangani		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Persen	100,00	100,00	720.000.000	100,00	720.000.000	100,00	545.000.000	100,00	545.000.000	100,00	545.000.000	100,00	3.075.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Didasarkan pada jumlah rumah terdampak relokasi program pemerintah		
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Persen		100,00	2.534.900.000	100,00	2.534.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	12.524.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah RTLH adalah 38.384. Target berdasarkan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh pada tahun berkenaan		
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen		100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	50.000.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah RTLH adalah 38.384. Target berdasarkan jumlah rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin	Persen		100,00	10.710.600.000	100,00	10.710.600.000	100,00	10.835.600.000	100,00	10.935.600.000	100,00	10.935.600.000	100,00	54.128.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Didasarkan pada jumlah rumah layak huni bagi keluarga miskin tahun berkenaan		
	Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Luas Kawasan Kumuh			Ha	87,85	82,85		77,85		72,85		67,85		62,85		62,85					
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																	Didasarkan pada luas kawasan kumuh (87,55ha)		
				Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Persen	87,85 Ha	5,70		11,40		17,10		22,80		28,50		28,50		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Didasarkan pada luas kawasan kumuh (87,55ha)		
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	Persen		100,00	198.938.000	100,00	198.938.000	100,00	198.938.000	100,00	198.938.000	100,00	198.938.000	100,00	994.690.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Didasarkan pada jumlah kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik pada tahun berkenaan		
				Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah MBR 46,434. Target didasarkan pada RLH untuk MBR yang dibangun pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan			Persen		90,50		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																			
				Persentase peningkatan embung terbangun	Persen	15,33	17,62	17.274.863.000	18,77	17.274.863.000	19,92	17.274.863.000	21,07	17.274.863.000	22,22	17.274.863.000	22,22	86.374.315.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dihitung dari jumlah desa (261)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																			
				Persentase rumah tangga yang terlayani Air bersih perpipaan dan terlindung	Persen	90,50	100,00	13.593.242.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	76.997.606.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dihitung dari seluruh jumlah seluruh penduduk		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	Persen	90,50	100,00	2.113.849.000	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	2.113.849.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dihitung dari seluruh jumlah seluruh penduduk		
				Persentase rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen		100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	7.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dihitung dari seluruh jumlah seluruh penduduk		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan			Persen	98,03	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik	Persen	-	98,18	2.907.217.000	98,31	2.907.217.000	98,45	2.907.217.000	98,58	2.907.217.000	98,72	2.907.217.000	98,72	14.536.085.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Didasarkan pada jumlah seluruh penduduk		
				Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	Persen	68,21	68,32	950.000.000	68,49	950.000.000	68,60	950.000.000	68,71	950.000.000	68,96	950.000.000	68,96	4.750.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Didasarkan pada jumlah seluruh penduduk		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	Persen	96,20	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	375.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Didasarkan pada jumlah seluruh penduduk		
		Persentase layanan publik dan pengaduan online yang aktif			Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA																			
				Persentase perangkat Daerah yang mengimple mentasi inovasi yang mendukung smart city	Persen	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Komunik asi dan Informati ka	Dihitung berdasarkan jumlah PD dan Rumah Sakit		
	Meningkat nya kualitas bangunan dan penataan ruang																					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase bangunan yang sesuai standar			Persen		89,95		90,40		90,90		91,40		92,40		92,40					
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI																			
				Persentase SIUJK terbit tepat waktu	Persen	93,00	94,00	99.451.300	95,00	99.469.000	96,00	99.469.000	97,00	99.469.000	98,00	99.469.000	98,00	497.327.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dihitung dari jumlah pengajuan SIUJK		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																			
				Persentase gedung yang dibangun dalam kondisi baik	Persen	89,95	90,40	48.039.340.000	90,90	41.950.000.000	91,40	950.000.000	91,90	950.000.000	92,40	950.000.000	92,40	92.839.340.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Didasarkan pada jumlah gedung perkantoran		
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penangg ung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase lingkungan gedung perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	2.500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Didasarkan pada jumlah gedung perkantoran		
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																			
				Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	Persen	85,00	87,00	45.213.000	88,00	45.213.000	89,00	45.213.000	90,00	45.213.000	91,00	45.213.000	91,00	226.065.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang			Persen	88,80	90,33		92,14		93,98		95,86		97,78		97,78					
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG																			
				Persentase pemanfaatan ruang sesuai ITR	Persen		89,30	763.000.000	89,80	813.840.000	90,30	813.840.000	90,80	813.840.000	91,30	813.840.000	91,30	4.018.360.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah pengajuan ITR selama 1 tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			Angka	60,17	66,49		66,54		66,60		66,65		66,71		66,71					
	Meningkatnya kualitas air																					
		Indeks Kualitas Air			Angka	58,57	58,80		58,92		59,04		59,16		59,28		59,28					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																			
				Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	Persen	60,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		70,00		Lingkungan Hidup	Dihitung dari perusahaan yang mengelola air limbah sesuai (200 perusahaan) , 2022:124, 2023:128, 2024:132, 2025:136, 2026: 140)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase sumber air yang dikonservasi	Persen	62,00	63,50	1.140.000.000	64,90	1.140.000.000	66,40	1.140.000.000	67,80	1.140.000.000	69,20	1.140.000.000	69,20	5.700.000.000	Lingkungan Hidup	Pembuatan sumur resapan, biopori, penanaman. Sampai dengan Th 2020 ada 131 sumber air yang dikonservasi dari 211 sumber air. Target sd 2026 15 sumber air yang dikonservasi, dengan rincian 3 sumber air per tahun		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																			
				Persentase Limbah B3 yang terkelola	Persen	71,00	73,00	100.000.000	75,00	100.000.000	77,00	100.000.000	79,00	100.000.000	80,00	100.000.000	80,00	500.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung berdasarkan volume potensi limbah B3		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																			
				Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	Persen	3 dokumen kajian	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	900.000.000	Lingkungan Hidup	Didasarkan pada jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan pada tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																			
				Persentase aduan lingkungan hidup yang ditangani	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah aduan lingkungan hidup		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya kualitas udara																					
		Indeks Kualitas Udara			Angka	87,35	87,40		87,43		87,45		87,48		87,51		87,51					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																			
				Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	Persen	100,00	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	7.600.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah sampling udara (20 sampling udara)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket
							2022		2023		2024		2025		2026					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	Persen	86,00	93,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah sampling emisi udara (20 sampling emisi udara)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																			
				Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	Persen	34,00	56,00		68,00		80,00		92,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah kampung iklim tahun berkenaan		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan																					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan			Angka	40,99	41,00		41,00		41,01		41,01		41,01		41,01					
			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																			

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20 dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	34,35	34,38	13.000.000.000	34,41	13.000.000.000	34,45	13.000.000.000	34,48	13.000.000.000	34,51	13.000.000.000	34,51	65.000.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung berdasarkan luas kawasan perkotaan yang seharusnya tersedia (4.378 Ha)		
	Meningkatnya penanganan sampah																					
		Persentase sampah yang tertangani			Persen	51,56	55,00		57,00		60,00		62,00		64,00		64,00					

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																			
				Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	7,35	20,75	2.000.000.000	27,85	2.000.000.000	32,58	2.000.000.000	37,16	2.000.000.000	42,54	2.000.000.000	42,54	10.000.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung berdasarkan luas area pelayanan pengelolaan sampah (76,5 Ha)		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung Jawab	Ket		
							2022		2023		2024		2025		2026							
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	Persen	23,49	26,00	3.170.000.000	27,00	3.170.000.000	28,00	3.170.000.000	30,00	3.170.000.000	31,00	3.170.000.000	31,00	15.850.000.000	Lingkungan Hidup	Dihitung dari jumlah sampah yang berkurang melalui kegiatan 3R/ jumlah timbulan sampah (76,5 ha/1015,10 ha)		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat indikasi rencana program prioritas Pemerintah Daerah, baik program-program yang mendukung pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati maupun untuk memenuhi layanan Perangkat Daerah untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Selain itu, bab ini juga memuat target program dan pagu indikatifnya. Pagu indikatif merupakan proyeksi kebutuhan pendanaan dalam bentuk jumlah dana yang tersedia untuk menyusun program tahunan. Jumlah dana yang tersedia mengacu pada bab III (Tiga) RPJMD ini terutama mengenai kerangka pendanaan yang terdiri dari kapasitas riil keuangan dan belanja Daerah. Adapun kerangka pendanaan pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

7.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab 3 terkait dengan proyeksi APBD tahun 2022 hingga 2026 di mana menuai tantangan besar. Tantangan tersebut disebabkan adanya Covid-19 yang melanda Kabupaten Boyolali, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Diharapkan proyeksi pendapatan daerah dapat tercapai melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
2. Penguatan data objek pajak;
3. Peningkatan *punishment* dan *reward* terhadap subjek pajak;
4. Optimalisasi objek retribusi daerah;
5. Peningkatan koordinasi dengan PD penghasil;

- 6. Peningkatan pelayanan pajak berbasis digital;
- 7. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD;
- 8. Optimalisasi aset-aset daerah yang potensial dalam mendukung investasi daerah

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Boyolali tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2022-2026

Kode			Kapabilitas Riil/ Belanja	Proyeksi				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Kapabilitas Riil Keuangan	2,286,758,508,000.00	2,300,836,038,000.00	2,325,706,938,000.00	2,349,993,304,000.00	2,376,933,800,000.00
			BELANJA	2,265,308,508,000.00	2,283,336,038,000.00	2,316,943,021,000.00	2,339,993,304,000.00	2,376,933,800,000.00
			Belanja operasi	1,523,618,669,000.00	1,501,137,428,000.00	1,516,275,899,000.00	1,474,184,131,000.00	1,485,630,288,000.00
			Belanja pegawai	1,032,836,527,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00	978,373,595,000.00
			Belanja barang dan jasa	398,965,030,000.00	461,293,222,000.00	476,431,693,000.00	479,339,925,000.00	490,786,082,000.00
			Belanja bunga	-	-	-	-	-
			Belanja subsidi	-	-	-	-	-
			Belanja hibah	64,940,312,000.00	52,420,300,000.00	52,420,300,000.00	7,420,300,000.00	7,420,300,000.00
			Belanja bantuan sosial	26,876,800,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00	9,050,311,000.00
			Belanja modal	330,834,622,000.00	387,527,297,000.00	391,849,763,000.00	455,722,737,000.00	479,895,199,000.00
			Belanja tidak terduga	35,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
			Belanja transfer	375,855,217,000.00	374,671,313,000.00	388,817,359,000.00	390,086,436,000.00	391,408,313,000.00
			Belanja bagi Hasil	15,149,776,000.00	15,889,029,000.00	17,111,918,000.00	18,380,995,000.00	19,702,872,000.00
			Belanja bantuan Keuangan	360,705,441,000.00	358,782,284,000.00	371,705,441,000.00	371,705,441,000.00	371,705,441,000.00

Pada dasarnya ketercapaian target kinerja program tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali, melainkan bisa dari berbagai sumber pendanaan lain, seperti APBN maupun pendanaan lainnya. Namun demikian, kerangka pendanaan pembangunan daerah dalam bab ini hanya mencantumkan sumber pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Boyolali. Kerangka pendanaan ini akan menjadi acuan dalam menyusun kebutuhan pendanaan masing-masing program. Program-program yang telah disusun pagu indikatifnya kemudian menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

7.2. Program Pembangunan

7.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pengelolaan pendidikan sekolah dasar, menengah pertama, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalkan dalam bentuk pembangunan unit sekolah baru, perpustakaan sekolah, sarana dan prasarana utilitas sekolah, penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa, mebel sekolah alat peraga siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kapasitas pengelola dana BOS, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, baik di tingkat pendidikan dasar, menengah pertama, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan APM SD dan SMP, APK PAUD, persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi serta beberapa indikator lain yang merupakan standar pelayanan minimum dalam urusan pendidikan.

b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan untuk melakukan pemerataan dari segi kuantitas maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan kesetaraan. Program ini dioperasionalkan dengan melakukan pemetaan dan

perhitungan terhadap jumlah pendidik dan tenaga kependidikan baik di satuan pendidikan dasar, PAUD maupun pendidikan kesetaraan. Program ini dilakukan untuk meningkatkan persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat

Program ini diarahkan untuk memenuhi kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Layanan tersebut difokuskan pada layanan rumah sakit dan puskesmas sesuai standar. Cakupan layanan yang diberikan diantaranya pemeriksaan ibu hamil, pelayanan ibu bersalin, pelayanan bayi baru lahir, pelayanan balita, penanganan penyakit menular dan tidak menular, pencegahan stunting dan balita kurang gizi, penanganan Covid-19, jaminan kesehatan warga miskin, peningkatan kesehatan lingkungan serta memberikan layanan screening kesehatan kepada warga negara usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia.

b. Program Peningkatan Kapasitas SDM Tenaga Kesehatan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu dan kompetensi SDM kesehatan melalui berbagai kegiatan diantaranya pemenuhan jumlah kebutuhan tenaga kesehatan dan sebagainya.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar sudah lolos uji sesuai standar kesehatan. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu memastikan sarana produksi IRTP memenuhi standar dan syarat perijinan, Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memenuhi syarat hygiene sanitasi, serta fasilitasi pelayanan kefarmasian memenuhi standar dan syarat perijinan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan baik kesehatan personal maupun lingkungan sekitar. Upaya yang akan dilakukan yaitu membentuk desa/kelurahan siaga aktif mandiri dan menerapkan Germas pada masing-masing desa/kelurahan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya embung yang terbangun di desa-desa Kabupaten Boyolali. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah meningkatnya rumah tangga yang terlayani air bersih untuk kebutuhan pokok sehari-hari di Kabupaten Boyolali. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sanitasi individu maupun komunal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya rumah tangga yang terlayani sanitasi layak dan dalam kondisi baik serta banyaknya rumah tangga yang telah memiliki septitank individu. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja SDGs akses layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

d. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya gedung yang dibangun di Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

e. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung fasilitas publik di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya lingkungan gedung perkantoran di Kabupaten Boyolali dalam kondisi baik.

Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

f. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan gedung fasilitas publik yang memadai di Kabupaten Boyolali. Indikator keberhasilan dari program ini adalah banyaknya jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja bangunan yang sesuai standar.

g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di Kabupaten Boyolali. Pada aspek perencanaan, program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR), sedangkan pada aspek pemanfaatan dan pengendalian dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana maupun korban relokasi program pemerintah kabupaten. Program dilaksanakan untuk mendukung tercapainya SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman dan indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

b. Program Kawasan Permukiman

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha serta perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan kumuh. Program ini mendukung pencapaian indikator kinerja menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh. Program ini dilaksanakan untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian indikator kinerja cakupan ketersediaan rumah layak huni.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mendukung fungsi hunian serta penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini mendukung tercapainya indikator kinerja menurunnya luas kawasan kumuh dan meningkatnya cakupan ketersediaan rumah layak huni.

5. Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana. beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan ke dalam bentuk penyusunan kajian resiko bencana, penyusunan rencana penanggulangan bencana, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana, pemberian pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, penyediaan sarana dna prasarana kesiapsiagaan, penanganan pasca bencana, pengembangan kapasitas Tim Reaksi cepat (TRC), penyusunan regulasi penanganan bencana, penguatan kelembagaan bencana, dan pembinaan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.

b. Program Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam daerah kabupaten/kota, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, koordinasi penyelenggaraan keramaian dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, membangun kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan, sosialisasi penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati, penanganan atas pelanggaran Peraturan daerah

dan Peraturan Bupati, serta pengembangan kapasitas dan karir PPNS. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan).

c. Program Pencegahan penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten, inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionisasikan dalam bentuk pencegahan, pengendalian dan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, penanganan bahan beracun dan berbahaya kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran, pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran, pendataan dan penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan pembentukan relawan pemadam kebakaran. program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang dilaporkan.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitas Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan dasar kepada anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan, pengemis, disabilitas dan PMKS lainnya diluar panti sosial. Pelayanan dasar tersebut terdiri dari penyediaan permakanan, penyediaan sandang, pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial, penyediaan alat bantu, peningkatan kemitraan rehabilitasi sosial, serta pemberian bimbingan sosial kepada keluarga ODGJ.

b. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan usaha kesejahteraan masyarakat. Upaya yang akan dilakukan yaitu pengembangan PSKS melalui berbagai pelatihan bersertifikat dan pengumpulan sumbangan dari dunia usaha untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial dan fasilitasi pengembangan ekonomi bagi fakir miskin. Salah satu kunci keberhasilan program tersebut yaitu tersedianya data fakir miskin yang akurat dan update. Selanjutnya dibutuhkan fasilitasi penyaluran bantuan sosial dan ekonomi yang tepat sasaran pada masyarakat.

d. Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan untuk pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) sesuai standar. Standar tersebut cukup membantu dalam implementasi proses pengelolaan TMP.

e. Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan untuk memberikan bantuan sosial saat dan setelah masa tanggap darurat bencana. Bantuan sosial yang diberikan diantaranya penyediaan sandang, penanganan khusus kelompok rentan, pelayanan dukungan psikososial, serta koordinasi pelaksanaan taruna siaga bencana dan kampung siaga bencana.

7.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dari tenaga kerja melalui berbagai pelatihan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini serta memberi perhatian lebih kepada masyarakat usia produktif yang kurang mampu. Dengan adanya program ini diharapkan tenaga kerja di Kabupaten Boyolali memiliki kompetensi (yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi) yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, upaya-upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, pengadaan sarana pelatihan kerja, pembinaan LPK swasta, serta penyediaan sumber daya perizinan LPK secara terintegrasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja dan persentase peningkatan fasilitasi pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu.

b. Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan untuk lebih fokus pada penempatan tenaga kerja secara langsung melalui upaya-upaya yang berjenjang mulai dari pemutakhiran *database* pencari kerja, penyuluhan, penyediaan bursa kerja *online* maupun *offline*, pengawasan terhadap LPTKS, hingga memberikan pelatihan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI), dan pemberdayaan terhadap Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia (PMI/TKI). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

c. Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan untuk terjaminnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan yang memberi kerja (perusahaan). Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan melalui upaya pengawasan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan bidang tenaga kerja oleh perusahaan, mencegah adanya perselisihan hubungan industrial antara pegawai dan perusahaan, serta memediasi perselisihan yang terjadi antara pegawai dan perusahaan melalui perundingan bipartite. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak, persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja dan kebebasan berserikat dan persentase perusahaan yang mempekerjakan penduduk boyolali termasuk difabel.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan layanan perlindungan terhadap perempuan. Program tersebut dibagi menjadi dua aspek yakni aspek pencegahan dan penanganan. Aspek pencegahan dilakukan melalui sosialisasi adanya layanan perlindungan korban kekerasan, serta mencegah terjadinya kekerasan dalam keluarga. Pada aspek penanganan akan ada penambahan jumlah layanan rujukan, peningkatan kerjasama dengan lembaga terkait serta peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan.

b. Program Pemenuhan Hak Anak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan area publik yang layak anak. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat). Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu sosialisasi dan advokasi kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan swasta untuk mendukung area/desa layak anak. Selain itu, perlu untuk meningkatkan partisipasi anak dalam proses pembangunan.

c. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini ditujukan untuk meningkatkan upaya perlindungan khusus pada anak. Adapun upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan upaya advokasi dan pendampingan pencegahan kekerasan pada anak, pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) anak yang memerlukan perlindungan khusus serta peningkatan kualitas SDM penyelenggaraan layanan perlindungan anak.

d. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan praktek dalam mewujudkan kesetaraan gender baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah. Dilingkungan pemerintah, program ini diarahkan pada peningkatan penggunaan Anggaran Responsif Gender (ARG). Sedangkan pada lingkungan non pemerintah diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan sebagainya.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan.

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik. Sarana dan prasana lumbung pangan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase cadangan pangan, persentase ketersediaan informasi distribusi

pangan yang dapat diakses masyarakat, dan persentase peningkatan kelompok UMKM yang melaksanakan diversifikasi pangan. Stok cadangan pangan utama, seperti beras, media informasi distribusi pangan dan pembinaan kelompok UMKM menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. **Program penanganan kerawanan pangan.**

Program ini diarahkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase penanganan desa rawan pangan. Pendataan dan penanganan desa rawan pangan dengan melibatkan kolaborasi multi aktor di Kabupaten Boyolali menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

d. **Program pengawasan keamanan pangan.**

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan keamanan pangan di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase pangan yang aman (layak konsumsi). Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana laboratorium pengujian pangan dan pengembangan sertifikasi pangan yang aman (layak konsumsi) menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Program ini dirancang untuk mengoptimalkan penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah banyaknya kasus sengketa tanah yang difasilitasi untuk diselesaikan.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran limbah dengan meningkatkan kualitas perencanaan lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah banyaknya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang berhasil disusun dengan baik dan sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Boyolali. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Air.

b. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Program ini diarahkan pada pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Program ini diharapkan dapat menekan emisi GRK di Kabupaten Boyolali dan mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, seperti kebun raya, taman kota, dan ruang terbuka hijau lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk mengendalikan pencemaran limbah terutama limbah B3 di Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah limbah B3 yang ada dapat terkelola dengan baik. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja Indeks Kualitas Air.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan untuk menjaga kesinambungan antara peningkatan aktivitas dan izin investasi yang ada di Kabupaten Boyolali dengan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya yang dilakukan melalui fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atay izin PPLH bagi usaha dan atau kegiatan yang mengajukan rekomendasi perizinan lingkungan, serta pengawasan terhadap usaha atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH nya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung terciptanya perusahaan yang ramah lingkungan sehingga diharapkan investasi di Kabupaten Boyolali meningkat tanpa memberi dampak buruk bagi lingkungan. Program ini dilakukan untuk mencapai tiga indikator yaitu persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar, persentase ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH, serta persentase perusahaan yang ramah lingkungan.

f. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada pengelolaan dan penanganan aduan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pelaksanaan

program ini diharapkan dapat mendukung tercapainya indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

g. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan, optimalisasi pengelolaan sampah 3R, dan peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Program ini dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Dokumen kependudukan memegang peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan berupa e-KTP, Kartu Identitas Anak, dan Kartu Keluarga. Fokus intervensi dari program pendaftaran penduduk antara lain berupa peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, serta peningkatan penataan pendaftaran penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil, terutama berupa akta kelahiran dan pengurusan akta kematian. Peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pencatatan sipil menjadi kerangka kegiatan di dalam program ini.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemutakhiran data kependudukan. Kerangka kegiatan yang menjadi prioritas berupa penataan dan penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan data profil kependudukan sesuai ketentuan. Adapun kerangka kegiatan yang direncanakan berupa penyusunan profil kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan Desa

Seiring dengan kewenangan desa yang semakin besar di dalam UU No 6 Tahun 2014, maka diperlukan peningkatan fasilitasi bagi

pemerintah desa dalam melakukan penataan desa. Oleh karena itu, program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa fasilitasi perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa sesuai kebutuhan pembangunan dan masyarakat. Tidak kalah penting dalam program ini akan memfasilitasi tata ruang desa dan sarana prasarana desa.

b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi desa dan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan. Pengembangan desa dilakukan melalui proses identifikasi potensi, fasilitasi pengembangan ekonomi desa, dan peningkatan penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG). Sedangkan peningkatan swadaya masyarakat melalui peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan bantuan bulanan bhakti gotong royong, dan fasilitasi kegiatan PKK.

c. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kawasan perdesaan. Kabupaten Boyolali telah memiliki modal kebijakan berupa Perda No. 15 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Fasilitasi kerjasama kawasan perdesaan diharapkan mampu meningkatkan kolaborasi antar desa dalam mengoptimalkan potensi kawasan.

d. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa. Adapun langkah yang ditempuh melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa serta penataan desa. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui fasilitasi penyusunan perencanaan dan pelaporan pembangunan desa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, fasilitasi musyawarah desa, fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa, dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan penataan desa melalui fasilitasi penyusunan profil desa, penegasan batas desa, pengelolaa aset desa, peningkatan sarana prasarana desa serta fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa,

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran kelompok tribina (BKB, BKR, dan BKL), UPPKS dan PIK Remaja dalam mewujudkan keluarga sejahtera. Adapun langkah yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pembinaan kepada kelompok terkait melalui berbagai pelatihan, serta membentuk dan menguatkan PIK Remaja berbasis masyarakat/sekolah.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah KB aktif pada masyarakat. Peningkatan tersebut dalam rangka mendukung upaya pengendalian jumlah penduduk. Adapun upaya yang akan dilakukan melalui pengendalian distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, meningkatkan tenaga penyuluh KB lapangan serta mengurangi kasus kegagalan atau komplikasi berat pemakaian kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

c. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin agar jumlah penduduk tidak meningkat secara signifikan. Untuk itu, diperlukan data basis keluarga dan data hasil pelayanan KB modern untuk memetakan perkiraan pengendalian penduduk. Selain itu, perlu peningkatan pemanfaatan dokumen kajian pengendalian penduduk pada setiap PD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing perangkat daerah memperhatikan aspek dampak kependudukan pada setiap keputusan yang diambil.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Program ini diarahkan pada peningkatan akses masyarakat terhadap moda transportasi, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, pengujian berkala kendaraan bermotor, dan pengelolaan parkir. Program ini dilaksanakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja rasio konektivitas kabupaten.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Aplikasi Informatika

Program ini dirancang untuk mengembangkan layanan publik secara online sebagai salah satu program yang mendukung inovasi *smart city* Kabupaten Boyolali. Indikator tercapainya program ini adalah meningkatnya perangkat daerah yang telah mengimplementasikan inovasi *e-government* yang akan mendukung *smart city* kabupaten. Program ini dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja layanan publik dan pengaduan online yang aktif.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, terutama terkait aspek transparansi dan partisipasi masyarakat. Kinerja yang diharapkan tercapai melalui program ini adalah persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah, serta persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi. Informasi publik melalui program ini diharapkan tidak hanya satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, sekaligus mampu membangun inisiatif warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perumusan kebijakan. Berbagai rencana teknis di dalam program ini antara lain fasilitasi kelompok informasi masyarakat dan penguatan peran PPID.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan untuk mengetahui dan meningkatkan kesehatan koperasi yang diharapkan akan berdampak pada rasa aman dan nyaman bagi anggota koperasi. Selain itu, koperasi yang sehat juga diharapkan dapat membantu perekonomian khususnya perekonomian lokal. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi. Hal tersebut dilakukan karena cukup banyak koperasi di Kabupaten Boyolali yang tidak sehat atau nonaktif akibat dari kualitas SDM yang rendah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih.

c. Program Pemberdayaan UMKM

Program ini lebih berfokus pada pemberdayaan usaha mikro secara langsung agar usahanya semakin meningkat serta menciptakan usaha-usaha mikro yang baru. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro dan jumlah pengembangan usaha mikro.

d. Program Pengembangan UMKM

Program ini fokusnya pada peningkatan SDM pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Boyolali agar dapat menjalankan usaha yang *sustain* dan sesuai standar, serta usaha mikro diharapkan dapat meningkatkan kelasnya menjadi usaha kecil. Selain itu, program ini juga merupakan program yang berkaitan langsung dalam program prioritas untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan SDM pelaku UMKM yang terlatih, persentase pelaku UMKM yang menerapkan metode produksi sesuai standar, persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan, dan persentase pelaku usaha mikro yang difasilitasi.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Boyolali melalui identifikasi potensi investasi. Hal ini dilakukan dengan upaya pembuatan peta potensi investasi, profil investasi, hingga yang bersifat mempermudah investasi melalui kebijakan daerah mengenai fasilitasi/insentif. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Boyolali melalui promosi potensi investasi secara langsung melalui berbagai kegiatan. Dengan adanya program ini diharapkan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Boyolali meningkat. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator yaitu persentase promosi potensi investasi yang ditindaklanjuti dengan peninjauan kerjasama investasi, serta persentase realisasi investasi di kawasan utara Boyolali. Pada indikator kedua disebutkan secara eksplisit kawasan utara Boyolali

karena diharapkan pembangunan di kawasan utara Boyolali akan merata dengan kawasan lainnya melalui adanya aktivitas investasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai standar bagi kegiatan investasi sehingga diharapkan aktivitas investasi di Kabupaten Boyolali tidak terhalang oleh regulasi dan prosedur yang menyulitkan bagi investor. Keberhasilan dari program ini akan diukur melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan indikator yang ingin dicapai dari program ini yaitu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM dalam hal ini calon investor) perizinan investasi.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk monitoring pelaksanaan penanaman modal melalui pemantauan pelaksanaan penanaman modal (perusahaan) dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal (pelaku usaha). Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LPKM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan untuk menyediakan data dan sistem informasi yang berkaitan langsung dengan penanaman modal sehingga seluruh aktivitas investasi baik penyediaan *database* untuk keperluan pendataan jumlah investor/realiasi investasi, maupun untuk keperluan pelayanan investasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota serta pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi. Beberapa kegiatan tersebut

dioperasionalisasikan dalam bentuk penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota, peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait, penyelenggaraan kejuaraan olahraga multievent, pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi, serta pemberian penghargaan olahraga tingkat kabupaten/kota. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik, pelatih yang berprestasi serta pembinaan terhadap atlet muda.

b. Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota, dan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota. beberapa kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera, serta peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota. program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda.

c. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan. kegiatan ini dioperasionalisasikan dengan melakukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase kelompok pramuka aktif.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Data statistik yang akurat dan mutakhir memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja berupa persentase penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas. Data statistik yang berkualitas diperoleh melalui rangkaian proses koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi

data statistik sektoral. Harapannya, setiap sektor atau perangkat daerah mampu menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas dan bermanfaat bagi efektivitas pembangunan.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Di tengah revolusi digital yang makin masif, perlu disertai dengan tingkat keamanan informasi. Program ini diarahkan untuk mencapai kinerja persentase tingkat keamanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pelestarian dan Pengeolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten/kota yang dioperasionisasikan dengan melakukan perlindungan terhadap cagar budaya dan pengembangan cagar budaya. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase cagar budaya yang teregistrasi.

b. Program pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kesenian masyarakat yang pelakunya dalam daerah kabupaten/kota. Mengingat pula eksistensi kesenian tradisional masih sangat kuat dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat Boyolali. Operasionalisasi program ini dalam bentuk peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional, standarisasi dan sertifikasi SDM kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, serta peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase kelompok seni yang dibina.

c. Program Pengelolaan Museum

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan museum. kegiatan tersebut dioperasionisasikan dengan melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, pembinaan dan peningkatan mutu serta kapasitas SDM permuseuman, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum, penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, dan

revitalisasi sarana dan prasarana museum. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase koleksi museum dalam kondisi baik.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota. Beberapa kegiatan tersebut dioperasionalkan dengan melakukan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik, pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan, pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten, pembinaan perpustakaan khusus tingkat kabupaten/kota, pengembangan layanan perpustakaan rujukan, sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kab/kota, Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca, serta Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, persentase perpustakaan sesuai standar nasional dan SKM layanan perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan untuk meningkatkan nilai audit kearsipan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa pengelolaan arsip dinamis, statis, dan pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Arsip memiliki peran penting dalam menopang akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkan. Beberapa kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten, autentifikasi arsip statis dan arsip alih media,

pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung, dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah, kecamatan, desa/kelurahan.

7.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program pengelolaan perikanan tangkap.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki indikator persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar serta persentase nelayan kecil yang diberdayakan. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode penangkapan ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program pengelolaan perikanan budidaya.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya. Program ini memiliki indikator persentase kelompok pembudidaya perikanan yang menggunakan metode budidaya yang baik, persentase pembudi daya ikan kecil yang diberdayakan, dan persentase peningkatan ketersediaan benih. Kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta metode budidaya ikan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. Program pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemasaran produk perikanan. Program ini memiliki indikator persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan metode promosi langsung dan tidak langsung menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan objek daya tarik wisata yang merupakan komponen inti dalam aktivitas pariwisata yang dapat menarik wisatawan. Kabupaten Boyolali yang masuk menjadi bagian dari KSPN Borobudur diharapkan mampu untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan mengembangkan objek daya tarik wisata yang dapat menjadi pilihan. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan

daya tarik wisata kabupaten, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten, penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten, pemeliharaan/pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana destinasi pariwisata kabupaten, serta fasilitasi dan standarisasi industri usaha pariwisata. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan, persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di kawasan utara.

b. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pemasaran pariwisata melalui kegiatan promosi media cetak, elektronik, dan media lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi, dan persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin.

c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan serta optimalisasi kelompok masyarakat atau kelompok sadar wisata (pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase peningkatan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, produksi hasil peternakan dan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil), persentase peningkatan ketersediaan sarana peternakan, dan persentase sampel obat hewan yang diperiksa. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan produksi hasil peternakan. Program ini memiliki indikator

persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik, dan persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana pertanian dan peternakan menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

c. **Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas produk hasil peternakan dan meningkatkan populasi ternak. Program ini memiliki indikator persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular, persentase susu yang memenuhi standar mutu dan persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

d. **Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.**

Program ini diarahkan untuk menjaga produksi pertanian melalui upaya penurunan resiko dampak bencana pertanian. Program ini memiliki indikator persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani, persentase fasilitasi penanggulangan bencana yang tertangani, dan persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian. Pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

e. **Program perizinan usaha pertanian.**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, walaupun tidak mendukung secara langsung. Program ini sangat dibutuhkan untuk membina pelaku usaha pertanian dalam arti luas agar mampu mengelola usahanya dengan baik. Program ini memiliki indikator persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha. Identifikasi jenis-jenis usaha dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan usaha pertanian menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

f. **Program penyuluhan pertanian.**

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan produk hasil peternakan. Program ini memiliki indikator cakupan bina kelompok tani. Pendataan dan pendampingan kelompok petani secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi.

4. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan untuk pemberian izin dan pendaftaran perusahaan melalui penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase rekomendasi perizinan pengembangan usaha-usaha toko modern yang difasilitasi.

b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat melalui pembangunan dan atau rehabilitasi pasar. Dengan adanya sarana distribusi perdagangan (pasar) yang baik maka diharapkan lalu lintas barang dapat terjamin. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik, persentase pedagang yang tertib lokasi, serta jumlah pendapatan retribusi pelayanan pasar.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini bertujuan untuk memastikan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang beredar stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Program tersebut juga untuk memastikan agar daya beli masyarakat tidak turun dan memastikan barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat selalu diakses oleh masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui sistem yang terintegrasi dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. Program ini memiliki indikator yang ingin dicapai yaitu persentase koefisiensi variasi harga antar waktu.

d. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan melalui penyelenggaraan promosi dagang melalui kegiatan pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Boyolali serta pembinaan dan pengembangan usaha ekspor unggulan. Program ini memiliki indikator yang ingin dicapai yaitu persentase pelaku usaha potensial ekspor yang dipromosikan dan persentase peningkatan pelaku usaha ekspor.

e. Program Standardisasi Perlindungan Konsumen

Program ini dilakukan untuk memberikan perlindungan konsumen melalui standarisasi alat tera yang ada agar konsumen/masyarakat

tidak dirugikan. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase alat UTTP yang sudah tertib ukur

f. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

Program ini diarahkan melalui pelaksanaan promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten, serta untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan susu sapi di Kabupaten Boyolali. Media dan metode promosi pemasaran susu sapi menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi, persentase informasi perdagangan yang harus diawasi, dan persentase produk olahan susu yang dipasarkan.

5. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program perencanaan dan pembangunan industri.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan industri di tingkat kabupaten khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri, peningkatan akses permodalan, penerapan teknologi tepat guna serta untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha pengolahan susu sapi di Kabupaten Boyolali. Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha susu sapi, sarana dan prasarana serta metode produksi menjadi fokus perhatian utama yang harus diintervensi. Program ini memiliki indikator yang akan dicapai yaitu persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang terlatih, persentase peningkatan akses permodalan, persentase IKM yang menggunakan teknologi tepat guna, persentase IKM yang menerapkan metode produksi berorientasi bisnis, dan persentase IKM susu yang meningkat produktivitasnya.

7.2.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Setda untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan pemerintah daerah. Peran Setda dalam hal ini tidak hanya melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, sekaligus pengendalian terkait tindak lanjut kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Program ini juga terkait kualitas produk hukum daerah yang mampu menjawab kebutuhan daerah dan mampu selaras dengan produk hukum provinsi dan nasional. Program ini juga memuat berbagai kebutuhan pembangunan terkait aspek kesejahteraan rakyat yang tidak terwadahi dalam program di perangkat daerah, terutama terkait alokasi beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri Boyolali dan fasilitasi kegiatan keagamaan.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini juga memiliki fungsi penting sebagai instrumen koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan tindak lanjut kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan. Penguatan fungsi pengendalian dan evaluasi memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan program ini. Selain itu, program ini juga diarahkan mampu mengawal kinerja BUMD sehingga dapat berkontribusi pada PAD, serta efektivitas dan efisiensi *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa. Tidak kalah penting, program perekonomian dan pembangunan juga berupaya meningkatkan peran sektor swasta dalam pembangunan daerah, terutama melalui koordinasi dan sinkronisasi implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP).

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini selain memiliki peran fasilitasi administrasi rutin perkantoran, layanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah, juga memiliki peran strategis dalam rangka penguatan reformasi birokrasi. Program ini menjadi instrumen dalam pengelolaan implementasi 8 area perubahan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya terkait pembangunan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas tata laksana dan pelayanan publik. Program ini memiliki peran penting untuk mencapai target kinerja indikator makro tata kelola pemerintahan berupa Indeks Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP, dan IKM.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan untuk meningkatkan dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar. Tugas dan fungsi DPRD berupa legislasi, pengawasan, dan penganggaran, kemudian dioperasionalisasi melalui kerangka kegiatan yang akan difasilitasi berupa fasilitasi pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, pembahasan kebijakan anggaran, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, fasilitasi tugas dan peningkatan kapasitas DPRD.

7.2.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pembangunan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas proses pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan, pengendalian, hingga evaluasi. Target kinerja yang akan dicapai terkait persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan hingga persentase capaian target program pembangunan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan di dalam program ini mulai dari aspek perencanaan partisipatif berupa konsultasi publik dan musrenbang, kemudian terkait analisis data dan informasi pembangunan daerah, hingga kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pembangunan. Program ini, oleh karena itu diarahkan agar berbagai dokumen perencanaan dapat sinkron. Sinkronisasi, terutama terkait perencanaan jangka menengah dengan tahunan, dan perencanaan pemerintah daerah dengan perangkat daerah. Koordinasi dan sinkronisasi direncanakan mulai dari setiap bidang, yaitu pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan. Kerangka kegiatan teknis yang dijalankan mulai dari koordinasi penyusunan, asistensi penyusunan, monitoring dan evaluasi penyusunan, serta koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Indikator kinerja di dalam program ini berupa persentase penyediaan anggaran sesuai ketentuan, persentase penyerapan APBD tahun berjalan, hingga persentase penyajian laporan keuangan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, kerangka kegiatan di dalam program ini mulai dari proses koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan, serta koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.

b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama dari komponen PAD berupa pajak dan retribusi daerah. Kerangka kegiatan direncanakan mulai dari penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah, penagihan pajak, hingga pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan inventarisasi aset daerah dan pemanfaatan barang milik daerah. Kerangka kegiatan di dalam program ini, antara lain terkait penyusunan standar harga, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan, dan penilaian barang milik daerah. Program ini tidak kalah penting juga terkait penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah.

3. Kepegawaian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Kepegawaian Daerah

Program ini memiliki peran penting untuk menopang pelaksanaan manajemen ASN. Kinerja yang diarahkan program ini yaitu persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan, persentase pegawai yang memenuhi target SKP, dan persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan mulai dari pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, hingga penilaian dan evaluasi kinerja ASN.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan SDM

Program ini diarahkan, terutama untuk meningkatkan kompetensi ASN. Indikator kinerja yang akan dicapai di dalam program ini yaitu rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), rasio pegawai berpendidikan tinggi, serta persentase PD yang terpenuhi kebutuhan diklat.

5. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Penelitian dan pengembangan daerah tidak lepas dari mandat Permendagri No. 17 Tahun 2016, terutama terkait bentuk kelitbangan utama berupa penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Indikator kinerja program diarahkan berorientasi hasil, yakni terkait tindak lanjut kebijakan inovasi daerah yang diterapkan dan hasil penelitian yang telah diolah dalam bentuk *policy brief* yang ditindaklanjuti sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penelitian dan pengembangan yang akan dijalankan sebagai basis *evidence based policy* terkait berbagai bidang pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi. Inovasi daerah yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akselerasi pembangunan.

7.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan Daerah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal, sehingga mampu mempertahankan capaian opini BPK WTP. Dalam rangka memwadhahi fungsi kontrol masyarakat, program ini juga memiliki target kinerja berupa persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Beberapa kerangka kegiatan teknis berupa pengawasan kinerja pemerintah daerah, review laporan kinerja dan keuangan,

monitoring dan evaluasi TLHP, pengawasan desa dan pengawasan untuk tujuan tertentu.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Program ini diarahkan untuk menopang kinerja *outcome* berupa maturitas SPIP dan WBK/WBBM. Indikator kinerja di dalam program ini berupa capaian nilai MCP, indeks manajemen resiko, dan kapabilitas APIP. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, serta pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah.

7.2.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan. Peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan terkait pelayanan administrasi maupun pelayanan sarana dan prasarana umum, dengan orientasi hasil berupa meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di setiap kecamatan. Kerangka kegiatan yang akan dijalankan berupa koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan untuk menopang pelaksanaan peran strategis Kecamatan, yakni pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Program ini memiliki indikator kinerja yang berperan dalam pengentasan kemiskinan, yakni persentase stimulus bagi masyarakat miskin/berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan. Indikator kinerja di dalam program ini juga terkait tindak lanjut hasil koordinasi pemberdayaan masyarakat. Kerangka kegiatan untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, antara lain peningkatan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa atau kelurahan, pemberdayaan masyarakat kelurahan serta pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, dan peningkatan kapasitas lembaga

kemasyarakatan dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini terkait salah satu peran Kecamatan di dalam koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan, antara lain terkait sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

Salah satu fungsi Kecamatan yakni menyelenggarakan pemerintahan umum di wilayahnya. Pemerintahan umum di wilayah Kecamatan diarahkan untuk penguatan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, serta pembinaan kerukunan antar dan intra umat beragama dalam rangka menjaga kohesivitas sosial di wilayah Kecamatan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kecamatan memiliki peran strategis sebagai *intermediary* antara pemerintah daerah dengan desa. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas desa di dalam menjalankan kewenangannya, serta membangun sinergi antara pembangunan daerah dengan desa. Kerangka kegiatan teknis yang akan dijalankan berupa fasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa.

7.2.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik

program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. kegiatan tersebut dioperasionisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik di daerah, serta melaksanakan forum koordinasi antar pimpinan daerah tingkat

kabupaten/kota. program ini dilaksanakan untuk menekan angka potensi konflik sosial.

b. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan..

c. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Program ini dilaksanakan untuk menurunkan potensi konflik keagamaan.

d. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan membangun koordinasi dan kerjasama pada bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase masyarakat yang paham terhadap pembinaan ormas.

e. Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum

Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. kegiatan tersebut dioperasionalisasikan dengan menerapkan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri.

Tabel 7. 2. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali 2022-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar	Persen	100,00	100,00	992.212.454.260	100,00	988.516.291.000	100,00	988.121.291.000	100,00	988.123.791.000	100,00	988.113.791.000	100,00	4.945.087.618.260	Seluruh PD
				Persentase PD yang memiliki nilai SAKIP minimal 80	Persen	58,00	58,00		60,00		65,00		70,00		75,00		75,00	-	Sekretariat Daerah
				Persentase IKU kepala daerah yang mencapai target	Persen	78,00	80,00		82,00		84,00		87,00		90,00		90,00		Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai kematangan organisasi rata-rata 3	Persen		82,00		86,00		90,00		94,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
				Persentase perangkat daerah dengan tata laksana baik	Persen		20,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase PD yang memiliki nilai RB minimal baik	Persen		20,00		35,00		55,00		75,00		90,00		90,00	-	Sekretariat Daerah
				Cakupan layanan protokol dan komunikasi pimpinan sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
				Persentase kualitas pelayanan publik yang baik	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
				Persentase satuan/unit yang memiliki IKM dengan kategori Baik	Persen	80,00	83,00		85,00		87,00		89,00		90,00		90,00	-	Sekretariat Daerah
1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
1	01			Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan															

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Persen	80,29	85,00	22.352.200.000	90,00	22.352.200.000	95,00	22.352.200.000	100,00	22.352.200.000	100,00	22.352.200.000	100,00	111.761.000.000	Pendidikan
				Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (SPM)	Persen	92,7	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD	Persen	87,71	89,05	75.066.592.000	90,38	75.066.592.000	91,16	75.066.592.000	91,94	75.066.592.000	92,50	75.066.592.000	92,50	375.332.960.000	Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	78,5	78,80	45.968.828.000	79,10	45.718.828.000	79,40	45.718.828.000	79,70	45.718.828.000	80,00	45.718.828.000	80,00	228.844.140.000	Pendidikan
				Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP)	Persen	91,01	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pendidikan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase kepala rumah tangga yang mendapat fasilitas kejar paket A	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pendidikan
				Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Persen	10,4	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	2.500.000.000	100,00	12.500.000.000	Pendidikan
				Persentase sekolah SD dan SMP yang terakreditasi	Persen	99,27	99,42		99,56		99,71		99,85		100,00		100,00		Pendidikan
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi	Persen	53,73	54,47	13.638.152.000	55,5	13.638.152.000	56,68	13.638.152.000	58,16	13.638.152.000	60,37	13.638.152.000	60,37	68.190.760.000	Pendidikan
1	02		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rumah sakit terakreditasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan
				Persentase capaian SPM RS	Persen	100,00	100,00	114.998.167.000	100,00	116.848.167.000	100,00	120.848.167.000	100,00	125.848.167.000	100,00	131.848.167.000	100,00	610.390.835.000	RS Pandan Arang
				Persentase capaian SPM RS	Persen	100,00	100,00	28.577.000.000	100,00	31.817.000.000	100,00	35.705.000.000	100,00	40.370.600.000	100,00	45.969.320.000	100,00	182.438.920.000	RS Waras Wiris
				Persentase capaian SPM RS	Persen	100,00	100,00	56.962.750.000	100,00	58.557.750.000	100,00	60.311.750.000	100,00	62.241.750.000	100,00	64.364.750.000	86,00	302.438.750.000	RS Simo
				Persentase Puskesmas terakreditasi	Persen	100,00	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	107.703.559.000	100,00	538.517.795.000	Kesehatan
				Kabupaten sehat	Penghargaan	0	6 tatanan (wiwerda)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	190.000.000	9 tatanan (wistara)	950.000.000	Kesehatan
				Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan	Penduduk	52,72	54.829	25.000.000.000	57.022	25.000.000.000	59.303	25.000.000.000	61.675	25.000.000.000	64.142	25.000.000.000	64.142	125.000.000.000	Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)															
				Jumlah kematian warga negara usia produktif	Jiwa	936	931		926		921		916		911		911		Kesehatan
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	Persen	98,8	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan
				Jumlah kematian warga negara usia lanjut	Jiwa	1,24	1229		1.219,00		1.209,00		1.199,00		1.189,00		1.189,00		Kesehatan
				Persentase balita gizi kurang	Persen	3,70	3,60		3,50		3,30		3,10		3,00		3,00		Kesehatan
				Persentase balita stunting	Persen	9,40	9,30	500.000.000	9,20	500.000.000	9,10	500.000.000	9,00	500.000.000	8,80	500.000.000	8,80	2.500.000.000	Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)	Persen	88,60	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	125.000.000	Kesehatan
				Jumlah kematian balita	Jiwa	118	116		115		113		112		110		110		Kesehatan
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar (SPM)	Persen	99,70	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	2.434.884.000	100,00	12.174.420.000	Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Persen	98,70	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	60.000.000	100,00	300.000.000	Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	Persen	93,20	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	3.117.600.000	100,00	15.588.000.000	Kesehatan
				Jumlah kematian ibu	Jiwa	17	13		12		11		10		9		9		Kesehatan
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (SPM)	Persen	35,60	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (SPM)	Persen	57,20	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan sesuai standar (100)	Persen	63,20	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan
				Persentase penderita Diabetes Militus (DM) yang mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)	Persen	98,60	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	50.000.000	100,00	250.000.000	Kesehatan
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (SPM)	Persen	50,90	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	90.000.000	100,00	450.000.000	Kesehatan
				Angka Kesakitan Covid-19	angka	468,10	450,00	685.000.000	425,00	685.000.000	400,00	685.000.000	350,00	685.000.000	300,00	685.000.000	300,00	3.425.000.000	Kesehatan
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS	Persentase tenaga kesehatan	Persen	100,00	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	135.640.000	100,00	678.200.000	Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	yang memenuhi kualifikasi															
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase makanan minuman yang lolos uji	Persen	87,00	88,00	618.62 6.000	91,00	618.62 6.000	93,00	618.62 6.000	94,00	618.62 6.000	95,00	618.62 6.000	95,00	3.093.1 30.000	Kesehatan
				Persentase obat layak edar pada sarana pelayanan kefarmasian	Persen	96,00	100,00	150.00 0.000	100,00	150.00 0.000	100,00	150.00 0.000	100,00	150.00 0.000	100,00	150.00 0.000	100,00	750.000 .000	Kesehatan
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/kelurah an siaga aktif mandiri	Persen	44,94	48,69 (130 desa)	155.00 0.000	52, 43 (140 desa)	155.00 0.000	56,18 (150 desa)	155.00 0.000	59,93 (160 desa)	155.00 0.000	63,67 (170 desa)	155.00 0.000	63,67 (170 desa)	775.000 .000	Kesehatan
				Persentase Desa/Kelura han yang menerapkan GERMAS	persen	100,00	100,00	342.34 6.000	100,00	342.34 6.000	100,00	342.34 6.000	100,00	342.34 6.000	100,00	342.34 6.000	100,00	1.711.7 30.000	Kesehatan
1	03		Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persen	60,77	61,15	9.788.4 32.000	61,53	9.788.4 32.000	61,91	9.788.4 32.000	62,29	9.788.4 32.000	62,67	9.788.4 32.000	62,67	48.942. 160.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase peningkatan embung terbangun	Persen	15,33	17,62	17.274.863.000	18,77	17.274.863.000	19,92	17.274.863.000	21,07	17.274.863.000	22,22	17.274.863.000	22,22	86.374.315.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang terlayani Air bersih perpipaan dan terlindung	Persen	90,50	100,00	13.593.242.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	15.851.091.000	100,00	76.997.606.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	Persen	90,50	100,00	2.113.849.000	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	2.113.849.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase rumah tangga miskin yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen		100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	1.450.000.000	100,00	7.250.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase sanitasi komunal dalam kondisi baik	Persen	-	98,18	2.907.217.000	98,31	2.907.217.000	98,45	2.907.217.000	98,58	2.907.217.000	98,72	2.907.217.000	98,72	14.536.085.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Peningkatan ketersediaan sanitasi individual	Persen	68,21	68,32	950.000.000	68,49	950.000.000	68,60	950.000.000	68,71	950.000.000	68,96	950.000.000	68,96	4.750.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	Persen	96,20	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	375.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen	26,19	26,30	2.260.667.000	26,50	2.260.667.000	26,70	2.260.667.000	26,90	2.260.667.000	27,10	2.260.667.000	27,10	11.303.335.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung dalam kondisi baik	Persen	89,95	90,40	48.039.340.000	90,90	41.950.000.000	91,40	950.000.000	91,90	950.000.000	92,40	950.000.000	92,40	92.839.340.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase lingkungan gedung perkantoran dalam kondisi baik	Persen	100,00	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100,00	500.000.000	100	2.500.000.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	82,52	82,72	71.675.871.100	82,92	64.259.640.100	83,12	108.358.105.850	83,32	170.136.687.520	83,52	192.189.421.621	83,52	606.619.726.191	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase infrastruktur berkondisi baik yang menghubungkan pusat pertumbuhan di wilayah Boyolali utara	Persen	77,31	79,21		81,33		83,83		85,33		87,30		87,30		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SIUJK terbit tepat waktu	Persen	93,00	94,00	99.451.300	95,00	99.469.000	96,00	99.469.000	97,00	99.469.000	98,00	99.469.000	98,00	497.327.300	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG														-		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase pemanfaatan ruang sesuai ITR	Persen		89,30	763.000.000	89,80	813.840.000	90,30	813.840.000	90,80	813.840.000	91,30	813.840.000	91,30	4.018.360.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Dokumen Rencana Rinci Kawasan Potensial Investasi	Persen		9,09	813.840.000	18,18	813.840.000	27,27	813.840.000	36,36	813.840.000	45,45	813.840.000	45,45	4.069.200.000	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	04		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman																
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN																Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	625.00 0.000	100,00	625.00 0.000	100,00	725.00 0.000	100,00	625.00 0.000	100,00	625.00 0.000	100,00	3.225.0 00.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban relokasi program pemerintah kabupaten (SPM)	Persen	100,00	100,00	720.00 0.000	100,00	720.00 0.000	100,00	545.00 0.000	100,00	545.00 0.000	100,00	545.00 0.000	100,00	3.075.0 00.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN																Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase kawasan kumuh yang tertangani	Persen		5,70		11,40		17,10		22,80		28,50		28,50		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	Persen		100,00	2.534.900.000	100,00	2.534.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	2.484.900.000	100,00	12.524.500.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH																Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	Persen		100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	50.000.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin	Persen		100,00	10.710.600.000	100,00	10.710.600.000	100,00	10.835.600.000	100,00	10.935.600.000	100,00	10.935.600.000	100,00	54.128.000.000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase kawasan perumahan yang memiliki PSU dalam kondisi baik	Persen		100,00	198.93 8.000	100,00	198.93 8.000	100,00	198.93 8.000	100,00	198.93 8.000	100,00	198.93 8.000	100,00	994.690 .000	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
				Persentase RLH untuk MBR yang dibangun	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	05		Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketentraman, Ketertiban, dan Keindahan)	Persen	100,00	100,00	491.87 0.000	100,00	491.87 0.000	100,00	491.87 0.000	100,00	491.87 0.000	100,00	491.87 0.000	100,00	2.459.3 50.000	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM)	persen	90,20	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	272.500.000	100,00	1.362.500.000	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM)	persen	100,00	100,00	2.348.012.100	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	2.358.812.000	100,00	11.783.260.100	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM)	persen	100,00	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	211.000.000	100,00	1.055.000.000	Ketentrman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM)	persen	127,90	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	1.244.647.000	100,00	6.223.235.000	Ketentrman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1	06		Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang bersertifikat	Persen		16,00		18,00		20,00		21,00		23,00		98,00		Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	Persen	100,00	100,00	206.25 0.000	100,00	206.25 0.000	100,00	206.25 0.000	100,00	206.25 0.000	100,00	206.25 0.000	100,00	1.031.250.000	Sosial
				Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	persen	100,00	100,00	450.00 0.000	100,00	450.00 0.000	100,00	450.00 0.000	100,00	450.00 0.000	100,00	450.00 0.000	100,00	2.250.000.000	Sosial
				Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti (SPM)	persen	100,00	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	27.500.000	100,00	137.500.000	Sosial

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti (SPM)	persen	100,00	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	884.806.000	100,00	4.424.030.000	Sosial
				Persentase PMKS lainnya yang mendapatkan rehabilitasi sosial di Rumah Singgah	persen	100,00	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	1.662.214.000	100,00	8.311.070.000	Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	Persen	72,00	0,60	740.000.000	1,30	740.000.000	1,90	740.000.000	2,60	740.000.000	3,20	740.000.000	3,20	3.700.000.000	Sosial
				Persentase penerima bantuan sosial yang tepat sasaran (Program Kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sosial

[illegible]

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	07		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja																
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Persen		0,46	1.500.000.000	1,23	1.500.000.000	2,00	1.500.000.000	2,76	1.500.000.000	3,53	1.500.000.000	3,53`	7.500.000.000	Tenaga Kerja
				Persentase peningkatan fasilitas pelatihan kerja bagi usia produktif masyarakat tidak mampu	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	44,58	47,00	500.000.000	47,50	500.000.000	48,00	500.000.000	48,50	500.000.000	50,00	500.000.000	50,00	2.500.000.000	Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Persen		70,00		75,00		80,00		85,00		90,00		90,00		Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Persen	42,25	42,48		42,73		42,98		43,23		43,48		43,48		Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang memenuhi hak pekerja dan kebebasan berserikat	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja
				Persentase perusahaan yang mempekerjakan penduduk boyolali termasuk difabel	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Tenaga Kerja

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	08		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja APBD	Persen	2,45	2,50		2,52		2,54		2,56		2,58		2,58		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Partisipasi perempuan di lembaga swasta	Persen	0,00	10,00		11,00		11,00		11,00		11,00		11,00		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase pejabat publik perempuan	Persen		6,39		6,49		6,58		6,67		6,76		6,76		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (per 100 rb)	Rasio	0,00004	0,000035		0,00003		0,000025		0,00002		0,000015		0,000015		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase fasilitas publik layak anak	Persen	-	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	16,6726.201.000	83,33131.005.000		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Persentase desa layak anak	Persen	63,64	68,1826.201.000	72,7326.201.000	77,2726.201.000	86,3626.201.000	100,0026.201.000	100,0026.201.000	100,0026.201.000	100,0026.201.000	131.005.000		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang diselesaikan	Persen	100,00	100,006.028.445	100,006.028.000	100,006.028.000	100,006.028.000	100,006.028.000	100,006.028.000	100,006.028.000	100,006.028.000	100,0030.140.445		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Rasio korban kekerasan terhadap anak (per 100 rb)	Rasio	0,00011	0,00010412.056.890	0,00009712.056.000,00	0,00009012.056.000	0,00008312.056.000	0,00007512.056.000	0,00007512.056.000	0,00007512.056.000	0,00007560.280.890		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2	09		Urusan Pemerintahan Bidang Pangan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan lumbung pangan dalam kondisi baik	Persen	31,51	47,22	474.74 0.000	50,00	474.74 0.000	52,78	474.74 0.000	55,56	474.74 0.000	58,33	474.74 0.000	58,33	2.373.700.000	Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Cadangan Pangan	Persen		6,67	285.00 0.000	50,00	285.00 0.000	20,00	285.00 0.000	26,67	285.00 0.000	33,33	285.00 0.000	33,33	1.425.000.000	Pangan
				Persentase Ketersediaan informasi Distribusi Pangan yang dapat diakses masyarakat	Persen	62,00	69,00	115.50 0.000	77,00	115.50 0.000	85,00	115.50 0.000	92,00	115.50 0.000	100,00	115.50 0.000	100,00	577.500.000	Pangan
				Persentase Peningkatan kelompok/U MKM yang melaksanakan Diversifikasi Pangan	Persen	20,00	23,00	965.50 0.000	25,00	965.50 0.000	28,00	965.50 0.000	30,00	965.50 0.000	35,00	965.50 0.000	35,00	4.827.500.000	Pangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rawan pangan	Persen	54,00	58,00	180.853.000	63,00	180.853.000	67,00	180.853.000	72,00	180.853.000	76,00	180.853.000	76,00	904.265.000	Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman (layak konsumsi)	Persen	86,39	86,50	90.426.000	87,00	90.426.000	87,50	90.426.000	88,00	90.426.000	88,50	90.426.000	88,50	452.130.000	Pangan
2	10		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan																
2	10	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase kasus sengketa tanah yang tertangani	Persen	85,00	87,00	45.213.000	88,00	45.213.000	89,00	45.213.000	90,00	45.213.000	91,00	45.213.000	91,00	226.065.000	Pertanahan
2	11		Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup																
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan hidup yang tersedia sebagai dasar penyusunan kebijakan	Persen		100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	900.000.000	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																Lingkungan Hidup
				Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	Persen	60,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		70,00		Lingkungan Hidup
				Persentase sumber air yang dikonservasi	Persen	62,00	63,50	1.140.000.000	64,90	1.140.000.000	66,40	1.140.000.000	67,80	1.140.000.000	69,20	1.140.000.000	69,20	5.700.000.000	Lingkungan Hidup
				Persentase sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu (SO2 dan NO2)	Persen	100,00	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	1.520.000.000	100,00	7.600.000.000	Lingkungan Hidup
				Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	Persen	86,00	93,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase Kampung Iklim yang terfasilitasi	Persen	34,00	56,00		68,00		80		92		100,00		100		Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan/ ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20 dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	Persen	34,35	34,38	13.000.000.000	34,41	13.000.000.000	34,45	13.000.000.000	34,48	13.000.000.000	34,51	13.000.000.000	34,51	65.000.000.000	Lingkungan Hidup
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang dikelola	Persen	71,00	73,00	100.000.000	75,00	100.000.000	77,00	100.000.000	79,00	100.000.000	80,00	100.000.000	80,00	500.000.000	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase persetujuan lingkungan yang dikeluarkan bagi aktivitas investasi yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup
				Persentase ketaatan pelaku usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Persen	60,00	62,00		64,00		66,00		68,00		70,00		70,00		Lingkungan Hidup
				Persentase perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	100,00	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00	1.000.000.000	Lingkungan Hidup
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase aduan lingkungan hidup yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Lingkungan Hidup
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan sampah	Persen	7,35	20,75	2.000.000.000	27,85	2.000.000.000	32,58	2.000.000.000	37,16	2.000.000.000	42,54	2.000.000.000	42,54	10.000.000.000	Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	Persen	23,49	26,00	3.170.000.000	27,00	3.170.000.000	28,00	3.170.000.000	30,00	3.170.000.000	31,00	3.170.000.000	31,00	15.850.000.000	Lingkungan Hidup
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan e-KTP	Persen	99,69	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	146.500.000	99,70	732.500.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan dokumen KIA	Persen	27,92	30,00	1.416.291.000	40,00	1.416.291.000	45,00	1.416.291.000	50,00	1.416.291.000	60,00	1.416.291.000	60,00	7.081.455.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase kepemilikan dokumen KK	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan dokumen akta kematian	Persen	8,00	20,00	217.000.000	30,00	217.000.000	40,00	217.000.000	50,00	217.000.000	60,00	217.000.000	60,00	1.085.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase kepemilikan dokumen akta kelahiran	Persen	66,40	66,50	18.200.000	67,00	18.200.000	67,48	18.200.000	67,90	18.200.000	68,00	18.200.000	68,00	91.000.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan data kependudukan yang diupdate	Persen	75,00	78,00	673.555.000	80,00	673.555.000	83,00	673.555.000	85,00	673.555.000	90,00	673.555.000	90,00	3.367.775.000	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Presentase peningkatan ketersediaan data profil sesuai ketentuan	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase penataan desa yang difasilitasi sesuai ketentuan	Persen	1,15	4,98	1.500.000.000	5,36	1.500.000.000	4,98	8.197.300.000	4,98	1.500.000.000	4,98	1.500.000.000	25,00	14.197.300.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kawasan perdesaan yang berkembang	Kawasan	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		6,00		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	30,65	14,18		13,79		13,79		13,79		13,79		99,99		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan (Program Kemiskinan)	Persen	100,00	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	20.000.000	100,00	100.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase swadaya masyarakat terhadap prgram pemberdayaan masyarakat	Persen	2,00	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	2,00	2.550.000.000	3,00	2.550.000.000	3,00	12.750.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase BUMDES yang berkembang	Persen	51,34	61,34	180.000.000	71,34	180.000.000	81,34	180.000.000	90,90	180.000.000	100,00	180.000.000	100,00	900.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase peningkatan Posyantek Desa	Persen	11,00	19,00	80.000.000	27,00	80.000.000	35,00	80.000.000	43,00	80.000.000	51,00	80.000.000	51,00	400.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase PKK Aktif	Persen	100,00	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	410.000.000	100,00	2.050.000.000	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	14		Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana																
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	20,18	20,25		20,45		20,65		20,85		21,05		21,05		Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana,
				Presentase perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	Persen	6,00	8,00		10,00		12,00		14,00		16,00		16,00		Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana,
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA(KB)	Persentase peserta KB aktif	Persen	71,20	71,26	1.490.957.000	71,32	1.490.957.000	71,38	1.490.957.000	71,44	1.490.957.000	71,50	1.490.957.000	71,50	7.454.785.000	Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana,
				Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	Persen	13,22	12,75		12,25		11,75		11,25		10,75		10,75		Pengendalia n Penduduk, Keluarga Berencana,

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	Persen	4,55	18,18		18,18		18,18		18,18		22,73		95,45		Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
2	15		Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan																
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Persen	79,50	80,00	6.230.000.000	81,00	6.230.000.000	82,00	6.230.000.000	83,00	6.230.000.000	84,00	6.230.000.000	84,00	31.150.000.000	Perhubungan
				Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	Persen	45,00	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	45,00	1.553.078.000	46,00	1.553.078.000	46,00	7.765.390.000	Perhubungan
				Persentase sarana dan prasarana pendukung angkutan aglomerasi yang tersedia	Persen	79,50	80,00	99.000.000	81,00	218.000.000	82,00	218.000.000	83,00	182.392.280	84,00	179.120.379	84,00	896.512.659	Perhubungan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	16		Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebar informasi dan kebijakan pemerintah daerah (Permendagri 18)	Persen	0,00	0,00		50,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Komunikasi dan Informatika
				Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM)	Persen	92,00	94,00		96,00		98,00		100,00		100,00		100,00		Komunikasi dan Informatika

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	77,00	80,00	1.356.400.000	90,00	1.356.400.000	95,00	1.356.400.000	100,00	1.356.400.000	100,00	1.356.400.000	100,00	6.782.000.000	Komunikasi dan Informatika
				Persentase layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi	Persen	51,00	60,00	90.426.000	65,00	90.426.000	80,00	90.426.000	80,00	90.426.000	100,00	90.426.000	100,00	452.130.000	Komunikasi dan Informatika
				Persentase perangkat daerah yang mengimplem entasi inovasi yang mendukung smart city	Persen	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Komunikasi dan Informatika
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah																
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	Persen	6,28	6,39		6,62		6,85		7,08		7,31		7,31		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan SDM Koperasi yang terlatih	Persen	27,40	41,10		54,79		68,49		82,19		95,89		95,89		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase rata-rata peningkatan omzet pelaku usaha mikro	Persen		60,00		63,00		66,00		69,00		72,00		72,00		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
				Jumlah pengembangan usaha mikro	Usaha		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		1500,00		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan SDM pelaku UMKM yang terlatih	Persen	0,18	0,73	390.30 4.000	1,03	390.30 4.000	1,41	390.30 4.000	1,86	390.30 4.000	2,39	390.30 4.000	2,39	1.951.5 20.000	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
				Persentase pelaku UMKM yang menerapkan metode produksi sesuai standar	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase usaha mikro masyarakat tidak mampu yang berkelanjutan	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
				Persentase pelaku usaha mikro yang difasilitasi	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal																
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan potensi investasi yang teridentifikasi	Persen	50,00	58,00	90.426.000	63,00	90.426.000	65,00	90.426.000	71,00	90.426.000	75,00	90.426.000	75,00	452.130.000	Penanaman Modal
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi potensi investasi yang ditindak lanjuti dengan penjajakan kerjasama investasi	Persen	25,00	30,00	135.640.000	35,00	135.640.000	40,00	135.640.000	45,00	135.640.000	50,00	135.640.000	50,00	678.200.000	Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase realisasi investasi di wilayah Boyolali utara	Persen	29,00	30,00		31,00		32,00		33,00		34,00		34,00		Penanaman Modal
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	IKM Perizinan Investasi	Nilai	82,46	82,55		83,50		84,50		85,00		86,00		86,00		Penanaman Modal
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan perusahaan yang tertib pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Persen	18,18	19,26		19,91		21,00		21,65		23,16		23,16		Penanaman Modal
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan untuk kemudahan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Penanaman Modal

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga																
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang mengikuti pelatihan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan pemuda	Persen	75,00	80,00	655.215.000	85,00	655.215.000	90,00	655.215.000	95,00	655.215.000	100,00	655.215.000	100,00	3.276.075.000	Kepemudaan dan olahraga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan fasilitas olahraga dalam kondisi baik	Persen	72,62	72,62	1.931.580.000	72,86	1.931.580.000	73,10	1.931.580.000	73,33	1.931.580.000	73,57	1.931.580.000	73,57	9.657.900.000	Kepemudaan dan olahraga
				Cakupan pelatih yang bersertifikasi	Persen	60,00	60,00	50.000.000	63,33	50.000.000	66,67	50.000.000	70,00	50.000.000	73,33	50.000.000	73,33	250.000.000	Kepemudaan dan olahraga
				Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	0,00	9,30	1.444.693.000	9,67	1.444.693.000	10,05	1.444.693.000	10,43	1.444.693.000	10,81	1.444.693.000	10,81	7.223.465.000	Kepemudaan dan olahraga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kelompok pramuka aktif	Persen	100,00	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	271.280.000	100,00	1.356.400.000	Kepemudaan dan olahraga

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase penyediaan data sektoral yang berkualitas	Persen	0,00	65,00		70,00		75,00		80,00		100,00		100,00	-	Statistik
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100,00	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	45.213.000	100,00	226.065.000	Persandian
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan																
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok seni yang dibina	Persen	25	27	3449000000	30	3449000000	34	3449000000	39	3449000000	45	3449000000	45	1724500000	Kebudayaan
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang teregistrasi	Persen	84	85	1356400000	86	1356400000	87	1356400000	88	1356400000	90	1356400000	90	6782000000	Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	22	06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase koleksi museum dalam kondisi baik	Persen	94	95	673500000	96	673500000	97	673500000	98	673500000	99	673500000	99	3367500000	Kebudayaan
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan																
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Persen	1,02	1,03	180.853.000	1,05	180.853.000	1,07	180.853.000	1,08	180.853.000	1,11	180.853.000	1,11	904.265.000	Perpustakaan
				Persentase perpustakaan sesuai standar nasional	Persen	1,03	2,29	66.820.000	3,66	67.820.000	4,81	67.820.000	5,95	67.820.000	7,09	67.820.000	7,09	338.100.000	Perpustakaan
				SKM layanan perpustakaan	Nilai	85,90	86,00	600.993.000	86,20	616.493.000	86,30	616.493.000	86,40	616.493.000	86,50	616.493.000	86,50	3.066.965.000	Perpustakaan
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan																
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Nilai audit kearsipan	Nilai	70,00	75,00	70.484.000	80,00	70.384.000	82,00	70.384.000	85,00	70.384.000	90,00	70.384.000	90,00	352.020.000	Kearsipan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Cakupan arsip yang terlindungi dan terselamatkann	Persen	5,00	20,00	146.482.000	30,00	144.682.000	40,00	144.682.000	50,00	144.682.000	60,00	144.682.000	60,00	725.210.000	Kearsipan
3			Urusan Pemerintahan Pilihan																
3	25		Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan																
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kelompok nelayan yang menerapkan metode penangkapan ikan yang baik dan benar	Persen		100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30.000.000	100,00	30000000,00	100,00	30000000,00	100,00	150.000.000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi Ikan Tangkap	Ton	2.178,00	2.266,00		2.323,00		2.369,00		2.416,00		2.464,00		2.464,00		Kelautan dan Perikanan
				Persentase nelayan kecil yang diberdayakan (Program Kemiskinan)	Persen		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Kelompok Pembudidaya Perikanan yang Menggunakan Metode Budidaya yang Baik	Persen		20,00	361.706.000	40,00	361.706.000	60,00	361.706.000	80,00	361.706.000	100,00	361.706.000	100,00	1.808.530.000	Kelautan dan Perikanan
				Produksi Ikan Budidaya	Ton	34.093,00	34.964,00		35.069,00		35.174,00		35.280,00		35.386,00		35.386,00		Kelautan dan Perikanan
				Persentase pembudidaya ikan kecil yang diberdayakan (Program Kemiskinan)	Persen		100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	474.940.000	100,00	2.374.700.000	Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan ketersediaan benih	Persen		2,00	542.560.000	4,00	542.560.000	6,00	542.560.000	8,00	542.560.000	10,00	542.560.000	10,00	2.712.800.000	Kelautan dan Perikanan
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Persen	0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Kelautan dan Perikanan
				Pengolahan ikan	Ton	79,86	80,70		81,00		81,03		81,12		81,20		81,20		Kelautan dan Perikanan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan destinasi wisata yang dikembangkan	Persen	4,44	6,70	10.264.018.000	8,90	10.264.018.000	11,10	10.264.018.000	13,30	10.264.018.000	15,60	10.264.018.000	15,60	51.320.090.000	Pariwisata
				Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persen	2,00	6,76		11,52		16,28		21,04		25,80		25,80		Pariwisata
				Persentase peningkatan destinasi wisata berkembang di wilayah Boyolali utara	Persen	33,00	42,00	5.904.709.000	50,00	5.904.709.000	58,00	5.904.709.000	67,00	5.904.709.000	75,00	5.904.709.000	75,00	29.523.545.000	Pariwisata
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase promosi potensi pariwisata yang ditindaklanjuti dengan kerjasama investasi	Persen	100,00	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	380.853.000	100,00	1.904.265.000	Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase peningkatan kerjasama pengembangan wisata yang terjalin	Persen	5,00	11,10	207.980.000	11,10	207.980.000	13,30	207.980.000	15,60	207.980.000	15,60	207.980.000	15,60	1.039.900.000	Pariwisata
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan perkembangan ekonomi kreatif dan ekonomi kepariwisataan	Persen		13,33	361.706.000	20,00	361.706.000	26,67	361.706.000	33,30	361.706.000	40,00	361.706.000	40,00	1.808.530.000	Pariwisata
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian																
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian per ha/tahun	kuintal/ha	Produk tivitas padi (57,69)	58,27	200.000.000	58,84	200.000.000	59,42	200.000.000	60,00	200.000.000	60,57	200.000.000	60,57	1.000.000.000	Pertanian
					kuintal/ha	Produk tivitas Jagung (49,20)	49,69	150.000.000	50,18	150.000.000	50,68	150.000.000	51,17	150.000.000	51,66	150.000.000	51,66	750.000.000	Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
					2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			kuintal/ha	Produktivitas Kacang tanah (11,30)	11,41	100.000.000	11,53	100.000.000	11,64	100.000.000	11,75	100.000.000	11,87	100.000.000	11,87	500.000.000	Pertanian
			kuintal/ha	Produktivitas Kencur (104)	105,04	200.000.000	106,08	200.000.000	107,12	200.000.000	108,16	200.000.000	109,20	200.000.000	109,20	1.000.000.000	Pertanian
			kuintal/ha	Produktivitas Jahe (276)	278,76	200.000.000	281,52	200.000.000	284,28	200.000.000	287,04	200.000.000	289,80	200.000.000	289,80	1.000.000.000	Pertanian
			kuintal/ha	Produktivitas Cabe (109)	113,36	300.000.000	117,72	300.000.000	122,08	300.000.000	126,22	300.000.000	130,80	300.000.000	130,80	1.500.000.000	Pertanian
			kuintal/ha	Produktivitas Bawang Merah (32)	33,28	300.000.000	34,56	300.000.000	35,84	300.000.000	37,12	300.000.000	38,40	300.000.000	38,40	1.500.000.000	Pertanian
			kuintal/ha	Produktivitas Buah Berkayu (1,33)	1,34	300.000.000	1,35	300.000.000	1,36	300.000.000	1,37	300.000.000	1,38	300.000.000	1,38	1.500.000.000	Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					kuintal /ha	Produktivitas Pepaya (97)	97,97	150.000.000	98,94	150.000.000	99,91	150.000.000	100,88	150.000.000	101,85	150.000.000	101,85	750.000.000	Pertanian
					Ton/ha	Produktivitas Kopi (1,22)	1,22	170.000.000	1,23	170.000.000	1,23	170.000.000	1,23	170.000.000	1,24	170.000.000	1,24	850.000.000	Pertanian
					Ton/ha	Produktivitas Tembakau (1,17)	1,17	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	2.312.500.000	1,18	11.562.500.000	Pertanian
					Persen		100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	500.000.000	Pertanian
					Persentase bantuan sarana pertanian yang tepat sasaran (petani penggarap, buruh tani, petani lahan kecil) (Program Kemiskinan)														
					Persen	10 unit	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	245.000.000	50,00	1.225.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Produksi susu	Liter	49.988.343,00	50.600.000,00		50.900.000,00		51.200.000,00		51.500.000,00		51.800.000,00		51.800.000,00		Pertanian
				Produksi daging	Kg	14.081.221,00	14.221.221,00		14.291.221,00		14.361.221,00		14.431.221,00		14.501.221,00		14.501.221,00		Pertanian
				Produksi telur	Kg	27.899.559,00	27.955.000,00		27.983.000,00		28.011.000,00		28.039.000,00		28.067.000,00		28.067.000,00		Pertanian
				Populasi ternak (sapi potong)	ekor	106.765,00	108.911,00		110.000,00		111.100,00		112.211,00		113.333,00		113.333,00		Pertanian
				Populasi ternak (sapi perah)	ekor	94.143,00	96.035,00		96.995,00		97.965,00		98.945,00		99.934,00		99.934,00		Pertanian
				Populasi ternak (kambing dan domba)	ekor	159.718,00	166.171,00		169.495,00		172.885,00		176.343,00		179.987,00		17.987,00		Pertanian
				Persentase sampel obat hewan yang diperiksa	Persen	40 sampel	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Pertanian
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	Persen	230.029 m (26,66%)	26,89	3.985.000.000	27,12	3.985.000.000	27,35	3.985.000.000	27,58	3.985.000.000	27,81	3.985.000.000	27,81	19.925.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase peningkatan ketersediaan prasarana peternakan	Persen		5,00	404.266.000	10,00	404.266.000	15,00	404.266.000	20,00	404.266.000	25,00	404.266.000	25,00	2.021.330.000	Pertanian
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen		5,00	494.846.000	10,00	494.846.000	15,00	494.846.000	20,00	494.846.000	25,00	494.846.000	25,00	2.474.230.000	Pertanian
				Persentase produk hasil peternakan yang ditangani sesuai standar ASUH	Persen	12 unit usaha	20,00	86.000.000	40,00	86.000.000	60,00	86.000.000	80,00	86.000.000	100,00	86.000.000	100,00	430.000.000	Pertanian
				Persentase susu yang memenuhi standar mutu	Persen	58,00	63,00		68,00		73,00		78,00		83,00		83,00		Pertanian
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani (Program Kemiskinan)	Persen		100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	440.000.000	100,00	2.200.000.000	Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase fasilitasi penanggulan gan bencana yang tertangani (Program Kemiskinan)	Persen		100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	144.000.000	100,00	720.000.000	Pertanian
				Persentase petani yang mendapatkan asuransi pertanian (Program Kemiskinan)	Persen		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000	Pertanian
3	27		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang mempunyai izin usaha	Persen		10,00	10.000.000	20,00	10.000.000	30,00	10.000.000	40	10.000.000	50,00	10.000.000	50,00	50.000.000	Pertanian
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	3.216 kelompok	8,68	180.800.000	17,35	180.800.000	26,03	180.800.000	34,7	180.800.000	43,38	180.800.000	43,38	904.000.000	Pertanian
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	30	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi perizinan pengembang an usaha usaha toko modern yang difasilitasi	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perdagangan
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	Persen	75,00	79,54		84,09		86,36		88,63		90,90		90,90		Perdagangan
				Persentase pedagang yang tertib lokasi	Persen	83,00	84,00		85,00		86,00		87,00		88,00		88,00		Perdagangan
				Pendapatan retribusi pelayanan pasar	Rupiah	7.534.344.000	4.000.891.600		4.000.891.600		4.808.475.000,00		5.212.266.700,00		5.212.266.700,00		23.234.791.600,00		Perdagangan
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase koefisiensi variasi harga antar waktu	Persen	0,00	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	20.000.000	12,00	100.000.000	Perdagangan
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha potensial ekspor yang dipromosika n	Persen	12,50	20,00		25,00		50,00		75,00		100,00		100,00		Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor	Persen		11,10	470.000.000	12,16	470.000.000	12,45	470.000.000	12,50	470.000.000	12,70	470.000.000	12,70	2.350.000.000	Perdagangan
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP yang sudah tertib ukur	Persen	51,82	57,00	20.000.000	63,00	20.000.000	67,00	20.000.000	72,00	20.000.000	75,00	20.000.000	75,00	100.000.000	Perdagangan
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi	Persen		0,62	45.213.000	0,72	45.213.000	0,77	45.213.000	0,82	45.213.000	0,97	45.213.000	0,97	226.065.000	Perdagangan
				Persentase informasi perdagangan yang harus diawasi	Persen	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perdagangan
				Persentase Produk olahan Susu yang Dipasarkan	Persen		20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Perdagangan
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian																
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih	Persen	0,90	4,70	221.545.000	4,80	221.545.000	4,90	221.545.000	5,00	221.545.000	5,10	221.545.000	24,00	1.107.725.000	Perindustrian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase peningkatan akses permodalan	Persen		0,31		0,67		1,09		1,56		2,08		2,08		Perindustria n
				Persentase IKM yang menggunaka n teknologi tepat guna	Persen		1,04		2,08		3,12		4,15		5,19		5,19		Perindustria n
				Persentase IKM yang menerapkan metode produksi berorientasi bisnis	Persen		0,52		1,04		1,56		2,08		2,60		2,60		Perindustria n
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM Susu yang meningkat produktifitas nya	Persen		20,00	2.500.243.000	40,00	2.500.243.000	60,00	2.500.243.000	80,00	2.500.243.000	100,00	2.500.243.000	100,00	12.501.215.000	Perindustria n
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																
4	01		Sekretariat Daerah																

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	78,00	80,00	35.000.000	82,00	35.000.000	84,00	35.000.000	86,00	35.000.000	88,00	35.000.000	88,00	175.000.000	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		90,00		90,00		95,00		98,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
				Persentase kerjasama pemerintah daerah yang ditindaklanjuti	Persen	80,00	80,00	323.482.000	82,00	323.482.000	84,00	323.482.000	86,00	323.482.000	88,00	323.482.000	88,00	1.617.410.000	Sekretariat Daerah
				Persentase batas wilayah yang diselesaikan	Persen		9,09		18,18		27,27		36,36		45,45		45,45		Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan SPM yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah
				Persentase ketercapaian target IKK	Persen	65,00	65,00		66,00		67,00		68,00		70,00		70,00		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan, baik di Provinsi maupun di Pemerintah Pusat	Persen	100,00	100,00	200.85 1.800	100,00	200.85 2.000	100,00	200.85 2.000	100,00	200.85 2.000	100,00	200.85 2.000	100,00	1.004.2 59.800	Sekretariat Daerah
				Persentase alokasi beasiswa pendidikan tinggi yang tepat sasaran	Persen		100,00	1.000.0 00.000	100,00	1.000.0 00.000	100,00	1.000.0 00.000	100,00	1.000.0 00.000	100,00	1.000.0 00.000	100,00	5.000.0 00.000	Sekretariat Daerah
				Persentase peningkatan fasilitas kegiatan keagamaan	Persen	66,36	67,00	6.322.5 55.000	68,00	6.322.5 55.000	69,00	6.322.5 55.000	70,00	6.322.5 55.000	71,00	6.322.5 55.000	71,00	31.612. 775.000	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan strategis bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	-	56,00	431.94 1.000	60,00	431.94 1.000	64,00	431.94 1.000	67,00	431.94 1.000	70,00	431.94 1.000	70,00	2.159.7 05.000	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan strategis bidang	Persen	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				pembangunan yang ditindaklanjuti															
				Persentase kontribusi BUMD pada PAD	Persen	1,85	1,86		1,87		1,88		1,89		1,90		1,90		Sekretariat Daerah
				Persentase penggunaan E-Procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	53,98	56,00		60,00		64,00		67,00		70,00		70,00		Sekretariat Daerah
				Jumlah perusahaan pelaksana TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan)	Perusahaan		1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00		Sekretariat Daerah
4	02		Sekretariat DPRD																
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan tugas dan fungsi DPRD sesuai standar	Persen	100,00	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	26.752.841.000	100,00	133.764.205.000	Sekretariat DPRD

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																
5	01		Perencanaan																
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian indikator program	Persen	0,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Perencanaan
				Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan daerah	Persen	-	100,00	210.000.000	100,00	414.750.000	100,00	781.750.000	100,00	871.750.000	100,00	669.750.000	100,00	2.948.000.000	Perencanaan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase keterpaduan antar dokumen RPJMD dengan RKPD	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan
				Persentase kesesuaian antara RKPD dan Renja	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Perencanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	02		Keuangan																
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penyerapan APBD tahun berjalan	Persen	92,00	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	452.133.000	92,00	2.260.665.000	Keuangan
				Persentase penyediaan anggaran sesuai dengan ketentuan	Persen		55,00	356.705.441.000	55,00		55,00		55,00		55,00		55,00	356.705.441.000	Keuangan
				Persentase penyajian laporan keuangan sesuai aturan	Persen	100,00	100,00	50.330.629.000	100,00	394.852.166.000	100,00	408.998.212.000	100,00	410.267.289.000	100,00	411.589.166.000	100,00	1.676.037.462.000	Keuangan
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	BMD		1		2		3		4		5		5		Keuangan
				Persentase aset daerah yang di inventarisasi	Persen	100,00	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	2.050.000.000	100,00	10.250.000.000	Keuangan
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Ketercapaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	358.772.843.000,00	358.303.849.000	6.853.438.000	372.381.379.000	6.853.438.000	397.252.279.000	6.853.438.000	421.538.645.000	6.853.438.000	448.479.141.000	6.853.438.000	1.996.805.293.000	34.267.190.000	Keuangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	03		Kepegawaian																
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai di setiap jabatan	Persen	90,84	94,06	2.112.456.000	95,05	2.112.456.000	96,04	2.112.456.000	97,03	2.112.456.000	98,02	2.112.456.000	98,02	10.562.280.000	Kepegawaian
				Persentase pegawai yang memenuhi target SKP	Persen	99,00	99,40	13.361.000	99,50	13.361.000	99,60	13.361.000	99,70	13.361.000	99,80	13.361.000	99,80	66.805.000	Kepegawaian
				Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persen	0,17	0,14	172.504.000	0,12	172.504.000	0,10	172.504.000	0,08	172.504.000	0,06	172.504.000	0,06	862.520.000	Kepegawaian
5	04		Pendidikan dan Pelatihan																
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	53,79	60,00	5.935.545.000	64,83	1.173.830.000	70,34	1.173.830.000	75,17	1.173.830.000	80,00	1.173.830.000	80,00	10.630.865.000	Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Rasio pegawai pendidikan tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	60,29	60,30		60,31		60,34		60,36		60,36		60,36		Pendidikan dan Pelatihan
				Persentase PD yang terpenuhi kebutuhan diklat	Persen	78,79	79,00		80,00		82,00		84		86,00		86,00		Pendidikan dan Pelatihan
5	05		Penelitian dan Pengembangan																
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase policy brief bidang penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan	Persen	75,00	75,00	605.000.000	78,00	605.000.000	80,00	605.000.000	83,00	605.000.000	85,00	605.000.000	85,00	3.025.000.000	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	Persen	70,00	75,00	400.000.000	78,00	400.000.000	80,00	400.000.000	83,00	400.000.000	85,00	400.000.000	85,00	2.000.000.000	Penelitian dan Pengembangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																
6	01		Inspektorat Daerah																
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	Persen	90,00	90,00	27.128.000	91,00	27.128.000	92,00	27.128.000	93,00	27.128.000	94,00	27.128.000	94,00	135.640.000	Pengawasan
				Perentase tindak lanjut hasil pemeriksaan internal	Persen	85,00	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		Pengawasan
				Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	90,00	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Pengawasan
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Capaian nilai MCP Kab. Boyolali oleh KPK	Nilai	85,00	85,00	135.640.000	86,00	135.640.000	87,00	135.640.000	88,00	135.640.000	89,00	135.640.000	90,00	678.200.000	Pengawasan
				Indeks Manajemen Resiko	Level	0	1		1		2		2		3		3		Pengawasan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Level Kapabilitas APIP	Level	3	3		3		3		3		3		3		Pengawasan
7			Unsur Kewilayahan																
7	01		Kecamatan																
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan publik kecamatan tepat waktu	Persen	84,00	85,00	4.475.034.105	86,00	4.477.000.000	87,00	4.502.500.000	88,00	4.515.000.000	89,00	4.522.500.000	89,00	22.492.034.105	Kewilayahan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase hasil koordinasi bidang pemberdayaa n masyarakat dan pembanguna n yang ditindaklanju ti	Persen	100,00	100,00	1.200.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	1.150.000.000	100,00	5.800.000.000	Kewilayahan
				Persentase stimulus bagi masyarakat miski/ berpenghasil an rendahdesa/	Persen		100,00	3.492.054.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	3.753.400.000	100,00	18.505.654.000	Kewilayahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab		
							2022		2023		2024		2025					2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan															
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	650.149.000	100,00	576.933.900	100,00	602.605.150	100,00	637.537.200	100,00	689.474.000	100,00	3.156.699.250	Kewilayahan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	1.604.220.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	1.660.000.000	100,00	8.244.220.000	Kewilayahan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	-	Kewilayahan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satua n	Kondi si Kinerj a Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8			Unsur Pemerintahan Umum																
8	01		Kesatuan Bangsa dan Politik																
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan	Persen	26,00	30,00	406.920.000	40,00	406.920.000	50,00	406.920.000	60,00	406.920.000	80,00	406.920.000	80,00	2.034.600.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase penanganan fasilitasi bidang politik dalam negeri	Persen	74,00	74,00	2.954.922.000	74,00	47.954.922.000	83,00	47.954.922.000	83,00	2.954.922.000	83,00	2.954.922.000	83,00	104.774.610.000	Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Masyarakat yang paham terhadap pembinaan Ormas	Persen	8,00	16,00		24,00		32,00		40,00		50,00		50,00		Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Penanggung jawab
							2022		2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase penanganan potensi konflik keagamaan	Persen	25,00	30,00		40,00		50,00		65,00		90,00		90,00		Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Angka konflik yang ditangani	jumlah	18,00	16,00	100.00 0.000	13,00	100.00 0.000	12,00	100.00 0.000	10,00	100.00 0.000	8,00	100.00 0.000	100,00	500.000 .000	Kesatuan Bangsa dan Politik

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berkaitan dengan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Selain itu, bab ini juga menyajikan IKU masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Target IKU yang sudah ditetapkan pada setiap tahapan mulai dari tahun 2022 sampai tahun 2026 merupakan target yang ditetapkan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama menggunakan pendekatan proyeksi statistik, yang kedua pendekatan terhadap situasi dan kondisi riil yang dihadapi daerah saat ini. Pertama, penetapan target dilakukan dengan pendekatan statistik dengan melihat kinerja dari setiap indikator selama 5 hingga 10 tahun ke belakang. Teknik yang digunakan antara lain forecast linear, forecast Exponential Triple Smoothing (ETS), serta menggunakan rata-rata pertumbuhan tiap indikator selama 5 hingga 10 tahun sebelumnya. Kedua, menggunakan teknik pendekatan empiris dengan mempertimbangkan pendekatan kondisi yang dihadapi daerah. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan target IKU sehingga dapat dijabarkan target-target yang sifatnya pesimis, moderat, maupun optimis. Selain itu, pendekatan empiris juga memperhatikan aspek-aspek adanya ketidakpastian atau uncertainty akibat Pandemi Covid-19, kebijakan pusat dan daerah serta prioritas kepala daerah dalam pembangunan lima tahun ke depan.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah merupakan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. IKU tersebut ditetapkan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk satu periode ke depan. Adapun IKU Daerah yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. 1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026

No	Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU)	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,24	3,68 – 5,15	4,18 – 5,40	4,68 - 5,65	5,18 - 5,90	5,68 - 6,15	5,68 - 6,15
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	10,18	9,18-8,68	8,18-7,18	7,18-5,68	6,18-4,18	5,18-2,68	5,18-2,68
3	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,25	75,28	75,80	76,31	76,83	77,34	77,34
4	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	81,95	81,96	81,97	81,98	81,99	82,00	82,00
5	Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Angka	71.346,00	70.276,00	69.222,00	68.183,00	67.161,00	66.153,00	66.153,00
6	Indeks Risiko Bencana	Angka	130,32	120,32	110,32	100,32	90,32	80,32	80,32
7	Indeks Desa Membangun	Angka	0,6941 (Berkembang)	0,7297 (Maju)	0,7361 (Maju)	0,7425 (Maju)	0,7489 (Maju)	0,7553 (Maju)	0,7553 (Maju)
8	Angka Konflik Sosial	Angka	18,00	16,00	13,00	12,00	10,00	8,00	8,00
9	Nilai Tukar Petani	Angka	106,68	107,16	107,64	108,12	108,60	109,80	109,80
10	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)	Angka	763,00	800,00	823,00	833,00	893,00	903,00	903,00
11	Indeks Smart City	Angka	2,91	3,03	3,09	3,15	3,21	3,28	3,28
12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	60,17	66,49	66,54	66,60	66,65	66,71	66,71

8.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU Organisasi Perangkat Daerah (PD) merupakan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat PD. IKU tersebut secara langsung mendukung capaian IKU daerah. Berikut ini adalah IKU masing-masing PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Tabel 8. 2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2022-2026

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Sekretariat Daerah	Persentase peningkatan peran perusahaan	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,65	12,74	12,82	12,91	13,00	13,00
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	83,22	84,72	86,22	87,72	89,22	90,72	90,72
		Nilai SAKIP	Nilai	67,13 (B)	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (BB)	80,13 (A)
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	56,84 (CC)	64,72 (B)	67,72 (B)	70,72 (BB)	73,72 (BB)	76,72 (BB)	76,72 (BB)
		Nilai EKPPD	Nilai	34.190	34.000	34.100	34.200	34.300	34.400	34.400
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85,00	85,00
2	Sekretariat DPRD	Nilai EKPPD	Nilai	34.190	34.000	34.100	34.200	34.300	34.400	34.400
3	Inspektorat Daerah	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai	88,51	88,6	88,7	88,8	88,9	89,00	89,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Dinas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,95	76,04	76,1	76,16	76,23	76,29	76,29
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,65	12,74	12,82	12,91	13,00	13,00
		Persentase budaya benda dan tak benda yang dilestarikan	Persen	83,22	84,72	86,22	87,72	89,22	90,72	90,72
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	82,52	82,72	82,92	83,12	83,32	83,52	83,52
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	2,01	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
		Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	Nilai (dalam juta)	1.675.461,70	1.711.511,59	1.771.109,26	1.830.706,93	1.890.304,60	1.949.902,26	9.153.534,64
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persen	98,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase bangunan sesuai standar	Persen	89,95	90,40	90,90	91,40	92,40	92,40	92,40
		Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	Persen	88,80	90,33	92,14	93,98	95,86	97,78	97,78

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Perumahan dan Permukiman	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	88,01	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
		Luas kawasan kumuh	Ha	87,85	82,85	77,85	72,85	67,85	62,85	62,85
8	Dinas Sosial	Peningkatan keberdayaan PMKS	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,28	4,45	4,03	3,61	3,19	2,78	2,78
		Persentase peningkatan kepatuhan perusahaan atas hak hak pekerja (kebebasan berserikat)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase koperasi yang meningkat SHUnya	Persen	16,78	17,34	17,9	18,46	19,03	19,59	19,59
		Jumlah usaha mikro yang meningkat omzetnya	Persen	30,0	60,0	63,0	66,0	69,0	72,0	72,0
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) (dalam juta rupiah)	Nilai (dalam juta)	1.675.461,70	1.711.511,59	1.771.109,26	1.830.706,93	1.890.304,60	1.949.902,26	9.153.534,64
11	Dinas Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan perusahaan yang ramah lingkungan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kualitas Air	Angka	58,57	58,80	58,92	59,04	59,16	59,28	59,28
		Indeks Kualitas Udara	Angka	87,35	87,40	87,43	87,45	87,48	87,51	87,51

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	40,99	41,00	41,00	41,01	4101,00	41.01	41.01
		Persentase sampah yang tertangani	Persen	51,56	55,00	57,00	60,00	62,00	64,00	64,00
12	Dinas Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,36	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
13	Dinas Pengendalian Pendudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Angka Kelahiran Total/ <i>Total Fertility Rate(TFR)</i>	Angka	1,87	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	44,27	46,43	48,59	50,75	52,91	55,07	55,07
		Angka kekerasan terhadap perempuan	Angka	16,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	10,00
		Status Kabupaten Layak Anak	Status	Pratama	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase kenaikan status desa	Persen	11,61	13,61	15,61	17,61	19,61	21,61	21,61
		Nilai EKPPD	Nilai	34190,00	34000,00	34100,00	34200,00	34300,00	34400,00	34400,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85,00	85,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP	Nilai	67.13 (B)	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (BB)	80,13 (A)
		Indeks SPBE	Nilai	2,85	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,50

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	92,17	92,17	92,20	92,25	92,30	92,35	92,35
		Persentase layanan publik dan pengaduan online yang aktif	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,65	12,74	12,82	12,91	13,00	13,00
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	56.84 (CC)	64,72 (B)	67,72 (B)	70,72 (BB)	73,72 (BB)	76,72 (BB)	76,72 (BB)
18	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	Persen	-5,55	0,50	1,25	2,00	2,75	3,50	3,50
		Prosentase pembinaan cabang olahraga	Persen	75,00	80,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persen	4,68	5,18	5,68	6,18	6,68	7,18	7,18
19	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	1,83	3,88	4,91	5,94	6,97	8,00	8,00
		Persentase Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persen	-3,72	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00
		Indeks Harga Konsumen	Angka	106,89	109,89	112,89	115,39	117,89	120,39	120,39
		Persentase peningkatan pendapatan sektor agro industri susu	Persen	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,00

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
20	Dinas Pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	2,01	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
21	Dinas Peternakan dan Perikanan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Persen	2,01	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	0,27	2,00	2,00	4,00	4,00	5,00	5,00
		Jumlah perusahaan yang menerima produk susu Boyolali	Perusahaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Skor	83,62	85,25	86,88	88,51	90,14	91,77	91,77
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D)	Nilai SAKIP	Nilai	67,13 (B)	69,13 (B)	72,13 (BB)	75,13 (BB)	77,13 (BB)	80,13 (BB)	80,13 (A)
		Nilai EKPPD	Nilai	34190,00	34000,00	34100,00	34200,00	34300,00	34400,00	34400,00
24	Badan Keuangan Daerah	Persentase pemanfaatan BMD	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai		66,49	67,81	69,16	70,54	71,95	71,95

No	Organisasi Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
		Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai (IPP)	Nilai	78.13 (Sedang)	79 (Sedang)	80 (Baik)	81 (Baik)	82 (Baik)	83 (Baik)	83 (Baik)
26	Kantor Kesbangpolinmas	Angka Potensi Konflik Sosial	Angka	20,00	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	9,00
27	Satpol PP	Angka Potensi Konflik Sosial	Angka	20,00	17,00	15,00	13,00	11,00	9,00	9,00
		Indeks Kapasitas (komponen Indeks Resiko Bencana)	Nilai	82,00	82,00	83,00	85,00	86,00	87,00	87,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Kapasitas (komponen Indeks Resiko Bencana)	Nilai	82,00	82,00	83,00	85,00	86,00	87,00	87,00
29	RSUD Pandan Arang	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,95	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29	76,29
30	RSUD Waras Wiris	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,95	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29	76,29
31	RSUD Simo	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,95	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29	76,29
32	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85,00	85,00

8.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun IKK Kabupaten Boyolali yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. 3. Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Sasaran (Dampak/ *Impact*) Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	-1,24	3,68-5,15	4,18-5,40	4,68-5,65	5,18-5,90	5,68-6,15	5,68-6,15
2	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	33,01	36,01	37,51	39,01	40,51	42,01	42,01
3	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	Persen	10,18	9,18-8,68	8,18-7,18	7,18-5,68	6,18-4,18	5,18-2,68	5,18-2,68
4	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	Nilai	1,30	1,20	1,10	1,00	0,90	0,80	0,80
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,25	75,28	75,80	76,31	76,83	77,34	77,34
6	Angka Melek Huruf	Persen	90,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Angka rata-rata lama Sekolah	Tahun	7,84	8,08	8,23	8,37	8,51	8,65	8,65
8	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	75,95	76,04	76,10	76,16	76,23	76,29	76,29
9	Presentase balita gizi buruk	Persen	3,70	3,60	3,50	3,30	3,10	3,00	3,00
10	Presentase balita gizi kurang	Persen	3,70	3,60	3,50	3,30	3,10	3,00	3,00
11	Cakupan desa siaga aktif	Persen	120 desa 44.94	130 desa 48.69	140 desa 52.43	150 desa 56.18	160 desa 59.93	170 desa 63.67	170 desa 63.67

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Angka Partisipasi angkatan kerja	persen	72,49	78,34	80,19	82,03	83,88	85,72	85,72
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75,11	77,90	79,47	81,04	82,61	84,18	84,18
14	Tingkat pengangguran Terbuka	Persen	5,28	4,45	4,03	3,61	3,19	2,78	2,78
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,89	82,11	82,72	83,55	84,18	85,00	85,00
16	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	15,85	15,64	16,20	17,09	17,95	18,88	18,88
17	Opini BPK	Predika t	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	87,00	86,30	87,20	88,10	89,10	90,00	90,00
19	Persentase cadangan pangan	Persen		6,67	13,33	20,00	26,67	33,33	33,33
20	Penanganan daerah rawan pangan	Persen	54,00	58,00	63,00	67,00	72,00	76,00	76,00
21	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	22,49	22,74	22,99	23,24	23,49	23,74	23,74
22	Produksi sektor pertanian	Ton/ha	422816,00	424392,22	439713,96	443144,43	446611,63	450142,44	450142,44
23	Produksi sektor perkebunan	Ton	26554,45	27224,37	27894,30	28564,23	29234,17	29904,10	29904,10

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	Persen	0,51	0,59	0,59	0,55	0,53	0,53	0,53
25	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	Persen	4,26	4,22	4,23	4,24	4,24	4,25	4,25
26	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	1,69	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	1,75
27	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	12,42	12,42	12,82	13,22	13,62	14,02	14,02
28	Kontribusi sektor pertanian, dan perikanan terhadap PDRB	Persen	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,66
29	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	30,14	30,02	30,95	32,04	33,07	34,03	34,03
30	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	Persen	30,14	30,44	30,74	31,04	31,34	31,64	31,64
31	Pertumbuhan Industri	Persen	3,91	4,30	4,69	5,09	5,48	5,87	5,87
Aspek Daya Saing									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah per kapita	410.598,00	558.237,00	594.775,00	631.313,00	667.851,00	704.389,00	704.389,00
2	Nilai tukar petani	Angka	106,68	107,16	107,64	108,12	108,60	109,80	109,80

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rupiah per kapita	507.604,00	593.616,00	615.119,00	636.622,00	658.125,00	679.628,00	679.628,00
4	Produktivitas total daerah	Persen	343.972.934,58	360.761.854,20	369.156.314,01	377.550.773,82	385.945.233,63	394.339.693,44	394.339.693,44
5	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Rasio Ekspor+Impor terhadap PDB	Persen	-8,25	0,12	1,12	2,12	3,12	4,12	4,12
7	Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	Persen	98,77	98,87	98,97	99,07	99,17	99,27	99,27
8	Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR	Persen	94,18	94,28	94,38	94,48	94,58	94,68	94,68
9	Angka Kriminalitas yang tertangani	Angka	370,00	274,00	246,00	222,00	199,00	180,00	180,00
10	Rasio Ketergantungan	Persen	51,25	51,16	51,12	51,08	51,03	50,99	50,99

Tabel 8. 4. Penetapan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintahan Kabupaten Boyolali Tahun 2022 – 2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1.1	Tingkat partisipasi warga usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	Persen	92,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	91,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	83,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	Persen	10,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
2.1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
2.2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	Persen	93,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (SPM)	Persen	99,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	Persen	98,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standard (SPM)	Persen	88,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (SPM)	Persen	84,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (SPM)	Persen	59,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard (SPM)	Persen	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (SPM)	Persen	63,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 1	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	98,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 2	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	50,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 3	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	35,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 4	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	57,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen		25,00	37,50	50,00	62,50	75,00	75,00
3.2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	61,00	61,15	61,53	61,91	62,29	62,67	62,67
3.3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga	Persen	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	98,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.5	Rasio kepatuhan IMB	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	82,52	82,72	82,92	83,12	83,32	83,52	83,52

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.7	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman								
4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah (SPM)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	87,85	5,70	11,40	17,10	22,80	28,50	28,50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.4	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Persen	11,99	11,52	11,06	10,59	10,12	9,65	9,65
4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	20,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
5.1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah	456.258,00	457.258,00	458.258,00	459.258,00	460.258,00	461.258,00	461.258,00
5.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumla h	49.950,00	50.950,00	51.950,00	52.950,00	53.950,00	54.950,00	54.950,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	15,00	20,16	19,16	18,16	17,16	16,16	16,16
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
6.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Boyolali	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
B	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja								
1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	33,33	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
1.2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	1,01	1,15	2,30	3,46	4,61	5,76	5,76
1.3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	343.972.934,5 8	360.761.854,2 0	369.156.314,0 1	377.550.773,8 2	385.945.233,6 3	394.339.693,4 4	394.339.693,4 4
1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	42,23	42, 48	42,73	42,98	43,23	43,48	43,48

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten Boyolali	Persen	44,58	43,95	44,47	44,99	45,51	46,02	46,02
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak								
2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen		2,50	2,52	2,54	2,56	2,58	2,58
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,072
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan								
3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya beras/jagung) sesuai kebutuhan	Persen	234,40	235,40	236,40	237,40	238,40	239,40	239,40
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.2	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	60,17	66,49	66,54	66,60	66,65	66,71	66,71
5.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	Persen	51,56	55,00	57,00	60,00	62,00	64,00	64,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	70,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
6.1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,69	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70
6.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	27,92	30,00	40,00	45,00	50,00	60,00	60,00
6.3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	66,40	66,50	67,00	67,48	67,90	68,00	68,00
6.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah	24,52	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.2	persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	0.61	1,23	1,25	1,27	1,28	1,30	1,30
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
8.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	angka	1,87	2,10	2,09	2,08	2,07	2,06	2,06
8.2	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	angka		20,00	19,75	19,50	19,25	19,00	19,00
8.3	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	Persen		20,00	22,50	25,00	27,50	30,00	30,00
8.4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	Persen		70,00	70,50	71,00	71,50	72,00	72,00
8.5	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	Persen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.6	Persentase peserta KB aktif MKJP	Persen	71,20	71,26	71,32	71,38	71,44	71,50	71,5
8.7	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	Persen		72,00	72,60	73,20	73,80	74,40	74,4
8.8	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Persen		50,00	49,75	49,50	49,25	49,00	49,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.9	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	Persen		20,00	20,25	20,50	20,75	21,00	21,00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan								
9.1	Rasio konektivitas	Rasio	0,36	0,38	0,39	0,39	0,40	0,40	0,40
9.2	Kinerja lalu lintas	Rasio	0,41	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39	0,39
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika								
10.1	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh DINAS Kominfo	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali	Persen	56,18	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.1	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Persen	65,64	66,10	66,32	66,55	66,78	67,01	67,01
11.2	Persentase peningkatan Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
12.1	Persentase peningkatan investasi	Persen	4,55	4,55	4,56	4,57	4,58	4,60	4,60
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga								
13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,02	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,06
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	4,68	5,18	5,68	6,18	6,68	7,18	7,18
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
14.1	Persentase PD yang menggunakan data statistic dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
15.1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan								
16.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	59,77	60,77	61,77	62,77	63,77	64,77	64,77
16.2	Indeks Pembangunan literasi masyarakat	Angka	13,54	14,54	15,54	16,54	17,54	18,54	18,54
16.3	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persen		5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,00
16.4	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Persen		0,74	0,91	1,08	1,26	1,43	1,43
16.5	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persen	1,03	2,29	3,66	4,81	5,95	7,09	7,09
17	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	Persen	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	78,50
17.2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Persen	57,00	57,50	58,00	58,50	59,00	59,50	59,5
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
18.1	Terlestarikannya cagar budaya	Persen	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	90,00	90,00
C	Urusan Pemerintahan Pilihan								
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan								
1.1	Jumlah total produksi perikanan budidaya (budidaya + tangkap)	Ton	36.271	36.371	36.471,00	36.571,00	36.671,00	36.771,00	36.771,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata								
2.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-100	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,50

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Boyolali	Persen	-43,32	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,00
2.3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	22,37	23,63	24,26	24,89	25,52	26,15	26,15
2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,69	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	1,75
2.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	0,01	0,35	0,40	0,45	0,50	0,60	0,60
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	118,19	121,19	124,19	127,19	130,19	133,19	133,19
3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-48,08	- 43,08	- 38,08	- 33,08	- 28,08	- 23,08	- 23,08
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	Persen	19,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	98,89	99,02	99,10	99,18	99,26	99,34	99,34
4.3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	51,82	62,00	67,00	72,00	75,00	75,00	75,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKM	100,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	-		30,00	40,00	50,00	60,00	60,00

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	7,06		50,00	55,00	60,00	70,00	70,00
5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di Kabupaten Boyolali	Persen	1,37		30,00	40,00	50,00	60,00	60,00
5.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	1,92		25,00	25,00	35,00	45,00	45,00
D	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Sekretariat Daerah								
1.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama								

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	29,93	30,00	30,10	30,20	30,30	30,40	30,40
1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	35,94	36,00	36,20	36,40	36,60	36,80	36,80
E	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah								
1	Keuangan								
1.1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Rasio	8,29	8,29	8,29	8,29	8,29	8,28	8,28
1.2	Rasio PAD	Persen	18,95	16,07	16,60	17,32	18,12	19,01	19,01
1.3	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	48,70	48,60	48,50	48,40	48,30	48,20	48,20
1.4	Deviasi realisasi belanja terhadap belenja total dalam APBD	Persen	-19,37	-19.20	-19.15	-19.10	-19.05	-19.00	-19.00
1.5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	22,25	22,20	22,15	22,10	22,05	22,00	22,00
1.6	Manajemen aset	Jumlah	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	6,70	6,60	6,50	6,40	6,30	6,20	6,20
1.8	Infomasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.10	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kepegawaian								
2.1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	151,85	151,90	151,95	152,00	152,05	152,10	152,10
2.2	Rasio Pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Persen	5,92	6,36	6,80	7,24	7,68	8,13	8,13
2.3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Persen	53,79	62,00	69,00	76,00	83,00	90,00	90,00

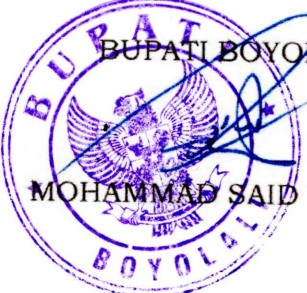
No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun Ke					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kesehatan)								
F	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan								
1	Inspektorat Daerah								
1.1	Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1.2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 disusun sebagai penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan menggunakan pendekatan perencanaan secara komprehensif, yaitu teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas, serta holistik-tematik, integratif, dan spasial. RPJMD Tahun 2021-2026 perlu dilaksanakan dengan komitmen tinggi seluruh komponen di Kabupaten Boyolali untuk mencapai visi **“Boyolali Maju, Meneruskan Pro Investasi; Melangkah dan Menata Bersama Penuh Totalitas (Metal)”**. Dalam menjalankan RPJMD Tahun 2021-2026 diperlukan kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi sebagai berikut:

1. RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
2. RPJMD 2021-2026 menjadi pedoman bagi penyusunan RKPD mulai tahun 2022 hingga tahun 2026;
3. Efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 memerlukan kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Boyolali, yaitu DPRD, masyarakat, dan sektor swasta, serta didukung sinergi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat;
4. RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi pedoman bagi pengendalian dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, melalui instrumen berupa rumusan dan target Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang termuat di dalam tujuan, sasaran, dan program pembangunan;
5. Dalam rangka menjaga kesinambungan proses pembangunan dan mengisi kekosongan dasar hukum, maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Boyolali dan RPJMN yang berlaku.


BUPATI BOYOLALI,
MOHAMMAD SAID HIDAYAT